BUMN
Hadir untuk negeri

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



BERSINERGI MENGUATKAN EKONOMI NEGERI

SYNERGY TO EMPOWER THE NATION'S ECONOMY

Laporan Tahunan **2018**
Annual Report

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

DISCLAIMER

Selamat datang pada Laporan Tahunan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (Persero) tahun 2018 dengan tema "Bersinergi Menguatkan Ekonomi Negeri". Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis Perusahaan pada 2018 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Laporan Tahunan 2018 Jamkrindo diterbitkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" dan "Rp" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Indonesia.

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pencapaian kinerja untuk tahun buku 2018, khususnya untuk akun yang terkait Laba Perusahaan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan pencatatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari sebelumnya menggunakan metode akrual tahunan menjadi akrual bulanan seiring dengan terbitnya Surat Edaran OJK Nomor S-129/D.05/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal pencatatan imbal jasa penjaminan (IJP).

Welcome to the Annual Report of the Public Corporation (Perum) Indonesian Credit Guarantee (Jamkrindo) (Persero) with the theme "Strengthening the Domestic Economy Through Synergizing". The theme was chosen based on an in-depth study based on the facts and development of the Company's business in 2018 and the future sustainability of the Company's business.

Jamkrindo's 2018 Annual Report is issued in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 29 / POJK.04 / 2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies, and the Financial Services Authority Circular Number 30 / SEOJK.04 / 2016 concerning the Form and Content of Issuers or Public Companies Annual Reports.

The mention of "Rupiah" and "Rp" currency units refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or USD refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

This annual report contains a statement of the financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forwarding statements in the implementation of the applicable legislation, except for historical matters. These statements have the prospect of risks, uncertainties, and can result in actual developments materially different from those reported.

Achievement of performance for the 2018 fiscal year, especially for accounts related to Company Profits, cannot be directly compared with the performance achievements of the previous years since there are differences in the listing of Guarantee Fees (IJP) from previously using the annual accrual method to monthly accruals. This change is in line with the issuance of Financial Services Authority Circular Number S-129 / D.05 / 2017 dated August 22, 2017, concerning the recording of guarantee fee (IJP).

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha.

Laporan tahunan ini memuat kata "Jamkrindo" dan "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yang menjalankan bisnis dalam bidang penjaminan kredit.

Laporan Tahunan Jamkrindo 2018 disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs resmi Jamkrindo yaitu www.jamkrindo.co.id.

Prospective statements in this annual report are based on various assumptions regarding the current conditions and future conditions of the Company and the business environment in which the Company conducts business activities.

This annual report contains the words "Jamkrindo" and "Company" which are defined as the Public Corporation Indonesian Credit Guarantee (Persero) which operates in the field of credit guarantee.

The Jamkrindo 2018 Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English using easy to read types and font sizes. This Annual Report can be viewed and downloaded from the official Jamkrindo website, www.jamkrindo.co.id.



PENJELASAN TEMA
THEME EXPLANATION



BERSINERGI MENGUATKAN EKONOMI NEGERI

SYNERGY TO EMPOWER THE NATION'S ECONOMY

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia memberikan peluang kepada Jamkrindo untuk merambah ke segmen pasar baru yang berada di bawah koridor sinergi BUMN. Hal ini menjadikan potensi pasar yang dapat digarap oleh Jamkrindo menjadi semakin besar. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Jamkrindo mengambil langkah yang cepat untuk melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perusahaan agar pengembangan usaha yang dilakukan memiliki payung hukum yang jelas. Perluasan pasar ini juga memberikan peluang bagi Jamkrindo untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi bangsa dengan melakukan sinergi bersama BUMN lainnya.

Tahun 2018, Jamkrindo juga terus bersinergi dalam memberikan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKM dan Koperasi) agar dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan, sebagai upaya mendukung penguatan ekonomi negeri.

The issuance of Government Regulation (PP) Number 35 concerning the Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee (Perum Jamkrindo) provides an opportunity for Jamkrindo to penetrate into new market segments that are under the corridor of SOEs synergy. This makes the market potential that can be worked on by Jamkrindo to be even greater. To optimize this potential, Jamkrindo took a quick step to make adjustments to the Company's Articles of Association so that the business development carried out had a clear legal basis. The expansion of this market also provides an opportunity for Jamkrindo to make a greater contribution to the development of the nation's economy through synergizing with other SOEs.

In 2018, Jamkrindo also continues to synergize in providing support for Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives (MSMEs and Cooperatives) to enjoy bank credit, even though they cannot fulfill some of the requirements set by banks. This is conducted in an effort to support the country's economic strengthening.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2017



Tumbuh & Berkembang Bersama UMKMK
Grow and Develop Together with MSMEs

Perum Jamkrindo mengemban misi untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dengan adanya penjaminan, maka UMKM dan Koperasi tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan.

Perum Jamkrindo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk penjaminan bagi UMKM dan Koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Perum Jamkrindo ingin terus tumbuh dan berkembang bersama UMKM dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Perum Jamkrindo has a mission to support Government policies and programs in the field of economy and national development, especially on Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKM and Koperasi). With the existence of guarantee, MSMEs and Cooperatives can still enjoy banking credit, even though some of the requirements set by banks cannot be met.

Perum Jamkrindo continuously strives to improve the quality of service and product guarantee for MSMEs and Cooperatives to encourage the growth of people based economy. Perum Jamkrindo wants to grow and develop together with UMKM and contribute to national development.

2016



Kerja Nyata Bersama UMKMK, Memajukan Ekonomi Kerakyatan
Concrete Work Together With MSMEs & Cooperatives, to Driving The People-Based Economy Forward

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) hadir dan terfokus pada kegiatan penjaminan kredit untuk mendukung pengembangan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), yang berperan sangat penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Penjaminan perlu diberikan karena banyak UMKMK yang mengalami kesulitan mendapatkan tambahan modal. Walau mempunyai prospek usaha yang bagus, namun banyak di antara mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.

Dengan adanya penjaminan, maka UMKMK tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. Kerja nyata itu berbuah manis. Sejalan dengan UMKMK yang terus berkembang dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, kinerja Perum Jamkrindo pun mencatatkan kinerja positif dari tahun ke tahun.

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) is present and focus on credit guarantee activities to support the development of Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprise (MSMEs & Cooperatives) activities, which play an important role in driving the people's economy. Guarantee is a necessity to be given because many MSMEs & Cooperatives are having difficulty getting additional capital. Despite having good business prospects, many of them are unable to meet the requirements set by the bank.

With the guarantee, MSMEs & Cooperatives can still utilize banking credit, even though it cannot meet some of the requirements set by banks. Concrete work generates satisfaction outcome. In line with MSMEs & Cooperatives continuous growth and driving the people based economy, Perum Jamkrindo performance also recorded positive performance from year to year.

2015



Membangun UMKMK & Koperasi yang Kuat untuk Indonesia Sejahtera
Building Strong MSMEs & Cooperative for a Prosperous Indonesia

Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo ingin memberikan kontribusi nyata untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada segmen UMKMK dan Koperasi.

As a state-owned enterprise, Perum Jamkrindo has a desire to make a real contribution to the success of national economic development, especially in the segment of MSMEs and Cooperatives.

KILAS KINERJA 2018
PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF 2018

Rp175 Triliun/ *Trillion*

Realisasi jumlah kredit yang dijamin Jamkrindo tahun 2018 mencapai Rp175 triliun dengan Rp124,21 triliun diperoleh dari penjaminan Non KUR dan sisanya Rp50,53 triliun dari penjaminan KUR.

The realization of the amount of credit guaranteed by Jamkrindo in 2018 reached IDR175 trillion with IDR124.21 trillion obtained from the Non-KUR guarantee and the remaining IDR50.53 trillion from the KUR guarantee.





10,65%

Total Aset Jamkrindo tahun 2018 mencapai Rp16.24 triliun, tumbuh 10,65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jamkrindo's Total Assets in 2018 reached IDR16,24 trillion, growing by 10.65% compared to the previous year.



Rp1,34 Triliun/ *Trillion*

Imbal Jasa Penjaminan Bersih yang diperoleh Jamkrindo tahun 2018 mencapai Rp1,34 Triliun

The Net Guarantee Fee obtained by Jamkrindo in 2018 reached IDR1.34 trillion

95,72

Skor Assessment GCG Jamkrindo tahun 2018 mencapai 95,72 dengan predikat "Sangat Baik", meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor 92,47 dengan predikat "Sangat Baik".

The score of Jamkrindo's GCG Assessment in 2018 reached 95.72 with the title "Very Good", an increase compared to the previous year with a score of 92.47 with the title "Very Good".



DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

2	*DISCLAIMER*
4	PENJELASAN TEMA *THEME EXPLANATION*
5	KESINAMBUNGAN TEMA *THEME CONTINUITY*
6	KILAS KINERJA 2018 *PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF 2018*
8	DAFTAR ISI *TABLE OF CONTENT*
PERFORMA 2018 *2018 PERFORMANCE*	
12	IKHTISAR KEUANGAN *FINANCIAL HIGHLIGHTS*
17	IKHTISAR SAHAM *HIGHLIGHTS OF THE COMPANY'S SHARE*
17	AKSI KORPORASI *CORPORATE ACTIONS*
17	IKHTISAR EFEK LAINNYA *HIGHLIGHTS OF OTHER SECURITIES*
18	PERISTIWA PENTING *IMPORTANT EVENTS*
LAPORAN MANAJEMEN *MANAGEMENT REPORT*	
26	LAPORAN DEWAN PENGAWAS *SUPERVISORY BOARD REPORT*
36	LAPORAN DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS REPORT*
46	SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PERUM JAMKRINDO *STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF SUPERVISORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2018 ANNUAL REPORT OF PERUM JAMKRINDO*
47	SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PERUM JAMKRINDO *STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2018 ANNUAL REPORT OF PERUM JAMKRINDO*
PROFIL PERUSAHAAN *COMPANY PROFILE*	
50	INFORMASI UMUM TENTANG JAMKRINDO *GENERAL INFORMATION ABOUT JAMKRINDO*
52	RIWAYAT SINGKAT JAMKRINDO *BRIEF HISTORY OF JAMKRINDO*
56	BIDANG USAHA *LINE OF BUSINESS*
61	PRODUK USAHA PENJAMINAN *GUARANTEE BUSINESS PRODUCTS*
66	Kompetensi Inti *Core Competence*
67	STRUKTUR ORGANISASI *ORGANIZATIONAL STRUCTURE*
70	VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN *VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE*
72	MAKNA BRANDING LOGO *THE MEANING BEHIND LOGO BRANDING*
73	PROFIL DEWAN PENGAWAS *PROFILE OF THE SUPERVISORY BOARD*
74	PROFIL DEWAN PENGAWAS *PROFILE OF THE SUPERVISORY BOARD*
79	PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH *PROFILE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD*
81	PROFIL DIREKSI *PROFILE OF THE DIRECTORS*
86	PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF *PROFILE OF EXECUTIVE OFFICERS*
92	DEMOGRAFI KARYAWAN *EMPLOYEE DEMOGRAPHICS*
93	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL *COMPOSITION OF SHAREHOLDERS/CAPITAL OWNER*
95	DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI/*JOINT VENTURE (JV)/SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)* *LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATION / JOINT VENTURE (JV) / SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)*
97	STRUKTUR GRUP *GROUP STRUCTURE*
98	KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM *CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE*
98	KRONOLOGIS PENERBITAN EFEK LAINNYA *CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE*
99	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG *SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS*
112	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI *AWARDS AND CERTIFICATIONS*
114	DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR CABANG/ KANTOR PERWAKILAN *LIST OF ADDRESSES OF SUBSIDIARIES AND BRANCH OFFICES/ REPRESENTATIVE OFFICES*

121	INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN *INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE*
122	PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL *EDUCATION AND/OR TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNIT*

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIST

130	ANALISA EKONOMI DAN INDUSTRI *ECONOMIC AND INDUSTRIAL ANALYSIS*
135	ANALISA OPERASIONAL *OPERATIONAL ANALYSIS*
155	TINJAUAN KEUANGAN *FINANCIAL REVIEW*

FUNGSI PENUNJANG BISNIS
BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS

188	SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN TALENTA *HUMAN RESOURCES AND TALENT MANAGEMENT*
215	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI *DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY*

TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

224	PRINSIP UMUM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK *GENERAL PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
226	PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO *THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO*
290	STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN *CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATION STRUCTURE*
420	MANAJEMEN RISIKO *RISK MANAGEMENT*
449	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL *INTERNAL CONTROL SYSTEM*
452	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
452	PERKARA PENTING *SIGNIFICANT CASES*
454	AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN *ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA*
462	KODE ETIK *CODE OF CONDUCT*
473	PENGENDALIAN GRATIFIKASI *GRATIFICATION CONTROL*
474	KEBIJAKAN ANTI KORUPSI *ANTI-CORRUPTION POLICIES*
474	INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK *INFORMATION ON FUNDS FOR POLITICAL ACTIVITIES*
475	*WHISTLEBLOWING SYSTEM*
491	KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI *DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS*
493	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA *STATE ADMINISTRATORS' WEALTH REPORT*
495	DEWAN PENGAWAS SYARIAH *SHARIA SUPERVISORY BOARD*
499	PRAKTIK *BAD GOVERNANCE* *BAD GOVERNANCE PRACTICES*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL REESPONSIBILITY

504	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: SEBUAH PENDEKATAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN APPROACH*
506	KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP JAMKRINDO *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY AND GOVERNANCE IN JAMKRINDO*
517	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP *ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
525	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF EMPLOYMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY*
531	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS AND GOODS AS WELL AS CONSUMERS*
537	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT*

LAMPIRAN
APPENDIX

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



Laporan Tahunan
Annual Report **2018**

PERFORMA 2018
2018 PERFORMANCE

Dengan sinergi yang terus dibangun, baik dengan sesama BUMN maupun UMKMK, kinerja Jamkrindo terus mengalami pertumbuhan. Pencapaian tersebut juga menjadi salah satu bentuk kontribusi Jamkrindo untuk pembangunan negeri.

With the synergy that continues to be built with other SOEs and MSMEs, Jamkrindo's performance continues to improve. This achievement is also one form of Jamkrindo's support for the country's development.

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

LAPORAN POSISI KEUANGAN *STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*

Uraian *Description*	2018	2017	2016	2015	2014
Aset *Assets*					
Kas dan Setara Kas *Cash and Cash Equivalents*	6.190.307	5.417.928	5.723.816	5.594.822	5.196.593
Surat Berharga *Marketable Securities*	4.124.057	4.025.861	3.209.124	2.925.022	2.700.064
Piutang IJP *Guarantee Receivable*	2.666.853	2.474.754	2.347.025	1.442.622	1.075.355
Piutang Penjaminan Ulang *Reguarantee Receivable*	254.607	120.532	112.346	97.538	69.937
Piutang yang diberikan *Loans*	656	776	955	955	973
Piutang lain-lain *Other Receivable*	104.901	87.892	81.728	58.861	132.732
Pajak Bayar di muka *Pre-paid Taxes*	0	0	0	33.878	25.404
Premi dan Fee Dibayar di Muka *Prepaid Premium and Fees*	1.384.677	1.132.300	991.153	807.741	565.241
Beban Dibayar di Muka *Prepaid Expenses*	27.806	21.690	25.020	13.903	8.120
Aset Tetap *Fixed assets*	477.067	471.169	441.995	396.123	54.425
Aset Pajak Tangguhan *Deferred Tax Assets*	231.563	177.252	174.614	168.754	128.607
Aset Lain-lain *Other Assets*	778.502	747.987	300.641	102.774	57.811
Jumlah Aset ***Total Assets***	**16.240.997**	**14.678.143**	**13.408.418**	**11.642.993**	**10.029.851**
Liabilitas *Liabilities*					
Utang Klaim *Claim Payable*	85.804	75.925	11.650	13.067	10.197
Cadangan Klaim *Claim Reserves*	456.690	427.143	404.959	321.871	396.379
Utang Penjaminan Ulang *Co-Guarantee Payable*	188.053	109.687	66.604	63.443	35.822
Pendapatan Ditangguhkan *Unearned Revenue*	3.908.675	2.638.598	2.346.247	1.615.781	1.019.708

Uraian *Description*	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Utang Pajak *Tax Payable*	7.594	59.550	72.812	29.218	3.525
Liabilitas Imbalan Kerja *Employment Benefit Liabilities*	18.887	38.907	28.168	18.124	21.843
Kewajiban Pajak Tangguhan *Deferred Tax Obligations*	0	0	0	0	9
Utang Lain-lain *Other Payable*	279.614	204.458	178.409	105.288	137.753
Jumlah Liabilitas ***Total Liabilities***	**4.945.317**	**3.554.268**	**3.108.849**	**2.166.792**	**1.625.236**
Ekuitas *Equity*					
Penyertaan Modal Pemerintah *State Equity Participation*	7.638.733	7.638.733	7.638.733	7.138.733	6.638.733
Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya *Appropriated Profit Balance*	3.193.598	2.471.937	1.828.847	1.515.215	1.130.951
Komponen Ekuitas Lainnya *Other Equity Components*	66.012	231.370	139.930	196.885	-28.284
Kepentingan Non Pengendali *Non-Controlling Interest*	15	14	13	13	13
Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya *Unappropriated Profit Balance*	397.321	781.821	692.045	625.354	663.203
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	11.295.680	11.123.875	10.299.569	9.476.201	8.404.615
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas ***Total Equity and Liabilities***	**16.240.997**	**14.678.143**	**13.408.418**	**11.642.993**	**10.029.851**

LAPORAN LABA RUGI

PROFIT OR LOSS STATEMENT

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

Uraian *Description*	2018	2017	2016	2015	2014
Pendapatan Usaha *Operating Revenue*	1.341.208	1.805.686	1.588.441	1.277.488	1.442.570
Beban Klaim *Claim Expenses*	(1.237.358)	(1.004.610)	(871.583)	(922.662)	(1.021.058)
Penjaminan Bersih *Net Guarante Revenues*	103.850	801.077	716.857	354.825	421.512
Pendapatan Investasi Bersih *Net Investment Income*	684.108	601.634	587.678	599.525	531.364
Pendapatan Lain-lain Bersih *Net Other Income*	511.099	328.679	294.070	307.230	222.492
Beban Usaha *Operating Expenses*	(790.773)	(708.169)	(657.151)	(470.528)	(329.320)
Laba Sebelum Pajak *Income before Tax*	508.284	1.023.221	941.454	791.053	846.007
Laba Bersih *Net Income*	397.543	801.846	692.045	625.354	663.203
Laba Komprehensif *Comprehensive Income*	261.586	859.677	573.335	845.163	715.664

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

THE CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

Uraian *Description*	2018	2017	2016	2015	2014
Kas Bersih Diperoleh/Digunakan dari Aktivitas Operasi *Net Cash Obtained/Used from Operating Activities*	491.688	350.306	(212.440)	(91.630)	(146.123)
Kas Bersih Diperoleh/Digunakan untuk Aktivitas Investasi *Net Cash Obtained/Used from Investment Activities*	360.876	(608.193)	154.112	255.515	(511.496)
Kas Bersih diperoleh/digunakan dari untuk dari Aktivitas Pendanaan *Net Cash Obtained/Used from Financing Activities*	(80.185)	(48.000)	187.323	234.344	1.142.437
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Kas pada Bank *Increase (Decrease) of Net Cash and Cash at Banks*	772.379	(305.887)	128.994	398.229	484.818

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

Uraian *Description*	2018	2017	2016	2015	2014
Kas dan Kas pada Bank Awal Tahun *Cash and Cash at Banks in the Beginning of the Year*	5.417.929	5.723.816	5.594.822	5.196.593	4.711.775
Kas dan Kas pada Bank Akhir Tahun *Cash and Cash at Banks in the End of the Year*	6.190.307	5.417.929	5.723.816	5.594.822	5.196.593

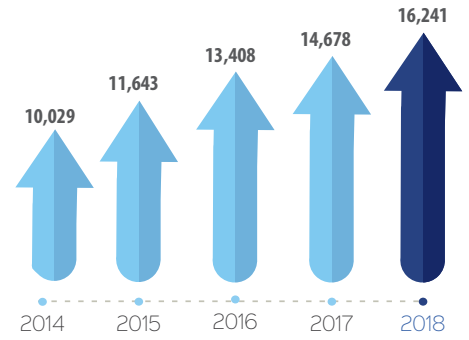
RASIO KEUANGAN *FINANCIAL RATIO*

Dalam %
In %

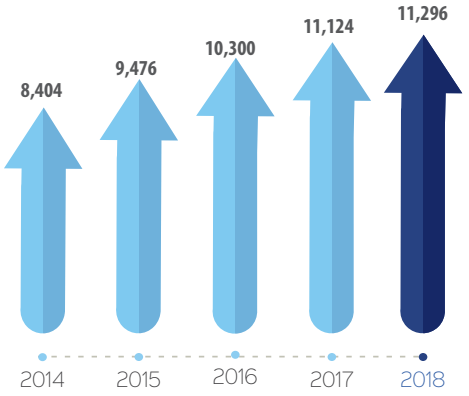
Uraian *Description*	2018	2017	2016	2015	2014
Rasio Likuiditas *Liquidity Ratio*	450,89%	769,09%	712,07%	755,22%	1.351,10%
Rasio Solvabiitas *Solvency Ratio*	43,78%	31,95%	30,18%	22,87%	19,34%
Rasio Rentabilitas *Rentability Ratio*					
Margin Laba Kotor *Gross Profit Margin*	(0,14%)	28,85%	29,75%	25,78%	31,59%
Margin Laba Penjualan *Sales Profit Margin*	25,10%	42,50%	43,26%	42,14%	42,86%
Return on Assets	3,29%	7,29%	7,52%	7,30%	9,23%
Return on Equity	3,50%	7,49%	6,72%	6,60%	7,89%
Rasio Aktivitas *Activity Ratio*					
Perputaran Aset *Asset Turnover*	13,11 kali	17,14 kali	17,37 kali	17,32 kali	21,54 kali
Jumlah Investasi pada Entitas Assosiasi ***Total Investment in Associated Entities***	**684.108**	**601.634**	**587.678**	**599.525**	**531.364**

GRAFIK KEUANGAN

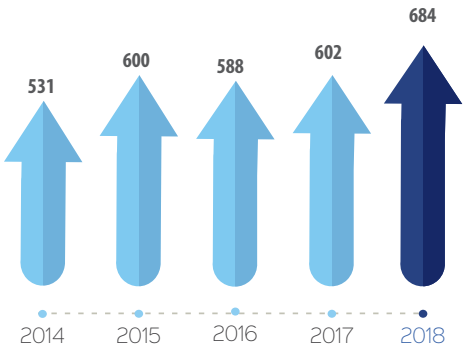
Total Aset
Total Asset (Rp-Billion)



Total Ekuitas
Total Equity (Rp-Billion)

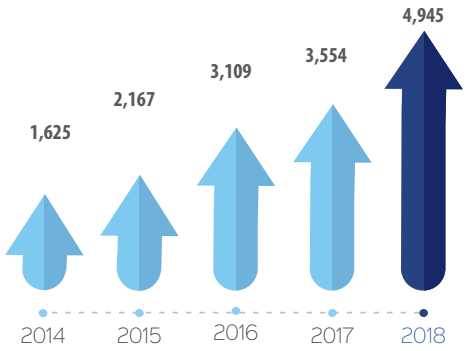


Pendapatan Investasi Bersih
Net Investment Income (Rp-Billion)

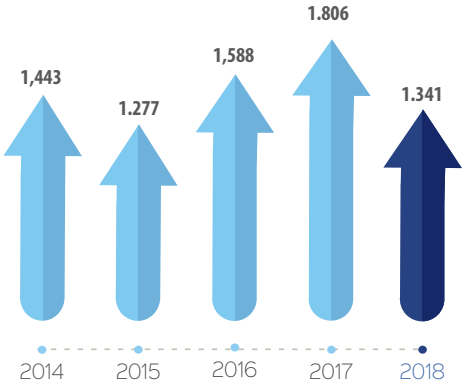


FINANCIAL GRAPHICS

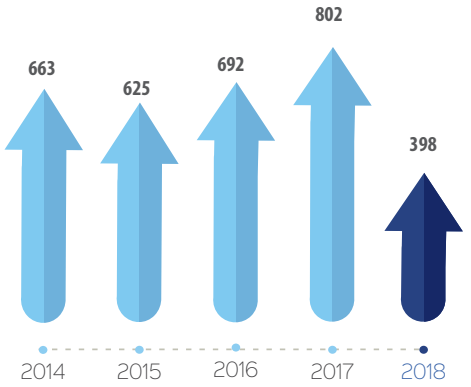
Liabilitas
Liabilities (Rp-Billion)



Pendapatan IJP Bersih
Net Accrual Guarantee Fee Revenues (Rp-Billion)



Laba Bersih
Net Profit (Rp-Billion)



IKHTISAR SAHAM
HIGHLIGHTS OF THE COMPANY'S SHARE

Sampai dengan akhir tahun 2018, Jamkrindo belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak terdapat informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

As of the end of 2018, Jamkrindo has not listed shares on the Indonesia Stock Exchange, so there is no information related to the number of shares outstanding, market capitalization, highest stock price, lowest stock price, closing stock price, and volume of shares traded.

AKSI KORPORASI
CORPORATE ACTIONS

Tahun 2018, Perum Jamkrindo tidak melakukan Aksi Korporasi yang berdampak pada perubahan struktur modal dan saham Perseroan.

In 2018, Perum Jamkrindo did not conduct Corporate Actions which have an impact on changes in the capital structure and shares of the Company.

IKHTISAR EFEK LAINNYA
HIGHLIGHTS OF OTHER SECURITIES

Sampai dengan akhir tahun 2018, Jamkrindo tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

As of the end of 2018, Jamkrindo did not issue bonds, sukuk, and convertible bonds. So, there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/reward rates, maturity dates, and bond/sukuk ratings.

PERISTIWA PENTING
IMPORTANT EVENTS

14 Maret 2018 / *March 14, 2018*



Penandatanganan KerjaSama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai sarana mitigasi risiko dalam analisa terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
The signing of the Cooperation Agreement on the Use of National Identification Number (NIK), National Identification Data, and Electronic Identity Card (KTP-el) as a means of risk mitigation in analyzing Micro, Small, Medium, and Cooperative Enterprises

6 April 2018 / *April 6, 2018*



Penandatanganan nota kesepahaman *(Memorandum Of Understanding/MoU)* dengan Persatuan Perusahaan *Real Estate* Indonesia (REI)
The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with the Association of Indonesian Real Estate Companies (REI)

16 April 2018 / *April 16, 2018*



Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) untuk Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa untuk proyek-proyek dan/atau pengadaan barang/jasa yang sumber dananya seluruhnya berasal dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD
Cooperation Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) for Guarantee of Construction and Procurement of Goods/Services for projects and/or procurement of goods/ services whose source of funds is entirely from the State Budget, Regional Budget, State-Owned Enterprises, and Regionally Owned Enterprises

3 Mei 2018 / *May 3, 2018*



Penghargaan Silver Winner Untuk Kategori Perusahaan *Promising Company In Marketing* 3.0 Di Ajang Bergengsi *Marketeers Awards 2018.*
Silver Winner Award for the Promising Company Category at the 2018 Prestigious Marketeer Awards Event.

17 Mei 2018 / *May 17, 2018*



Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Jamkrindo dengan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk terkait penjaminan *suretyship online*
Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo and PT Semen Baturaja (Persero) Tbk related to online guarantee suretyship

23 Mei 2018 / *May 23, 2018*



Kunjungan ke Redaksi harian Kompas
The Visit to Kompas Daily Editorial Office

8 Juni 2018 / *June 8, 2018*



Pelepasan Peserta Mudik Program Mudik Bareng BUMN 2018
Sending-off the Participants of the 2018 Joint Homecoming Program

24 Juli 2018 / *July 24, 2018*



Penerimaan Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas aksi sosialnya membagikan puluhan ribu paket penunjang pendidikan
The Acceptance of the Certificate from the Indonesian World Record Museum (MURI) for the Company's social action of distributing tens of thousands of educational support packages

9 Agustus 2018 / *August 9, 2018*



Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi BUMN dalam Mendukung PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Mengembangkan Produk Sarung dan Industri Tekstil
The signing of SOEs Synergy Memorandum in Supporting PT Industri Sandang Nusantara (Persero) to Develop Sarong Products and Textile Industry

13 Agustus 2018 / *August 13, 2018*



Penerimaan Program Magang Bersertifikat Batch I
Acceptance of Batch I Certified Internship Program

13 Agustus 2018 / *August 13, 201*



Program Pertukaran Pelajar Siswa Mengenal Nusantara
'Siswa Mengenal Nusantara' Student Exchange Program

14 Agustus 2018 / *August 14, 2018*



Bedah Rumah Eks Pejuang Integrasi Timor Timur Di Kupang; Adonara; Dan Larantuka, Nusa Tenggara Timur
Renovation of the Houses of Ex-East Timor Integration Fighters in Kupang; Adonara; And Larantuka, East Nusa Tenggara

17 Agustus 2019 / *August 17, 2018*



Upacara Peringatan 17 agustus 2018 dalam rangka Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Gorontalo
Indonesian Independence Commemorative Ceremony of August 17, 2018, in the context of SOEs Activities: 'Present for the Country' in Gorontalo Province

22 Agustus 2019 / *August 22, 2018*



Kegiatan penyembelihan hewan kurban
Animal sacrificing activities in the context of eid al adha

12 September 2018 / *September 12, 201*



Peluncuran program Pembiayaan Perumahan bagi Pegawai Jamkrindo
The Launching of Jamkrindo's Employees Housing Financing Program

11 Oktober 2018 / *October 11, 2018*



Memberangkatkan Tim Relawan ke Palu dan Donggala
Dispatching Volunteer Teams to Palu and Donggala

15 november 2018 / *November 15, 2018*



Direktur Utama Terpilih Menjadi Ketua Himppara (Himpunan Penjaminan dan Perasuransian Negara)
Jamkrindo's President Director was Chosen as Chairperson of the Himppara (Association of State-Owned Insurance and Guarantee Companies)

21 November 2018 / *November 21, 2018*



Perum Jamkrindo Raih Penghargaan *The Best Marketing*
Perum Jamkrindo Wins the Best Marketing Award 2018

22 november 2018 / *November 22, 2018*



Perum Jamkrindo Raih Apresiasi sebagai Penjamin KUR Terbaik
Perum Jamkrindo Wins the Award of Best People's Business Credit Guarantor

23 november 2018 / *November 23, 2018*



Menerima Penghargaan Best SOE *in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises* dari Warta Ekonomi
Jamkrindo received the Award for the Best SOE in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises from Warta Ekonomi

11-14 Desember / *December 11-14*



4th Working Level Council Jamkrindo-Kodit 4th Working Level Council Jamkrindo-Kodit

18 Desember 2018 / *December 18, 2018*



Penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Tabungan negara (Persero) Tbk terkait sinergi jasa layanan perbankan dan penjaminan kredit, penyedian jasa layanan perbankan kepada karyawan Jamkrindo, penjaminan kredit ringan (KRING) BTN, dan penjaminan KRING BTN program perumahan ASN, TNI dan Polri.
The signing of MoU and Cooperation Agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk related to the synergy of banking and credit guarantee services, provision of banking services to employees of Jamkrindo, guarantee of light credit of (KRING) BTN, and KRING BTN guarantee program of housing for State Civil Apparatus , Indonesian Armed Forces soldiers, and the Police Corps.

26 Desember 2018 / *December 26, 2018*



Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tentang Penjaminan Kredit Bersama Dalam Rangka Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
The signing of Cooperation Agreement concerning Joint Credit Guarantee in the Context of the Implementation of People's Business Credit

26 Desember 2019 / *December 26, 2019*



Pengiriman Bantuan Untuk Korban Tsunami di Lampung dan Banten
The Delivery of Assistance for Tsunami Victims in Lampung and Banten

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



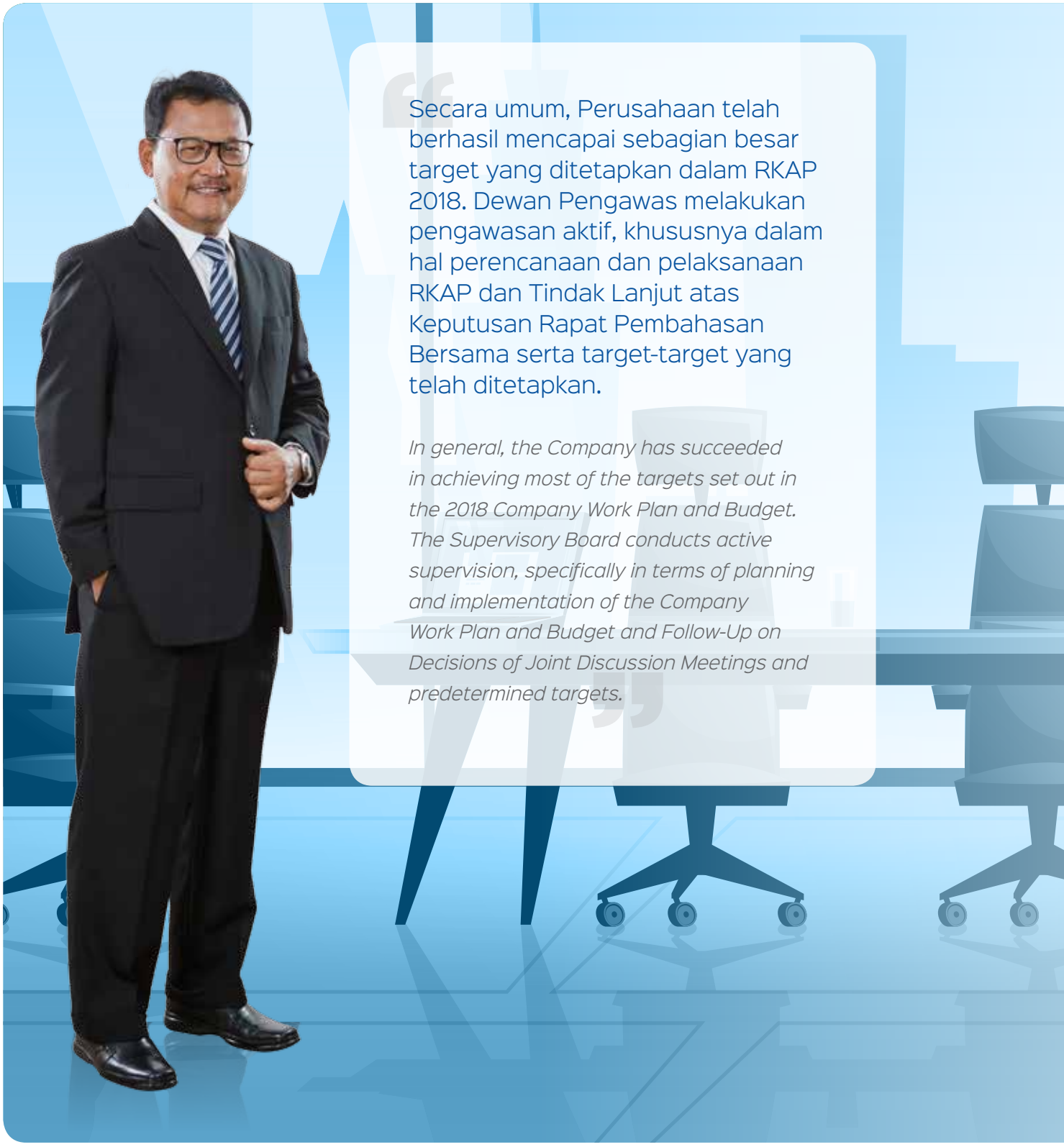
Laporan Tahunan
Annual Report **2018**

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Berbagai inisiatif strategis yang diambil Direksi dan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Pengawas menjadi sebuah sinergi yang positif dalam mendukung upaya Jamkrindo meraih kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu.

The various strategic supports taken by the Board of Commissioners and the active supervision carried out by the Supervisory Board have become a positive synergy in supporting Jamkrindo's efforts to get better support from time to time.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS
SUPERVISORY BOARD REPORT



Secara umum, Perusahaan telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dalam RKAP 2018. Dewan Pengawas melakukan pengawasan aktif, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan RKAP dan Tindak Lanjut atas Keputusan Rapat Pembahasan Bersama serta target-target yang telah ditetapkan.

In general, the Company has succeeded in achieving most of the targets set out in the 2018 Company Work Plan and Budget. The Supervisory Board conducts active supervision, specifically in terms of planning and implementation of the Company Work Plan and Budget and Follow-Up on Decisions of Joint Discussion Meetings and predetermined targets.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dapat melalui tahun 2018 dengan capaian kinerja yang baik. Suatu kehormatan bagi saya mewakili Dewan Pengawas untuk menyajikan laporan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas melakukannya secara independen, berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Perekonomian global tahun 2018 secara umum mengalami perlambatan akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Selain itu, naiknya suku bunga The Fed mempengaruhi arus investasi di negara-negara berkembang. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Namun demikian, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh cukup baik dengan pertumbuhan sebesar 5,17% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07%.

Perekonomian Indonesia tahun 2018 diwarnai dengan gejolak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang terjadi hampir sepanjang tahun serta naiknya suku bunga BI 7 *Days Repo Rate* sebanyak enam kali hingga ke level 6,00%. Hal ini membuat tingkat suku bunga perbankan mengalami peningkatan yang berdampak pada meningkatnya rasio kredit macet. Dengan kondisi tersebut, beban klaim Perusahaan sepanjang tahun 2018 yang mengalami peningkatan.

Dear Shareholder and Stakeholders,

Thank you, we pray for the presence of the Almighty God who has bestowed His mercy and blessings on us all so that the Perum Jamkrindo can get through the year 2018 with good performance. It is an honor for me to represent the Supervisory Board to present supervision reports on the Company's performance for the Fiscal Year ending on December 31, 2018.

The Supervisory Board has carried out the task of supervising and providing advice to the Directors in good faith, and in a responsible and prudent manner in the interests of the Company. In carrying out its duties and functions, the Supervisory Board does it independently, guided by the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations, and based on the principles of Good Corporate Governance.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS 'PERFORMANCE

The global economy in 2018 has generally experienced a slowdown due to trade wars between the United States (US) and China. In addition, the increase in the Fed's interest rate affects the flow of investment in developing countries. This also affected the Indonesian economy. However, the Indonesian economy can still grow quite well with the growth of 5.17% higher than the previous year's growth of 5.07%.

The Indonesian economy in 2018 was characterized by turmoil in the weakening of the Rupiah against the US Dollar which occurred almost throughout the year and the increased in the BI 7 Days Repo Rate by six times to the level of 6.00%. This makes banking interest rates experienced an increase which has an impact on the increase in the ratio of bad loans. With these conditions, the Company's claim expenses throughout 2018 have increased.

Menyikapi kondisi tersebut, Direksi telah mengambil sejumlah inisiatif strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Inisiatif strategis yang diambil Direksi merupakan hasil pembahasan dengan Dewan Pengawas, karena baik Direksi dan Dewan Pengawas memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa Perusahaan meraih kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 yang telah disepakati bersama oleh Dewan Pengawas dan Direksi dan juga telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham.

Dalam kesempatan ini, Dewan Pengawas menyampaikan bahwa secara umum, Perusahaan telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dalam RKAP 2018. Atas pencapaian kinerja tersebut, Dewan Pengawas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh jajarannya atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam membawa Perusahaan meraih kinerja yang baik di tahun 2018.

Penjabaran atas kinerja Direksi tahun 2018 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Kinerja Operasional Jamkrindo

Tahun 2018, Jamkrindo telah mencapai sejumlah target operasional yang telah ditetapkan dalam RKAP. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama Dewan Pengawas adalah pengembangan organisasi. Dewan Pengawas memandang organisasi Jamkrindo harus disesuaikan dengan kondisi Perusahaan saat ini. Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan Jamkrindo membutuhkan organisasi yang kuat dengan fungsi-fungsi yang saling mendukung.

Direksi telah melakukan pengembangan organisasi perusahaan dengan melakukan pengembangan organisasi yang disertai dengan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan.

Direksi juga telah melakukan peningkatan kapasitas teknologi informasi sebagai bagian dari upaya perbaikan proses kerja dan pengembangan usaha Perusahaan. Sebagaimana diketahui, saat ini hampir tidak ada usaha yang dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan teknologi informasi. Dewan Pengawas memberikan dukungan penuh kepada Direksi untuk terus meningkatkan kapasitas TI Perusahaan.

In response to these conditions, the Board of Directors has taken a number of internal and external strategic initiatives. The strategic initiatives taken by the Board of Directors are the result of discussions with the Supervisory Board since both the Board of Directors and the Supervisory Board have the same goal, namely to bring the Company to achieve better performance. The goal is in accordance with the targets set in the 2018 Corporate Work Plan which was mutually agreed upon by the Board of Supervisors and the Board of Directors. It also has received approval from the Shareholders.

On this occasion, the Supervisory Board would like to say that, in general, the Company had succeeded in achieving most of the targets set out in the 2018 Corporate Work Plan. For this performance achievement, the Supervisory Board gave the highest appreciation to the Directors and all of their staff for their dedication and hard work in bringing the Company to achieve good performance in 2018.

We can present the description of the Directors' performance in 2018 as follows:

Jamkrindo's Operational Performance

In 2018, Jamkrindo has achieved a number of operational targets set out in the 2018 Corporate Work Plan. One of the main concerns of the Supervisory Board is the development of the organization. The Supervisory Board views Jamkrindo's organization to be adapted to the current conditions of the Company. To achieve the targets set by Jamkrindo, it requires a strong organization with mutually supportive functions.

The Board of Directors has developed the Company's organization by accompanying it with the efforts to improve the quality and capacity of the Company's Human Resources (HR).

The Board of Directors has also increased the capacity of information technology as part of the efforts to improve work processes and develop the Company's business. As is known, there are currently almost no businesses that can run well without the support of information technology. The Supervisory Board gives full support to the Directors to continue to improve the Company's IT capacity.

Jamkrindo juga telah melakukan upaya peningkatan pelayanan dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015. Langkah ini merupakan langkah yang sangat baik mengingat tingkat persaingan di industri penjaminan terus meningkat.

Kinerja Keuangan Jamkrindo

Tahun 2018 merupakan tahun pertama dilakukan penyesuaian pencatatan pembukuan sesuai dengan SEOJK Nomor S-129/D.05/2017, yaitu terkait pencatatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari tahunan menjadi bulanan, sehingga pencapaian beberapa indikator keuangan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2018, Jamkrindo berhasil membukukan pendapatan IJP Bersih sebesar Rp1.341.208 juta, dengan Beban Klaim sebesar Rp1.237.358 juta. Perusahaan juga berhasil membukukan Pendapatan Investasi sebesar Rp684.108 juta. Dengan pencapaian tersebut, tahun 2018 Jamkrindo membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp397.543 juta, jauh di atas target RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar Rp219.970 juta.

Selain itu, Perusahaan juga berhasil mencatat pertumbuhan Aset sebesar 10,65% menjadi Rp16.240.997 juta dan pertumbuhan Ekuitas sebesar 1,54% menjadi Rp11.295.680 juta.

Pencapaian kinerja Perusahaan tahun 2018 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RKAP 2018.

FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT

Fokus pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas dalam tahun 2018 meliputi perencanaan dan pelaksanaan RKAP dan Tindak Lanjut atas Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) serta target-target yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama Dewan Pengawas tahun 2018 adalah:

1. Masih rendahnya *gearing ratio* Perusahaan. Dengan modal yang besar, Dewan Pengawas mendorong Direksi untuk terus meningkatkan penetrasi dalam penjaminan kredit, baik KUR maupun Non KUR. Dewan Pengawas meyakini, Jamkrindo masih memiliki potensi yang sangat besar untuk terus melakukan pengembangan usaha.

Jamkrindo has also made efforts to improve services by implementing ISO 9001: 2015. This is a very good step considering the level of competition in the guarantee industry continues to increase.

Jamkrindo's Financial Performance

2018 is the first year of adjustment for accounting records in accordance with SEOJK Number S-129 / D.05 / 2017, concerning the change in the recording of Accrual Guarantee Fee (IJP) from annual recording to monthly. For this reason, the achievement of several financial indicators cannot be compared to the previous year.

In 2018, Jamkrindo managed to record Net Accrual Guarantee Fee revenues of IDRp1,341,208 million, with Claims Expenses of IDR1,237,358 million. The Company also managed to book an Investment Income of IDR684,108 million. With this achievement, in 2018, Jamkrindo posted a current year's profit of IDR397,543 million, which is well above the target set in 2018 Corporate Work Plan by IDR219,970 million.

In addition, the Company managed to record asset growth of 10.65% to IDRp16,240,997 million and equity growth of 1.54% to IDR11,295,680 million.

The achievement of the Company's performance in 2018 has generally met the targets set in the 2018 Corporate Work Plan.

SUPERVISION AND ADVISING FUNCTION

The focus of supervision and advice provided by the Supervisory Board in 2018 includes the planning and implementation of Corporate Work Plan and Follow-Up on the Resolutions of the Joint Discussion Meeting (RPB) and the targets that have been set.

Some of the main concerns of the Supervisory Board in 2018 are:

1. *The Company's gearing ratio which was still low. With a large capital, the Supervisory Board encourages the Directors to continue to increase penetration in credit guarantees, in both KUR and Non-KUR guarantee. The Supervisory Board believes that Jamkrindo still has enormous potential to continue to develop its business.*

2. Tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Perum Jamkrindo. Terbitnya PP 35 memberikan peluang kepada Jamkrindo untuk tidak hanya menggarap segmen Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, tapi juga dapat masuk ke segmen BUMN. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi Jamkrindo untuk melakukan pengembangan pasar.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM. Dewan Pengawas mendorong Direksi untuk terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Perusahaan.
4. Peningkatan kapasitas TI.
5. Klaim rasio. Masih tingginya klaim rasio Jamkrindo menjadi perhatian utama Dewan Pengawas dan meminta Direksi untuk terus menekan klaim rasio.

MEKANISME DAN FREKUENSI PENGAWASAN

Hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi telah terjalin dengan baik dengan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan Pengawas secara rutin setiap bulan mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan.

Dalam forum tersebut, Dewan Pengawas dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perusahaan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Pengawas dapat menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut. Sepanjang tahun 2018, Dewan Pengawas melaksanakan 12 kali rapat gabungan dengan Direksi.

Selain forum rapat gabungan, organ Dewan Pengawas, yaitu Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha dapat melakukan rapat dengan mengundang Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Tahun 2019, perekonomian Indonesia diyakini masih akan tumbuh secara positif. Kendati tidak akan ada lonjakan yang signifikan, namun fundamental ekonomi Indonesia diyakini masih cukup kuat. Kondisi ini merupakan peluang bagi Jamkrindo untuk terus memacu laju pertumbuhan usahanya.

2. *Follow-up on the issuance of Government Regulation Number 35 concerning Perum Jamkrindo. The issuance of PP 35 provides an opportunity for Jamkrindo not only to work on the Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives segment, but also to enter the SOEs segment. This provides a great opportunity for Jamkrindo to conduct market development.*
3. *The quality and capacity of HR. The Supervisory Board encourages the Directors to continue to make efforts in improving the quality and capacity of the Company's HR.*
4. *Increased IT capacity.*
5. *Claim ratio. Jamkrindo's high claim ratio is the main concern of the Supervisory Board and therefore, the Board of Supervisors asks the Board of Directors to continue to press claims ratio.*

MONITORING MECHANISM AND FREQUENCY

The working relationship of the Supervisory and Board of Directors has been well established by prioritizing the principle of mutual respect for the authority of each party. The Supervisory Board routinely holds meetings with the Board of Directors every month to discuss various matters related to the management of the Company carried out by the Directors in joint discussion meetings.

In such meetings, the Supervisory Board can request an explanation from the Board of Directors regarding the achievement of the Company's performance and various obstacles encountered. The Supervisory Board can convey views and provide advice to the Board of Directors on this matter. Throughout 2018, the Supervisory Board conducted 12 joint meetings with the Directors.

In addition to joint meeting forums, the organs of the Supervisory Board, namely the Audit Committee and the Business Risk and Investment Committee, can hold meetings by inviting the relevant Divisions to discuss fields that are the responsibility of each Committee.

PERSPECTIVES ON THE COMPANY BUSINESS PROSPECTS

In 2019, the Indonesian economy was believed to still be growing positively. Although there will be no significant surge, Indonesia's economic fundamentals are believed to be still strong enough. This condition is an opportunity for Jamkrindo to continue to spur the growth of its business.

Dewan Pengawas dan Pemegang Saham telah menyetujui RKAP 2019 yang diajukan oleh Direksi. Dengan mempertimbangkan prediksi pertumbuhan ekonomi dan industri penjaminan, Dewan Pengawas menilai bahwa target-target yang ditetapkan oleh Direksi dalam RKAP tersebut merupakan target yang realistis.

The Supervisory Board and Shareholders have approved the 2019 Corporate Work Plan submitted by the Directors. Taking into account the predictions of economic growth and the guarantee industry, the Supervisory Board considers that the targets set by the Directors in the Corporate Work Plan are realistic.

Mengacu pada kinerja Perusahaan tahun 2018, Dewan Pengawas meyakini target-target yang ditetapkan dalam RKAP 2019 dapat dicapai. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan penguatan secara berkelanjutan untuk memperkuat strategi bisnis perusahaan termasuk perlunya pengembangan bisnis dan diversifikasi baik secara organik maupun anorganik, penguatan pengelolaan keuangan Perusahaan secara komprehensif, penguatan pemasaran dan penjualan, penguatan peran investasi, dan yang paling utama penguatan kebijakan sumber daya manusia yang dapat mendorong kapasitas, produktifitas dan profesionalisme.

Referring to the Company's performance in 2018, the Supervisory Board believes that the targets set in the 2019 Corporate Work Plan can be achieved. To achieve this, continuous efforts are needed to strengthen the Company's business strategy including the need for business development and diversification, both organically and inorganically, the comprehensive strengthening of the Company's financial management, the strengthening of marketing and sales, the strengthening of the role of investment, and most importantly the strengthening of human resources policies which can encourage capacity, productivity, and professionalism.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PERSPECTIVES ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Dewan Pengawas menilai bahwa penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Jamkrindo terus mengalami kemajuan yang berarti. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG dengan menyempurnakan organ dan tata laksana penerapan GCG. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan hasil *self assessment* GCG yang dilaksanakan untuk tahun buku 2018 dan memperoleh skor "95,716" dengan kategori "Sangat Baik", meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor "92,470" dengan kategori "Sangat Baik".

The Supervisory Board considers that the implementation of Good Corporate Governance principles in the Jamkrindo environment continues to make significant progress. The Company continues to improve the quality of the implementation of GCG principles by perfecting the organs and governance of GCG implementation. This is evidenced by the results of the GCG self-assessment carried out for the 2018 financial year which obtained a score of "95,716" in the category of "Very Good". This is an increase compared to the previous year with a score of "92,470" with the same "Very Good" category.

Peningkatan skor dalam *assessment* GCG seharusnya menjadi penyemangat bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG. Dewan Pengawas terus mengingatkan Direksi untuk menjadikan GCG sebagai budaya di lingkungan Perusahaan. Kualitas GCG yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Jamkrindo.

The increase in the score of GCG assessment should be an encouragement for the Company to continue to improve the quality of GCG implementation. The Supervisory Board continues to remind the Directors to make GCG a culture within the Company. Good GCG quality will also increase stakeholders' trust in Jamkrindo.

Penerapan GCG di Organ Dewan Pengawas

GCG Implementation in the Supervisory Board Organs

Dewan Pengawas juga secara aktif mengawasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam operasional Perusahaan. Salah satu langkah yang dilakukan Dewan Pengawas adalah

The Supervisory Board also actively supervises the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the Company's operations. One of the steps taken by the Supervisory Board is

dengan melaksanakan rapat secara berkala setiap pekan. Dewan Pengawas bersama Komite di bawah Dewan Pengawas melakukan rapat rutin baik yang bersifat rapat internal maupun dengan mengundang divisi terkait maupun Direksi.

to hold meetings regularly every week. The Supervisory Board together with the Committee under the Supervisory Board conducts regular meetings both in the form of internal meetings and in meetings which invite relevant divisions and Directors.

Selain itu, seluruh kegiatan yang dilakukan Dewan Pengawas dan organ di bawah Dewan Pengawas juga terdokumentasi dengan baik. Ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Dewan Pengawas untuk membudayakan GCG di lingkungan Dewan Pengawas.

In addition, all activities carried out by the Supervisory Board and organs under the Supervisory Board are well documented. This is one of the steps taken by the Supervisory Board to cultivate GCG within the Supervisory Board.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dan organ di bawah Dewan Pengawas selalu dilandasi pada pedoman dan tata tertib yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In addition, in carrying out its functions, duties, and responsibilities, the Supervisory Board and organs under the Supervisory Board are always based on established guidelines and regulations and applicable laws and regulations.

Peran Dewan Pengawas dalam Implementasi Whistleblowing System

The Role of the Supervisory Board in the Implementation of the Whistleblowing System

Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) yang dikelola oleh SPI dan Direksi. Dewan Pengawas mendukung keberadaan WBS tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya *fraud* di lingkungan Perusahaan.

The Company has a violation reporting system (Whistleblowing System / WBS) managed by the Internal Audit Unit and Directors. The Supervisory Board supports the existence of the WBS as a step to prevent fraud in the Company.

Dewan Pengawas turut berperan aktif untuk mendukung penerapan *Whistleblowing System*. Melalui Komite Audit, Dewan Pengawas memantau penerapan *Whistleblowing System* di Perusahaan. Dewan Pengawas memiliki komitmen untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaannya serta akan menjadi bagian aktif seandainya pengaduan terkait dengan level manajemen setingkat Direksi.

The Supervisory Board plays an active role in supporting the implementation of the Whistleblowing System. Through the Audit Committee, the Supervisory Board monitors the implementation of the Whistleblowing System in the Company. The Supervisory Board is committed to being a supervisor in its implementation and will take an active part if there are complaints related to the management of the Board of Directors level.

Namun demikian, Dewan Pengawas meminta Direksi untuk meningkatkan sosialisasi keberadaan WBS tersebut mengingat minimnya laporan yang disampaikan melalui mekanisme WBS.

However, the Supervisory Board asked the Board of Directors to improve the information dissemination of the existence of the WBS system. This was due to the lack of reports submitted through the WBS mechanism.

Penilaian Atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Pengawas

Assessment of the Performance of the Committees Under the Supervisory Board

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Sepanjang tahun 2018, Dewan Pengawas menilai kedua Komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

In carrying out its functions, duties, and responsibilities, the Supervisory Board is assisted by the Audit Committee and the Business Risk and Investment Committee. Throughout 2018, the Supervisory Board assessed that both Committees had carried out their duties and responsibilities properly.

Tahun 2018, Komite Audit telah menjalankan program kerja dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas. Komite Audit telah melakukan pengawasan dan pemberian masukan kepada Dewan Pengawas atas kinerja Direksi dalam aspek keuangan akuntansi dan sistem pengendalian internal perusahaan. Selain itu, Komite Audit juga telah melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

In 2018, the Audit Committee has run a work program and submitted a report to the Supervisory Board. The Audit Committee has supervised and provided input to the Supervisory Board on the performance of the Directors in the financial aspects of accounting and the Company's internal control system. In addition, the Audit Committee has also reviewed compliance of the Company's activities with laws and regulations.

Kegiatan yang dilaksanakan Komite Audit tahun 2018 antara lain:

The activities carried out by the Audit Committee in 2018 include:

- Menyiapkan kajian dan bahan rapat bulanan Dewan Pengawas
- Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Pengawas ke lapangan.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2018 yang dilaksanakan oleh KAP Hertanto, Grace dan Karunawan.
- Membantu Dewan Pengawas dalam proses pengadaan dan pengusulan KAP audit tahun buku 2018 untuk ditetapkan oleh Menteri BUMN.
- Melakukan *review* terhadap kegiatan pengendalian internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern serta memberi tanggapan/masukan terkait temuan-temuan penting SPI dan temuan-temuan dari pihak eksternal seperti BPK-RI, OJK, dan lainnya.
- Melakukan kajian atas Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2017 Perum Jamkrindo.
- Melakukan kajian atas Laporan Manajemen Triwulanan.
- Melakukan kajian atas Saran dan Pertimbangan untuk Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI.
- Melakukan kajian atas *Assessment Good Corporate Governance,* dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
- Melakukan kajian atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jamkrindo Tahun 2018.
- Melakukan kajian atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum Jamkrindo Tahun 2019-2023.

- *The preparation of the reviews and materials for the monthly meeting of the Supervisory Board.*
- *The provision of assistance on the Supervisory Board's site visit.*
- *The monitoring and evaluation of the implementation of the 2018 financial statement audit conducted by Public Accounting Firm of Hertanto, Grace, and Karunawan.*
- *Assistance to the Supervisory Board in the procurement and proposal for the audit year 2018 to be decided by the Minister of SOEs.*
- *The review of internal control activities carried out by the Internal Audit Unit and provision of feedback/input regarding important Internal Audit Unit's findings, and findings from external parties such as the Audit Board of the Republic of Indonesia, Financial Service Authority, and others.*
- *A review of the Fourth Quarterly Management Report of Perum Jamkrindo in 2017.*
- *A review of the Quarterly Management Report.*
- *A review of the Suggestions and Considerations for Preparation of the Annual Supervision Work Program (PKPT) of the Internal Audit Unit.*
- *A review of Good Corporate Governance Assessment, and the Company's Code of Conduct.*
- *A review of the Jamkrindo's Corporate Work Plan and Budget (RKAP) in 2018.*
- *A review of the Company's Long Term Plan (RJPP) in 2019-2023.*

Komite Investasi dan Risiko Usaha telah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait dengan potensi risiko usaha yang dihadapi Perusahaan serta melakukan pemantauan terhadap transaksi, pengelolaan, kebijakan dan pedoman keuangan dan investasi Perusahaan.

The Business Risk and Investment Committee has provided input and recommendations to the Supervisory Board related to the potential business risks faced by the Company as well as monitoring the Company's transactions, management, policies and guidelines, and investment.

Kegiatan yang dilakukan Komite Investasi dan Risiko Usaha tahun 2018 antara lain:

- Menyiapkan kajian dan bahan rapat bulanan Dewan Pengawas.
- Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Pengawas ke lapangan.
- Melakukan kajian atas Penilaian/*Assessment* GCG di Perum Jamkrindo.
- Melakukan kajian atas reviu *Board Manual Code of Governance* dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
- Melakukan kajian atas reviu SOP dan pelaksanaan kegiatan investasi pada Perum Jamkrindo.
- Melakukan kajian atas pelaksanaan dan reviu atas laporan berkala manajemen risiko.

Activities carried out by the Business Risk and Investment Committee in 2018 include:

- *Preparation of reviews and materials for the monthly meeting of the Supervisory Board.*
- *Assistance on the Supervisory Board's site visit.*
- *A review of GCG Assessment at Perum Jamkrindo.*
- *A review of the Code of Governance Manual Board and the Company's Code of Conduct.*
- *A review of SOP review and implementation of investment activities at the Jamkrindo Corporation.*
- *A review on the implementation, and a review of risk management periodic reports.*

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2018 terjadi perubahan susunan Dewan Pengawas, yaitu berdasarkan keputusan Menteri BUMN No. SK/297/MBU/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dan SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota dewan Pengawas Perum Jamkrindo serta mengingat pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2018 tentang Perum Jamkrindo dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negera, maka jabatan sdr. Dahlan Siamat sebagai Anggota Dewan pengawas Perum Jamkrindo berakhir setelah genap menjalani masa jabatan selama 5 (lima tahun).

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

In 2018, there was a change in the composition of the Supervisory Board. This change was based on the decree of the Minister of SOEs No. SK / 297 / MBU / 2013 dated June 28, 2013, concerning the appointment of Members of the Board of Supervisors of the Republic of Indonesia's Perum Jamkrindo, and SK-88 / MBU / 05/2017 dated May 3, 2017, regarding dismissal, assignment, and appointment of members of the Perum Jamkrindo's Supervisory Board, and article 43 Paragraph (1) and Article 50 paragraph (1) of the Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo, and the Regulation of Minister of SOEs No. PER-02 / MBU / 02/2015 concerning the requirements and procedures for the appointment and dismissal of the members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. The change was related to the position of Mr. Dahlan Siamat as a member of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo which ends after serving a full term of 5 (five) years.

Dengan demikian komposisi Dewan Pengawas Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sri Mulyanto	Ketua Dewan Pengawas
Diah Natalisa	Anggota Dewan Pengawas
Subandriyo	Anggota Dewan Pengawas
Noor Ida Khomsiyati	Anggota Dewan Pengawas

Because of that, the composition of the Perum Jamkrindo's Supervisory Board at the end of 2018 is as follows:

Sri Mulyanto	*: Chair of the Supervisory Board*
Diah Natalisa	*: Member of the Supervisory Board*
Subandriyo	*: Member of the Supervisory Board*
Noor Ida Khomsiyati	*: Member of the Supervisory Board*

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sdr. Dahlan Siamat atas dedikasi yang diberikan kepada Perusahaan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan.

We express our gratitude and highest appreciation to Mr. Dahlan Siamat for his dedication to the Company while serving as a Member of the Company's Supervisory Board.

APRESIASI

Tahun 2018 telah berhasil dilalui Perum Jamkrindo dengan kinerja yang baik. Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajaran manajemen Perusahaan serta seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan kepada Perusahaan sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik tersebut.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sehingga Dewan Pengawas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Tak lupa, atas nama Dewan Pengawas, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah dan mitra kerja Perum Jamkrindo. Semoga kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

APPRECIATION

Perum Jamkrindo has gone through the year 2018 with good performance. The Supervisory Board appreciates the Directors, the management of the Company, and all employees for the dedication and hard work that has been given to the Company so as to be able to realize the good performance.

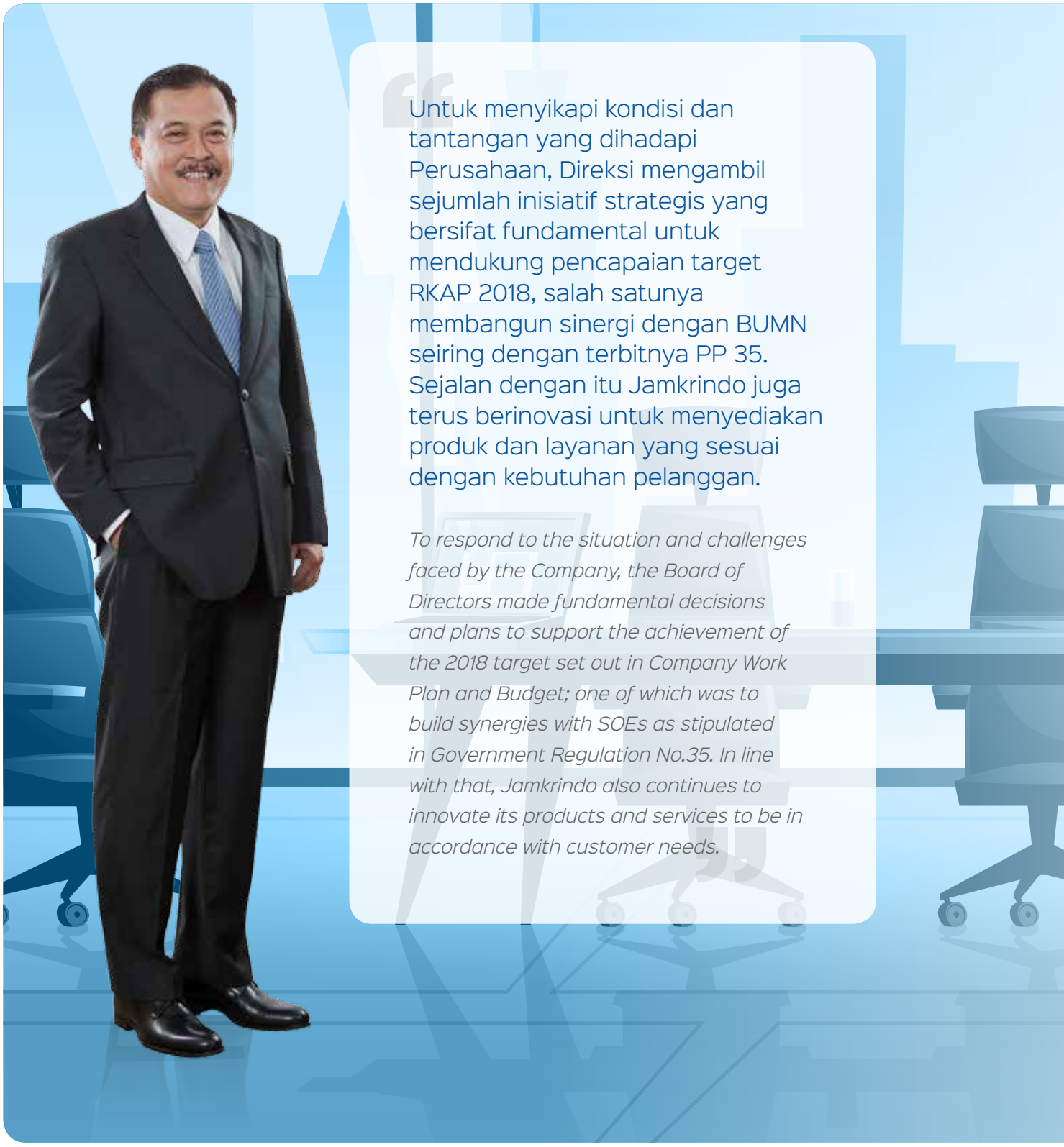
We would also like to express our gratitude to shareholders and stakeholders for the trust and support provided so that the Supervisory Board can carry out its duties and responsibilities properly.

On behalf of the Supervisory Board, we would also like to express our highest gratitude to all customers and working partners of Perum Jamkrindo. Hopefully, the cooperation that has been established so far can continue to be improved in the future.

Jakarta, Mei 2019
Jakarta, May 2019

SRI MULYANTO
Ketua Dewan Pengawas
Chairperson of the Board of Supervisors

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT



Untuk menyikapi kondisi dan tantangan yang dihadapi Perusahaan, Direksi mengambil sejumlah inisiatif strategis yang bersifat fundamental untuk mendukung pencapaian target RKAP 2018, salah satunya membangun sinergi dengan BUMN seiring dengan terbitnya PP 35. Sejalan dengan itu Jamkrindo juga terus berinovasi untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

To respond to the situation and challenges faced by the Company, the Board of Directors made fundamental decisions and plans to support the achievement of the 2018 target set out in Company Work Plan and Budget; one of which was to build synergies with SOEs as stipulated in Government Regulation No.35. In line with that, Jamkrindo also continues to innovate its products and services to be in accordance with customer needs.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dapat melalui tahun 2018 dengan capaian kinerja yang baik. Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi dalam pengelolaan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 berserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

KONDISI EKSTERNAL PERUSAHAAN

Harus diakui, kondisi ekonomi tahun 2018 tidaklah sebaik tahun sebelumnya. Terdapat beberapa tantangan, khususnya dari tingkat global yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap kondisi perekonomian di Tanah Air.

Kondisi perekonomian global hingga tahun 2018 masih mengalami ketidakpastian dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7%. Hal ini merupakan akibat dari beberapa tantangan yang dihadapi selama tahun 2018, di antaranya adalah kebijakan ekonomi di Amerika Serikat yang memperkuat nilai mata uang dolar Amerika Serikat serta lanjutan perang dagang dengan Tiongkok. Kondisi ini berimbas pada perekonomian beberapa negara khususnya negara-negara berkembang dan diperkirakan akan terus berlangsung di tahun 2019.

Ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yaitu sebesar 5,17% di tahun 2018. Angka tersebut lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar 5,4%. Hal ini disebabkan karena berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi di kuartal IV 2018. Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil karena didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan peningkatan investasi.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise God Almighty for His abundance of favors and gifts so that the PerumJamkrindo can go through 2018 with good performance. We herewith submit the accountability report of the Board of Directors in managing the Company for the fiscal year ended December 31, 2018, accompanied by the financial statements which have been audited by Hertanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm and obtained unqualified opinions.

THE EXTERNAL CONDITIONS OF THE COMPANY

Admittedly, the economic conditions in 2018 were not as good as the previous year. There were a number of challenges, especially in a global level which has a considerable influence on economic conditions in the country.

The condition of the global economy until 2018 was still experiencing uncertainty with the economic growth of 3.7%. This was a result of several challenges faced during 2018, which include economic policies in the United States that strengthened the value of the US dollar and continued trade wars with China. This condition has impacted the economies of several countries, especially developing countries and is expected to continue in 2019.

The Indonesian economy grew higher than global economic growth, which amounted to 5.17% in 2018. This figure was lower than the economic growth target set out in the 2018 State Budget of 5.4%. This was due to various economic events that occurred in the fourth quarter of 2018. Although economic growth did not reach the target, Indonesia's economic growth was still stable because it was supported by growth in household consumption, government consumption, and increased investment.

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sepanjang tahun 2018 mencapai Rp14.837 triliun, konsumsi domestik merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi lebih dari 56%. Selanjutnya ekspor tumbuh melambat seiring dengan penurunan volume perdagangan dan ekonomi global. Berbanding terbalik dengan ekspor, impor tumbuh cepat seiring dengan peningkatan permintaan domestik.

Gross Domestic Product (GDP) based on current prices throughout 2018 reached IDR14,837 trillion. Domestic consumption was the largest contributor with a contribution of more than 56%. Furthermore, exports grew slowly in line with the decline in global trade and economic volumes. In contrast to exports, imports grew rapidly in line with the increase in domestic demand.

Sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan non migas, sektor perdagangan dan sektor transportasi. Nilai mata uang Indonesia sempat mencapai titik Rp15.000 per dolar AS, namun Pemerintah berupaya untuk menguatkan rupiah kembali melalui beberapa paket kebijakan hingga di akhir tahun 2018 mata uang Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara.

The sector that experienced positive growth were the agricultural sector, non-oil processing industry sector, trade sector, and transportation sector. The value of the Indonesian currency had reached a point of IDR15,000 per US dollar, but the Government tried to strengthen the Rupiah through several policy packages so that at the end of 2018 Indonesia's currency became the strongest in Southeast Asia.

TANTANGAN YANG DIHADAPI JAMKRINDO

Di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang, Jamkrindo juga menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat dikatakan ringan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Jamkrindo tahun 2018 adalah meningkatnya potensi klaim akibat kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) di industri perbankan. Sebagaimana diketahui, munculnya kredit macet terhadap kredit yang dijamin oleh Jamkrindo akan berakibat pada munculnya klaim. Karena itu, Jamkrindo berupaya untuk mempertajam analisa sebelum melakukan penjaminan.

Selain itu, Perusahaan juga dihadapkan pada fakta bahwa daya tawar pihak perbankan terhadap industri penjaminan masih relatif tinggi, sehingga *margin* yang diperoleh industri penjaminan menjadi lebih terbatas. Untuk itu, Jamkrindo berupaya mengembangkan solusi yang bersifat *win-win* dengan industri perbankan.

Tantangan lain yang dihadapi Jamkrindo adalah masih rendahnya *awareness* masyarakat, khususnya pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) terhadap industri penjaminan. Karena itu, Jamkrindo terus mendorong upaya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKMK.

CHALLENGES FACED BY JAMKRINDO

With challenging economic conditions, Jamkrindo also faces a number of quite difficult challenges. One of the main challenges faced by Jamkrindo in 2018 was the increasing potential claims due to the increase in Non-Performing Loans (NPL) in the banking industry. As is known, the emergence of non-performing loans against loans guaranteed by Jamkrindo will result in claims. For that reason, Jamkrindo strives to sharpen the analysis before conducting the guarantee.

In addition, the Company is faced with the fact that the bargaining power of the banks towards the guarantee industry was still relatively high, so the margin obtained by the guarantee industry is more limited. For this reason, Jamkrindo seeks to develop win-win solutions with the banking industry.

Another challenge faced by Jamkrindo was the low awareness of the public, especially the Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs) business actors in the guarantee industry. Therefore, Jamkrindo continues to encourage information dissemination and education for MSME entrepreneurs.

INISIATIF STRATEGIS

Menyikapi kondisi ekonomi dan industri penjaminan di tahun 2018, Jamkrindo telah mengambil sejumlah inisiatif strategis yang ditujukan untuk mencapaian target-target usaha yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Pemegang Saham.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Direksi telah mengambil beberapa langkah strategis yang bersifat internal. Salah satu langkah strategis dan bersifat fundamental yang dilakukan Direksi tahun 2018 adalah melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia yang menjadi tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan. Penyesuaian PP Nomor 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, memungkinkan Perum Jamkrindo dapat menjamin selain UMKM.

Terbitnya PP 35 tersebut memberikan peluang kepada Jamkrindo untuk merambah ke segmen pasar baru selama masih berada di bawah koridor sinergi BUMN. Hal ini menjadikan potensi pasar yang dapat digarap oleh Jamkrindo menjadi semakin besar. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Jamkrindo mengambil langkah yang cepat untuk melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perusahaan agar pengembangan usaha yang dilakukan memiliki payung hukum yang jelas.

Selain itu, tahun 2018 Jamkrindo juga melakukan penataan organisasi, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Kebijakan *Performance Management System* (PMS) untuk Pengukuran Kinerja, yaitu KPI Perusahaan (Korporasi), KPI Unit Kerja & KPI Individu melalui Perdir Nomor : 09/Per-Dir/1/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Kebijakan *Performance Management System* (PMS) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Untuk mendukung penerapan PMS tersebut, Perusahaan juga melakukan penataan Struktur Organisasi agar lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi Perusahaan. Dalam Struktur Organisasi yang disahkan melalui Peraturan Direksi Nomor: 12/Per-Dir/1/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang telah mengadopsi penyesuaian Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan.

STRATEGIC INITIATIVE

Responding to the economic conditions and guarantee industry in 2018, Jamkrindo has taken a number of strategic initiatives aimed at achieving business targets set out in the 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) which have been approved by the Supervisory Board and Shareholders.

To support the achievement of these targets, the Board of Directors has taken several strategic steps that are internal in nature. One of the strategic and fundamental steps taken by the Board of Directors in 2018 is to make changes to the Company's Articles of Association along with the issuance of Government Regulation (PP) Number 35 concerning the Perum Jamkrindo, which is a follow-up to the enactment of Law Number 1 of 2016 concerning Guarantee. Perum Jamkrindo, then, proposed an adjustment to Government Regulation No. 41 of 2008 concerning Perum Jamkrindo so that the company could guarantee other than MSMEs.

The issuance of PP 35 provides an opportunity for Jamkrindo to penetrate into new market segments as long as it is still under the corridor of SOEs synergy. This makes the market potential that can be worked on by Jamkrindo to be even greater. To optimize this potential, Jamkrindo took a quick step to make adjustments to the Company's Articles of Association so that the business development carried out had a clear legal umbrella.

In addition, in 2018 Jamkrindo conducted organizations restructuring, one of which is by implementing the Performance Management System (PMS) for Performance Measurement, namely Corporate KPI (Corporate), Work Unit KPI, and Individual KPI through the Director Regulation Number: 09 / Per-Dir / 1 / VII / 2018 dated July 12, 2018, concerning the Policy on Performance Management System (PMS) of Perum Jamkrindo.

To support the implementation of the PMS, the Company also reconstructed the Organizational Structure to better suit the challenges faced by the Company in the Organizational Structure ratified through the Board of Directors Regulation Number: 12 / Per-Dir / 1 / VIII / 2018 dated August 23, 2018, which has adopted an adjustment to the Delegation of Authority for Administration and Policy.

Tahun 2018, Jamkrindo berupaya untuk meningkatan pelayanan kepada nasabah khususnya dalam hal penjaminan dan pelayanan klaim dengan menerapkan ISO 9001:2015 yang diperoleh dari Sucofindo dengan nomor sertifikat QSC 01557 berlaku dari 2 Mei 2018 hingga 1 Mei 2021.

Untuk meningkatkan pertumbuhan pasar baru dan jumlah pelanggan, tahun 2018 Jamkrindo mengembangkan beberapa produk non KUR dengan melakukan:

- Inovasi produk yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan pasar yang dinamis dan sesuai kebutuhan pasar
- Melakukan berbagai aktivitas pemasaran dengan mitra bank maupun non bank serta melakukan *mapping* potensi wilayah dan cabang bank yang potensial
- Peningkatan kualitas layanan kepada mitra dengan menetapkan *Service Level Agreement* Penjaminan dan Klaim
- Sistem IT yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis Perusahaan
- Sinergi dengan organisasi/asosiasi/lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri (ASSIPINDO, ACSIS, *benchmarking* dengan KODIT, JFC dsb)

In 2018, Jamkrindo seeks to improve service to customers, especially in terms of guarantee and service claims by applying ISO 9001: 2015 obtained from Sucofindo with the certificate number QSC 01557. The certificate is valid from May 2, 2018, to May 1, 2021.

To increase the growth of new markets and the number of customers, in 2018 Jamkrindo develops several non-People Business Credit (KUR) products by conducting:

- *Product innovation which aims to keep up with dynamic market developments and meet market needs*
- *Conduct various marketing activities with bank and non-bank partners as well as mapping potential regional and potential bank branches*
- *Improving the quality of services to partners by establishing a Service Level Agreement Guarantee and Claims*
- *Develop integrated IT systems to improve the effectiveness of the Company's business processes*
- *To synergize with other organizations/associations/financial institutions in Indonesia and abroad (ASSIPINDO, ACSIS, benchmarking with KODIT, JFC, etc.)*

KINERJA PERUM JAMKRINDO

Pembahasan pencapaian kinerja Jamkrindo tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh terbitnya SEOJK Nomor S-129/D.05/2017, di mana terjadi perubahan pencatatan besaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang sebelumnya menggunakan metode Akrual Tahunan menjadi Akrual Bulanan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan agar tidak salah dalam membaca kinerja Jamkrindo tahun 2018.

Tahun 2018, secara umum Jamkrindo berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP 2018. Dari sisi kinerja operasional konsolidasi, total realisasi jumlah kredit tahun 2018 tercatat sebesar Rp175 triliun. Porsi terbesar 71,08% atau Rp124,21 triliun diperoleh dari penjaminan Non KUR dan sisanya Rp50,53 triliun merupakan penjaminan KUR.

Dengan jumlah penjaminan kredit tersebut, Perusahaan membukukan pendapatan IJP Bersih sebesar Rp1.341.208 juta. Dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan IJP Bersih tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 25,72%, namun hal tersebut lebih dikarenakan perbedaan pencatatan akuntansi

PERUM JAMKRINDO'S PERFORMANCE

The discussion of Jamkrindo's performance achievements in 2018 is strongly influenced by the publication of SEOJK Number S-129 / D.05 / 2017, where there was a change in the recording of the Guaranteed Feet (IJP) which was previously recorded using the Annual Accrual method to become Monthly Accrual. This needs to be a concern for Shareholders and Stakeholders so they are not mistaken in reading the performance of Jamkrindo in 2018.

In 2018, in general, Jamkrindo succeeded in achieving the targets set out in the 2018 RKAP. In terms of consolidated operational performance, the total realization of the 2018 loan amounted to IDR175 trillion. The largest portion of it which is 71.08% or IDR124.21 trillion was obtained from the Non-People Business Credit guarantee and the remaining, IDR50.53 trillion, was from People Business Credit guarantee.

With the total credit guarantee, the Company posted a Guarantee Fee - Net income of IDR1,341,208 million. Compared to the previous year, the Guarantee Fee - Net income in 2018 decreased by 25.72%, but this was more due to differences in accounting records in which the newer one is in accordance with SEOJK

sesuai dengan SEOJK Nomor S-129/D.05/2017. Dari sisi volume, tahun 2018 terjadi peningkatan penjaminan sebesar 17,47%. Dengan demikian, pencapaian tersebut berada di atas target RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar Rp156.576 miliar atau dengan pencapaian sebesar 111,60%.

Number S-129 / D.05 / 2017. In terms of volume, in 2018 there was an increase in the guarantee of 17.47%. As such, this achievement was above the 2018 RKAP target set at IDR156,576 billion or equal to 111.60% of the target.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya jumlah kredit macet pada tahun 2018, jumlah Beban Klaim yang ditanggung Jamkrindo tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 23,17% menjadi Rp1.237 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.005 miliar. Jumlah Beban Klaim tersebut juga berada di atas target RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar Rp1.159 miliar.

However, along with the increase in the number of bad loans in 2018, the amount of Claim Expenses borne by Jamkrindo in 2018 increased by 23.17% to IDR1,237 billion from the previous year amount of IDR1,005 billion. Total Claims Expenses were also above the 2018 RKAP target set at IDR1,159 billion.

Perusahaan mencatat kinerja yang cukup baik pada tahun 2018 dengan pertumbuhan pendapatan investasi sebesar 13,71% menjadi Rp684 miliar dari tahun sebelumnya Rp602 miliar. Pencapaian tersebut juga berada di atas target RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar Rp672 miliar.

The Company recorded a fairly good performance in 2018 with investment income growth of 13.71%, from IDR602 billion in the previous year to IDR684 billion in 2018. The achievement was also above the 2018 RKAP target set at IDR672 billion.

Uraian *Description*	**RKAP 2018** *Company Work Plan and Budget 2018*	**Realisasi 2018** *2018 Realizations*	**Pencapain RKAP 2018** *Achievement compared to 2018 RKAP Target*
Imbal Jasa Penjaminan – Bersih *Net- Guarantee Fee*	1.453.763	1.341.208	92,26%
Beban Klaim *Claim Expenses*	1.159.472	1.237.358	106,72%
Pendapatan Investasi – Bersih *Net – Investment Income*	672.132	684.108	101,78%
Laba Tahun Berjalan *Current Year Profit*	219.970	397.543	180,73%
Jumlah Aset ***Total Assets***	**16.301.213**	**16.240.997**	**99,63%**
Jumlah Liabilitas ***Total Liabilities***	**4.032.823**	**4.945.317**	**122,63%**
Jumlah Ekuitas ***Total Equity***	**12.268.389**	**11.295.680**	**92,07%**

Dengan pencapain tersebut, tahun 2018 Jamkrindo membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp398 miliar, jauh di atas target RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar Rp220 miliar.

With this achievement, in 2018, Jamkrindo posted a current year's profit of IDR398 billion. This is well above the 2018 RKAP target set at IDR220 billion.

Jamkrindo juga berhasil mencatat pertumbuhan aset sebesar 10,65% menjadi Rp16.241 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp14.678 miliar. Pencapaian jumlah aset tersebut setara dengan 99,63% dari target RKAP 2018 sebesar Rp16.301 miliar.

Jamkrindo also managed to record asset growth of 10.65%, from the previous year of IDR14,678 billion to IDR16,241 billion. The achievement of the total assets is equivalent to 99.63% of the 2018 RKAP target of IDR16,301 billion.

PROSPEK USAHA JAMKRINDO

Ekonomi Indonesia tahun 2019 diyakini masih akan mengalami pertumbuhan yang positif. Fundamental ekonomi Indonesia diyakini masih cukup kuat dalam menghadapi berbagai gejolak dari ekonomi global yang masih akan berlanjut di tahun 2019.

Perekonomian Indonesia hingga saat ini mengalami pertumbuhan yang stabil didukung dengan adanya target Pemerintah dalam pembangunan di bidang infrastruktur. Aliran dana terus dibutuhkan untuk menyokong pembangunan infrastruktur. Pihak perbankan maupun non perbankan tidak dapat terlepas dari dukungan penjaminan kredit, sejalan dengan tingginya risiko yang dihadapi oleh lembaga penyalur keuangan.

Prospek industri penjaminan secara umum saat ini diuntungkan oleh berakhirnya masa transisi Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, sehingga sangat memungkinkan bagi perusahaan penjaminan akan mengalami peningkatan volume penjaminan yang berpengaruh langsung terhadap laba Perusahaan.

Tahun 2019, Jamkrindo juga memiliki potensi yang sangat besar untuk ekspansi usaha. Terbitnya PP 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia memberikan peluang pasar baru di industri penjaminan. Hal tersebut disebabkan karena Jamkrindo dapat menggarap pasar selain UMKM melalui sinergi BUMN. Pada penjaminan KUR, Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp140 triliun. Penyaluran KUR di tahun 2019 meningkat sebesar 14% dari tahun 2018 sebesar Rp120 triliun. Peningkatan penyaluran KUR dari Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan target volume penjaminan KUR Perusahaan.

Sejalan dengan peningkatan target penyaluran KUR dari Pemerintah, Perum Jamkrindo meningkatkan target volume penjaminan Non KUR 2019 menjadi sebesar Rp122,36 triliun. Target penjaminan Non KUR terus ditingkatkan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu program KUR dihentikan, maka Perusahaan dapat meningkatkan fokusnya terhadap penjaminan kredit Non KUR.

JAMKRINDO'S BUSINESS PROSPECTS

The Indonesian economy in 2019 is believed to still be experiencing positive growth. Indonesia's economic fundamentals are believed to be still strong enough in the face of various shocks from the global economy that will continue in 2019.

The Indonesian economy to date has experienced stable growth supported by the Government's target in infrastructure development. The flow of funds continues to be needed to support infrastructure development. In line with the high risks faced by financial channeling institutions, banking and non-banking institutions cannot be separated from credit guarantee support.

The prospect of the guarantee industry, in general, is currently benefiting from the end of the transition period of Law No. 1 of 2016 concerning Guarantees, so it is very possible for guarantee companies to experience an increase in the volume of guarantees that directly affect the Company's profits.

In 2019, Jamkrindo also has enormous potential for business expansion. The publication of Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo provides new market opportunities in the guarantee industry. This is because Jamkrindo can work on markets other than MSMEs through the synergy of SOEs. In the People's Business Credit guarantee, the Government is targeting People's Business Credit distribution of IDR140 trillion. People's Business Credit distribution in 2019 increased by 14% from 2018 amount to IDR120 trillion. The increase in People's Business Credit distribution from the Government is expected to increase the Company's People's Business Credit guarantee volume target.

In line with the increase in the People's Business Credit distribution target from the Government, Perum Jamkrindo increased the target of the Non-People's Business Credit 2019 guarantee volume to IDR122.36 trillion. Non-People's Business Credit guarantee targets continue to be increased. This is to anticipate the termination of People's Business Credit program. If at any time the People's Business Credit program is terminated, the Company can increase its focus on Non-People's Business Credit guarantee.

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Jamkrindo meyakini, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menunjang pengembangan usaha dan pencapaian target-target Perusahaan. Karena itu, Jamkrindo memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan SDM.

Tahun 2018, Perusahaan melaksanakan pengembangan karier karyawan sesuai kompetensi maupun kemampuan individu, kebutuhan Perusahaan dan pengalaman jabatan, antara lain dengan melakukan:

- Melaksanakan *Learning Blue Print* yang dijadikan pedoman untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM.
- Melakukan kegiatan terkait manjamen pengetahuan, seperti pengelolaan *database expert*, pelaksanaan pendampingan, melakukan *sharing session*, dan evaluasi *project*.
- Menerapkan penggunaan aplikasi dalam pengelolaan data pada Divisi MSDM.
- Penyempurnaan HRMS untuk strategi Perusahaan dalam meningkatkan pasar dan mendekatkan diri kepada pelanggan.
- Implementasi *Knowledge Management* untuk meningkatkan kualitas SDM.

Selain itu, tahun 2018 Jamkrindo juga mengembangkan *Learning Center* bagi perusahaan lainnya, yaitu pengembangan *Blue Print Learning* sebagai pedoman pembekalan kompetensi bagi SDM di industri penjaminan, penyusunan buku (cetak dan *e-book*) sosialiasi penjaminan dan hasil pendampingan UMKM perusahaan, sosialisasi metode pendampingan UMKM untuk SDM Divisi PUKM dan Divisi terkait dan melaksanakan *Training for Trainer* petugas pemeringkatan Kantor Cabang.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Jamkrindo terus menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance*/GCG). Jamkrindo meyakini dengan menerapkan prinsip GCG secara tepat akan membawa Perusahaan meraih kinerja yang positif dan secara jangka panjang akan semakin meningkatkan kepercayaan mitra kerja dan nasabah yang menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha Jamkrindo.

HR QUALITY IMPROVEMENT

Jamkrindo believes that Human Resources (HR) is a key factor in supporting business development and achieving Company targets. Because of this, Jamkrindo has given great attention to the management and development of HR.

In 2018, the Company carried out employee career development in accordance with the competencies and capabilities of individuals, the needs of the Company, and office experience, among others by:

- *Implementing Learning Blue Print which is used as a guideline to improve HR productivity and quality.*
- *Conduct activities related to knowledge management, such as expert database management, implementation of assistance, sharing sessions, and project evaluation.*
- *Implement the use of applications in data management in the HRM Division.*
- *Improvement of HRMS for the Company's strategy in improving markets and in an effort to get closer to customers.*
- *Knowledge Management Implementation to improve the quality of HR.*

In addition, in 2018, Jamkrindo developed a Learning Center for other companies, namely the development of Blue Print Learning as a guide to competency briefing for HR in the guarantee industry, preparation of books (print and e-book) dissemination of guarantees and the results of assistance to MSMEs, dissemination of MSME assistance methods for the Human Resources of PUKM Division and related Divisions, and carry out Training for Trainer for Branch Office's rating officers.

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Jamkrindo continues to maintain and improve the quality of the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG). Jamkrindo believes that appropriate implementation of the GCG principles will bring the Company to achieve positive performance and in the long term will further enhance the trust of its partners and customers which are an important part of Jamkrindo's business development.

GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika.

GCG is the principles that underlie the process and mechanism of corporate management based on compliance with laws and regulations, and a reflection of the ethical business world.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG dan sebagai upaya pencegahan terjadi *fraud*, tahun 2018 Jamkrindo melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistle Blowing System)*.

In order to improve the quality of GCG implementation and as an effort to prevent fraud from occurring, in 2018 Jamkrindo made improvements to the Guidelines for Management of the Whistleblowing System.

Selain itu, penerapan praktik GCG terus menerus ditingkatkan di Perum Jamkrindo, melalui *monitoring* dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* di lingkup Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

In addition, the implementation of GCG practices is continuously improved at Perum Jamkrindo, through monitoring conducted by the Internal Control Unit and HRM Division on the implementation of the Code of Conduct (CoC). If a conflict of interest or office misuse is found that causes fraud in the Company, it will be resolved and followed up in accordance with applicable regulations.

Jamkrindo juga telah melakukan *Assessment* GCG untuk periode tahun buku 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang dilakukan oleh PT Cita Negeri Amanah (*Subsidiary of* IICD) sebagai Assesor Independen. Berdasarkan hasil *assessment* GCG tahun buku 2018, Jamkrindo berhasil memperoleh skor 95,716 dengan predikat "Sangat Baik". Dengan capaian tersebut, Jamkrindo berhasil meningkatkan kualitas penerapan GCG-nya, di mana pada tahun sebelumnya skor *assessment* GCG Jamkrindo adalah sebesar 92,470 dengan predikat "Sangat Baik".

Jamkrindo has also carried out GCG Assessment for the 2018 fiscal year in accordance with the SOE Minister's Regulation which was carried out by PT Cita Negeri Amanah (Subsidiary of IICD) as an Independent Assessor. Based on the results of the 2018 fiscal year GCG assessment, Jamkrindo managed to obtain a score of 95.716 with the title "Very Good". With this achievement, Jamkrindo succeeded in improving the quality of its GCG implementation, in which in the previous year, Jamkrindo's GCG assessment score was 92,470 with the title "Very Good".

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pada tahun 2018 komposisi Direksi Perum Jamkrindo tidak mengalami perubahan, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:

In 2018 the composition of the Board of Directors of Perum Jamkrindo did not change. The following was the composition:

Direktur Utama *President Director*	: Randi Anto
Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Guarantee Business*	: Amin Mas'udi
Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operations and Network*	: Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan *Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	: Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment and Risk Management*	: I. Rusdonobanu

APRESIASI

Tahun 2018 telah berhasil dilalui Jamkrindo dengan capaian kinerja yang baik. Atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai Jamkrindo yang telah bekerja dengan semangat dan kebanggaan. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang telah memberikan arahan kepada Direksi dalam tata kelola perusahaan.

Atas nama Perusahaan, kami juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para mitra kerja yang turut berkontribusi dalam perkembangan usaha Jamkrindo dan kepada Pemegang Saham yang secara konsisten memberi dukungan penuh untuk pengembangan Jamkrindo dari waktu ke waktu, serta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penentu kebijakan.

Semoga Jamkrindo dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar dan dapat menunjukan peran yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.

APPRECIATIONS

Jamkrindo has successfully gone through the year 2018 with good performance. On behalf of the Board of Directors, we express our highest gratitude and appreciation to all Jamkrindo employees who have worked with enthusiasm and pride. We also would like to thank the Supervisory Board for providing guidance to the Directors in corporate governance.

On behalf of the Company, we also express our sincere gratitude to our partners who contributed to the development of the Jamkrindo business and to Shareholders who consistently provide full support for the development of Jamkrindo from time to time, as well as to the Financial Services Authority (OJK) as a policy determinant.

Hopefully, Jamkrindo can continue to improve its performance and provide greater contributions and show a greater role for national economic development.

Jakarta, Mei 2019
Jakarta, May, 2019



RANDI ANTO
Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PERUM JAMKRINDO

STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF SUPERVISORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2018 ANNUAL REPORT OF PERUM JAMKRINDO

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jamkrindo tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of Perum Jamkrindo for 2018 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2019

Jakarta, May, 2019

DEWAN PENGAWAS
BOARD OF SUPERVISORS

Sri Mulyanto
Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Independen
Chairperson of the Supervisory Board/ Independent Supervisory Board

Subandriyo
Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Noor Ida Khomsiyati
Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Diah Natalisa
Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PERUM JAMKRINDO

STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR THE 2018 ANNUAL REPORT OF PERUM JAMKRINDO

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jamkrindo tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of Perum Jamkrindo for 2018 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

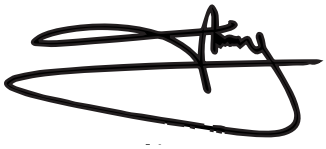
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2019

Jakarta, May, 2019

DIREKSI
DIRECTORS



Randi Anto
Direktur Utama
President Director



Amin Mas'udi
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Business Guarantee



Kadar Wisnuwarman
Direktur Operasional dan Jaringan
Operations and Network Director



Sulis Usdoko
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs and Compliance



I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



Laporan Tahunan
Annual Report **2018**

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Perum Jamkrindo melakukan pengembangan dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Perum Jamkrindo made development by adding Company's business activities in accordance with current developments and needs, to support Government policies and programs in the field of national economy and development.

INFORMASI UMUM TENTANG JAMKRINDO

GENERAL INFORMATION ABOUT JAMKRINDO



Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

Nama Perusahaan/ ***Company Name***

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Bentuk dan Status Badan Usaha/
Form and Status of Business Entity

Perusahaan Umum (Perum)
Public Company

Tanggal Pendirian/ ***Date of Establishment***

1 Juli 1970
July 1, 1970

Dasar Hukum/ ***Legal Basis***

- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tanggal 20 Juli 2018
- Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-77/ KM.10/2009 tanggal 22 April 2009
- *Government Regulation No. 35 of 2018 concerning the Perum Jamkrindo dated July 20, 2018*
- *Decree of the Minister of Finance No. KEP-77 / KM.10 / 2009 dated April 22, 2009*

Dasar Hukum Pelaksanaan Usaha Penjaminan/ ***Legal Basis of Business Guarantee Practice***

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Penjaminan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.05/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tanggal tentang Perubahan Kedua Atas POJK No. 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- *Law No. 1 of 2016 concerning Guarantees*
- *Government Regulation No. 1 of 2016 concerning the Implementing Agency for Guarantee of Warehouse Receipt System*
- *Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.05 / 2017 dated January 11, 2017, concerning Business Licensing and Guarantee Institutions*
- *Financial Services Authority Regulation Number 2 / POJK.05 / 2017 dated January 11, 2017, concerning Business Implementation of the Guarantee Institutions*
- *Financial Services Authority Regulation Number 3 / POJK.05 / 2017 dated January 11, 2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions*
- *Financial Services Authority Regulation Number 56 / POJK.05 / 2017 dated August 28, 2017, concerning the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 1 / POJK.05 / 2016 concerning Investment in Government Securities for Non-Bank Financial Services Institutions*



Bidang Usaha/ ***Line of Business***
Penjaminan kredit baik bersifat langsung maupun tidak langsung yang diberikan kepada bank atau Badan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Direct and indirect credit guarantees given to banks or Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives

Jaringan Usaha/ ***Business Network***
9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia
9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia

Kepemilikan/ ***Ownership***
100% Negara Republik Indonesia, melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara
100% belong to the Republic of Indonesia, under the care of the Government of the Republic of Indonesia / Ministry of State-Owned Enterprises

Penyertaan Modal Negara/
State Equity Participation
Rp7.638.733.365.160,-
IDR7,638,733,365,160,-

Jumlah Karyawan/ ***Number of Employees***
1.002 orang di 2018
1,002 people in 2018

Alamat/ ***Address***
Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia

KONTAK
CONTACT

+62 21 6540335
+62 21 6540344, 6540348
info@jamkrindo.co.id
www.jamkrindo.co.id

MEDIA SOSIAL
SOCIAL MEDIA

Perum Jamkrindo
perum_jamkrindo
perum_jamkrindo
Perum Jamkrindo



RIWAYAT SINGKAT JAMKRINDO
BRIEF HISTORY OF JAMKRINDO



> Perum Jamkrindo meningkatkan perannya dalam industri penjaminan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2018.
>
> *The Jamkrindo Corporation increases its role in the national guarantee industry as stated in Government Regulation No. 35 of 2018.*

SELAYANG PANDANG SEJARAH PERUM JAMKRINDO

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, atau disebut juga dengan "Perum Jamkrindo" atau "Perusahaan" merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fokus kegiatan usaha pada bidang penjaminan kredit, baik konvensional maupun syariah.

HISTORY OF PERUM JAMKRINDO AT A GLANCE

The Indonesian Credit Guarantee Public Corporation, also called "Perum Jamkrindo" or "Company" is a State-Owned Enterprise (SOE) that has a focus on business activities in the field of both conventional and sharia credit guarantee.

Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan maupun program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dalam upaya menyejahterahkan kehidupan bangsa. Implementasi komitmen tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan konsultasi manajemen berupa pemberian jaminan kredit bersifat tunai dan non-tunai, yang diberikan oleh bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata dan memudahkan aksesibilitas, Perum Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri serta melakukan perbaikan dan pengembangan pada kualitas layanan.

As an SOE, Perum Jamkrindo is fully committed to implementing and supporting Government policies and programs in the field of national economy and development in an effort to improve the life of the nation. The implementation of these commitments was carried out through the activities of providing management consulting assistance in the form of providing cash and non-cash credit guarantees provided by banks or business entities to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). In an effort to improve the economy of the community evenly and facilitate accessibility, Perum Jamkrindo continues to develop its work network to all corners of the country as well as make improvements and development on service quality.

Jamkrindo didirikan pada pertengahan tahun 1970 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Jamkrindo was established in the mid-1970s as the Cooperative Credit Guarantee Agency (LJKK). At that time, the development of cooperatives was still behind compared to state-owned enterprises and private companies. In its development, LJKK was later changed to a Cooperative Financial Development Public Corporation (Perum PKK) through Government Regulation No. 51 of 1981 dated December 23, 1981, which was perfected by Government Regulation No. 27 of 1985 dated 31 May 1985 concerning the Public Corporation for Cooperative Financial Development.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup UMKM. Atas usaha tersebut, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran Perum PKK melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000 yang sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

The successful implementation of the functions and duties of Perum PKK in developing cooperatives through credit guarantee activities has made the Government expand the service coverage of Perum PKK to not only be limited to cooperatives but also includes MSMEs. For this effort, the Government again issued a policy aimed at strengthening the role of Perum PKK through the issuance of Government Regulation No. 95 of 2000 dated 7 November 2000 which at the same time changed the name of Perum PKK to become a Public Business Facility Development Company (Perum SPU).

Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Terkait dengan perubahan bisnis Perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKM dan Koperasi melalui pola bagi hasil, tetapi berfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM dan Koperasi, Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.

In 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 2 of 2008 dated January 26, 2008, concerning the Guarantee Institution. With regard to business changes, the Company no longer provides loans directly to MSMEs and Cooperatives through profit sharing patterns, but focuses on the MSME and Cooperative credit guarantee business, Perum SPU was renamed the Indonesian Credit Guarantee Public Corporation (Perum Jamkrindo) based on Government Regulation No. 41 of 2008 dated May 19, 2008.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah melalui Departemen Keuangan memperkuat dasar hukum pendirian Perusahaan serta perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Melalui regulasi tersebut, Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti aturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan (KMK) No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

As a follow up to the implementation of the Presidential Regulation, the Government through the Ministry of Finance strengthened the legal basis for the establishment of the Company and other companies with similar line of business through the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 222 / PMK.010 / 2008 dated December 16, 2008 as amended in Minister of Finance Regulation No. 99 / PMK.010 / 2011 dated July 8, 2011 concerning Credit Guarantee Companies and Credit Re-Guarantee Companies. Through the regulation, Perum Jamkrindo is required to have a business license as a Credit Guarantee Company. Following up on the regulation, the Minister of Finance issued a Decree (KMK) No. KEP-77 / KM.10 / 2009 dated 22 April 2009 which stipulates the business permit of Perum Jamkrindo as a Credit Guarantee Company.

Di tahun 2016, Pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penjaminan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam memayungi dan melembagakan industri penjaminan yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia.

In 2016, the Government launched Law No. 1 of 2016 dated January 19, 2016 concerning Guarantees, as a form of the Government's seriousness in covering and institutionalizing the guarantee industry that continues to develop in line with the growth of financial services in Indonesia.

Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, peraturan ini diterbitkan guna meningkatkan peran Perum Jamkrindo dalam industri penjaminan nasional sebagai upaya untuk mensukseskan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah memandang Jamkrindo perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

In 2018, the Government issued Government Regulation No. 35 of 2018 concerning the Indonesian Credit Public Corporation (Perum). This regulation was issued in order to increase the role of Perum Jamkrindo in the national guarantee industry in an effort to succeed Government policies and programs in the national economy and development sector. The Government views Jamkrindo as necessary to develop its business by increasing the Company's business activities in accordance with current developments and needs, to support Government policies and programs in the field of national economy and development.

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Kronologi proses perubahan nama Perum Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985.

THE CHANGE OF COMPANY'S NAME

The chronology of the name change process of Perum Jamkrindo since its inception until now as described above is as follows:

- *The company was originally established under the name of the Cooperative Financial Development Public Corporation (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 which was a merger of the Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK) which was formed in 1970. The Government Regulation was then refined through Government Regulation No. 27 of 1985.*

- Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000.
- Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) seperti yang dikenal saat ini, melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008.

- *The Company name was changed to the Public Business Development Facility Company (Perum SPU) based on Government Regulation No. 95 of 2000.*
- *The company name was changed again, becoming the Indonesian Credit Guarantee Public Corporation (Perum Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of Government Regulation No. 41 of 2008.*



BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR: PENERIMA JAMINAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang menjadi anggaran dasar perusahaan, dalam pasal 6 disebutkan bahwa Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan sistem resi gudang, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan usaha yaitu:
   a. Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya;
   c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
   d. Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   e. Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   f. Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   g. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *surety bond* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
   h. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION: GUARANTEE RECIPIENTS

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2018 concerning Public Corporation (Perum) Indonesian Credit Guarantees (Jamkrindo) which are the Company's articles of association, in Article 6 it is stated that the Company's Purpose, Objectives, and Business Activities are as follows:

1. *The Company has the intent and purpose to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the field of national economy and development, by conducting business guarantees for Micro, Small and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantee for state-owned enterprises, Guarantee receipt systems warehouse, and optimizing the utilization of Company resources based on the principles of good corporate governance.*
2. *In carrying out the aims and objectives as referred to in paragraph (1), the Company carries out business activities for the following:*
   a. Credit guarantee, conservative financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives;
   b. Loan guarantees channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit to its members;
   c. Credit guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs;
   d. Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
   e. Guarantee of purchase of goods in installments made to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
   f. Guarantee of trade transactions carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
   g. Guarantee of the procurement of surety bond goods and/or services carried out for Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
   h. Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;

i. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
j. Penjaminan letter of credit yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
k. Penjaminan kepabeanan (*Custom bond*) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
l. Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
m. Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (*start up business*) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
n. Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
o. Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan badan usaha milik negara lain;
p. Penjaminan sistem resi gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
q. Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
r. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
s. Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi; dan
t. Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

3. Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s.
4. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan/ atau dikuasai Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

i. Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
j. Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
k. Customs guarantees (Custom bonds) carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
l. Excise guarantees carried out on Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
m. Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro Business, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
n. The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
o. Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises;
p. Guarantee of warehouse receipt system in accordance with the provisions of legislation;
q. Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company;
r. Provision of management consulting services related to Guarantee business activities;
s. Ranking, management consulting, management services, assistance/empowerment, as well as other services for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, and Cooperatives; and
t. Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions in accordance with their authority.

3. The main business activities of the Company can be carried out in the form of joint guarantee (co-guarantee) except for the main business activities as referred to in paragraph (2) point r and s.
4. In addition to the main business activities as referred to in paragraph (2), as long as financially supporting the main business activities, the Company can carry out business activities in order to optimize the utilization of potential resources that are owned and/or controlled by the Company as determined by the Minister.

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha untuk mendukung pembiayaan. Berikut disampaikan pelaksanaan kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha yang telah dilakukan.

In an effort to achieve these aims and objectives, the Company can conduct several business activities and business development policies to support financing. The following is the implementation of business activities and business development policies that have been carried out.

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar *Business Activities Based on Articles of Association*	Telah/Belum Dijalankan *Has or has not been performed*	Keterangan *Description*
1	Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Credit guarantee, conservative financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives*	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Umum, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat *Available on General Credit Guarantee products, Micro Credit Guarantee, People's Business Credit Guarantee*
2	Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya *Loan guarantees channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit to its members*	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna KKLK *Available on the KKLK Multipurpose Credit Guarantee product*
3	Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan *Credit guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs*	√	Penyaluran program kemitraan *Distribution of partnership programs*
4	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives*	-	-
5	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Guarantee of purchase of goods in installments made to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives*	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO *Available on OTO Credit Guarantee products*
6	Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Guarantee of trade transactions carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives*	√	Terdapat dalam produk Penjaminan Distribusi Barang *Available on Goods Distribution Guarantee products*

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar *Business Activities Based on Articles of Association*	Telah/Belum Dijalankan *Has or has not been performed*	Keterangan *Description*
7	Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa surety bond yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Guarantee of the procurement of surety bond goods and/or services carried out for Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;*	√	Terdapat pada produk *Surety Bond, Surety Bond Co-Guarantee,* Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa. *Available on Surety Bond products, Surety Bond Co-Guarantee, Guarantee of Construction Loans and Procurement of Goods / Services.*
8	Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;*	√	Terdapat dalam produk Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi *Co-Guarantee* *Available on Counter Guarantee Bank Credit Guarantee and Co-Guarantee Counter Guarantee Bank Credit Guarantee products*
9	Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;*	-	-
10	Penjaminan *letter of credit* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;*	-	-
11	Penjaminan kepabeanan (*Custom bond*) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Customs guarantees (Custom bonds) carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;*	√	Terdapat pada *Customs Bond* *Available on Customs Bond*
12	Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Excise guarantees carried out on Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;*	√	Terdapat pada produk *Customs Bond* *Available on Customs Bond*
13	Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan *(start up business)* yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro Business, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;*	√	Terdapat pada produk enjaminan Kredit Umum, dan Penjaminan Kredit Mikro *Available on General Credit guarantee products, and Micro Credit Guarantees*

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar *Business Activities Based on Articles of Association*	Telah/Belum Dijalankan *Has or has not been performed*	Keterangan *Description*
14	Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi *The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;*	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Mikro *Available on Micro Credit Guarantee products*
15	Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan badan usaha milik negara lain *Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises;*	√	Terdapat dalam produk *Surety Bond*, Penjaminan Bersama KUR, Penjaminan Pembiayaan Invoice *Available in Surety Bond products, KUR Joint Guarantee, Invoice Financing Guarantee*
16	Penjaminan sistem resi gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *Guarantee of warehouse receipt system in accordance with the provisions of legislation;*	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Subsidi Resi Gudang *Available on the Warehouse Receipt Credit Guarantee Subsidy product*
17	Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; *Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company;*	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan Kredit Arrum *Available on Multipurpose Credit Guarantee products, Arrum Credit Guarantee*
18	Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan *Provision of management consulting services related to Guarantee business activities;*	√	Dilakukan oleh korporasi *Conducted by the corporation*
19	Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen,pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi, dan *Ranking, management consulting, management services, assistance/empowerment, as well as other services for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, and Cooperatives; and*	√	Dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM *Conducted by the Risk Management Division and PUKM*
20	Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya *Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions in accordance with their authority.*	√	Penjaminan Bersama KUR *KUR Collateral Guarantee*

v = telah dijalankan
x = belum/tidak dijalankan

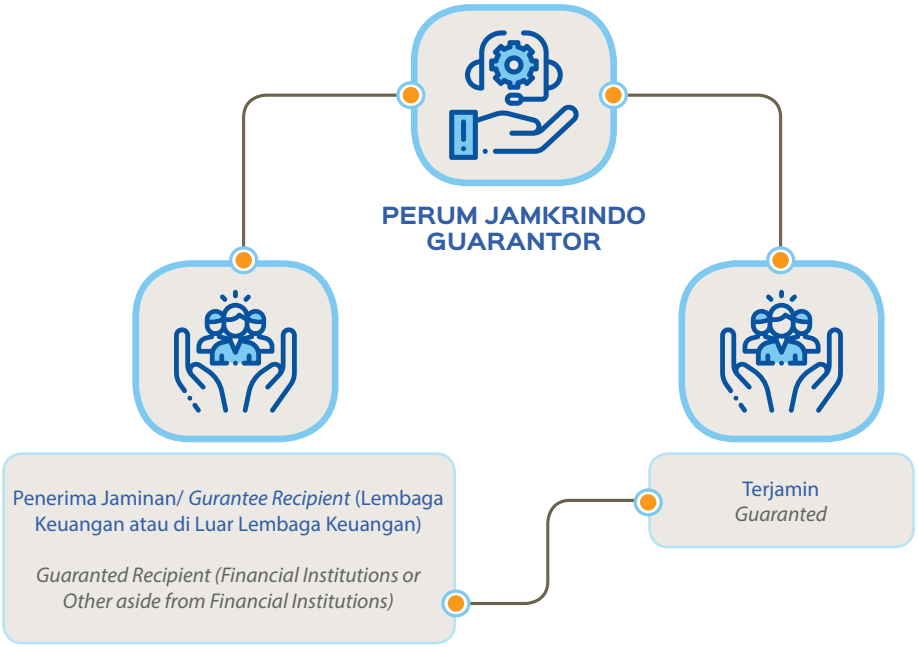
v = Has been performed
x = Has not been performed

PRODUK USAHA PENJAMINAN
GUARANTEE BUSINESS PRODUCTS

Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

Credit Guarantee is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the Credit Recipient's financial obligations (Guaranteed) to the Guarantee Recipient. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, namely the credit giving business entity called the Guarantee Receiver, the credit debtor called the Guaranteed, and the Credit Guarantee Company called the Guarantor.

Proses Penjaminan Kredit
Credit Guarantee Process



Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Recipient of Guarantee but does not eliminate guaranteed financial obligations to the Recipient of Guarantee until the Recipient of Guarantee states the Guaranteed Credit is paid off.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Credit Guarantee is required by the Guarantee Receiver when the loan application from Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Receiver but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of unbankable fulfillment of collateral.

Jenis-jenis Produk usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut:

The types of guarantee business products include the following:

Kegiatan *Activities*	**Keterangan** *Description*
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) *Guarantee of People's Business Credit*	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak,namun belum *bankable* yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. *Venture Capital Credit/Financing and/or investment to MSMEs in a productive and feasible, but not yet bankable business field which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help develop productive businesses.*
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP *Kpr Sejahtera Guarantee - Housing Financing Liquidity Facility*	Penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed installments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.*
Penjaminan Sistem Resi Gudang *Guarantee on the Warehouse Receipt System*	Kegiatan pemberian jaminan kepada Pengelola Gudang atas Kewajibannya kepada petani dalam melakukan pengelolaan barang komoditas. *Guarantee activities to Warehouse Managers for their Obligations to farmers in managing commodity goods.*
Penjaminan Kredit Umum *Guarantee on General Credit*	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainya (Non Bank) kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin,yang proses penjaminannya dilakukan secara kasus per kasus *Guarantee on credit/financing provided by the Recipient of the Other Financial Institution Guarantee (Non-Bank) to the Guaranteed for the purposes of additional Working Capital and/or Investment in the context of guaranteed business development and improvement, in which the guarantee process is carried out on a case-by-case basis*
Penjaminan Kredit Mikro *Micro Credit Guarantee*	Penjaminan atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Produktif, yang jumlah plafond kredit sesuai dengan ketentuan kredit mikro di Penerima Jaminan, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*). *Guarantee of the credit given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is automatic conditional (Conditional Automatic Cover/CAC).*
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa *Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/Services*	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan *Bowheer* (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. *Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bowheer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure.*

Kegiatan *Activities*	**Keterangan** *Description*
Penjaminan Kredit Multiguna *Multipurpose Credit Guarantee*	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (*Non Bank*) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. *Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/ Government agency) whose distribution is done directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.*
Penjaminan Distribusi Barang *Goods Distribution Guarantee*	Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan fabrikan (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan *case by case*) *Credit guarantees for credit/financing of distribution which is given provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (guarantee analysis is done on case basis)*
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi *Guarantee on Guarantee/Counter Guarantee Bank*	Penjaminan yang diberikan Penjamin (Perum Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan *Obligee* ketika Terjamin wanprestasi. *A guarantee given by the Guarantor (Perum Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Obligee when the Guaranteed has defaulted*
Surety Bond	Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada *Obligee* bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut *A 3-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Bondee that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to carry out work in accordance with the Obligee's demand, the Guarantor will be responsible to the Obligee to settle the Guaranteed's obligations*
Payment Bond	Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan. *Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the Guaranteed's payment to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guarantee Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver.*
Customs Bond	Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang & import dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada *Obligee* (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya. *Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the Obligee (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations*
Penjaminan Keagenan Kargo *Cargo Agency Guarantee*	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima Jaminan (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban terjamin (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan. *A guarantee that is given to the Recipient of the Guarantee (The Transportation Service Provider) for guaranteed obligations (Cargo Agent) in making payment of freight costs to the Recipient of Guarantee*

Kegiatan *Activities*	**Keterangan** *Description*
Penjaminan *Invoice Financing* *Guarantee of Invoice Financing*	Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada invoice yang diterbitkan oleh penerima jaminan. *Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients*
Penjaminan Pembiayaan Syariah *Sharia Financing Guarantee*	Penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009. *Guarantee between the parties based on sharia principles as stipulated in the MUI DSN Fatwa No. 74 / DSN-MUI / I / 2009*
Penjaminan *Supply Chain Financing* *Guarantee of Supply Chain Financing*	Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK pre *Financing*, KMK *Post Financing* dan KMK Distributor. *Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of workmanship/project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain CORE COMPANIES in the form of KMK Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor.*
Penjaminan Kemaritiman /Jaring *Maritime/Fisheries Guarantee*	Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan. *Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries.*
Penjaminan Pembiayaan Otomotif *Automotive Financing Guarantee*	Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna. *Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose*
Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang *Credit Guarantee on Subsidy Scheme of Warehouse Receipt*	Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya. *The activity of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks / Non-Bank Financial Institutions Providing SSRG Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as a collateral. This is in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments*
Penjaminan Kredit Resi Gudang *Warehouse Receipt Credit Guarantee*	Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau Oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (*Collateral Management Agreement*/CMA). *Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management (CMA).*

Kegiatan *Activities*	**Keterangan** *Description*
Penjaminan Fintech *Fintech Guarantee*	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh *lender* melalui penyelenggara (*peer to peer landing*) kepada *borrower.* *Guarantee on information technology-based money lending services that are channeled by lenders through the organizer (peer to peer landing) to the borrower.*
Penjaminan KPR *Guarantee of Home Ownership Loans*	Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (Non Bank) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko. *Guarantee of the Home Ownership Loan given by Other (Non-Bank) Financial Institutions Guarantee Recipient to the Guaranteed whose financing facilities are used to buy houses, flats/ apartments, home offices, shop houses or other consumptive needs with collateral in the form of houses, apartment, home office, or shophouse.*
Penjaminan *Capital Management Guarantee* (CMG) *Guarantee on Capital Management Guarantee (CMG)*	Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) *coverage* penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank. *Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation (MRK).*

KOMPETENSI INTI
CORE COMPETENCE

Kompetensi inti berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. namun demikian, *competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya *customer relationship*. Saat ini dan masa yang akan datang, Perusahaan memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi moral *hazard* pada *customer*.

Core competencies have a great potential in strengthening competitive advantage. However, strong competitive advantage can still be hampered by dynamic factors in market competition, such as lack of customer loyalty and lack of customer relationships. At present and in the future, the Company has several strategic challenges related to the dynamics of market competition factors related to the moral hazard potential of the customer.

Kriteria Identifikasi *Identification Criteria*	*Accessibility*	Kemampuan mengakses berbagai pasar potensial *Ability to access various potential markets*
	Unik/Langka *Unique/Rare*	Peniruan oleh kompetitor sulit dilakukan *Imitation by competitors is difficult*
	Value Creation	Memberi kontribusi besar terhadap manfaat produk, terutama dari perspektif pelanggan *Give a large contribution to the benefits of the product, especially from the customer's perspective*
Risiko *Risk*	1. Peluang untuk pertumbuhan terabaikan 2. Re-organisasi perusahaan menjadi unit-unit bisnis yang lebih kecil dapat mengakibatkan kompetensi terpecah dan lemah 3. Kurangnya sensitifitas terhadap tumbuhnya peluang lain yang terkait 4. Investasi dapat menjadi kurang optimal 5. Terlalu fokus kepada kinerja periodik, yang sangat dipengaruhi oleh harga jual dan kompetisi pasar. Akibatnya, *core competency* kurang mendapatkan perhatian *1. Opportunities for growth are neglected* *2. The re-organization of a company into smaller business units can lead to fragmented and weak competencies* *3. Lack of sensitivity to the growth of other related opportunities* *4. Investment can be less than optimal* *5. Too focused on periodic performance, which is strongly influenced by selling prices and market competition. As a result, core competency gets less attention*	
Kendala *Obstacles*	1. Kerugian akibat melemahnya *core competency* hanya sebagian kecil saja yang dapat dihitung di muka 2. Tingginya pertumbuhan pasar menimbulkan kinerja cukup bagus yang dapat mengaburkan potensi yang lebih besar jika *core competency* diperhatikan sepenuhnya *1. Losses due to weaker core competencies are only a small portion that can be calculated upfront* *2. The high growth of the market raises quite good performance which can obscure the greater potential if full core competency is taken into account*	

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKM dan Koperasi.
   - » Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit.
   - » Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (*customized product*).
2. Sistem informasi yang reintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja.
3. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari Pemerintah.

In accordance with the above identification criteria and the results of the development of the Company's business model, the Company's core competencies are as follows:

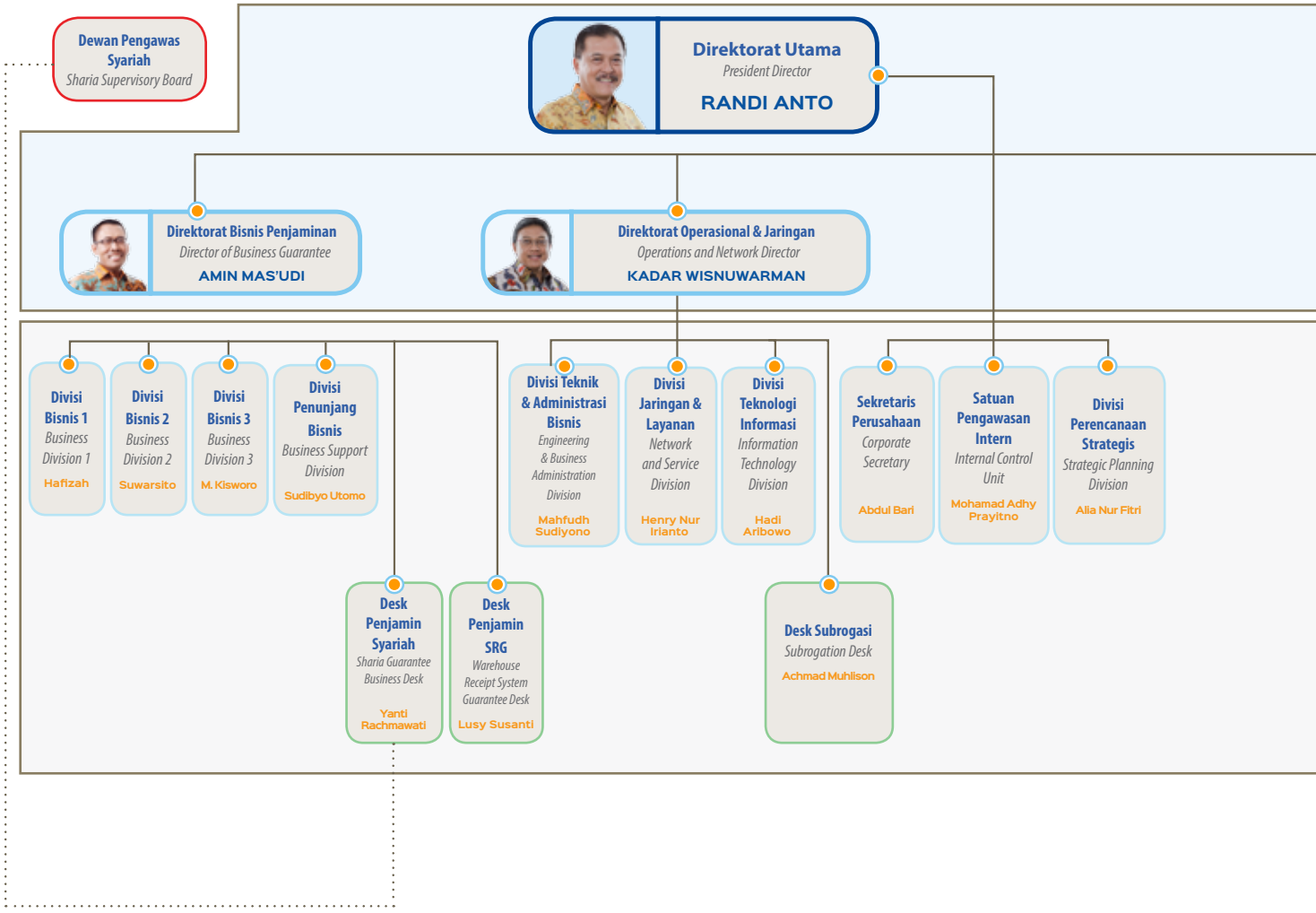
1. *Having good expertise and reputation in the field of MSMEs and Cooperative credit guarantee.*
   - » *Speed of payment of credit guarantee claims.*
   - » *Serving products according to the needs of partners (customized products).*
2. *Information systems that reintegrate internally and externally with work partners.*
3. *Having large capital and great support from the Government.*

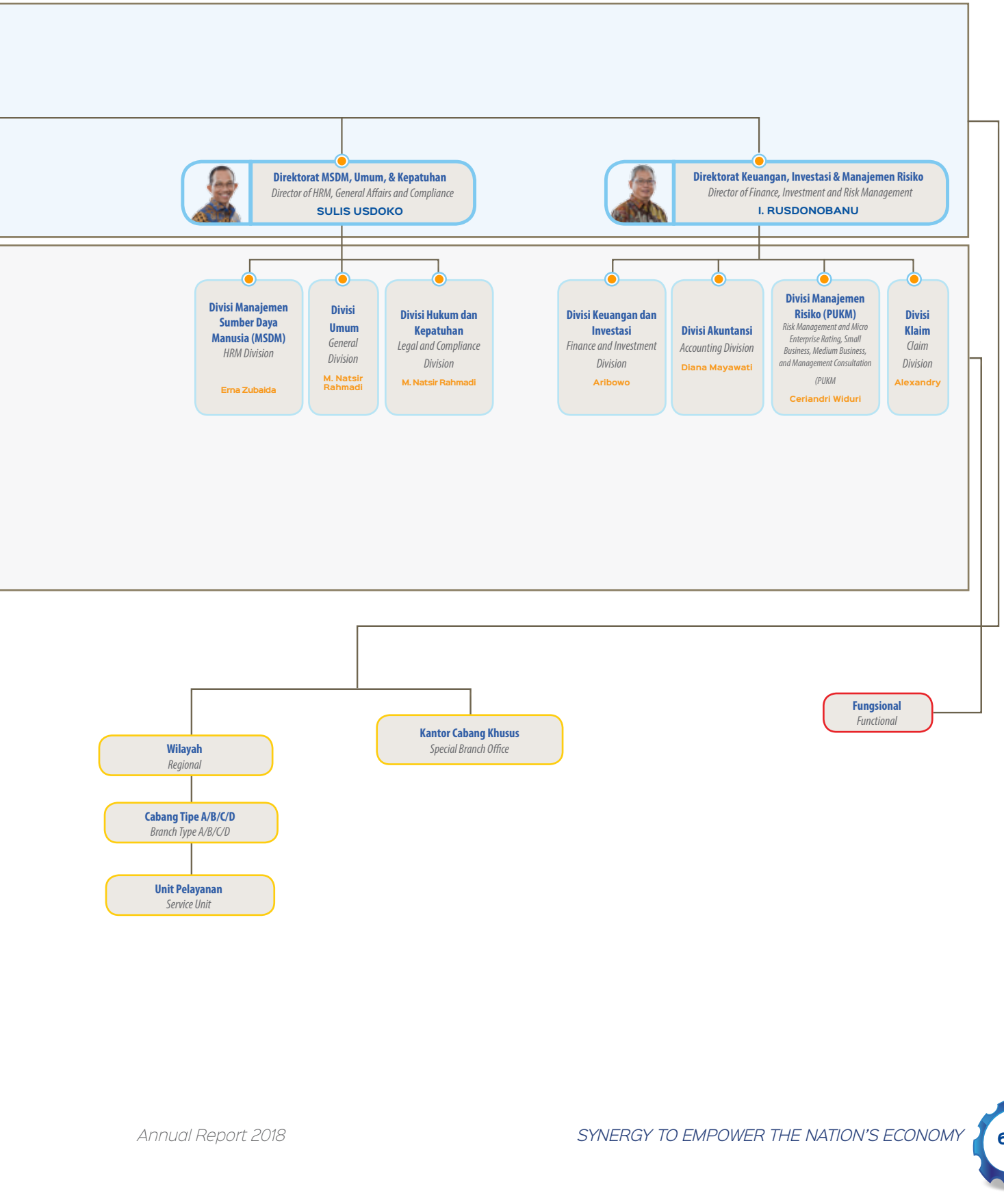
STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Ketetapan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Berikut struktur organisasi Perusahaan per 31 Desember 2018.

The Company's organizational structure has been ratified through the Directors Decree No. 01/KD/1/V/2018 dated 30 May 2018 concerning Organizational Structure of Public Corporations (Perum) for Indonesian Credit Guarantees. The following is the Company's organizational structure as of December 31, 2018.




Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board
Direktorat Utama
President Director
RANDI ANTO
Direktorat Bisnis Penjaminan
Director of Business Guarantee
AMIN MAS'UDI
Direktorat Operasional & Jaringan
Operations and Network Director
KADAR WISNUWARMAN
Divisi Bisnis 1
Business Division 1
Hafizah
Divisi Bisnis 2
Business Division 2
Suwarsito
Divisi Bisnis 3
Business Division 3
M. Kisworo
Divisi Penunjang Bisnis
Business Support Division
Sudibyo Utomo
Divisi Teknik & Administrasi Bisnis
Engineering & Business Administration Division
Mahfudh Sudiyono
Divisi Jaringan & Layanan
Network and Service Division
Henry Nur Irianto
Divisi Teknologi Informasi
Information Technology Division
Hadi Aribowo
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Abdul Bari
Satuan Pengawasan Intern
Internal Control Unit
Mohamad Adhy Prayitno
Divisi Perencanaan Strategis
Strategic Planning Division
Alia Nur Fitri
Desk Penjamin Syariah
Sharia Guarantee Business Desk
Yanti Rachmawati
Desk Penjamin SRG
Warehouse Receipt System Guarantee Desk
Lusy Susanti
Desk Subrogasi
Subrogation Desk
Achmad Muhlison


Direktorat MSDM, Umum, & Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs and Compliance
SULIS USDOKO
Direktorat Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management
I. RUSDONOBANU
Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
HRM Division
Erna Zubaida
Divisi Umum
General Division
M. Natsir Rahmadi
Divisi Hukum dan Kepatuhan
Legal and Compliance Division
M. Natsir Rahmadi
Divisi Keuangan dan Investasi
Finance and Investment Division
Aribowo
Divisi Akuntansi
Accounting Division
Diana Mayawati
Divisi Manajemen Risiko (PUKM)
Risk Management and Micro Enterprise Rating, Small Business, Medium Business, and Management Consultation (PUKM
Ceriandri Widuri
Divisi Klaim
Claim Division
Alexandry
Fungsional
Functional
Kantor Cabang Khusus
Special Branch Office
Wilayah
Regional
Cabang Tipe A/B/C/D
Branch Type A/B/C/D
Unit Pelayanan
Service Unit

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No. S-34/MBU/2014 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Dewan Pengawas dan Direksi menetapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In order to guarantee the implementation of professional business activities based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No. S-34 / MBU / 2014 concerning the Company's Long Term Plan (RJPP), the Board of Trustees and Directors establish the following Vision, Mission, and Corporate Culture:

VISI *VISION*

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

Become the Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development.



MISI *MISSION*

Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan "Tridharma Jamkrindo" sebagai berikut:

1. **Dharma Pertama**
   Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi.
2. **Dharma Kedua**
   Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas.
3. **Dharma Ketiga**
   Memberikan manfaat bagi *stakeholders* sesuai prinsip bisnis yang sehat.

The Company's vision is translated into missions which are named "Tridharma Jamkrindo" which contain the followings:

1. ***First Dharma***
   Undertake guarantee activities for MSME and Cooperative business development.
2. ***Second Kedua***
   Providing extensive and quality services.
3. ***Third Ketiga***
   Providing benefits to stakeholders in accordance with sound business principles.

PERSETUJUAN MANAJEMEN KUNCI ATAS VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi, Misi & Nilai Perusahaan telah mendapatkan dukungan dan persetujuan bersama dari Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan, berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No. S-34/MBU/2014 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum Jamkrindo Tahun Buku 2014-2018.

KREDO PERUSAHAAN

Kredo perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir, sebagai berikut:

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan.
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan.
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan.
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasaan pelanggan.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "TRUST".

Terpercaya
Bekerja jujur dengan integritas tinggi
Responsif
Tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap *stakeholder*
Unggul
Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan
Sehat
Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat
Terkemuka
Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan

Substansi yang terkandung di dalam visi, misi, kredo dan budaya Perusahaan telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perusahaan.

KEY MANAGEMENT APPROVAL OF THE COMPANY'S VISION AND MISSION

The Company's Vision, Mission & Core Values have received mutual support and approval from the Company's Board of Directors and Directors, based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No. S-34 / MBU / 2014 concerning the Company's Long-Term Plan (Perum Jamkrindo) 2014-2018.

COMPANY CREED

Perum Jamkrindo's company creed consists of 5 (five) items, as follows:

1. *Trusted in carrying out a guarantee business.*
2. *Responsive to changes in the business environment.*
3. *Excellent and Professional in service.*
4. *Healthy in corporate governance.*
5. *Leading in providing customer satisfaction.*

CORPORATE CULTURE

The company culture of Perum Jamkrindo consists of 5 (five) items of cultural values adopted by the Company, namely the culture of "TRUST".

Trusted
Work honestly with high integrity
Responsive
Responsive to the needs of business partners and all stakeholders
Excellence
Always improve professionalism for the achievement of added value for the company
Healthy
Always work diligently to support healthy corporate governance
Leading
Always at the forefront in providing service and performance to become a leader in the guarantee industry

The substance contained in the Company's vision, mission, creed, and culture have been acknowledged and approved by the Board of Supervisors and the President Director of the Company.

MAKNA BRANDING LOGO

THE MEANING BEHIND LOGO BRANDING

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

Logo Perusahaan terdiri dari akronim nama Perusahaan dan ikon grafis berbentuk bujur sangkar.

Akronim Perusahaan yaitu "JAMKRINDO" merupakan singkatan dari Jaminan Kredit Indonesia. Akronim ini terucap sangat familiar, dengan tujuan membangun "*Brand Awareness*" dan identitas melalui pengucapannya, yang secara psikologis akan terekam dalam otak manusia dan memungkinkan adanya pengucapan berulang-ulang.

Ikon grafis pada logo membentuk konfigurasi huruf "J" yang tegas dan bersudut, yang melambangkan ketegasan Perusahaan, orientasi yang fokus pada tujuan, serta konsistensi pada visi. Huruf "J" tersebut membentuk sebuah kunci berwarna putih, yang bermakna dasar dari motto Perusahaan yaitu "kunci Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) menuju sukses". Huruf "J" pada logo terbentuk dari 3 (tiga) garis tegas berwarna putih, yang melambangkan kesatuan dari inti pelayanan Perusahaan, yaitu Jaminan terhadap UMKMK.

Logo Perusahaan dibangun dari 2 (dua) warna, yaitu Biru dan Putih. Warna Biru melambangkan konsentrasi, ketenangan, bekerja sama, dapat menerima segala masukan, peka, cerdas dan bersatu; hal ini sejalan dengan bidang usaha Perusahaan yaitu pelayanan dan kemitraan. Sementara warna Putih merupakan lambang kesucian, kebersihan, dan ketepatan dari Perusahaan untuk mewujudkan visinya. Komposisi kedua warna tersebut memberikan nuansa ketenangan dan kematangan jasa pelayanan yang terbentuk karena keteguhan memegang budaya Perusahaan.

Pemilihan huruf yang tegas, jelas, kokoh, namun sederhana dan dinamis didasari pada visi Perusahaan, yang melambangkan kepemimpinan dengan ketangguhan dan ketegasan. Jenis bold atau cetak tebal bertujuan memperkuat makna simbolisasi nama Perusahaan dan konotasi yang relevan terhadap *core* bisnis Perusahaan.

The Company logo consists of an acronym of the Company name and a square graphic icon.

The Company's acronym, "JAMKRINDO" stands for 'Jaminan Kredit Indonesia' (Indonesian Credit Guarantee). This acronym sounds very familiar, which is appropriate with the aim of building "Brand Awareness" and identity through its pronunciation. The expectation of using this acronym is that it psychologically will be recorded in the human brain and allow for repeated pronunciation.

The graphic icon on the logo forms a strict and angular "J" letter configuration, which symbolizes firmness, an orientation that focuses on goals, and consistency in vision. The letter "J" forms a white key, which means the basis of the Company's motto is "the key to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs) towards success". The letter "J" in the logo is formed from 3 (three) white lines, which symbolize the unity of the core of the Company's service, namely the guarantee for micro, small and medium enterprises, and cooperatives.

The Company logo is designed using 2 (two) colors, namely Blue and White. Blue symbolizes concentration, calmness, cooperation, the ability to receive all input, sensitivity, smart, and unity; this is in line with the Company's business sector, namely service and partnership. While the color White is a symbol of holiness, cleanliness, and accuracy of the Company to realize its vision. The composition of the colors provides a nuance of calm and maturity in the service that is formed because of the firmness in holding on to the Company's culture.

The choice of letters that are firm, clear, sturdy, yet simple and dynamic is based on the Company's vision, which symbolizes leadership with toughness and firmness. Bold type lettering aims to strengthen the meaning of the company name and the connotations relevant to the core business of the Company.

PROFIL DEWAN PENGAWAS
PROFILE OF THE SUPERVISORY BOARD

Dalam periode penyusunan Laporan Tahunan ini, terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas, dengan masuknya Ari Wahyuni per 3 Januari 2019 menggantikan Dahlan Siamat yang telah habis masa jabatannya terhitung per 28 Juni 2018.

In the period of preparation of this Annual Report, there is a change in the composition of the Supervisory Board, with the entry of Ari Wahyuni as of January 3, 2019 replacing Dahlan Siamat whose term of duty has expired as of June 28, 2018.





PROFIL DEWAN PENGAWAS
PROFILE OF THE SUPERVISORY BOARD



SRI MULYANTO

Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Independen
Chairperson of the Supervisory Board/ Independent Supervisory Board

Periode Jabatan: 27 Oktober 2017 – 26 Oktober 2022, Periode Pertama
Term of Office: October 27, 2017 - October 26, 2022, First Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 60 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Klaten, 8 Oktober 1958/ *October 8, 1958*
Domisili/ *Domicile*: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia/ *South Jakarta Region, DKI Jakarta Province, Indonesia*

Riwayat Penunjukan
Jabatan Ketua Dewan Pengawas diemban sejak 27 Oktober 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik modal Perum Jamkrindo No. SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Ketua Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

Pendidikan
(S2) Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (1993); (S1) Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

Keahlian
Ekonomi

Pengalaman Kerja
Direktur Umum dan SDM PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Komisaris PT Antam (2011-2012), Komisaris PT Jasa Raharja (2008-2012), Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementrian BUMN (2010), Asisten Deputi Urusan Usaha Asuransi, Kementrian BUMN (2006), Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Kementrian BUMN (2002).

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Directorship Program pada tanggal 8-9 Oktober 2018 yang diselenggarakan oleh Pertamina Training & Consulting, Winning Strategy pada tanggal 11-12 Oktober 2018 yang diselenggarakan oleh Pertamina Training & Consulting, dan IBERO-AMERICAN FORUM "Guarantee and Financing System For SME" pada tanggal 25-26 Oktober 2018 yang diselenggarakan di Portugal.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Sri Mulyanto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Sri Mulyanto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Sri Mulyanto tidak memiliki saham Perusahaan

Appointment History
The position of Chairperson of the Supervisory Board has been carried out since October 27, 2017, through the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-233 / MBU / 10/2017 October 27, 2017, concerning Dismissal and Appointment of Chairperson of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. This is his first period serving as the Supervisory Board

Education
Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, United States (1993); Bachelor of Economics, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

Expertise
Economy

Work Experience
General and HR Director of PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Commissioner of PT Antam (2011-2012), Commissioner of PT Jasa Raharja (2008-2012), Assistant Deputy for Services Business III, Ministry of SOEs (2010), Assistant Deputy for Insurance Business Affairs, Ministry of SOEs (2006), Assistant Deputy of Construction Services Business Affairs, Ministry of SOEs (2002).

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Directorship Program on 8-9 October 2018 organized by Pertamina Training & Consulting, Winning Strategy on 11-12 October 2018 organized by Pertamina Training & Consulting, and IBERO-AMERICAN FORUM "Guarantee and Financing System for SME" on the 25th -26 October 2018 held in Portugal.

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Sri Mulyanto does not have concurrent positions at other companies/ institutions.

Affiliations
Sri Mulyanto does not have affiliation with other members of the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, as well as with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Sri Mulyanto does not own the Company's shares



SUBANDRIYO

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member
Periode Jabatan: 31 Desember 2013 – 31 Desember 2018, Periode Pertama
Term of Office: December 31, 2013 - December 31, 2018, First Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 63 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Demak, 11 Juni 1955/ *June 11, 1955*
Domisili/ *Domicile*: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia/
South Jakarta Region, DKI Jakarta Province, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 31 Desember 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

Pendidikan
(S1) Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981).

Keahlian
Manajemen dan Pertanian.

Pengalaman Kerja
Direktur Utama PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008-Sekarang); Direktur Utama PT Kogas Diryap Konsultan (1991-1997); Marketing Manager PT Kampsax International, Denmark (1986-1990).

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Certtified *Risk Management Officer* yang merupakan program sertifikasi yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada 27 Juli 2018.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Direktur Utama PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008-sekarang).

Hubungan Afiliasi
Subandriyo tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Subandriyo tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of Member of the Supervisory Board has been carried out since 31 December 2013 through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-435 / MBU / 2013 dated 31 December 2013 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Perum Jamkrindo Supervisory Board. This is his first period serving as the Supervisory Board Member.

Education
Bachelor of Agriculture, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981).

Expertise
Management and Agriculture.

Work Experience
President Director of PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008-Present); President Director of PT Kogas Diryap Konsultan (1991-1997); Marketing Manager of PT Kampsax International, Denmark (1986-1990).

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Certified Risk Management Officer which is a certification program held by PPM Management on July 27, 2018.

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
President Director of PT Jagadtara Unggul Kreasi (2008-present).

Affiliations
Subandriyo does not have affiliation with other members of the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Subandriyo does not own the Company's shares.



NOOR IDA KHOMSIYATI

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member
Periode Jabatan: 12 April 2016 – 11 April 2021, Periode Pertama
Term of Office: April 12, 2016 - April 11, 2021, First Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 47 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Pati, 8 Mei 1971/ *May 8, 1971*
Domisili/ *Domicile*: Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia/
East Jakarta Region, DKI Jakarta Province, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 12 April 2016 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

Pendidikan
(S2) Magister jurusan Manajemen SDM Universitas Bhayangkara (2006); (S1) Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1995).

Keahlian
Manajemen SDM.

Pengalaman Kerja
Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang); Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I Kementerian BUMN (2012-2014); Kepala Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II C Kementerian BUMN (2010-2012); Kepala Subbagian Pelayanan Hukum Kementerian BUMN (2006-2010).

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Directorship Program pada tanggal 8-9 Oktober 2018 yang diselenggarakan oleh Pertamina Training & Consulting, dan *Winning Strategy* pada tanggal 11-12 Oktober 2018 yang diselenggarakan oleh Pertamina Training & Consulting.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Noor Ida Khomsiyati tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Noor Ida Khomsiyati tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of Member of the Supervisory Board has been carried out since April 12, 2016, through the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of Capital of Perum Jamkrindo No. SK-76 / MBU / 4/2016 dated April 12, 2016 concerning Dismissal and Appointment of Members of Perum Jamkrindo Supervisory Board. This is her position as the Supervisory Board Member.

Education
Master in HR Management from Universitas Bhayangkara (2006); Bachelor of Law from Universitas Diponegoro Semarang (1995).

Expertise
HR Management.

Work Experience
Head of Legal Aid Division, Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014-present); Head of Services and Legal Aid I of the Ministry of SOEs (2012-2014); Head of Service Division and Legal Aid II C of the Ministry of SOEs (2010-2012); Head of Legal Services Subdivision of the Ministry of SOEs (2006-2010).

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Directorship Program on October 8-9 2018 organized by Pertamina Training & Consulting, and Winning Strategy on October 11-12 2018 organized by Pertamina Training & Consulting.

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Head of Legal Aid Division, Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014-present)

Affiliations
Noor Ida Khomsiyati does not have affiliation with other members of the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Noor Ida Khomsiyati does not own the Company's shares.



DIAH NATALISA

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member
Periode Jabatan: 3 Mei 2017 – 2 Mei 2022, Periode Pertama
Term of Office: May 3, 2017 - May 2, 2022, First Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 55 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Palembang, 15 November 1963 / *November 15, 1963*
Domisili/ *Domicile*: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia/
South Jakarta Region, DKI Jakarta Province, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 3 Mei 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

Pendidikan
Profesor dan (S3) Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga (1999); Magister Manajemen, University of Kentucky (1992); (S1) jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya (1987).

Keahlian
Manajemen dan ilmu Ekonomi.

Pengalaman Kerja
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB (2016-Sekarang), Koordinator KOPERTIS Wilayah II Kemdikbud RI (2008-2016), Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya.

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Diah Natalisa tidak memiliki sertifikasi profesi yang masih berlaku maupun program peningkatan kompetensi di tahun 2018

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB (2016-Sekarang)

Hubungan Afiliasi
Diah Natalisa tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Diah Natalisa tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of the Supervisory Board Member has been carried out since May 3, 2017, through the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-88 / MBU / 05/2017 dated May 3, 2017, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo. This is her first period as the Supervisory Board Member.

Education
Professor and Doctor of Economics at Universitas Airlangga (1999); Master of Management, University of Kentucky (1992); Bachelor of Management from Universitas Sriwijaya (1987).

Expertise
Economics and Management.

Work Experience
Deputy Minister of Public Services of the Ministry of National Development Planning (2016-Present), KOPERTIS Region II Coordinator of the Ministry of Education and Culture (2008-2016), Head of the Universitas Sriwijaya Master of Management Study Program.

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Diah Natalisa does not have a professional certification that is still valid and also the competency improvement program in 2018

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Deputy of Public Service Ministry of PANRB (2016-Present)

Affiliations
Diah Natalisa does not have affiliation with other members of the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Diah Natalisa does not own the Company's shares.



ARI WAHYUNI

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member
Periode Jabatan: 3 Januari 2019 - 2 Januari 2024, Periode Pertama
Term of Office: January 3, 2019 - January 2, 2024, First Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 52 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Surabaya, 9 November 1966/ *November 9, 1966*
Domisili/ *Domicile*: Bogor, Jawa Barat, Indonesia/
Bogor, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 3 Januari 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK- 02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama.

Pendidikan
(S2) Master of Public Management Carnigie- Mellon University (1994), (S1) Ilmu Hukum (keperdataan) Universitas Diponogoro (1990)

Keahlian
Keuangan dan Manajemen

Pengalaman Kerja
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 – sekarang), Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013 – September 2018), Dewan Pengawas PERURI (2013-2018), Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2009-2013), Dewan Komisaris PT PANN (2010-2013), Kepala Pusdiklat Keuangan Umum BPPK (2008-2009), Kepala Bagian Pengawasan Kebijakan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset BAPEPAM (2004-2006), Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Perundangan-undangan dan Bantuan Hukum BAPPEPAM (1990-2000), Biro Perundangan-undangan dan Bantuan Hukum BAPPEPAM (1990-2000).

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Ari Wahyuni tidak memiliki sertifikasi profesi yang masih berlaku maupun program peningkatan kompetensi di tahun 2018

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 – sekarang)

Hubungan Afiliasi
Ari Wahyuni tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Ari Wahyuni tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of Member of the Supervisory Board has been carried out since January 3, 2019 through the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-02 / MBU / 01/2019 dated January 3, 2019 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Perum Jamkrindo Supervisory Board. This is her first period as the Supervisory Board Member.

Education
Master of Public Management from Carnigie-Mellon University (1994), Bachelor of Law (Civil Law) from Universitas Diponogoro (1990)

Expertise
Finance and Management

Work Experience
Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present), Director of Investment Management Systems of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2013 - September 2018), PERURI Supervisory Board (2013-2018), Secretary of the Directorate General of Budget Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009-2013), Board of Commissioners member of PT PANN (2010-2013), Head of BPPK Public Finance Training Center (2008-2009), Head of Investment Policy Supervision Section, BAPEPAM Investment Management and Research Bureau (2004-2006), Head of Legislation Section, BAPPEPAM Legal and Legal Aid Bureau (1990-2000), BAPPEPAM Legal and Legal Aid Bureau (1990-2000).

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Ari Wahyuni does not have a professional certification that is still valid and also the competency improvement program in 2018

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present)

Affiliations
Ari Wahyuni does not have affiliation with other members of the Supervisory Boards or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Ari Wahyuni does not own the Company's shares.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PROFILE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD



HASANUDIN

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairperson of the Sharia Supervisory Board
Periode Jabatan: 1 Juli 2016-30 Juni 2019
Term of Office: July 1, 2016 - June 30, 2019

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 73 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Majalengka, 18 Juli 1945 / *July 18, 1945*
Domisili/ *Domicile*: Tangerang Selatan, Banten, Indonesia/
South Tangerang Region, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2006, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Pendidikan
(S3) Doktor bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994); (S2) Magister bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989); (S1) Sarjana jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974).

Keahlian
Asuransi Syariah.

Pengalaman Kerja
Anggota BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) (2004 – 2007), Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta (2002 – 2006), Dosen Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI DKI Jakarta.

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi DSN-MUI

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah (1998-sekarang); Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asei Syariah; Anggota Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syariah Kementrian Kesehatan RI; Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2000-sekarang); Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat (2010-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Hasanudin tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Pengawas, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Hasanudin tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of Chairperson of the Sharia Supervisory Board has been carried out since 2006, and was reappointed in 2016 through the Directors Decree No. 123 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016.

Education
(S3) Doctor of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994); (S2) Master of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989); (S1) Bachelor degree in Sharia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974).

Expertise
Sharia Insurance.

Work Experience
Member of BPKN (National Consumer Protection Agency) (2004 - 2007), Dean of the Faculty of Sharia UIN Jakarta (2002 - 2006), Lecturer in Ulema Cadre Education (PKU) of Indonesia Council of Ulema (MUI) DKI Jakarta.

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Certificate of Competency from the Sharia National Board of Indonesia Council of Ulema's Professional Certification Institute

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Chairman of the Victoria Syariah Bank Supervisory Board (1998-present); Chair of the Asuransi Asei Syariah's Supervisory Board; Member of the Health and Sharia Advisory Council of the Indonesian Ministry of Health; Member of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulema (2000-present); Chairperson of the Central Commission of Indonesian Council of Ulema's Fatwa (2010-present)

Affiliations
Hasanudin does not have an affiliate relationship with other members of the Sharia Supervisory Board or the Supervisory Board, the Board of Directors, and major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Hasanudin does not own the Company's shares.



MUHAMMAD SYAKIR SULA

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board
Periode Jabatan: 1 Juli 2016-30 Juni 2019
Term of Office: July 1, 2016 - June 30, 2019

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 54 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Poso, 12 Februari 1964 / *February 12, 1964*
Domisili/ *Domicile*: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia/
South Jakarta Region, DKI Jakarta Province, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2009, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Pendidikan
(S1) Sarjana Pertanian di Universitas Padjadjaran, Bandung (1989)

Keahlian
Asuransi Syariah.

Pengalaman Kerja
Anggota Komite Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008-2012); Deputi Humas Badan Wakaf Indonesia (2008-2014); Staff Ahli Direksi ICDIF-LPPI (2008-2015); Dewan Pengawas Syariah Bank Tabungan Negara-Unit Syariah (2010-2017); Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2015-2017); Dewan Pengawas Syariah PT Central Asia Raya (2005-2016).

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah; Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah; Sertifikat Ijtma' Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-sekarang); Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Panin Daichi Life (2015-sekarang); Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Reasuransi Nasional Indonesia (2013-sekarang)

Hubungan Afiliasi
Muhammad Syakir Sula tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Pengawas, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Muhammad Syakir Sula tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of Member of the Sharia Supervisory Board has been carried out since 2009, and was reappointed in 2016 through the Directors Decree No. 123 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016.

Education
Bachelor of Agriculture from Universitas Padjadjaran, Bandung (1989)

Expertise
Sharia Insurance.

Work Experience
Member of the Bank Indonesia Sharia Banking Committee (2008-2012); Indonesian Waqf Agency Deputy Public Relations (2008-2014); Expert Staff of ICDIF-LPPI Directors (2008-2015); Sharia Supervisory Board of the Bank Tabungan Negara - Sharia Unit (2010-2017); Member of the Financial Services Authority Sharia Financial Services Development Committee (2015-2017); PT Central Asia Raya Sharia Supervisory Board (2005-2016).

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Sharia Guarantee DPS Certification; Sharia Supervisory Competency Certificate; Ijtma 'Sanawi DPS Islamic Financial Institutions Certificate

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - Now); Chairperson of the Panin Daichi Life Sharia Supervisory Board (2015 - Now); Chairperson of PT Reasuransi Nasional Indonesia Sharia Supervisory Board (2013 - Now)

Affiliations
Muhammad Syakir Sula does not have affiliation with other members of the Sharia Supervisory Board or the Supervisory Board, the Board of Directors, and with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Muhammad Syakir Sula does not own the Company's shares.

PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE DIRECTORS



RANDI ANTO

Direktur Utama
President Director
Periode Jabatan: 21 November 2017 – 20 November 2022, Periode Pertama
Term of Office: November 21, 2017 - November 20, 2022, First Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 57 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Semarang, 12 April 1961 / *April 12, 1961*
Domisili/ *Domicile*: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia/
South Jakarta Region, DKI Jakarta Province, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Direktur Utama diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur Utama inimerupakan periode pertama.

Pendidikan
(S2) Perbankan, St Louis University, Amerika Serikat (1994), (S1) Ekonomi Jurusan Ekonomi Perusahaan, Universitas Diponegoro, Semarang (1984)

Keahlian
Ekonomi dan Perbankan

Pengalaman Kerja
Direktur Konsumer Bank BRI (2017), Direktur Human Capital & Asset Management Bank BRI (2016), Direktur Credit Risk & Asset Management Bank BRI (2015), Direktur Kepatuhan Bank BRI (2011-2015), Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya manusia Kantor Pusat Bank BRI (2009-2011), Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Palembang Bank BRI (2007-2009), Kepala Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2006-2007), Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Kantor Pusat Bank BRI (2004-2006), Pj. Wakadiv Divisi Analisis Risiko Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2001-2004), Ka.Desk Stk. Pj.Wakadiv Desk Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank BRI (2000-2001)

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Blockchain tentang Peluang dan Risiko bagi Industri Keuangan pada tanggal 26 April 2018 di Jakarta yang diselenggarakan oleh LPPI, dan *Indonesia Risk Management Outlook* 2019, pada tanggal 6 November 2018 di Jakarta yang diselenggarakan oleh LPPI.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Randi Anto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/lembaga.

Hubungan Afiliasi
Randi Anto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Randi Anto tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of President Director has been carried out since November 21, 2017 through the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-249 / MBU / 11/2017 November 21, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. This is his first period serving as President Director.

Education
Master in Banking, St Louis University, United States (1994), Bachelor of Economics majoring in Corporate Economics, Universitas Diponegoro, Semarang (1984)

Expertise
Economic and Banking.

Work Experience
Consumer Director of Bank BRI (2017), Director of Human Capital & Asset Management of Bank BRI (2016), Director of Bank BRI Credit Risk & Asset Management (2015), Compliance Director of Bank BRI (2011-2015), Head of Human Resources Management Division, Bank BRI Head Office (2009-2011), Regional Head of Palembang Regional Office, Bank BRI (2007-2009), Head of Bank BRI's Central Office Credit Division (2006-2007), Head of Compliance and Risk Management Division at Bank BRI Headquarters (2004-2006), Acting Head of Bank BRI's Head Office Credit Risk Analysis Division (2001-2004), The Head of a Desk which is equal to the level of Deputy Chairperson of the BRI Head Office Credit Administration Desk Division (2000-2001)

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Blockchain on Opportunities and Risks for the Financial Industry on 26 April 2018 in Jakarta organized by the LPPI, and the Indonesia Risk Management Outlook 2019, on 6 November 2018 in Jakarta organized by the LPPI.

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Randi Anto does not hold concurrent positions with other companies / institutions.

Affiliations
Randi Anto does not have affiliation with does not have affiliation with other members of the Board Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Randi Anto does not own the Company's shares.



AMIN MAS'UDI

Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Business Guarantee
Periode Jabatan: 7 September 2017 – 6 September 2022, Periode Pertama
Term of Office: September 7, 2017 - September 6, 2022, First Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 45 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Blora, 24 Juni 1973 / *June 24, 1973*
Domisili/ *Domicile*: Bogor, Jawa Barat, Indonesia/
Bogor, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Direktur diemban sejak 7 September 2017 sebagai Direktur Bisnis Penjaminan melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

Pendidikan
(S2) Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2011); (S1) Manajemen, Universitas Islam Bandung (1996).

Keahlian
Manajemen Agribisnis.

Pengalaman Kerja
Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non Bank, Perum Jamkrindo (2013-2017), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Perum Jamkrindo (2012-2013), Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi, Perum Jamkrindo (2012), Kepala Kantor Cabang Samarinda, Perum Jamkrindo (2010-2012), Kepala Bagian Penjaminan Perum Jamkrindo (2008-2010), Kepala Bagian Pengembangan Usaha, Perum Jamkrindo (2003-2008), Kepala Bagian Pengendalian Penjaminan, Perum Jamkrindo (2002-2003).

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) *Training Program*, pada tanggal 22 – 28 November 2018 di India, dan 4th *Working Level Council* Jamkrindo-KODIT, pada tanggal 10 – 14 Desember 2018 di Yogyakarta.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Amin Mas'udi tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain/ lembaga.

Hubungan Afiliasi
Amin Mas'udi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Amin Mas'udi tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of Director of Guarantee Business has been carried out since September 7, 2017 through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-187 / MBU / 09/2017 September 7, 2017. This is his first period serving as a Director .

Education
Masters in Agribusiness Management, Bogor Agricultural Institute (2011); Bachelor of Management, Bandung Islamic University (1996).

Expertise
Agribusiness Management.

Work Experience
Head of the Non-Bank Suretyship and Guarantee Business Division, Perum Jamkrindo (2013-2017), Head of the Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Information Technology Division, Perum Jamkrindo (2012-2013), Head of Risk Management and Information Technology Division, Perum Jamkrindo (2012), Head of Samarinda Branch Office, Perum Jamkrindo (2010-2012), Head of Guarantee Section, Perum Jamkrindo (2008-2010), Head of Business Development Section, Perum Jamkrindo (2003-2008), Head of the Guarantee Control Section, Perum Jamkrindo (2002-2003).

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Training Program, November 22-28, 2018 in India, and 4th Working Level Council Jamkrindo-KODIT, on December 10-14, 2018 in Yogyakarta.

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Amin Masudi does not have concurrent positions in other companies / institutions.

Affiliations
Amin Masudi does not have affiliation does not have affiliation with other members of the Board Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Amin Masudi does not own the Company's shares.



KADAR WISNUWARMAN

Direktur Operasional dan Jaringan
Operations and Network Director
Periode Jabatan: 21 November 2017 – 20 November 2022, Periode Pertama
Term of Office: November 21, 2017 - November 20, 2022, First Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 47 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Malang, 31 Oktober 1971 / *October 31, 1971*
Domisili/ *Domicile*: Cibubur, Jawa Barat, Indonesia/
Cibubur, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Direktur diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/ MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

Pendidikan
(S2) Magister Manajemen, Universitas Hasanuddin (2002); (S1) Manajemen, Universitas Airlangga (1996)

Keahlian
Manajemen

Pengalaman Kerja
Pranata Utama Perum Jamkrindo untuk ditugaskan sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Kepala Kantor Cabang Jakarta Khusus, Perum Jamkrindo (2013-2014), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi, Perum Jamkrindo (2013), Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor Cabang Denpasar, Perum Jamkrindo (2011-2012), Kepala Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2010-2011), Kepala Bagian Penjaminan Kantor Pusat, Perum Jamkrindo (2006-2010), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Jakarta, Perum Jamkrindo (2004-2006), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Bandung, Perum Jamkrindo (2004), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2003-2004).

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Kadar Wisnuwarman tidak memiliki sertifikasi profesi yang masih berlaku maupun program peningkatan kompetensi di tahun 2018

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Kadar Wisnuwarman tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/ lembaga lain

Hubungan Afiliasi
Kadar Wisnuwarman tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Kadar Wisnuwarman tidak memiliki saham Perusahaan

Appointment History
The position of Director has been carried out since November 21, 2017 through the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-249 / MBU / 11/2017 dated November 21, 2017, concerning the Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. This is his first period serving as a Director

Education
Master in Management, Universitas Hasanuddin (2002); Bachelor of Management, Universitas Airlangga (1996)

Expertise
Management

Work Experience
Main Institution's Officer of Perum Jamkrindo to be assigned as President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Head of Jakarta Special Branch Office, Perum Jamkrindo (2013-2014), Head of Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Claim and Subrogation Division, Perum Jamkrindo (2013), Corporate Secretary of Perum Jamkrindo (2012-2013), Head of Denpasar Branch Office, Perum Jamkrindo (2011-2012), Head of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2010-2011), Head of Guarantee Division of the Head Office, Perum Jamkrindo (2006-2010), Head of Jakarta Branch Office Operational Section, Perum Jamkrindo (2004-2006), Head of Bandung Branch Office Operational Section, Perum Jamkrindo (2004), Head of Pontianak Branch Office Operations, Perum Jamkrindo (2003-2004)

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Kadar Wisnuwarman does not have a professional certification that is still valid and also the competency improvement program in 2018

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Kadar Wisnuwarman does not have concurrent positions at other companies/ institutions

Affiliations
Kadar Wisnuwarman does not have an affiliate relationship to other members of the Board of Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as major shareholders

Jamkrindo Share Ownership
Kadar Wisnuwarman does not own the Company's shares



SULIS USDOKO

Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs and Compliance
Periode Jabatan: 7 September 2017 – 6 September 2022, Periode Pertama
Term of Office: September 7, 2017 - September 6, 2022, First Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 58 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Semarang, 5 September 1960 / *September 5, 1960*
Domisili/ *Domicile*: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia/
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Direktur diemban sejak 7 September 2017 melalui Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/ MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Sebelum pengangkatannya di tahun 2017, Sulis Usdoko belum pernah menjabat pada jajaran Direksi Perum Jamkrindo.

Pendidikan
(S2) Ekonomi Manajemen, Universitas Brawijaya (2003); (S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya (1985).

Keahlian
Ekonomi dan Manajemen

Pengalaman Kerja
Direktur Bidang *Collection Management, Asset Management, Legal* dan Dokumen Perkreditan, Bank BTN (2015-2017), Kepala Divisi Bidang Dana Pihak Ketiga Retail dan Jasa-jasa, Bank BTN (2011-2015), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Bank BTN (2008-2011), Kepala Kantor Cabang Kelas 1, Kelas 1, dan Kepala Kantor Cabang Utama, Bank BTN (1997-2010), Staf hingga Kepala Bagian, Bank BTN (1986-1995).

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
Risk Management Certification Refreshment pada tanggal 12-13 Juli 2018 di Bali yang diselengarakan oleh Banker *Association for Risk Management* (BARa), Workshop Pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penjaminan pada tanggal 1 November 2018 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), IBERO-AMERICAN FORUM "*Guarantee and Financing System For SME*" pada tanggal 25-26 Oktober 2018 di Portugal.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
Sulis Usdoko tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Sulis Usdoko tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
Sulis Usdoko tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of Director has been carried out since September 7, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs, as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-187 / MBU / 09/2017 dated September 7, 2017 regarding the Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. This is his first period serving as a Director. Prior to his appointment in 2017, Sulis Usdoko had never served on the Board of Directors of Perum Jamkrindo.

Education
Master in Management Economics, Universitas Brawijaya (2003); Bachelor Degree in Civil Engineering, Universitas Brawijaya (1985).

Expertise
Economics and Management

Work Experience
Director of Collection Management, Asset Management, Legal and Credit Documents, Bank BTN (2015-2017), Head of Third Party Funds Retail and Services Division, BTN Bank (2011-2015), Head of Information Technology Division, Bank BTN (2008 -2011), Head of Branch Office Class 1, Class 1, and Head of Main Branch Offices, BTN Bank (1997-2010), Staff to Head of Section, Bank BTN (1986-1995).

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
Risk Management Certification Refreshment on 12-13 July 2018 in Bali held by the Banker Association for Risk Management (BARa), Workshop on Debriefing and Preparation of the Competency Map for the Indonesian National Work Competency Standards (RSKKNI) for Guarantee Business on November 1, 2018 in Jakarta organized by the Financial Services Authority (OJK), IBERO-AMERICAN FORUM "Guarantee and Financing System for SME" on October 25-26 2018 in Portugal.

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
Sulis Usdoko does not have concurrent positions at other companies / institutions.

Affiliations
Sulis Usdoko does not have affiliation with other members of the Board of Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
Sulis Usdoko does not own the Company's shares.



I. RUSDONOBANU

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management
Periode Jabatan: 15 Januari 2018 – 14 Januari 2023, Periode Kedua
Term of Office: January 15, 2018 - January 14, 2023, Second Period

Warga negara Indonesia/ *Indonesian citizen*
Usia/ *Age*: 59 tahun/ *Years Old*
Kelahiran/ *Born*: Balikpapan, 26 Februari 1959 / *February 26, 1959*
Domisili/ *Domicile*: Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia/
East Jakarta Region, DKI Jakarta Province, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Jabatan Direktur diemban sejak 15 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-22/MBU/01/2018, untuk periode kedua.

Pendidikan
(S2) Master Of Science Jurusan Ekonomi North Eastern University Boston, Amerika Serikat (1995); (S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Pancasila (1988); (S1) Sarjana Muda Akuntansi STAN Jakarta (1981).

Keahlian
Ekonomi dan Manajemen

Pengalaman Kerja
Plt Direktur Utama Perum Jamkrindo (7 September 2017 – 21 November 2017), Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010-sekarang); Anggota Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011); Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011); Anggota Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2011); Anggota Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003-2009); Asisten Deputi Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN (2006-2010); Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA Kementerian BUMN (2006); Pj. Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian Kementerian BUMN (2002-2006).

Sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018
I. Rusdonobanu tidak memiliki sertifikasi profesi yang masih berlaku maupun program peningkatan kompetensi di tahun 2018

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain/Lembaga
I. Rusdonobanu tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
I. Rusdonobanu tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Pengawas maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Kepemilikan Saham Jamkrindo
I. Rusdonobanu tidak memiliki saham Perusahaan.

Appointment History
The position of Director has been carried out since January 15, 2013 through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Owner of Capital of Perum Jamkrindo No. SK-12 / MBU / 2013 dated January 15, 2013 concerning Dismissal, Change of Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, j.o Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Owner of Capital of Perum Jamkrindo No. SK-44 / MBU / 2014 concerning Changes in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo. He has served one priod as a director. He was reappointed based on the Decree of the State Minister of SOEs as the Owner of the Capital of Perum Jamkrindo No. SK-22 / MBU / 01/2018.

Education
Master of Science, Department of Economics North Eastern University Boston, United States (1995); Bachelor of Economics majoring in Corporate Management, Universitas Pancasila (1988); Bachelor of Accounting from STAN Jakarta (1981).

Expertise
Economics and Management.

Work Experience
Acting President Director of Perum Jamkrindo (September 7, 2017 - November 21, 2017), Assistant Deputy for Business Services II Ministry of SOEs (2010-present); Member of the Commissioner of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011); Member of the Commissioner of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011); Member of the Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2011); Member of the Commissioner of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003-2009); Assistant Deputy of Plantation Business II, Ministry of SOEs (2006-2010); Head of IIA Plantation Business Division, Ministry of SOEs (2006); Acting Head of Agriculture Production Facility Business Department of the Ministry of SOEs (2002-2006).

Professional Certification and Competency Development Program in 2018
I. Rusdonobanu does not have a professional certification that is still valid and also the competency improvement program in 2018

Concurrent Position in Other Companies/Institutions
I. Rusdonobanu does not have concurrent positions at other companies / institutions.

Affiliations
I. Rusdonobanu does not have affiliation with other members of the Board Directors, the Supervisory Board or the Sharia Supervisory Board, as well as with major shareholders.

Jamkrindo Share Ownership
I. Rusdonobanu does not own the Company's shares.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
PROFILE OF EXECUTIVE OFFICERS



Abdul Bari
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat sejak: 3 Februari 2017

Warga Negara: Indonesia
Usia: 43 tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
21 Agustus 2015
Pendidikan: Dr. Manajemen SDM, Universitas Negeri Jakarta, 2014

Serving the position since: February 3, 2017

Citizen: *Indonesian*
Age: *43 years old*
Domicile: *Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
August 21, 2015
Education: *Doctor of HR Management from Universitas Negeri Jakarta, 2014*



Mohamad Adhy Prayitno
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Control Unit

Menjabat sejak: 12 November 2018

Warga Negara: Indonesia
Usia: 57 tahun
Domisili: Sleman, Yogyakarta, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
12 November 2018
Pendidikan: S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2003)

Serving the position since: November 12, 2018

Citizen: *Indonesian*
Age: *57 years old*
Domicile: *Sleman, Yogyakarta, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
November 12, 2018
Education: *Master of Management from Universitas Gadjah Mada, 2003*



Alia Nur Fitri
Kepala Divisi Perencanaan Strategis (d/h Divisi Perencanaan dan Pengembangan)
Head of Strategic Planning Division (previously Planning and Development Division)

Menjabat sejak: 19 September 2017

Warga Negara: Indonesia
Usia: 47 tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
3 September 2014
Pendidikan: STP.,M.M, Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 1997

Serving the position since: September 19, 2017

Citizen: *Indonesian*
Age: *47 years old*
Domicile: *Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
September 3, 2014
Education: *Bachelor of Agricultural Technology, Master of Management from Universitas Gadjah Mada, 1997*



Hafizah

Kepala Divisi Bisnis 1 (d/h Divisi Bisnis Penjaminan Program)
Head of Business Division 1 (previously Business Program Guarantee Division)

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018

Warga Negara: Indonesia
Usia: 53 tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
3 September 2014
Pendidikan: M.M, Manajemen, Universitas Persada Indonesia, 2002

Serving the position since: August 31, 2018

Citizen: *Indonesian*
Age: *53 years old*
Domicile: *Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
September 3, 2014
Education: *Master of Management from, Universitas Persada Indonesia, 2002*



Suwarsito

Kepala Divisi Bisnis 2 (d/h Divisi Bisnis Penjaminan Bank)
Head of Business Division 2 (previously Business Bank Guarantee Division)

Menjabat sejak: 30 Agustus 2016

Warga Negara: Indonesia
Usia: 47 tahun
Domisili: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
2 Januari 1998
Pendidikan: S.E, M.M, Manajemen, Universitas Hasanuddin, 2007

Serving the position since: August 30, 2016

Citizen: *Indonesian*
Age: *47 years old*
Domicile: *Bekasi, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
January 2, 1998
Education: *Bachelor of Economics, Master of Management, Management, Universitas Hasanuddin, 2007*



M. Kisworo

Kepala Divisi Bisnis 3 (d/h Divisi Bisnis Suretyship & Penjaminan Non-Bank)
Head of Business Division 3 (previously Business Suretyship & Non-Bank Guarantee Division)

Menjabat sejak: 19 September 2017

Warga Negara: Indonesia
Usia: 45 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
2 Februari 2000
Pendidikan: S.E, M.M, Manajemen, Universitas Sumatera Utara, 2010

Serving the position since: September 19, 2017

Citizen: *Indonesian*
Age: *45 years old*
Domicile: *Bogor, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
February 2, 2000
Education: *Bachelor of Economics, Master of Management, Management, University of North Sumatra, 2010*



Sudibyo Utomo

Kepala Divisi Penunjang Bisnis
Head of Business Support Division

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018

Warga Negara: Indonesia
Usia: 53 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
21 Januari 1998
Pendidikan: M.M, Manajemen, Universitas Padjadjaran, 2012

Serving the position since: August 31, 2018

Citizen: *Indonesian*
Age: *53 years old*
Domicile: *Bogor, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
January 21, 1998
Education: *Master of Management, Management, Universitas Padjadjaran, 2012*



Yanti Rachmawati

Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah
Head of Sharia Guarantee Business Desk

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018

Warga Negara: Indonesia
Usia: 44 tahun
Domisili: Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
21 Januari 1998
Pendidikan: M.M, Manajemen, Universitas Padjadjaran, 2012

Serving the position since: August 31, 2018

Citizen: *Indonesian*
Age: *44 years old*
Domicile: *Bandung, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
January 21, 1998
Education: *Master of Management, Management, Universitas Padjadjaran, 2012*



Lusy Susanti

Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang
Head of Warehouse Receipt System Guarantee Desk

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018

Warga Negara: Indonesia
Usia: 42 tahun
Domisili: Pekanbaru, Riau, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
11 Januari 2000
Pendidikan: S.E, Akuntansi, Universitas Andalas, 1999

Serving the position since: August 31, 2018

Citizen: *Indonesian*
Age: *42 years old*
Domicile: *Pekanbaru, Riau, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
January 11, 2000
Education: *Bachelor of Economics, Accounting, Universitas Andalas, 1999*



Mahfudh Sudiyono

Kepala Divisi Teknik & Administrasi Bisnis
Head of Engineering & Business Administration Division

Menjabat sejak: 10 Desember 2015

Warga Negara: Indonesia
Usia: 45 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
2 Januari 1997
Pendidikan: S.E, Manajemen, Universitas Brawijaya, 1998

Serving the position since: December 10, 2015

citizen: *Indonesian*
Age: *45 years old*
Domicile: *Bogor, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
January 2, 1997
Education: *Bachelor of Economics, Management, Universitas Brawijaya, 1998*



Henry Nur Irianto

Kepala Divisi Jaringan dan Layanan
Head of Network and Service Division

Menjabat sejak: 8 Maret 2017

Warga Negara: Indonesia
Usia: 53 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
1 Januari 1991
Pendidikan: M.M, Manajemen, STM Labora, 1999

Serving the position since: March 8, 2017

citizen: *Indonesian*
Age: *53 years old*
Domicile: *Bogor, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
January 1, 1991
Education: *Master of Management, Management, STM Labora, 1999*



Hadi Aribowo

Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division

Menjabat sejak: 10 Desember 2015

Warga Negara: Indonesia
Usia: 42 tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
26 September 2008
Pendidikan: S.T, Teknik Sipil, Universitas Indonesia, 2002

Serving the position since: December 10, 2015

citizen: *Indonesian*
Age: *42 years old*
Domicile: *Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
September 26, 2008
Education: *Bachelor of Engineering, Civil Engineering, University of Indonesia, 2002*



Achmad Muhlison

Kepala Desk Subrogasi
Head of Subrogation Desk

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018

Warga Negara: Indonesia
Usia: 47 tahun
Domisili: Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
2 Januari 1997
Pendidikan: M.M, Manajemen Keuangan, Universitas Andalas, 2002

Serving the position since: August 31, 2018

citizen: *Indonesian*
Age: *47 years old*
Domicile: *Bandung, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
January 2, 1997
Education: *Master of Management, Financial Management, Universitas Andalas, 2002*



Erna Zubaida

Kepala Divisi MSDM
Head of HRM Division

Menjabat sejak: 19 September 2017

Warga Negara: Indonesia
Usia: 48 tahun
Domisili: Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
2 Juli 1996
Pendidikan: S.E, Manajemen Ekonomi, Universitas Diponegoro, 1995

Serving the position since: September 19, 2017

citizen: *Indonesian*
Age: *48 years old*
Domicile: *Bogor, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
July 2, 1996
Education: *Bachelor of Economics, Economic Management, Universitas Diponegoro, 1995*



M. Natsir Rahmadi

Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan/ Plt. Kepala Divisi Umum
Head of Legal and Compliance Division/ Act. Head of General Division

Menjabat sejak: 1 Agustus 2016

Warga Negara: Indonesia
Usia: 46 tahun
Domisili: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
1 Juli 2003
Pendidikan: S.H, Hukum, Universitas Brawijaya, 1999

Serving the position since: August 1, 2016

citizen: *Indonesian*
Age: *46 years old*
Domicile: *Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
July 1, 2003
Education: *Bachelor of Law, Law, Universitas Brawijaya, 1999*



Aribowo

Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
Head of Finance and Investment Division

Menjabat sejak: 1 Agustus 2016

Warga Negara: Indonesia
Usia: 52 tahun
Domisili: Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
2 Januari 1991
Pendidikan: Drs. AK. M.M, Manajemen, Universitas Andalas, 2002

Serving the position since: August 1, 2016

citizen: *Indonesian*
Age: *52 years old*
Domicile: *Sidoarjo, East Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
January 2, 1991
Education: *Drs. AK. Master of Management, Management, Universitas Andalas, 2002*



Diana Mayawati

Kepala Divisi Akuntansi (d/h Divisi Akuntansi & PKBL)
Head of Accounting Division (previously Accounting & PKBL Division)

Menjabat sejak: 10 Desember 2015

Warga Negara: Indonesia
Usia: 43 tahun
Domisili: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
4 Mei 2015
Pendidikan: S.E, Akuntansi, Universitas Trisakti, 1998

Serving the position since: December 10, 2015

citizen: *Indonesian*
Age: *43 years old*
Domicile: *Bekasi, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
May 4, 2015
Education: *Bachelor of Economics, Accounting, Trisakti University, 1998*



Ceriandri Widuri

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM) (d/h Divisi Manajemen Risiko)
Head of Risk Management and Micro Enterprise Rating, Small Business, Medium Business, and Management Consultation (PUKM) (previously Risk Management Division)

Menjabat sejak: 19 September 2017

Warga Negara: Indonesia
Usia: 47 tahun
Domisili: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
2 Januari 1997
Pendidikan: S.E, MBA, Manajemen Strategic, Universitas Gadjah Mada, 2009

Serving the position since: September 19, 2017

citizen: *Indonesian*
Age: *47 years old*
Domicile: *Bekasi, West Java, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
January 2, 1997
Education: *Bachelor of Economics, MBA, Strategic Management, Universitas Gadjah Mada, 2009*



Alexandry

Kepala Divisi Klaim
Head of Claim Division

Menjabat sejak: 31 Agustus 2018

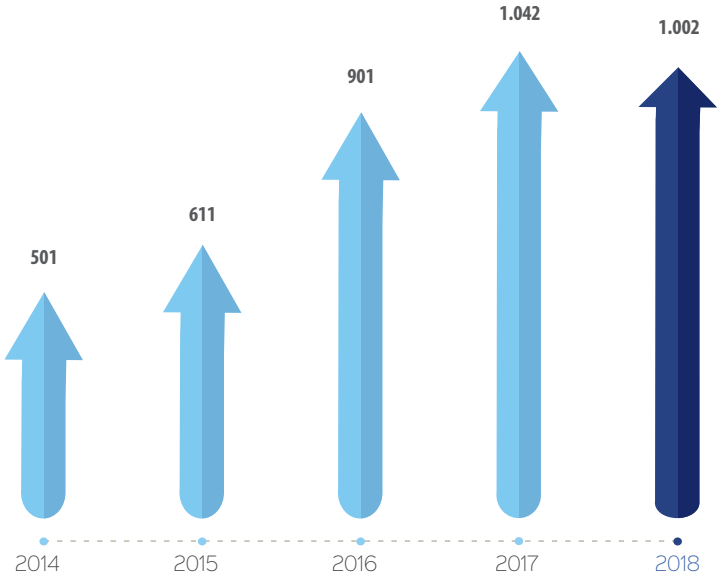
Warga Negara: Indonesia
Usia: 41 tahun
Domisili: Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Bergabung di Jamkrindo:
1 Juli 2003
Pendidikan: S.E, S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah, 2001

Serving the position since: August 31, 2018

citizen: *Indonesian*
Age: *41 years old*
Domicile: *Palembang, South Sumatra, Indonesia*
Joined Jamkrindo:
July 1, 2003
Education: *Bachelor of Economics, Accounting, Universitas Muhammadiyah, 2001*

DEMOGRAFI KARYAWAN
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

Perkembangan Jumlah Karyawan Tahun 2014-2018 (orang)
Development Trend in the Number of Employees in 2014-2018 (in number of people)



1.002 karyawan yang tercatat per 31 Desember 2018, berkarya di Perusahaan dengan mendedikasikan diri kepada dunia UMKM dan Koperasi melalui 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) Perum Jamkrindo yang tersebar di seluruh Indonesia.

As much as 1,002 employees are registered as of December 31, 2018. They work in the Company by dedicating themselves to the world of MSMEs and Cooperatives through 9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Units (KUP) of Perum Jamkrindo which are spread throughout Indonesia.

Uraian tentang pengembangan kekaryawanan Perusahaan dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam bagian pembahasan Sumber Daya Manusia.

A description of the development of the Company's employees can be seen in the chapter on Business Support Functions in the Human Resources section.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS/CAPITAL OWNER

RINCIAN PEMEGANG SAHAM/ PEMILIK MODAL

Perusahaan memiliki bentuk Perusahaan Umum (Perum) yang tidak mengenal saham dalam sistem kepemilikannya. Namun demikian, kepemilikan dalam bentuk penyertaan modal dapat disampaikan sebagai berikut:

DETAILS OF SHAREHOLDERS / CAPITAL OWNERS

The Company is a Public Corporation; the ownership of its shares is 100% belong to the Republic of Indonesia. However, ownership in the form of equity participation can be conveyed as follows:

Penyertaan Modal pada Perum Jamkrindo per 31 Desember 2018

Equity Participation at Perum Jamkrindo as of December 31, 2018

Pemilik Modal *Capital Owner*	**Nominal** *Nominal Value (Rp/IDR)*	**Persentase Kepemilikan** *Percentage of Ownership (%)*
Negara Republik Indonesia (Penyertaan Modal Negara)	7.638.733.365.160	100,00%
The Republic of Indonesia (State Equity Participation)	*7,638,733,365,160*	

Komposisi Kepemilikan Perum Jamkrindo

Perum Jamkrindo's Ownership Composition



INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang saham utama Perusahaan dalam hal ini adalah Pemilik Modal seluruhnya sebesar 100,00% adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Melalui kepemilikan tunggal tersebut, Perusahaan memiliki status hukum Perusahaan Umum dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

INFORMATION ABOUT MAJOR SHAREHOLDERS

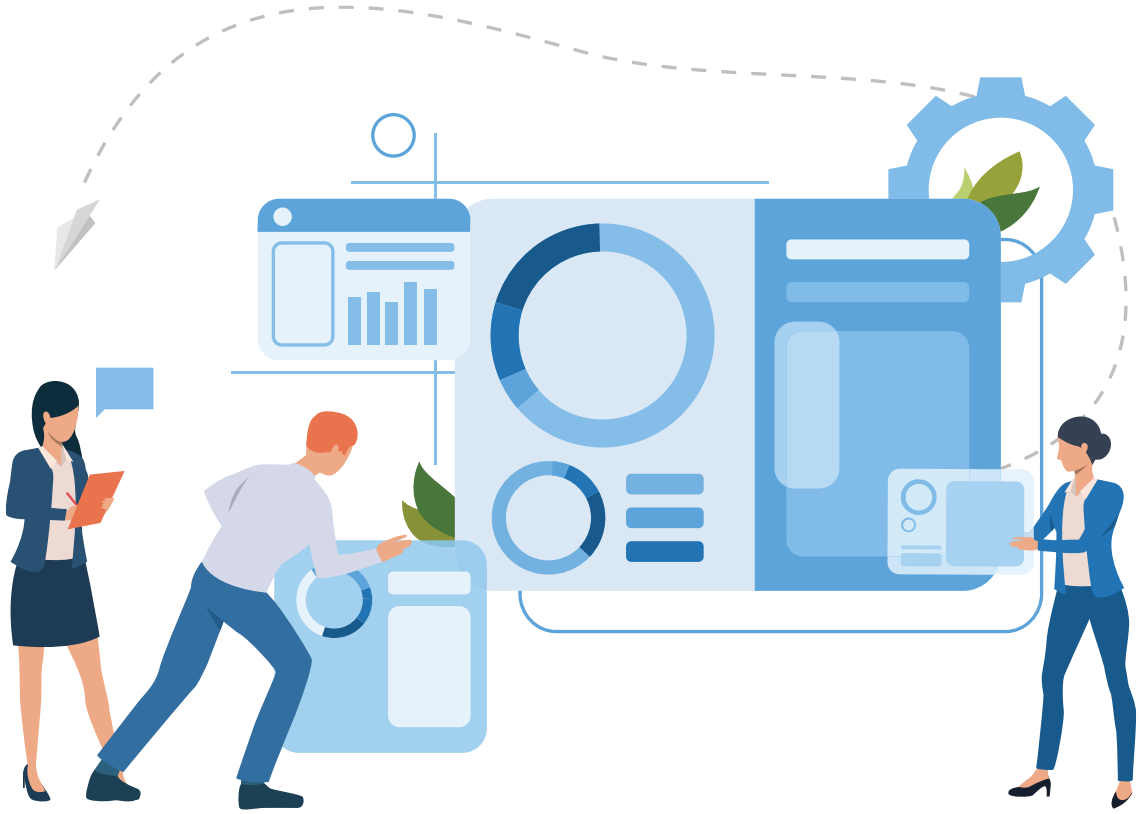
The major shareholders of the Company in this case are the owners of the total capital of 100.00%, namely the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia / Ministry of State Owned Enterprises. Through sole ownership, the Company has the legal status of a Public Corporation and becomes a State-Owned Enterprise (BUMN).

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASING-MASING DI BAWAH 5 (LIMA) PERSEN

Hingga 31 Desember 2018, Perusahaan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, dan Program Kepemilikan Saham Manajemen. Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan modal sesuai dengan penjelasan di atas. Untuk itu, hingga 31 Desember 2018, tidak ada pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

INFORMATION ABOUT SHARE OWNERSHIP BY MANAGEMENT AND GROUP OF SHAREHOLDERS - EACH UNDER 5 (FIVE) PERCENT

As of December 31, 2018, the Company does not have an Employee Share Ownership Program policy, and a Management Share Ownership Program. The Company also does not conduct Initial Public Offering which allows the Company's share to be owned by the public. All capital ownership is in accordance with the previous explanation. For this reason, as of December 31, 2018, there were no Company officials or employees who owned the Company's shares.



DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI/ *JOINT VENTURE (JV)/SPECIAL PURPOSE VEHICLE* (SPV)

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATION / JOINT VENTURE (JV) / SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

Entitas Anak *Subsidiaries*	**Bidang Usaha** *Line of Business*	**Domisili** *Domicile*	**Tahun Pendirian** *Year of Establish-men*	**Tahun Beroperasi** *Year of Operation*	**Kepemilikan Saham** *Share Ownership (%)*		**Jumlah Aset (Rp-juta)** *Total Assets (in million IDR)*		**Status Operasi** *Operation-al Status*
					2018	**2017**	**2018**	**2017**	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah	Jakarta	2014	2014	99,997%	99,995%	799.975	354.759	Beroperasi *Operation*

> Selain daftar entitas anak di atas, Perum Jamkrindo tidak memiliki entitas asosiasi dan/atau penyertaan saham kepada entitas manapun.
>
> *Besides the subsidiaries listed above, Perum Jamkrindo does not associate with and/or has equity participation in any entity.*

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH ("JAMSYAR")

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No. 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014; kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, serta Surat OJK No. S-34/nB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung *tagline* "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, responsif, dan Inovatif".

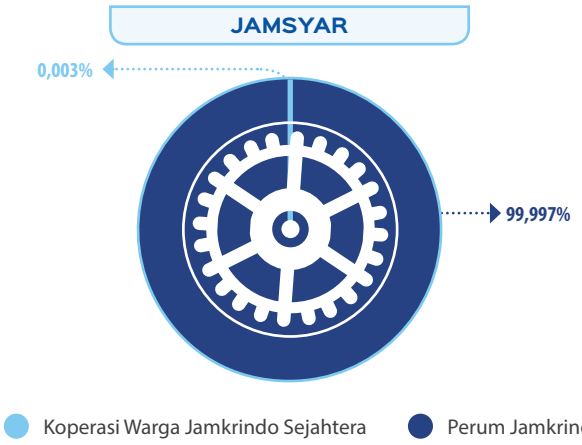
Informasi tentang kepemilikan, kinerja, dan manajemen Jamsyar adalah sebagai berikut:

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH ("JAMSYAR")

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014 and obtained an operational permit on November 7, 2014. Jamsyar was formed through Notarial Deed No. 68 made by the Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014 which was registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-26462.40.10.2014 concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of PT Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014; It received an operation permit from the Financial Services Authority (FSA) through the FSA letter No. KEP-134 / d.05 / 2014 November 7, 2014 concerning the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and FSA Letter No. S-34 / nB.223 / 2015 January 15, 2015 concerning the Listing of New Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the Sharia Guarantee Services business, with the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative".

Information about Jamsyar's ownership, performance and management is as follows:

Kepemilikan Saham Jamsyar
Jamsyar Share Ownership



Ikhtisar Kinerja Keuangan Jamsyar
Jamsyar Financial Performance Overview

Rp-juta *In million IDR*	**2018** ***(Rp)*** ***(IDR)***	**2017** *(Rp)* *(IDR)*
Pendapatan/ *Income*	160.862.271.701	73.908.738.231
Beban Usaha/ *Operating Expenses*	60.463.493.198	40.918.702.236
Laba Bersih/ *Net Profit*	22.543.355.454	11.189.244.746
Laba Komprehensif/ *Comprehensive Profit*	16.634.047.541	14.352.353.247
Aset/ *Assets*	746.638.381.732	469.331.790.157
Liabilitas/ *Liabilities*	406.145.052.263	195.472.508.229
Ekuitas/ *Equity*	340.493.329.469	273.859.281.928

Manajemen Jamsyar
Jamsyar Management

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	
Komisaris Utama/ *President Commissioner*	Bakti Prasetyo
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*	Muhammad Syakir Sula
Komisaris/ *Commissioner*	Aribowo
Direksi *Board of Directors*	
Direktur Utama/ *President Director*	Gatot Suprabowo
Direktur Bisnis/ *Business Director*	Gatot Suprabowo
Direktur Operasional/ *Director of Operations*	Achmad Sonhadji
Direktur Keuangan, SDM & Umum/ *Director of Finance, HR & General Affairs*	Endang Sri Winarni

STRUKTUR GRUP
GROUP STRUCTURE



NEGARA REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

100,00%

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

99,997%

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE

Hingga tanggal 31 Desember 2018 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan bukan merupakan Perseroan Terbatas (PT) dan berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perusahaan dicatatkan.

As of December 31, 2018 and the date of submission of this data/information, the Company is not a Limited Liability Company (PT); it is a Public Corporation. The Company also does not conduct Initial Public Offering and does not trade its shares on any stock exchange. Therefore, there is no information regarding the year of issuance of shares, number of shares, share value, share price for each corporate action, the number of shares listed after each corporate action, and the name of the share in which the company shares are listed.

KRONOLOGIS PENERBITAN EFEK LAINNYA
CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE

Hingga tanggal 31 Desember 2018 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan tidak menerbitkan efek apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of December 31, 2018 and the date of submission of this data/information, the Company does not issue any securities. Therefore, there is no information regarding the name of other securities, the year of other securities issuance, the interest rate/reward of other securities, and other securities maturity dates; value of other securities; name of the exchange in which other securities are listed; and securities ratings.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
PT Icon Plus	Jl. KH Abdul Rochim No.1 Kuningan Barat Mampang Jakarta Selatan 12710	Perpanjangan Jangka waktu berlangganan koneksi *link back up* VPN IP *Host to Host* BRI *Extension of time period for subscribing to a connection to the BRI IP Host to Host VPN back-up link*	Rp1.650.000,00/bulan *IDR1,650,000.00 / month*	1 tahun s.d 14 Januari 2019 *1 year until January 14, 2019*
PT Sucofindo	Jl. Raya Pasar Minggu, RT.13/RW.4, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pengadaan Audit Eksternal ISO 9001:2015 *Procurement of ISO 9001: 2015 External Audit*	Rp51.800.000,00 *IDR51,800,000.00*	s.d 13 Maret 2018 *until March 13, 2018*
PT Sigma Pro 77	Jl. Nusa Indah Raya Kav. 74 RT. 04/13 Kel. Serua Kec. Ciputat	Jasa In House Konsultan (*Retainer*) Bidang Konstruksi *In House Consultants (Retainer) Services in the Construction Sector*	Rp215.160.000,00 *IDR215,160,000.00*	s.d 31 Desember 2018 *until December 31, 2018*
PT Inti Marketing Komunika (Inmark)	Jl. H. Nawi - Jl.H. Syaip No.16 D Gandaria Selatan,Cilandak Jakarta 12420	Pengadaan Pembuatan *Annual Report* Tahun 2017 *The Making of 2017 Annual Report*	Rp498.487.000,00 *IDR498,487,000.00*	s.d 25 Juli 2018 *until July 25, 2018*
PT Mitrasindo Jayatama	Jl Arteri Kelapa Dua Raya II Bl B%2F40-B Kebon Jeruk Kebon Jeruk Jakarta Barat DKI Jakarta, RT.11/RW	Pengadaan Iklan *Billboard* *Procurement of Billboard Ads*	Rp2.150.000.000,00 *IDR2.150,000,000.00*	1 tahun s.d 25 April 2019 *1 year until April 25, 2019*
KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK) *Hertanto Grace Karunawan (HGK) Public Accounting Firm*	Palma Tower, 18th Floor Lot F & G Jl. RA Kartini II-S Kav.06 TB Simatupang Jakarta Selatan 12310	Jasa Konsultan *Review* KPI *KPI Review Consultant Services*	Rp49.500.000,00 *IDR49,500,000.00*	s.d 20 Maret 2018 *until March 20, 2018*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
PT Infobank Institusi Keuangan Indonesia	Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710	Jasa Konsultan pembuatan SOP dan alat ukur (*tools*) Analisa Kelayakan Usaha UMKM *Consultant services for the making SOPs and tools for analyzing the feasibility of MSME businesses*	Rp210.705.000,00 *IDR210,705,000.00*	s.d 25 April 2018 *until April 25, 2018*
PT FED Insight Indonesia	Jl. Bend. Jatiluhur No.29, RT.5/RW.2, Bend. Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	Jasa konsultan penataan ulang struktur penggajian *Consultant services for the rearranging of payroll structure*	Rp385.000.000,00 *IDR385,000,000.00*	s.d 30 April 2018 *until April 30, 2018*
KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK) *Hertanto Grace Karunawan (HGK) Public Accounting Firm*	Palma Tower, 18th Floor Lot F & G Jl. RA Kartini II-S Kav.06 TB Simatupang Jakarta Selatan 12310	Jasa audit prosedur program PKBL BUMN Hadir Untuk Negeri di Babel *Audit services for the SOEs Partnership and Community Development Program named 'Hadir Untuk Negeri' in Bangka Belitung*	Rp143.000.000,00 *IDR143,000,000.00*	s.d 27 April 2018 *until April 27, 2018*
PT Bina Persada Kinerja (BPXcellence)	Gedung AEKI 3rd Floor, Jalan R.P. Soeroso No. 20, RT.9/RW.5, Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat,103	Jasa Konsultan Penyusunan *Job Desk* *Job Desk Preparation Consultant Services*	Rp158.365.900,00 *IDR158,365,900.00*	s.d 18 Mei 2018 *until May 18, 2018*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Jasa Layanan Koneksi Internet *Internet Connection Services*	Rp14.300.000,00/bulan *IDR14,300,000.00 / month*	1 tahun s.d 31 Maret 2019 *1 year until March 31, 2019*
PT Telekomunikasi Indonesia	Menara multimedia 8th floor Jl.Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat 10110	Pengadaan Layanan *Host to Host* Dukcapil *Procurement of Host to Host Dukcapil Services*	Rp2.750.000,00/1x instalasi Rp2.310.000,00/bulan *IDR2,750,000.00 / 1x installation* *IDR2,310,000.00 / month*	1 tahun s.d 29 Maret 2019 *1 year until March 29, 2019*
PT Binaman Utama (PPM Consulting)	Jl. Menteng Raya 9-19 Jkt 10340	Jasa Konsultan *Review* dan Penyempurnaan *Integrated* ERM *Review and Improvement of Integrated ERM Consultant Services*	Rp262.660.750,00 *IDR262,660,750.00*	s.d 31 Agustus 2018 *until August 31, 2018*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
CV Tata Permata Plantation	Jalan Mendut IV No.9 Pondok unggu Permai - Bekasi	Jasa Kontrak Servis STP (*Sewage Treatment Plan*) Gedung Jamkrindo	Rp8.085.000,00/bulan	1 tahun s.d 30 April 2019
		STP (Sewage Treatment Plan) Contract Services in Jamkrindo Building	*IDR8,085,000.00/month*	*1 year until April 30, 2019*
KAP HMR	Jl. Prof. Dr. Soepomo.SH No.178A Jak-Sel 12870	Jasa Konsultan Rekonsiliasi Data Operasional Dengan Data Akuntansi Atas Saldo IJP dan Turunan nya Bulan Februari s/d Desember 2018	Rp363.000.000,00	s.d Januari 2019
HMR Public Accounting Firm		*Consultant Services for Operational Data Reconciliation with Accounting Data for IJP Balance and its Derivatives for February to December 2018*	*IDR363,000,000.00*	*until January 2019*
PT Lemti UI	Aldevco Octagon Building, Gd Perluasan Lt 2, Jl. Warung Jati Barat no. 75, RT.7/RW.5, Kalibata, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740	Jasa konsultan SMKI	Rp222.392.500,00	s.d 26 Desember 2018
		SMKI consultant services	*IDR222,392,500.00*	*until December 26, 2018*
PT Maesa Creation Indonesia	JL. Barata Karya Raya, Kav. 284, Karang Tengah, 15157, Karang Tengah, Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15157	Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan SOP Pengelolaan Investasi Perum Jamkrindo	Rp695.000.000,00	s.d 3 Januari 2019
		Consultant Services for Preparation of SOP for Investment Management of Perum Jamkrindo	*IDR695,000,000.00*	*until January 3, 2019*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Pengadaan Kontrak Servis Sistem Pendingin Gedung Jamkrindo	Rp357.000.000,00	1 tahun s.d 16 Juli 2019
		Procurement of Contracts for the Jamkrindo Building Cooling System Service	*IDR357,000,000.00*	*1 year until July 16, 2019*
PT Telekomunikasi Indonesia	Menara multimedia 8th floor Jl.Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat 10110	Perpanjangan VPN IP *Host to Host* PT Pegadaian	Rp2.310.000,00/bulan	1 tahun s.d 27 Juni 2019
		Extension of PT Pegadaian Host to Host VPN IP	*IDR2,310,000.00/month*	*1 year until June 27, 2019*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
PT Telekomunikasi Indonesia	Menara multimedia 8th floor Jl.Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat 10110	Perpanjangan Jangka Waktu SPK Pengadaan SIKP *SPK Time Extension for the Procurement of Program Credit Information System*	Rp2.475.000,00/bulan *IDR2,475,000.00/month*	1 tahun s.d 15 Juni 2019 *1 year until June 15, 2019*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Pekerjaan Penggantian *Exhaust Fan* dan *Intake Fan* Gedung Jamkrindo *Jamkrindo Building Exhaust Fan and Fan Intake Replacement*	Rp410.900.000,00 *IDR410,900,000.00*	s.d 23 Agustus 2018 *until August 23, 2018*
PT Gelar Mapan Sejahtera	Jl. Kasturi No.24, RT.10/RW.1, Jatipulo, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11430	EO *Family Gathering* Karyawan dan Keluarga Perum Jamkrindo Ke-48 *EO service for the 48th Family Gathering of Jamkrindo Employees and Family Members*	Rp477.345.000,00 *IDR477,345,000.00*	s.d 23 Juli 2018 *until July 23, 2018*
PT PPM Manajemen	Jl. Menteng Raya 9-19 Jkt 10340	Jasa Konsultan RJPP *Consultant Services for the Company's Long Term Plan*	Rp660.000.000,00 *IDR660,000,000.00*	s.d 6 Nopember 2018 *until November 6, 2018*
PT FED Insight Indonesia	Jl. Bend. Jatiluhur No.29, RT.5/RW.2, Bend. Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	konsultan penataan ulang struktur penggajian karyawan lanjutan *Consultant service for further rearrangement of employee payroll structure*	Rp220.000.000,00 *IDR220,000,000.00*	s.d 23 November 2018 *until November 23, 2018*
PT Argas Dilaga	Jl. Kemang Raya Studio Alam No. 65, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16414	Pekerjaan Penggantian GRC menjadi ACP *GRC to ACP Replacement*	Rp1.990.186.000,00 *IDR1,990,186,000.00*	s.d 11 November 2018 *until November 11, 2018*
PT Astra Graphia Information Technology (AGIT)	RT.4/RW.1, Lb. Bulus, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440	Pengadaan *Mobile Apps Claim Monitoring System* *Procurement of Mobile Apps Claim Monitoring System*	Rp750.000.000,00 *IDR750,000,000.00*	s.d 17 Desember 2018 *until December 17, 2018*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
PT Telekomunikasi Indonesia	Menara multimedia 8th floor Jl.Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat 10110	Jasa pengembangan *contact center* *Contact center development services*	Rp29.425.000,00/bulan *IDR29,425,000.00/month*	2 tahun s.d 5 Oktober 2020 *2 years from October 5, 2020*
PT Anugerah Bersama Nirwana	Jl. Pucang Sewu VII No.20, Pucang Sewu, Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60283	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Cabang Surabaya *Renovation of Surabaya Branch Office Buildings*	Rp1.332.338.000,00 *IDR1,332,338,000.00*	s.d 14 Desember 2018 *until December 14, 2018*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Pekerjaan Renovasi Kantin Gedung Jamkrindo *Renovation of the Jamkrindo Building Canteen*	Rp189.194.000,00 *IDR189,194,000.00*	s.d 8 Oktober 2018 *until October 8, 2018*
PT Fliq Visual Indonesia	Menara Citicon, Jl. Letjen S. Parman No.Kav 72, RT.4/RW.3, Slipi, Palmerah, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410	Jasa Pembuatan Video Produk Jamkrindo *Jamkrindo Product Video Making Services*	Rp220.000.000,00 *IDR220,000,000.00*	s.d 27 September 2018 *until September 27, 2018*
CV. Kreasi Seratama Unggul	Wisma Kosgoro, Kav. 53, Jl. M.H. Thamrin, RT.9/RW.5, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250	Pekerjaan Logo dan Lampu Gedung Jamkrindo *Logo and Lamp Work for the Jamkrindo Building*	Rp862.400.000,00 *IDR862,400,000.00*	s.d 3 Desember 2018 *until December 3, 2018*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	SPK Pengadaan *Remote Control Panel* *SPK for Procurement of Remote Control Panels*	Rp695.638.664,00 *IDR695,638,664.00*	s.d 7 Desember 2018 *until December 7, 2018*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Renovasi lantai 1 *1st floor renovation*	Rp2.804.620.000,00 *IDR2,804,620,000.00*	s.d 22 Februari 2019 *until February 22, 2019*
ABDSI	Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340 Tlp/Fax: 021 3927422 / 021 3927527	Penyusunan modul konsultasi manajemen dan pendampingan UMKM *Preparation of management consultation and assistance to MSMEs modules*	Rp38.775.000,00 *IDR38,775,000.00*	s.d 20 Desember 2018 *until December 20, 2018*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
Perum Produksi Film Negara (PFN) *State Film Production Corporation (PFN)*	Jl.Otto Iskandardinata (Otista) Kav 125-127 Jakarta - 13330	Pengadaan *Video Company Profile* Perum Jamkrindo *Procurement of Perum Jamkrindo's Company Profile Video*	Rp324.750.000,00 *IDR324,750,000.00*	s.d 17 Desember 2018 *until December 17, 2018*
PT Transforma Rekayasa dan Solusi	Jl Selaras Alam II No.5 Sariwangi Bandung 40559	pengadaan konsultan MPTI *procurement of MPTI consultants*	Rp439.860.000,00 *IDR439,860,000.00*	s.d 17 Januari 2019 *until January 17, 2019*
PT Balai Pustaka	Jl.Bunga No. 8-8A Matraman, Jakarta Timur	SPK Kalender *Calendar SPK*	Rp877.800.000,00 *IDR877,800,000.00*	s.d 30 November 2018 *until November 30, 2019*
KAP HMR *HMR Public Accounting Firm*	Jl. Prof. Dr. Soepomo.SH No.178A Jak-Sel 12870	Pengadaan Jasa Konsultan *Review* dan Evaluasi Aplikasi akuntansi *Procurement of Consultant Services for the Review and Evaluation of Accounting Applications*	Rp325.000.000,00 *IDR325,000,000.00*	s.d 30 April 2019 *until April 30, 2019*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	SPK renovasi rumah dinas *Official residence renovation*	Rp407.408.925,00 *IDR407,408,925.00*	s.d 29 Januari 2019 *until January 29, 2019*
PT Berca Hardayaperkasa	Gedung BNI Life Insurance Lt. 5 Jl. Aipda KS Tubun No.67	Pengadaan Instalasi Switch *Procurement of Switch Installation*	Rp956.000.000,00 *IDR956,000,000.00*	s.d 20 Maret 2019 *until March 20, 2019*
KAP HMR *HMR Public Accounting Firm*	Jl. Prof. Dr. Soepomo.SH No.178A Jak-Sel 12870	Pengadaan Konsultan Penyesuaian Kebijakan dan SOP Akuntansi *Procurement of Policy Adjustment and Accounting SOPs Consultant Service*	Rp49.500.000,00 *IDR49,500,000.00*	s.d 6 Desember 2018 *until December 6, 2018*
PT Solusitama Aircond	Jl. Raya PKP Rt. 002 RW. 008 Kelapa Dua Wetan, Ciracas Jakarta - Indonesia 13730	Ac cassete lantai 3 dan 8 *3rd and 8th floors Ac cassettes*	Rp825.535.700,00 *IDR825,535,700.00*	s.d 21 Des 2018 *until December 21, 2018*
PT Multi Talenta Solusi	The Royal Palace, Jln. Soepomo Kav 178 A C-17 Jakarta	Pengadaan Jasa Konsultan Anggaran *Procurement of Budget Consultant Services*	Rp200.000.000,00 *IDR200,000,000.00*	s.d 28 Februari 2019 *until February 28, 2019*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
PT Rumah Jala Inspirasi	Jl. Cipinang Indah Raya No. 1 Lantai 3 suite 4A Jakarta Timur 13420	Jasa pembuatan video PSA *PSA video production services*	Rp343.200.000,00 *IDR343,200,000.00*	s.d 5 Desember 2018 *Until December 5, 2018*
PT Mitrasindo Jayatama	Jl Arteri Kelapa Dua Raya II Bl B%2F40-B Kebon Jeruk Kebon Jeruk Jakarta Barat DKI Jakarta, RT.11/RW	Pengadaan Pemasangan Iklan *Billboard* Perum Jamkrindo di Semarang *Procurement of Perum Jamkrindo's Billboard Advertising Installation in Semarang*	Rp980.000.000,00 *IDR980,000,000.00*	s.d 14 Desember 2019 *until December 14, 2019*
PT KMPLus Optima Internasional	Plaza Sentral, Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 47, RT.14/RW.1, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930	Pengadaan *Knowledge Management* Perum Jamkrindo *Procurement of Perum Jamkrindo Knowledge Management*	Rp308.000.000,00 *IDR308,000,000.00*	s.d 9 Maret 2019 *until March 9, 2019*
Kowajasa	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Sewa Alat *card reader* *Card reader tool rental*	Rp4.150.000,00/bulan/unit *IDR4,150,000.00/month/unit*	s.d Mei 2019 *until May 2019*
KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK) *Hertanto Grace Karunawan (HGK) Public Accounting Firm*	Palma Tower, 18th Floor Lot F & G Jl. RA Kartini II-S Kav.06 TB Simatupang Jakarta Selatan 12310	Pengadaan konsultan KPI *Procurement of KPI consultants*	Rp55.000.000,00 *IDR55,000,000.00*	s.d 14 Februari 2019 *until February 14, 2019*
PT Solusitama Aircond	Jl. Raya PKP Rt. 002 RW. 008 Kelapa Dua Wetan, Ciracas Jakarta - Indonesia 13730	ac cassete lantai 2 dan 5 *2nd and 5th floors Ac cassettes*	Rp984.993.900,00 *IDR984,993,900.00*	s.d 8 Februari 2019 *until February 8, 2019*
PT Mitra Solusi Infokom	Grand Slipi Tower, Jl. Letjen S. Parman, RT.1/ RW.4, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480	Pengadaan NGFW *Procurement of NGFW*	Rp720.905.138,00 *IDR720,905,138.00*	s.d 11 Januari 2019 *until January 11, 2019*
PT Panca Anugrah Wisesa	Jak Design Center, Lantai 6, RT.10/RW.6, Petamburan, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260	Pengadaan Furniture Lantai 1 *Procurement of 1st Floor Furniture*	Rp589.460.928,00 *IDR589,460,928.00*	s.d 19 Februari 2019 *until February 19, 2019*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
PT Cita Negeri Amanah IICD	Gedung Prof. M. Sadli (Gedung Magister Akuntansi) Lt. 1 Jl. Salemba No.4, RT.4/ RW.6, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430	Jasa Assesor assesment GCG 2018 *Assessor of 2018 GCG assessment service*	Rp167.000.000,00 *IDR167,000,000.00*	s.d 14 April 2019 *until April 14, 2019*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	*Chiller* sistem III *System III Chiller*	Rp305.680.814,00 *IDR305,680,814.00*	s.d 22 Februari 2019 *until February 22, 2019*
PT Prima Karya Sarana Sejahtera	Jl Buncit Raya No. 75 Jakarta Selatan	Penyediaan Jasa Pekerja Fungsi Pengemudi *Provision of Driver Services*	Rp6.028.661,00/org/bln *IDR6,028,661.00/person /month*	s.d 30 November 2018 *until November 30, 2018*
PT Telekomunikasi Indonesia	Menara multimedia 8th floor Jl.Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat 10110	Layanan VPN *Primary* *Primary VPN service*	Rp4.307.090.700,00 *IDR4,307,090,700.00*	1 tahun s.d 31 Maret 2019 *1 year until March 31, 2019*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Addendum Penyediaan Tenaga *Outsourcing* Agendaris Pengemudi *Addendum for Procurement of Outsourced Driver Agenda*	Rp4.455.927,00/org/bln *IDR4,455,927.00/person /month*	1 tahun s.d 31 Desember 2018 *1 year until December 31, 2018*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Addendum Penyediaan Tenaga *Outsourcing* Agendaris dkk *Addendum for Procurement of Outsourced Driver Agenda and friends*	Rp4.455.927,00/org/bln *IDR4,455,927.00/person /month*	1 tahun s.d 31 Desember 2018 *1 year until December 31, 2018*
PT Jamkrindo Tama	Jl. Angkasa B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	*Management Building*	Rp476.228.598,00/bulan *IDR476,228,598.00/month*	1 tahun s.d 31 Maret 2019 *1 year until March 31, 2019*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
Suyanto Simalango Patria and Partners Law Firm	Wisma Nugraha Santana, 14th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 7-8	Jasa Konsultan Hukum *Retainer Lawyer* *Retainer Lawyer Legal Consultant Services*	Rp660.000.000,00 *IDR660,000,000.00*	1 tahun s.d 12 Maret 2019 *1 year until March 12, 2019*
PT Satkomindo Mediyasa	Jl. Rumah Sakit Fatmawati No. 1, RT.2/ RW.8, Cilandak Bar., Cilandak, Kota Jakarta Selatan 12430	Jasa sewa layanan telekomunikasi *Host to Host* BRI *BRI Host to Host telecommunications rental service*	Rp6.160.000,00/bulan *IDR6,160,000.00/month*	s.d 19 Maret 2019 *until March 19, 2019*
PT Diagonal Cipta Selaras	Jl Siaga Raya No 87 RT 019 RW 01 Pasar Minggu Jak-Sel	Pengadaan *Website* Perum Jamkrindo *Procurement of Perum Jamkrindo's Website*	Rp425.000.000,00 *IDR425,000,000.00*	s.d 30 Juli 2019 *until July 30, 2019*
Rahmad Irwan and Partners	Gandaria 8 Office lantai 15 Floor of E. Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240	Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum *Retainer Lawyer* *Retainer Lawyer Legal Consultant Services*	Rp35.000.000,00/bulan *IDR35,000,000.00/month*	1 tahun s.d 16 April 2019 *1 year until April 16, 2019*
PT BNI Multifinance	Gedung BNI Life Insurance Lt. 5 Jl. Aipda KS Tubun No.67	Sewa operasi kendaraan dinas Direksi *Operating leases for official vehicles of the Directors*	Rp19.635.500/unit/bln(th 2016) Rp19.140.000/unit/bln (th 2015) *IDR19,635,500/unit/month (2016)* *IDR19,140,000/unit/month (in 2015)*	3 tahun s.d 9 April 2021 *3 years until April 9, 2021*
PT BRI Multifinance	Wisma 46, 10th Floor - Kota BNI Jl. Jend. Sudirman Kav.1, RT.10/ RW.11, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220	Sewa operasi kendaraan dinas *Rental of official vehicle operations*	Harrier Turbo Hitam: Rp 47.559.827/ unit/bln Harrier Turbo Putih: Rp46.837.130/unit/bln *Black Harrier Turbo: IDR47,559,827/ unit/month* *White Harrier Turbo: IDR46,837,130/unit/month*	1 tahun s.d 15 Mei 2019 *1 year until May 15, 2019*
PT. Pos Indonesia	Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta 10710	Pengadaan Jasa Ekspedisi Dokumen dan Barang *Procurement of Document and Goods Expedition Services*	sesuai pemakaian *according to the usage*	1 tahun s.d 10 Juni 2019 *1 year until June 10, 2019*
PT Abyor International	Wisma BCA Wing A, PH Floor BSD City, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15322	Pengadaan Aplikasi *E-Procurement* *Provision of E-Procurement Applications*	Rp550.000.000,00 *IDR550,000,000.00*	s.d 1 Oktober 2018 *until October 1, 2019*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
PT Sharing Vision Indonesia	Jl. Anggrek No.47, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114	Jasa Konsultan Retainer TI *IT Retainer Consultant Services*	Rp660.000.000,00 *IDR660,000,000.00*	s.d 10 Januari 2019 *until January 10, 2019*
PT Anugerah Solusi Mandiri (ERPsoft)	Ruko Graha Boulevard Blok C-6 Jl Boulevard Gading Serpong - Tangerang *Banten*	Jasa pengembangan aplikasi SIMR *SIMR application development services*	Rp96.000.000,00 *IDR96,000,000.00*	s.d 31 Desember 2018 *until December 31, 2018*
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Panin Tower Senayan City 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270	Perjanjian Kerja Sama pemeringkat *Rating cooperation agreement*	Rp120.000.000,00 *IDR120,000,000.00*	s.d 6 Agustus 2018 *until August 6, 2018*
KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK) *Hertanto Grace Karunawan (HGK) Public Accounting Firm*	Palma Tower, 18th Floor Lot F & G Jl. RA Kartini II-S Kav.06 TB Simatupang Jakarta Selatan 12310	Pengadaan Jasa KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 *Procurement of Public Accounting Firm Services for Audit of Financial Statements for the fiscal year 2018*	Rp424.550.000,00 *IDR424,550,000.00*	s.d 11 Februari 2019 *until February 11, 2019*
PT Telekomunikasi Indonesia	Menara multimedia 8th floor Jl.Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat 10110	Pengembangan Sistem Aplikasi *Office automation* *Development of the Office automation Application System*	Rp953.447.000,00 *ID 953,447,000.00*	s.d 21 Desember 2018 *until December 21, 2018*
PT Telematic Multisistem	SOHO Pancoran, Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, RT.1/ RW.6, Tebet Barat, Tebet, RT.1/RW	Pengadaan Implementasi Ruang Server *Procurement of Server Room Implementation*	Rp1.958.000.000,00 *IDR1,958,000,000.00*	s.d 18 Desember 2018 *until December 18, 2018*
PT BDO Konsultan Indonesia	Prudential Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79, Setia Budi, Setiabudi, RT.2/RW.2, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910	Pengadaan MPG *MPG Procurement*	Rp981.200.000,00 *IDR981,200,000.00*	s.d 19 Desember 2018 *until December 19, 2018*
PT Aplikanusa Lintasartha	Jl. Ciungwanara No 6 Bandung	Pengadaan Pengembangan Aplikasi HRIS *Procurement of HRIS Application Development*	Rp1.048.422.375,00 *IDR1,048,422,375.00*	s.d 22 Juli 2019 *until July 22, 2019*

Lembaga/Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*	**Alamat** *Address*	**Jenis dan Bentuk Jasa** *Types and Forms of Services*	**Biaya** *Costs*	**Periode Penugasan** *Assignment Period*
PT Anugrah Karunia Perkasa Abadi	Jl. Pangeran Jayakarta, Kom. Ruko Gatep No. 19N	Layanan Internet *Primary* Kantor Pusat *Primary Internet Service for the Head Office*	Rp16.197.500/bulan *IDR16,197,500/month*	1 tahun s.d 2 Januari 2020 *1 year until January 2, 2020*

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan 6 (enam) Tahun Terakhir 2013-2018

List of Public Accounting Firms and Accountants for the last 6 (six) Years - 2013-2018

Tahun Buku *Fiscal Year*	**Kantor Akuntan Publik** *Public Accounting Firms*	**Akuntan** *Accountants*	**Jasa** *Services*	**Jasa Lainnya** *Other Services*	**Opini** *Opinion*	**Biaya** *Costs (Rp/IDR)*
2018	KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK)	Bambang Karunawan	Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2018 *Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for 2018 Fiscal Year*	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)*	424.550.000,00
2017	KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK)	Drs. Hertanto	Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2017 *Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for Fiscal Year 2017*	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)*	386.000.000,00
2016	KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK)	Drs. Hertanto	Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2016 *Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for Fiscal Year 2016*	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)*	387.612.500,00

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan 6 (enam) Tahun Terakhir 2013-2018

List of Public Accounting Firms and Accountants for the last 6 (six) Years - 2013-2018

Tahun Buku *Fiscal Year*	**Kantor Akuntan Publik** *Public Accounting Firms*	**Akuntan** *Accountants*	**Jasa** *Services*	**Jasa Lainnya** *Other Services*	**Opini** *Opinion*	**Biaya** *Costs (Rp/IDR)*
2015	KAP Hertanto Grace Karunawan (HGK)	Drs. Hertanto	Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2015 *Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for Fiscal Year 2015*	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)*	389.565.000,00
2014	Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Budi Taufik Wibawa	Jasa Audit Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2014 *Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for Fiscal Year 2014*	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)*	300.740.000,00
2013	Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Budi Taufik Wibawa	Jasa Audit Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2013 *Public Accounting Firm Services for the Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo for Fiscal Year 2013*	-	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Fair in all material aspects (Unqualified Opinion)*	300.740.000,00


EXIT

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS



Penghargaan di Tahun 2018
Awards in 2018

1. 2 Maret 2018/ *March 2, 2018*
2nd *Best Performing Financial Guarantee Company*
Malam Apresiasi PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Nasional Indonesia's Appreciation Night
PT Reasuransi Nasional Indonesia

2. 29 Maret 2018/ *March 29, 2018*
PRIA 2018 Awards
'Silver *Winner* Kategori *Annual Report*'
PR Indonesia (PRIA) Award 2018
PR Indonesia

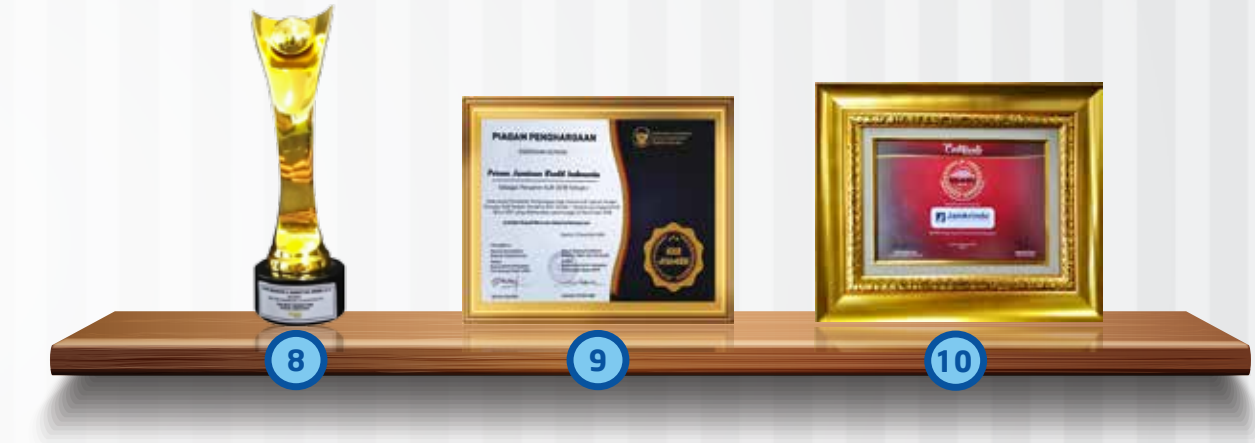
3. 4 Mei 2018/ *May 4, 2018*
BUMN Branding & Marketing Award 2018
'Silver *Winner Promising Company in Marketing* 3.0'
BUMN Branding & *Marketing Award* 2018
Forum Humasn BUMN dan Markplus

4. 21 Juli 2018/ *July 21, 2018*
Piagam Penghargaan MURI 2018
"Pembagian Paket Alat Sekolah Kepada Pelajar Terbanyak"
MURI 2018 Award Charter for the "The Most Extensive Distribution of School Equipment Packages to Students" Category
Gerakan Jamkrindo Peduli Pendidikan
Jamkrindo Cares for Education Movement
MURI (Record Museum Indonesia)

5. 9 Agustus 2018/ *August 9, 2018*
Juara 2 Kategori Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada 7th Anugrah BUMN 2018
2nd Place in the Partnership and Community Development Program (PKBL) Category on the 7th BUMN 2018 Award
7th Anugerah BUMN 2018
The 7th BUMN Award 2018
BUMN Track

6. 1 Oktober 2018/ *October 1, 2018*
***Golden Thropy Infobank Award* BUMN 2018**
'Kinerja Keuangan Sangat Bagus 2013-2017'
2018 BUMN Golden Trophy Infobank Award for the 'Excellent Financial Performance of 2013-2017' Category
Golden Thropy Infobank Award BUMN 2018
Majalah Infobank

7. 6 Oktober 2018/ *October 6, 2018*
Stand Pelayanan Terbaik pada IBD Expo 2018
Best Service Stand at IBD Expo 2018
IBD EXPO 2018
Kementrian BUMN/ *Ministry of SOEs*





Sertifikasi yang Berlaku di Tahun 2018
Certifications that apply in 2018

8 21 November 2018/ *November 21, 2018*
BUMN *Branding And Marketing Award*
'The Best Marketing: BUMN Sector Financial and Hospitality'
BUMN *Branding And Marketing Award*
BUMN Track

9 22 November 2018/ *November 22, 2018*
Piagam Penghargaan "Penjamin KUR Terbaik 2018"
"Best KUR Guarantor 2018" Award Charter
KUR Awards
Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia/
Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

10 23 November 2018/ *November 23, 2018*
BUMN *Branding And Marketing Award*
Awarding Night Apresiasi Indonesia untuk BUMN 2018
Awarding Night of Indonesia's Appreciation for SOEs 2018
Wartaekonomi

11 13 Desember 2018/ *December 13, 2018*
Global Performance Excellence Awards 2018 'Best in Class Award dalam Kinerja dan Keunggulan Bisnis Skala Internsional'
2018 Global Performance Excellence Awards 'Best in Class Award in International Scale Business Excellence and Performance'
Global Performance Excellence Awards 2018
Asia Pacific Quality Organization (APQO)

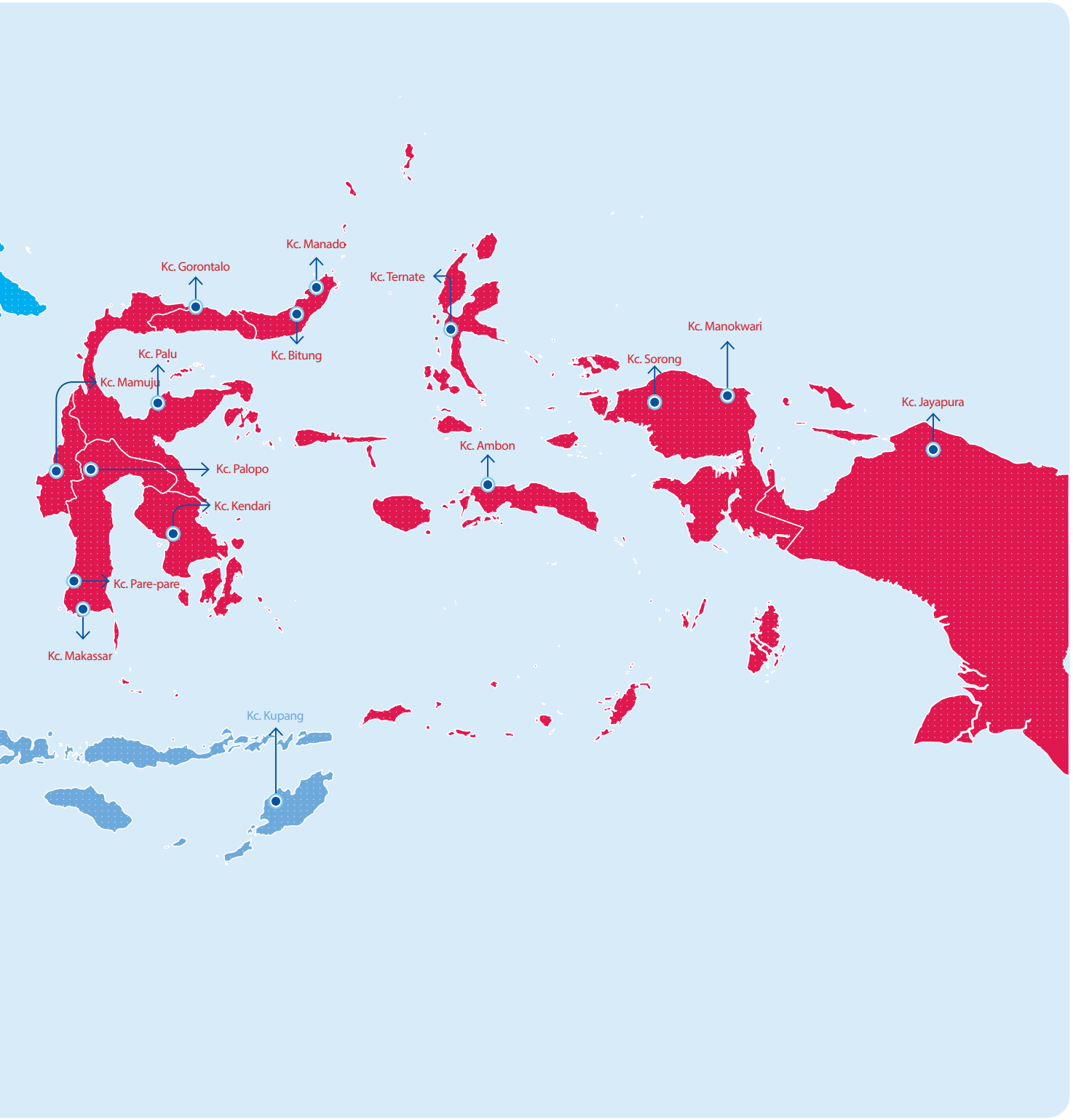
12 3 Agustus 2018/ *August 3, 2018*
Sertifikat Pemeringkatan 'AA+' *(Double A Plus)*
'AA +' (Double A Plus) Rating Certificate
Masa Berlaku hingga 1 Agustus 2019
Validity Period until August 1, 2019
Pefindo

13 2 Mei 2018/ *May 2, 2018*
Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015
ISO 9001: 2015 Quality Management Certification
Masa Berlaku hingga 1 Mei 2021
Validity Period until May 1, 2021
Sucofindo

DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN

LIST OF ADDRESSES OF SUBSIDIARIES AND BRANCH OFFICES / REPRESENTATIVE OFFICES




Kc. Manado
Kc. Gorontalo
Kc. Ternate
Kc. Manokwari
Kc. Sorong
Kc. Palu
Kc. Bitung
Kc. Mamuju
Kc. Jayapura
Kc. Ambon
Kc. Palopo
Kc. Kendari
Kc. Pare-pare
Kc. Makassar
Kc. Kupang



Kantor Pusat Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo Head Office
Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia

Kontak/ *Contact*

+62 21 6540335
+62 21 6540344, 6540348
info@jamkrindo.co.id
www.jamkrindo.co.id

Entitas Anak
Subsidiaries

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Lantai 7
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia

Kontak/ *Contact*

+62 21 6540386
+62 21 6540389
info@jamkrindosyariah.co.id
www. jamkrindosyariah.co.id

Kantor Wilayah (Kanwil)
Regional Office

	Kanwil *Regional Office*	Alamat *Address*
I	Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan – 20111 Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II	Palembang	Jl. Basuki Rahmat Ruko No. 4 (Depan BLPT), Kec. Kemuning, Palembang 30127, Sumatera Selatan
III	DKI Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta
IV	Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722, Gedebage, Bandung, Jawa Barat; Telp: 022-7801890
V	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A, Semarang, Jawa Tengah, Telp: 024-7601797 Fax: 024-7614138
VI	Surabaya	Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3, Surabaya, Jawa Timur; Telp: 031-8685567
VII	Denpasar	Jl. Letda Tantular, Renon Denpasar Telp: 0361-286854 Fax: 0361-286267
VIII	Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210-B, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Telp: 0511-6744706 Fax: 0511-3273435
IX	Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112, Sulawesi Selatan; Telp: 0411-875836

Kantor Cabang
Branch office

Kanwil *Office Region*		Kantor Cabang *Branch office*	Alamat *Address*
I	1	Medan	Jl. Sei Serayu No. 40, Medan, Sumatera Utara, Telp: 061-4152827 / 4155767 Fax: 061-4156775
	2	Pekan Baru	JL. Jend. Sudirman No 150, Kel. Suka Ramai, Pekanbaru 28113, Riau; Telp: 0761-854311, 854870; Fax: 0761-848801
	3	Aceh	Jl. Syiah Kuala No.10 A-B Kel. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh 23126 Telp: 0651-8016790 Fax: 0651-8011094
	4	Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C, Padang, Sumatera Barat; Telp: 0751-7050598 Fax: 0751-447165
	5	Tanjung Pinang	Komp. Ruko Pamedan, Jl. Raja Ali Haji No. 6, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Telp: 0771-316919 Fax: 0771-316074
	6	Batam	Jl.Raja Ali Haji Fisabilillah, Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau; Telp: 0778-7495993 Fax: 0778-469019
	7	Balige	Jl. Siliwangi No. 08 Balige, Tobasa, Sumatera Utara; Telp: 0632-21722 Fax: 0632-21722
II	8	Palembang	Jl. Residen abdul rozak no.188-189 kelurahan kalidoni Palembang Telp: 0711-7826393 Fax: 0711-7826398
	9	Jambi	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Telp: 0741-668707 Fax: 0741-668115
	10	Bengkulu	Jl. Ahmad Yani Rt. 004 / Rw 001 No.28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119 Telp: 0736-344541 Fax: 0736-344249
	11	Bandar Lampung	Jl. Teuku Umar No. 10 E-F, Kedaton, Bandar Lampung 35141, Lampung; Telp: 0721-778511
	12	Pangkal Pinang	Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang – 33136 Telp: 0717-432837 Fax: 0717-436816
III	13	DKI Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: 021-6540409
	14	Khusus Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: 021-65868278
	15	Pontianak	Jl. Teuku Umar, Komp. Perkantoran Pontianak Mall Blok B/24, Pontianak, Kalimantan Barat; Telp: 0561-749095
	16	Serang	Jl. Jendral A. Yani No. A1, Serang 42117, Banten; Telp: 0254-228999
	17	Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1, Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322, Banten
IV	18	Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722, Gedebage, Bandung, Jawa Barat; Telp: 022-7801890
	19	Cirebon	Jl. Sudarsono No. 10 B, Kota Cirebon, Jawa Barat, Telp: 0231-833681 Fax: 0231-8336850
	20	Purwakarta	Jl.Terusan Ibrahim Singadilaga No.55 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa barat Telp: 0264-8304002 Fax: -
	21	Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No.90 Rt.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113 Telp: 0266-6223811 Fax: 022-6223868
	22	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F, Kel. Lengkongsari Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat; Telp: 0265-314169 Fax: 0265-314169

Kantor Cabang
Branch office

Kanwil *Office Region*		Kantor Cabang *Branch office*	Alamat *Address*
V	23	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A, Semarang, Jawa Tengah
	24	Yogyakarta	Jl. Parangtritis Km. 1 No. 96, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergansan, Yogyakarta; Telp: 0274-375989
	25	Solo	Jl. Dr. Rajiman No.531 A, Kelurahan Laweyan, Kec Laweyan – Surakarta Telp: 0271-719807 Fax: 0271-723564
	26	Purwokerto	Jl. Prof Suharso No. 1186 A, Purwokerto, Jawa Tengah; Telp: 0281-6572555
	27	Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus, Jawa Tengah 59312.Telp: 0291-430757 Fax: 0291-430758
	28	Pekalongan	Ruko The Luxor Jl. Ahmad Yani No.02 Wiradesa, Pekalongan Tlp: 0285-4420770 Fax: 0285-4420777
VI	29	Surabaya	Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3, Surabaya, Jawa Timur, Telp: 031-8673827
	30	Kediri	Jl. Kilisuci No.85 Kota Kediri Telp: 0354-7418826 Fax: 0354-680881
	31	Banyuwangi	Jl. S. Parman No. 116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi – 68419 Telp: 0333-418140 Fax: 0333-425804
	32	Malang	Jl. Letjend S. Parman No. 56 Blok A-4 Malang Telp: 0341-4377377 Fax: 0341-4378177
	33	Madiun	Jl. Thamrin No. 38, Madiun – 63117 Telp: 0351-4472250 Fax: 0351-4472249
VII	34	Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76, Denpasar, Bali; Telp: 0361-286854
	35	Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram, NTB, Telp: 0370-644573 / 644747
	36	Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82, Kec. Sumbawa Besar, NTB; Telp: 0371-2629239
	37	Kupang	Jl. Bundaran PU, Ruko TDM II No. 4, Oebufu, Kupang, NTT; Telp: 0380-8553899
VIII	38	Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117 Telp: 0541-747608 Fax: 0541-206578
	39	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.17 B Kuripan Banjarmasin-70236 Telp: 0511-3273345 Fax: 0511-3273435
	40	Palangkaraya	Jl. Christopel Mihing No. 31, Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Telp: 0536-3226895
	41	Tarakan	Jl. Cendrawasih RT. 004, Karanganyar Pantai, Tarakan, Kalimantan Utara; Telp: 0551-30448
	42	Balikpapan	Jl. Mayjen Sutoyo No. 26 C, Balikpapan, Kalimantan Timur; Telp: 0542-791908

Kantor Cabang
Branch office

Kanwil *Office Region*		**Kantor Cabang** *Branch office*	**Alamat** *Address*
IX	43	Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140, Makassar, Sulawesi Selatan; Telp: 0411-873031
	44	Gorontalo	Jl. HB Hasin (KH Agus Salim) No. 222, Gorontalo; Telp: 0435-828003
	45	Mamuju	Jl. Marthadinata No.11, Mamuju, Sulawesi Selatan; Telp: 0426-2324878
	46	Ambon	Jl Philit Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126 Telp: 0911-351770
	47	Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo-Ubo, Kel. Tabona, Ternate, Maluku Utara; Telp: 0921-3122739
	48	Jayapura	Pusat Bisnis Jayapura, Ruko Pasifik Permai Blok H No. 17, Kel. Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Papua; Telp: 0967-524424
	49	Manokwari	Jl. Trikora, Wosi, Manokwari, Papua Barat; Telp: 0986-214184
	50	Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C, Palu 94121, Sulawesi Tengah; Telp: 0451-4131812
	51	Kendari	Jl. La Ode Hadi No 56 B, Kendari 93118, Sulawesi Tenggara; Telp: 0401-3196780
	52	Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43, Manado, Sulawesi Utara; Telp: 0431-865194, 865198
	53	Bitung	Jl. Sam Ratulangi No. 1, Bitung, Sulawesi Utara; Telp: 0438-35939
	54	Pare-pare	Jl. Andi Mappatola No. 30-C, Parepare, Sulawesi Selatan; Telp: 0421-2914592
	55	Palopo	Jl. Batara Lattu No. 74, Palopo 91913, Sulawesi Selatan; Telp: 0471-23006
	56	Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 9, Sorong, Papua Barat; Telp: 0951-329081

Kantor Unit Pelayanan (KUP)
Service Unit Office

Kanwil *Office Region*	KUP *Service Unit Office*		Alamat *Address*
I	1	Dumai	Jl. Jend. Sudirman No. 391, Kota Dumai, Riau; Telp: 0765-439037
	2	Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No. 04 Rantau Prapat, Sumatera Utara, Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	3	Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No. 81 Panyabungan – 22913, Telp: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774
II	4	Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso RT 001 No. 366, Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan; Telp: 0733-3281182
III	5	Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor, Jawa Barat; Telp: 0251-7564211
	6	Cibinong	Ruko CIbinong City Center, Jl. Tegar Beriman 1 Blok A No. 29, Cibinong, Bogor, Jawa Barat; Telp: 021-29335250
	7	Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A Nomor 7Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi
IV	8	Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C, RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat, Telp: 022-20661506
V	9	Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah, Telp: 0293-3201767
	10	Cilacap	Jl Raya Sudirman, Cilacap, Jawa Barat, Telp: 0282-531194 / 532010
VI	11	Surabaya Kota	Jl. Kusuma Bangsa No. 86 B, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Telp: 031-52403358
	12	Pamekasan	Jl Jokotole No.26, Barurambat Kota, Pamekasan, Jawa Timur; Telp: 0324-3510118
	13	Jember	Jl. Gajah Mada No. 187 Jember, Jawa Timur; Telp: 0331-4431044
	14	Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro – 62111 Telp: 0353-2898420
VIII	15	Pangkalan Bun	Jl. Iskandar, Arut Selatan, Kotawaringin Barat 74113, Kalimantan Tengah, Telp: 0532-2074989
IX	16	Watampone	Jl. Ahmad Yani No. 29 B, Kel. Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Watampone, Sulawesi Selatan; Telp: 0481-2921479

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE



Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs Web ini berisi informasi seputar korporasi Perusahaan. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

The company has an official website with the address www.jamkrindo.co.id. This Website contains information about the Company's corporation. This website is a portal that can be accessed openly, with the aim of providing comprehensive information about the Company to a broad audience.

Uraian *Description*	**Ketersediaan** *Availability*	**Keterangan** *Information*
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu *Shareholder information up to the individual final owner*	√	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu telah tersedia di situs web Perusahaan. *Shareholder information up to individual final owners is available on the Company's website.*
Isi Kode Etik *Code of Conduct*	√	Informasi terkait isi Kode Etik telah tersedia di situs web Perusahaan. *Information regarding the contents of the Code of Conduct is available on the Company's website.*
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) *Separate annual financial statements (of the last 5 years)*	√	Informasi laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) telah tersedia di situs web Perusahaan. *Information on separate annual financial statements (of the last 5 years) is available on the Company's website.*
Profil Dewan Komisaris dan Direksi *Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors*	√	Profil Dewan Pengawas dan Direksi telah tersedia di situs web Perusahaan. *The profile of the Board of Supervisors and the Board of Directors is available on the Company's website.*

√: tersedia pada situs web Perusahaan
x: belum tersedia pada situs web Perusahaan

√: available on the Company's website
x: not yet available on the Company's website

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

EDUCATION AND/OR TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNIT

Perusahaan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi semua insan Jamkrindo, tak terkecuali Dewan Pengawas, Direksi, Anggota Komite-Komite, dan satuan kerja lainnya untuk selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait dunia usaha, industri penjaminan, serta peraturan dan perundang-undangan terkait. Perusahaan pun memfasilitasinya melalui kegiatan program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi masing-masing.

The company provides a great opportunity for all Jamkrindo personnel, including the Supervisory Board, Directors, Members of Committees, and other work units to always be able to keep abreast of matters related to the business world, the guarantee industry, and related laws and regulations. The company also facilitates it through the activities of competency development programs in the form of seminars, workshops, or other activities that can improve their knowledge and competencies.

Nama dan Jabatan *Names and Positions*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Education and Training Materials*	**Tempat/Tanggal** *Place / Date*	**Penyelenggara/** *Organizer*
Dewan Pengawas/ *Board of Supervisors*				
Sri Mulyanto (Ketua Dewan Pengawas)/ *(Chair of the Supervisory Board)*	*Public Training*	*Directorship Program*	Jakarta, 8 – 9 Oktober 2018 *Jakarta,October 8 – 9, 2018*	Pertamina *Training* dan *Consulting*/ *Pertamina Training and Consulting*
	Public Training	*Winning Strategy*	Jakarta, 11 – 12 Oktober 2018 *Jakarta,October 11 – 12, 2018*	Pertamina Training dan Consulting *Pertamina Training and Consulting*
	Seminar	IBERO-AMERICAN FORUM "*Guarantee and Financing System For* SME	Portugal, 25 – 26 Oktober 2018/ *Portugal, October 25-26, 2018*	*The Portuguese Mutual Guarantee System and Ibero-American Guarantee Network Association (REGAR)*
Noor Ida Khomsiyati (Dewan Pengawas)/ *(Supervisory Board Member)*	*Public Training*	*Directorship Program*	Jakarta, 8 – 9 Oktober 2018 *Jakarta,October 8 – 9, 2018*	Pertamina *Training* dan *Consulting* *Pertamina Training and Consulting*
		Winning Strategy	Jakarta, 11 – 12 Oktober 2018 *Jakarta,October 11 – 12, 2018*	Pertamina *Training* dan *Consulting* *Pertamina Training and Consulting*
Subandriyo (Dewan Pengawas)/ *(Supervisory Board Member)*	Sertifikasi *Certifications*	*Certified Risk Management Officer*	Jakarta, 27 Juli 2018 *Jakarta, July 27, 2018*	PPM Manajemen
Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board*				

Tidak ada pelatihan atau pengembangan kompetensi terhadap Dewan Pengawas Syariah di sepanjang tahun 2018
There is no training or competency development for the Sharia Supervisory Board throughout 2018

Nama dan Jabatan *Names and Positions*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Education and Training Materials*	**Tempat/Tanggal** *Place / Date*	**Penyelenggara/** *Organizer*
Direksi/ *Board of Directors*				
Randi Anto (Direktur Utama)/ *(President Director)*	*Public Training*	Blockchain: peluang dan Risiko bagi Industri Keuangan/ *Blockchain: opportunities and risks for the Financial Industry*	Jakarta, 26 April 2018 *Jakarta, April 26, 2018*	LPPI Stabilitas
	Public Training	*Indonesia Risk Management Outlook* 2019	Jakarta, 6 November 2018 *Jakarta, November 6, 2018*	LPPI Stabilitas
Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan) *(Director of HRM, General Affairs, and Compliance)*	Sertifikasi *Certifications*	*Risk Management Certification Refreshment*	Bali, 12 – 13 Juli 2018 *Bali, July 12-13, 2018*	Banker Association *for Risk Management* (BARa)
	Seminar	IBERO-AMERICAN FORUM "*Guarantee and Financing System For* SME	Portugal, 25 – 26 Oktober 2018 *Portugal, October 25-26, 2018*	*The Portuguese Mutual Guarantee System and Ibero-American Guarantee Network Association* (REGAR)
	Workshop	*Workshop* Pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penjaminan *Workshop on Debriefing and Preparation of Competency Map for Indonesian National Work Competency Standards (RSKKNI) Draft in the Guarantee Sector*	Jakarta, 1 November 2018 *Jakarta, November 1, 2018*	OJK *Financial Service Authority*
	Workshop	*Sharing Session Millenial Leadership*	Makassar, 22 – 23 November 2018 *Makassar, November 22 - 23, 2018*	FHCI
Amin Mas'udi (Direktur Bisnis Penjaminan) *(Director of Business Guarantee)*	*Public Training*	*Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Training Program*	India, 22 – 28 November 2018 *India, November 22-28, 2018*	ACSIC
	Annual Meeting	*4th Working Level* Council Jamkrindo-KODIT	Yogyakarta, 10 – 14 Desember 2018 *Yogyakarta, December 10-14, 2018*	ACSIC
Komite Audit/ *Audit Committee*				

Tidak ada pelatihan atau pengembangan kompetensi terhadap Komite Audit di sepanjang tahun 2018/
There is no training or competency development for the Audit Committee throughout 2018

Nama dan Jabatan *Names and Positions*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Education and Training Materials*	**Tempat/Tanggal** *Place / Date*	**Penyelenggara/** *Organizer*
Komite Investasi dan Risiko Usaha/ *Business Risk and Investment Committee*				
Slamet Wiyono (Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha)/ *(Member of the Business Risk and Investment Committee)*	*Public Training*	*Corporate Culture & Leadership*	Jakarta, 22 -23 Oktober 2018/ *Jakarta, October 22-23, 2018*	Pertamina Training dan Consulting/ *Pertamina Training and Consulting*
Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*				
Abdul Bari (Sekretaris Perusahaan)/ *(Corporate Secretary)*	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	Metodologi Pelatihan (Instruktur Pengawasan Pelatihan) *Training Methodology (Training Supervision Instructor)*	17 Januari 2018/ *January 17, 2018*	BNSP
	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	"*Workshop Key Performance* Individu (KPI) Individu Bagi Kepala Divisi dan Kepala Bagian Kantor Pusat" *"Individual Key Performance Workshop (KPI) for Head Office Head of Division and Head of Section"*	22 Januari 2018/ *January 22, 2018*	Perum Jamkrindo
	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	*In House Training The* 4 *Disciplines of Execution* (4DX)	10 Maret 2018/ *March 10, 2018*	Perum Jamkrindo
	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* I *Batch* I/ *Level I Batch I Risk Management Certification Training*	26 – 27 Juli 2018/ *July 26-27, 2018*	Perum Jamkrindo
	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	*Corporate Secretary Course*	7 September 2018/ *September 7, 2018*	LM-FEUI
	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	Insan PR Indonesia 2018	14 – 15 September 2018 *September 14-15, 2018*	PR Indonesia
	Leadership	*Workshop "Leardership Competency"*	22 September 2018 *September 22, 2018*	SDM Cendikia
	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	Mengelola Konten Media Sosial yang Reputatif, dari Strategi Hingga Eksekusi/ *Managing Reputative Social Media Content, from Strategy to Execution*	9 November 2018 *November 9, 2018*	PR Indonesia

Nama dan Jabatan *Names and Positions*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Education and Training Materials*	**Tempat/Tanggal** *Place / Date*	**Penyelenggara/** *Organizer*
Anggit Murdiwibowo (Kepala Bagian Kesekretariatan)/ *(Head of Secretariat Section)*	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	Insan PR Indonesia 2018	14-15 September 2018	PR Indonesia
		Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 1 *Batch* VI *Level 1 Batch VI Risk Management Certification Training*	4 - 6 Oktober 2018 *October 4 - 6, 2018*	Perum Jamkrindo
Dwi Putra Raneldo Kurniawan (Kepala Seksi Kesekretariatan) *(Head of Secretariat Section)*	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	*Optimizing The Future Role of Corporate Secretary*	26-27 Maret 2018/ *March 26-27, 2018*	Pertamina Training and Consulting *Pertamina Training and Consulting*
Nastiti Pandanwangi (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan)/ *(Head of Public Relations and Corporate Communication)*	Kompetensi Teknis *Technical Competence*	*Corporate Secretary Course*	7 September 2018 *September 7, 2018*	LM-FEUI
		Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Batch VI/ *Level 1 Batch VI Risk Management Certification Training*	4-6 Oktober 2018 *October 4-6, 2018*	Perum Jamkrindo
Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern *Internal Audit/Internal Control Unit*				
Karinu Aji Wirakusuma (Plt. Kepala Bagian Audit Wilayah II) *(Acting Head of Regional Audit Division II)*	Sertifikasi *Certifications*	QIA (*Qualified Internal Audit*) Tingkat Manajerial *Managerial Level QIA (Qualified Internal Audit)*	Jakarta, 19 - 28 Maret 2018 *Jakarta, March 19-28, 2018*	Yayasan Pendidikan Internal Audit *Internal Audit Education Foundation*
	Seminar	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2018 dan Pengukuhan QIA/ *2018 National Internal Audit Seminar and QIA Inauguration*	Yogyakarta, 18 – 20 April 2018/ *Yogyakarta, April 18-20 2018*	Yayasan Pendidikan Internal Audit *Internal Audit Education Foundation*
	Seminar	"Sinergi Internal Auditor dan Eksternal Auditor dalam Rangka Penguatan Kapabilitas Pengawasan Keuangan Negara" *"Synergy of Internal Auditors and External Auditors in Order to Strengthen the Capability of State Financial Supervision"*	Jakarta, 7 Juni 2018 *Jakarta, June 7, 2018*	Badan Pengawas Keuangan *Financial Supervisory Agency*

Nama dan Jabatan *Names and Positions*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Education and Training Materials*	**Tempat/Tanggal** *Place / Date*	**Penyelenggara/** *Organizer*
Irmatati (Kepala Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi) *(Head of Corporate Audit and Information Technology Section)*	Sertifikasi *Certifications*	*Qualified Internal Audit* (QIA) Tingkat Dasar II *Qualified Internal Audit (QIA) Basic Level II*	Jakarta, 23 Juli – 3 Agustus 2018 *Jakarta, July 23 - August 3, 2018*	Yayasan Pendidikan Internal Audit *Internal Audit Education Foundation*
	Seminar	*Digital Leadership Program for Senior Executives*	Jakarta, 25 – 26 September 2018/ *Jakarta, September 25-26, 2018*	LM FEB UI
	Sertifikasi/ *Certifications*	Manajemen Risiko (MR) Level 1 Batch V *Risk Management Level 1 Batch V*	Jakarta, 27 – 28 September 2018 *Jakarta, September 27-28, 2018*	Ikatan Bankir Indonesia- Lspp *Indonesian Bankers Association – Lspp*
Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kepala Seksi Administrasi Pelaporan dan Penganggaran Audit) *(Head of Audit Reporting and Budgeting Administration Section)*	Sertifikasi *Certifications*	QIA (***Qualified Internal Audit***) Tingkat Manajerial *Managerial Level QIA (Qualified Internal Audit)*	Jakarta, 19 - 28 Maret 2018/ *Jakarta, March 19-28, 2018*	Yayasan Pendidikan Internal Audit/ *Internal Audit Education Foundation*
	Seminar	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2018 dan Pengukuhan QIA *2018 National Internal Audit Seminar and QIA Inauguration*	Yogyakarta, 18 – 20 April 2018/ *Yogyakarta, April 18-20 2018*	Yayasan Pendidikan Internal Audit *Internal Audit Education Foundation*
	Seminar	"Sinergi Internal Auditor dan Eksternal Auditor dalam Rangka Penguatan Kapabilitas Pengawasan Keuangan Negara" *"Synergy of Internal Auditors and External Auditors in Order to Strengthen the Capability of State Financial Supervision"*	Jakarta, 7 Juni 2018 *Jakarta, June 7, 2018*	Badan Pengawas Keuangan *Financial Supervisory Agency*

Manajemen Risiko
Risk Management

Nama dan Jabatan *Names and Positions*	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** *Types of Education and Training*	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** *Education and Training Materials*	**Tempat/ Tanggal** *Place / Date*	**Penyelenggara** *Organizer*
Ceriandri Widuri *(Kepala Divisi Manajemen Risiko)* *(Head of the Risk Management Division)*	Seminar	Indonesia Risk Management Outlook 2019	Jakarta, *06 November 2011* *Jakarta, 06 November, 2018*	LPPI Stabilitas
	Sertifikasi *Certification*	Sertifikasi MR Level 2 Batch II *Level 2 Batch II MR Certification*	Grand Orchardz Rajawali, *01 November 2018* *Grand Orchardz Rajawali, November 01, 2018*	Perum Jamkrindo
	Sertifikasi *Certification*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level I Batch II *Level I Batch II Risk Management Certification*	Jakarta, *09 Agustus 2018* *Jakarta, August 09, 2018*	Perum Jamkrindo
	Sertifikasi *Certification*	Risk Based Audit	Human Capital BUMN (HC BUMN), *03 Mei 2018* *Human Capital BUMN (HC BUMN), May 03, 2018*	Human Capital BUMN (HC BUMN)
	Sertifikasi *Certification*	Workshop ISO 31000: 2018	Jakarta, *15 Maret 2018* *Jakarta, March 15, 2018*	CRMS Indonesia

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



Laporan Tahunan
Annual Report **2018**

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIST

Jamkrindo terus melakukan inovasi baik dalam dalam aspek operasional maupun aspek penunjang lainnya untuk dapat meraih kinerja yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Jamkrindo continues to innovate in the operational and other supporting aspects to achieve continuous improvement from time to time.

ANALISA EKONOMI DAN INDUSTRI
ECONOMIC AND INDUSTRIAL ANALYSIS



> Rencana bisnis perusahaan tahun 2018 tetap berpedoman pada pencapaian visi perusahaan dan meraih pertumbuhan berkualitas dan berkesinambungan.
>
> *Our business Plan 2018 still adapts initiative to achieve vision of the company and pursue sustainable and excellent growth.*

ANALISA EKONOMI NASIONAL

Ekonomi global tahun 2018 menghadapi kondisi ketidakpastian. Hal ini terutama disebabkan oleh ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang memicu terjadi perang dagang. Disaat yang bersamaan, Bank Sentral AS (*The Fed*) membuat kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga secara bertahap sebanyak empat kali hingga ke level 2,50%. Kedua hal tersebut sangat mempengaruhi arus perdagangan dan investasi dunia.

ECONOMIC AND INDUSTRIAL ANALYSIS

The 2018 global economy faces conditions of uncertainty. This was mainly due to tensions in trade relations between the United States (US) and China which triggered a trade war. At the same time, in stages, the US Central Bank (the Fed) issued a policy to increase interest rates four times to the level of 2.50%. These greatly influenced the flow of world trade and investment.

Ekonomi Indonesia tidak dapat lepas dari dampak kejadian tersebut. Tahun 2018, neraca perdagangan Indonesia tercatat mengalami defisit yang cukup besar, yaitu mencapai 8,6 miliar Dolar AS. Defisit perdagangan tersebut disebabkan pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor. Sepanjang 2018, ekspor Indonesia tercatat sebesar 180,1 miliar Dolar AS, sedangkan impor mencapai 188,6 miliar Dolar AS.

The Indonesian economy was impacted by the incident. In 2018, Indonesia's trade balance recorded a quite large deficit, reaching 8.6 billion US Dollars. The trade deficit was due to import growth which was far higher than exports. Throughout 2018, Indonesia's exports were recorded at 180.1 billion US dollars, while imports reached 188.6 billion US Dollars.

Selain itu, hampir sepanjang tahun 2018, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mengalami tekanan. Bahkan, pada Oktober 2018, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sempat menyentuh angka Rp15.450/Dolar AS atau menjadi yang terendah sejak krisis ekonomi tahun 1998.

In addition, almost throughout 2018, the exchange rate of the Rupiah against the US Dollar was under pressure. In fact, in October IDR. 15,450/US Dollar, which was the lowest since the economic crisis in 1998.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah mengambil sejumlah kebijakan. Sepanjang tahun 2018, BI tercatat menaikan tingkat suku bunga BI 7 *Days Repo Rate* sebanyak enam kali secara bertahap hingga ke level 6,00%. Kebijakan tersebut mampu meredam pelemahan nilai tukar Rupiah. Untuk menekan defisit perdagangan, pemerintah juga telah mengambil sejumlah langkah, salah satunya dengan menekan impor bahan bakar minyak, khususnya jenis solar, melalui kebijakan wajib penggunaan solar dengan campuran 20% biodiesel (B20).

Faced with these conditions, the government and Bank Indonesia (BI) have taken a number of policies. Throughout 2018, in several stages, BI was recorded to raise the BI rate of 7 Days Repo Rate six times to the level of 6.00%. The policy was able to reduce the weakening of the Rupiah. To reduce the trade deficit, the government has also taken a number of steps, one of which is by suppressing imports of fuel oil, especially diesel fuel, through a mandatory policy of using diesel fuel with a mixture of 20% biodiesel (B20).

Melalui kebijakan ekonomi yang tepat, pemerintah masih dapat mengatasi sejumlah tantangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,17%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 5,07%. Walau pertumbuhan tersebut masih berada di bawah target pemerintah sebesar 5,40%, namun pencapaian tersebut merupakan hasil yang sangat baik. Indonesia mampu mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dalam 4 tahun terakhir.

Through appropriate economic policies, the government can still overcome a number of challenges and encourage national economic growth. Throughout 2018, Indonesia's economy grew by 5.17%, or higher than the previous year's growth of 5.07%. Although this growth was still below the government's target of 5.40%, this was a very good achievement. Indonesia has been able to maintain a positive trend in economic growth in the past 4 years.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 dipengaruhi oleh kenaikan pengeluaran konsumsi yang ditopang oleh pengelolaan inflasi yang baik oleh Pemerintah. Inflasi di tahun 2018 sebesar 3,13% atau lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2017 sebesar 3,61%. Pencapaian ini sesuai dengan target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 3,5% (±1%).

Indonesia's economic growth in 2018 was influenced by the increase in consumption expenditure which was supported by good management of inflation by the Government. Inflation in 2018 was 3.13% or lower than inflation in 2017 of 3.61%. This achievement is in accordance with the inflation target set by Bank Indonesia (BI) of 3.5% (± 1%).

Indonesia juga mampu membukukan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang meningkat di tahun 2018 meski menghadapi tantangan perekonomian global. Total realisasi investasi di tahun 2018 mencapai Rp721,30 triliun atau tumbuh 4,11% dibandingkan Rp692,9 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan investasi PMDN menjadi Rp328,6 triliun di tahun 2018, dari sebesar Rp262,3 triliun di tahun 2017. Sementara itu, investasi PMA turun 8,8% dari posisi tahun 2017 sebesar Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun di tahun berikutnya.

Indonesia was also able to record the realization of Domestic Investment (PMDN) and foreign investment (PMA) which increased in 2018 despite facing the challenges of the global economy. The total investment realization in 2018 reached IDR 721.30 trillion or grew 4.11% compared to IDR 692.9 trillion in the previous year. This increase is in line with the growth of domestic investment to IDR328.6 trillion in 2018, from IDR262.3 trillion in 2017. Meanwhile, FDI investment fell 8.8% from the position in 2017 of IDR430.5 trillion to IDR392.7 trillion in the following year.

Selain itu, tingkat kepercayaan konsumen tahun 2018 mengalami penguatan dan industri perbankan mengalami perbaikan dengan membukukan pertumbuhan kredit sebesar 12,45% dan meningkatnya kualitas kredit yang ditunjukan dengan rasio kredit bermasalah neto dan bruto yang semakin rendah masing-masing sebesar 2,67% dan 1,14%.

In addition, the consumer confidence level of 2018 has strengthened and the banking industry has improved by posting credit growth of 12.45% and increasing credit quality as indicated by the lower ratio of the net and gross non-performing loans of 2.67% and 1,14% respectively.

Tahun 2018, pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2018, pemerintah menganggarkan Rp410 triliun untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur di berbagai daerah.

In 2018, the government also continues to develop infrastructure projects to encourage national economic growth. In the 2018 Revised State Budget (APBNP), the government has budgeted IDR410 trillion for the construction of various infrastructure projects in various regions.

Kebijakan ekonomi yang tepat dan efektif juga telah mendorong lembaga pemeringkat Moody's *Investor Service* (*Moody's*) meningkatkan *Sovereign Credit Rating* (SCR) Republik Indonesia dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil.

Appropriate and effective economic policy has also prompted Moody's Investor Service rating agency to increase the Sovereign Credit Rating (SCR) of the Republic of Indonesia from Baa3 of Outlook Positive to Baa2 of Outlook Stable.

Pemerintah Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3% di tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan PDB sebesar 5,2% di tahun 2018. Pengendalian inflasi yang telah teruji dengan baik menyebabkan inflasi yang stabil dan berada di level 3,5%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah diperkirakan masih dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pasar global sehingga tekanan terhadap Rupiah masih berlanjut dan kurs Rupiah terhadap Dollar AS diperkirakan sebesar 14.400. Harga minyak dunia diprediksi bertahan di level 70,0 Dolar AS/barel sejalan dengan permintaan komoditas yang berlanjut di tahun 2019.

The Indonesian government estimates that the Indonesian economy will grow by 5.3% in 2019, or higher than the projected GDP growth of 5.2% in 2018. Well-tested inflation control causes stable inflation at a level of 3.5%. Meanwhile, the Rupiah exchange rate is estimated to be still influenced by the dynamics that occur in the global market so that the pressure on the Rupiah continues and the exchange rate of the Rupiah against the US Dollar is estimated at 14,400. World oil prices are predicted to stay at the level of 70.0 US dollars/barrel, which is in line with continued commodity demand in 2019.

PENYALURAN KUR DAN PERAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah terbukti terus menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu langkah yang dijalankan pemerintah adalah terus melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM untuk penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Melalui program KUR, pemerintah meningkatkan akses pada sumber pembiayaan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM. Program yang dijalankan sejak tahun 2007 ini terbukti mampu meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Mengutip data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, realisasi penyaluran KUR tahun 2018 mencapai Rp120,35 triliun atau mencapai 100,3% dari target yang ditetapkan sebesar Rp120 triliun. Kredit tersebut disalurkan kepada 4.440.028 debitur.

Tahun 2018, penyaluran KUR tersebar ke seluruh Indonesia dengan provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai penyerap KUR terbesar. Total penyaluran KUR ke tiga provinsi tersebut mencapai Rp56,97 triliun dan menjangkau 2.430.127 debitur. Sementara Bank Rakyat Indonesia merupakan penyalur KUR terbesar dengan total pinjaman Rp80,18 triliun yang diberikan kepada 3.940.925 debitur.

Pemerintah memang memberikan perhatian yang sangat besar kepada sektor usaha mikro sebagai unit ekonomi terkecil dalam pembiayaan KUR. Pelaku UMKM pun menunjukkan antusiasme dalam memanfaatkan KUR tersebut. Apalagi model pendampingan kredit kepada pelaku usaha dalam bentuk kelompok usaha seperti kelompok nelayan/petani/peternak atau Koperasi Unit Desa (KUD).

Kondisi keberadaan UMKM di Indonesia saat ini sebanyak 62.928.077 unit. Dari angka tersebut dirincikan untuk usaha besar dengan omzet per tahun lebih dari Rp50 miliar dan aset Rp10 miliar sebanyak sekitar 5.450 unit (0.01%), usaha menengah yang beromzet per tahun Rp2,5 miliar—Rp50

PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) DISTRIBUTION AND ROLE OF MSMES IN ECONOMIC DEVELOPMENT

To encourage national economic growth, the government continues to encourage the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which have proven continuously to be the main pillars of national economic growth.

One of the steps taken by the government is to continue implementing the KUR program. KUR is a program that aims to improve the real sector and empower MSMEs for job creation and poverty reduction. Through the KUR program, the government increased access to financing sources by providing credit guarantees for MSMEs. This program, which has been implemented since 2007, has proven to be able to increase the role of MSMEs in the national economy.

Citing data from the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, the realization of KUR distribution in 2018 reached idr120.35 trillion or equal to 100.3% of the target set at IDR120 trillion. The credit was channeled to 4,440,028 debtors.

In 2018, the distribution of KUR spread throughout Indonesia with the provinces of Central Java, East Java, and West Java as the biggest KUR users. The total KUR distribution to the three provinces reached IDR56.97 trillion and 2,430,127 debtors. Bank Rakyat Indonesia was the largest KUR distributor with a total loan of IDR80.18 trillion given to 3,940,925 debtors.

The government has indeed given enormous attention to the micro business sector as the smallest economic unit in KUR financing. The MSME actors, especially, with the credit assistance model for business actors in the form of business groups such as groups of fishermen/farmers/breeders or Village Unit Cooperatives (KUD) also showed enthusiasm in utilizing the KUR.

The current condition of MSMEs in Indonesia is 62,928,077 units. From this figure, it is detailed for large businesses with an annual turnover of more than IDR50 billion and assets of IDR10 billion for about 5,450 units (0.01%), medium-sized businesses which earn IDR2.5 billion per year - IDR50 billion with assets of IDR500 million

miliar dengan aset Rp500 juta—Rp50 miliar sebanyak 58.627 unit (0,09%), usaha kecil beromzet Rp300 juta—Rp2,5 miliar sebanyak 727.090 unit (0,21%), dan yang terbesar adalah usaha mikro dengan omzet sampai dengan Rp300 juta sebanyak sekitar 62.106.900 (98,70%).

Pembiayaan KUR menjadi penting karena kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,6%, khusus untuk usaha mikro mencapai 30,3%, dengan penyerapan tenaga kerja per tahun 87% dari total 97%.

ANALISIS INDUSTRI PENJAMINAN

Industri penjaminan memasuki tantangan yang cukup berat tahun 2018. Disahkannya Surat Edaran OJK Nomor S-129/D.05/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal pencatatan imbal jasa penjaminan (IJP), memberikan dampak yang cukup besar terhadap industri penjaminan di Indonesia. Realisasi kinerja industri penjamin di Indonesia pada akhir 2018 mengalami penurunan, menyusul penyesuaian pencatatan imbal jasa penjaminan sesuai aturan tersebut.

Mengutip data Statistik Lembaga Penjamin Indonesia yang diterbitkan OJK, total aset industri penjaminan pada Desember 2018 sebesar Rp18,09 triliun, meningkat 7,30% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16,86 triliun. Namun demikian, pendapatan IJP Bruto industri penjaminan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18,77% dari Rp2,14 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp1,74 triliun di tahun 2018.

Penurunan kinerja di industri bukan disebabkan oleh penyusutan bisnis, tetapi karena perubahan pencatatan IJP sesuai SEOJK Nomor S-129/D.05/2017. Berdasarkan regulasi tersebut, pencatatan IJP untuk KUR menjadi *accrual* bulanan. Dari sisi volume penjaminan dan jumlah kreditur yang dijaminkan tetap mengalami pertumbuhan.

Sementara itu, klaim bruto yang dibayarkan bertumbuh 19,28% dari Rp1,06 triliun per Desember 2017 menjadi Rp1,26 triliun pada Desember 2018. Dampaknya, laba bersih industri terkekan dalam sebesar 48,37% dari Rp769 miliar pada Desember 2017 menjadi Rp397 miliar pada Desember 2018.

- IDR50 billion for 58,627 units (0.09%), small businesses with IDR300 million - IDR 2.5 billion assets for 727,090 units (0.21%), and micro businesses, which are the largest, with a turnover of up to IDR 300 million for as much as 62,106,900 units (98.70%).

KUR financing is important because the contribution of MSMEs to Gross Domestic Product (GDP) is 57.6%. From that figure, the micro-enterprises' contribution reached 30.3%, with 87% of employment per year from a total of 97%.

ANALYSIS OF GUARANTEE INDUSTRY ANALYSIS

The guarantee industry faced a considerable challenge in 2018. The adoption of the Financial Service Authority (OJK) Circular Letter Number S-129 / D.05 / 2017 dated August 29, 2017 regarding the recording of guarantee fees (IJP), has a considerable impact on the guarantee industry in Indonesia. The realization of the guarantee industry's performance in Indonesia at the end of 2018 has experienced a sharp decline, following the adjustment of the recording of guarantee fee.

Quoting the Statistics of the Indonesian Insurance Agency published by the OJK, the total assets of the guarantee industry in December 2018 amounted to IDR18.09 trillion, an increase of 7.30% compared to the previous year of IDR16.86 trillion. However, the gross IJP revenue of the guarantee industry in 2018 decreased by 18.77% from IDR2.14 trillion in 2017 to IDR1.74 trillion in 2018.

The decline in performance in the industry was not caused by business depreciation, but because of changes in IJP recording regulated in SEOJK Number S-129 / D.05 / 2017. Based on the regulation, IJP recording for KUR becomes monthly accrual. In terms of guarantee volume and the number of secured creditors, they were still experiencing growth.

Meanwhile, paid gross claims grew by 19.28% from IDR1.06 trillion as of December 2017 to IDR1.26 trillion in December 2018. As a result, the industry net profit was pressurized by 48.37% from IDR769 billion in December 2017 to IDR397 billion in December 2018.

ANALISA OPERASIONAL
OPERATIONAL ANALYSIS

Di tengah kondisi industri penjaminan yang tingkat persaingannya semakin ketat, Jamkrindo masih dapat mempertahankan dan meningkatkan kepemimpinannya.

In the midst of the increasingly competitive conditions of the guarantee industry, Jamkrindo can still maintain and improve its leadership.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA

BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY

Tahun 2018, Pemerintah terus mendorong terciptanya stabilitas ekonomi makro, salah satunya dengan program paket kebijakan ekonomi I-XIV merupakan faktor pendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia tidak hanya dibidang pembangunan infrastruktur tetapi juga pengembangan *e-commerce* dan peningkatan kualitas hidup melalui rumah murah untuk rakyat.

In 2018, the Government continues to encourage macroeconomic stability, one of steps taken is by the issuance of economic policy package I-XIV which is a more equitable and fair driving force for national economic growth throughout Indonesia. This economic policy not only focused in infrastructure development but also e-commerce development and improving quality of life through cheap homes for the people.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong peran swasta, BUMN, dan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan, khususnya untuk UMKMK, dengan tujuan antara lain; (1) Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian; dan (2) Meningkatnya daya saing UMKMK, dengan arah kebijakan antara lain berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia UMKMK dan perluasan akses UMKMK ke pembiayaan. Selain itu terkait dengan arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2018 salah satunya pemberdayaan UMKMK. Guna menunjang kebijakan tersebut, Pemerintah mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akses UMKMK pada sumber pembiayaan. Untuk itu perlu ditingkatkan peran lembaga penjaminan kredit bagi UMKMK sebagai jembatan antara UMKMK dengan perbankan.

In addition, the Government encourages the role of the private sector, state-owned enterprises, and local governments to make creative innovations in financing instruments, especially for MSMEs, with the aim of; (1) Increased contribution of MSMEs in the economy; and (2) Increased competitiveness of MSMEs, with the goals of the policies, among others, in the form of increased competence of human resources in MSMEs and access expansion of MSMEs to finance. In addition, in relation to the aims of the policies and steps taken by the Government in carrying out economic functions in 2018, one of which is the empowerment of MSMEs. In order to support this policy, the Government seeks to increase institutional capacity and access to MSMEs in financing sources. For this reason, the role of credit guarantee institutions for MSMEs should be increased as a connecting bridge between MSMEs and banks.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan membaik serta komitmen Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya terkait dengan koperasi dan UMKM dan hal tersebut merupakan peluang bagi Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit dalam meningkatkan kapasitas penjaminannya kepada UMKMK dan meningkatkan perluasan akses UMKMK ke pembiayaan baik pembiayaan Bank maupun pembiayaan Lembaga Non Bank.

With the support of the government, the projected economic growth as well as the Government's commitment to its policies related to cooperatives and MSMEs is expected to improve. This is an opportunity for Perum Jamkrindo as a Credit Guarantee Company in increasing its guarantee capacity to MSMEs and increasing MSMEs access to good financing, be it Bank financing and financing of Non-Bank Institutions.

Namun demikian dengan semakin banyaknya pesaing yang terjun ke dalam bisnis penjaminan kredit merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Perum Jamkrindo. Oleh karena itu Perum Jamkrindo akan berusaha memperluas

However, with the increasing number of competitors driving its capital into the credit guarantee business, it is a challenge that must be faced by Perum Jamkrindo. For that reason, Perum Jamkrindo will try to expand the coverage of community-based

cakupan program berbasis masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan juga lembaga keuangan. Program ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Program lainnya seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).

programs and increase access of the poor to basic services and financial institutions. This program is an opportunity that can be utilized by the Company. Some of the activities that have been carried out are the People's Business Credit (KUR) guarantee program and other Credit Programs such as Food and Energy Security Loans (KKPE).

Pada tahun 2018 Perum Jamkrindo menghadapi trend potensi klaim yang meningkat dari program KUR baru. Hal ini mengingat bahwa dalam tiga tahun terakhir perusahaan melakukan penjaminan KUR baru dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu Perum Jamkrindo akan memfokuskan pada upaya penguatan daya saing melalui efisiensi dan efektivitas bisnis dengan meningkatkan kekuatan sistem manajemen operasional yang optimal, pertumbuhan pendapatan penjaminan untuk *sustainability*, peningkatan pelayanan kepada UMKMK, perluasan jaringan pemasaran dan diversifikasi usaha serta penyertaan langsung.

In 2018 Perum Jamkrindo faced a potential trend of claims that has increased significantly from the new KUR program. This is due to the fact that in the last three years the Company carried out a very large amount of new KUR guarantee. Therefore, Perum Jamkrindo will focus on strengthening competitiveness through business efficiency and effectiveness by increasing the strength of the optimal operational management system, encouraging growth in guarantee income for sustainability, improving services to MSMEs, expanding marketing networks, conducting business diversification and direct participation.

Tahun 2018, Perum Jamkrindo berada pada kuadran strategi bertumbuh. Pada posisi ini Perusahaan dituntut untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional. Dalam rangka mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki, maka Perum Jamkrindo perlu melakukan peningkatan kualitas layanan melalui penguatan manajemen operasional perusahaan dengan didukung oleh struktur organisasi yang solid.

In 2018, Perum Jamkrindo was in the growth strategy quadrant. In this position, the Company is required to achieve operational efficiency and effectiveness. In order to optimize the strength owned, Perum Jamkrindo needs to improve service quality through the strengthening of the Company's operational management supported by an organizational structure that solid.

Untuk mencapai sasaran Perusahaan tahun 2018, Perusahaan merumuskan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Mempertahankan akselerasi pertumbuhan yang telah dicapai
2. Pengembangan kompetensi baru untuk memenangkan persaingan pasar
3. Menjadi *learning center* bagi perusahaan penjaminan lainnya.
4. Mengelola risiko penjaminan
5. Meningkatkan pertumbuhan pasar baru dan jumlah pelanggan
6. Meningkatkan produktifitas dan kualitas SDM
7. Menerapkan tata kelola perusahaan.

To achieve the Company's goals in 2018, the Company formulates the following strategies:

1. *Maintaining the acceleration of growth*
2. *Development of new competencies to win market competition*
3. *Become a learning center for other guarantee companies.*
4. *Manage guarantee risk*
5. *Increase the growth of new markets and the number of customers*
6. *Increase the productivity and quality of HR*
7. *Implement corporate governance.*

ASPEK PEMASARAN

Perekonomian Indonesia hingga saat ini mengalami pertumbuhan yang stabil didukung dengan adanya target Pemerintah dalam pembangunan di bidang infrastruktur. Aliran dana terus dibutuhkan untuk menyokong pembangunan infrastruktur. Pihak perbankan maupun non perbankan tidak dapat terlepas dari dukungan penjaminan kredit, sejalan dengan tingginya risiko yang dihadapi oleh lembaga penyalur keuangan.

Prospek industri penjaminan secara umum saat ini diuntungkan oleh berakhirnya masa transisi Undang-Undang Penjaminan No 1 tahun 2016, sehingga sangat memungkinkan bagi perusahaan penjaminan akan mengalami peningkatan volume penjaminan yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan.

Selain itu, dalam industri penjaminan Perusahaan memiliki potensi yang sangat besar untuk ekspansi usaha. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia memberikan peluang pasar baru di industri penjaminan. Hal tersebut disebabkan karena Jamkrindo dapat menggarap pasar selain UMKM melalui sinergi BUMN.

Tahun 2018, Jamkrindo telah mulai melakukan pendekatan kepada beberapa BUMN untuk memberikan layanan penjaminan bagi BUMN dan mitra kerja BUMN terhadap pembiayaan yang mereka butuhkan. Strategi ini terbukti telah membuahkan hasil yang cukup baik, di mana volume penjaminan melalui sinergi BUMN yang dibukukan Perusahaan hingga akhir tahun 2018 cukup baik.

Di samping itu, pada produk-produk lainnya, Jamkrindo yang selama ini telah menempati posisi yang cukup baik di pasar masih berjalan sebagaimana biasanya. Jamkrindo terus meningkatkan kerja sama dengan industri perbankan, khususnya terhadap bank-bank yang menyalurkan program KUR serta terus melakukan edukasi kepada UMKMK akan fungsi industri penjaminan terhadap pengembangan usahanya.

MARKETING ASPECTS

To date, the Indonesian economy has experienced stable growth supported by the Government's target in infrastructure development. The flow of funds continues to be needed to support infrastructure development. Banking and non-banking parties need credit guarantee support, with the high risks faced by financial channeling institutions.

The prospect of the guarantee industry, in general, is currently benefiting from the end of the transition period of the Guarantee Law No. 1 of 2016, making it very possible for guarantee companies to experience an increase in the volume of guarantees that directly affect the Company's profits.

In addition, in the guarantee industry, the Company has enormous potential for business expansion. The existence of Government Regulation Number 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo provides new market opportunities in the guarantee industry. This is because Jamkrindo can work on markets other than MSMEs through the synergy of SOEs

In 2018, Jamkrindo has begun to approach several SOEs to provide guarantee services for SOEs and SOEs' partners on the financing they need. This strategy is proven to have produced quite good results, where the volume of guarantees through the synergy of SOEs that the Company has booked until the end of 2018 was quite good.

In addition to that, Jamkrindo's other guarantee products, which has been in a fairly good position in the market, is still running as usual. Jamkrindo continues to enhance cooperation with the banking industry, particularly with banks that channel the KUR program and continue to educate MSMEs on the function of the guarantee industry in developing their businesses.

Pangsa Pasar Industri penjaminan

Perusahaan memiliki potensi yang sangat besar untuk ekspansi usaha. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia memberikan peluang pasar baru di industri penjaminan. Hal tersebut disebabkan karena Jamkrindo dapat menggarap pasar selain UMKM melalui sinergi BUMN. Untuk produk KUR Porsi *market share* Perum Jamkrindo pada tahun 2018 dijabarkan dalam tabel berikut :

Market Share of The Guarantee Industry

The Company has an enormous potential for business expansion. The existence of Government Regulation Number 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo provides new market opportunities in the guarantee industry. This is because Jamkrindo can now work on markets other than MSMEs through the synergy of SOEs. For KUR products, the portion of Perum Jamkrindo's market share in 2018 is described in the following table:

Bank Penyalur *Channeling Banks*	**Realisasi** *Realization*			**Persentase** *Percentage*	
	Bank *Bank*	**Jamkrindo** *Jamkrindo*	**Pesaing** *Competitors*	**Jamkrindo** *Jamkrindo*	**Pesaing** *Competitors*
BRI	80.178.397	36.981.860	43.196.537	46,1%	53,9%
Mandiri	17.580.001	7.123.695	10.456.306	40,5%	59,5%
BNI	15.989.413	4.624.621	11.364.792	28,9%	71,1%
Bank lain	6.600.726	1.792.825	4.807.901	27,2%	72,8%
Total	**120.348.537**	**50.523.001**	**69.825.536**	**42,0%**	**58,0%**

Walaupun presentase *market share* Jamkrindo dilapangan terlihat bahwa Jamkrindo tidak lebih unggul dari perusahaan pesaing, namun pada tahun 2018 terdapat kerja sama *co-guarantee* dengan perusahaan pesaing. Hal tersebut menyebabkan porsi volume penjaminan yang dijamin oleh Jamkrindo & Perusahaan Pesaing akan sama (masing-masing sebesar 50%).

Even though in paper Jamkrindo's market share percentage does not appear to be superior to competing companies, in 2018 there was a co-guarantee collaboration with competing companies. This caused the portion of the guarantee volume guaranteed by Jamkrindo & Competitor Companies to be the same (50% each).

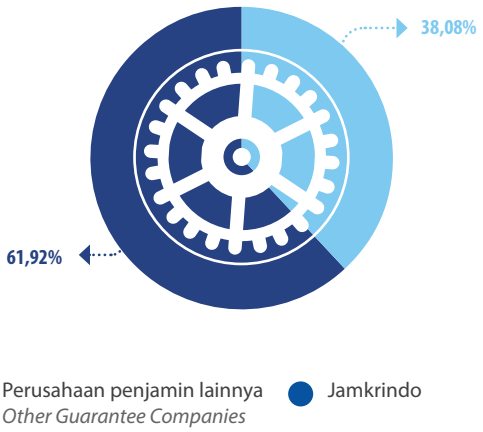
Adapun untuk produk produk resi gudang tahun 2018, terdapat peningkatan pangsa pasar atau jumlah Resi Gudang yang siginifikan, dibandingkan dengan tahun 2017. Total Nilai Resi Gudang (Nilai Komoditi) terbit pada tahun 2018 sebesar Rp100 miliar (2017; Rp27 miliar), dan penyaluran Kredit Resi Gudang sebesar Rp45 miliar (2017; Rp17miliar). Untuk penjaminan kredit Resi Gudang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 di mana penugasan pemerintah kepada Jamkrindo sebagai Lembaga Penjamin Sistem Resi Gudang, maka untuk produk penjaminan kredit berbasis Resi Gudang hanya dimiliki oleh Perum Jamkrindo.

As for warehouse receipt products, in 2018, there was an increase in market share. This means there was a significant number of Warehouse Receipts compared to 2017. The total value of Warehouse Receipts (Commodity Value) published in 2018 was IDR100 billion (2017; IDR27 billion), with the distribution of Warehouse Receipt credit of IDR45 billion (2017; IDR17 billion). In the guarantee of Warehouse Receipt credit, in accordance with Government Regulation No.1 of 2016 in which the government assigns Jamkrindo to be the Guarantee Institution of the Warehouse Receipt System, then, the Warehouse-based credit guarantee products are owned only by Perum Jamkrindo.

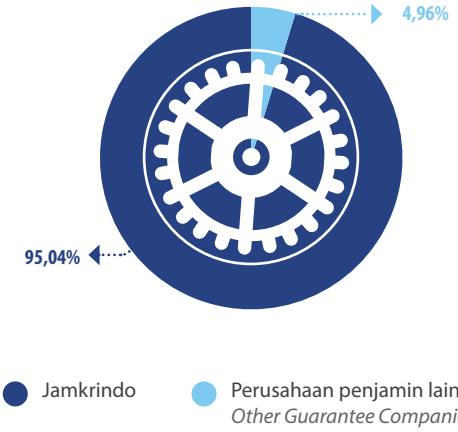
Hingga akhir tahun 2018, tidak terdapat data yang diterbitkan oleh pihak ketiga terkait pangsa pasar di industri penjaminan. Penyajian data pangsa pasar pada laporan ini dengan mengolah data dari statistik industri penjaminan yang diterbitkan oleh OJK dengan data internal Jamkrindo.

Until the end of 2018, there were no data published by third parties regarding market share in the guarantee industry. The market share data in this report is presented by processing data from the guarantee industry statistics issued by the Financial Service Authority with Jamkrindo's internal data.

Aset
Assets



IJP Bersih
Net Guarantee Fee



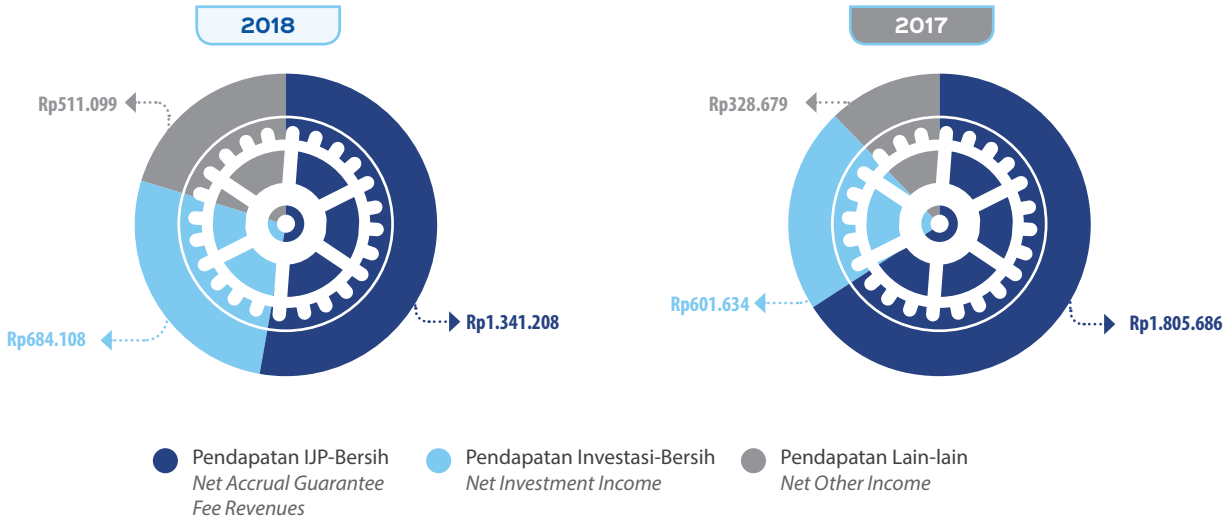
TINJAUAN PER SEGMEN USAHA

Laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan belum memisahkan segmen operasi Perusahaan, karena itu dapat dikatakan bahwa Perusahaan memiliki segmen operasi tunggal. Pembahasan segmen usaha dalam laporan ini dipisahkan berdasarkan sumber pendapatan Perusahaan yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu pendapatan imbal jasa penjaminan, pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain

REVIEW PER BUSINESS SEGMENTS

The Company's financial statements that have been audited by Hertanto Public Accountant Office, Grace, Karunawan included the Company's operating segments. Therefore, it can be said that the Company has a single operating segment. The discussion of business segments in this report is separated based on the Company's revenue sources which are divided into 3 (three) large groups, namely guarantee (IJP) income, investment income, and other income.

Komposisi Pendapatan Perum Jamkrindo (dalam jutaan Rupiah)
Perum Jamkrindo's Income Composition (dalam jutaan Rupiah/in IDR million)



IMBAL JASA PENJAMINAN

Merupakan sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Sesuai dengan POJK No. 2 Tahun 2017, Besarnya tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP) ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit:

1. Risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
   a. Rasio Klaim;
   b. Jenis Kredit atau Pembiayaan;
   c. Cakupan penjaminan; dan
   d. Jangka waktu penjaminan;
2. Biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan
3. Keuntungan

GUARANTEE FEE

It is a sum of money received by the Guarantee Company from the Guaranteed in the context of Guarantee activities as referred to in Law Number 1 of 2016 concerning Guarantees. In accordance with POJK No. 2 of 2017, the amount of the Guarantee Fee (IJP) is at least determined by the following consideration:

1. *Guaranteed risk, which is at least calculated based on:*
   a. Claim ratio;
   b. type of Credit or Financing;
   c. guarantee coverage; and
   d. guarantee period;
2. *General, operational, and marketing administration costs; and*
3. *Profit*

(dalam jutaan)
in million

Uraian *Description*	**Realisasi 2018 Rp** *(2018 Realization) IDR*	**RKAP 2018 Rp** *(Company Budget and Workplan IDR*	**Realisasi 2017 Rp** *(2017 Realization) IDR*	**% Realisasi 2018** *(2018 Realization %)*	
				(2 : 3)	**(2 : 4)**
1	2	3	4	5	6
KUR	744.684	792.307	1.359.768	93,99%	54,77%
Non KUR	897.218	935.072	676.285	95,95%	132,67%
Jumlah	**1.641.902**	**1.727.379**	**2.036.053**	**95,05%**	**80,64%**

Total imbal jasa penjaminan yang diperoleh 2018 sebesar Rp1,642 triliun atau mencapai 95,05% dari target 2018 sebesar Rp1,727 triliun dan mencapai 80,64% dibandingkan dengan tahun 2017. Imbal Jasa Penjaminan yang terdiri dari imbal jasa penjaminan KUR Rp744,7 miliar atau mencapai 93,99% dibandingkan dengan target 2018 serta mencapai 54,77% dari realisasi 2017 dan imbal jasa penjaminan Non KUR sebesar Rp897,2 miliar atau mencapai 95,95% dibandingkan target 2018 dan mencapai 132,67% dibandingkan realisasi tahun 2017. Imbal jasa penjaminan tersebut sangat signifikan diperoleh dari penjaminan Non KUR.

The total guarantee fee obtained in 2018 amounted IDR1,642 trillion or equal to 95.05% of the 2018 target of IDR1,727 trillion or 80.64% when compared to the 2017's value. The KUR guarantee fee obtained was at IDR744.7 billion or equal to 93.99% of the 2018 target or 54.77% of the 2017 realization. Non-KUR guarantee fees number was IDR897.2 billion or equal to 95.95% of the 2018 target or 132.67% of 2017 realization. The most significant gain of guarantee fee was from the Non-KUR guarantee.

Penjaminan KUR

KUR Guarantee

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia sesuai dengan Inpres nomor 6 Tahun 2007. Program penjaminan KUR bekerja sama dengan delapan (8) bank pelaksana yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, BTN Syariah dan BNI Syariah. Sementara sampai tahun 2018 Perum Jamkrindo telah bekerja sama dengan tiga puluh satu (31) Bank Pelaksana yang mendapat penugasan untuk penyaluran KUR.

People's Business Credit (KUR) is carried out by Perum Jamkrindo in accordance with Presidential Instruction number 6 of 2007. The KUR guarantee program was co-implemented by eight (8) banks namely Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, BTN Syariah and BNI Syariah. Until 2018, Perum Jamkrindo has cooperated with thirty-one (31) Executing Banks who received assignments for KUR distribution.

Penjaminan KUR diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dengan *plafond* kredit maksimal Rp 500 juta dengan sistem penjaminan secara *automatic cover*, di mana IJP ditanggung oleh pemerintah.

KUR guarantees are for Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSME-K) with a maximum credit limit of IDR500 million. This guarantee has an automatic cover guarantee system, in which the guarantee fee (IJP) is borne by the government.

Pendapatan IJP atas penjaminan KUR mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas penjaminan KUR dan realisasi imbal jasa penjaminan dan PMK No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010. Sehingga tarif IJP disesuaikan menjadi 3,25% x plafond kredit / pembiayaan x 70% atau sebesar 2,275%.

IJP's income for KUR guarantees follows the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 22 / PMK.05 / 2010 dated January 28, 2010, concerning the Second Amendment to PMK Number 135 / PMK.05 / 2008 dated September 24, 2008, concerning KUR guarantee facilities and realization of guarantee fee, and PMK No.189 / PMK.05 / 2010 dated November 2, 2010. Because of that, the IJP rates are adjusted to 3.25% x credit/financing limit x 70% or 2.275%.

Regulasi KUR 2016 didasarkan pada Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015, Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015, Keputusan Menko Perekonominan No. 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Untuk Jenis KUR tahun 2016 adalah Mikro, Retail, dan TKI.

The 2016 KUR regulation is based on the Decree of the Coordinating Minister for Economy No. 170 of 2015 concerning the Executing Bank and the KUR Guarantor Company which was stipulated on August 11, 2015, and on the decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 188 of 2015 concerning the Establishment of KUR Distributors and KUR Guarantor Companies which was stipulated on October 30, 2015, and on the Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 105 of 2016 concerning Stipulation of the People's Business Credit Guarantee Companies. The types of KUR in 2016 were Micro, Retail, and TKI.

Evaluasi terhadap pencapaian penjaminan KUR didasarkan pada RKAP tahun 2018 yang telah menetapkan target-target dalam pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Hasil Usaha KUR

Total pendapatan usaha KUR sebesar Rp1,332 triliun, bersumber dari penjaminan KUR sebesar 45,35% dari total pendapatan atau Rp745 miliar dan dari pendapatan investasi dana KUR sebesar 85,81% dari total pendapatan atau Rp587 miliar, yaitu masing-masing 93,99% dan 97,45% dibandingkan dengan RKAP tahun 2018.

Volume Kredit Jasa Penjaminan KUR

Volume KUR yang dijamin tahun 2018 sebesar Rp50,529 triliun atau 28,92% terhadap total realisasi kredit yang dijamin tahun 2018 sebesar Rp174,742 triliun dan mencapai 101,06% dari target volume kredit KUR tahun 2018 sebesar Rp50 triliun.

Imbal Jasa Penjaminan KUR

Total Imbal jasa penjaminan KUR sebesar Rp744,684 miliar atau 45,35% dari total realisasi imbal jasa penjaminan 2018 sebesar Rp1,642 triliun dan mencapai 93,99% dari target imbal jasa penjaminan KUR tahun 2018 sebesar Rp792,307 miliar.

Beban Klaim KUR

Total realisasi beban klaim KUR tahun 2018 sebesar Rp670 miliar atau sebesar 98,55% dari RKAP tahun 2018 yaitu sebesar Rp680 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp550 miliar, beban klaim mengalami kenaikan sebesar 121,89%. Hal ini dikarenakan meningkatnya klaim KUR pada tahun 2018 yaitu klaim KUR konvensional.

Beban Usaha KUR

Total realisasi beban usaha KUR sebesar Rp998,750 miliar atau 49,24% dari total realisasi beban usaha 2018 sebesar Rp2,028 triliun dan mencapai 74,12% dari target beban usaha KUR tahun 2018 sebesar Rp1,347 triliun.

The evaluation of the achievement of KUR guarantees is based on the 2018 Company Budget and Work Plan which has set targets in the implementation of the People's Business Credit guarantee.

Kur's Revenues

KUR's total operating revenues amounted to IDR1,332 trillion; this was from KUR guarantees which contributed 45.35% of total revenues or IDR745 billion, and from KUR funds investment revenues which contributed 85.81% of the total revenue or IDR587 billion. This was respectively 93.99% and 97.45% of the Company Work Plan and Budget in 2018.

Credit Volume of KUR Guarantee Service

The guaranteed KUR volume in 2018 amounted to IDR50,529 trillion or 28.92% of the total guaranteed credit realization in 2018 of IDR 174,742 trillion or equal to 101.06% of the KUR credit volume target in 2018 of IDR 50 trillion.

KUR Guarantee Fee

The total KUR guarantee fee was IDR744,684 billion or 45.35% of the total realization of 2018 guarantee fee of IDR1,642 trillion or 93.99% of the KUR guarantee fee target in 2018 of IDR792,307 billion.

KUR Claim Expenses

The total realization of the KUR claim expenses in 2018 amounted to IDR670 billion or 98.55% of the 2018 Company Work Plan and Budget which was IDR680 billion. When compared with the realization in 2017 of IDR550 billion, the value of claim expenses increased by 121.89%. This is due to the increase in KUR claims in 2018, specifically in conventional KUR claims.

KUR Operating Expenses

The total realization of KUR operating expenses amounted to IDR 98,750 billion or 49.24% of the total realized operating expenses of 2018 of IDR2,028 trillion, or 74.12% of the target of KUR's operating expenses of 2018 of IDR1,347 trillion.

Laba Operasi KUR

Laba bersih KUR sebesar Rp14,138 miliar atau 5,40% terhadap laba bersih termasuk Beban Komprehensif Lainnya Perusahaan tahun 2018 sebesar Rp262 miliar dan mencapai 6,22% terhadap target yang ditetapkan tahun 2018 sebesar Rp227 miliar.

Strategi Penjaminan KUR

Untuk meningkatkan perolehan IJP dari penjaminan KUR, tahun 2018, strategi yang dijalankan Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekspansi bisnis penjaminan KUR melalui percepatan negosiasi dengan mitra baru untuk mempercepat penandatanganan PKS, meningkatkan kualitas pelayanan serta responsif terhadap keluhan mitra dan perubahan kebijakan dari pemerintah.
2. *Monitoring* aktif bersama Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar pelaksanaan penjaminan KUR sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan sinergi internal dalam problem *solving* penjaminan KUR *online*.
4. Melakukan sinergi BUMN dalam praktik penjaminan.

Kinerja Penjaminan KUR

Jumlah KUR yang dijamin Perum Jamkrindo tahun 2018 adalah sebesar Rp50.529 miliar, dengan BRI sebagai penyaluran KUR terbesar dengan kontribusi sebesar 73,19%. Setelah BRI, porsi penerima penjaminan terbesar Perum Jamkrindo adalah Bank Mandiri sebesar 16,70% kemudian diikuti oleh BNI sebesar 6,38%.

Adapun penerbitan Sertifikat Penjaminan KUR oleh Perum Jamkrindo per Bank periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018 yaitu :

Net Profit of KUR

KUR's net profit amounted to Rp14,138 billion or 5.40% of net income. This includes Other Comprehensive Expenses in 2018 amounting to IDR262 billion. It was 6.22% of the target set in 2018 of IDR227 billion.

KUR Guarantee Strategy

To increase IJP from KUR guarantees, in 2018, the strategies implemented by Jamkrindo are as follows:

1. *Increase the expansion of the KUR guarantee business through accelerated negotiations with new partners to accelerate the signing of cooperative agreement, improve service quality, and be responsive to partner partners' complaints and policy changes from the government.*
2. *Active monitoring with Regional and Branch Offices so that KUR guarantees are in accordance with applicable regulations.*
3. *Increase internal synergy in solving KUR guarantee problems online.*
4. *Conduct SOEs synergy in guarantee practices.*

KUR Guarantee Performance

The amount of KUR approved by Perum Jamkrindo in 2018 is IDR 50,529 trillion, with BRI as the largest KUR distribution with a contribution of 73.19%. After BRI, Perum Jamkrindo's largest portion of the guarantee recipient is Bank Mandiri at 16.70% and BNI at 6.38%.

The issuance of KUR Guarantee Certificate per Bank by Perum Jamkrindo for the period of January 1, 2018, until. December 31, 2018 can be seen below:

Rp Juta
in IDR Million

Penerima Jaminan *Guarantee Recipients*	**Plafond** *Limit*	**%Plafond** *Limit Percentage*	**UMKM** *MSMEs*	**TK**
Bank Rakyat Indonesia	36,981,860	73.19%	1,810,030	87,236,419
Bank Mandiri	7,123,695,20	14,10%	105,176	105,176
Bank Negara Indonesia	4,624,621,26	9.15%	32,366	67,246
Bank Tabungan Negara	17,152,00	0,03%	62	259

Rp Juta
in IDR Million

Penerima Jaminan *Guarantee Recipients*	**Plafond** *Limit*	**%Plafond** *Limit Percentage*	**UMKM** *MSMEs*	**TK**
Bank Swasta *Private Banks*	624,072,25	1.24%	19,822	29,965
BPD	1,102,507.48	2.18%	12,560	25,321
Multifinance	52,116,91	0.10%	3,137	3,137
Koperasi *Cooperatives*	2,976,00	0,01%	129	203
Total	**50,529,001.35**	**100.00%**	**1,983,282**	**87,467,726**

Berdasarkan sektor ekonomi, yang mendapatkan KUR terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan porsi sebesar 57,15%. Adapun Penerbitan Sertifikat Penjaminan KUR oleh Perum Jamkrindo untuk periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 berdasarkan Sektor Ekonomi yang dibiayai Bank Pelaksana KUR adalah sebagai berikut :

Based on the economic sector, the biggest KUR sector is the Retail and Trade Sector with a portion of 57.15%. The Issuance of the KUR Guarantee Certificate by Perum Jamkrindo for the period of January 1, 2018.d. December 31, 2018, based on the Economic Sector financed by the Bank Partners of KUR are as follows:

No	**Sektor** *Sectors*	**Realisasi 01 Jan – 31 Desember 2018** *Realization Period of January 1 – December 31, 2018*			
		Plafond *Limit*	**%Plafond** *Limit Percentage*	**UMKM** *MSMEs*	**TK**
1	Industri Pengolahan *Processing industry*	2.374.735.00	4,70%	77.797	13.463.715
2	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya *Community, social culture, entertainment, and other individuals services*	3.231.719.07	6,40%	148.156	10.818.937
3	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial *Health services and social activities*	61.362.25	0,12%	640	963
4	Jasa Pendidikan *Educational services*	43.586.15	0,09%	1.237	1.850
5	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga *Housemaid services*	5.111.01	0,01%	76	110
6	Kegiatan yang belum jelas batasannya *Activities that have no clear boundaries*	102.529.75	0,20%	5.502	5.507
7	Konstruksi *Construction*	46.042.99	0,09%	272	553
8	Listrik, Gas, dan Air *Electricity, gas, and water*	1.050.00	0,00%	3	7
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum *Provision of accommodations and catering*	1.537.017.78	3,,04%	27.398	3.035.521

No	Sektor *Sectors*	Realisasi 01 Jan – 31 Desember 2018 *Realization Period of January 1 – December 31, 2018*			
		Plafond *Limit*	**%Plafond** *Limit Percentage*	**UMKM** *MSMEs*	**TK**
10	Perantara Keuangan *Financial intermediary*	17,996.00	0.04%	73	251
11	Perdagangan Besar dan Eceran *Large and retail trade*	28,874,853.75	57.15%	1,113,717	51,950,479
12	Perikanan *Fisheries*	723,262.35	1.43%	28,835	41,110
13	Pertambangan dan Penggalian *Mining and digging*	2,066.00	0.00%	36	79
14	Pertanian, Perbiuiruan, dan Kehutanan *Farming, hunting, and forestry*	12,318,919.11	24.38%	548,010	7,405,991
15	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan *Real estate, rental business, and company services*	594,133.87	1.18%	14,152	18,950
16	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi *Transportation, warehousing, and communication*	594,616.17	1.18%	17,378	723,703
Total		**50,529,001.35**	**100.00%**	**1,983,282**	**87,467,726**

Penjaminan Non-KUR

Selain produk penjaminan KUR, Perum Jamkrindo juga memiliki beragam produk lainnya diluar KUR seperti penjaminan distribusi barang, FLPP, keagenan kargo, konstruksi,kontra bank garansi, KPR, kredit mikro, kredit otomotif, kredit umum, *surety bond, payment bond*, pembiayaan *invoice*, kredit super mikro, keagenan kargo, Resi Gudang, *Capital management Guarantee* (CMG) dan lain-lain.

Beberapa produk yang berkontribusi besar bagi kinerja produksi penjaminan Non-KUR antara lain penjaminan FLPP, Kredit Multiguna, kredit mikro dan *surety bond.* Pada tahun 2018, imbal jasa penjaminan non-kur mencatatkan angka sebesar sebesar Rp897 miliar atau mencapai 95,95% dibandingkan target 2018 dan mencapai 132,67% dibandingkan realisasi tahun 2017.

Non-KUR Guarantee

In addition to KUR guarantee products, Perum Jamkrindo also has a variety of other products outside KUR such as goods distribution guarantees, FLPP, cargo agency, construction, counter-bank guarantees, mortgages, microcredit, automotive credit, general credit, surety bonds, payment bonds, invoice financing, super micro credit, Warehouse Receipt, Capital management Guarantee (CMG) and others.

Some products that contribute greatly to the performance of Non-KUR guarantee production include the FLPP guarantee, Multipurpose Credit, Micro-credit, and surety bonds. In 2018, non-KUR guarantee services recorded a figure of IDR897 billion or 95.95% of the 2018 target, or 132.67% if compared to 2017's target.

Produksi Penjaminan Non-KUR

Non-KUR Guarantee Production

Produk *Product*	**Volume Penjaminan 2018** *Guarantee Volume 2018*	**Volume Penjaminan 2017** *Guarantee Volume 2017*
CMG	9.431.927.998.845	8.438.322.236.124
Custom Bond	283.500.556.288	100.540.018.144
Distribusi Barang *Goods Distribution*	285.182.602.364	43.120.430.000
FLPP	35.267.046.907.362	27.251.435.330.667
Keagenan Kargo *Cargo Agency*	107.210.000.000	69.651.000.000
Konstruksi *Construction*	1.836.510.460.176	2.605.232.418.245
Kontra Bank Garansi *counter bank guarantees*	6.913.676.552.050	6.909.048.517.790
KPR	59.790.979.672	79.608.432.000
Kredit Mikro *Micro Credit*	7.613.173.074.715	4.954.477.928.359
Kredit Multiguna *Multipurpose Credit*	16.180.010.584.993	14.515.778.204.613
Kredit OTO *Automotive Credit*	6.137.201.532.575	5.182.718.389.664
Kredit Subsidi Resi Gudang *Warehouse Receipt System Credit*	1.897.850.000	1.165.000.000
Kredit Super Mikro *Super Micro Credit*	9.207.293.500.000	3.715.606.014.000
Kredit Umum *General Credit*	1.473.846.029.732	1.055.729.900.090
Payment Bond	235.722.784.453	517.728.205.432
Pembiayaan Invoice *Invoice Financing*	434.276.718.537	65.297.643.233
Surety Bond	7.395.157.746.480	8.845.164.423.764
Penjaminan Fintech *Fintech Guarantee*	190.826.500.000	9.641.000.000
Total	**103.054.252.348.241**	**84.360.365.092.125**

* Tidak Termasuk Entitas Anak Perusahaan
** Not including subsidiaries*

Strategi Penjaminan Non-KUR

Menghadapi tantangan usaha di tahun 2018, Jamkrindo telah melaksanakan sejumlah strategi, antara lain:

1. Sinergi dengan Himbara : Realisasi Penjaminan KBG Sinergi dengan Himpunan Bank Milik Negara
2. Sinergi dengan Himppara : Melakukan kerja sama dengan Asosiasi perusahaan penjaminan dan perasuransian milik negara.
3. Sinergi dengan BUMN dan Mitra Strategis Lainnya: Melakukan kerja sama penjaminan dengan mitra (Penerima Jaminan dan Terjamin) BUMN, seperti BUMN Karya (Indonesia *Infrastructure Finance,* Brantas Abipraya, Pembangunan Perumahan, Amartha Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya). Kerja sama dengan Mitra Strategis yakni *multifinance* yang potensial.
4. Sinergi dengan perusahaan penjamin daerah : Penawaran CO- *Guarantee* dengan Jamkrida Jatim, Bali, Riau, NTB, Jabar, Sumbar, Sumsel, Kalteng, Babel, Banten, NTT, Kaltim, Papua, Jateng, DKI Jakarta, Kalbar, dan Sulsel, Realisasi CO- *Guarantee* dengan Perusahaan Penjamin daerah. Sosialisasi kerja sama *bundling* produk sinergi BUMN dengan Askrindo, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)
5. Implementasi SB *Online* dan *Mobile Apps* SB: Implementasi SB *Online* dan *Mobile Apps* SB pada Kanwil dan kantor cabang perum Jamkrindo, Implementasi SB *Online* dan *Mobile Apps* SB melalui asosiasi – asosiasi kontraktor, Pengenalan SB *Online* dan *Mobile Apps* SB melalui media cetak, elektronik dan media sosial.
6. Pembenahan SOP Bank Garansi dan *Suretybond*, Melakukan *Award* dan *Reward* dalam rangka meningkatkan pangsa pasar, Membentuk layanan Jamkrindo Prioritas.

Adapun untuk Penjaminan Sistem Resi Gudang Pada tahun 2018, Jamkrindo masih mengalami kendala dalam memaksimalkan fungsinya di dalam Sistem Resi Gudang. Karena yang dibutuhkan dalam pengembangan pasar Resi Gudang antara lain, sebagai berikut:

1. Lembaga Pelaksana Penjamin Sistem Resi Gudang (LPPSRG)-Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016. Penyertaan Permodalan Negara yang belum terealisasikan, sehingga Penjaminan Sistem Resi Gudang (SRG) belum bisa berjalan secara maksimal untuk melindungi pemilik resi dari risiko yang terdapat dalam Resi Gudang; dengan

Non-KUR Guarantee Strategy

Facing business challenges in 2018, Jamkrindo has implemented a number of strategies that include:

1. *A synergy with Himbara: Realization of KBG Synergy Guarantee with the State-Owned Bank Association*
2. *A synergy with Himppara: Collaborating with the state-owned insurance and guarantee companies association.*
3. *A synergy with State-Owned Enterprises and Other Strategic Partners: Undertake joint ventures with state-owned partners (as the Guaranteed and Guarantee Recipients), such as BUMN Karya (Indonesia Infrastructure Finance, Brantas Abipraya, Housing Development, Amartha Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya). Also, forming collaboration with Strategic Partners, namely potential multi-finance companies.*
4. *A synergy with regional guarantor companies: co-guarantees offers with Jamkrida Jatim, Bali, Riau, NTB, West Java, West Sumatra, South Sumatra, Central Kalimantan, Babel, Banten, NTT, East Kalimantan, Papua, Central Java, DKI Jakarta, West Kalimantan and South Sulawesi. Realization of co-guarantee with regional guarantee company. Dissemination of bundling cooperation of products of a synergy between SOE with Askrindo, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)*
5. *Implementation of SB Online and SB Mobile Apps: Implementation of SB Online and SB Mobile Apps on Perum Jamkrindo's regional and branch offices, Implementation of SB Online and SB Mobile Apps through contractor associations, Introduction of SB Online and SB Mobile Apps through print, electronic media, and social media.*
6. *Improvement of Bank Guarantee and Surety bond SOPs, Conducting Awards and Rewards programs to increase market share, Establish Priority Jamkrindo services.*

As for the Guarantee of Warehouse Receipt System (SRG) In 2018, Jamkrindo was still experiencing difficulties in maximizing its function in the Warehouse Receipt System since what is needed in the development of the Warehouse Receipt market includes the followings:

1. *Executing Agency for Guarantor of Warehouse Receipt System (LPPSRG) as per Government Regulation No.1 of 2016. On this, the State Equity Participation has not been realized yet. As a result, the Guarantee of Warehouse Receipt System (SRG) cannot run optimally to protect receipt holders from the risks contained in the Warehouse Receipt System;*

belum berjalannya Program Penugasan dari Pemerintah tersebut, maka *Desk*. Sistem Resi Gudang fokus ke dalam pengembangan Penjaminan Kredit Resi Gudang.

2. Pelaksanaan Penjaminan Kredit Resi Gudang.
   a. Belum terbentuknya Komite Resi Gudang, yang melibatkan Regulator (Bappebti, BI, OJK, Kemenko), di mana komite tersebut bertugas untuk mengawasi pertumbuhan Resi Gudang (Nilai Komoditi dan/ atau Kredit Resi Gudang), melakukan evaluasi secara berkala dan mewajibkan (mandatori) bagi Perbankan untuk menyalurkan kredit Resi Gudang.
   b. Kerja sama Penjaminan Kredit dengan lembaga keuangan penyalur kredit SRG belum optimal; disebabkan oleh rendahnya pemahaman SDM perbankan, mengenai Resi Gudang, serta sosialiasi yang sangat kurang di internal perbankan;
   c. Kredit Resi Gudang yang berbeda, dalam hal *Service Level Agreement* (SLA) dengan kredit mikro pada umumnya, karena kredit tersebut berbasis Agunan (mirip dengan Gadai);
   d. Belum adanya perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 tahun 2009 yang mewajibkan Kredit Resi Gudang bersubsidi wajib berpenjaminan, selayaknya Kredit Program lainnya;
   e. Bursa Resi Gudang yang belum terbentuk sehingga pemilik resi masih harus menjalankan transaksi fisik;
   f. Calon terjamin merupakan Non UMKMK, untuk kredit komersial Resi Gudang;

with the Assignment for the Government's Program is not yet in effect, the Desk of Warehouse Receipt System focuses on developing Warehouse Receipt Credit Guarantee.

2. *Implementation of Warehouse Receipt Credit Guarantee*
   a. The Warehouse Receipt Committee has not been formed yet. The formation involves Regulators (such as Bappebti, BI, OJK, coordinating Ministry). The formed committee will have the duty to oversee the growth of Warehouse Receipts (Commodity Values and/or Warehouse Receipt Credit), to conduct periodic and mandatory evaluations for Banking to channel Warehouse Receipt Credits.
   b. The collaboration of Credit Guarantee with SRG credit channeling financial institutions is not yet optimal; This was caused by the low understanding of banking human resources concerning Warehouse Receipts, and lack of information on that in the banking sector;
   c. The distinctiveness of Warehouse Receipt Credit, in terms of Service Level Agreement (SLA), which is different from microcredit in general, because the credit is collateral-based (similar to pawn business);
   d. There has been no change in Minister of Finance Regulation No. 171 of 2009 which requires subsidized Warehouse Receipt Credits to be guaranteed, just like other Credit Programs;
   e. Warehouse Receipt Exchange has not been formed yet. Thus, the receipt holders still have to carry out physical transactions;
   f. Guaranteed candidates for commercial credits of Warehouse Receipts are Non-MSMEs;

Agar dapat mengelola dengan baik beberapa tantangan tersebut di atas, Desk Penjaminan SRG memiliki beberapa strategi di antaranya sebagai berikut :

In order to properly manage the challenges mentioned above, the SRG Guarantee Desk has several strategies including the following:

No	Strategi *Strategies*	Program Kerja *Work Plan*
1.	Mengupayakan Pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) *Striving for Disbursement of State Equity Participation (PMN)*	Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan seluruh pihak yang terkait, untuk menindaklamjuti proses pencairan PMN. *Coordinate with the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) and all related parties, to follow up the State Equity Participation disbursement process.*

No	Strategi *Strategies*	Program Kerja *Work Plan*
2.	Optimalisasi produk penjaminan berbasis Resi Gudang *Optimization of guarantee products based on Warehouse Receipt*	• Optimalisasi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang pelaksana produk-produk Penjaminan SRG berdasarkan potensi SRG; • Sosialisasi kepada seluruh *Stakeholder* • Melakukan kerja sama dengan Mitra Perbankan dan Non-Perbankan • Sinergi BUMN • *Optimization of Regional Offices and Branch Offices implementing Warehouse Receipt System Guarantee products based on Warehouse Receipt System potential;* • *Dissemination to all stakeholders* • *Cooperating with Banking and Non-Banking Partners* • *Synergy of SOEs*
3.	Investasi Sarana dan Prasarana Divisi Penjaminan SRG *Facility and Infrastructure Investment of the Warehouse Receipt System Guarantee Division*	• Sistem Informasi Desk Penjaminan SRG Membangun jaringan sistem informasi yang terpadu: a. Internal Memastikan sistem informasi produk-produk Desk Penjaminan SRG dapat berjalan dengan baik b. Eksternal - Badan Pengawas; - Pusat Registrasi; - Seluruh Pengelola Gudang; - Lembaga keuangan Bank maupun Non Bank. • *Warehouse Receipt System Guarantee Desk Information System* *Build a network of integrated information systems:* *a. Internal* *Ensuring information systems for Warehouse Receipt System Guarantee Desk products can run well* *b. External* - *Supervisory Board;* - *Registration Center;* - *All Warehouse Managers;* - *Bank and Non-Bank financial institutions.*
4.	Pengembangan produk penjaminan baru *Development of new guarantee products*	• Menggali potensi produk penjaminan baru berbasis resi gudang; • Pembuatan produk baru penjaminan berbasis resi gudang; • *Explore the potential of the new warehouse receipt-based guarantee products;* • *Manufacture of new warehouse receipt-based guarantee products;*
5.	Monitoring dan evaluasi produk penjaminan *Monitoring and evaluation of guarantee products*	• Mengumpulkan data dan informasi mengenai kegiatan SRG; • Analisis ketercapaian kinerja program dibandingkan dengan rencana program, indikator kunci (ukuran hasil) dan target yang ditetapkan; dan • Identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan program. • *Collect data and information about Warehouse Receipt System activities;* • *Analysis of program performance achievements compared to program plans, key indicators (outcome measures) and set targets; and* • *Identification of problems and efforts to solve them in implementing the program.*

INVESTASI

Selain dari menjalankan bisnis penjaminan, Perusahaan juga memperoleh pendapatan dari investasi yang dilakukan pada instrumen-instrumen keuangan yang tersedia di pasar, baik pasar modal maupun perbankan. Kewenangan Pengambilan setiap keputusan (transaksi) investasi sebagai mana tabel di bawah ini:

INVESTMENT

Aside from running the guarantee business, the Company also receives investment income from financial instruments available on the market, be it from capital markets and banks. The authority to take each investment decision (transaction) is as follows:

Pejabat Berwenang *Authorized official*	**Money Market (Rp miliar)** *in IDR billion*	**Non- Money Market (Rp miliar)** *in IDR billion*
Kepala Divisi Yang Membidangi Investasi *Head of Division in charge of Investment*	s.d. 15	-
Direktur Yang Membidangi Investasi *Director in charge of investment*	> 15 s.d. 50	s.d. 25
Direktur Utama *President Director*	> 50	> 25

Bila terjadi kondisi ketidakpemenuhan atas dan/atau SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku, diperlukan persetujuan pemutus wewenang satu level lebih tinggi atau maksimum seluruh Dewan Direksi.

If there is a condition of non-compliance with the SOP (Standard Operating Procedure) that applies, it is necessary to have a higher or maximum level of approval of the authority of the Board of Directors.

Strategi Investasi

Investment Strategies

DEPOSITO/*DEPOSIT*

1. Mendapatkan Suku Bunga Minimal 7,02%
2. Optimalisasi Dana Giro dimanfaatkan untuk melakukan penempatan DOC Mingguan agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal
3. Jangka waktu penempatan deposito disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi pasar yang meliputi suku bunga acuan
4. Untuk penempatan deposito (Reciprocal) minimal bunga yang diberikan harus setara dengan suku bunga LPS

1. *Get a minimum interest rate of 7.02%*
2. *Current Account fund is optimized to be used to place weekly DOCs in order to get maximum returns*
3. *The period of placement of deposits is adjusted to the conditions of the company and the market which follows the benchmark interest rate*
4. *For deposit placement (reciprocal), the minimum interest given must be equal to the interest rate of the Saving Guarantee Agency (LPS)*

OBLIGASI NEGARA/ *GOVERNMENT BONDS*

1. Pembelian diprioritaskan melalui proses lelang
2. Lebih aktif dalam melakukan trading bagi obligasi negara yabg sudah membukukan keuntungan
3. Pembelian obligasi negara diusahakan pembelian diskonto agar mendapatkan yield yang lebih maksimal

1. *Purchases are prioritized through the auction process*
2. *More active in trading for state bonds that have posted profits*
3. *Purchase of state bonds is sought to buy discount in order to get maximum yield*

OBLIGASI KORPORASI/ *CORPORATE BONDS*

1. Mencari obligasi korporasi (BUMN/ anak BUMN)
2. Lebih aktif dalam melakukan trading bagi obligasi korporasi yang sudah membukukan keuntungan
3. Pembelian obligasi korporasi diusahakan di pasar perdana

1. *Seek corporate bonds (belonging to SOEs / SOE's Subsidiaries) with a higher coupon rate*
2. *More active in trading corporate bonds that have posted profits*
3. *Purchase corporate bonds which are cultivated outside the primary market*

REKSADANA/*MUTUAL FUNDS*

1. Pemilihan reksadana harus memperhatikan *return* yang kompetitif
2. Pemilihan manager investasi harus memperhatikan *track record, management fee*, dan minimal harus menduduki peringkat 25 besar
3. RDPT dan RDT menjadi prioritas karena memiliki *reccuring income* dengan minimal imbal hasil 8,5%
4. *Trading* reksadana yang sudah membukukan profit
5. Optimalisasi dividen reksadana
6. *Switching* reksadana saham menjadi reksadana pendapatan tetap

1. *The selection of mutual funds must pay attention to competitive returns*
2. *The selection of investment managers must pay attention to the track record, management fee, and at a minimum must be ranked in the top 25*
3. *Limited Investment Funds and protected mutual funds are priorities because they have a recurring income with a minimum yield of 8.5%*
4. *Prioritize mutual fund trading that has booked profits*
5. *Optimalization dividend mutual funds*
6. *Switching stock mutual funds into fixed income mutual funds*

SAHAM/*SHARES*

1. Pemilihan saham yang termasuk dalam kategori LQ45 secara dua periode berturut-turut
2. *Profit taking instrument* saham yang sudah membukukan keuntungan
3. Memilih saham yang liqid dan memiliki kapitalis yang besar dengan memperhatikan *issue* yang beredar maupun laporan keuangan Perusahaan

1. *Select the shares which have been included in the LQ45 category for two consecutive periods*
2. *Profit taking stock instruments that have posted profits*
3. *Choose stocks that are liquid and have large capital by paying attention to outstanding issues and the Company's Financial Statements*

Kinerja Investasi *Investment Performance*

No	Instrumen Investasi *Investment Instruments*	RKAP 2018 *Company Work Plan and Budget of 2018*		Realisasi	
		Nominal *Nominal Value*	Pendapatan (Gross) *Gross Income*	Nominal *Nominal Value*	Pendapatan (Gross) *Gross Income*
1	Deposito *Time Deposits*	4.951.343.810.001	324.149.028.000	5.743.101.868.085	360.431.421.527,27
2	Marginal Deposito *Marginal Deposits*	336.140.000.000		394.140.000.000	
3	Obligasi Negara *Government Bonds*	1.137.028.-71.131	78.454.936.908	1.144.942.019.433	72.235.238.212,92
4	Obligasi Korporasi *Corporate Bonds*	1.004.281.650.132	80.242.103.846	962.276.131.697	94.259.100.007,27
5	Reksadana *Mutual Funds*	1.938.830.783.153	155.106.462.652	1.510.343.506.033	119.851.756.468,29
6	Saham *Shares*	181.055.270.308	19.916.079.734	288.623.686.400	17.291.107.988,31
7	Penyertaan pada Jamkrindo Syariah *Participation in Jamkrindo Syariah*	364.987.500.000		299.987.500.000	
Total		**9.913.667.084.725**	**657.868.611.140**	**10.343.414.711.649**	**664.158.624.204,07**
Biaya Investasi *Investment Expenses*			(8.000.000.000)		4.353.835.218,56
Pendapatan Investasi Bersih *Net Investment Income*			649.868.611.140		659.804.788.985,51

Perum Jamkrindo mencatatkan kinerja investasi yang baik selama tahun buku 2018, dengan pencapaian pendapatan sebesar 101% dari RKAP 2018 dan YoI (*Yield on Investment*) sebesar 6,83%. Dana kelolaan mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan target dengan RKAP 2018 dan secara YoY (*Yield on Year*) meningkat sebesar 9%. Dalam pengelolaan investasi, Perum Jamkrindo mengikuti ketentuan OJK dan arahan investasi perusahaan. Saat ini, strategi masih tetap konservatif dengan banyak portofolio deposito untuk menunjang bisnis penjaminan, selain itu untuk meningkatkan kinerja investasi perusahaan banyak berinvestasi di SBN, *Corp Bonds* dan Reksadana yang berbasis *fix return*.

Perum Jamkrindo recorded a good investment performance during the 2018 fiscal year, with revenues reaching 101% of the 2018 Company Work Plan and Budget, and YoI (Yield on Investment) of 6.83%. The managed fund increased by 4% compared to the target of the 2018 Company Work Plan and Budget and on a YoY (Yield on Year) basis increased by 9%. In managing investment, Perum Jamkrindo follows the Financial Service Authority (OJK) provisions and company investment guidelines. At present, the strategy is still conservative with many deposit portfolios to support the guarantee business, in addition to increasing investment performance, the Company invests heavily in SBN, Corp Bonds and mutual funds based on fixed returns.

LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain bersih merupakan pendapatan diluar usaha setelah dikurangi beban diluar usaha yang terdiri dari pendapatan subrogasi, pendapatan lainnya, pendapatan subrogasi lainnya, pendapatan jasa giro, pendapatan jasa administrasi penjaminan, dan pendapatan administrasi BUM, dengan rincian sebagai berikut:

OTHERS

Other net income is income outside the business after deducting expenses outside the business. Other net income consists of subrogation income, other income, other subrogation income, income from demand deposits, income from guarantee administration services, and BUM administration income, with details as follows:

dalam jutaan Rupiah
in Billion Rupiah

Uraian *Description*	**Tahun** *Year*		**Pertumbuhan/Penurunan** *Increase/Decrease*	
	2018	**2017**	**Rp**	**%**
Pendapatan Subrogasi *Subrogation Income*	461.125	285.834	175.291	61,33%
Pendapatan Lainnya *Other Income*	24.179	21.887	2.292	10,47%
Pendapatan Subrogasi Lainnya *Other Subrogation Income*	15.674	11.033	4.641	42,06%
Pendapatan Jasa Giro *Income from Demand Deposits*	5.204	5.890	(686)	(11,64%)
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan *Income from Guarantee Administration Services*	4.767	3.815	952	24,95%
Pendapatan Administrasi BUM *BUM Administration Income*	150	219	(69)	(31,51%)
Jumlah Pendapatan Lain-lain ***Total Other Income***	**511.099**	**328.679**	**182.420**	**55,50%**

Strategi dan Kinerja tahun 2018

Untuk dapat mencapai target dan meningkatkan pendapatan lain-lain, secara garis besar Perusahaan menetapkan strategi Subrogasi sebagai berikut:

1. Pengembangan Subrogasi *Online* dengan 2 Bank Himbara antara lain BRI dan BNI
2. Pelaksanaan rekonsiliasi terpusat dengan Penerima Jaminan khusus untuk penerimaan Subrogasi terpusat yaitu KUR Gen 2, Kupra dan BRIguna
3. Penyusunan Kebijakan terkait Subrogasi
4. Penyusunan *mapping* subrogasi terdiri atas potensi Subrogasi dan *aging* Subrogasi
5. Pengelolaan rekening penampungan Subrogasi terpusat

The Company's Strategy and Performance in 2018

To achieve the target and increase other revenue, the Comapny sets Subrogation strategy as follows:

1. *Online Subrogation Development with 2 Himbara Banks including BRI and BNI*
2. *The implementation of centralized reconciliation with Recipients of Special guarantee for centralized receipt of subrogation, namely KUR Gen 2, Kupra and BRIguna*
3. *Preparation of Policies related to Subrogation*
4. *Compilation of subrogation mappings consisting potential Subrogation and Aging Subrogation*
5. *Management of centralized Subrogation shelter accounts*

PROSPEK USAHA

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Perum Jamkrindo telah menjaga *sustainability* (keberlangsungan) perusahaan melalui pertumbuhan volume dan pendapatan penjaminan serta peningkatan layanan kepada UMKMK baik langsung terhadap Terjamin maupun melalui Penerima Jaminan. Pada tahun 2019, Perum Jamkrindo akan terus berusaha menjaga *sustainability* perusahaan dengan berfokus mempertahankan dan memantapkan akselerasi pertumbuhan yang telah dicapai pada periode tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, perekonomian dunia diperkirakan tidak akan lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2018. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik serta keberhasilan program paket kebijakan ekonomi merupakan faktor pendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia tidak hanya dibidang pembangunan infrastruktur tetapi juga pengembangan bidang industri dan peningkatan kualitas hidup melalui rumah murah untuk rakyat. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, strategi kebijakan umum pembiayaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah akan diarahkan pada beberapa kebijakan utama, antara lain: Pertama, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Kedua, memberdayakan peran swasta, BUMN, dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Ketiga, melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan. Keempat, memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif sehingga bersifat tidak mengikat dan dengan biaya yang lebih rendah.

BUSINESS PROSPECT

Since 2014 until 2018, Perum Jamkrindo has maintained the sustainability of the Company through growth in the volume and income of guarantees as well as improved services to MSMEs both directly to Guaranteed and through Guarantee Recipients. In 2019, Perum Jamkrindo will continue to maintain the sustainability of the Company by focusing on maintaining and strengthening the accelerated growth achieved in the previous years.

In 2019, the world economy is not expected to be better than the conditions in 2018. From the domestic side, well-maintained macroeconomic stability and the success of the economic policy package program are the more fair and equitable drivers of national economic growth throughout Indonesia not only in the field of infrastructure development but also in the development of industrial fields and improving the quality of life through cheap housing for the people. In relation to financing, the general policy strategy of financing to be implemented by the government will be divided into several main policies, including: First, guiding the use of debt for productive activities. Second, empowering the role of the private sector, state-owned enterprises, and regional governments in accelerating infrastructure development. Third, making creative innovations in financing instruments. Fourth, selective using of foreign loans so that they are non-binding and at lower costs.

Terkait dengan kebijakan pembiayaan tersebut, sasaran yang ingin dicapai khususnya untuk UMKMK antara lain; (1) Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian; dan (2) Meningkatnya daya saing UMKMK, dengan arah kebijakan antara lain berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia UMKMK dan perluasan akses UMKMK ke pembiayaan. Selain itu terkait dengan arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2019 salah satunya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Guna menunjang kebijakan tersebut, Pemerintah mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akses UMKMK pada sumber pembiayaan. Untuk itu perlu ditingkatkan peran lembaga penjaminan kredit bagi UMKMK sebagai jembatan antara UMKMK dengan perbankan.

Regarding the financing policy, the objectives to be achieved, especially for MSMEs, are among others; (1) Increased contribution of MSMEs in the economy; and (2) Increased competitiveness of MSMEs, with the aims of the policies, among others, in the form of increasing the competence of human resources in MSMEs and expanding access to MSMEs to finance. In addition, it is related to the aims of policies and steps taken by the Government in carrying out economic functions in 2019, one of which is the empowerment of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs). In order to support this policy, the Government seeks to increase institutional capacity and access to MSMEs in financing sources. For this reason, the role of credit guarantee institutions for MSMEs should be increased as a bridge between MSMEs and banks.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan membaik serta komitmen Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya terkait dengan koperasi dan UMKM merupakan peluang bagi Perum Jamkrindo. Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit dapat meningkatkan kapasitas penjaminannya kepada UMKMK dan meningkatkan perluasan akses UMKMK ke pembiayaan baik pembiayaan Bank maupun pembiayaan Lembaga Non Bank. Namun demikian dengan semakin banyaknya pesaing yang terjun ke dalam bisnis penjaminan kredit merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Perum Jamkrindo. Oleh karena itu Perum Jamkrindo akan berusaha memperluas cakupan program berbasis masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan juga lembaga keuangan. Program ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah pembinaan/konsultasi manajemen dan pemeringkatan UMKM, penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penjaminan Kredit Program lainnya seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Sistem Resi Gudang (SRG).

With the support of the government, the projected economic growth that is expected to improve and the Government's commitment with its policies related to cooperatives and MSMEs presents an opportunity for Perum Jamkrindo. Perum Jamkrindo as a Credit Guarantee Company can increase its guarantee capacity to MSMEs and increase the expansion of MSMEs access to both bank financing and financing for non-bank institutions. However, with the increasing number of competitors taking parts into the credit guarantee business, it is a challenge that must be faced by Perum Jamkrindo. Therefore Perum Jamkrindo will try to expand the coverage of community-based programs and increase access of the poor to basic services and financial institutions. This program is an opportunity that can be utilized by the Company. Some of the activities that have been carried out are guidance/ management consultation and MSME ranking, the guarantee of People's Business Credit (KUR), other Credit Guarantee Programs such as Food and Energy Security Credit (KKPE) and Warehouse Receipt System (SRG).

Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo telah menetapkan 3 (tiga) strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Sinergi BUMN perluasan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 35 tahun 2018
2. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia,
3. Penguatan Proses Bisnis.

The Board of Directors and the Supervisory Board of Perum Jamkrindo have established 3 (three) strategies that will be implemented in 2019 which have been formulated as follows:

1. *A synergy of SOEs expansion in accordance with Government Regulation Number 35 of 2018*
2. *Strengthening Human Resource Competence,*
3. *Strengthening Business Processes.*

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan opini wajar tanpa pengecualian.

This description of financial performance is prepared based on the Company's Financial Statements presented in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) that are generally accepted in Indonesia for the year ended December 31, 2018. The financial statements have been audited by Hertanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm with an unqualified opinion.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The discussion of the Company's financial performance is conveyed by taking into account the explanation in the notes of the Consolidated Financial Statements from the external auditor as an integral part of this Annual Report.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Aset

Assets

Aset Perum JAMKRINDO
Assets of Perum JAMKRINDO

dalam jutaan Rupiah
in IDR million

Uraian *(Description)*	Tahun *(Year)*		Pertumbuhan/Penurunan *(Increase/Decrease)*	
	2018	2017	Rp	%
Kas dan Setara Kas *(Cash and Cash Equivalents)*	6.190.307	5.417.929	772.378	14,26%
Surat Berharga *(Marketable Securities)*	4.124.057	4.025.861	98.196	2,44%
Piutang IJP – Bersih *(Guarantee Receivables – Net)*	2.666.853	2.474.754	192.099	7,76%
Piutang Penjaminan Ulang – Bersih *(Reguarantee Receivables - Net)*	254.607	120.532	134.075	111,24%
Pinjaman yang diberikan – Bersih *(Loans – Net)*	656	776	(120)	(15,46%)
Piutang lain-lain *(Other Receivables)*	104.901	87.892	17.009	19,35%
Premi dan Fee dibayar dimuka *(Prepaid Premium and Fees)*	1.384.677	1.132.300	252.377	22,29%
Beban dibayar di muka *(Prepaid Expenses)*	27.806	21.690	6.116	28,20%
Aset Tetap – Bersih *(Fixed assets)*	477.067	471.169	5.898	1,25%

Aset Perum JAMKRINDO
Assets of Perum JAMKRINDO

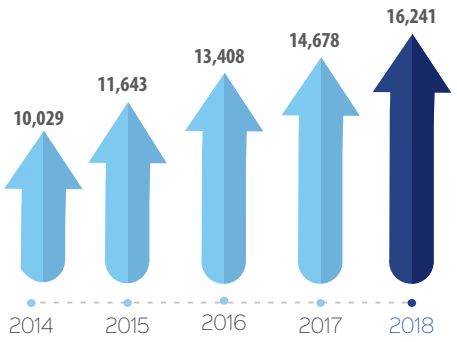
dalam jutaan Rupiah
in IDR million

Uraian *(Description)*	Tahun *(Year)*		Pertumbuhan/Penurunan *(Increase/Decrease)*	
	2018	2017	Rp	%
Aset Pajak Tangguhan *(Deferred Tax Assets)*	231.563	177.252	54.311	30,64%
Aset lain-lain *(Other Assets)*	778.502	747.987	30.515	4,08%
Jumlah Aset *Total Assets*	**16.240.997**	**14.678.143**	**1.562.854**	**10,65%**

Jumlah Aset yang dimiliki Jamkrindo pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp16.241 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan 10,65% atau sebesar Rp1.563 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp14.678 miliar. Dengan capaian tersebut, jumlah aset Jamkrindo secara konsisten terus mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

The amount of assets owned by Jamkrindo at the end of 2018 is IDR16,241 billion. This value was an increase of 10.65% or by IDR1,563 billion compared to the previous year of IDR14,678 billion. With this achievement, Jamkrindo's total assets have consistently increased in the last 5 (five) years.

Total Aset
Total Assets (Rp-Billion)



Aset Lancar dan Tidak Lancar Perum JAMKRINDO
Current and Non-Curent Assets of Perum JAMKRINDO

dalam jutaan Rupiah
(in IDR million)

Uraian *(Descriptions)*	Tahun *(Year)*		Pertumbuhan/Penurunan *Increase/Decrease*	
	2018	2017	Rp	%
Aset *Assets*				

Aset Lancar dan Tidak Lancar Perum JAMKRINDO
Current and Non-Curent Assets of Perum JAMKRINDO

dalam jutaan Rupiah
(in IDR million)

Uraian *(Descriptions)*	Tahun *(Year)*		Pertumbuhan/Penurunan *Increase/Decrease*	
	2018	2017	Rp	%
Aset Lancar *Curent Assets*	14.445.496	13.282.028	1.163.468	8,76%
Aset Tidak Lancar *Non-Curent Assets*	1.795.501	1.396.115	399.386	28,61%
Jumlah Aset *Total Assets*	**16.240.997**	**14.678.143**	**1.562.854**	**10,65%**

Aset Lancar

Aset lancar tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,76% atau Rp1.163 miliar menjadi Rp14.445 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp13.282 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp772 miliar.

Current Assets

Current assets in 2018 increased by 8.76% or IDR1,163 billion to IDR14,445 billion from the previous year amount of IDR13,282 billion. This increase was caused by an increase in cash and cash equivalents of IDR772 billion.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar tahun 2018 mengalami peningkatan namun tidak signifikan sebesar 28,61% atau Rp399 miliar menjadi Rp1.796 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.396 miliar. Peningkatan terbesar terjadi pada aset pajak tangguhan sebesar Rp54 miliar dari tahun sebelumnya.

Non-Current Assets

Non-current assets in 2018 increased but not significantly amounted to 28.61% or IDR399 billion to IDR1,796 billion from the previous year of IDR1,396 billion. The largest increase occurred in deferred tax assets from the previous year amounting to IDR54 billion.

Kas dan Setara Kas

Pada tahun 2018 Kas dan Setara Kas Perum Jamkrindo mengalami peningkatan sebesar 14,26% atau Rp772 miliar, dari nilai tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.418 miliar menjadi Rp6.190 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan strategi Perusahaan untuk meningkatkan investasi pada instrumen deposito di tahun 2018.

Cash and cash equivalents

In 2018, the Cash and Cash Equivalents of Perum Jamkrindo increased by 14.26% or IDR772 billion, from the previous year's value of IDR5,418 billion to this year's value of IDR6,190 billion. This increase is in line with the Company's strategy to increase investment in deposit instruments in 2018.

Surat Berharga

Jumlah Surat Berharga Perum Jamkrindo tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,44% atau Rp98 miliar, dari tahun 2017 sebesar Rp4.026 miliar menjadi Rp.4.124 miliar di tahun 2018. Hal ini sejalan peningkatan investasi surat berharga, khususnya yang bersifat jangka pendek yang dilakukan Jamkrindo tahun 2018.

Marketable Securities

The number of Marketable Securities of Perum Jamkrindo in 2018 has increased by 2.44% or IDR98 billion, from 2017 amount of IDR4,026 billion to IDR4,124 billion in 2018. This is in line with the increase in investment in marketable securities, especially those of short-term nature as invested by Jamkrindo in 2018.

Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

Sejalan dengan peningkatan penjaminan yang dilakukan Perusahaan, khususnya penjaminan KUR, jumlah Piutang IJP tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 7,76% atau Rp192 miliar, menjadi Rp2.667 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.475 miliar.

Premi dan Fee Dibayar di Muka

Premi dan Fee dibayar di muka Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 22,29% atau Rp252 miliar di tahun 2018 menjadi Rp1.385 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.132 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan karena volume penjaminan eksisting meningkat sehingga berpengaruh langsung terhadap peningkatan premi dan *fee* dibayar di muka (co *guarantee* dan reasuransi).

Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap Perusahaan tahun 2018 mencapai Rp477 miliar, meningkat 1,25% atau Rp30 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp471 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan penambahan aset tetap yang dilakukan sesuai dengan strategi dan rencana Perusahaan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan Jamkrindo tahun 2018 adalah sebesar Rp232 miliar, mengalami peningkatan sebesar 30,64% atau Rp54 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp177 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan cadangan-cadangan

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Perusahaan tahun 2018 sebesar Rp779 miliar, mengalami peningkatan 4,08% atau Rp31 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp748 miliar. Peningkatan aset lain-lain utamanya disebabkan meningkatnya saldo deposito yang dibatasi penggunaannya di tahun 2018.

Guarantee Receivables (IJP)

In line with the increase in guarantees made by the Company, particularly on KUR guarantees, the number of Guarantee Receivables in 2018 increased by 7.76% or IDR192 billion, from the previous year amount of IDR2,475 billion to 2018's amount of IDR2,667 billion.

Prepaid Premium and Fees

The Company prepaid premiums and fees increased by 22.29% or IDR252 billion in 2018 from the previous year amount of IDR1,132 billion to IDR1,385 billion in 2018. This increase was mainly due to the increasing volume of existing guarantees which directly affected the increase in premiums and prepaid fees (co-guarantee and reinsurance).

Fixed Assets

The Company's Fixed Assets in 2018 was IDR477 billion; this was an increase of 1.25% or IDR30 billion compared to the previous year of IDR 471 billion. This increase is in line with the addition of fixed assets in accordance with the Company's strategy and plans.

Deferred Tax Assets

Jamkrindo's Deferred Tax Assets in 2018 was at IDR232 billion which was an increase of 30.64% or IDR54 billion compared to 2017 amount of IDR177 billion. This increase was caused by an increase in reserves

Other Assets

Other assets of the Company in 2018 amounted to IDR779 billion. This is an increase of 4.08% or IDR31 billion compared to the previous year which was IDR748 billion. The increase in other assets was mainly due to the increase in the balance of restricted-use deposits in 2018.

Liabilitas

Liabilities

Liabilitas Perum JAMKRINDO
Liabilities of Perum JAMKRINDO

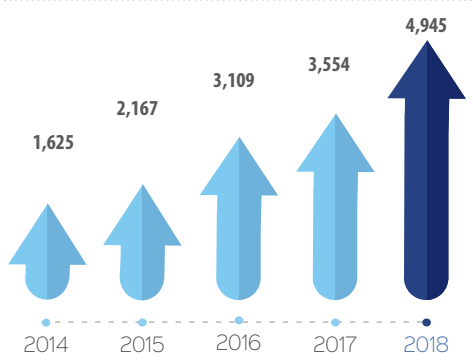
dalam jutaan Rupiah
in billion Rupiah

Uraian *Description*	Tahun *Year*		Pertumbuhan/ (Penurunan) *Increase/Decrease*	
	2018	2017	Rp	%
Utang Klaim *Claim Payable*	85.804	75.925	9.879	13,01%
Cadangan Klaim *Claim Payable*	456.690	427.143	29.547	6,92%
Utang Penjaminan Ulang *Co-Guarantee Payable*	188.053	109.687	78.366	71,45%
Pendapatan Ditangguhkan *Deferred Income*	3.908.675	2.638.598	1.270.077	48,13%
Utang Pajak *Tax Payable*	7.594	59.550	(51.956)	(87,25%)
Liabilitas Imbalan Kerja *Employee Benefits Liabilities*	18.887	38.907	(20.020)	(51,46%)
Utang lain-lain *Other Payable*	279.614	204.458	75.156	36,76%
Jumlah Liabilitas ***Total Liabilities***	**4.945.317**	**3.554.268**	**1.391.049**	**39,14%**

Jumlah Liabilitas Jamkrindo pada akhir tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 39,14% atau Rp1.391 miliar, dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp3.554 miliar menjadi Rp4.945 miliar di akhir tahun 2018. Liabilitas Perusahaan terus meningkat dalam 5 (tahun) terakhir.

The number of Jamkrindo's Liabilities at the end of 2018 increased by 39.14% or equal to IDR1,391 billion, from 2017 amount of IDR3,554 billion to IDR4,945 billion at the end of 2018. The Company's liabilities continued to increase in the last 5 (years).

Liabilitas
Liabilities (Rp-Billion)



Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang Perum JAMKRINDO
Short-Term and Long-Term Liabilities

dalam jutaan Rupiah
(in IDR million)

Uraian *Descriptions*	Tahun *Year*		Pertumbuhan/ (Penurunan) *Increase/Decrease*	
	2018	2017	Rp	%
Kewajiban *Liabilities*				
Liabilitas Jangka Pendek *Short-Term Liabilities*	3.203.771	1.726.978	1.476.793	85,51%
Liabilitas Jangka Panjang *Long-Term Liabilities*	1.741.546	1.827.290	(85.744)	(4,69%)
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	**4.945.317**	**3.554268**	**1.391.049**	**39,14%**

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek tahun 2018 mencapai Rp3.204 miliar, meningkat 85,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.727 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan adanya peningkatan pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp1.270 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perum Jamkrindo tahun 2018 mencapai Rp1.742 miliar, lebih rendah 4,69% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.827 miliar. Hal tersebut disebabkan turunnya jumlah liabilitas pasca kerja.

Utang Klaim

Utang Klaim Utang Klaim Perusahaan pada akhir tahun 2018 sebesar Rp86 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp10 miliar atau 13,01% dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp76 miliar. Peningkatan yang terjadi dikarenakan klaim pada tahun 2018 mengalami peningkatan dan untuk persetujuan diakhir bulan Desember tahun 2018 baru dibayarkan di awal tahun 2019.

Cadangan Klaim

Cadangan Klaim Jamkrindo pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp457 miliar, naik sebesar 6,92% atau Rp30 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp427 miliar. Kenaikan cadangan klaim ini terjadi dikarenakan

Short-Term Liabilities

The total short-term liabilities in 2018 reached IDR3,204 billion, an increase of 85.51% compared to the previous year amount of IDR1,727 billion. The increase was mainly due to an increase in deferred income of IDR1,270 billion.

Long-term Liabilities

The total long-term liabilities of Perum Jamkrindo in 2018 reached IDR1,742 billion, decrease by 4.69% compared to the previous year amount of IDR1,827 billion. This was due to a decrease in the number of post-employment liabilities.

Claim Payable

The Company's Claim Payable at the end of 2018 amounting to IDR86 billion, an increase of IDR10 billion or 13.01% compared to 2017's amount of IDR76 billion. The increase was due to an increase in claims in 2018 and for approval at the end of December 2018, only to be paid at the beginning of 2019.

Claim Reserves

Jamkrindo's Claim Reserves at the end of 2018 amounted to IDR457 billion; an increase of 6.92% or IDR30 billion compared to the previous year amount of IDR427 billion. This increase in claim reserves was due to the increase in the volume of guarantees

meningkatnya volume penjaminan sehingga perusahaan membentuk cadangan klaim yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya untuk memitigasi risiko.

Utang Penjaminan Ulang

Utang Penjaminan Ulang Perum Jamkrindo pada tahun 2018 adalah sebesar Rp188 miliar yang mengalami peningkatan sebesar Rp78 miliar atau 71,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp110 miliar. Peningkatan ini dikarenakan dikarenakan peningkatan volume penjaminan yang berhubungan langsung dengan premi yang harus dibayar Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Perusahaan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 51,46% atau Rp20 miliar dari posisi di tahun 2017 sebesar Rp39 miliar dan posisi di ahkir tahun 2018 adalah sebesar Rp19 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya beberapa karyawan yang pensiun dan *resign*.

Ekuitas

so that the Company prepared a higher claim reserve from the previous year to mitigate the risk.

Co-Guarantee Payable

Perum Jamkrindo's Co-Guarantee Payable in 2018 amounted toIDR188 billion, which increased by IDR78 billion or 71.45% compared to the previous year amount which was IDR110 billion. This increase was due to an increase in the volume of guarantees that are directly related to the premiums payable by the Company to transfer the risk of claims

Employment Benefit Liabilities

The Company's Employment Benefit Liabilities in 2018 decreased by 51.46% or IDR20 billion from the position in 2017 of IDR 39billion and the position at the end of 2018 of IDR19 billion. The decrease was due to the existence of several retiring and resigning employees.

Equity

Ekuitas Perum JAMKRINDO
Equity of Perum JAMKRINDO

dalam jutaan Rupiah
in billion Rupiah

Uraian *Description*	**Tahun** *Year*		**Pertumbuhan/ (Penurunan)** *Increase/Decrease*	
	2018	**2017**	**Rp**	**%**
Penyertaan Modal Pemerintah *State Equity Participation*	7.638.733	7.638.733	-	0,00%
Saldo Laba *Retained Earnings*				
Ditentukan Penggunaannya *Appropriated*	3.195.598	2.471.937	723.661	29,28%
Belum ditentukan penggunaannya *Unappropriated*	397.321	781.821	(384.500)	(49,18%)
Komponen Ekuitas Lainnya *Other Equity Components*				
Keuntungan (kerugian) Aset yang tersedia untuk dijual *Gain (loss) Financial Assets Available For Sale*	(223.422)	(58.064)	(165.358)	284,79%
Cadangan revaluasi aset *Asset Revaluation Reserve*	289.434	289.434	-	0,00%

Ekuitas Perum JAMKRINDO
Equity of Perum JAMKRINDO

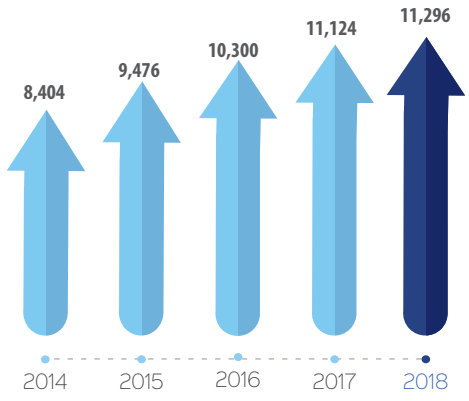
dalam jutaan Rupiah
in billion Rupiah

Uraian *Description*	Tahun *Year*		Pertumbuhan/ (Penurunan) *Increase/Decrease*	
	2018	2017	Rp	%
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk *Total Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity*	11.295.665	11.123.861	171.804	1,54%
Kepentingan Non Pengendali *Non-controlling Interest*	15	14	1	7,14%
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	**11.295.680**	**11.123.875**	**171.805**	**1,54%**

Jumlah Ekuitas Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp11.296 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 1,54% atau Rp172 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp11.124 miliar. Peningkatan pada jumlah Ekuitas disebabkan oleh adanya tambahan ekuitas dari laba tahun berjalan 2018 dan peningkatan cadangan-cadangan. Jumlah Ekuitas Perum Jamkrindo selama 5 tahun berakhir selalu mengalami peningkatan, dapat terlihat dari bagan berikut ini :

The total Equity of Perum Jamkrindo at the end of 2018 is IDR11,296 billion. This value increased by 1.54% or IDR172 billion compared to the previous year, which was IDR11,124 billion. An increase in the amount of Equity was caused by the existence of additional equity in the current profit of 2018, and an increase in reserves. The total equity of Perum Jamkrindo for the past 5 years has always increased. This can be seen from the following chart:

Total Ekuitas
Total Equity (Rp-Billion)



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Laporan Laba Rugi Perum JAMKRINDO

Consolidated Statements of Profit and Loss of Perum JAMKRINDO

dalam jutaan Rupiah
(in IDR million)

Uraian *(Description)*	Tahun *(Year)*		Pertumbuhan/(Penurunan) *(Increase/(Decrease))*	
	2018	2017	Rp	2018
Pendapatan Penjaminan *Guarantee Income*				
Imbal Jasa Penjaminan *Guarantee Fee*	1.641.902	2.036.053	(394.151)	(19,36%)
Pendapatan Komisi *Commission Fee*	36.424	27.224	9.200	33,79%
Premi Co-Guarantee *Co-Guarantee Premium*	(116.765)	(96.472)	(20.293)	21,04%
Premi Re-Asuransi *Reinsurance Premium*	(215.349)	(154.313)	(61.036)	39,55%
Restitusi Imbal Jasa Penjaminan *Guarantee Restitution*	(5.003)	(6.805)	1.802	(26,48%)
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih *Net Guarantee Revenues*	1.341.208	1.805.686	(464.478)	(25,72%)
Beban Klaim *Claim Expenses*				
Beban Klaim *Claim Expenses*	(1.163.985)	(971.218)	(192.767)	19,85%
Kenaikan Cadangan Klaim *Increase in Claim Reserves*	(31.048)	(22.615)	(8.433)	37,29%
Kerugian Penurunan Nilai Piutang *Impairment Losses of Receivable*	(42.325)	(10.777)	(31.548)	292,73%
Jumlah Beban Klaim *Total Claim Expenses*	(1.237.358)	(1.004.610)	(232.748)	23,17%
Penjaminan Bersih *Operating Income – Net*	103.850	801.077	(697.227)	(87,04%)
Pendapatan Investasi – Bersih *Investment Income – Net*	684.108	601.634	82.474	13,71%
Pendapatan Lain-Lain *Other Income*	511.099	328.679	182.420	55,50%
Beban Usaha *Operating Expenses*				
Beban Operasional *Operating Expenses*	(242.150)	(228.402)	(13.748)	6,02%
Beban Sumber Daya Manusia *Human Resource Expenses*	(383.172)	(325.822)	(57.350)	17,60%

Laporan Laba Rugi Perum JAMKRINDO

Consolidated Statements of Profit and Loss of Perum JAMKRINDO

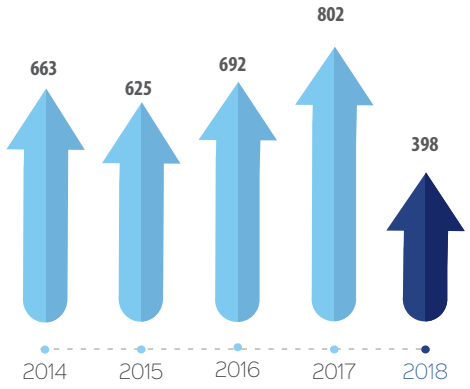
dalam jutaan Rupiah
(in IDR million)

Uraian *(Description)*	Tahun *(Year)*		Pertumbuhan/(Penurunan) *(Increase/(Decrease))*	
	2018	2017	Rp	2018
Beban Administrasi dan Umum *General and Administrative Expenses*	(138.965)	(132.939)	(6.026)	4,53%
Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha *System, Technology, and Operating Development Expenses*	(26.485)	(21.006)	(5.479)	26,08%
Jumlah Beban Usaha *Total Operating Expenses*	(790.773)	(708.169)	(82.604)	11,66%
Laba Sebelum Pajak *INCOME BEFORE TAX*	508.284	1.023.221	(514.937)	(50,33%)
Pajak Kini *Current income tax*	(117.274)	(247.361)	130.087	(52,59%)
Manfaat Pajak Tangguhan *Deferred tax income*	6.533	25.986	(19.453)	(74,86%)
Beban Pajak Penghasilan *Total Income tax expenses*	(110.740)	(221.375)	110.635	(49,98%)
Laba Tahun Berjalan *Current Year Income*	397.543	801.846	(404.303)	(50,42%)
Pendapatan Beban Komprehensif Lainnya *Other Comprehensive Income Expenses*	(135.957)	57.831	(193.788)	(335,09%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan *Total Comprehensive Income For The Current Year*	261.586	859.677	(598.091)	(69,57%)
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada: *Income For The Year Attributable To:*				
Pemilik Entitas Induk *Equity Holders of The Parent Entity*	397.542	801.845	(404.303)	(50,42%)
Kepentingan Non Pengendali dalam Rupiah penuh *Non-controlling Interest in fullIDR*	940.060	744.355	195.705	26,29%
Jumlah ***Total***	**397.543**	**801.846**	**(404.303)**	**(50,42%)**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada: *Comprehensive Income of The Current Year Attributable To:*				
Pemilik Entitas Induk *Equity Holders of The Parent Entity*	261.585	859.676	(598.091)	(69,57%)
Kepentingan Non Pengendali dalam Rupiah penuh *Non-controlling Interest in fullIDR*	940.060	744.355	195.705	26,29%
Jumlah ***Total***	**261.586**	**859.677**	**(598.091)**	**(69,57%)**

Posisi Laba Bersih Perum Jamkrindo pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp398 miliar, mengalami penurunan sebesar 50,42% atau Rp404 miliar dibandingkan dengan 31 Desember 2017 yaitu Rp802 miliar. Penyebab terjadinya penurunan ini adalah dikarenakan menurunnya pendapatan penjaminan karena pengaruh pencatatan IJP secara akrual bulanan dari yang sebelumnya dicatat secara akrual tahunan.

The position of Perum Jamkrindo's Net Profit as of December 31, 2018, was IDR398 billion; a decrease of 50.42% or IDR404 billion compared to the position at December 31, 2017, which was IDR802 billion. The cause of this decline was due to the decrease in guarantee income because of the effect of the changes in guarantee fee recording to monthly accruals from previously recorded on annual accruals.

Laba Bersih
Net Profit (Rp-Billion)



Imbal Jasa Penjaminan

Jumlah Imbal Jasa Penjaminan bersih tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.341 miliar, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 25,72% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar RP1.806 miliar. Penyebab terjadinya penurunan ini adalah dikarenakan menurunnya pendapatan penjaminan karena pengaruh pencatatan IJP secara akrual bulanan dari yang sebelumnya dicatat secara akrual tahunan.

Guarantee Fee

The total amount of net guarantee fee in 2018 was recorded at IDR1,341 billion. This was a decrease of 25.72% compared to the previous year amount of IDR1,806 billion. The cause of this decline was the decrease in guarantee income because of the effect of the changes in guarantee fee recording of monthly accruals from previously recorded on annual accruals.

Beban Klaim

Jumlah beban klaim tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan sebesar 23,17% menjadi Rp1.237 miliar dari tahun sebelumnya sebesar RP1.005 miliar. Peningkatan klaim dikarenakan meningkatnya volume penjaminan di tahun 2018 sehingga secara otomatis risiko yang ditanggung semakin besar.

Claim Expenses

The total claim expenses in 2018 were recorded to have increased by 23.17% to IDR1,227 billion from the previous year position of IDR1,005 billion. The increase in claims was due to the increase in the volume of guarantees in 2018 so that the risks borne are automatically increased.

Pendapatan Investasi

Pendapatan Investasi Bersih Perusahaan tahun 2018 sebesar Rp684 miliar, meningkat 13,71% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp602 miliar. Pertumbuhan yang terjadi dikarenakan kenaikan tingkat suku bunga, pemilihan *instrument* investasi dan kenaikan dana kelolaan investasi.

Pendapatan Lain-lain Bersih

Pendapatan Lain-lain Bersih Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp511 miliar, mengalami peningkatan sebesar 55,50% atau Rp182 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp329 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan subrogasi

Beban Usaha

Beban Usaha Perusahaan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 11,66% atau Rp83 miliar menjadi Rp791 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp708 miliar. Peningkatan beban usaha ini disebabkan disebabkan oleh meningkatnya biaya-biaya yang disebabkan adanya inflasi tahunan.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak Perum Jamkrindo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp508 miliar, mengalami penurunan 50,33% dibandinghkan tahun sebelumnya Rp1.023 miliar. Penurunan ini disebabkan menurunnya pendapatan penjaminan karena pengaruh pencatatan IJP secara akrual bulanan dari yang sebelumnya dicatat secara akrual tahunan

Laba Tahun Berjalan

Sejalan dengan penurunan IJP Perusahaan, Laba Tahun Berjalan yang dibukukan Perum Jamkrindo tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp404 miliar atau 50,42% dari tahun sebelumnya Rp802 miliar, menjadi Rp398 miliar.

Laba Komprehensif

Jumlah Laba Komprehensif yang dibukukan Perum Jamkrindo tahun 2018 adalah sebesar Rp262 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp598 miliar atau 69,57% dibandingkan tahun sebelumnya Rp860 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena kondisi pasar investasi secara nasional turun, sehingga nilai pasar dari investasi *Available For Sale* (AFS) mengalami penurunan.

Investment Income

The Net Investment Income of the Company in 2018 amounted to IDR 684 billion; an increase of 13.71% compared to the previous year of IDR 602 billion. The growth that occurred was due to rising interest rates, selection of investment instruments, and increasing investment managed funds.

Other Income - Net

Net Other Income of Perum Jamkrindo at the end of 2018 was IDR511 billion. This was an increase of 55.50% or IDR182 billion compared to 2017, which was IDR329 billion. This increase was caused by the increase in subrogation income

Operating Expenses

The Company's operating expenses in 2018 increased by 11.66% or IDR83 billion from the previous year of IDR708 billion to IDR791 billion. This increase in operating expenses was due to increased costs due to annual inflation.

Profit before Tax

The Company's profit before tax of Perum Jamkrindo as of December 31, 2018, was IDR508 billion. This was a decrease of 50.33% compared to the previous year of IDR1,023 billion. This decrease was due to the decrease in guarantee income due to the effect of the changes in guarantee fee recording of monthly accruals from previously recorded on annual accruals

Current Year Profit

In line with the decline in the Company's Guarantee Fee, the Current Year Profit posted by Perum Jamkrindo in 2018 decreased by IDR404 billion or 50.42% from the previous year of IDR802 billion to IDR398 billion.

Comprehensive Profit

The total Comprehensive Profit posted by the Jamkrindo Corporation in 2018 was IDR262 billion; a decrease of IDR598 billion or 69.57% compared to the previous year of IDR860 billion. The decrease was due to the failing condition of the national investment market. as a result, the market value of Available For Sale (AFS) investments declined.

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENTS OF CASH FLOWS CONSOLIDATED

Laporan Arus Kas PERUM JAMKRINDO
Statements of Consolidated Cash Flow of Perum JAMKRINDO

dalam jutaan Rupiah
in IDR million

Uraian *Description*	Tahun *Year*		Pertumbuhan/Penurunan *Increase/Decrease*	
	2018	2017	Rp	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi *Cash Flow From Operating Activities*	491.688	350.306	141.382	40,36%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi *Cash Flows From Investment Activities*	360.876	608.193	969.069	159,34%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan *Cash Flow From Financing Activities*	80.185	48.000	32.185	67,05%
Penurunan Kenaikan Kas dan Setara Kas *Decreased increase in cash and cash equivalents*	772.379	305.887	1.078.266	352,50%
Kas dan setara kas awal tahun *Cash and equivalents at the beginning of year*	5.417.929	5.723.816	305.887	5,34%
Kas dan setara kas akhir tahun *Cash and equivalents at the end of year*	6.190.307	5.417.929	772.378	14,26%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2018, Perusahaan memperoleh kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp492 miliar, meningkat 40,36% dibandingkan tahun sebelumnya Rp350 miliar. Kas masuk diperoleh dari penerimaan imbalan jasa penjaminan sebesar Rp2.645 miliar dan aktivitas operasi lainnnya sebesar Rp552 miliar. Sedangkan kas keluar digunakan untuk pembayaran klaim dari mitra co *guarantee*, pembayaran imbal jasa co *guarantee*, pembayaran klaim, pembayaran biaya, pembayaran aktivitas lainnya, pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan.

Cash Flow from Operating Activities

In 2018, the Company obtained net cash from operating activities of IDR492 billion. This was an increase of 40.36% compared to the previous year of IDR350 billion. In-flowing cash was obtained from the receipt of compensation for guarantee fee amounting to IDR2,645 billion and other operating activities amounting to IDR552 billion. Whereas out-flowing cash is used for payment of claims from co-guarantee partners, payment of compensation fees, payment of claims, payment of fees, payment of other activities, payments to employees and payment of income tax.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh Perusahaan dari aktivitas investasi tahun 2018 mencapai Rp361 miliar, meningkat 159,34% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017 Perusahaan menggunakan Rp608 miliar untuk aktivitas investasi. Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan hasil investasi dan penerimaan hasil investasi lainnya, sedangkan arus kas keluar digunakan untuk penempatan investasi yang diperkenankan, pembelian aset tetap dan pembayaran aktivitas investasi lainnya.

Cash Flow from Investment Activities

Net cash obtained by the Company from investment activities in 2018 reached IDRp361 billion which was an increase of 159.34% compared to the previous year's usage of IDR608 billion for investment activities. Cash inflows were obtained from receipts of investment returns and receipts of other investment returns, while cash outflows are used for permissible investment placements, purchases of fixed assets, and payments for other investment activities.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2018 adalah sebesar Rp80 miliar yang digunakan untuk pembayaran dividen. Jumlah mengalami peningkatan 67,05% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp48 miliar.

Cash Flow from Financing Activities

The net cash used for financing activities in 2018 was IDR80 billion which was used to pay dividends. The number experienced an increase of 67.05% compared to the previous year of IDR48 billion.

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

Rasio Keuangan
Financial Ratio

dalam %
in %

Uraian *Description*	2018	2017	2016	2015	2014
Rasio Likuiditas *Liquidity Ratio*					
Current ratio	450,89%	769,09%	712,07%	755,22%	1351,10%
Rasio Solvabilitas *Solvency Ratio*					
Utang terhadap ekuitas *Debt to equity*	43,78%	31,95%	30,18%	22,87%	19,34%
Rasio Rentabilitas *Rentability Ratio*					
Margin Laba Kotor *Gross Profit Margin*	-0,14%	28,85%	29,75%	25,78%	31,59%
Margin Laba Penjualan *Sales Profit Margin*	25,10%	42,50%	43,26%	42,14%	42,86%
Return on Assets	3,29%	7,29%	7,52%	7,30%	9,23%
Return on Equity	3,50%	7,49%	6,72%	6,60%	7,89%
Rasio Aktivitas *Activity Ratio*					
Perputaran Aset *Asset Turnover*	13,11 kali	17,14%	17,37%	17,32%	21,54%
Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi (Juta Rp) ***(Total Investment in Associated Entities (in IDR Million))***	**684.108**	**601.634**	**587.678**	**599.525**	**531.364**

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANY HEALTH LEVEL

Tahun 2018, Perusahaan melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri

In 2018, the Company evaluated the Company's Health Level as regulated in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100 / MBU / 2002 concerning SOE Health Level Evaluation and Minister of BUMN State Regulation No. PER-04 / MBU / 2011

Negara BUMN RI No. PER-04/MBU/2011 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Jaminan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Tingkat Kesehatan Perusahaan Perum Jamkrindo pada tahun 2018 adalah 79,77, berada pada kategori Sehat A. Hal ini memperlihatkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 81,50 dengan kategori SEHAT AA.

concerning Indicators of Soundness Rating of State-Owned Enterprises of Financial Services in the Field of Insurance Business and Guarantee Services.

Based on the evaluation, the Health Level of the Company of Perum Jamkrindo in 2018 was 79.77; it was in the category of Healthy A. This was a decrease compared to the previous year's score which was 81.50 in the category of HEALTHY AA.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

THE COMPANY"S ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLE COLLECTIBILITY LEVEL

Kemampuan Membayar Utang

Debt-Paying Ability

Perusahaan menggunakan Rasio Likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, terdiri dari rasio kas dan rasio lancar. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The company uses a Liquidity Ratio to measure the Company's ability to pay off its short-term liabilities, consisting of cash ratios and current ratios. This can be seen in the following table:

Rasio Likuiditas *Liquidity Ratio*	**2018**	**2017**
Rasio Kas *Cash Ratio*	193,22%	313,74%
Rasio Lancar *Current Ratio*	450,89%	769,09%

Selain rasio likuiditas, Perusahaan juga menggunakan Rasio Solvabilitas untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aset dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas.

In addition to liquidity ratios, the Company also uses Solvency Ratios to measure the Company's ability to fulfill all its obligations, by comparing all liabilities to all assets and comparing all liabilities to equity.

Rasio Solvabilitas *(Solvency Ratio)*	**2018**	**2017**
Rasio Liabilitas Terhadap Total Aset *(Liabilities to All Assets Ratio)*	30,45%	24,21%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas *(Liabilities to Equity Ratio)*	43,78%	31,95%

Pada tahun 2018, tingkat kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek berdasarkan rasio lancar sebesar 450,89% yang menunjukan bahwa kemampuan aset lancar Perusahaan dalam menjamin utang lancarnya masih cukup baik.

In 2018, the Company's ability to pay short-term liabilities based on the current ratio of 450.89% shows that the ability of the Company's current assets to guarantee its current debt was still quite good.

Kolektibilitas Piutang

Definisi piutang secara luas adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Jamkrindo memiliki 2 jenis piutang yang yang masing-masing memiliki metode kolektibilitas yang berbeda, yaitu Piutang KUR dan Piutang Non KUR.

Piutang IJP KUR

Piutang IJP produk Kredit Usaha Rakyat terbagi menjadi:

1. Piutang IJP KUR kepada Pemerintah

   Merupakan tagihan IJP KUR (KUR realisasi kredit tahun 2008 s/d tahun 2014) kepada Pemerintah atas jasa kegiatan penjaminan yang telah diberikan kepada terjamin. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 menyebutkan bahwa IJP KUR dibayar oleh Pemerintah setelah dilakukan proses verifikasi secara periodik.

2. Piutang IJP KUR kepada Penerima Jaminan

   Tagihan IJP KUR (KUR Gen II realisasi kredit tahun 2015 s/d 2018) kepada Penerima Jaminan/ Bank penyalur KUR atas jasa kegiatan penjaminan yang telah diberikan kepada terjamin. Sesuai Permenko Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 bahwa Imbal Jasa Penjaminan termasuk dalam Subsidi Bunga yang dibayarkan Pemerintah yang nilainya hasil dari kesepakatan antara Penjamin dan Penerima Jaminan.

Berikut nilai piutang IJP KUR Perum Jamkrindo per 31 Desember 2018 :

Collectibility of Receivables

Receivables can generally be defined as one type of accounting transaction that takes care of billing the customers who owe to someone, a company, or an organization for goods and services that have been provided to the consumer. Jamkrindo has 2 types of receivable accounts that each have a different collectable method, they are, KUR and Non-KUR Receivables.

Receivables of People's Business Credit Guarantee Fee

Guarantee Fee receivables from People's Business Credit products are divided into:

1. *Receivables of People's Business Credit Guarantee Fee to the Government*

   It is a People's Business Credit Guarantee Fee bill (KUR credit realization from 2008 to 2014) to the Government for the guarantee services provided to the government. In accordance with the Minister of Finance Regulation Number 135 / PMK.05 / 2008 dated September 24, 2008, which states that People's Business Credit Guarantee Fee is paid by the Government after a periodic verification process has been carried out.

2. *Receivables of People's Business Credit Guarantee Fee to Guarantee Recipients*

   This is a People's Business Credit Guarantee Fee bill (KUR Gen II credit realization in 2015 to 2018) to the Guarantee Recipients/People's Business Credit channeling bank/s for the guarantee activity services provided for the Guaranteed by the Guarantee Recipients. In accordance with the Regulations of the Coordinating Ministry Number 8 of 2015 dated October 19, 2015, Guarantee Fees are included in the Interest Subsidies paid by the Government whose value is the result of an agreement between the Guarantor and the Guarantee Recipients.

The following is the value of People's Business Credit Guarantee Fee of Perum Jamkrindo receivables as of December 31, 2018:

No	Piutang IJP KUR *Guarantee Fee Receivables from People's Business Credit Products*	Nilai Piutang (Rp) *Receivable Values (IDR)*
1	Piutang IJP KUR kepada Pemerintah *Receivables of People's Business Credit Guarantee Fee to the Government*	1.328.036.144.692
2	Piutang IJP KUR kepada Penerima Jaminan *Receivables of People's Business Credit Guarantee Fee to Guarantee Recipients*	1.307.160.788.366
Jumlah ***Total***		**2.635.196.933.058**

Piutang IJP Non KUR

Tagihan IJP produk Non KUR kepada Penerima Jaminan/ Bank atas jasa kegiatan penjaminan yang telah diberikan kepada terjamin. Piutang yang terdapat piutang IJP antara lain penjaminan FLPP, Kupedes Rakyat dan Syariah dan besaran nilai piutang IJP Non KUR per 31 Desember 2018 adalah Rp.75.313.506.88.

Non People's Business Credit Guarantee Fee Receivables

It refers to Non-People's Business Credit product Guarantee Fee bills to Guarantee Recipients/Banks for guarantee activities provided for the Guaranteed. The receivables from Guarantee Fee receivables include the guarantee of FLPP, General and Sharia Rural Credit. The value of Non-People's Business Credit Guarantee Fee receivables as of December 31, 2018, was IDR75,313,506.88.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal merupakan jumlah modal yang diperoleh dari modal sendiri (ekuitas) dan utang (liabilitas). Perusahaan berkeyakinan bahwa struktur modal yang optimal akan memaksimalkan nilai Perusahaan.

Struktur modal Perusahaan pada 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Capital structure refers to the amount of capital obtained from owned capital (equity) and debt (liabilities). The Company believes that an optimal capital structure will maximize the value of the Company.

The Company's capital structure in the last 2 (two) years can be seen in the following table:

dalam jutaan Rupiah
in IDR million

Uraian *Description*	**2018**	**% Total Modal** *% Of Total Capital*	**2017**	**% Total Modal** *% Of Total Capital*
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	4.945.317	23,34%	3.554.268	19,49%
Ekuitas *Equity*	16.240.997	76,66%	14.678.143	80,51%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas *Total Liabilities and Equity*	**21.186.314**	**100%**	**18.232.411**	**100%**

Kebijakan Struktur Modal

Pengelolaan terhadap struktur modal Perum Jamkrindo dilakukan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi Pemangku Kepentingan lainnya serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna mengurangi biaya modal.

Kondisi struktur modal yang optimal dapat dicapai dengan modal rata-rata tertimbang atau *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) yang minimal dengan pertambahan penggunaan utang, akan meminimalkan WACC karena biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri (*cost of equity*).

Capital Structure Policy

Management of the capital structure of Perum Jamkrindo is carried out to protect the Company's ability to maintain business continuity so that the Company can provide returns to Shareholders and other Stakeholders and maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

Optimal capital structure conditions can be achieved with a minimum weighted average cost of capital (WACC). The increase in debt usage will minimize WACC because the cost of debt is cheaper than the cost of owned capital (cost of equity). In addition, the use of debt will also reduce taxable costs so that

Di samping itu, penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Meski demikian, peningkatan utang yang dilakukan Perum Jamkrindo akan meningkatkan biaya beban bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perum Jamkrindo secara keseluruhan untuk itu, perlu kompromi perpaduan antara penggunaan utang dan modal sendiri sehingga diperoleh kondisi yang optimum.

tax savings will occur. However, the increase in debt made by Perum Jamkrindo will increase the cost of interest, which in turn will reduce the overall value of Perum Jamkrind. There is a need to compromise the mix of debt usage and own capital so that optimum conditions are obtained.

KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perum Jamkrindo, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, dan PT Reasuransi Nasional Indonesia nomor 02/PKS/OP-02/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang penyelesaian Utang Piutang dan Pengalihan Portofolio Bisnis. Telah menyepakati bahwa piutang *co-guarantee* dari PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin kepada Perum Jamkrindo akan dialihkan kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp94.741.625.377.

Selain itu terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas dengan keputusan NOMOR : SK - 02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

EVENTS AFTER THE ACCOUNTING'S REPORT DATE

Based on the cooperation agreement between Jamkrindo Corporation, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, and PT Reasuransi Nasional Indonesia Number 02 / PKS / OP-02/2019 dated January 25, 2019, concerning the settlement of Receivables and Transfer of Business Portfolio, It has been agreed that the co-guarantee receivables from PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin to the Jamkrindo Corporation will be transferred to PT Reasuransi Nasional Indonesia in the amount of IDR94,741,625,377.

In addition there was a change in the composition of the Supervisory Board as per the decree number : SK - 02 / MBU / 01/2019 date January 3, 2019, concerning Dismissal and Appointment of the Member of the Perum Jamkrindo Supervisory Board.

DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA

Tahun 2018 Bank Indonesia tercatat 6 (enam) kali menaikan tingkat suku bunga BI 7 *Day Repo Rate* secara bertahap, dari 4,50% menjadi 6,00%. Kenaikan ini merupakan salah satu upaya bank sentral menekan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kenaikanan tingkat suku bunga tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terdapat kinerja Perum Jamkrindo. Hal ini salah satunya disebabkan karena industri perbankan tidak serta merta merespon kenaikan tingkat suku bunga tersebut dengan menaikan tingkat suku bunga pinjaman kepada nasabah.

IMPACT OF CHANGES IN INTEREST ON PERFORMANCE

In 2018, Bank Indonesia recorded 6 (six) times gradual increase of the BI 7 Day Repo Rate interest rate, from 4.50% to 6.00%. This increase was one of the efforts of the central bank to suppress the weakening of the rupiah against the United States Dollar which occurred some time ago.

The increase in interest rates did not have a significant impact on the performance of Perum Jamkrindo. This was partly because the banking industry does not necessarily respond to the increase in interest rates by raising the loan's interest rates to customers.

Selain itu, bagi UMKM suku bunga tidak selalu menjadi pertimbangan untuk mendapatkan dana. Bagi UMKM, yang terpenting adalah bisa dapat kebutuhan dengan cepat. Dengan kondisi tersebut, Perusahaan sebagai jembatan bagi UMKM dan perbankan tidak banyak terpengaruh dari kebijakan dari Bank Indonesia tersebut.

In addition, interest rates for MSMEs are not always considered as funds. For MSMEs, the most important thing is to be able to meet needs quickly. With these conditions, the Company, which bridges the needs of MSMEs and banks was not much affected by the policies of Bank Indonesia.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak melakukan pengikatan yang bersifat material untuk investasi barang modal dengan pihak manapun.

MATERIAL COMMITMENTS FOR INVESTMENT OF CAPITAL GOODS

Throughout 2018, the Company did not make material commitments for capital goods investment with any party.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Tahun 2018, Perusahaan telah merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp27 miliar. Investasi barang modal tersebut ditujukan untuk mendukung operasional dan kinerja Perusahaan, baik jangka pendek, menengah dan panjang. Sumber dana yang digunakan untuk investasi barang modal tersebut sebagian besar berasal dari kas internal.

INVESTMENT OF CAPITAL GOODS REALIZED IN THE LAST FISCAL YEAR

In 2018, the Company has realized a capital goods investment of IDR27 billion. These capital goods investments are intended to support the short, medium and long term operations and performance of the Company. The source of funds used for investment in capital goods mostly came from internal cash.

Rincian investasi barang modal yang direalisasikan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Details of capital goods investment realized in 2018 were as follows:

Jenis Barang Modal (Types of Capital Goods)	Nilai (Rp) (Value (in IDR))
Tanah *Land*	37.400.000
Bangunan *Building*	8.747.053.783
Perumahan Dinas *Office Housing*	4.207.500
Kendaraan Bermotor *Motor Vehicle*	119.870.000
Inventaris Kantor *Office Inventory*	19.964.008.908
Inventaris Rumah Dinas *Office Housing Inventory*	542.727.606
Jumlah ***Total***	**27.415.267.797**

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

Pada setiap awal tahun buku, Perusahaan menetapkan target yang hendak dicapai pada tahun buku, khususnya untuk kinerja operasional dan finansial utama. Namun demikian, dalam perjalannya Perusahaan melakukan *review* terhadap target yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal Perusahaan.

Tahun 2018, secara umum Perum Jamkrindo berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIZATION AND ONE YEAR PROJECTION

At the beginning of each financial year, the Company sets targets to be achieved in the fiscal year, especially for key operational and financial performance. However, in its journey, the Company reviews the targets set in accordance with the development of the Company's internal and external conditions.

In 2018, in general, Perum Jamkrindo successfully achieved the targets set out in the Company Work Plan and Budget of 2018 with the following details:

Uraian *Description*	**RKAP 2018** *2018 Company Budget and Workplan*	**Realisasi 2018** *2018 Realization*	**Pencapaian RKAP 2018** *Achievement of 2018 Company Budget and Workplan*
Imbal Jasa Penjaminan – Bersih *Guarantee Fee - Net*	1.453.763	1.341.208	92,26%
Beban Klaim *Claim Expenses*	1.159.472	1.237.358	106,72%
Pendapatan Investasi – Bersih *Investment Income – Net*	672.132	684.108	101,78%
Laba Tahun Berjalan *Current Year Profit*	219.970	397.543	180,73%
Jumlah Aset ***Total Assets***	**16.301.213**	**16.240.997**	**99,63%**
Jumlah Liabilitas ***Total Liabilities***	**4.032.823**	**4.945.317**	**122,63%**
Jumlah Ekuitas ***Total Equity***	**12.268.389**	**11.295.680**	**92,07%**

Proyeksi 2019

Memasuki tahun 2019, Perum Jamkrindo telah menyusun sejumlah target yang hendak dicapai yang tertuang dalam RKAP 2019. Adapun asumsi dalam penyusunan RKAP tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3% per tahun
2. Tingkat inflasi 3,5%.
3. *Exchange Rate* 1 USD = Rp15.000,-/USD
4. Suku Bunga (Surat Perbendaharaan Negara) 3 Bulanan = 5,3%

2019 Projection

Entering 2019, Perum Jamkrindo has compiled a number of targets to be achieved which are contained in the 2019 Company Work Plan and Budget. The assumptions in the preparation of the Company Work Plan and Budge for the 2019 fiscal year are as follows:

1. *The economic growth rate of 5.3% per year*
2. *3.5% inflation rate.*
3. *Exchange Rate 1 USD = IDR 15,000 / USD*
4. *Interest Rates (Treasury Bills) 3 Monthly = 5.3%*

Berdasarkan asumsi tersebut, target yang ditetapkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on these assumptions, the targets set by the Company are as follows:

Uraian *Description*	**RKAP 2019** *2019 Company Work Plan and Budget*	**Realisasi 2018** *2018 Realizations*
Imbal Jasa Penjaminan – Bersih *Guarantee Fee - Net*	1.615.953	1.341.208
Beban Klaim *Claim Expenses*	1.175.997	1.237.358
Pendapatan Investasi – Bersih *Investment Income – Net*	746.482	684.108
Laba Tahun Berjalan *Current Year Profit*	591.935	397.543
Jumlah Aset ***Total Assets***	**16.166.077**	**16.240.997**
Jumlah Liabilitas ***Total Liabilities***	**4.431.571**	**4.945.317**
Jumlah Ekuitas ***Total Equity***	**11.734.506**	**11.295.680**

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

CONTRIBUTION TO COUNTRY

Pada tahun 2018 Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan berupa pemungutan dan penyetoran berbagai jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

In 2018 the Company carried out tax obligations in the form of collecting and depositing various types of taxes with the following details:

Uraian *Description*	**Saldo Awal** *Beginning Balance*	**Mutasi Tahun 2018** *Mutations from 2018*		**Saldo AKhir** *Ending Balance*
		Kewajiban *Obligations*	**Penyetoran** *Deposit*	
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**
Utang Pajak *Tax Payables*				
Pajak Penghasilan ***Income Tax***				
Pajak Penghasilan Pasal 21 *Article 21 Income Tax*	2.586.384.939	32.227.675.095	30.355.835.801	4.458.224.233
Pajak Penghasilan Pasal 22 *Article 22 Income Tax*	61.304.581	268.452.933	255.977.421	73.780.094
Pajak Penghasilan Pasal 23 *Article 23 Income Tax*	276.780.942	2.855.930.919	2.680.305.065	452.406.796

Uraian *Description*	Saldo Awal *Beginning Balance*	Mutasi Tahun 2018 *Mutations from 2018*		Saldo AKhir *Ending Balance*
		Kewajiban *Obligations*	Penyetoran *Deposit*	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak penghasilan pasal 25 *Article 25 Income Tax*	8.063.600.333	0	8.063.600.333	0
Pajak Penghasilan Pasal 26 *Article 26 Income Tax*	16.623.250	139.790.610	121.635.700	34.778.160
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) *Article 4 (2) Income Tax*	188.269.670	1.840.117.747	1.857.763.136	170.624.281
Pajak Penghasilan Pasal 29 *Article 29 Income Tax*	45.937.895.254	0	45.937.895.254	0
Pajak Final Revaluasi Aset Tetap ***Final Fixed Asset Revaluation Tax***	**57.130.858.969**	**37.331.967.304**	**89.273.012.710**	**5.189.813.564**
Pajak Pertambahan Nilai *VAT*				
Pajak Pertambahan Nilai *VAT*	2.390.606.389	8.425.542.406	8.411.879.438	2.404.269.356
Total Pajak Pertambahan Nilai ***Total VAT***	**2.390.606.389**	**8.425.542.406**	**8.411.879.438**	**2.404.269.356**
Pajak Bumi dan Bangunan *Property Tax*				
Pajak Bumi dan Bangunan *Property Tax*	26.000.000	169.204.496	195.204.496	-
Total Pajak Bumi dan Bangunan ***Total Property Tax***	**26.000.000**	**169.204.496**	**195.204.496**	**-**
Total Utang Pajak ***Total Tax Payables***	**59.547.465.358**	**45.926.714.206**	**97.880.096.644**	**7.594.082.920**

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan keputusan RPB pada 2018 memutuskan usulan pembagian laba tahun buku 2017 sebagai berikut:

DIVIDEND POLICY

Based on the decision of the Joint Discussion Meeting in 2018, the proposed distribution of profit for the 2017 fiscal year is as follows:

Uraian *Description*	Tahun buku 2017 *2017 Fiscal Year*	Tahun buku 2016 *2016 Fiscal Year*
Laba Bersih *Net Profit*	801.846.160.838	692.045.235.887
Jumlah Dividen *Amount of Dividend*	80.184.500.000	48.000.000.000
Payout Ration	10%	6,94%
Tanggal pengumuman *Date of Announcement*	3 Mei 2018 *May 3, 2018*	9 Mei 2017 *May 9, 2017*
Tanggal Pembayaran Dividen *Date of Dividend Payment*	30 Mei 2018 *May 30, 2018*	31 Mei 2017 *May 31, 2017*

Jamkrindo merupakan Perusahaan Umum (Perum) yang di didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah, sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai jumlah dividen kas per saham yang dapat disampaikan pada laporan ini.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Jamkrindo adalah perusahaan dengan badan hukum Perusahaan Umum yang tidak memiliki saham. Kepemilikan Perusahaan 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hingga 31 Desember 2018. Perum Jamkrindo tidak pernah melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan atau manajemen.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2018. Perusahaan tidak melakukan penawaran umum, baik berupa penawaran saham atau surat utang, sehingga tidak terdapat informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang dapat disampaikan pada laporan ini.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Di 2018, Jamkrindo tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Semua transaksi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi serta manfaat ekonomis yang secara substansial sebanding dengan transaksi dengan pihak ketiga.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, di mana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga yang meliputi:

Jamkrindo is a Public Company (Perum) which is established and owned by the Government. So, there is no information about the number of shares. For that reason, there is no information about the amount of cash dividends per shares that can be submitted in this report.

SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES AND / OR MANAGEMENT

Jamkrindo is a Public Corporation legal entity that does not have shares. Company ownership is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. As of December 31, 2018. Perum Jamkrindo has never implemented a share ownership program by employees or management.

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

In 2018, The Company did not conduct a public offering, either in the form of offering shares or debt securities. Therefore, there is no information regarding the realization of the use of the funds acquired from the public offering that can be submitted in this report.

TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

Transactions Containing Conflict of Interest

In 2018, Jamkrindo did not conduct any transactions which contains a conflict of interest. All Company's Transactions of has been carried out in accordance with the prevailing terms and conditions, and based on economic benefits that are substantially comparable with transactions with third parties.

Transactions with Affiliates

In its business activities, the Company carries out certain transactions with related parties which the management believes that transactions with related parties are carried out with terms and conditions similar to those of third parties.

Pihak Berelasi *Parties in Affiliation*	**Sifat Hubungan** *Nature of Affiliation*	**Sifat Transaksi** *Nature of Transaction*
Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan *Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*	Pemegang Saham *Shareholder*	Piutang IJP KUR; Pendapatan IJP KUR *KUR Guarantee Fee Receivables, KUR Guarantee Fee Income*
Dewan Pengawas dan Direksi *Board of Supervisors and Directors*	Manajemen Kunci *Key Management*	Gaji dan tunjangan *Salaries and Benefits*
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	Giro, deposito, efek-efek *Current accounts, deposits, securities*
PT Bank Mandiri Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	Giro, deposito, efek-efek *Current accounts, deposits, securities*
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	Giro, deposito, efek-efek *Current accounts, deposits, securities*
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	Giro, deposito, efek-efek *Current accounts, deposits, securities*
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	Giro, deposito, efek-efek *Current accounts, deposits, securities*
PT Bank Syariah Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	Giro, deposito, efek-efek *Current accounts, deposits, securities*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	Giro, deposito, efek-efek *Current accounts, deposits, securities*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	Giro, deposito, efek-efek *Current accounts, deposits, securities*
PT Reasuransi Internasional Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
Perum Pegadaian Persero	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
Perum Perumahan Nasional Persero	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Aneka Tambang Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Perusahaan Listrik Negara Persero	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Waskita Karya Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Angkasa Pura II Persero	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Hutama Karya Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*

Pihak Berelasi *Parties in Affiliation*	**Sifat Hubungan** *Nature of Affiliation*	**Sifat Transaksi** *Nature of Transaction*
PT Permodalan Nasional Madani Persero	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Perkebunan Nusantara X Persero	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Garuda Indonesia Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Danareksa Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Semen Gresik Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Wijaya Karya Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Jasa Marga Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Bukit Asam Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*
PT Kereta Api Indonesia Persero	Berelasi dengan Pemerintah *Government-related*	efek-efek *securities*

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERJADI PADA TAHUN BUKU

AMENDMENT TO THE REGULATIONS THAT HAPPENED IN THE FISCAL YEAR 2018.

Sepanjang tahun 2018, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Perusahaan, antara lain :

Throughout 2018, there were no changes in legislation that has a considerable influence towards the Company.

Nama Peraturan *Names of Regulation*	**Dampak Bagi Perusahaan** *The Impact to the Company*
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indoneisa *Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo*	Perubahan Anggaran Dasar (adanya penjaminan BUMN/sinergi BUMN) *Amendments to the Articles of Association (the existence of SOEs guarantees/SOEs synergies*

Nama Peraturan *Names of Regulation*	Dampak Bagi Perusahaan *The Impact to the Company*
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services*	Proses penanganan klaim *Claim Management process*
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat *Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 8 of 2018 concerning Amendment to Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 11 of 2017 concerning Guidelines for Implementing People's Business Credit*	Penjaminan KUR (penambahan sektor) *KUR Guarantee (additional sector)*
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/06/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara *Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-06 / MBU / 06/2018 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04 / MBU / 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises*	Penyesuaian penghasilan *Income Adjstment*
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin *Financial Services Authority Regulation No. 30 of 2018 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2017 concerning the Operation of Guarantor Business Institutions*	Penyesuaian investasi *Investment adjustment*
Surat Edaran No. SE-06/MBU/08/2018 tentang Kepesaertaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *Circular Letter No. SE-06 / MBU / 08/2018 concerning the Participation of State-Owned Enterprises in the Employment Social Security Program*	Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) *Social Security (BPJS for Employment)*
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.05/2018 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Bagi Lembaga Penjamin dan Pendaftaran Bagi Lembaga Penunjang Penjaminan Secara Elektronik *Financial Services Authority Circular No. 20 / SEOJK.05 / 2018 concerning Requests for Licensing, Approval, and Reporting for Guarantee Business Institutions and E-Registration for Guarantee Supporting Institutions*	Perizinan, persetujuan, dan laporan secara elektronik *Licensing, approval, and electronic reporting*

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tanggal 1 Januari 2018, Perum Jamkrindo dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Since January 1, 2018, Perum Jamkrindo and Subsidiaries applied statements of financial accounting standards ("PSAK") and the new and revised interpretations of financial accounting standards ("ISAK"). The changes in accounting policies of Perum Jamkrindo and Subsidiaries have been fulfilled as required, in accordance with the transitional provisions in each standard and interpretation.

1. Amandemen PSAK 2 "Laporan arus kas"
   Amandemen tersebut mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktifitas pembiayaan pada laporan arus kas.
2. Amandemen PSAK 13 "Properti investasi"
   Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk mengalihkan ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan.
   Untuk menyimpulkan bahwa terdapat perubahan penggunaan terjadi, pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi. Perubahan ini harus didukung oleh bukti atas penggunaan perubahan. Pada amandemen ini, dikonfirmasi juga bahwa perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan bukti perubahan penggunaan.
3. Amandemen PSAK 15 Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
   Amandemen tersebut mengizinkan perusahaan modal ventura, reksa dana, unit trust dan entitas serupa untuk memilih pengukuran inestasi mereka di perusahaan asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). DSAK mengklarifikasi bahwa pemilihan tersebut harus dilakukan secara terpisah.
4. Amandemen PSAK 16 "Aset tetap"
   Amandemen tersebut memberikan klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran dari tanaman produksi harus sesuai dengan standar yang relevan.
5. Amandemen PSAK 46 "Pajak penghasilan"
   Amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan untuk mengakui asset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi.
   Amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi untuk pajak tangguhan di mana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih rendah dari dasar pengenaaan pajak atas asset tersebut. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi aspek tertentu dari akuntansi untuk pajak tangguhan.
6. Amandemen PSAK 53 "Pembayaran berbasis saham"
   Amandemen ini mengklarifikasi basis pengukuran untuk pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas dan akuntansi untuk modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang sebelumnya diklasifikasikan dari imbalan yang diselesaikan dengan kas menjadi imbalan yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Amandemen

1. *Amendments to PSAK on "Cash flow statement"*
   The amendment requires the entity to explain changes in its liabilities for cash flows that have been, or which will be classified as financing activities in the cash flow statement.

2. *Amendments to PSAK 13 on "Investment property"*
   This amendment clarifies that to transfer to or from an investment property can be done if, and only if, there is a change in the usage.
   To conclude that changes in usage occur, testing needs to be conducted to find out whether the property meets, or stops meeting, the definition of investment property. This change must be supported by evidence of the change of use. In this amendment, it was also confirmed that changes in management's intention to use the property did not show evidence of changes in use.

3. *Amendments to PSAK 15 on "Investment in associates and joint ventures"*
   The amendment allows venture capital companies, mutual funds, unit trusts, and similar entities to choose their investment measurements in associated companies or joint ventures at fair value through profit and loss (FVTPL). DSAK clarifies that the selection must be done separately.

4. *Amendments to PSAK 16 on "Fixed assets"*
   The amendment provides clarification of biological assets that meet the definition of production plants recorded as fixed assets. Definition, recognition, and measurement of production plants must be in accordance with relevant standards.
5. *Amendments to PSAK 46 on "Income Tax"*
   The amendment clarifies the requirement to recognize deferred tax assets for losses that have not been realized.

   The amendment clarifies the accounting for deferred tax where an asset is measured at fair value and the fair value is lower than the base of tax imposition of the asset. The amendment also clarifies certain aspects of accounting for deferred tax.

6. *Amendments to PSAK 53 on "Stock-based Payments"*
   This amendment clarifies the measurement basis for stock-based payments that are settled by cash and accounting for the modification of stock-based payment transactions which was previously classified from rewards that are settled with cash into rewards that are settled by equity instruments. The amendment also introduces an exception to the principle

ini juga memperkenalkan sebuah pengecualian terhadap prinsip pada PSAK 53 yang mengharuskan suatu penghargaan diakui seakan-akan seluruhnya akan diselesaikan melalui pembayaran berbasis saham, ketika pemberi kerja diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pekerja terkait dengan pembayaran berbasis saham dan membayarkannya kepada otoritas pajak.

7. Amandemen PSAK 67 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain"
   Amandemen tersebut berlaku untuk kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sifat dari kepentingan di entitas lain, risiko yang terasosiasi dengan kepentingan dan efek dari kepentingan tersebut untuk laporan keuangan.
8. PSAK 69 "Agrikultur"
   Standar ini menyajikan definisi dan kriteria pengakuan untuk aset biologis atau hasil agrikultur. Aset-aset tersebut diukur menggunakan nilai wajar dikurangi harga jual dengan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi.
   Penerapan dari standar dan interpretasi baru tersebut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak, dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

of PSAK 53 which requires an award to be recognized as if all of it would be settled through share-based payments at the time the employer is required to deduct worker income tax related to share-based payments and pay it to the tax authority.

7. *Amendments to PSAK 67 on "Disclosure of interests in other entities"*
   The amendment applies to interests in entities categorized as owned for sale except for a summary of financial information. The purpose of this amendment is to provide information about the nature of interests in other entities, the risks associated with the interests, and effects of these interests for financial statements.
8. *PSAK 69 "Agriculture"*
   This standard presents definitions and recognition criteria for biological assets or agricultural products. These assets are measured by the reduction of fair value by the selling price with the changes in the carrying amount recognized in the income statement.
   The application of the new standards and interpretations does not result in substantial changes to the accounting policies of Perum Jamkrindo and Subsidiaries and does not have a significant effect on the amounts reported in the current or previous year.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Pada tahun 2018 tidak terdapat faktor yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Kondisi lingkungan internal dan eksternal Perusahaan berada dalam posisi yang cukup baik dan cenderung mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, manajemen Perusahaan tetap melakukan langkah antisipatif untuk memastikan Perusahaan terhindar dari risiko-risiko dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perusahaan. Dalam hal ini, Jamkrindo telah menerapkan *Business Continuity Management* (BCM), yaitu proses manajemen menyeluruh yang mengidentifikasi potensi dan dampak bencana terhadap operasional Perusahaan, menyediakan *framework* untuk membangun ketahanan Perusahaan dengan kemampuan respon yang efektif melindungi kepentingan *stakeholders*, reputasi, *brand*

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

In 2018 there were no factors that could significantly influence the sustainability of the Company's business. The conditions of the Company internal and external environment are in a fairly good position and tend to experience growth compared to the previous year.

However, the Company's management continues to take anticipatory steps to ensure that the Company avoids the risks and factors that can affect the Company's business continuity. In this case, Jamkrindo has implemented Business Continuity Management (BCM), a comprehensive management process that identifies the potential and impact of disasters on the Company's operations, provides a framework to build the resilience of the Company with response capabilities that effectively protect the interests of stakeholders, reputation, brand, and value creating activities. The BCM of Perum Jamkrindo has been standardized

dan aktivitas *value-creating*. BCM Perum Jamkrindo telah dibakukan kedalam Peraturan Direksi Nomor : 25/Per-Dir/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 perihal Kebijakan Umum *Business Continuity Management* Perum Jamkrindo.

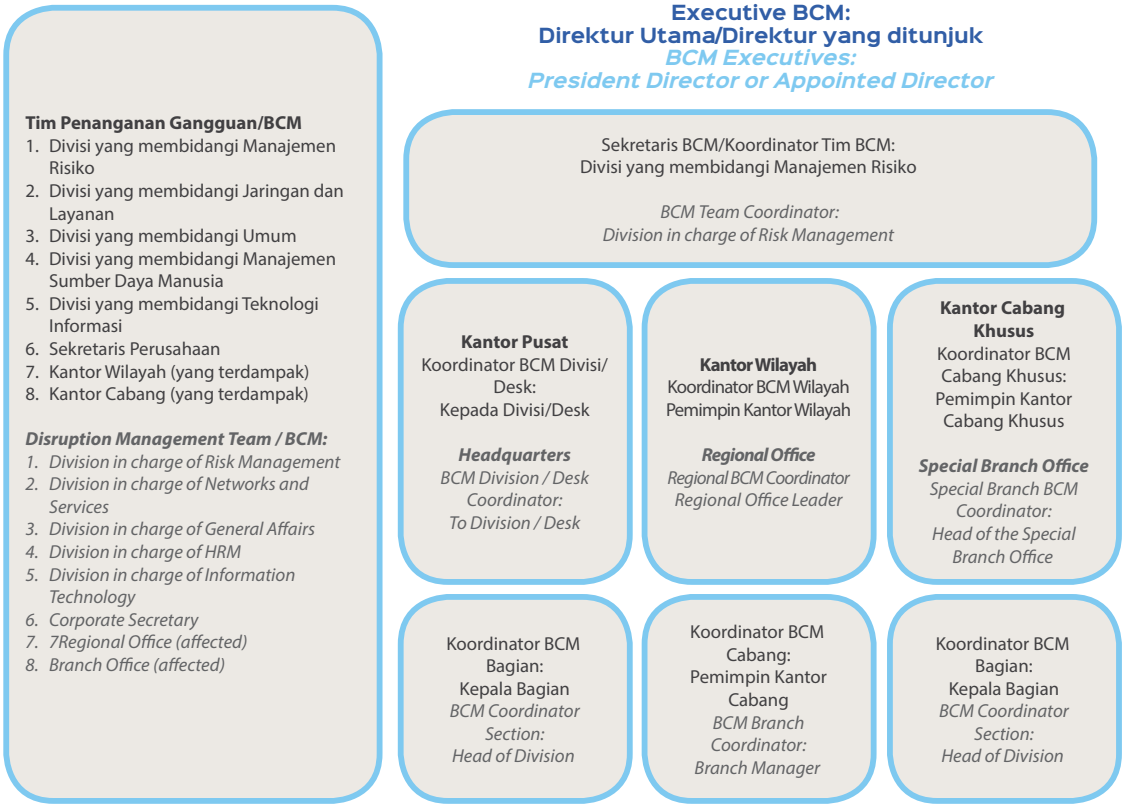
in the Directors' Regulation Number: 25 / Per-Dir / VII / 2017 dated 13 July 2017 concerning General Policy of Business Continuity Management of Perum Jamkrindo.

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM merupakan Unit Kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penerapan BCM. Dalam penerapannya, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Kerja Perusahaan. Selain melakukan sosialisasi aktif, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah merilis buku saku yaitu buku Manajemen Kelangsungan Usaha dan buku Tanggap Tangkas Menghadapi Bencana yang telah didistribusikan keseluruh Unit Kerja di Perum Jamkrindo.

The Risk Management and MSME Ranking & Management Consultation (PUKM) Divisions are Work Units responsible for the management and implementation of BCM. In its implementation, the Risk Management and PUKM Divisions have conducted dissemination of BCM to all Work Units of the Company. In addition to active dissemination, the Risk Management and PUKM Divisions have released a pocketbook, namely the Business Continuity Management and Disaster Management Handbook which has been distributed throughout the Work Unit at the Perum Jamkrindo.

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM dalam penerapan BCM tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan seluruh Unit Kerja di Perum Jamkrindo. Keterlibatan Unit Kerja lainnya, tergambarkan dalam struktur organisasi BCM yaitu sebagai berikut :

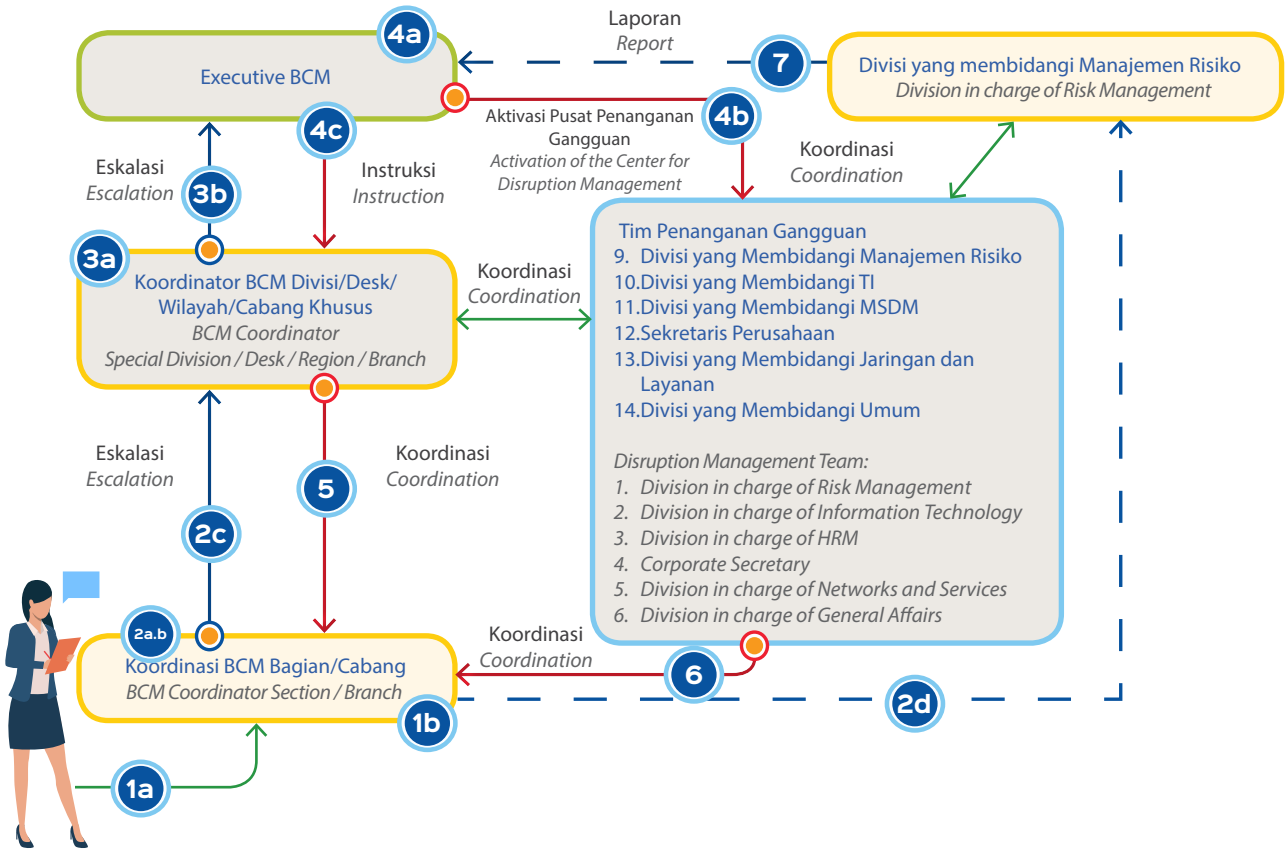
In the application of BCM, The Risk Management and PUKM Divisions do not work alone; they involve all Work Units at Perum Jamkrindo. The involvement of other Work Units, reflected in the organizational structure of BCM, is as follows:

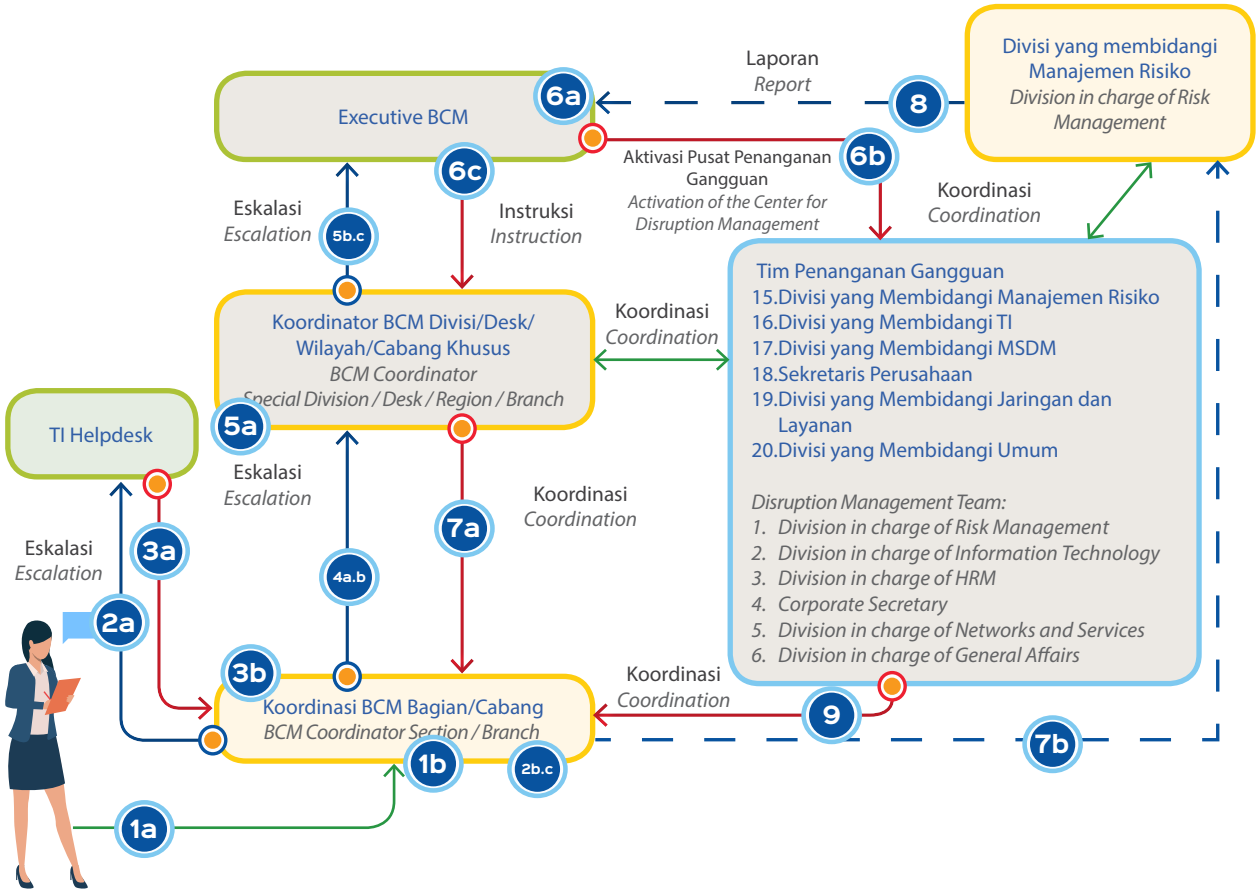


Penerapan dari BCM Perum Jamkrindo dapat ditunjukkan dengan adanya pelaporan business continuity management oleh Unit Kerja yang tertimpa bencana dan mekanisme prosedur penanganan BCM. Berikut mekanisme pelaporan dan penanganan yang dilakukan :Mekanisme call tree – gangguan non-IT

The application of BCM in Perum Jamkrindo can be demonstrated by the existence of reporting on business continuity management by the affected Unit and the mechanism for management of BCM. The followings are the BCM reporting and management mechanisms:

Mekanisme call tree – gangguan IT
Call tree mechanism - non-IT Disruption





Unit Kerja yang telah melakukan prosedur pelaporan di atas yaitu Kantor Cabang Palu (gempa bumi) dan Kantor Unit Pelayanan Surabaya Kota (angin puting beliung). Selanjutnya pelaporan dari Unit Kerja tersebut ditindak lanjuti oleh Tim Penanganan Gangguan dalam bentuk monitoring secara berkala dan melaporkan kepada seluruh Direksi Perum Jamkrindo.

Work Units that have carried out the reporting procedures above, namely the Palu (earthquake) Branch Office and the Surabaya City Service Unit Office (tornado). Furthermore, reporting from the Work Unit is followed up by the Disruption Management Team in the form of periodic monitoring and reporting to all Directors of Perum Jamkrindo.

Untuk menindaklanjuti kebijakan BCM yang telah tersedia, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM melakukan penyusunan prosedur Business Continuity Plan (BC Plan) Unit Kerja Kritikal. Selain melakukan penyusunan prosedur tersebut, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM melakukan pembaharuan atas kebijakan BCM menyesuaikan dengan struktur organisasi terbaru.

To follow up on the available BCM policies, the Risk Management and PUKM Divisions carry out the preparation of a Business Continuity Plan (BC Plan) procedure for Critical Work Units. In addition to making these procedures, the Risk Management and PUKM Divisions are updating the BCM policy to adapt to the latest organizational structure.

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



Laporan Tahunan
Annual Report **2018**

FUNGSI PENUNJANG BISNIS
BUSINESS SUPPORT FUNCTIONS

Perum Jamkrindo menerapkan program-program strategis di bidang SDM dan IT untuk meningkatkan perannya dalam industri penjaminan nasional melalui peningkatan produktivitas karyawan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi teknologi Perusahaan.

Perum Jamkrindo implements strategic programs in the field of HR and IT to increase its role in the national guarantee industry through increasing employee productivity and optimizing the utilization of the Company's information technology system.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN TALENTA

HUMAN RESOURCES AND TALENT MANAGEMENT



> Dalam rangka pengelolaan SDM yang lebih profesional, pada tahun 2018, Perum Jamkrindo telah melakukan perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan SDM sesuai praktik-praktik terbaik (*best practice*).
>
> *In the context of more professional HR management, in 2018, Perum Jamkrindo has made changes to HR management policies according to best practices.*

Perusahaan memandang Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan roda bisnis di tengah dunia industri yang terus berkembang. Di mana melalui pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan strategi Perusahaan, akan mampu meningkatkan daya saing dan akselarasi kinerja Perusahaan. Bagi Perusahaan, SDM adalah aset berharga yang eksistensinya selalu mendapat perhatian khusus baik dalam bentuk pengembangan kompetensi maupun tingkat kesejahteraan.

The company views Human Resources (HR) as one of the most important elements in moving the business wheel amid a growing industrial world. Through HR management that is integrated with the Company's strategy, it will be able to improve the competitiveness and acceleration of the Company's performance. For the Company, HR is a valuable asset whose existence has always received special attention both in the form of competency development and welfare.

Untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM, Perum Jamkrindo senantiasa melakukan program-program pengembangan bagi karyawan. Melalui pengelolaan SDM dan pengembangan kompetensi, Perum Jamkrindo berupaya untuk dapat menciptakan kinerja organisasi yang dapat mendorong setiap karyawan untuk dapat menemukan potensi terbaik dirinya dan mengembangkan talenta tersebut secara berkesinambungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membentuk karyawan yang andal dan berkompeten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan kemampuan inilah Perusahaan dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif.

To improve the competency and quality of its human resources, Perum Jamkrindo always carries out development programs for employees. Through HR management and competency development, Perum Jamkrindo strives to create an organizational performance that can encourage every employee to be able to find their best potential and develop these talents on an ongoing basis. The company has the responsibility to form reliable and competent employees to be able to carry out their duties properly. With this capability, the Company can progress well and can face various challenges in an all-competitive era.

Demografi Karyawan

Hingga 31 Desember 2018, Perum Jamkrindo mengkaryakan 1.002 orang. Jumlah ini berkurang 46 orang dan bertambah 6 orang atau menurun 3,83% dibanding tahun 2017 yang sebanyak 1.042 orang. Hal ini disebabkan oleh 35 orang karyawan mengundurkan diri, 8 orang pensiun normal, 3 orang meninggal dunia dan penambahan karyawan baru sebanyak 6 orang.

Demografi karyawan selengkapnya disajikan sebagai berikut:

Employee Demographics

As of December 31, 2018, Perum Jamkrindo employs 1,002 people. This number is a result of a decrease of 46 people and an increase of 6 people. In other words, the number of employees decreased by 3.83% compared to 2017 which was 1,042 people. This is due to 35 employees resigning, 8 people retiring normally, 3 people passed away, and the addition of 6 new employees.

The detailed employee demographics are presented as follows:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level/Kelompok Jabatan
Composition of Employees by Level / Position

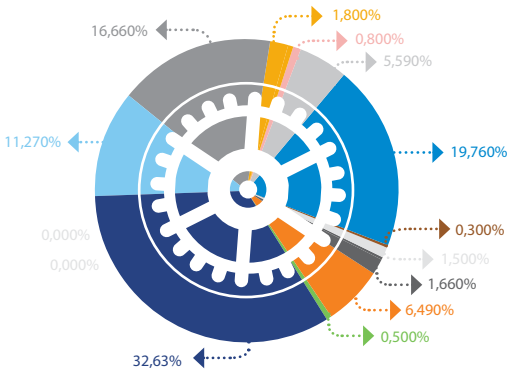
Level/Kelompok Jabatan *Level/Position*	2018				2017			
	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*
Kepala Divisi *Division Head*	11	7	18	1,80%	12	7	19	1,82%
Pejabat Pranata Utama *Main Institution's Officer*	0	0	0	0,00%	2	0	2	0,20%
Kepala Kantor Wilayah *Head of Regional Office*	8	0	8	0,80%	8	1	9	0,86%
Wakil Kepala Kantor Wilayah *Deputy Head of Regional Office*	1	0	1	0,10%	0	0	0	0,00%
Kepala Kantor Cabang *Head of Branch Office*	48	8	56	5,59%	49	7	56	5,37%
Kepala Bagian *Department Head*	143	55	198	19,76%	71	29	100	9,60%
Pejabat Pranata Madya *Middle Institution's Officer*	2	1	3	0,30%	4	1	5	0,48%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level/Kelompok Jabatan

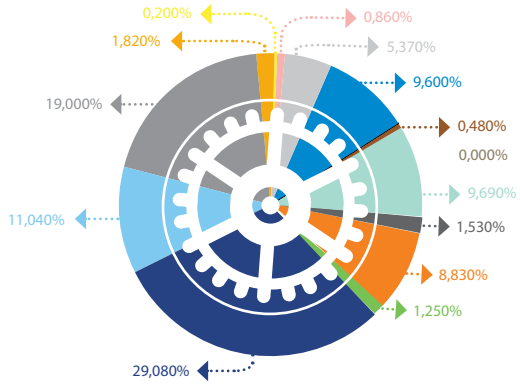
Composition of Employees by Level / Position

Level/Kelompok Jabatan *Level/Position*	2018				2017			
	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*
Pejabat Pranata Pratama *Institution's Junior Officer*	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Kepala Unit *Unit Head*	13	2	15	1,50%	74	27	101	9,69%
Kepala Kantor Unit Pelayanan *Head of Service Unit Office*	12	4	16	1,60%	14	2	16	1,53%
Kepala Seksi *Section Head*	20	45	65	6,49%	34	58	92	8,83%
Pranata Muda *Institution's Junior*	1	0	1	0,10%	1	0	1	0,10%
Kepala Sub Seksi *Sub-section Head*	3	2	5	0,50%	9	4	13	1,25%
Staf *Staff*	190	137	327	32,63%	176	127	303	29,08%
Pelaksana *Executor*	73	40	113	11,27%	75	40	115	11,04%
Calon Karyawan *Prospective Employees*	84	83	167	16,66%	104	94	198	19,00%
Penugasan Jamsyar *Assigned to Jamsyar*	5	2	7	0,70%	5	4	9	0,86%
Penugasan PT LSPP *Assigned to PT LSPP*	1	1	2	0,20%	2	1	3	0,29%
Jumlah ***Total***	**615**	**387**	**1.002**	**100,00%**	**640**	**402**	**1.042**	**100,00%**

2018



2017



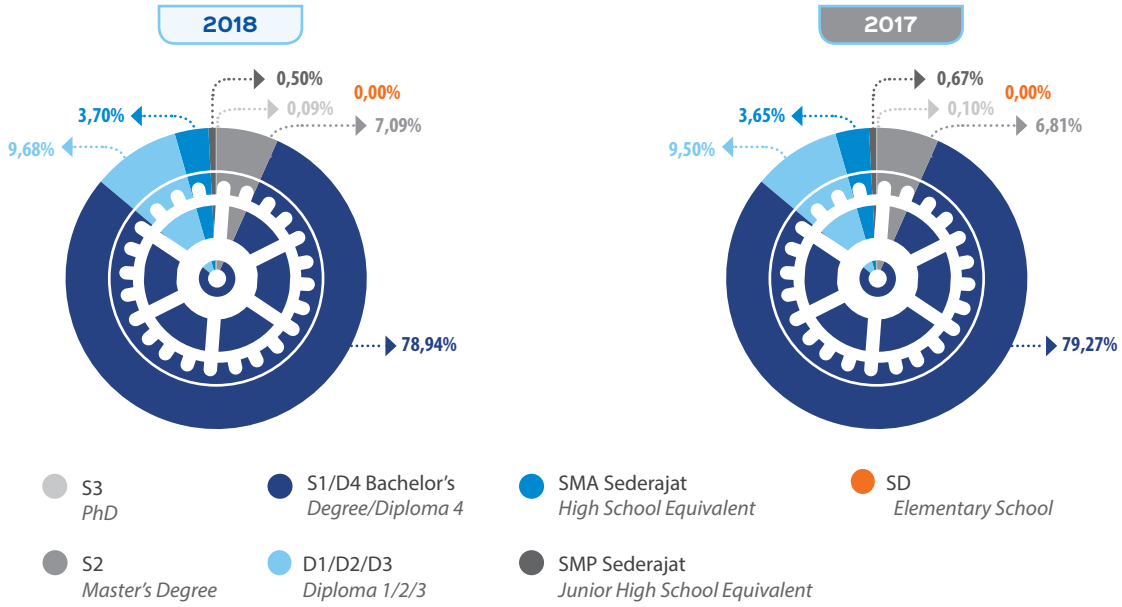
- Kepala Divisi *Division Head*
- Kepala Bagian *Department Head*
- Kepala Kantor Unit Pelayanan *Head of Service Unit Office*
- Pelaksana *Executor*
- Pejabat Pranata Utama *Main Institution's Officer*
- Pejabat Pranata Madya *Middle Institution's Officer*
- Kepala Seksi *Section Head*
- Calon Karyawan *Prospective Employees*
- Kepala Kantor Wilayah *Head of Regional Office*
- Pejabat Pranata Utama *Main Institution's Officer*
- Kepala Sub Seksi *Sub-section Head*
- Kepala Kantor Cabang *Head of Branch Office*
- Kepala Unit *Unit Head*
- Staf *Staff*

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Composition of Employees by Level of Education

Tingkat Pendidikan *Level of Education*	2018				2017			
	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*
S3 *PhD*	1	0	1	0,09%	1	0	1	0,10%
S2 *Master's Degree*	49	22	71	7,09%	49	22	71	6,81%
S1/D4 *Bachelor's Degree / Diploma 4*	477	314	791	78,94%	498	328	826	79,27%
D1/D2/D3 *Diploma 1/2/3*	56	41	97	9,68%	58	41	99	9,50 %
SMA Sederajat *High School Equivalent*	27	10	37	3,70%	27	11	38	3,65%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Composition of Employees by Level of Education

Tingkat Pendidikan *Level of Education*	2018				2017			
	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*
SMP Sederajat *Junior High School Equivalent*	5	0	5	0,50%	7	0	7	0,67%
SD *Elementary School*	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Jumlah *Total*	**615**	**387**	**1.002**	**100,00%**	**640**	**402**	**1.042**	**100,00%**

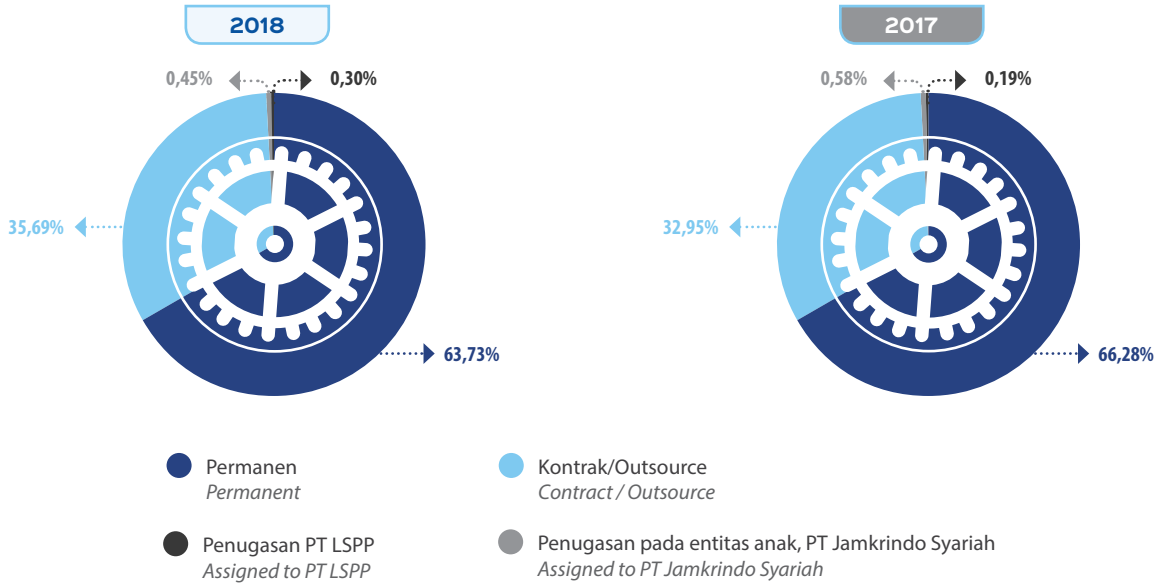


Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Composition of Employees by Employment Status

Status Kepegawaian *Employment Status*	2018				2017			
	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*
Permanen *Permanent*	609	384	993	63,73%	633	397	1.030	66,28%
Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah *Assigned to PT Jamkrindo Syariah*	5	2	7	0,45%	5	4	9	0,58%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Composition of Employees by Employment Status

Status Kepegawaian *Employment Status*	2018				2017			
	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*
Penugasan PT LSPP *Assigned to PT LSPP*	1	1	2	0,13%	2	1	3	0,19%
Sub Jumlah *Sub Total*	615	387	1.002	100,00%	640	402	1.042	67,05%
Kontrak/Outsource *Contract / Outsource*	447	109	556	35,69%			512	32,95%
Jumlah	**1.062**	**496**	**1.558**	**100,00%**			**1.554**	**100,00%**

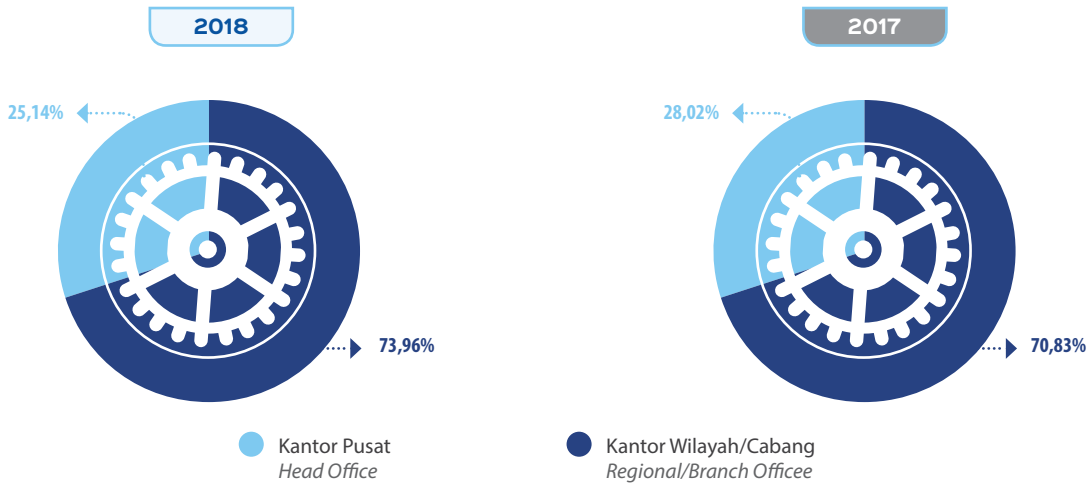


Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja
Composition of Employees by Work Area

Wilayah Kerja *Work Area*	2018				2017			
	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*
Kantor Pusat *Head Office*	147	105	252	25,14%	166	126	292	28,02%
Kantor Wilayah/Cabang *Regional / Branch Office*	462	279	741	73,96%	467	271	738	70,83%

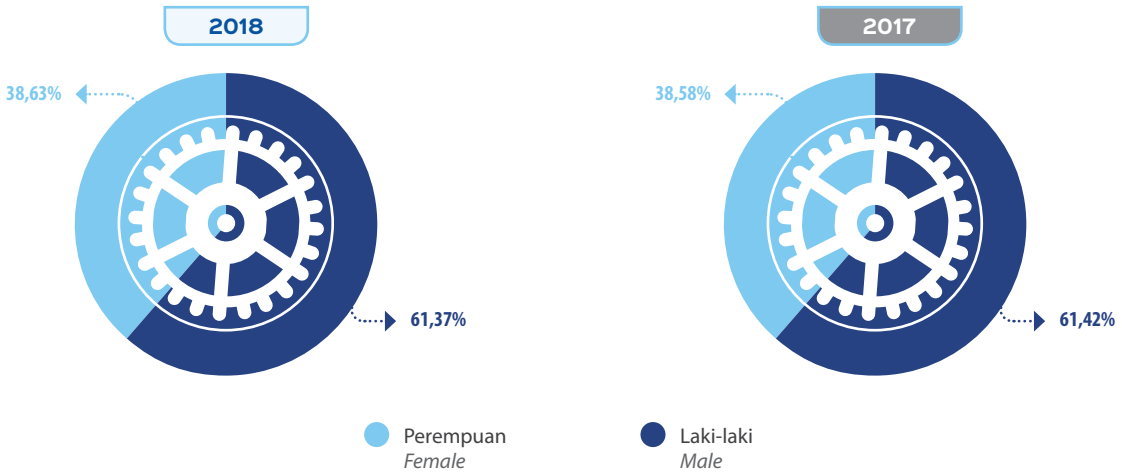
Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja
Composition of Employees by Work Area

Wilayah Kerja *Work Area*	2018				2017			
	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*	L *Male*	P *Female*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*
Penugasan Jamsyar *Assigned to PT Jamkrindo Syariah*	5	2	7	0,70%	5	4	9	0,86%
Penugasan PT LSPP *Assigned to PT. LSPP*	1	1	2	0,20%	2	1	3	0,29%
Jumlah	**615**	**387**	**1.002**	**100,00%**	**640**	**402**	**1.042**	**100,00%**



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Composition of Employees by Gender

Jenis Kelamin *Gender*	2018		2017	
	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*	Jumlah *Total*	Komposisi *Composition*
Laki-laki *Male*	615	61,37%	640	61,42%
Perempuan *Female*	387	38,63%	402	38,58%
Jumlah *Total*	**1.002**	**100,00%**	**1.042**	**100,00%**



PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SDM

Sebagai aset utama, Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan. Jamkrindo menyadari, kesuksesan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM, baik dari sisi pengelolaan internal maupun memenuhi kebutuhan pasar. Perencanaan dan strategi pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang dilaksanakan Perum Jamkrindo untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan perencanaan dan strategi pengembangan SDM adalah:

1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam Perusahaan.
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan.
3. Menghindari terjadinya *miss management* dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat.
5. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan.
6. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan kedisiplinan, serta pemberhentian karyawan.
7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horizontal) dan pensiun karyawan.
8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai.

HR DEVELOPMENT PLANNING AND STRATEGY

As a major asset, the Company is committed to developing HR on an ongoing basis. Jamkrindo realizes that the success and sustainability of the Company's business are largely determined by the availability of HR, be it in terms of internal management and meeting market needs. HR planning and development strategies are the main functions carried out by Perum Jamkrindo to ensure the distribution of the workforce on the right job and at the right time to occupy various positions.

The objectives of HR planning and development strategies are:

1. *To determine the quality and quantity of employees who will fill all positions in the Company.*
2. *To ensure the availability of current and future labor, so that every work can be completed.*
3. *To avoid the occurrence of mismanagement and overlap in the execution of tasks.*
4. *To facilitate coordination, integration, and synchronization to increase work productivity*
5. *To avoid employee shortages or excess*
6. *To become a guideline in establishing programs for recruitment, selection, development, compensation, integration, maintenance, discipline, as well as the dismissal of employees.*
7. *To become a guideline in carrying out mutations (vertical or horizontal) and employee retirement.*
8. *To become the basis for evaluating employees.*

Perusahaan terus berupaya menerapkan strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi yang diawali dengan telah tersusunnya direktori kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Perusahaan pada RKAP 2015 dan RJPP 2014-2018. Upaya ini bertujuan untuk menempatkan posisi seorang karyawan pada tempat atau jabatan yang sesuai dengan kualitas kemampuannya.

The company continues to implement a competency-based HR development strategy which begins with the compilation of directories of competencies and job requirements as stated in the Company's work plan for the 2015 RKAP and 2014-2018 RJPP. This activity is aimed to distribute the position of an employee in a place or position that is in accordance with the quality of his ability.

Dalam rangka pengelolaan SDM yang lebih profesional, Perusahaan telah melakukan perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan SDM sesuai praktik-praktik terbaik *(best practise)*. Pada tahun 2018, strategi utama bidang SDM adalah peningkatan produktivitas karyawan melalui peningkatan kompetensi, penyempurnaan sistem penilaian kinerja, sistem penggajian, peningkatan kedisiplinan dan peningkatan *engagement* karyawan.

In the framework of more professional management of human resources, the Company has made changes to HR management policies in accordance with best practices. In 2018, the main strategy in the HR sector was to increase employee productivity through increasing competence, improving the performance appraisal system, payroll system, improving discipline, and increasing employee engagement.

Berikut program-program strategis bidang SDM tahun 2018 untuk peningkatan produktivitas tersebut di atas:

1. Pengembangan Sistem *Knowledge Management*.
   Knowledge Management adalah suatu rangkaian proses kegiatan dalam mengidentifikasi, menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan agar bisa digunakan kembali oleh sebuah organisasi. Tujuan pengembangan Sistem *Knowledge Management* di Jamkrindo adalah agar pengetahuan yang dimiliki oleh Perusahaan dapat dikelola dengan baik dan dapat digunakan kembali sebagai media peningkatan kompetensi dan pembelajaran bagi seluruh generasi karyawan. Program *knowledge management* Jamkrindo saat ini antara lain:
   a. *Sharing Knowledge*, kegiatan sharing pengetahuan terkait *product knowledge*, peraturan Perusahaan ataupun materi-materi pelatihan yang pernah diikuti oleh Karyawan
   b. *Sharing experience, lesson learned* melalui media *knowledge management* www.km.jamkrindo.co.id
   c. E-learning , kegiatan pelatihan jarak jauh melalui media *knowledge management* www.km.jamkrindo.co.id dan www.ilmu.jamkrindo.co.id

2. Penerapan KPI Individu.
   Peningkatan produktivitas karyawan dapat tercapai apabila Perusahaan dapat mengukur kinerja karyawannya secara kuantitatif. Untuk itu Perusahaan telah menetapkan sistem penilaian kinerja berdasarkan KPI Individu. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan penilaian kinerja

The followings are the HR division strategic programs in 2018 to increase the productivity mentioned above:

1. *Knowledge Management System Development.*
   Knowledge Management is a series of activities in identifying, creating and distributing knowledge so that it can be reused by an organization. The purpose of developing the Knowledge Management System in Jamkrindo is so that the knowledge owned by the Company can be managed properly and can be reused as a medium to increase competence and a medium of learning for all generations of employees. Jamkrindo's current knowledge management program includes:
   a. *Sharing Knowledge. These knowledge-sharing activities related to product knowledge, Company regulations or training materials which have been attended by Employees*
   b. *Sharing experience. Lessons learned through the media knowledge management www.km.jamkrindo.co.id*
   c. *E-learning. Remote training activities through media knowledge management www.km.jamkrindo.co.id and www.ilmu.jamkrindo.co.id*

2. *Application of Individual KPI.*
   Increased employee productivity can be achieved if the Company can measure employee performance quantitatively. For this reason, the Company has established a performance appraisal system based on Individual KPI. This is done in order to create a performance assessment

yang lebih terukur, objektif, *fair* (adil) dan transparan. Hasil penilaian kinerja tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atas kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan *reward and punishment*
b. Penyusunan kebijakan alokasi bonus
c. Kebijakan pengembangan karyawan
d. Kebijakan rotasi karyawan
e. Pembentukan talent pool karyawan

3. Tata Ulang Struktur Gaji
Tujuan tata ulang struktur gaji adalah untuk menciptakan sistem remunerasi yang *internally fair* dan *externally competitive* di mana melalui penataan struktur gaji yang baru diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan memotivasi karyawan memberikan kinerja terbaik serta membangun budaya berkompetisi secara optimal untuk pencapaian kinerja Perusahaan. Tata ulang struktur gaji juga bertujuan untuk meningkatkan manfaat pensiun dari karyawan.

4. Peningkatan komposisi karyawan di unit kerja bisnis
Selaras dengan strategi utama bidang SDM tahun 2018, maka Perusahaan juga memperkuat tim bisnis, hal ini guna percepatan pencapaian kinerja korporasi yang dilakukan dengan cara :
a. Melakukan mutasi karyawan dari unit non-bisnis ke unit bisnis
b. Memberikan program pelatihan yang mendukung perkuatan tim bisnis

5. Sertifikasi Manajemen Risiko oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Sertifikasi Internal Ahli Penjaminan.
Sebagai Perusahaan yang yang bergerak di Industri Keuangan, pengelolaan risiko merupakan hal yang bersifat *mandatory*. Terkait hal tersebut, Perusahaan telah melakukan sertifikasi Manajemen Risiko oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sertifikasi Internal Ahli Penjaminan kepada karyawan guna meningkatkan awareness karyawan terhadap risiko, peningkatan kompetensi serta standarisasi kompetensi karyawan.

6. Penyempurnaan kebijakan tentang sanksi pelanggaran ketentuan Perusahaan
Kepercayaan mitra kerja sangat ditentukan oleh reputasi Perusahaan dan juga perilaku karyawan. Untuk menjaga kepercayaan mitra kerja tersebut maka Perusahaan meng*update* kebijakan tentang sanksi pelanggaran ketentuan Perusahaan dengan tujuan:

that is more measurable, objective, fair and transparent. The results of the performance assessment are then used as the basis for making decisions on the following policies:

a. Reward and punishment policy
b. Compilation of bonus allocation policies
c. Employee development policy
d. Employee rotation policy
e. Establishment of employee talent pool

3. Restructuring of Salary Structure
The purpose of the salary structure rearrangement is to create a remuneration system that is internally fair and externally competitive in which through restructuring, the new salary structure is expected to increase employee productivity and motivate employees to provide the best performance and build a culture of competing optimally for the achievement of the Company's performance. The reorganization of the salary structure also aims to increase the pension benefits of employees.

4. Increasing the composition of employees in the business work unit
In line with the main strategy of the HR division in 2018, the Company also strengthened the business team, in order to accelerate the achievement of corporate performance by:
a. Transferring employees from non-business units to business units, and
b. Providing training programs that support the strengthening of the business team

5. Risk Management Certification by the National Board of Professional Certification and Internal Assurance Expert Certification.
As a company which engaged in the financial industry, risk management is mandatory. Related to this, the Company has carried out Risk Management certification by the National Professional Certification Agency (BNSP) and Internal Assurance Expert certification for the employees to increase their awareness of risk, increase competence, and standardize employee competencies.

6. Improvement of policies regarding sanctions on the violation of Company provisions
The trust of the partners is very much determined by the Company's reputation and employee behavior. To maintain the trust of the work partners, the Company updates policies regarding sanctions for violating Company provisions with the aim of:

a. meningkatkan kepatuhan karyawan
b. mencegah terjadinya pelanggaran
c. media pembinaan karyawan
d. meningkatkan rasa keadilan *(fairness)*
e. menciptakan *engagement*
f. meningkatkan profesionalisme pengelolaan Perusahaan.

7. Pemberian penghargaan masa kerja
Peningkatan produktivitas juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman. Penghargaan masa kerja merupakan salah satu bentuk pengakuan Perusahaan atas kontribusi karyawan sehingga karyawan merasa nyaman karena adanya pengakuan oleh Perusahaan. Untuk itu Perusahaan memberikan penghargaan masa kerja dengan tujuan:
a. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi kepada Perusahaan
b. Meningkatkan motivasi karyawan agar terus memberikan kinerja terbaiknya kepada Perusahaan
c. Meningkatkan *engagement*/ keterlekatan karyawan kepada Perusahaan sehingga produktivitas karyawan dapat ditingkatkan secara efektif dan optimal

REKRUTMEN KARYAWAN

Perum Jamkrindo menyadari betapa pentingnya kualitas SDM bagi kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan Perusahaan. Karyawan yang andal hanya dapat dibentuk dari orang-orang yang mempunyai integritas, dedikasi, serta loyalitas yang baik. Perusahaan terus mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDM baik yang sudah berpengalaman maupun *fresh graduate* agar selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Perekrutan SDM dilingkungan Perum Jamkrindo dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan serta mengacu kepada standar kompetensi dengan memegang teguh Nilai-nilai Perusahaan.

Oleh karena itu, Perum Jamkrindo pada tahap awal perekrutan karyawan senantiasa berupaya untuk mencari dan menempatkan calon-calon karyawan dengan aspek kompetensi dan integritas yang terbaik, berkualitas, dan mumpuni sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam melayani masyarakat. Perum Jamkrindo tidak hanya menawarkan pekerjaan pada bidang keahlian yang dimiliki masing-masing karyawan maupun calon karyawan, namun juga kepastian jenjang karier bersama Perum Jamkrindo.

a. Improving employee compliance
b. Preventing violation
c. Employee coaching media
d. Increasing the sense of justice (fairness)
e. Creating engagement, and
f. Improving the professionalism of the management of the Company.

7. Awarding years of servic
Increased productivity is also influenced by a conducive, safe and comfortable work environment. The years of service award is one form of the Company's recognition of employee contributions so that employees feel comfortable because of the Company's recognition. For this reason, the Company awards work tenure with the aim of:

a. Giving awards to employees who have shown loyalty and dedication to the Company

b. Increasing employee motivation to continue to provide the best performance to the Company
c. Increasing employee engagement/adherence to the Company so that employee productivity can be increased effectively and optimally

EMPLOYEE RECRUITMENT

Perum Jamkrindo realizes the importance of the quality of HR is for the Company's operational, marketing and financial performance. Reliable employees can only be formed from people who have integrity, dedication, and good loyalty. The Company continues to balance the fulfillment of the needs of HR with both experienced and fresh graduates to be in line with the development and growth of the Company's business. HR Recruitment in Perum Jamkrindo environment is carried out by referring to projections of employee needs for the current year and referring to competency standards by upholding Company Values.

Therefore, in the early stages of hiring employees, Perum Jamkrindo always strives to find and distribute prospective employees with the best quality, competence, and integrity in accordance with the needs of the Company in serving the community. Perum Jamkrindo not only offers jobs in the areas of expertise owned by each employee and prospective employee but also the certainty of career paths with Perum Jamkrindo.

Sesuai kompetensi dan untuk menjaga independensi maka seleksi karyawan dilakukan melalui konsultan independen yang mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang rekrutmen karyawan.

Proses rekrutmen yang diselenggarakan Perum Jamkrindo senantiasa mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan berdasarkan kebutuhan, serta kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Perum Jamkrindo juga memberikan peluang seluas-luasnya bagi lulusan perguruan tinggi.

In accordance with competence and to maintain independence, employee selection is carried out through independent consultants who have competence and experience in the field of employee recruitment.

The recruitment process organized by Perum Jamkrindo always puts forward the principles of openness, fairness, and equality based on the needs, as well as the competencies possessed by prospective employees. Perum Jamkrindo also provides the widest opportunity for college graduates.



ASAS REKRUTMEN SDM
HR RECRUITMENT GUIDELINES



TERBUKA
OPENNESS



SELEKTIF
SELECTIVE



DAYA GUNA DAN HASIL GUNA
EFFECTIVE AND EFFICIENT



KEBUTUHAN
NEEDS

Ruang lingkup pengadaan karyawan meliputi:

a. Perencanaan
untuk memperoleh tenaga yang tepat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan termasuk merencanakan kebutuhan profesional dengan kompetensi khusus.
b. Pengumuman
untuk memberikan kesempatan bagi angkatan kerja untuk melamar pada Perusahaan.
c. Pelamaran
untuk menciptakan ketertiban dalam proses penerimaan karyawan.
d. Seleksi
untuk memilih dan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
e. Pengangkatan
untuk memberikan status karyawan dan atau jabatan tertentu dalam Perusahaan.

The scope of employee procurement includes:

a. Planning
To obtain the appropriate employees according to the needs of the Company, the recruitment must include planning professional needs with special competencies.
b. Announcement
To provide opportunities for the workforce to apply to the Company.
c. Application
To create order in the process of receiving employees.
d. Selection
To choose and acquire employees who are in accordance with the needs of the Company.
e. Appointment
To provide certain employee status and/or position within the Company.

Sumber pengadaan karyawan berasal dari dalam Perusahaan dan atau dari luar Perusahaan apabila dibutuhkan untuk pengisian format tertentu dan atau memerlukan keahlian/ keterampilan tertentu. Perusahaan dapat melakukan pengadaan/rekrutmen tenaga kerja berpengalaman/tenaga profesional untuk pengisian posisi tertentu dan/atau untuk kebutuhan keahlian/keterampilan tertentu berupa:

a. Karyawan/staf berpengalaman
   Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
b. Pejabat struktural/ fungsional
   Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menduduki jabatan struktural/fungsional.
c. Tenaga kerja profesional *(Prohire)*
   Tenaga Kontrak Waktu Tertentu yang direkrut berdasarkan pengalaman kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan pendampingan dan asistensi pada unit kerja terkait atau untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan/ atau dengan target tertentu dan jangka waktu tertentu.

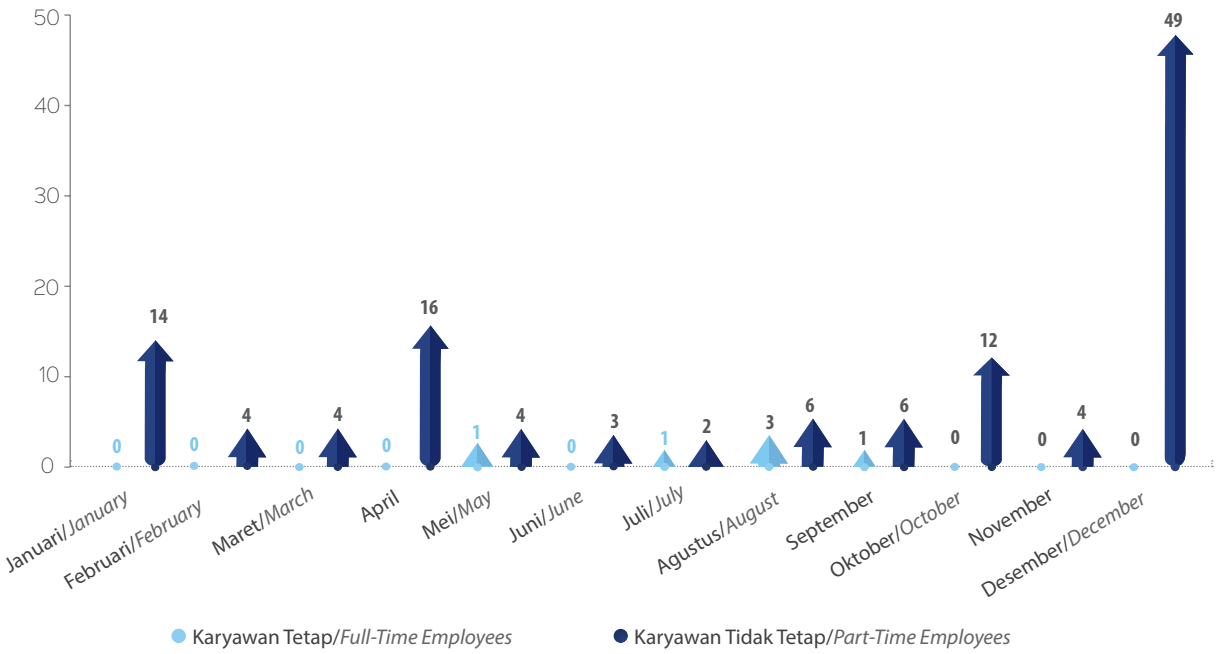
Berikut jumlah rekrutmen karyawan Perusahaan di sepanjang tahun 2018:

The sources of procurement of employees come from within the Company and/or, if needed, from outside the Company to fill in certain formats and/or require certain skills/capabilities. The company can conduct procurement/recruitment of experienced workforce/professional personnel to fill certain positions and/or for specific skills/capabilities in the form of:

a. Experienced employees/staff
   These appointment by the Company takes into account the employees work experience, work period, expertise and competencies according to the qualifications that are in accordance with the needs of the Company.

b. Structural/functional officials
   These appointment by the Company takes into account their work experience, years of service, expertise, and competencies according to qualifications that are in accordance with the needs of the company to occupy structural/functional positions.
c. Professional workforce (Prohire)
   These are Part-Time Contractors recruited based on their work experience, expertise, and competencies in accordance with the qualifications needed by the company to provide assistance and aids to the relevant work units or to carry out certain work and/or with specific targets and certain time periods.

The following is the total recruitment of Company employees throughout 2018:



Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan melakukan rekrutmen sebanyak 130 orang karyawan baru, yang terdiri dari 6 orang karyawan tetap dan 124 orang karyawan tidak tetap. Sementara itu, di sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak melakukan rekrutmen karyawan profesional untuk ditetapkan sebagai pejabat struktural yang memiliki pengalaman sesuai kebutuhan Perusahaan.

Throughout the year 2018, the Company recruited 130 new employees, consisting of 6 full-time employees and 124 part-time employees. In the same year, the Company did not recruit professional employees to be appointed as structural officials with experience in accordance to the needs of the Company.

Rekrutmen Pejabat Struktural (2017-2018)
Recruitment of Structural Officers (2017-2018)

Rekrutmen *Recruitment*	**2018**	**2017**
Pranata Utama *Main Institution's Officer*	0	0
Kepala Bagian *Section Head*	0	1
Pranata Madya *Middle Institution's Officer*	0	0
Kepala Seksi *Section Head*	0	4
Jumlah ***Total***	**0**	**5**

Selain hal tersebut, pada tahun 2018 Perusahaan juga melakukan rekrutmen tenaga kerja waktu tertentu profesional untuk melakukan pendampingan dan asistensi sebanyak 5 (lima) orang meningkat 150,00% dibanding tahun 2017 yang sebanyak 2 (dua) orang yang tersebar di beberapa unit kerja, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Perekrutan tenaga profesional tersebut diharapkan dapat membantu percepatan tercapainya program-program kerja Perusahaan serta *transfer knowledge* kepada karyawan tetap pada unit kerja tersebut.

In addition to this, in 2018 the Company also recruited 5 (five) professional part-time workers to provide assistance and aids. This is an increase of 150.00% compared to 2017 of 2 (two) people. These workers are distributed across several work units, as shown in the table below. The recruitment of these professionals is expected to help accelerate the achievement of the Company's work programs and the transfer of knowledge to full-time employees in the work unit.

Rekrutmen *Recruitment*	**2018**	**2017**
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Sekretaris Perusahaan *Part-Time Professional Contractors (KKWT) recruited to support the Corporate Secretary division*	2	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Satuan Pengawasan Intern *Part-Time Professional Contractors (KKWT) recruited to support the Internal Control Unit*	1	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi MSDM *Part-Time Professional Contractors (KKWT) recruited to support the HR Management Division*	1	0
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi Keuangan dan Investasi *Part-Time Professional Contractors (KKWT) recruited to support the Finance and Investment Division*	1	0
Jumlah ***Total***	**5**	**2**

PENGEMBANGAN KARIER

Untuk memastikan *Career Success Factor* (CSF) terpenuhi, maka Perusahaan melaksanakan kegiatan pengembangan karier yang sesuai dengan masing-masing faktor. Upaya ini dilakukan secara optimal agar dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara maksimal. Pengembangan karier dilakukan melalui kenaikan posisi jabatan seorang pegawai ke level yang lebih tinggi dengan program promosi. Program promosi ini dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang tepat guna mengisi jabatan pada level yang lebih tinggi sesuai dengan persyaratan secara tepat waktu.

Karyawan yang dinilai berdasarkan sistem penilaian kinerja dan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik, jujur dan dapat dipercaya serta berwibawa dapat diangkat untuk menduduki jabatan struktural apabila memenuhi syarat jabatan yang dimaksud. Sistem penilaian kinerja karyawan diadakan untuk menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan dan

CAREER DEVELOPMENT

To ensure that the Career Success Factor (CSF) is fulfilled, the Company carries out career development activities in accordance with each factor. This activity is carried out optimally to motivate the employees to work optimally. Career development is done by increasing the position of an employee to a higher level with a promotion program. This promotion program is conducted to get the appropriate candidates to fill the positions at a higher level in accordance with the requirements in a timely manner.

Employees who have been assessed based on a performance appraisal system and have demonstrated good, honest and trustworthy and authoritative work performance can be appointed to occupy structural positions if they fulfill the intended job requirements. An employee performance appraisal system is conducted to ensure objectivity in considering and establishing

menetapkan kenaikan pangkat, golongan gaji dan tingkat gaji serta pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu pada perusahaan.

Tahapan kegiatan pengembangan karier melalui kegiatan promosi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana jenjang karier karyawan berdasarkan:
   a. Kebijakan perusahaan tentang pengelolaan SDM.
   b. Peraturan-peraturan perusahaan yang terkait pengelolaan SDM.
   c. RKAP dan RJPP.
2. Memetakan seluruh formasi karyawan dan evaluasi karyawan berdasarkan:
   a. Formasi karyawan baru.
   b. Hasil penilaian kinerja pegawai.
3. Mengidentifikasikan formasi yang akan kosong berdasarkan:
   a. Hasil pemetaan formasi karyawan dan evaluasi karier karyawan.
   b. Identifikasi formasi yang akan kosong.
4. Melakukan rencana pengisian formasi melalui promosi dan menyusun persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut.
5. Mencari kandidat untuk dipromosikan berdasarkan:
   a. Data kualifikasi karyawan yang kompeten untuk menempatkan posisi yang kosong.
   b. Seleksi kualifikasi dan kompetensi awal untuk mendapatkan calon kandidat terbatas/*sort list candidate*.
   c. Rekomendasi atasan karyawan jika memiliki kandidat yang memenuhi kualifikasi yang menjadi syarat untuk posisi yang kosong.
6. Menetapkan kandidat yang tepat untuk posisi yang kosong melalui komite promosi.
7. Melakukan proses penggantian posisi karyawan sesuai mekanisme.

Pada tahun 2018, karyawan yang mendapatkan promosi tercatat sebanyak 75 orang atau turun 64,45% dibanding tahun 2017 yang sebanyak 211 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

promotions, salary and salary levels as well as appointments in certain structural positions in the company.

The stages of career development activities through promotions are as follows:

1. *Develop employee career path plans based on:*
   a. *Company policy regarding HR management.*
   b. *Company regulations related to HR management.*
   c. *RKAP and RJPP.*
2. *Map the entire employee formation and employee evaluation based on:*
   a. *Formation of new employees.*
   b. *Results of employee performance appraisal.*
3. *Identify formations which will be vacant based on:*
   a. *Results of employee formation mapping and employee career evaluation.*
   b. *Identify the formation that will be vacant.*
4. *Make a plan to fill out the formation through promotion and arrange the requirements needed for the position.*
5. *Look for candidates to be promoted based on:*
   a. *Data on qualifications of competent employees to fill in the vacant positions.*
   b. *Selection of initial qualifications and competencies to get the candidates/short-list the candidates.*
   c. *The recommendation of the employee's supervisor if there are candidates who meet the qualifications required for the vacant position.*
6. *Establish the status of the candidate for the vacant position through the promotion committee.*
7. *Process the replacement of employee positions according to the mechanism.*

In 2018, the number of employees who received promotion was recorded as many as 75 people, which is a decrease of 64.45% compared to 2017 of 211 people. The details can be seen in the table below:

Promosi Karyawan
Employee Promotions

Jabatan *Positions*	2018	2017
KaDiv/ Setingkat *Division Head/Equivalent*	1	4
KaKanwil *Head of Regional Office*	3	1
KaKanca Tipe A/ B/ C/ D *Head of Branch Office Type A/B/C/D*	13	20
KaBag Kanpus/ Cab Tipe A/ B *Department Head of Main/Branch Office's Type A/B*	29	53
KaUnit Kanca Tipe C/ D *Unit Head of Branch Office's Type C/D*	21	76
Kepala KUP *Head of Service Unit Office*	8	11
Kasie Pusat/ Wil/ Cab A/ B *Section Head of Main/Regional/Branch Office A/B*	0	28
Kasubsie Kanca Tipe C *Sub-Section Head of Branch Office Type C*	0	0
Kasubsie KUP *Sub-Section Head of Service Unit Office*	0	12
Pranata Utama *Main Institution's Officer*	0	3
Pranata Madya *Middle Institution's Officer*	1	3
Total	**76**	**211**

PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TALENTA SDM

Perum Jamkrindo mempunyai komitmen yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas karyawan sebagai salah satu kunci utama penentu keberlangsungan Perusahaan. Perum Jamkrindo aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi para karyawan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memungkinkan Perusahaan untuk tetap mengikuti perkembangan bisnis yang cukup dinamis. Salah satu sarana peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan karyawan. Berikut program pelatihan dan pendidikan karyawan yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2018 maupun tahun 2017.

HR TALENT EDUCATION AND DEVELOPMENT

Perum Jamkrindo has a high commitment to always improve the quality of employees as one of the key determinants of the sustainability of the Company. Perum Jamkrindo actively organizes various trainings for employees. The education and training allow the Company to keep abreast of fairly dynamic business developments. One means of improving quality is through employee training and education programs. The following are employee training and education programs conducted by the Company in 2018 and 2017.

Indikator *Indicator*	**2018**	**2017**	**Peningkatan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*
Jumlah karyawan yang disertakan mengikuti diklat *The number of employees included in the training and education programs*	12.250	1.618	657,11%
Realisasi Biaya pengembangan *Realization of Cost*	Rp19.244.903.668	Rp13.397.708.866	43,64%
Penugasan belajar (S2) Dalam Negeri atau Luar Negeri *Domestic or Foreign Study (Master Programs) Assignments*	0	2	-100,00%

Sepanjang tahun 2018, karyawan yang ikut pelatihan meningkat 657,11% jika dibandingkan tahun 2017, yang lebih disebabkan karena adanya pelatihan berbasis *online* melalui web *knowledge management* (ilmu.jamkrindo.co.id) dan *sharing knowledge*.

Program pelatihan dan pendidikan Perum Jamkrindo dijalankan dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial Perusahaan. Program pelatihan dan pendidikan tersebut disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berbasis Kompetensi
   Program pelatihan mengacu pada kebutuhan kompetensi sesuai *job description* masing-masing karyawan.
2. Berjenjang
   Program pelatihan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan kebutuhan/tuntutan tugas, tanggung jawab dan jabatan karyawan.
3. Berkelanjutan
   Program pelatihan dilakukan secara berkesinambungan baik dari segi materi (materi level terendah sampai level tertinggi) maupun dari segi kontinuitasnya.

Sedangkan jenis pelatihan yang diperuntukan kepada karyawan dibedakan dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Reguler
   Program pelatihan yang dirancang khusus untuk dilaksanakan secara rutin (tahunan) oleh Perusahaan. Dalam rangka program pelatihan reguler maka dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis pelatihan sebagai berikut:
   a. Pelatihan Prajabatan
      Pelatihan yang harus diikuti karyawan yang akan diangkat menjadi Calon Karyawan dan Karyawan Tetap atau yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan tertentu.

Throughout the year 2018, the number of employees participating in training increased by 657.11% compared to 2017. This was more due to online-based training through web knowledge management (Knowledge.jamkrindo.co.id) and knowledge sharing.

The training and education program of Perum Jamkrindo was carried out while taking into account the Company's financial capabilities. The training and education program was prepared with reference to the following principles:

1. *Competency-based*
   The training program refers to competency requirements according to the job description of each employee.
2. *Tiered*
   The training program was carried out in stages according to the level of needs/demands of the duties, responsibilities, and positions of the employees.
3. *Sustainable*
   The training program was carried out continuously both in terms of material (from the lowest to the highest level materials) and in terms of continuity.

The types of training intended for employees are divided into 2 (two) programs:

1. *Regular Training Program*
   This is a training program specifically designed to be carried out routinely (annually) by the Company. In the context of the regular training program, it is divided into 2 (two) types of training, they are:
   a. *Pre-service Training*
      This is a training that must be followed by employees who will be appointed as Prospective Employees and Permanent Employees or who will or have occupied a certain position level.

Materi pelatihan prajabatan terdiri dari:

i. Pelatihan pengetahuan Perusahaan
   Pelatihan-pelatihan tentang pengetahuan perusahaan yang diikuti oleh seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.
ii. Pelatihan perilaku
   Pelatihan-pelatihan yang bertujuan pembentukan untuk dan peningatan kualitas kepribadian, perilaku dan etika karyawan yang wajib diikuti seluruh karyawan sesuai tingkatan dan jabatan karyawan.
iii. Pelatihan manajerial
   Pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial dan kepmimpinan karyawan, serta ditujukan bagi karyawan yang akan atau telah menduduki suatu tingkat jabatan struktural.

b. Pelatihan Kompetensi Teknis
   Pelatihan yang harus diikuti karyawan agar mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai *job description* masing-masing.

2. Program Pelatihan Non-Reguler
   Program pelatihan di luar program yang tema dan pelaksanaannya bersifat insidentil sesuai kebutuhan Perusahaan. Materi pelatihan diberikan secara komprehensif meliputi semua aspek peningkatan kualitas, baik kualitas perilaku maupun keilmuannya.

Seluruh pelatihan dilakukan melalui lembaga pendidikan yang mempunyai kompetensi di bidang yang diperlukan maupun secara mandiri oleh para pejabat senior perusahaan untuk materi *"Corporate and Product Knowledge"* dan sebagai saran transfer pengetahuan ilmu penjaminan kredit dari pejabat yang telah mempunyai pengalaman di bidang tersebut kepada para staf sebagai generasi penerus perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas karyawan perusahaan juga telah menjalankan program pemberian beasiswa pendidikan ke jenjang S2 dengan program studi sesuai kebutuhan Perusahaan. Seleksi pemberian beasiswa tersebut dengan memperhatikan kinerja dan kontribusi karyawan.

The pre-service training material consists of:

i. Training on Company knowledge
   Training on company knowledge must be followed by all employees according to the level and position of employees.
ii. Behavioral training
   This training is aimed at establishing and strengthening the quality of personality, behavior, and ethics of employees. This training must be followed by all employees according to the level and position of employees.
iii. Managerial training
   This training is aimed at improving managerial skills and leadership of employees and is intended for employees who will or have occupied a structural level.

b. Technical Competence Training
   This is a training that must be followed by employees in order to have the technical competencies needed to carry out tasks according to their respective job descriptions.

2. Non-Regular Training Program
   These are training programs outside the predetermined program whose themes and implementation are incidental according to the needs of the Company. The training material is provided comprehensively covering all aspects of quality improvement, both in behavioral and scientific quality.

All training is carried out through educational institutions which have the competencies in the fields needed, or independently by senior company officials for "Corporate and Product Knowledge" material, and as a suggestion for transfer of knowledge of credit guarantee from officials who have experience in that field to staff as the next generation of the company.

To improve the quality of employees, the company has also conducted a program to provide educational scholarships to the level of Master in study programs which is in accordance with the needs of the Company. The selection of scholarship award is based on employee performance and contributions.

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Survei kepuasan karyawan dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan terhadap Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan merujuk pada sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaan dan Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan dan keterikatan karyawan menunjukkan sikap yang kontraproduktif terhadap pekerjaannya.

Dalam menilai program peningkatan tenaga kerja, maka Perum Jamkrindo membuat evaluasi indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan Perum Jamkrindo yang dinilai pada tahun 2017 dan tahun 2018. Program kepuasan karyawan dapat digambarkan sebagai program peningkatan kinerja *(performance improvement)* secara efektif, dalam hal ini adalah program yang menyesuaikan dengan kebutuhan para karyawan.

Survei kepuasan karyawan ini dilakukan di seluruh wilayah kerja Perum Jamkrindo dengan cara memberikan jawaban melalui kuesioner yang berjumlah 835 responden meliputi KKWT, Calon Karyawan, dan Karyawan Tetap.

Hasil dari survei kepuasan karyawan dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

The employee satisfaction survey is conducted to measure the extent of employee satisfaction and engagement with the Company. The level of satisfaction and attachment of employees refers to the general attitude of an employee to their work and the Company. A high level of satisfaction and attachment will show a positive attitude towards the work. Conversely, dissatisfaction and attachment of employees show a counterproductive attitude towards their work.

In assessing the workforce improvement program, Perum Jamkrindo creates an evaluation index of the employee satisfaction and engagement of Perum Jamkrindo employees which are assessed in 2017 and 2018. The employee satisfaction program can be described as an effective performance improvement program, in this case, the program which adjusts to the needs of the employees.

This employee satisfaction survey was carried out in all the working areas of Perum Jamkrindo by providing answers through questionnaires totaling 835 respondents that include Part-Time workers, Prospective Employees, and Full-Time Employees.

The results of the employee satisfaction survey through the use of employee satisfaction and employee engagement index are expected to be utilized by the Company to further improve its performance.

Uraian *Description*	**Kepuasan Karyawan** *Employee Satisfaction*		**Loyalitas** *Loyalty*	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**
Kantor Pusat *Main Office*	77,55	76,88	80,76	80,69
Wilayah I *Region I*	78,33	76,95	81,41	81,43
Wilayah II *Region II*	78,38	77,00	84,17	80,22
Wilayah III *Region III*	77,72	77,12	81,15	81,48
Wilayah IV *Region IV*	78,11	77,03	82,99	82,53

Uraian *Description*	Kepuasan Karyawan *Employee Satisfaction*		Loyalitas *Loyalty*	
	2018	2017	2018	2017
Wilayah V *Region V*	78,16	76,91	80,87	80,85
Wilayah VI *Region VI*	78,40	77,09	82,13	81,26
Wilayah VII *Region VII*	78,16	77,06	82,62	82,78
Wilayah VIII *Region VIII*	78,14	77,00	82,55	80,87
Wilayah IX *Region IX*	77,40	77,01	81,37	83,92
Nasional *National*	78,04	77,00	82,00	81,60

Berdasakan data tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Nasional indeks kepuasan karyawan Perum Jamkrindo yaitu:
   a. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,04. Tahun 2017 Indeks Kepuasan karyawan sebesar 77,00 dan di tahun 2018 naik menjadi 78,04.
   b. Indeks kepuasan tertinggi terdapat di wilayah VI Surabaya dengan skor 78,40 (kualifikasi Baik).
   c. Indeks kepuasan terendah terdapat di wilayah IX Makassar dengan skor 77,40 (kualifikasi Baik).
2. Secara Nasional indeks *engagement* karyawan Perum Jamkrindo yaitu:
   a. Tahun 2018 Indeks Kepuasan Karyawan sebesar 82,00 meningkat meningkat dari tahun 2017 sebesar 81,60.
   b. Indeks *engagement* tertinggi terdapat di wilayah II Palembang dengan skor 84,17 (kualifikasi BAIK).
   c. Indeks *engagement* terendah terdapat di wilayah Kantor Pusat dengan skor 80,76 (kualifikasi BAIK).

Based on the data above, the followings can be concluded:

1. *Nationally, Perum Jamkrindo employee satisfaction index:*
   a. *Increased when compared to the previous year by 1.04. In 2017 the Employee Satisfaction Index was 77.00 and in 2018 it rose to 78.04.*
   b. *The highest satisfaction index is in region VI Surabaya with a score of 78.40 (GOOD category).*
   c. *The lowest satisfaction index is in region IX Makassar with a score of 77.40 (GOOD category).*
2. *Nationally, the engagement index of Perum Jamkrindo's employees:*
   a. *Increased. In 2018 the Employee Satisfaction Index was 82.00. In 2017 it was at 81.60.*
   b. *The highest engagement index is in the region II Palembang with a score of 84.17 (GOOD category).*
   c. *The lowest engagement index is in the Head Office area with a score of 80.76 (GOOD category).*

PEMENUHAN HAK KARYAWAN

Salah satu bentuk upaya Perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai, dengan memberikan remunerasi bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik setiap tahunnya. Perum Jamkrindo menyadari bahwa tuntutan tugas dan tanggung jawab Perusahaan terus meningkat seiring peningkatan skala dan volume bisnis Perusahaan. Untuk itu seluruh karyawan dituntut untuk dapat bekerja secara intensif dan optimal sesuai kebutuhan perusahaan.

FULFILLMENT OF EMPLOYEE RIGHTS

One form of the Company's efforts to preserve the welfare of all employees is by providing remuneration for employees who have a good performance every year. Perum Jamkrindo realizes that the demands of the Company's duties and responsibilities continue to increase along with the increase in the scale and volume of the Company's business. For this reason, all employees are required to work intensively and optimally according to the needs of the company.

Sistem penggajian karyawan Perum Jamkrindo disusun dengan memperhatikan masa kerja, beban kerja, tanggung jawab, serta risiko tugas maupun jabatan masing-masing karyawan. Perum Jamkrindo telah menerapkan sistem pemberian insentif baik kepada karyawan maupun unit kerja sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan. Selain hal tersebut, Perum Jamkrindo juga memberikan benefit kepada karyawan berupa Jasa Produksi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kinerja tahunannya.

Berikut rincian pendapatan dan rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan Perum Jamkrindo:

1. Pendapatan karyawan Perum Jamkrindo terdiri dari :
   a. Gaji Pokok.
   b. Tunjangan kesejahteraan.
   c. Tunjangan Jabatan.
   d. Tunjangan Wilayah.
   e. Tunjangan Uang Makan.
   f. Tunjangan Komunikasi.
   g. Tunjangan Cuti Tahunan.
   h. Tunjangan Hari Raya.
2. Rasio Gaji (Upah) tertinggi dan terendah
   Berikut kami sampaikan Rasio Gaji (Upah) Tertinggi dan Terendah sebagai berikut:
   a. Rasio Gaji Karyawan Terendah dan Tertinggi = 1 : 8,1
   b. Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi = 1 : 1,1
   c. Rasio Honorarium Dewan Pengawas Terendah dan Tertinggi = 1 : 1,1
   d. Rasio Gaji Direksi Terendah dan Karyawan Tertinggi = 4,4 : 1

The employee salary system of Perum Jamkrindo is prepared by taking into account the years of service, workload, responsibility, and the risks of the duties and positions of each employee. Perum Jamkrindo has implemented a system of providing incentives to both employees and work units as a form of appreciation for employee performance. In addition to this, Perum Jamkrindo provides benefits to employees in the form of Production Services as a form of the Company's appreciation for their annual performance.

The following is the breakdown of income and the ratio of the highest and lowest salary of the employees of Perum Jamkrindo:

1. *Perum Jamkrindo's employee income consists of:*
   a. *Basic salary.*
   b. *Welfare benefits.*
   c. *Positional allowance.*
   d. *Regional Allowance.*
   e. *Food Allowance*
   f. *Communication Allowance.*
   g. *Annual Leave Allowance.*
   h. *Holiday allowance.*
2. *The highest and lowest salary ratio*
   The following is the Highest and Lowest Salary Ratios:
   a. *Lowest and Highest Employee Salary Ratio = 1: 8.1*
   b. *Lowest and Highest Directors Salary Ratio = 1: 1.1*
   c. *Lowest and Highest Supervisory Board Honorarium Ratio = 1: 1.1*
   d. *Lowest Directors Salary and Highest Employee Salary ratio = 4.4: 1*

Rasio Gaji 2018
Salary Ratio in 2018

Gaji *Salary*	**GG/TG**	**Gaji +** *Tunjangan Tetap* *Salary + Fixed Allowance*	**Jabatan** *Position*
Gaji Tertinggi 2018 *Highest Salary in 2018*	XI/23	Rp 33.927.450 *IDR33,927,450*	Kepala Divisi *Division Head*
Gaji Terendah 2018 *Lowest Salary in 2018*	II/6	Rp 5.274.817 *IDR5,274,817*	Pelaksana *Executor*

PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN

Disamping memberikan hak-hak remunerasi karyawan, Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik sekaligus sebagai stimulus dalam meningkatkan kinerja. Pada tahun 2018, Perusahaan memberikan *reward* dalam bentuk pemberian jasa produksi dan penghargaan masa kerja.

AWARD TO EMPLOYEES

In addition to providing the employee with their remuneration rights, the Company also rewards employees who have worked well. This also functions as a stimulus to improve performance. In 2018, the Company provides rewards in the form of providing production services and years of service awards.

JUMLAH KARYAWAN KELUAR *(TURNOVER)*

Rasio *employee turnover* dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja sebuah perusahaan. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Pada tahun 2018, jumlah karyawan yang keluar dari Perusahaan tercatat sebanyak 46 orang atau 4,59% dari jumlah keseluruhan karyawan, meningkat dibandingkan tahun 2017 dengan jumlah 27 orang atau 2,59% dari jumlah keseluruhan karyawan.

Data jumlah karyawan keluar *(turnover)* pada tahun 2018 dan 2017 terdiri dari pensiun normal, pensiun dini, mengundurkan diri, dan meninggal dunia.

THE NUMBER OF EMPLOYEES TURNOVER

The employee turnover ratio can show the productivity of a company's performance. In addition, the employee turnover rate is also a reflection of the Company's culture and work system which can be an indicator of the Company's success in creating a conducive work environment.

In 2018, the number of employees leaving the Company was 46 people or 4.59% of the total number of employees. This is an increase compared to 2017 of 27 people or 2.59% of the total number of employees.

The data on the number of employees turnover in 2018 and 2017 consists of data of normal retirement, early retirement, resignation, and death.

Tingkat *Turnover* Karyawan 2017-2018
Employee Turnover Rate 2017-2018

Uraian *Description*	2018		2017	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah *Total*	Persentase *Percentage*
Pensiun normal *Normal Retirement*	7	15,21%	5	18,52%
Pensiun dini *Early Retirement*	1	2,18%	0	0,00%
Mengundurkan diri *Resignation*	35	76,09%	22	81,48%
Meninggal dunia *Death*	3	6,52%	0	0,00%
Jumlah ***Total***	**46**	**100,00%**	**27**	**100,00%**

Tingkat *Turnover* Karyawan 2017-2018
Employee Turnover Rate 2017-2018

Uraian *Description*	2018		2017	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah *Total*	Persentase *Percentage*
Jumlah Karyawan *Total Number of Employee*	1.002		1.042	
Tingkat *Turnover* *Turnover Rate*	4,59%		2.59%	

ROTASI DAN MUTASI KARYAWAN

Mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja diberlakukan dengan maksud memberikan pengalaman menyeluruh kepada setiap karyawan tentang keseluruhan operasional dan bisnis yang dikembangkan Perusahaan. Melalui kebijakan mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja ini, karyawan dapat mengenal prosedur, sistem, kebijakan, hingga kegiatan sehari-hari dan visi yang ingin dicapai Perusahaan.

Mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja ini dapat diadakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Perusahaan dan pembinaan pegawai, termasuk di dalamnya perencanaan karier. Kewenangan mutasi dan penempatan karyawan dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Kantor Pusat
   a. Mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern Direktorat dapat dilakukan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Divisi yang membidangi SDM.
   b. Mutasi dan penempatan karyawan antar Direktorat dapat diusulkan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Direktur yang membidangi SDM.
2. Kantor Cabang
   a. Untuk mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern kantor cabang ditetapkan oleh Kepala Kantor Cabang dengan memperhatikan kompetensi masing-masing karyawan dan kebutuhan Kantor Cabang.
   b. Khusus untuk penempatan karyawan sebagai kasir agar segera dibuat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Cabang setempat.

EMPLOYEE ROTATION AND MUTATION

Position mutations and/or mutations of work units are implemented with the intention of providing a thorough experience to each employee about the overall operations and business developed by the Company. Through the policy of transfer of position and/or mutation of the work unit, employees can recognize the position's procedures, systems, policies, and daily activities, as well as the vision that the Company wants to achieve.

Position mutations and/or mutations of the work unit can be held for the benefit of implementing the Company's duties and fostering employees, including career planning. The authority for transfer and distribution of employees is divided into 2 (two):

1. *Head Office*
   a. *Mutations and distribution of employees in the internal directorate can be carried out by the Head of Division/ equivalent accompanied by a proposal to the Division in charge of HR.*
   b. *Mutation and distribution of employees between directorates can be proposed by the Head of Division/ equivalent to the Director in charge of HR.*
2. *Branch Office*
   a. *The transfer and distribution of employees in the internal branch office are determined by the Head of the Branch Office by paying attention to the competencies of each employee and the needs of the Branch Office.*
   b. *For the placement of employees as cashiers, a Task Order is immediately made to be signed by the local Branch Head.*

Sebagian besar rotasi dan mutasi karyawan dilakukan dalam rangka memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap Karyawan yang bersangkutan pada jabatan yang lebih tinggi. Ketentuan terkait rotasi dan mutasi karyawan untuk promosi ditetapkan sesuai dengan ketentuan promosi Perusahaan sesuai hasil komite promosi.

Most rotations and mutations of employees are carried out in order to assign duties and responsibilities to the employees concerned in higher positions. Provisions related to employee rotation and transfer for promotions are determined in accordance with the Company's promotional conditions according to the results of the promotion committee.

Selama tahun 2018 tingkat rotasi dan mutasi karyawan tercatat sebesar 16,17% dibandingkan jumlah keseluruhan karyawan.

In 2018, the rate of rotation and mutation of employees was 16.17% compared to the total number of employees.

Karyawan Mutasi/Rotasi *Employee Rotation/Mutation*	**2018**	**2017**
Januari *January*	0	4
Februari *February*	0	8
Maret *March*	20	49
April	0	0
Mei *May*	0	0
Juni *June*	0	0
Juli *Juli*	41	29
Agustus *August*	22	20
September	0	11
Oktober *October*	56	25
November	0	0
Desember *December*	23	0
Jumlah *Total*	**162**	**146**

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

Sejak tahun 2018, sesuai Surat Edaran No. 14/SE/4/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Penerapan KPI Individu sebagai Dasar Penilaian Kinerja Karyawan, maka terhitung mulai tahun 2018 penilaian kinerja karyawan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *balanced scorecard*. Penilaian

According to Circular Letter No. 14 / SE / 4 / III / 2018 dated March 29, 2018, concerning Guidelines for the Implementation of Individual KPIs as the basis for Employee Performance Evaluation, starting from 2018 employee performance appraisal uses a balanced scorecard based Key Performance Indicator

kinerja merupakan bagian dari pengembangan talenta bagi karyawan, di mana setiap karyawan akan mendapatkan evaluasi atas kinerja dari setiap individu.

Penilaian atas kinerja karyawan dilakukan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) Individu pola *Balance Scorecard* dengan 4 (empat) perspektif penilaian:

1. *Financial*
2. *Customer*
3. *Internal Business Process*
4. *People Development*

Tahap pelaksanaan penilaian kineja berdasarkan KPI Individu yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan target *(goals setting)* masing-masing komponen KPI Individu.
2. Penetapan target individu dilakukan dengan cara *one on one* (diskusi tatap muka) antara atasan dan karyawan yang bersangkutan, di mana atasan memberikan *coaching* dan mentoring kepada yang bersangkutan.
3. Penandatanganan KPI Individu oleh atasan langsung, atasan tidak langsung dan karyawan yang bersangkutan.
4. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan agar target kerja yang menjadi KPI Individu dapat tercapai maka perlu dilakukan *Performance Review* setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Pada akhir tahun dilakukan penilaian akhir kinerja *(Performance Appraisal)* KPI Individu. Penilaian dilakukan menggunakan 2 (dua) variabel sebagai berikut:
   a. Pencapaian KPI Individu dengan bobot sebesar 90 %.
   b. Budaya kerja dalam bentuk perilaku dengan bobot sebesar 10%.
6. Penilaian kinerja tersebut akan dilakukan pemeringkatan *(Performance Level)* pada setiap masing-masing tingkat jabatan yang sama.

Berdasarkan penilaian tersebut, Perusahaan dapat menggunkannya sebagai dasar kebijakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan perhitungan dan pembayaran jasa produksi karyawan.
2. Kebijakan *coaching* dan mentoring untuk meningkatkan produktifitas karyawan.
3. Kebijakan pengembangan karyawan
4. Kebijakan *talent management* dan *career planning* karyawan.

Pada tahun 2018, Perusahaan telah menggunakan hasil penilaian kinerja berdasarkan KPI Individu sebagai dasar untuk perhitungan pembayaran jasa produksi tahun buku 2018.

(KPI). Performance assessment is a part of talent development for employees, in which each employee will get an evaluation of the performance of each individual.

Assessment of employee performance is carried out using the Individual Key Performance Indicator (KPI) Balance Scorecard pattern with 4 (four) valuation perspectives:

1. *Financial*
2. *Customer*
3. *Internal Business Process*
4. *People Development*

The implementation stage of the performance assessment is based on the Individual KPI:

1. *Target setting for each individual KPI component.*
2. *Establishment of individual targets is done by means of one on one (face-to-face discussion) between the supervisor and the employee concerned, in which the superior provides coaching and mentoring to those concerned.*
3. *Signing of individual KPIs by direct supervisors, indirect supervisors, and relevant employees.*
4. *Performance Review was conducted every 3 (three) months to evaluate the implementation of the work so that the work targets that become individual KPIs can be achieved.*
5. *At the end of the year, a final performance assessment (Performance Appraisal) of Individual KPI is conducted. Assessment is carried out using the following 2 (two) variables:*
   a. *The achievement of Individual KPI with a value of 90%.*
   b. *Work culture in the form of behavior with a value of 10%.*
6. *The performance assessment will be carried out with a ranking (Performance Level) at each level of the same position.*

Based on the assessment, the Company can use it as a policy basis for the following matters:

1. *Calculation and payment of employee production services policy.*
2. *Coaching and mentoring policies to increase employee productivity.*
3. *Employee development policy*
4. *Talent management and career planning policies of employees.*

In 2018, the Company has used the results of performance appraisal based on the Individual KPI as the basis for calculating the payment of production services for the 2018 financial year.

Perkembangan Pengelolaan SDM ke Depan

Dalam rangka menjawab tantangan ke depan, Perusahaan akan melakukan pengelolaan SDM dengan mengedepankan pengelolaan yang profesional dan sesuai *best practise* yang ada, misalnya dengan memaksimalkan *Performance Management System*, Tata Ulang Sistem Remunerasi, Penerapan KPI Individu dan Internalisasi Budaya Perusahaan. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM Jamkrindo menjadi isu utama, hal ini guna menjadikan SDM Jamkrindo sebagai ahli di bidang penjaminan yang meguasai proses bisnis penjaminan, data *analytic* terkait UMK dan *behavioural analysis* UMKM.

Future Development of HR Management

To respond to the challenges ahead, the Company will conduct HR management by prioritizing professional management and in accordance with existing best practices, for example by maximizing the Performance Management System, Regulating the Remuneration System, Implementing the Individual KPI and Internalizing Corporate Culture. In addition, the improvement of Jamkrindo's HR competency is a major issue; this is to make Jamkrindo's HR as an expert in the field of guarantee that controls the guarantee business process, MSE-related analytical data and behavioral analysis of MSMEs.



PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY



Perkembangan kebutuhan bisnis dan organisasi mengharuskan Perusahaan untuk menata dan membenahi diri dalam menyiapkan teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung pengembangan dan perluasan bisnis, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan melalui layanan berbasis teknologi informasi. Dalam era globalisasi, keandalan teknologi informasi merupakan salah satu unsur penting yang mendukung proses bisnis dan layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perusahaan menyediakan produk dan jasa kepada para pemangku kepentingan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usaha ke depannya.

The development of business and organizational needs requires the Company to organize and improve itself in preparing the technology needed to be able to support the development and expansion of business, as well as providing the best service to stakeholders through information technology-based services. In the era of globalization, the reliability of information technology is one of the important elements that support business processes and excellent service. Technology is the main key that enables the Company to provide products and services to stakeholders, measure and track business performance, and make appropriate management decisions for the continuity of the business.

VISI DAN MISI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PERUM JAMKRINDO

Visi

Menjadi *Key Success Factor* bagi transformasi Perusahaan menuju Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

Misi

1. Menyediakan Solusi Bisnis yang terintegrasi, efisien dan efektif untuk mendukung transformasi Perusahaan.
2. Menyediakan infrastruktur TI yang aman dan andal sesuai dengan perkembangan bisnis.
3. Meningkatkan kematangan atau kapabilitas IT *Governance* sesuai dengan kebutuhan kepatuhan regulasi dan pemenangan persaingan.

PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perusahaan, khususnya dukungan dalam penyediaan aplikasi perangkat lunak kegiatan operasional penjaminan kredit, maka pada tahun 2018 Perusahaan mengembangkan program strategis dengan tema "Mempertahankan dan Memantapkan Akselerasi Pertumbuhan". Untuk itu Perusahaan telah melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Integrasi Online dengan Mitra Bisnis
   Sejak tahun 2013, Perusahaan bekerja sama dengan mitra bank maupun non-bank untuk melaksanakan kerja sama *Digital Channeling* dan terus berkembang, baik dalam segi jumlah mitra maupun jumlah produk *Online*. Pada tahun 2018 ini, kerja sama *Digital Channeling* semakin dikembangkan hingga modul subrogasi *online*. Adapun mitra yang telah berkerja sama hingga subrogasi *online* adalah Bank BRI dan Bank BNI.

   Dengan adanya integrasi penjaminan *Online* dengan mitra bisnis, maka risiko kesalahan data penjaminan bisa direduksi karena tidak ada lagi proses *re-entry* data di sisi Jamkrindo. Selain itu, proses penerbitan sertifikat penjaminanan menjadi lebih cepat karena data langsung

VISION AND MISSION OF PERUM JAMKRINDO'S INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION

Vision

To become a Key Success Factor for the transformation of the Company towards the Leading Guarantee Company which Supports National Economic Development.

Mission

1. *To provide integrated, efficient and effective business solutions to support the Company's transformation.*
2. *To provide a safe and reliable IT infrastructure in accordance with business developments.*
3. *To increase the maturity or capability of IT Governance in accordance with the requirements of regulatory compliance and winning competition.*

THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS IN PERUM JAMKRINDO

To support the Company's business activities, particularly in supporting the provision of credit guarantee operational activities software applications, the Company developed a strategic program in 2018 with the theme "Maintaining and Strengthening Growth Acceleration". For this reason, the Company has carried out the following steps:

1. *Online Integration with Business Partners*
   Since 2013, the Company has collaborated with bank and non-bank partners to carry out Digital Channeling cooperation, and it continues to grow, both in terms of the number of partners and the number of products online. In 2018, Digital Channeling cooperation is increasingly being developed until online subrogation modules. The partners who have collaborated until online subrogation are BRI and BNI.

   With the integration of Online guarantee with business partners, the risk of data guarantee errors can be reduced because there is no data re-entry process on the Jamkrindo side. In addition, the process of issuing guarantee certificates is faster because the data is directly received by the system.

diterima oleh sistem. Kemudahan ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan kepuasan pelanggan dalam melakukan kerja sama dengan Perum Jamkrindo.

2. Pengembangan *E-Procurement*
Perusahaan mengembangkan sistem Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik yang dapat diakses secara internal dan eksternal. Sistem Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, efektifiktas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi pengadaan yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo. Sehingga dengan adanya sistem ini maka biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Konsep *paperless* ini juga sangat mendukung terhadap tema *Eco Green* yang berdampak positif terhadap konservasi alam.

3. Pengembangan HRIS
Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Perum Jamkrindo merupakan salah satu aset perusahaan yang berperan penting dalam mendukung target Perusahaan, oleh karena itu maka sumber daya ini harus dipelihara, didayagunakan, dan dikembangkan. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara optimal dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan. Untuk itu Perusahaan mengembangkan sistem Aplikasi *Human Resource Information System* (HRIS). Dengan adanya sistem aplikasi tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya Manusia Perum Jamkrindo dalam bekerja, baik dari segi waktu, biaya dan pengambilan keputusan. Di tahun 2018, fokus utama pengembangan Sistem HRIS adalah modul *Payroll*.

4. Pengembangan *Mobile App Surety*
Perkembangan bisnis, khususnya di Indonesia telah memasuki era digitalisasi di mana banyak industri melakukan efisiensi dengan lebih mengembangkan teknologi informasi, menjangkau produktifitas tinggi serta melakukan percepatan layanan/*Service Level Agreement*. Secara spesifik, industri keuangan terutama perbankan, sudah menerapkan prinsip efisiensi melalui *branchless, paperless* dan *customer based*. Di mana seluruh transaksinya tidak lagi membutuhkan kantor-kantor cabang yang akan menggerus biaya operasional mereka, melainkan justru mengembangkan beragam aplikasi yang mendukung transaksi elektronik dengan prinsip *customer based*.

This convenience is expected to have a positive impact on increasing customer satisfaction in collaborating with Perum Jamkrindo.

2. *Development of E-Procurement*
The company develops Electronic Goods and Services Procurement systems that can be accessed internally and externally. This Application System is expected to improve performance, effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of procurement transactions conducted by Perum Jamkrindo. With this system, operational costs can be significantly reduced because there is no need to submit physical documents and administrative processes that are time-consuming and costly. This paperless concept is also very supportive of the Eco Green theme which has a positive impact on nature conservation.

3. *HRIS Development*
Human Resources (HR) for Perum Jamkrindo is one of the company's assets that plays an important role in supporting the company's target. Therefore, these resources must be maintained, utilized, and developed. HR management must be carried out optimally in order to achieve the company's vision and mission. For this reason, the Company has developed a Human Resource Information System (HRIS) Application system. With the application system, it is expected to be able to improve the quality and efficiency of the management of Human Resources in the work activities of Perum Jamkrindo, be it in terms of time, cost and decision making. In 2018, the main focus of the development of the HRIS System is the Payroll module.

4. *Mobile App Surety Development*
Business developments, especially in Indonesia, have entered the digitalization era in which many industries have strived for efficiency by further developing information technology, reaching high productivity as well as accelerating service/ Service Level Agreement. Specifically, in the financial industry, especially in banking, there has been an implementation of the principle of efficiency through branchless, paperless and customer base. The entire transaction no longer requires branch offices (which subsequently will erode their operational costs), instead, they develop various applications that support electronic transactions with the customer based principle.

Jamkrindo yang juga memiliki peran dalam industri keuangan tentu harus dapat bersaing dalam era digitalisasi tersebut. Salah satu *tools* yang dapat membawa Jamkrindo masuk ke dalam era digitalalisasi tersebut yaitu *Mobile App Surety*, di mana Terjamin dapat mengakses penjaminan Jamkrindo kapanpun, di manapun dan oleh siapapun. *Mobile App Surety* dapat mengakomodir permohonan penerbitan sertifikat penjaminan melalui aplikasi secara *paperless* dan efisien sehingga diharapkan membawa kemudahan dan kepuasan atas penggunaan layanan penjaminan.

Jamkrindo, which also has a role in the financial industry, must certainly be able to compete in the digitalization era. One of the tools that can bring Jamkrindo into the digitalization era is the Surety Mobile App. In which, access to Jamkrindo guarantees service is guaranteed whenever, wherever and by anyone. Mobile App Surety can accommodate requests for issuing guarantee certificates through applications in a paperless and efficient manner so that it is expected to bring convenience and satisfaction to the use of guarantee services.

5. *Enhancement e-Office*
   Bahwa dalam rangka kepatuhan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka Perum Jamkrindo melakukan Implementasi *Grand Design* Reformasi 2010-2025 dalam bentuk sistem aplikasi *e-Office* (SnapJam). Dengan adanya *e-Office* (SnapJam) ini maka diharapkan dapat meminimalisir penggunaan kertas, mempercepat kerja dan sirkulasi aktivitas persuratan, serta mempermudah koordinasi antar unit kerja sehingga budaya koordinasi dan elaborasi semakin tumbuh dan berkembang.

5. *e-Office Enhancement*
   To comply with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of 2010-2025 Bureaucratic Reform, Perum Jamkrindo implements the Grand Design Reform 2010-2025 in the form of an e-Office application system (SnapJam). With the existence of e-Office (SnapJam), it is expected to minimize paper use, speed up work and circulation of correspondence activities, and facilitate coordination between work units so that a culture of coordination and elaboration grows and develops.

6. Pembaharuan *website* Perusahaan
   Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan OJK nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan pada Bab XII tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi pasal 45. Dalam POJK tersebut disebutkan bahwa lembaga penjaminan wajib memiliki situs web. Sebelumnya Perum Jamkrindo telah memiki sistem *website* sesuai dengan peraturan tersebut. Selaras dengan hal tersebut maka *website* Jamkrindo telah dilakukan Pembaharuan secara berkesinambungan sehigga dapat lebih memberikan informasi, edukatif, dan komunikatif.

6. *Updates to the Company's website*
   As a form of compliance with the Financial Service Authority (OJK) regulations number 2 / POJK.05 / 2017 concerning the Implementation of the Guarantee Institution Business in Chapter XII concerning the Utilization of Information Technology article 45, It is stated that the guarantee institution must have a website. Previously, Perum Jamkrindo had a website system in accordance with these regulations. In line with this, the Jamkrindo website has been continuously updated so that it can provide more information, be more educative and communicative.

7. Implementasi *Call Center*
   Sebagai Salah satu Perusahaan BUMN yang terus tumbuh dan berkembang, Perum Jamkrindo dituntut untuk menciptakan dan mewujudkan optimalisasi pelayanan terhadap mitra. Kepuasan mitra merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Berkaitan dengan kepuasan mitra, maka Perusahaan memerlukan suatu media pelayanan yaitu *Call Center* di mana media ini berfungsi sebagai salah satu jalur/media komunikasi antara mitra dengan Perusahan melalui telepon. Dengan

7. *Implementation of the Call Center*
   As one of the BUMN companies that continue to grow and develop, Perum Jamkrindo is required to create and realize service optimization for partners. Partner satisfaction is the main factor that must be considered. Regarding partner satisfaction, the Company requires a service medium, namely the Call Center in which this media functions as one of the channels/media of communication between partners and companies by telephone. By utilizing the Call Center, it is the first step in implementing Excellent Service with the aim

memanfaatkan *Call Center* maka merupakan langkah awal penerapan *Service Excellent* dengan tujuan menjadi sarana layanan yang komunikatif, efektif, informatif, edukatif, dan interaktif bagi pihak eksternal Perusahaan.

8. Persiapan ISO:27001:2013
Bahwa dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan Menteri Kominfo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, bahwa setiap instansi yang memiliki sistem elektronik berkategori tinggi dan strategis wajib memiliki sertifikat manajemen pengamanan informasi (ISO27001:2013). Atas hal tersebut Perum Jamkrindo melakukan persiapan untuk proses sertifikasi di tahun 2019. Imlementasi SMKI yang optimal sesuai dengan standar ISO 27001:2013 akan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan proses bisnis secara menyeluruh. Untuk itu Perum Jamkrindo telah menerapkan kebijakan dan prosedur terkini SMKI berdasarkan standar ISO27001:2013 serta melaksanakan penerapan dengan lingkup proses pengelolaan pemantau layanan aplikasi penjaminan yang merupakan bisnis inti perusahaan.

9. Implementasi Ruang Server
Seiiring dengan telah berjalannya proses sentralisasi aplikasi operasional dan akuntansi Perum Jamkrindo, maka dibutuhkan layanan dukungan infrastruktur yang memadai dan andal. Selain itu kebutuhan akan standar keamanan data bersifat dinamis dan berdaya akses mudah juga mutlak dibutuhkan. Menyadari akan hal tersebut, maka layanan pendukung ruang server yang memiliki tingkat kapasitas dan kapabilitas yang cukup sehingga mampu mengakomodir kebutuhan penerapan layanan tersebut. Selain itu dengan adanya ruang server ini maka diharapkan dapat memberikan sistem pemantauan secara terpadu guna mendukung kegiatan bisnis perusahaan.

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Di sepanjang tahun 2018 Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp20,973 miliar, sedikit turun 0,15% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp21,005 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan karena adanya efisiensi biaya TI.

of being a communicative, effective, informative, educative, and interactive service facility for external parties of the Company.

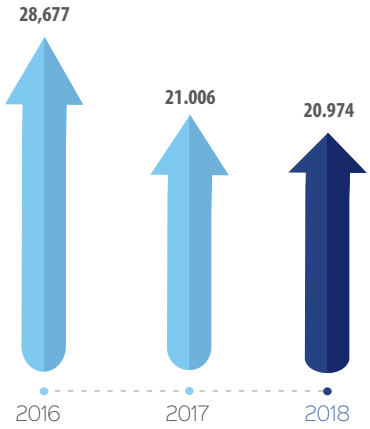
8. *ISO: 27001: 2013 preparation*
In the framework of compliance with the regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 4 of 2016 concerning Information Security Management System, every agency that has a high-category and strategic electronic system must have an information security management certificate (ISO27001: 2013). For this reason, Perum Jamkrindo has made preparation for the certification process in 2019. Optimal implementation of the ISMS in accordance with ISO 27001: 2013 standards will be able to contribute to supporting the successful implementation of overall business processes. For this reason, Perum Jamkrindo has implemented the latest ISMS policies and procedures based on the ISO27001: 2013 standard and has implemented the scope of the guarantee application service monitoring process scope which is the company's core business.

9. *Implementation of Server Space*
Along with the ongoing process of centralizing operational applications and accounting for Perum Jamkrindo, there is a need for adequate and reliable infrastructure support services. In addition, the need for dynamic data security standards which is empowered with easy access is absolutely necessary. Realizing this, the server room support services have sufficient capacity and capability so that they are able to accommodate the needs of implementing these services. This addition of this server room is expected to provide an integrated monitoring system to support the company's business activities.

INVESTMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY

Throughout the year 2018, the Company spent IDR20.973 billion on IT. This was a slight decrease of 0.15% from the previous year amount of IDR21.005 billion. This decrease was more due to IT cost efficiency.

Perbandingan Biaya Investasi Teknologi Informasi 2016-2018 (dalam jutaan Rupiah)
Comparison of Information Technology Investment Costs 2016 - 2018 (In million Rupiah)



Roadmap dan Proyeksi Pengembangan TI ke Depan
Roadmap and Projections for Future TI Development

Tahun *Year*	Tema *Theme*	Arahan Strategis *Strategic Guidelines*		
		Sistem Informasi *Information System*	**Infrastruktur** *Infrastructure*	**Tata Kelola** *Governance*
2019 2020	*Integrated Fundamental Services*	Penyelesaian backlog layanan prioritas untuk mendukung proses bisnis utama Penyelesaian backlog layanan prioritas untuk mendukung proses bisnis pendukung Pengembangan Tahap I untuk mendukung layanan terkait model bisnis baru Jamkrindo Layanan Descriptive & Dignostic Analytics pada proses bisnis kritikal *Completion of priority service backlogs to support key business processes* *Completion of priority service backlogs to support supporting business processes* *Development of Phase I to support services related to Jamkrindo's new business model* *Descriptive & Diagnostic Analytics services in critical business processes*	Adopsi teknologi DC/DRC yang dapat mengantisipasi perkembangan kapasitas layanan SME ke depan Penyelesaian implementasi arsitektur jaringan untuk penguatan akses dan menghilangkan single point of failure Penyelesaian arsitektur keamanan prioritas *Adoption of DC / DRC technology that can anticipate the development of SME service capacity* *Completion of network architecture implementation to strengthen access and eliminate single point of failure* *Completion of priority security architecture*	Penyesuaian organisasi dan tata aturan TI. Penguatan kapabilitas SDM TI Kepatuhan atas Permen BUMN terkait Tata Kelola TI Sertifikasi manajemen keamanan informasi Implementasi Tahap I Tata Kelola Data untuk resolusi isu-isu data prioritas *Adjustment of IT organization and rules.* *Strengthening the capabilities of IT HR* *Compliance with Minister of SOE Regulation related to IT Governance* *Information security management certification* *Phase I Implementation Data Management for resolution of priority data issues*

Roadmap dan Proyeksi Pengembangan TI ke Depan
Roadmap and Projections for Future TI Development

Tahun *Year*	Tema *Theme*	Arahan Strategis *Strategic Guidelines*		
		Sistem Informasi *Information System*	**Infrastruktur** *Infrastructure*	**Tata Kelola** *Governance*
2021 2022	*Strengthening services for business growth & profitability*	Pengembangan Tahap II untuk mendukung layanan terkait model bisnis baru Pengembangan dan Piloting layanan terintegrasi SME Financial Accessibility Layanan Predictive Analytics pada proses bisnis utama dan pendukung *Development Phase II to support services related to new business models* *Development and piloting of integrated SME Financial Accessibility services* *Predictive Analytics services on key business processes and supporters*	Penguatan arsitektur keamanan yang memungkinkan surveillance atas potensi risiko keamanan Penyesuaian kapasitas infrastruktur DC/DRC sesuai perkembangan jaringan dan layanan Penyesuaian kapasitas jaringan *Strengthening the security architecture that allows surveillance of potential security risks* *Adjusting the capacity of DC / DRC infrastructure according to network and service developments* *Adjusting network capacity*	Sertifikasi global SDM TI Implementasi Tahap II Tata Kelola Data untuk mendukung model bisnis baru Sertifikasi terkait manajemen layanan TI *Global IT HR Certification* *Phase II Implementation of Data Management to support new business models* *Certification related to IT service management*
2023	*Strengtheing SME Financial Accessibility Services*	Rollout layanan terintegrasi SME Financial Accessbility Perluasan Layanan Predictive & Prescriptive Analytics pada proses bisnis utama *Rollout of SME Financial Accessibility integrated services* *Expansion of Predictive & Prescriptive Analytics Services in key business processes*	Penyesuaian kapasitas infrastruktur sesuai pertumbuhan jaringan dan SME *Adjustment of infrastructure capacity according to network growth and SME*	Rollout manajemen layanan dan keamanan pada seluruh layanan TI *Service management and security rollout on all IT services*

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



Laporan Tahunan
Annual Report **2018**

TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komitmen Perum Jamkrindo untuk terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG ditunjukkan melalui tren peningkatan skor assessment GCG yang terus meningkat setiap tahunnya.

The commitment of Perum Jamkrindo to continually improve the implementation of GCG principles is shown through the increasing trend of GCG assessment scores that continue to increase every year.

PRINSIP UMUM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GENERAL PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE



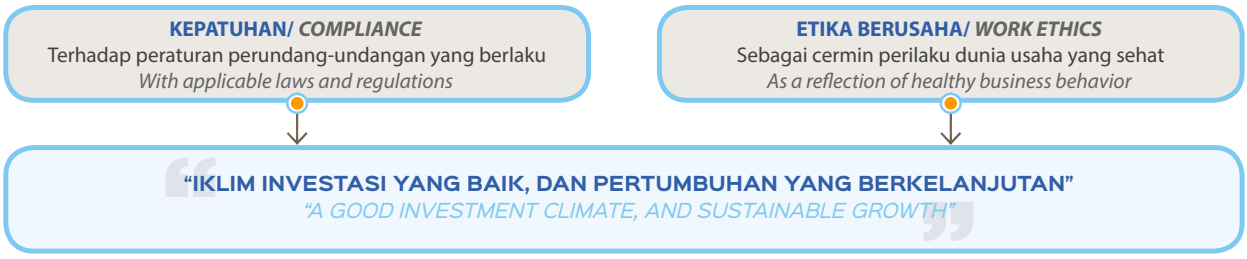
Berkembangnya dunia usaha dari masa ke masa membuat reputasi sebuah perusahaan tidak lagi hanya dipandang dari segi finansial, melainkan juga dari segi non-finansial, mencakup etika bisnis dan bentuk komitmen serta pertanggung jawaban sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya kepada publik secara luas.

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan dunia usaha di seluruh dunia, termasuk Indonesia. GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

The development of the business world from time to time makes the reputation of a company no longer only viewed from a financial perspective, but also from a non-financial perspective, including business ethics and a form of commitment and accountability of a company in conducting its business activities to the public at large.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices has become a necessity for businesses throughout the world, including Indonesia. GCG is the principles that underlie the process and mechanism of corporate management based on compliance with laws and regulations and a reflection of an ethical business world. In the concept of sustainable development, GCG is one of the main pillars expected to form the foundation of a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing a company's sustainable performance in the future.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Approach



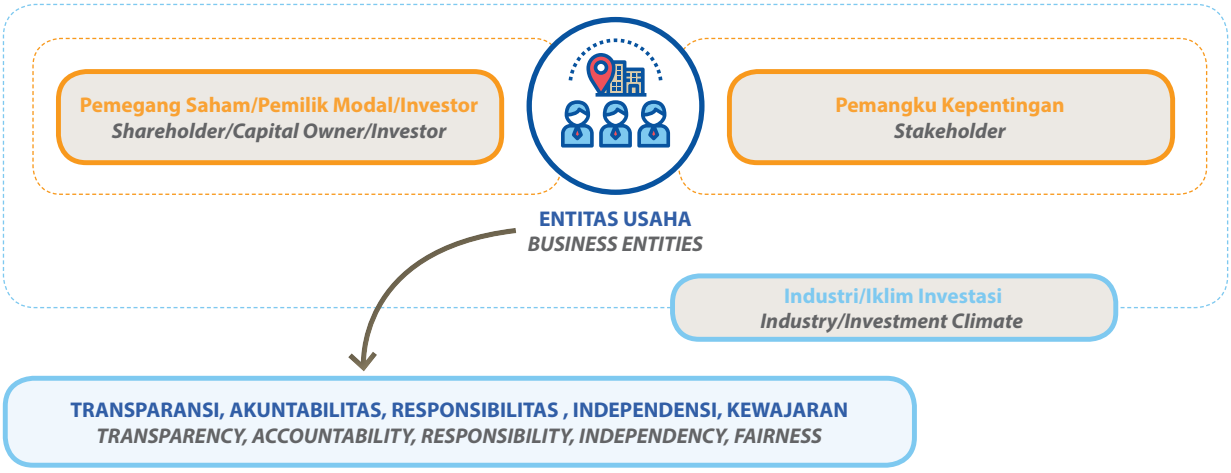
Regulator bersama-sama dengan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan pemangku kepentingan. Melalui hubungan yang harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha yang menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, dan justru mampu berkontribusi bagi dimensi sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Together with various parties who pay attention to the development of GCG in Indonesia, the Regulators provide a strong affirmation of the importance of a harmonious relationship between business entities and stakeholders. Through this harmonious relationship, it is hoped that a business world, devoid of ways to create temporary profits, will be formed and will actually be able to contribute to the social dimension and the surrounding environment.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam peLaporan Keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkungan Perusahaan, evaluasi secara berkala dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

In line with the development of the business world, GCG principles have also experienced developments that include a system of supervision and control that supports work ethics and responsible decision making, supports integrity in financial reporting, appropriate risk management, and ethical and stakeholder relations. Within the Company, regular evaluations are carried out on the implementation of GCG to ensure the realization of the principles of GCG comprehensively.

Harmonisasi Entitas Usaha dengan Pemilik Modal dan Pemangku Kepentingan
Harmonization of Business Entities with Shareholders and Stakeholders



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO

THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO



DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Komitmen Jamkrindo atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perum Jamkrindo menyadari bahwa penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Penerapan GCG diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai pemilik modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Praktik GCG terus dikembangkan Perum Jamkrindo sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implemetasi GCG di lingkup keorganisasian di lingkungan Perum Jamkrindo, di mana hal ini memberikan Perusahaan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif.

THE BASICS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Jamkrindo's Commitment to Implementing Good Corporate Governance

Perum Jamkrindo realizes that implementing GCG systematically and consistently is a must for a company. GCG implementation is expected to encourage business development, accountability and materialize the value of equity owners in the long term without ignoring the interests of other stakeholders. GCG practices continue to be developed by Perum Jamkrindo as a commitment to continue to innovate in an effort to improve the implementation of GCG in the organizational environment of Perum Jamkrindo in which this gives the Company confidence in facing every challenge ahead and to become a business entity with competitive competencies.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

Perum Jamkrindo senantiasa memiliki semangat dan komitmen dalam menerapkan GCG di lingkup Perusahaan yang dilandaskan pada kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar Perum Jamkrindo dapat berkembang secara maksimal serta memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi dinamika usaha khususnya pada industri penjaminan secara konsisten. Untuk itu, implementasi GCG menjadi aspek penting bagi Perusahaan dalam mencapai cita-cita yang digariskan serta mewujudkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Perum Jamkrindo always bears the enthusiasm and commitment in implementing GCG in the Company which is based on compliance with prevailing laws and regulations. This is so that the Perum Jamkrindo is able to develop optimally and possess high competitiveness to consistently face the business dynamics, especially in the guarantee industry. For this reason, the implementation of GCG is an important aspect for the Company in achieving the outlined goals and realizing healthy corporate principles.

Dalam mengimplementasikan GCG, Perum Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemilik modal, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

In implementing GCG, Perum Jamkrindo refers to a number of regulations and laws, especially Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN). This law provides a comprehensive foundation for aspects of organizational management; starting from the rights and obligations of the equity owner, the duties and authority of the Board of Directors and the Board of Commissioners/Supervisors, to the Company's relationship with internal and external stakeholders.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corperate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, di mana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan pemilik modal dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

As a State-Owned Enterprise (BUMN), the implementation of GCG in the Company also refers to Minister of SOEs Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 concerning the establishment of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs) as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09 / MBU / 2012 dated July 6, 2012, which states that GCG is the principles that underlie a process and mechanism for managing the company based on legislation and business ethics. The implementation of GCG principles which includes transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness is a strong foundation for the sustainability of the Company's business activities. In addition, the implementation of GCG that refers to best practices will increase the trust of equity owners and stakeholders which will eventually bring the Company to significant and sustainable progress.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut, penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN mempunyai tujuan sebagai berikut:

In accordance with the Minister of SOE's Regulation, the implementation of GCG principles to SOEs business entities has the following objectives:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

1. *Optimizing the value of SOEs so that companies have strong competitiveness, both nationally and internationally.*
2. *Encouraging the management of SOEs in a professional, efficient and effective manner, as well as empowering functions and increasing the independence of the company's organs.*
3. *Encouraging corporate organs in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the existence of SOE's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the SOEs.*
4. *Increasing the contribution of SOEs in the national economy.*
5. *Improving a conducive climate for the development of the national investment.*

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Principles for Implementing Good Corporate Governance

Asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles of Good Corporate Governance



Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui asas-asas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas

The principle of GCG implementation adhered to by the Company refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 and the General Guidelines for GCG from the National Committee on Governance Policy (KNKG) and interpreted through the principles of GCG which are abbreviated into TARIF, namely

(*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemilik Modal, Dewan Pengawas maupun Direksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 88/KEP-DIR/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness to all Company Organ such as to Equity Owners, Board of Supervisors and Directors listed in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 88/KEP-DIR/XII/2012,KEP-05/DPJAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012 concerning Guidelines for Implementation of Good Corporate Governance of Perum Jamkrindo, with details as follow :

Organ GCG *GCG Organs*	**Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik** *Principles of Good Corporate Governance*				
	Transparasi *Transparency*	**Akuntabilitas** *Accountability*	**Pertanggung jawaban** *Responsibility*	**Kemandirian** *Independence*	**Kewajaran** *Fairness*
Pemilik Modal *Equity Owner*	1. Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain merger, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jurnlah yang substansional 2. Keterbukaan dalam penetapan penghasilan direksi dan dewan pengawas *1. Clear disclosures regarding plans for extraordinary transactions including mergers, acquisitions, and sales of Company assets in substantive amounts* *2. Openness in determining the income of the directors and the supervisory board members*	Pemilik modal mempunyai tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan *The equity owner has the responsibility to monitor the implementation of GCG principles in the process of managing the Company and ensure that all management of the Company complies with the laws and regulations*	Pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku *The equity owner is not permitted to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the board of directors in accordance with the applicable laws and regulations*	Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota direksi dan dewan Pengawas sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan *To conduct the procedures which are common in assigning members of the board of directors and the supervisory board so that the appropriate individual is chosen in accordance with the qualifications needed by the Company*	Pemilik modal berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Pengawas *The equity owner has the right to obtain information relating to the interests of the Company from the Board of Directors and or the Supervisory Board*

Organ GCG *GCG Organs*	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Principles of Good Corporate Governance*				
	Transparasi *Transparency*	**Akuntabilitas** *Accountability*	**Pertanggung jawaban** *Responsibility*	**Kemandirian** *Independence*	**Kewajaran** *Fairness*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	1. Dibuat risalah rapat Dewan Pengawas yang menunjukkan adanya dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan 2. Kehadiran setiap anggota Dewan Pengawas dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahan 3. Remunerasi dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan *1. Minutes of the Board of Supervisors meeting was made which indicated the dynamics of the meeting in the decision-making process* *2. The presence of each member of the Supervisory Board and the implementation of the Supervisory Board meeting are reported in the Company's Annual Report* *3. The supervisory board's remuneration is reported in the Company's Annual Report*	1. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif 2. Pemberdayaan fungsi Dewan Pengawas *1. The Supervisory Board is responsible for overseeing the implementation of the Company's strategy and requires the implementation of accountability and providing advice to the Board of Directors in order to effectively manage the Company* *2. Empowerment of the functions of the Supervisory Board*	1. Dewan Pengawas harus mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya 2. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik modal 3. Dewan Pengawas turut bertanggung jawab terhadap kebenaran Laporan Keuangan yang diajukan direksi kepada Pemilik modal *1. The Supervisory Board must be committed to obeying the laws and regulations related to their job duties* *2. The Supervisory Board is responsible for carrying out its duties to the Equity Owners of capital* *3. The Supervisory Board is also responsible for the correctness of the financial statements submitted by the directors to the equity owners*	1. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan 2. Dewan Pengawas tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerja sama atau kontrak- kontrak yang bersifat rutin *1. Provide objective consideration in solving problems faced by the Company that may contain potential conflicts of interest* *2. The Supervisory Board is not authorized to make Company management decisions on a daily basis such as decisions regarding the appointment and dismissal of employees or the signing of cooperation or routine contracts*	Dewan Pengawas dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholders* *The Supervisory Board in carrying out its duties will always apply the Company's business ethics in order to fulfill the interests of stakeholders*

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

Organ GCG *GCG Organs*	**Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik** *Principles of Good Corporate Governance*				
	Transparasi *Transparency*	**Akuntabilitas** *Accountability*	**Pertanggung jawaban** *Responsibility*	**Kemandirian** *Independence*	**Kewajaran** *Fairness*
Direksi *Directors*	1. Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada *stakeholder* secara transparan 2. Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan di antaranya disajikan melalui *website* Perusahaan 3. Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain direksi pada Laporan Tahunan *1. Provide Corporate Financial and Activity Reports as a tool to transparently disclose financial transactions and Company performance to stakeholders* *2. Disclose Company Information and Financial Reports including those presented through the Company's website* *3. Disclose the salary and other income of the directors in the Annual Report*	1. Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan *stakeholder* 2. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan 3. Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen. 4. Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya *1. The Board of Directors must be able to place a priority sequence in an effort to fulfill stakeholder interests* *2. The Board of Directors builds and establishes an effective Internal Control System so that it can secure Company assets* *3. The Board of Directors empowers the roles and functions of the Internal Audit Unit as a strategic management partner.* *4. The Board of Directors must ensure that the Internal Audit Unit has access to the needed information about the Company to be able to carry out its duties*	1. Direksi harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan 2. Direksi bertanggung jawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan 3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan pada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh *stakeholder* *1. The Board of Directors must be committed to comply with the Laws and Regulations related to the Company's operations* *2. The Board of Directors are responsible for the material presented in the Financial Report* *3. The Board of Directors is responsible for disclosure of financial statement information in national publication media so that it can be accessed by stakeholders*	Komposisi Direksi harus memungkinkan direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya *The composition of the Board of Directors must allow the directors to act independently in the sense that they do not have interests that can interfere with their ability to carry out tasks independently and critically in relation to each other*	1. Penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja 2. Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholder* *1. Implementation of an adequate system of reward and punishment so that every employee gets a sense of fairness associated with success in achieving performance* *2. Implementing the Company's business ethics in order to fulfill stakeholder interests*

Landasan Hukum

Perusahaan memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Perusahaan dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
   a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
   b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
   c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
   e. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.
   f. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
   g. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah
   a. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
   b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
   c. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
3. Peraturan Menteri BUMN
   a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
   b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Legal Basis

The Company is fully committed to and consistently upholds the implementation of GCG by referring to several formal rules that form the basis for the Company in implementing GCG, namely:

1. *Law of the Republic of Indonesia.*
   a. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
   b. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 concerning Guarantees.
   c. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption.
   d. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.
   e. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003.
   f. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure.
   g. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
2. *Government regulations*
   a. Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo.
   b. Government Regulation No. 38 of 2008 concerning Amendments to Government Regulation No. 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property.
   c. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs.
3. *Minister of SOEs Regulations*
   a. Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, and its amendment No. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
   b. Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Establishing the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

c. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05 MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

4. Keputusan Menteri BUMN
   a. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
5. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

c. Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/2013 dated February 18, 2013, concerning the Preparation Guide of SOEs Information Technology Management.
d. Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/2006 concerning the Audit Committee for SOEs.

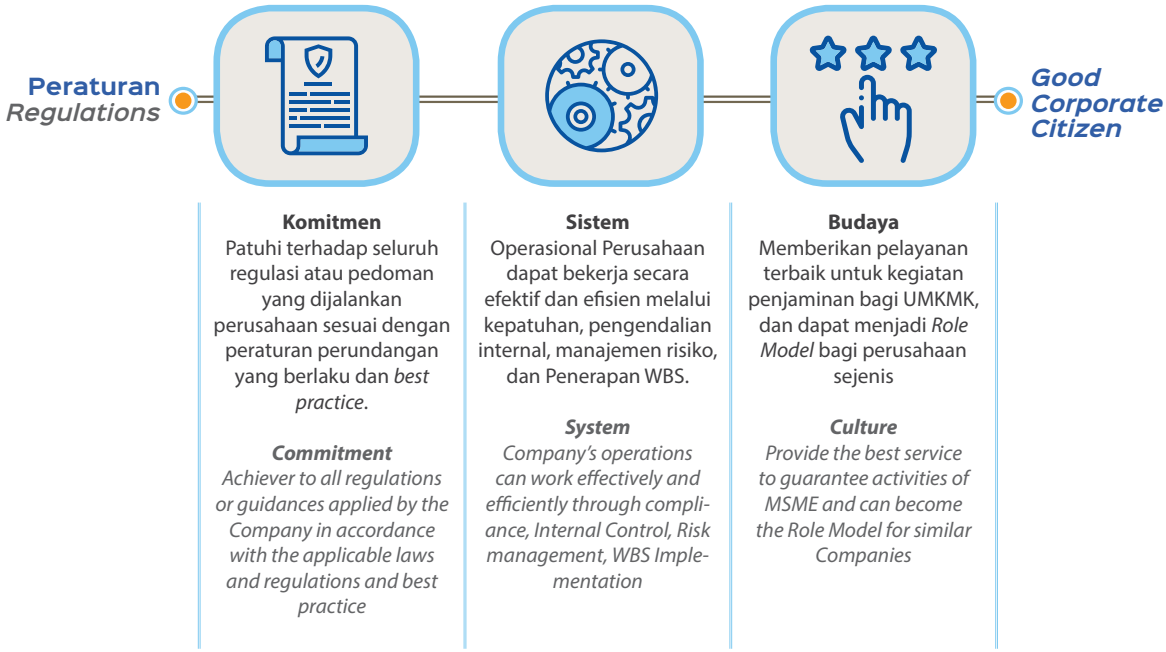
4. Decree of the Minister of SOEs
a. Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/ S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators / Parameters for Evaluating and Assessing the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.
5. General Guidelines for Indonesian GCG by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

PETA JALAN: RENCANA PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perum Jamkrindo memiliki *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

ROAD MAP: A GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT PLAN

Perum Jamkrindo adheres to a Roadmap in implementing GCG principles to achieve Good Corporate Citizen with the mechanism below:



Komitmen

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Perum Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Perum Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Perum Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

Sistem

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Perum Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

Budaya

Nilai-nilai budaya Perum Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Perum Jamkrindo, maka seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Perum Jamkrindo adalah untuk menjadi Perusahaan Penjaminan yang memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien dengan menciptakan nilai-nilai budaya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta *benchmark* bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Commitment

In applying these GCG principles, all Company Personnel are committed to submitting to and complying with all applicable regulations and laws, as well as those that are generally accepted. Support from management provides a large role in determining the direction and objectives of implementing GCG at Perum Jamkrindo. In practice, the Management of Perum Jamkrindo is a role model for the employees to continue committing to the implementation of sustainable GCG. Perum Jamkrindo will implement GCG principles in every business process and make improvements to GCG supporting devices.

System

In supporting sustainable GCG commitment at Perum Jamkrindo, it needs a company operational system that can work effectively and efficiently through compliance with applicable laws, adequate internal control systems and good risk management and implementation of an effective violation reporting system.

Culture

The cultural values of the Jamkrindo Corporation are the foundation for the Company's Employees in their work to be clearer and more structured. In the framework of implementing the GCG in Perum Jamkrindo, all Company Personnel are committed to implementing corporate cultural values that are in line with the principles of GCG.

The purpose of GCG implementation conducted by Perum Jamkrindo is to become a Guarantee Company that provides value to stakeholders through effective and efficient management of the Company by creating cultural values so as to increase the level of trust, build a corporate image (brand image) and a good Company's reputation and become the benchmarks for other similar companies. The details are as follow:

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

Menuju Tata Kelola Perusahaan yang lebih Baik dan Penciptaan Nilai-nilai Budaya
Toward governance good corporate and the creation of cultural values

Komitmen Tata Kelola
Governance Commitment

Visi dan Misi
Nilai-Nilai Budaya Perusahan
Pedoman Tata Kelola
Pedoman Perilaku
Charter
- *Internal Audit Charter*
- Komite *Audit Charter*
- Kiru *Charter*

Pedoman Pengawas dan Direksi
Kebijakan Gratifikasi
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
Sistem dan Prosedur

Vision and Mission
Corporate Cultural Values
Governance guidelines
Code of Conduct
Charter
- *Internal Audit Charter*
- *Audit Committee Charter*
- *Kiru Charter*

Guideliness of the board of supervisors and Directors
Gratification Policies
Guideliness of Violation
Reporting System
System and Procedure

Struktur Tata Kelola
Governance Structure

Organ Utama
- Rapat Pembahasan Bersama Dewan Pengawas
- Direksi

Organ Pendukung
- Komite Audit
- Komite Investasi dan Risiko Usaha
- Sekretaris Dewan Pengawas
- Sekretaris Perusahaan
- Satuan Pengawas Internal Perusahaan

Main Organ
- *Joint Meeting with Board of Supervisors*
- *Directors*

Supporting Organ
- *Audit Committee*
- *Investment and Business Risk Committee*
- *Secretary to the Board of Supervisors*
- *Corporate Secretary*
- *Internal Control Unit Company*

Mekanisme Tata Kelola
Governance Mecharism

Implementasi
- Penerapan Prinsip GCG
- Pada Kegiatan Usaha Perusahaan

Evaluasi
- *Monitoring* Implementasi
- Tata kelola Perusahaan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan
- Evaluasi Rencana
- Bisnis Perusahaan

Pemutakhiran
- Penyempurnaan Perangkat
- Pendukung Tata Kelola

Implementation
- *GCG Principles Implementation*
- *On Company's business activities*

Evaluation
- *Monitoring of Implementation*
- *Corporate Governance*
- *Company Perfomance Evaluation*
- *Plan Evaluation*
- *Company Business Update*

Update
- *Device Enchancement*
- *Corporate Governance support*

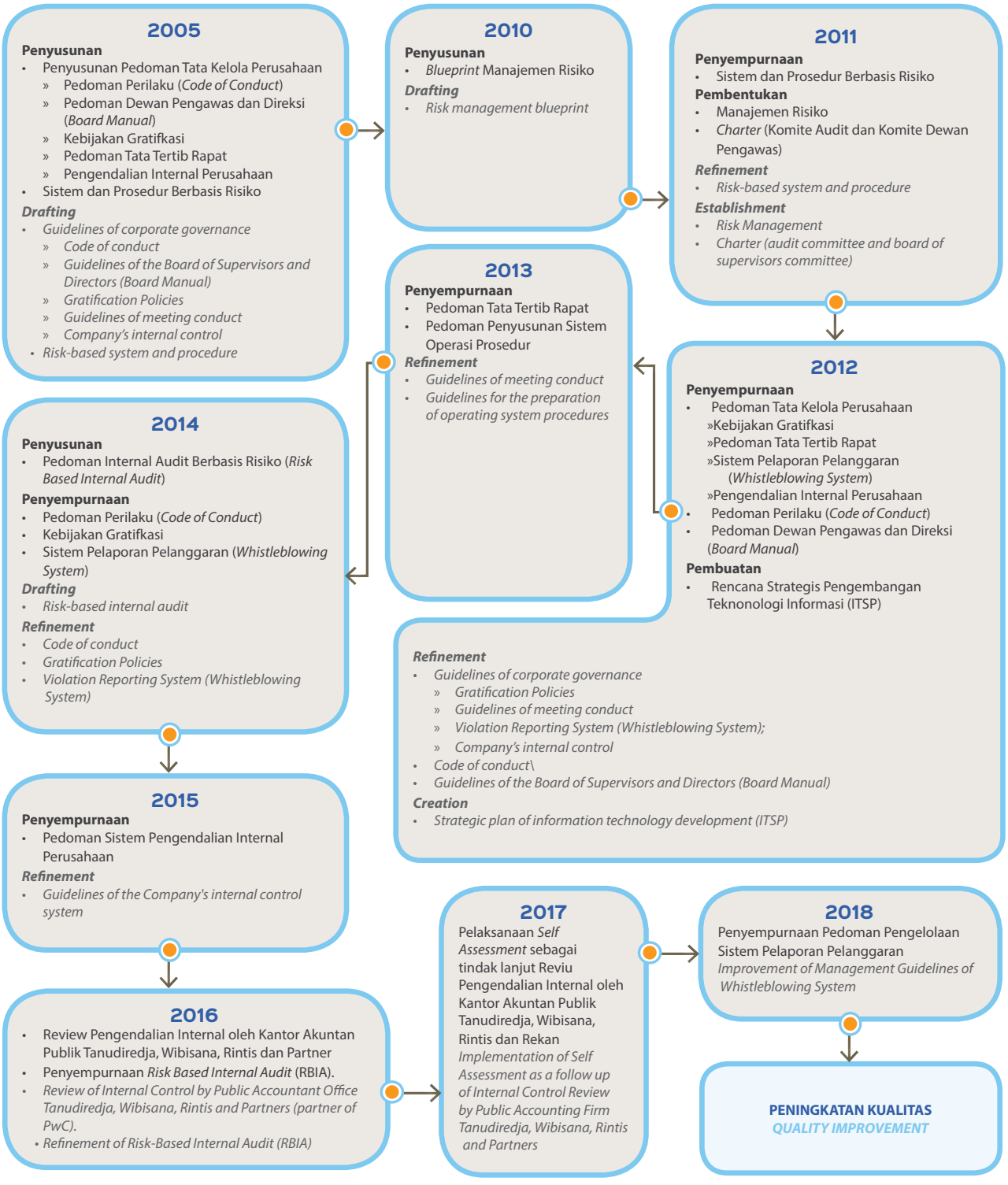
Tujuan Tata Kelola
Governance Objectives

Pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien
Kepercayaan, *Image*, dan Reputasi Perusahaan yang lebih baik
Menjadi *Benchmark*

Effective and Efficient company management
Better Trust, Image, and Reputation of the Company
Become benchmark

Rekam Jejak Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Track Record of the Development of Good Corporate Governance Implementation



PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2018

Penerapan praktik GCG terus menerus ditingkatkan di Perum Jamkrindo, melalui *monitoring* dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* di lingkup Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2018, pemantauan atas penerapan praktik GCG pada Perum Jamkrindo, di antaranya:

1. Menyampaikan Laporan *Self Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perum Jamkrindo Tahun 2017 kepada Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei & Keuangan, Jasa Survei dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 1609/P/1/III/2018 dan 1610/P/1/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
2. Menyampaikan *Area of Improvement* atas Hasil *Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2017 kepada Dewan Pengawas dan Divisi terkait sebagai tindak lanjut melalui Surat No: 2172/P/1/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dan Memorandum No: 144/M/1.2/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
3. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing* System kepada Direktur Utama periode bulan Juli 2018 dan September 2018 melalui Memorandum No: 267/M/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan Memorandum No: 362/M/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
4. Melakukan *Assessment* GCG Perum Jamkrindo Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang dilakukan oleh PT Cita Negeri Amanah (Subsidiary of IICD) sebagai Assesor Independen berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 56/SPK/4.2/II/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan *Self Assessment* sesuai dengan Peraturan OJK yang dilakukan oleh Tim Internal Perusahaan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) No: 667/SPT/1/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT IN 2018

The implementation of GCG practices is continuously improved at Perum Jamkrindo, through monitoring of the Internal Audit Unit and the HRM Division on the implementation of the Code of Conduct (CoC). If a conflict of interest or positional abuse is found that causes fraud in the scope of the Company, it will be resolved and followed up in accordance with applicable regulations. In 2018, the monitoring of the implementation of GCG practices at Perum Jamkrindo includes the followings:

1. *Delivering a Self Assessment Report on the Implementation of Good Corporate Governance of Perum Jamkrindo in 2017 to the Deputy of Financial Services, Survey & Financial Services, Survey Services and Executive Heads of Insurance Supervisors, Pension Funds, Financing Institutions, and Other Financial Service Institutions of the Financial Services Authority through Letter No. 1609 / P/1/ III/ 2018 and 1610 /P/1/III/ 2018 dated March 20, 2018.*
2. *Reporting the Area of Improvement on the Results of 2017 Good Corporate Governance Implementation Assessment to the relevant Supervisory and Division Board as a follow-up through Letter No: 2172/P/1/IV/2018 dated 23 April 2018 and Memorandum Nor: 144 / M /1.2/IV/2018 dated April 23, 2018.*
3. *Submitting the Whistleblowing System Implementation Report to the President Director in the period July 2018 and September 2018 through Memorandum No: 267/M/VIII/2018 dated 8 August 2018 and Memorandum No: 362 /M/X/2018 dated 15 October 2018.*
4. *Conducting the GCG Assessment of Perum Jamkrindo in 2018 in accordance with the Minister of SOEs Regulation with PT Cita Negeri Amanah (Subsidiary of IICD) appointed as an Independent Assessor based on Work Order No. 56/SPK/4.2 /II/2018 dated 28 December 2018 and Self Assessment in accordance with Financial Service Authority Regulations carried out by the Company's Internal Team based on the Task Order (SPT) No: 667/SPT/1/ XII/2018 dated December 4, 2018.*

INFRASTRUKTUR DAN SOFTSTRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Struktur GCG di Lingkungan Perum Jamkrindo

Infrastruktur keorganisasian sebuah Perusahaan Umum (Perum) mencakup kepentingan pemilik modal yang dituangkan melalui Rapat Pembahasan Bersama (RPB); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perum menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Pengawas dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Perusahaan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RPB, Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Pengawas dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Infrastruktur GCG Perusahaan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perusahaan, terdiri dari pemangku kepentingan dan organ pendukung. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebagai landasan utama, Perusahaan menempatkan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan sebagai kunci utama yang melandasi seluruh organisasi Perusahaan untuk dapat bekerja bersama-sama, dan mampu mewujudkan kinerja yang sesuai dengan etika usaha yang berlaku di Indonesia.

INFRASTRUCTURE AND SOFTSTRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG Structure in Perum Jamkrindo

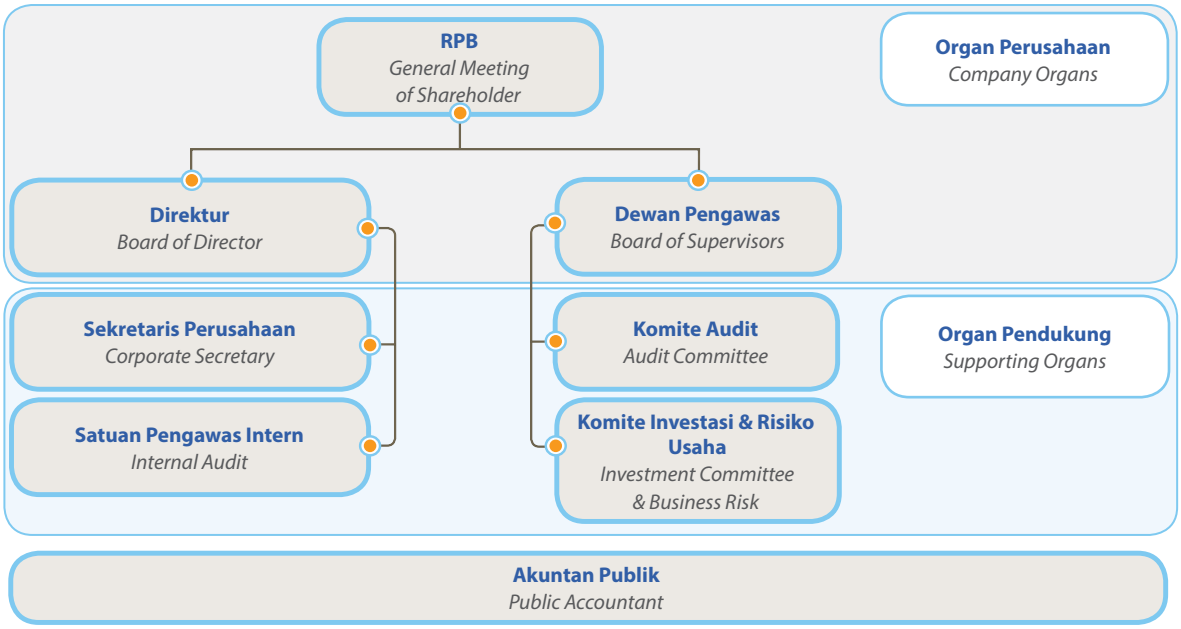
The organizational infrastructure of Perum Jamkrindo refers to the interests of capital owners as outlined in a Joint Discussion Meeting (RPB); Directors with their duties to manage; and the Supervisory Board which functions to supervise. Perum Jamkrindo's management system adheres to a 2 (two) body model, namely the Supervisory Board and the Board of Directors, which have clear authority and responsibility according to their respective functions as mandated in regulations and legislation.

The Company possesses the three main organs, namely the Joint Discussion Meetings, Supervisory Board, and Directors. The Board of Supervisors and Directors have the responsibility to maintain the sustainability of the Company's business in the long term. Therefore, the Board of Supervisors and Directors' perception must adhere to the Company's vision, mission, and values.

The Company's GCG Infrastructure also includes several important aspects with the role to support the strengthening of control and management of the Company, These aspects consist of stakeholders and supporting organs. This structure is in accordance with the provisions

As the main foundation, the Company places the Company's vision, mission, and values as the main key that underlies all Company organizations capability to work together, and realize performance that is in line with the prevailing business ethics in Indonesia.

Struktur Organ GCG Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo GCG Organ Structure



Dalam forum Rapat Pembahasan Bersama (RPB), para Pemilik Modal dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RPB didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RPB atau Pemilik Modal tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RPB untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kedudukan yang setara, para Pemilik Modal akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RPB kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Pengawas dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

In the Joint Discussion Meeting (RPB) forum, Equity Owners can make important decisions related to their investments in the Company. Decisions taken in the RPB are based on the interests of the Company. The RPB or Equity Owner cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Supervisory Board and the Board of Directors without reducing the authority of the RPB to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and Legislation. With an equal position, the Equity Owners will carefully consider their decisions for the long term interests of the Company. After the decision is taken, the RPB will then hand over all authority to supervise and implement the decision to the Supervisory Board and the Board of Directors. This is in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RPB tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Pengawas kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perusahaan serta keputusan RPB tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga

The management of the Company and the implementation of each decision of the RPB is carried out by the Board of Directors. The Supervisory Board then supervises and provides advice to ensure that the Company's objectives and RPB decisions are carried out optimally and achieved maximally. With such great duties and responsibilities in maintaining the sustainability of the Company, the Supervisory Board is assisted by a Supporting

keberlangsungan Perusahaan, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut.

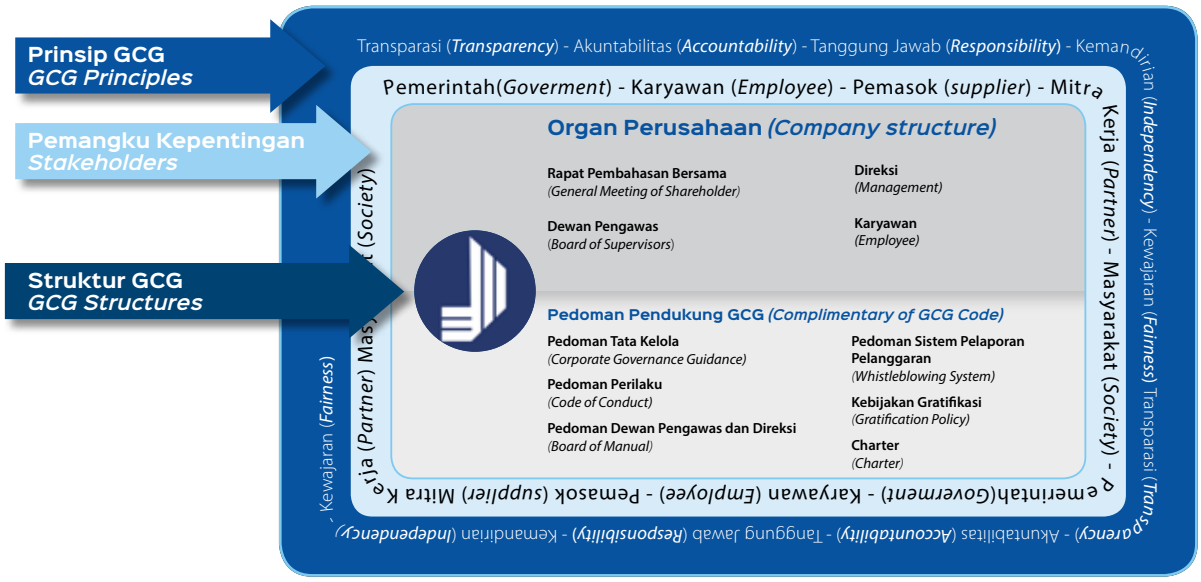
Committee while the Board of Directors is assisted by work units that are related to the governance mechanism.

Proses dan Mekanisme GCG: Softstructure dan Perangkat Kebijakan

GCG Processes and Mechanisms: Softstructure and Policy Instruments

Agar infrastruktur berjalan pada koridor yang tepat, Perusahaan menerapkan perangkat kebijakan berupa peraturan internal sebagai *softstructure* yang mengatur Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perusahaan. *Softstructure* atau perangkat kebijakan berguna untuk memberikan kerangka acuan dan standarisasi pelaksanaan tugas dari setiap organ GCG yang dimiliki Perusahaan.

In order for infrastructure to operate appropriately, the Company implements a set of policies in the form of internal regulations as a structure that regulates Corporate Governance within the Company. The soft structure or policy instruments are useful to provide a reference framework and standardization of the implementation of tasks from each GCG organ of the Company.



Secara rinci, aspek perangkat kebijakan GCG yang telah tercatat dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai bentuk ketaatan hukum dan komitmen dalam pelaksanaan GCG, meliputi:

In detail, the aspects of the GCG policy that have been recorded and endorsed by the authorities as a form of legal compliance and commitment in the implementation of GCG, include:

Perangkat Kebijakan *Policy Instruments*	**Penetapan** *Established by*
Anggaran Dasar Perusahaan *(Company's Articles of Association)*	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Anggaran Dasar Perusahaan. *Government Regulation No. 35 of 2008 concerning Perum Jamkrindo as the Company's Articles of Association.*

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

Perangkat Kebijakan *Policy Instruments*	**Penetapan** *Established by*
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Guidelines for Good Corporate Governance)*	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 88/Kep-Dir/XII/2012—KER-05/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. *Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board ofPerum Jamkrindo No. 88 / Kep-Dir / XII / 2012 — KER-05 / DP-JAMKRINDO / XII / 2012 dated 3 December 2012 concerning General Guidelines of Perum Jamkrindo.*
Pedoman Perilaku *(Code of Conduct/CoC)*	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012—KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). *Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo No. 93 / Kep-Dir / XII / 2012 — KEP-07 / DP JAMKRINDO / XII / 2012, December 13, 2012 concerning the Code of Conduct.*
Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)*	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012—KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. *Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo No. 89 / Kep-Dir / XII / 2012 — KEP-06 / DP-JAMKRINDO / XII / 2012 dated 3 December 2012.*
Piagam Komite Audit *(Audit Committee Charter)*	Telah disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas pada tanggal 26 April 2011 *It has been approved by the Chairperson of the Supervisory Board on April 26, 2011*
Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha *(Charter of the Business Risk and Investment Committee)*	Telah disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas pada Desember 2012 *It has been approved by the Chairperson of the Supervisory Board in December 2012*
Piagam Audit Internal *(Internal Audit Charter)*	Telah diperbaharui serta disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 38/Kep-Dir/V/2017–KEP-03/DP-JAMKRINDO/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 *It has been updated and ratified through a Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo No. 38 / Kep-Dir / V / 2017 – KEP-03 / DP-JAMKRINDO / V / 2017 dated May 10, 2017*
Kode Etik Satuan Pengawasan Intern *(Code of Ethics for Internal Audit Unit)*	Disahkan melalui Peraturan Direksi No. 30/Per-Dir/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017. *Ratified through Directors Regulation No. 30 / Per-Dir / VIII / 2017 dated August 25, 2017*
Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko *(Risk Management Implementation Reporting Guidelines)*	Disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 02/Per-Dir/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 *Ratified through the Perum Jamkrindo's Board of Directors Regulation No. 02 / Per-Dir / III / 2014 dated March 5, 2014*
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa *Guidelines for Procurement of Goods and Services*	Telah diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No 13/Per-Dir/III/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tanggal 26 Maret 2013 *It has been updated and ratified through the Board of Directors of Perum Jamkrindo Regulation No13 / Per-Dir / III / 2013 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services for Perum Jamkrindo dated March 26, 2013*
Pedoman Kebijakan Gratifikasi *(Guidelines for Gratification Policy)*	Diperbaharui serta disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. 9/SE/4/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Perum Jamkrindo. *It has been updated and ratified by the Board of Directors' Circular No. 9 / SE / 4 / IX / 2014 dated September 24, 2014, concerning Gratification Control Policies at Perum Jamkrindo.*

Perangkat Kebijakan *Policy Instruments*	Penetapan *Established by*
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System Guidelines)*	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018. *It has been updated and validated through the Board of Directors of Perum Jamkrindo Regulation No. 04 / Per-Dir / IV / 2018 dated April 10, 2018.*
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara *(Guidelines for Submitting State Administrators Wealth Report)*	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 24/Per-Dir/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017. *It has been updated and validated through the Board of Directors of Perum Jamkrindo Regulation No. 24 / Per-Dir / VI / 2017 dated June 14, 2017.*

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sosialisasi terus dilakukan dengan tujuan agar seluruh Insan Perusahaan memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam lingkungan kerja sehari-hari guna menghindari perilaku menyimpang. Dalam rangka *improvement* atas penerapan GCG Perusahaan yang berkelanjutan, pada tahun 2018 telah dilakukan revisi atas Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018. Pedoman WBS tersebut disosialisasikan kepada Karyawan, yaitu:

DISSEMINATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

The dissemination continues to be conducted with the aim that all Company Personnel understand and apply the principles of GCG in their daily work to avoid deviant behavior. In the framework of improving the implementation of sustainable corporate GCG, in 2018 revisions have been made to the Guidelines for the Management of the Whistleblowing System which was ratified through the Directors of Perum Jamkrindo's Regulation No. 04/ Per-Dir/IV/2018 dated April 10, 2018. The WBS Guidelines are disseminated to employees through the following activities:

No	Tempat Sosialisasi *Place of Dissemination*	Tanggal Sosialisasi *Date of Dissemination*	Tim Pelaksana *Disseminating Team*
1	Kantor Pusat *Head Office*	29 Juni 2018 *June 29, 2018*	Untung Heri S (Kepala SPI/*Head of Internal Audit Unit*)
2	Kantor Cabang Ambon *Ambon Branch Office*	2 Juli 2018 *July 2, 2018*	• Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ *Region 2 Section Head*) • Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/*Internal Audit Unit Staff*) • Andreas Theodorus M (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
3	Kantor Cabang Palu *Palu Branch Office*		• Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ *Region 3 Section Head*) • Asep Ginanjar Cahya Gumilar (*Kasie SPI/ Internal Audit Unit Section Chief*) • Rinjani Yusni Maharjanti (*Staf SPI/Internal Audit Unit Staff*) • Laila Wijayanti (*Staf SPI/Internal Audit Unit Staff*)

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

No	Tempat Sosialisasi *Place of Dissemination*	Tanggal Sosialisasi *Date of Dissemination*	Tim Pelaksana *Disseminating Team*
4	Kantor Cabang Aceh *Aceh Branch Office*	2 Juli 2018 *July 2, 2018*	• Irmatati (Kabag Korporasi dan TI/*Head of Corporate and IT Division*) • Muhammad Ilham (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
5	Kantor Cabang Yogyakarta *Yogyakarta Branch Office*		• Kartono (Kabag PSKA/*Head of PSKA Division*) • Laurdes Sinurat (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Andik Sugiarto (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Arif Syachroni (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
5	Kantor Cabang Makassar *Makassar Branch Office*	19 Juli 2018 *July 19, 2018*	• Irmatati (Kabag Korporasi dan TI/*Head of Corporate and IT Division*) • Muhammad Ilham (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Laila Wijayanti (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Emmerisa br Sembiring (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
6	Kantor Cabang Semarang *Semarang Branch Office*		• Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag Wil. 2/ *Region 2 Section Head*) • Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Arif Syachroni (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Didit Suharyono (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
7	Kantor Cabang Surabaya *Surabaya Branch Office*		• Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ *Region 3 Section Head*) • Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI/ *Internal Audit Unit Section Chief*) • Andreas Theodorus M (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
8	Kantor Cabang Gorontalo *Gorontalo Branch Office*	1 Agustus 2018 *August 1, 2018*	• Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie SPI/ *Internal Audit Unit Section Chief*) • Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
9	Kantor Cabang Mataram *Mataram Branch Office*	2 Agustus 2018 *August 2, 2018*	• Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Arif Syachroni (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
10	Kantor Cabang Tanjung Pinang *Tanjung Pinang Branch Office*		• Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ *Region 3 Section Head*) • Laurdes Sinurat (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
11	Kantor Cabang Palopo *Palopo Branch Office*		• Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Andreas Theodorus Mokodaser (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
12	Ternate	13 September 2018 *September 13, 2018*	• Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ *Region 3 Section Head*) • Laurdes Sinurat (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Andik Sugiarto (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
13	Mamuju		• Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/*Region 1 Section Head*) • M. Ilham (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Andi Aldino Chandra (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
14	Manokwari		• Irmatati (Kabag Korporasi dan TI/*Head of Corporate and IT Division*) • Arif Syachroni (*Staf SPI/ Internal Audit Unit Staff*) • Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)

No	Tempat Sosialisasi *Place of Dissemination*	Tanggal Sosialisasi *Date of Dissemination*	Tim Pelaksana *Disseminating Team*
15	Pekanbaru	27 September 2018 *September 27, 2018*	• Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ *Region 3 Section Head*) • Faoziah Ulfah (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • M. Ilham (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
16	Kupang		• Aditya Putra Darmawan (Kabag Wil. 1/*Region 1 Section Head*) • Aldhy Haryono Fachrial (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Andik Sugiarto (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Michael Ranap Simanjuntak (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
17	Pontianak		• Irmatati (Kabag Korporasi dan TI/*Head of Corporate and IT Division*) • Laurdes Sinurat (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Emmerisa br Sembiring (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
18	Samarinda	17 Oktober 2018 *October 17, 2018*	• Agus Mirazul Fajar (Kabag Wil. 3/ *Region 3 Section Head*) • M. Ilham (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Muhammad Leonard Gustav Q (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)
19	Kanwil V Semarang *Region V Office Semarang*	8 November 2018 *November 8, 2018*	• Irmatati (Kabag Korporasi dan TI/*Head of Corporate and IT Division*) • Andreas Theodorus M (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*) • Faisal Arief Sentosa (Staf SPI/ *Internal Audit Unit Staff*)

Kegiatan Sosialisasi Whistleblowing System di Sepanjang Tahun 2018
Dissemination Activities on Whistleblowing Systems in 2018



Kantor Cabang Pangkal Pinang
Pangkal Pinang Branch Office



Kantor Cabang Padang
Padang Branch Office

Kegiatan Sosialisasi Whistleblowing System di Sepanjang Tahun 2018
Dissemination Activities on Whistleblowing Systems in 2018



Kantor Cabang Palangka Raya
Palangkaraya Branch Office



Kantor Cabang Palopo
Palopo Branch Office



Kantor Cabang Pekanbaru
Pekanbaru Branch Office



Kantor Wilayah IX Makassar
Region IX Office Makassar



Kantor Cabang Makassar
Makassar Branch Office



Kantor Cabang Mataram
Mataram Branch Office

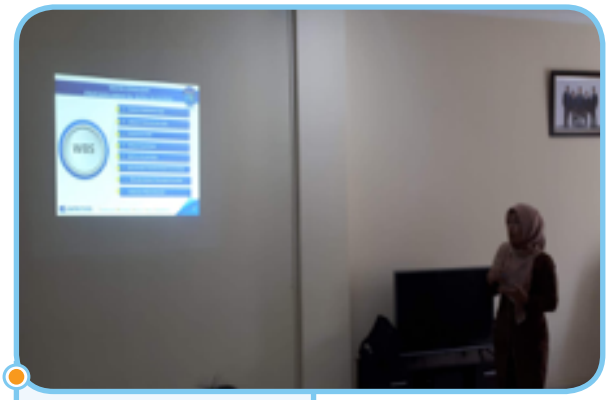
Kegiatan Sosialisasi Whistleblowing System di Sepanjang Tahun 2018
Dissemination Activities on Whistleblowing Systems in 2018



Kantor Cabang Semarang
Semarang Branch Office



Kantor Cabang Jambi
Jambi Branch Office



Kantor Cabang Serang
Serang Branch Office



Kantor Cabang Manokwari
Manokwari Branch Office

PENILAIAN: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Assessment Penerapan GCG

Metode *Assessment*

Sebagai wujud komitmen penerapan prinsip GCG, Perum Jamkrindo melaksanakan *assessment* atau penilaian atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan. *Assessment* dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu melalui *self assessment* atau evaluasi yang dilakukan oleh tim internal Perusahaan, dan *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh pihak

ASSESSMENT: EVALUATION, MONITORING, AND IMPROVEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Assessment of GCG Implementation

Assessment Method

As a form of commitment to the implementation of GCG principles, Perum Jamkrindo conducts an evaluation or assessment of the implementation of GCG within the Company. The assessment is carried out with 2 (two) models, namely through self assessment or evaluation conducted by the Company's internal team, and assessment or evaluation carried

independen. Tujuan pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perum Jamkrindo, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan pada Perum Jamkrindo.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada Perum Jamkrindo dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate govermance* di lingkungan perusahaan.

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Perum Jamkrindo. Selanjutnya penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk tren kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Perum Jamkrindo.

Dasar pelaksanaan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

out by an independent party. The purpose of implementing an assessment of the implementation of GCG at Perum Jamkrindo, which refers to the Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012, are:

1. *To measure the quality of corporate GCG implementation through evaluating the level of fulfillment of GCG criteria with the real conditions in Perum Jamkrindo, using the scoring/value on the implementation of GCG and its quality categories.*
2. *To identify the strengths and weaknesses of the implementation of corporate GCG, and propose improvement recommendations to reduce the gap between the GCG criteria and its application n Perum Jamkrindo.*
3. *To monitor the consistency of GCG implementation at Perum Jamkrindo and obtain input for improving and developing corporate governance policies in the corporate environment.*

The assessment results are expected to be the basis for improving the implementation of GCG practices at Perum Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practices is also expected to provide benefits to encourage the management of the Company in a transparent, professional, and efficient manner so that it can increase the Company's value in the form of high-performance trends, and a good corporate image, as well as trust of stakeholders (i.e. service users, employees, and the community as a whole) towards Perum Jamkrindo.

The basis for the implementation of the evaluation/assessment of the implementation of GCG in Perum Jamkrindo refers to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, and Letter of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning the Indicators/ Parameters for Evaluating and Assessing the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

This assessment and evaluation method is carried out using a measuring instrument which consists of 6 (six) aspects with the values of which stipulated in the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012.

6 Aspek *Assessment* GCG
(Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)
6 Aspects of GCG Assessment
(Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16 / S.MBU / 2012)



Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
Shareholders and GMS/ Equity Owners

Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas
Board of Commissioners/ Supervisory Board

Direksi
Board of Directors

Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Information Disclosure and Transparency

Aspek lainnya
Other aspects

Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2017: Hasil, Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya Hingga Akhir Tahun Buku 2018

2017 GCG Assessment: The Results, Recommendations, and Follow-Up until the end of 2018 Fiscal Year

Assessment penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2017 dilakukan dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG Perusahaan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 1373/SPT/1/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

The GCG implementation assessment for 2017 was conducted with the aim of providing recommendations for continuous improvement in the implementation of the Company's GCG. The assessment process is based on Task Order No. 1373 / SPT / 1 / IX / 2017 September 26, 2017.

Jenis Penilaian *Type of Assessment*	:	Self *Assessment*/Evaluasi *Self Assessment/Evaluation*
Assessor/Penilai	:	Tim *Self Assessment* Internal Perum Jamkrindo *Perum Jamkrindo's Internal Self Assessment Team*
Metode Penilaian *Assessment Method*	:	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 *Assessment Indicators/Parameters for GCG Implementation No. SK16 / S.MBU / 2012*
Tahun Buku Penerapan *Year of Implementation*	:	1 Januari - 31 Desember 2017 *January 1 - December 31, 2017*
Periode Pengukuran *Period of Measurement*	:	26 September 2017 - 28 Februari 2018 *September 26, 2017 - February 28, 2018*

Hasil penilaian penerapan GCG Perum Jamkrindo tahun 2017 mencapai total skor sebesar 92,470 dengan kualifikasi "Sangat Baik", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The results of the assessment of the implementation of GCG at Perum Jamrkindo in 2017 reached a total score of 92.470 with a category of "Very Good". The details can be seen in the following table.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

	Aspek *Aspects*	**Bobot** *Value*	**Nilai** *Score*	**Pencapaian** *Achievement* **(%)**
1		2	3	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*	7,000	6,924	98,912
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/Equity Owners*	9,000	8,568	95,194
III	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	35,000	32,085	91,671
IV	Direksi *Board of Directors*	35,000	32,426	92,647
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*	9,000	8,468	94,085
VI	Aspek Lainnya *Other Aspects*	5,000	4,000	80,000
Skor Keseluruhan ***Total Score***		**100,000**	**92,470**	**92,470**
Peringkat Kualitas Penerapan GCG ***GCG Implementation quality***			**"Sangat Baik"** ***'Very Good'***	

Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment
Classification of Quality Assessment Implementation

Nilai di atas 85 *Score above 85*	:	Sangat Baik *Very Good*
75 < Nilai ≤ 85 *75 < Score ≤ 85*	:	Baik *Good*
60 < Nilai ≤ 75 *65 < Score ≤ 75*	:	Cukup Baik *Satisfactory*
50 < Nilai ≤ 60 *50 < Score ≤ 60*	:	Kurang Baik *Poor*
Nilai ≤ 50 *Score ≤ 50*	:	Tidak Baik *Bad*

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, terdapat 9 (sembilan) butir rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* penerapan GCG di Perusahaan. Terhadap rekomendasi tersebut, Perusahaan telah melakukan tindak lanjut hingga akhir tahun 2018, dengan penjelasan sebagai berikut:

Based on the results of the self-assessment, there are 9 (nine) recommendations that become the Area of Improvement of GCG implementation in the Company. Regarding these recommendations, until the end of 2018, the Company has followed up some of the aspects with the following description:

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Recommendations for 2017 GCG Implementation Assessment*	Tindak Lanjut per 31 Desember 2018 *Follow-ups as of December 31, 2018*		
		Status	**Periode Tindak Lanjut** *Follow-up Period*	**Bentuk Tindak Lanjut** *Form of Follow-up*
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*			
1	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*Whistleblowing system*). *The company implemented a policy regarding reporting on alleged irregularities in the company (whistleblowing system).*	√	2018	Perum Jamkrindo segera melakukan revisi Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) berupa mekanisme pelaporan pelanggaran, penyempurnaan sarana dan prasarana pelaporan dan penunjukan pengelola WBS. *Perum Jamkrindo immediately revised the Whistleblowing System (WBS) Guidelines in the form of a violation reporting mechanism, improved reporting facilities and infrastructure and appointment of WBS managers.*
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/Equity Owners* - Nihil *- Nil*			
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/Supervisory Board*			
1	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan. *The Board of Commissioners/Supervisory Board carries out training programs in order to improve the needed competency of members of the Board of Commissioners/Supervisory Board.*	√	2018	Dewan Pengawas sebaiknya melaksanakan program pelatihan/seminar/*workshop* sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas dan membuat laporan atas kegiatan tersebut. *The Supervisory Board should carry out training/seminar/workshop programs in accordance with the Supervisory Board's annual work plan and budget and make a report on these activities.*
2	Tanggapan rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. *The response to the draft of the Company's Work Plan and Budget by the Board of Commissioners/Supervisory Board is given within the period as stipulated in the Board Manual.*	√	2018	Melakukan revisi *Board Manual* dengan menetapkan jangka waktu pemberian tanggapan dari Dewan Pengawas atas rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi. *Revise the Board Manual by setting the time period for giving a response from the Supervisory Board to the draft of the Company's Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors.*
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang saham/ pemilik modal. *The Board of Commissioners/Supervisory Board assesses the Board of Directors and reports the results of the assessment to shareholders/equityl owners.*	√	2018	Menyusun target kinerja individual dan melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap kinerja masing-masing Dewan Pengawas serta melaporkannya kepada Pemilik Modal. *Arrange individual performance targets and conduct self-assessments on the performance of each Supervisory Board member and report it to the Equity Owner.*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Recommendations for 2017 GCG Implementation Assessment*	Tindak Lanjut per 31 Desember 2018 *Follow-ups as of December 31, 2018*		
		Status	Periode Tindak Lanjut *Follow-up Period*	Bentuk Tindak Lanjut *Form of Follow-up*
4	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. *The Board of Commissioners/Supervisory Board provides guidance on the quality policy and service and implementation of the policy.*	√	2018	Dewan Pengawas agar memberikan arahan dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan dengan Direksi mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya untuk meningkatkan kinerja operasional Perusahaan. *The Supervisory Board must provide guidance in the Internal Meeting and Joint Meeting with the Board of Directors regarding quality and service policies and their implementation to improve the Company's operational performance.*
IV	Direksi *Board of Directors*			
1	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. *The Board of Directors reports the implementation of a performance management system to the Board of Commissioners/Supervisory Board.*	√	2018	Menyusun target kinerja individual dan melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap kinerja masing-masing Direksi serta melaporkannya kepada Dewan Pengawas. *Arrange individual performance targets and conduct self-assessments on the performance of each Board of Directors member and report them to the Supervisory Board.*
2	Direksi menetapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. *The Board of Directors establishes a system of information technology in accordance with established policies.*	x	-	Segera melakukan finalisasi atas SOP Teknologi Informasi dan Kebijakan Tata Kelola & Manajemen Teknologi Informasi. *Immediately finalize the Information Technology SOP and Information Technology Management & Management Policy.*
3	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan. *The Board of Directors implements a system to improve product quality and service.*	√	2018	Melakukan sertifikasi standar mutu pelayanan untuk kegiatan bisnis utama dengan menunjuk lembaga yang kompeten dan melakukan audit atas pelaksanaan sistem mutu. *Conduct certification of service quality standards for key business activities by appointing competent institutions and conducting audits on the implementation of the quality system.*

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Recommendations for 2017 GCG Implementation Assessment*	Tindak Lanjut per 31 Desember 2018 *Follow-ups as of December 31, 2018*		
		Status	Periode Tindak Lanjut *Follow-up Period*	Bentuk Tindak Lanjut *Form of Follow-up*
4	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan renumerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan. *The Board of Directors develops HR, evaluates performance and provides decent remuneration, and builds an HR environment that effectively supports the company's achievements.*	√	2018	Segera melakukan finalisasi atas Kebijakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). *Immediately finalize the OHS Policy (Occupational Health and Safety).*
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*			
	- Nihil *- Nil*			
VI	Aspek Lainnya *Other Aspects*			
	- Nihil *- Nil*			

√ = telah ditindaklajuti | x = belum ditindaklanjuti
√ = *follow-ups has been performed* I x = *follow-ups have not yet been performed*

Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2018

Assessment penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2018 dilakukan secara independen oleh PT Cita Negeri Amanah, dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG di lingkungan Perum Jamkrindo. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 56/SPK/4.2/II/2018 tanggal 28 Desember 2018.

2018 GCG Assessment Implementation

The assessment of GCG implementation for 2018 was carried out independently by PT Cita Negeri Amanah, with the aim of providing recommendations for continuous improvement on the implementation of GCG within Perum Jamkrindo. The assessment process is based on Task Order No. 56/SPK/4.2/II/ 2018 dated December 28, 2018.

Jenis Penilaian *Type of Assessment*	:	*Assessment*
Penilai *Assessor*	:	PT Cita Negeri Amanah *(Subsidiary of IICD)*
Metode Penilaian *Assessment Method*	:	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 *Assessment Indicators/Parameters for GCG Implementation No. SK16 / S.MBU / 2012*
Tahun Buku Penerapan *Year of Implementation*	:	1 Januari - 31 Desember 2018 *January 1 - December 31, 2018*
Periode Pengukuran *Period of Measurement*	:	Januari 2019 - Maret 2019 *January 2019 - March 2019*
Waktu Pelaporan *Reporting Date*	:	21 Maret 2019 *March 21, 2019*

Hasil penilaian penerapan GCG Perum Jamrkindo tahun 2018 mencapai total skor sebesar 95,716 dengan kualifikasi "Sangat Baik", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The results of the assessment of the implementation of GCG at Perum Jamkrindo in 2018 reached a total score of 95,716 with a category of "Very Good". The details can be seen in the following table:

	Aspek *Aspects*	**Bobot** *Value*	**Nilai** *Score*	**Pencapaian** *Achevement* **(%)**
1		2	3	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*	7,000	6,924	98,913
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/Equity Owners*	9,000	8,957	95,519
III	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	35,000	33,355	95,301
IV	Direksi *Board of Directors*	35,000	33,351	95,289
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*	9,000	8,754	97,267
VI	Aspek Lainnya *Other Aspects*	5,000	4,375	87,500
Skor Keseluruhan ***Total Score***		**100,000**	**95,716**	**95,716**
Peringkat Kualitas Penerapan GCG ***GCG Implementation quality***			**"Sangat Baik"** ***'Very Good'***	

Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment
Classification of Quality Assessment Implementation

Nilai di atas 85 *Score above 85*	:	Sangat Baik *Very Good*
75 < Nilai ≤ 85 *75 < Score ≤ 85*	:	Baik *Good*
60 < Nilai ≤ 75 *65 < Score ≤ 75*	:	Cukup Baik *Satisfactory*
50 < Nilai ≤ 60 *50 < Score ≤ 60*	:	Kurang Baik *Poor*
Nilai ≤ 50 *Score ≤ 50*	:	Tidak Baik *Bad*

Hasil *Area of Improvement* (AOI) atau rekomendasi atas *assessment* penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun 2018, serta ada atau tidak adanya kesamaan dengan hasil *assessment* untuk tahun buku 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The results of Area of Improvement (AOI) or recommendations on the assessment of GCG implementation carried out for 2018, and the presence or absence of similarities with the results of the assessment for the 2017 fiscal year can be seen in the table below.

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*		
1	Efektivitas kegiatan diseminasi Pengendalian Gratifikasi kepada *stakeholders* belum efektif karena informasi penyampaian informasi program Pengendalian Gratifikasi pada *website* Perusahaan belum nampak jelas pada halaman pertama *website*. *The effectiveness of the Gratification Control dissemination activities to stakeholders has not been effective because the information on the dissemination of the Gratification Control program on the Company's website is not clearly visible on the first page of the website.*	x	
2	Sarana/media Perusahaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *Whistleblowing system* belum efektif dan masih perlu ditingkatkan. *The Company's facilities/media to support the implementation of the whistleblowing system policy have not been effective and still need to be improved.*	x	
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/Equity Owners*		
1	Perusahaan agar lebih meningkatkan kualitas sistem/ pedoman penilaian kinerja Direksi dengan memberikan ukuran terget kinerja yang bersifat kuantitatif (pada area yang memungkinkan) sehingga kinerja Direksi dapat diukur secara lebih presisi. *The Company is to further improve the quality of the system/ guidelines for evaluating the performance of the Board of Directors by providing quantitative performance targets (in the area that is possible) so that the performance of the Directors can be measured more precisely.*	x	

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

No	**Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018** *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	**Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017** *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	**Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017)** *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/Board of Supervisors*		
1	*Board Manual* belum dilengkapi dengan kebijakan mengenai jangka waktu pemberian tanggapan Dewan Pengawas atas rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi. *The Board Manual has not been equipped with a policy regarding the time period for giving the Supervisory Board's response to the draft of the Company's Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors.*	√	Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No: KEP-05/DP-Jamkrindo/III/2018 tanggal Maret 2018 tentang Kebijakan Dewan Pengawas Terkait Mekanisme Pemberian Persetujuan/ Tanggapan/Pendapat Terhadap Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). *The decision of the Supervisory Board of the Perum Jamkrindo number: KEP-05 / DP-Jamkrindo / III / 2018 dated March 2018 concerning the Supervisory Board Policy Regarding the Mechanism of Approval/Response/Opinion on the Design of the Company's Long Term Plan (RJPP) and Corporate Work Plans and Budget (RKAP).*
2	Kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengelolaan Perusahaan dalam *Board Manual* belum mencakup kebijakan spesifik terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya. *The Supervisory Board's policy regarding the management of the Company in the Board Manual does not include specific policies related to the function of monitoring and providing advice on the Company's risk management policies and their implementation.*	x	
3	Kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan Perusahaan belum secara spesifik mencakup kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. *The Supervisory Board's policy regarding supervision and provision of advice on the management of the Company has not specifically included the company's information technology system policies and their implementation.*	x	
4	Kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan Perusahaan belum secara spesifik mencakup ketentuan mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. *The Supervisory Board's policy regarding supervision and giving advice on the management of the Company has not specifically included provisions regarding procurement policies and their implementation.*	x	

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
5	Kebijakan Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kegiatan operasi Perusahaan belum mengatur mengenai kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya. *The Supervisory Board's policy regarding supervision and giving advice on the Company's operational activities has not regulated the quality and service policy and its implementation.*	x	
6	Perusahaan agar melakukan *improvement* terhadap *Board Manual* sehingga mencakup aturan yang jelas dan spesifik mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. *The Company must make improvements to the Board Manual so that it includes clear and specific rules regarding supervision and advisory of the Supervisory Board on the Company's compliance in implementing applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association and all agreements and commitments made by the Company with third parties as referred to in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No: SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.*	x	
7	Dewan Pengawas agar melakukan penilaian dalam proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. *The Supervisory Board must conduct an assessment in the process of appointing the subsidiaries' Directors and Board of Commissioners as referred to in the Decree of the Minister of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.*	x	

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
8	Dewan Pengawas agar melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual berdasarkan pada KPI individual yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. *The Supervisory Board must assess the performance of the Directors individually based on adequate individual KPIs as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) on SOEs.*	x	
9	Dewan Pengawas agar melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja individu Dewan Pengawas secara memadai, khususnya pada aspek Pengawasan dan Pengarahan, Aspek Pelaporan dan Aspek Dinamis. *The Supervisory Board should evaluate the achievement of individual performance of each Supervisory Board member adequately, especially in the aspects of Supervision and Guidance, Reporting and Dynamic Aspects.*	√	Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No: KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2018 tanggal Maret 2018 tentang Kebijakan Terkait Penilaian Kinerja Dewan Pengawas. *Decree of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo No: KEP-04 / DP-JAMKRINDO/III/2018 dated March 2018 concerning Policies Regarding the Performance Evaluation of the Supervisory Board.*
10	Sekretariat Dewan Pengawas agar selalu menyampaikan bahan-bahan rapat paling lambat 3 hari sebelum diadakannya rapat serta mendokumentasikan penyerahan dokumen tersebut sehingga tidak dapat dimonitor apakah dokumen telah diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakannya rapat. *The Secretariat of the Supervisory Board should always submit meeting materials no later than 3 days before the meeting and documents the submission of the documents so that they can be monitored on whether or not the documents have been submitted no later than 3 (three) days before the meeting is held.*	x	
IV	Direksi *Board of Directors*		
1	Terdapat peluang untuk dapat meningkatkan SOP proses bisnis inti tertentu, misalnya SOP terkait proses bisnis investasi. *There are opportunities to improve the SOP of certain core business processes, such as SOPs related to investment business processes.*	x	

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
2	Masih terdapat jabatan yang kosong pada akhir tahun 2018, agar Divisi MSDM segera mengisi jabatan yang kosong dengan personel yang kompeten melalui prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan *urgency* jabatan tersebut. *There were still vacant positions at the end of 2018; the HRM Division should immediately fill the vacant positions with competent personnel through the applicable procedures taking into account the urgency of the position.*	x	
3	Direksi agar menuntaskan peluang bisnis pemeringkatan UMKM sehingga dapat memperoleh manfaat bagi Perusahaan *The Board of Directors is to complete the MSME ranking business opportunity so that it can obtain benefits for the Company*	x	
4	Direksi agar menerapkan penandatanganan kontrak kinerja pada jabatan dalam struktur organisasi yang lebih luas serta menetapkan target kinerja yang pada area tertentu menunjukkan sasaran kinerja yang dapat diukur secara lebih presisi. *The Board of Directors is to apply the signing of performance contracts to broader positions in the organizational structure and to set performance targets that in certain areas show performance targets that can be measured more precisely.*	x	
5	Perusahaan menetapkan target kinerja per individu Direksi secara lebih memadai dengan menetapkan sasaran yang bersifat kuantitatif pada area-area yang memungkinkan. *The company must set the performance targets per individual of the Board of Directors more adequately by setting quantitative targets in the possible areas.*	x	
6	Direksi agar meningkatkan efektivitas teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. *The Board of Directors is to improve the effectiveness of information technology in accordance with the needs of the Company*	x	
7	Perusahaan agar melakukan berbagai upaya terkait sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan *The company is to make various efforts related to product quality and service improvement systems*	x	

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
8	Perusahaan agar melaksanakan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan seluruh rencana yang ditetapkan dalam tahun yang bersangkutan, serta menetapkan indikator kinerja individu secara konsekuen sehingga dapat memberi hasil berupa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas karyawan dan unit kerja. *The company must implement education/training policies/ programs in accordance with all plans stipulated in the year concerned, as well as establish individual performance indicators consequently so that it can give results in the form of having a significant impact on increasing employee and work unit productivity.*	x	
9	Direksi agar menetapkan: • Kebijakan yang menyebutkan bahwa Direksi dapat mencalonkan anggota Direksi dan/atau Komisaris yang mewakili perusahaan pada perusahaan patungan dan/ atau anak perusahaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, serta telah mengatur pasal pengangkatan Dekom/Dewas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dekom/Dewas dan Direksi pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. • Peraturan Perusahaan yang mengatur bahsa proses pengangkatan Pengurus Anak Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN dan OJK. • Besaran tantiem Pengurus Anak Perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang mengacu dengan formula tertentu yang didasarkan pada laba bersih dan skor KPI. *The Board of Directors must determine:* • *The policy which states that the Board of Directors can nominate members of the Board of Directors and/or Commissioners representing companies in joint ventures and/or certain subsidiaries appointed by the Minister, and have regulated the appointment of the Board of Commissioners/Directors and Directors, performance targets and performance appraisals and incentives for the Board of Commissioners/Directors and Directors at joint ventures and/or certain subsidiaries appointed by the Minister.* • *Company Regulations governing the process of appointing the Subsidiaries' Management which refers to the Minister of SOEs and Financial Service Authority Regulations.* • *The amount of tantiem of the Subsidiary of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah which refers to certain formulas based on net income and KPI score.*	x	

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
10	Direksi memanfaatkan ruang untuk dapat menerapkan standar akuntansi secara lebih berkualitas terkait dengan perkembangan terbaru lingkungan perusahaan, antara lain terkait terbitnya Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2018, serta berbagai aturan baru dari OJK. *The Board of Directors should create more opportunity to apply more quality accounting standards related to the latest developments in the Company, including related to the issuance of Government Regulation No 35 of 2018, as well as various new rules from the Financial Service Authority.*	x	
11	Direksi agar melaksanakan: • Program manajemen risiko secara efektif dan berkesinambungan sehingga hasil identifikasi risiko dapat mengakomodasi seluruh risiko yang ada dan penilaian risiko dapat mencerminkan nilai risiko yang faktual. • Pemantauan terhadap program manajemen risiko secara berkelanjutan. *The Directors must implement:* • *Risk management program effectively and continuously so that the results of risk identification can accommodate all existing risks and risk assessment can reflect the factual value of risk.* • *Continuous monitoring of risk management programs.*	x	
12	Perusahaan agar melakukan pengukuran atas hasil (*outcome*) kegiatan tanggung jawab sosial (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). *The Company is to measure the results of social responsibility activities (Partnership and Community Development Program).*	x	
13	Direksi agar dapat menghadiri seluruh rapat Direksi secara penuh, baik rapat internal Direksi maupun rapat gabungan dengan Dewan Pengawas. *The Board of Directors should be able to attend all Directors' meetings, be it internal meetings of the Board of Directors or joint meetings with the Supervisory Board*	x	

No	**Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018** *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	**Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017** *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	**Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017)** *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
14	Direksi agar memberikan arahan kepada Kepala SPI/Fungsi Audit Internal agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut: • Melakukan upaya sehingga seluruh Staf Auditor Internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal, antara lain sertifikasi audit internal yang bertaraf internasional (CRMA, CIA, dan sebagainya). • Menambah jadwal pelatihan/training thematik profesi audit internal untuk meningkatkan pengetahuan auditor, antara lain training dengan topik: menulis laporan audit yang baik, *root-caused analysis, continuous auditing*, praktik kerja RBIA, dan sebagainya. • Mengupayakan agar seluruh personel SPI memiliki kualitas yang memadai atas profesionalitasnya yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi dan pengalaman bekerjanya, termasuk sertifikasi audit internal yang bertaraf internasional (CRMA, CIA, dan sebagainya). • Melaksanakan program jaminan dan peningkatan kualitas Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern, khususnya program reviu berkala baik internal maupun eksternal. Pelaksanaan reviu berkala baik internal dapat dilakukan secara *self assesment* dengan pendampingan dari pihak yang kompeten dan independen. Reviu berkala eksternal dilakukan melalui asesmen yang dilakukan oleh pihak eksternal yang kompeten dan independen. *The Board of Directors must provide guidance to the Head of the Internal Audit Unit/Internal Audit Function to carry out the following matters:* • *Try to make all Internal Auditor Staff have the necessary knowledge and expertise by obtaining the appropriate professional certification with their positions in the Internal Auditor Function, including international standard internal audit certification (CRMA, CIA, etc.).* • *Increase the schedule of training/thematic training of the internal audit profession to increase auditor knowledge, including training on the following topics: writing good audit reports, root-cause analysis, continuous auditing, RBIA work practices, and so on.* • *Try to have all Internal Audit Function personnel to have adequate quality for their professionalism as evidenced by ownership of certification and work experience, including international standard internal audit certification (CRMA, CIA, etc.).* • *Carry out a guarantee program and improve the quality of the Internal Audit Function, which covers all aspects of the activities of the internal supervision function, especially the periodic and internal review programs. Implementation of periodic reviews both internally can be carried out by self-assessment with assistance from competent and independent parties. External periodic reviews are carried out through assessments carried out by competent and independent external parties.*	x	

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017 *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017) *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
15	Sekretaris Perusahaan agar diarahkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: • Mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat) pada seluruh risalah rapat. • Melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui laporan kegiatan dan keuangan Triwulanan dengan memasukkan seluruh informasi penting yang material secara tepat waktu. • Melakukan telaahan peraturan dan perundang-undangan baru sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan ang Baik (GCG) pada BUMN. Dalam hal telaahan peraturan dan perundang-undangan baru telah dilakukan oleh pihak independen, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menjamin kualitas kerja pihak independen tersebut. • Melakukan telaahan kepatuhan terhadap perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Dalam hal telaahan kepatuhan terhadap perundang-undangan telah dilakukan oleh pihak independen, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menjamin kualitas kerja pihak independen tersebut. *The Corporate Secretary is given guidance to carry out the following activities:* • *Record the meeting dynamics in all minutes of the meeting.* • *Report the implementation of their duties through Quarterly activity and financial reports by including all important material information in a timely manner.* • *Conduct a review of new regulations and legislation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No: SK-16/ S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs. In terms of the review of new regulations and legislation carried out by an independent party, the Corporate Secretary is responsible for ensuring the quality of work of these independent parties.* • *Conducting a review of compliance with legislation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No: SK-16/ S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs. In the event that a compliance review of the legislation has been carried out by an independent party, the Corporate Secretary is responsible for ensuring the quality of work of the independent party.*	x	

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

No	**Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018** *Results of Recommendations for GCG Implementation Assessment for 2018 Fiscal Year*	**Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017** *Included in the 2017 Recommendation for GCG Implementation Assessment for 2017 Fiscal Year*	**Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017)** *Follow-up Plan (If It Is a Recommendation for 2017 GCG Implementation Assessment)*
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*		
1	Perusahaan agar mempublikasikan berbagai dokumen tata kelola perusahaan, termasuk *Boards Manual*, Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan pada *website*. *The Company is to publish various corporate governance documents, including the Boards Manual, the Code of Conduct, and the Company's Gratification Control Program on the website.*	x	
2	Perusahaan agar mempublikasikan berbagai dokumen yang memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik khususnya tentang program peningkatan layanan kepada konsumen serta biaya yang telah dikeluarkan. *The Company is to publish various documents that contain disclosures of Good Corporate Governance practices, especially regarding service improvement programs for consumers and the costs incurred.*	x	
VI	Aspek Lainnya *Other Aspects*		
1	Perusahaan agar meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menjadi institusi terdepan dalam bisnis penjaminan di Indonesia dan akan menjadi pusat *benchmarking* nasional. *The company is to improve its performance so that it can become the leading institution in the guarantee business in Indonesia and will become the national benchmark for guarantee business*	x	

√ = Terdapat dalam rekomendasi *assessment* penerapan GCG tahun buku 2017
x = Tidak terdapat dalam rekomendasi *assessment* penerapan GCG tahun buku 2017
√ = Included in the recommendations for the GCG implementation assessment of the 2017 fiscal year
x = Not included in the recommendations for the GCG implementation assessment of the 2017 fiscal year

Terkait beberapa butir rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* penerapan GCG di Perusahaan, sebagaimana yang terlampir pada tabel di atas, meskipun ada beberapa butir yang perlu diperhatikan atau ditindaklanjuti lebih lanjut, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa, penerapan GCG di Perusahaan telah diterapkan atau berjalan dengan baik, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik Secara Berkelanjutan
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 6,924 dari bobot sebesar 7,000 atau setara dengan *prosentase* pencapaian sebesar 98,913%. Hal ini memperlihatkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, skor hasil *assessment* pada aspek ini meningkat sangat tipis, yaitu 0,00002 *point* atau meningkat 0,0003%.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS, skor yang dicapai adalah 8,957 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 99,519%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, skor hasil *assessment* pada aspek ini meningkat sebesar 0,389 *point* atau meningkat 4,543%.
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
   Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, skor yang dicapai adalah 33,355 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 95,301%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, skor hasil *assessment* pada aspek ini meningkat sebesar 1,270 *point* atau meningkat sebesar 3,959%.
4. Aspek Direksi
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah 33,351 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan *prosentase* pencapaian sebesar 95,289%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor

There were several recommendations that become the Area of Improvement of GCG implementation in the Company, as attached to the table above, although there were some items that need further attention or follow up, but in general it can be concluded that the implementation of GCG in the Company has been very good, as detailed below:

1. *Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*
   Based on the results of the assessment that has been carried out in this aspect, the score achieved is 6.924 from a total score of 7,000 or equivalent to the achievement percentage of 98.913%. This shows that the Company's commitment to implementing GCG on an ongoing basis has been "Very Good". When compared to the previous year's score, the score of the assessment results on this aspect increased slightly, which was by 0.00002 points or increased by 0.0003%.

2. *Shareholders and GMS Aspects/Equity Owners*
   Based on the results of the assessment that has been carried out on the Shareholder Aspects and the GMS, the score achieved is 8,957 from a total score of 9,000 or equivalent to the achievement percentage of 99,519%. This means that in general, the implementation of GCG in the Shareholder and the GMS Aspects has been "Very Good". When compared with the previous year's score, the score of the assessment results on this aspect increased by 0.389 points or increased by 4.543%.
3. *The Aspects of the Board of Commissioners / Supervisory Board*
   Based on the results of the assessment carried out on the Board of Commissioners/Supervisory Aspects, the score achieved was 33,355 from a total score of 35,000 or equivalent to the achievement percentage of 95,301%. This means that in general, the implementation of GCG in the Board of Commissioners/Supervisory Board Aspect has been "Very Good". When compared with the previous year's score, the score of the assessment results on this aspect increased by 1,270 points or an increase of 3.959%.
4. *The Aspect of the Board of Directors*
   Based on the results of the assessment that has been conducted on the Board of Directors Aspect, the score achieved is 33,351 from the total score of 35,000 or equivalent to the achievement percentage of 95,289%. This means that in general, the application of GCG for the Aspects of the Board of Directors has been "Very Good". When compared with the

tahun sebelumnya, skor hasil *assessment* pada aspek ini meningkat sebesar 0,925 *point* atau meningkat sebesar 2,851%.

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah 8,754 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan *prosentase* pencapaian sebesar 97,267%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, skor hasil *assessment* pada aspek ini meningkat sebesar 0,286 *point* atau meningkat sebesar 3,383%.
6. Aspek Lainnya
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Lainnya, skor yang dicapai adalah 4,375 dari bobot sebesar 5,000 atau setara dengan *prosentase* pencapaian sebesar 87,500%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Lainnya telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, skor hasil *assessment* pada aspek ini meningkat sebesar 0,375 *point* atau meningkat sebesar 9,375%.

previous year's score, the score of the assessment results on this aspect increased by 0.925 points or increased by 2.851%.

5. *The Aspects of Information Disclosure and Transparency*
   Based on the results of the assessment carried out on the Information Disclosure and Transparency Aspects, the score achieved was 8.754 from a total score of 9,000 or equivalent to the achievement percentage of 97.267%. This means that in general the implementation of GCG in the Information Disclosure and Transparency Aspects has been carried out with a "Very Good" category. When compared with the previous year's score, the score of the assessment results on this aspect increased by 0.286 points or increased by 3.383%.

6. *Other Aspects*
   Based on the results of the assessment that has been carried out on Other Aspects, the score achieved is 4,375 from the total score of 5,000 or equivalent to the achievement percentage of 87,500%. This means that in general the implementation of GCG in the Other Aspects category has been carried out with a "Very Good" category. When compared with the previous year's score, the score of the assessment results on this aspect increased by 0.375 points or increased by 9.375%.

Perjalanan *Assessment* Perum Jamkrindo

Sekilas riwayat proses penilaian penerapan GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

Perum Jamkrindo's Assessment History

A glimpse of the history of the assessment process for the implementation of the Company's GCG is as follows:

Pengukuran GCG *GCG Assessment*	**Tahun Buku** *Fiscal Year*	**Asssessor**	**Skor** *Score* **(%)**	**Kategori** *Category*
Assessment	2018	PT Cita Negeri Amanah	95,716	Sangat Baik *Very Good*
Self Assessment	2017	Tim *Self Assesment* Perum Jamkrindo *Perum Jamkrindo's Assessment Team*	92,470	Sangat Baik *Very Good*
Assessment	2016	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali *Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Public Accounting Firm*	92,120	Sangat Baik *Very Good*
Self Assessment	2015	Tim *Self Assesment* Perum Jamkrindo *Perum Jamkrindo's Assessment Team*	91,563	Sangat Baik *Very Good*
Assessment	2014	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali *Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Public Accounting Firm*	91,510	Sangat Baik *Very Good*
Self Assessment	2013	Tim *Self Assesment* Perum Jamkrindo *Perum Jamkrindo's Assessment Team*	90,080	Sangat Baik *Very Good*

Hasil *assessment* atas penerapan GCG Perum Jamkrindo periode tahun 2014-2018 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The results of the assessment of the implementation of GCG at Perum Jamkrindo for the 2014-2018 period can be summarized as follows:

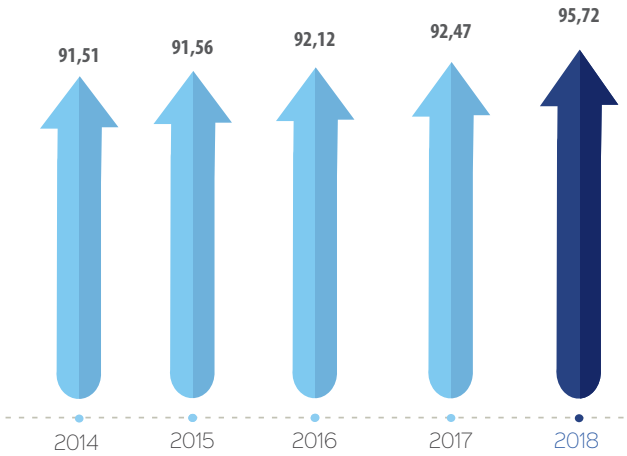
No	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter *Assessment Aspects/Indicator/Parameter*	Bobot *Value*	Capaian Tahun 2014 *Achievement of 2014*		Capaian Tahun 2015 *Achievement of 2015*	
			Skor *Score*	% Capaian *Achievement*	Skor *Score*	% Capaian *Achievement*
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan *Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*	7,00	6,96	99,35	6,95	99,35
2	Pemegang Saham dan Rups/Pemilik Modal *Shareholders and GMS Aspects/Equity Owners*	9,00	8,12	90,19	8,11	90,07
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/Supervisory Board*	35,00	31,59	90,26	31,61	90,32
4	Direksi *Board of Directors*	35,00	32,93	94,09	32,94	94,12
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Information Disclosure and Transparency*	9,00	7,91	87,9	7,95	88,32
6	Aspek Lainnya *Other Aspects*	5,00	4,00	80,00	4,00	80,00
Skor Keseluruhan *Total Score*		100,00	91,51	91,51	91,56	91,56
Klasifikasi *Classification*			"Sangat Baik" *"Very Good"*		"Sangat Baik" *"Very Good"*	

Komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip GCG dan melakukan evaluasi terhadap penerapan tersebut ditunjukkan melalui tren peningkatan skor *assessment* GCG. Melalui *assessment*, Perusahaan mendapatkan rekomendasi secara berkala, yang memungkinkan bagi Perusahaan untuk terus melakukan pembenahan baik dari infrastruktur atau perangkat GCG, hingga *softstructure* GCG yang dimiliki. Tren skor *assessment* GCG 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Company's commitment to implementing the GCG principles and evaluating the implementation is shown through the trend of increasing GCG assessment scores. Through assessment, the Company receives recommendations on a regular basis, which makes it possible for the Company to continue to make improvements from either the infrastructure or GCG instruments to the owned GCG softstructures. The trends in the GCG assessment scores for the past 5 (five) years are as follows:

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

Capaian Tahun 2016 *Achievement of 2016*		**Capaian Tahun 2017** *Achievement of 2017*		**Capaian Tahun 2018** *Achievement of 2018*	
Skor *Score*	**% Capaian** *Achievement*	**Skor** *Score*	**% Capaian** *Achievement*	**Skor** *Score*	**% Capaian** *Achievement*
6,96	99,46	6,92	98,91	6,92	98,91
8,21	91,18	8,57	95,19	8,96	95,52
32,25	92,14	32,08	91,67	33,36	95,30
32,94	94,12	32,43	92,65	33,35	95,29
7,76	86,23	8,47	94,08	8,75	97,27
4,00	80,00	4,00	80,00	4,38	87,50
92,12	92,12	92,47	92,47	95,72	95,72
"Sangat Baik" *"Very Good"*		"Sangat Baik" *"Very Good"*		"Sangat Baik" *"Very Good"*	



Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Metode Penilaian

Dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing BUMN, Kementerian BUMN memutuskan untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja BUMN berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Hal ini dituangkan melalui Surat Kementerian Negara BUMN No.S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang telah diperbaharui melalui Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan *Assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 2016.

Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence*". Penyelenggaraan Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan yang dapat dijadikan role model bagi perusahaan lain. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan kriteria Malcolm Baldrige untuk menguatkan daya saing melalui upaya:

- Meningkatkan praktik kinerja organisasi, kemampuan dan hasil.
- Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi tentang praktik terbaik di antara perusahaan-perusahaan dari semua jenis industri.
- Menyediakan sebuah alat untuk memahami dan mengelola kinerja perusahaan, juga sebagai alat untuk membimbing perencanaan dan meningkatkan pembelajaran.

Evaluasi kinerja KPKU tersebut didasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian, yaitu "Proses", dan "Hasil". Proses penerapan KPKU dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar, yaitu tahap "*Ondesk Review*" yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada respon KPKU pada tahun sebelumnya dan informasi pendukung melalui Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI; serta tahapan "*Site Visit*" ke perusahaan untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi

Assessment Criteria Of Superior Performance

Assessment Method

In order to improve the capability and competitiveness of SOEs, the Ministry of SOEs decided to implement a system of management and control of SOEs performance based on Assessment Criteria of Superior Performance (KPKU). This was stated in the State Ministry of SOEs Letter No.S-153/S.MBU/2012 dated July 19, 2012, concerning Performance Reporting Based on the updated SOEs Performance Assessment Criteria of Superior Performance (KPKU) Approach which was updated through a Letter from the Secretary of the Ministry of SOEs No. S-445/D7.MBU/10/2016 dated October 14, 2016, concerning the Implementation of the 2016 SOEs Assessment Criteria of Superior Performance (KPKU).

The Assessment System on SOEs Performance Evaluation is based on the method described in the Assessment Criteria of Superior Performance (KPKU) document as determined by the Ministry of SOEs that adopts and adapts "Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence". The implementation of the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) aims to identify a company that can be a role model for other companies. In addition, the Company also applies the Malcolm Baldrige criteria to strengthen competitiveness through the following efforts:

- *Improve the practice of organizational performance, capabilities, and results.*
- *Facilitate communication and information sharing about best practices among companies of all types of industries.*
- *Provides an instrument for understanding and managing company performance, as well as an instrument to guide planning and improve learning.*

The KPKU performance evaluation is based on 2 (two) assessment dimensions, namely "Process", and "Result". The process of implementing KPKU is carried out through 2 (two) major stages, namely the "On-desk Review" stage, or the on paper assessment based on the KPKU's response in the previous year and supporting information through the Approach, Deployment, Learning, and Integration method/system (ADLI); and the "Site-Visit" (stage) to the company for interviews and clarification of the KPKU's response to the Directors and other Senior Leaders appointed by

serta *Senior Leader* lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi. Sementara faktor yang digunakan untuk mengevakuasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level, Trend, Comparison dan Integration* (LeTCI).

the company, and verification of various data and information. While the factors used to evaluate company results are Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCI).

Kedua dimensi evaluasi, yaitu dimensi "Proses" dan dimensi "Hasil" sangat penting bagi evaluasi dan umpan balik. Berdasarkan kedua tahapan di atas kemudian disusun laporan yang berisi Skor dan Umpan Balik yang berisikan *Opportunity for Improvements* (OFI) dan Kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan perbaikan, baik proses maupun peningkatan hasil-hasil bisnis.

The two dimensions of evaluation, namely the "Process" dimension and the "Results" dimension are very important for evaluation and feedback. Based on the two stages above, a report containing Scores and Feedback that contains Opportunity for Improvements (OFI) and Company Strengths is prepared to be used as a basis for making improvements, in both the processes and business results.

Hasil skor dan kategorisasi atas penilaian penerapan KPKU adalah sebagai berikut:

The results of the score and categorization of the assessment of the implementation of KPKU are as follows:

Skala Skor *Scoring Scale*	**Kategori** *Category*
876 - 1.000	*World Class Leader*
776 - 875	*Benchmark Leader*
676 - 775	*Industry Leader*
576 - 675	*Emerging Industry Leader*
476 - 575	*Good Performance*
376 - 475	*Early Improvement*
276 - 375	*Early Result*
0 - 275	*Early Development*

Penilaian KPKU Tahun Buku 2017 dan Tindak Lanjut di Tahun 2018

Assessment of the KPKU for the 2017 Fiscal Year and its Follow-Up in 2018

Penilaian KPKU untuk tahun 2017 didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen KPKU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Di bawah ini disampaikan hasil penilaian KPKU Perusahaan tahun 2017.

The KPKU assessment for 2017 is based on the method described in the KPKU document as determined by the Ministry of SOEs. Below are the results of the Company's KPKU assessment in 2017.

Kategori *Category*	**Maksimal Skor** *Maximum Score*	**Persentase** *Percentage* **(%)**	**Skor** *Score* **(nominal)**
	(1)	(2)	(3 = 1x2)
Kategori 1: Kepemimpinan *Category 1: Leadership*			
1.1. Kepemimpinan Senior *1.1. Senior Leadership*	70	60%	42,00
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan *1.2. Community Governance and Responsibility*	50	55%	30,00
Kategori 2: Perencanaan Strategis *Category 2: Strategic Planning*			
2.1. Pengembangan Strategi *2.1. Strategy Development*	40	55%	24,00
2.2. Implementasi Strategi *2.2. Strategy Implementation*	45	60%	27,00
Kategori 3: Fokus Pelanggan *Category 3: Customer Focus*			
3.1. Suara Pelanggan *3.1. Customer Voice*	45	60%	24,75
3.2. Keterikatan (Engagement) Pelanggan *3.2. Customer Engagement*	40	55%	20,00
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan *Category 4: Measurement, Analysis, and Knowledge Management*			
4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan *4.1. Measurement, Analysis, and Improvement of Company Performance*	45	60%	27,00
4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi *4.2. Knowledge Management, Information Management, and Information Technology*	45	60%	24,75
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja *Category 5: Employee Focus*			
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja *5.1. Working Environment*	40	60%	24,00
5.2. Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja *5.2. Employee Engagement*	45	55%	27,00

Kategori *Category*	**Maksimal Skor** *Maximum Score*	**Persentase** *Percentage* **(%)**	**Skor** *Score* **(nominal)**
Kategori 6: Fokus Operasi *Category 6: Operation Focus*			
6.1. Proses Kerja *6.1. Work Process*	45	60%	24,75
6.2. Efektivitas Operasional *6.2. Operational Effectiveness*	40	55%	20,00
Kategori 7: Dimensi Hasil *Category 7: Dimensions of Results*			
7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses *7.1. Product and Process Results/Performance*	110	50%	55,00
7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan *7.2. Customer Focus Results/Performance*	85	50%	45,00
7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja *7.3. Employee Focus Results/Performance*	85	45%	48,00
7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola *7.4. Leadership and Governance Results/Performance*	80	45%	40,00
7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar *7.5. Financial and Market Results/Performance*	90	50%	54,00
Jumlah ***Total***	**1.000**		**557,25**
Kategori ***Category***		***"Good Performance"***	

Berikut disampaikan *Opportunity of improvement* dari hasil penilaian KPKU tahun 2017 yang menjadi rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut manajemen yang dilakukan di sepanjang tahun 2018.

The following is the Opportunity of Improvement from the results of the 2017 KPKU assessment which is a recommendation for improvement, and management follow-up conducted throughout 2018.

No	*Opportunity of improvement*	**Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2018** *Follow-Up as of the end of 2018*
Dimensi "PROSES" *Dimension of "PROCESS"*		
1.	Walaupun, Pimpinan senior Jamkrindo telah menetapkan cara dalam mengejawantahkan visi dan tata nilai perusahaan dalam sistem kepemimpinannya, kepada semua pekerja, pemasok utama dan mitra kerja, juga kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya yang sesuai, dengan garis besar tahapan: 1. Identifikasi pemangku kepentingan melalui data yang dimiliki. 2. Menetapkan anggaran 3. Menetapkan stakeholders yang akan menjadi objek sosialisasi/internalisasi VMT 4. Menbuat jadwal sosialisasi 5. Pelaksanaan 6. Evaluasi setelah pelaksanaan dan evaluasi pada penyusunan RKAP Sosialisasi yang telah dilakukan: 1. kepada pegawai melalui berbagai kesempatan, di antaranya distribusi *tools* Budaya TRUST sesuai surat No 208/P/4.1/2017 dan *morning briefing* yang diatur melalui surat edaran No. 49/SE/3/9/2017, dengan agenda doa, ikrar visi & misi, *empowering session*, Ikrar budaya dan yel-yel. 2. Kepada pelanggan, Pelatihan Analis Kredit *Standard* di BNI, 2017 (dalam 4 kali kesempatan); 3. Kepada Komunitas, Pelatihat Jaminan Kredit, dengan peserta para wartawan yang bertugas meliput pemberitaan ekonomi, Februari 2017 4. UMKM dan Koperasi, bersamaan dengan Pelatihan/Sosialisasi Jaminan Kredit, 2017 Namun pelaksanaannya belum konsisten, terbukti Jamkrindo belum memiliki program sosialisasi VMN TRUST kepada tenaga kerja alih daya dan vendor. Kondisi seperti ini dapat menghambat pencapaian visi dan pembangunan Nilai-nilai TRUST. *Eventhough the senior leadership of Perum Jamkrindo has established a way to manifest the company's vision and values in its leadership system to all workers, main suppliers, partners, customers, and other relevant stakeholders, with an outline of the stages:* *1. Identification of stakeholders through data owned.* *2. The setting of the budget* *3. Establishment of the stakeholders who will be the object of VMT dissemination/ internalization* *4. Making of a schedule for dissemination* *5. Implementation* *6. Evaluation after implementation and evaluation on the preparation of the Company's Work Plan and Budget* *And the dissemination that has been done:* *1. to employees through various opportunities, including the distribution of TRUST Culture instruments according to letter No 208/P/4.1/2017 and morning briefings which are regulated by circular letter No. 49/SE/3/9/2017, with the agenda of prayer, pledge of vision & mission, empowering session, cultural pledge and yells;* *2. to customers, through Standard Credit Analyst Training at BNI, 2017 (on 4 occasions);* *3. to the Community, through Credit Guarantee Training, with the participants consisting of journalists in charge of covering economic news, on February 2017* *4. to MSMEs and Cooperatives, simultaneously conducted with Credit Guarantee Training/Dissemination, in 2017* *the implementation, however, has not been consistent, it is evident that Perum Jamkrindo does not yet have a VMN TRUST dissemination program for outsourced workers and vendors. Such conditions can hinder the achievement of the vision and development of TRUST Values.*	Perusahaan telah melakukan sosialisasi visi misi TRUST saat pelatihan kepada wartawan pada bulan Februari 2017. *The company has disseminated the 'TRUST' vision and mission during training to reporters in February 2017.*

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

No	*Opportunity of improvement*	**Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2018** *Follow-Up as of the end of 2018*
2.	Walaupun JAMKRINDO telah mengumpulkan dan menganalisa data yang menyangkut faktor ketidaktahuan atau terbatasnya jangkauan penglihatan (*potential blind spot*), berdasarkan pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo No 25 dan 28 Tahun 2017, dalam proses perencanaan strategi dan dalam memperoleh informasi yang penting bagi perusahaan sebagai bagian dari perencanaan strategis dengan cara : Memperdalam Analisa SWOT melalui FGD (*Focus group Discussion*) dalam sebuah *workshop* tanggal 20 Juli 206 dengan peserta seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Divisi, Kanwil dan Kanca guna mendapat masukan yang telah tercantum dalam draft RJPP, sebelum dilakukan perumusan keuntungan strategis dan tantangan strategis, Namun cara tersebut tidak efektif, terbukti belum mampu mengidentifikasi risiko potential *blind spot* tersebut seperti terlihat dalam profil *risk* 2015-216 dan 2017 masih terdapat risiko di luar ambang batas toleransi sebanyak 19 (zona orange/tinggi) dan 1 risiko (zona merah/ ekstrem). Dengan demikian berpotensi menggangu *sustainibility* Perusahaan. *Even though JAMKRINDO has collected and analyzed data concerning factors of ignorance or potential blind spot, based on Guidelines for Risk Management Policy of Perum Jamkrindo No. 25 and 28 of 2017, in the strategic planning process and in obtaining important information for the company as part of strategic planning, by: Deepening SWOT Analysis through FGD (Focus group Discussion) in a workshop held on July 20, 2016, with participants from all work units at the Head Office, Division, Branch Office and Regional Office in order to get input to be listed in the Company's Long Term Plan draft, before the formulation of strategic advantages and challenges, this method however was not effective, as it has proven unable to identify the potential blind spot risk as seen in the risk profile of 2015, 2016, and 2017 which shown that there were still risks outside the tolerance threshold. It has been identified as much as 19 risks in the orange/high zone, and 1 risk in the red/extreme zone. Thus, it has the potential to disrupt the Company's sustainability.*	• Melakukan mitigasi risiko dengan mengoptimalkan permintaan pengajuan pendapat (opini) Manajemen Risiko dari masing-masing Unit Kerja melalui Divisi terkait. • Melakukan Komite Manajemen Risiko tingkat korporasi untuk pembahasan risiko residual diluar toleransi Perusahaan. • Melakukan pembahasan tindak lanjut profil risiko dengan Divisi terkait. • Menyusun parameter dampak dan kemungkinan dari masing-masing kategori risiko dengan bantuan Konsultan Manajemen Risiko. • *Conduct Risk mitigation by optimizing requests for submission of opinions of Risk Management from each Work Unit through the relevant Division.* • *Conduct a corporate level Risk Management Committee to discuss residual risk beyond the Company's tolerance.* • *Conduct a discussion of follow-up risk profiles with the relevant Division.* • *Arrange parameters of the impact and possibility of each risk category with the help of the Risk Management Consultant.*

No	*Opportunity of improvement*	**Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2018** *Follow-Up as of the end of 2018*
3.	Walaupun JAMKRINDO, memastikan telah menentukan persyaratan yang terpenting untuk memberikan dukungan kepada pelanggan dengan cara pendekatan melalui: 1. Melakukan kunjungan ke pelanggan. 2. Analisa persyaratan dan harapan pelanggan 3. Melakukan komunikasi dan melakukan deal marketing. 4. Menampung informasi/umpan balik pelanggan sebagai dukungan perbaikan terhadap produk & *service*. 5. Cara dan cara kunjungan pelanggan dibedakan berdasarkan segment pelanggan maupun pasar. Namun (a). pelaksanaan belum konsisten terbukti dalam tahapan analisa persyaratan dan harapan pelanggan khususnya Non KUR tidak ada bukti melakukan analisa atau pemetaan terhadap tahapan pengalaman pelanggan atau "*Mapping Customer Experience Journey*" pada setiap tahapan *Touchpoint* atau yang berpotensi menjadi pengalaman pelanggan, (b). Pelaksanaannya belum efektif, terbukti pencapaian kinerja yang tidak lebih baik dari target atau dari tahun sebelumnya terkait grafik nomor 7.2.a.(2).2.2 *Customer Acquisition* - Non KUR; grafik nomor 7.2.a.(2).5.3 *Customer Enggagement* Segmen Non KUR; grafik nomor 7.2.a.(1).4 Jumlah Keluhan / Komplain pelangga; grafik nomor 7.2.a.(1).4.1 Jumlah Keluhan / Komplain pelanggan Prosedur Pembayaran Klaim. Sehingga JAMKRINDO mengalami kesulitan untuk memberikan dukungan pelanggan secara efektif untuk mencapai pengelolaan fokus pelanggan baik saat ini maupun ke depan. *Eventhough JAMKRINDO has ensured that it has determined the most important requirements to provide support to customers through:* *1. conducting a visit to the customer.* *2. conducting an analysis of customer requirements and expectations* *3. communicating and conducting deal marketing.* *4. accommodating customer information/feedback as support for product & service improvements.* *5. differentiating the way and method of customer visits by customer and market segments.* *however, (a). the implementation has not been consistent. It has been proven that in the stages of requirements analysis and expectations of customers, especially in Non-KUR segment, there is no evidence of analyzing or mapping of customer experience or "Customer Experience Journey Mapping" at each stage of Touchpoint or what potentially could become a customer experience, and (b). the implementation has not been effective; it is proven that the performance achievement is not better than the target or from the previous year related to graph number 7.2.a. (2) .2.2 Customer Acquisition - Non-KUR; graph number 7.2.a. (2). 5.3 Customer Engagement Non-KUR Segments; graph number 7.2.a. (1) .4 Number of Complaints from customers; graph number 7.2.a. (1) .4.1 Amount of Complaints/Customer Complaints on Payment Claim Procedure. As a result, JAMKRINDO has difficulty in providing effective customer support to achieve customer focus management for the present and in the future.*	• Melakukan Sosialisasi • Melakukan Rekonsiliasi • *Conduct Dissemination* • *Reconcile*

No	*Opportunity of improvement*	**Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2018** *Follow-Up as of the end of 2018*
4.	Walaupun JAMKRINDO telah memiliki cara dalam mentransfer pengetahuan yang relevan dari dan kepada pelanggan, pemasok, mitra kerja dan kolaborator, yang dilakukan melaui tahapan : (a) Melakukan *upload* data dan informasi ke dalam web perusahaan; (b) Menginformasikan kepada pelanggan, pemasok, mitra dan kolaborator melalui media cetak dan elektronik setiap kali mencantumkan alamat perusahaan; dan melakukan *up date* data setiap bulan. Dalam pelaksanaannya didapatkan fakta, bahwa : Terlibat dalam konsultansi manajemen tentang akses pasar eksport Malaysia yang mengundang peserta dari UMKM, Asosiasi Pengusaha Makanan & minuman dan Induk Koperasi Kreasi Wanita, dengan salah satu nara sumber dari Jamkrindo. Sosialisasi juga dilakukan ke kampus-kampus. Namun, pelaksanaannya tidak konsisten terbukti tidak ada program/dokumen yang terkait dengan aktivitas transfer pengetahuan dari dan ke pemasok. Kondisi demikian berpotensi mengganggu kegiatan operasional. *Although JAMKRINDO has a way of transferring relevant knowledge to and from customers, suppliers, work partners, and collaborators, which is carried out through the following stages: (a) Uploading data and information into the Company's web; (b) Informing customers, suppliers, partners, and collaborators through print and electronic media every time they list the company's address; and updating the data every month.* *In practice, it was obtained the fact that being involved in management consultancy about access to the Malaysian export market which invited participants from MSMEs, Food & Beverage Entrepreneurs Association, and Koperasi Kreasi Wanita Parent, with one of the speakers from Jamkrindo, the dissemination was also carried out on campuses.* *The implementation, however, was not consistent; it has been proven that there were no programs/documents related to knowledge transfer activities to and from suppliers. Such conditions have the potential to disrupt operational activities.*	Telah dilakukan *business matching* dengan CGCMB Malaysia. *Business matching has been carried out with CGCMB Malaysia.*

No	*Opportunity of improvement*	**Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2018** *Follow-Up as of the end of 2018*
5.	Walaupun JAMKRINDO telah menilai kebutuhan akan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja, termasuk tingkat ketrampilan, kompetensi dan tingkat pengawakannya dengan cara; 1. Mengidentifikasi RJPP dan RKAP tentang kebutuhan akan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja yang mendukung tercapainya rencana strategis perusahaan, 2. Melakukan penyusunan standarisasi kebutuhan staf dan pejabat pada masing-masing unit kerja 3. Melakukan penyusunan direktori kompetensi di mana terdokumentasi seluruh jenis keterampilan serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan sesuai bidang tugasnya. Model kompetensi tersebut dibangun berdasarkan kajian organisasi dan SDM Perusahaan dengan landasan utama yaitu : visi, misi, rencana stratejik organisasi, struktur organisasi, *job description*, budaya organisasi dan nilai-nilai SDM, 4. Mengukur kesesuaian pemenuhan pengisian staf dan jabatan pada masing-masing unit kerja melalui analisis beban kerja 5. Mengukur kesenjangan kompetensi antara tuntutan kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki individu yang duduk atau akan duduk pada jabatan tersebut melalui asesmen 6. Melakukan mutasi jika: (a) Hasil analisa beban kerja suatu unit kerja menunjukan antara beban pekerjaan lebih sedikit dibanding tingkat pengawakannya, (b) Hasil asesmen menunjukan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan 7. Promosi sesuai dengan kebutuhan dan hasil asesmen dan abk 8. JAMKRINDO telah melakukan assesment terhadap pegawai dan Melakukan pemenuhan kebutuhan pengisian staf dan jabatan pada unit kerja juga kesenjangan atas kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan organisasi dan unit kerja. Namun system ini belum efektif, terbukti tidak bisa dijadikan acuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan unit kerja karena, mengacu kepada grafik nomor 7.3.a.(1).1. Pengisian Posisi Pekerjaan (%) menunjukan pemenuhan tidak mencapai 100% dalam tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut dapat mengakibatkan layanan dan operasional akan terganggu sehingga kepuasan pelanggan menurun *Although JAMKRINDO has assessed the need for capability and capacity of the workforce, including the level of skills, competency and level of supervision by means of:* *1. Identifying The Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget in relation to the need for capability and capacity of the workforce that supports the achievement of the company's strategic plan.* *2. Arranging the standardization of the needs of staff and officials in each work unit* *3. Making a directory of competency where all types of skills and competencies needed to carry out work according to their field of work are documented. The competency model is built based on organizational studies and Company HR, with the main foundations of vision, mission, organizational strategic plan, organizational structure, job description, organizational culture, and HR values.* *4. Measuring the suitability of staff and position in each work unit through workload analysis* *5. Measuring competency gaps between the demanded competency of the positions and the competencies possessed by the individuals who sit or will sit in these positions through assessment* *6. Performing employee mutation if: (a) The results of the analysis of the workload of a work unit show that the workload is less than the level of workmanship, (b) The results of the assessment show that there is a mismatch between the competencies possessed and the required job competencies* *7. Giving promotion in accordance with the needs and results of the assessment and ABK* *8. and the fact that JAMKRINDO has assessed its employees and fulfilled staffing and office needs in work units as well as paying attention to the gaps in the capacity and capabilities needed by organizations and work units, this system, however, has not been effective. It has been proven that the system cannot be used as a reference in fulfilling the needs of work units. Referring to graph number 7.3.a. (1) .1., regarding the percentage of Job Position fulfillment (%), it is shown that the fulfillment did not reach 100% in three consecutive years. This can result in disrupted services and operations which will lead to decreased customer satisfaction.*	Telah dilakukan pemenuhan pengisisan posisi pekerjaan per 31 Desember 2018 mencapai 98,76% (38 jabatan terisi dari 322 jabatan). Masih adanya kekosongan jabatan dikarenakanhal-hal sebagai berikut: • Adanya pejabat yang memasuki masa pensiun per 31 Desember 2018 • Adanya jabatan baru pada struktur organisasi baru *The job positions have been fulfilled as of 31 December 2018. The fulfillment has reached 98.76% (or 38 positions filled from 322 positions). There were still vacancies due to the following:* • *There were officials entering retirement period as of 31 December 2018* • *There were new positions in the new organizational structure*

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUM JAMKRINDO
THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION IN PERUM JAMKRINDO

No	*Opportunity of improvement*	**Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2018** *Follow-Up as of the end of 2018*
6.	Walaupun JAMKRINDO melakukan pengukuran kinerja proses yang berkorelasi/berujung pada dicapainya kualitas produk dan kinerja perusahaan dengan cara: • Memonitor hasil tindak lanjut atas kinerja yang belum mencapai target; • Melakukan koordinasi antar Divisi, Cabang dan Unit Kerja untuk pencapaian kinerja perusahaan; • Melakukan perhitungan Penilaian Kinerja perusahaan setiap triwulan dan tahunan. • Memberikan insentif kepada Karyawan dan Unit Kerja dengan Peringkat AA, A dan BB; Memberikan sanksi kepada Karyawan dan Unit Kerja dengan kualifikasi penilaian "Tidak Produktif". Sesuai dengan Peraturan Direksi Perum Jamkrindo No: 34/Per-Dir/IX/2014 tentang Ketentuan dan Tata Car Penilaian Kinerja Perusahaan dan Unit Kerja dalam Rangka Pemberian Insentif kepada Karyawan dan Unit Kerja. Namun, deployment nya tidak konsisten. Terbukti pada permohonan Klaim No B-414-KCXV/AMU/09/2016 diterima tanggal 2 November 2016, Berita Acara Klaim tanggal 2 September 2016 (BRI terjamin). Persetujuan tanggal 23 Oktober dan Pembayaran tanggal 31 Oktober. Kelengkapan Dokumen belum ada tanggal, yang menyebabkan SLAnya tidak dapat diukur. Hal ini dapat menyebabkan JAMKRINDO kesulitan dalam mencapai Misi Perusahaan yaitu Dharma Kedua: Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas *Although JAMKRINDO has measured the process performance that correlates/leads to the achievement of product quality and company performance by:* • *Monitoring the results of follow-up on the performance that has not reached the target;* • *Coordinating between Divisions, Branches, and Work Units to achieve company performance;* • *Calculating company performance appraisals quarterly and yearly.Providing incentives to employees and work units with AA, A and BB ratings;* • *Imposing sanctions on Employees and Work Units with "Non-productive" assessment qualifications in accordance with the Directors Regulation of Perum Jamkrindo No. 34/Per-Dir/IX/2014 concerning Provisions and Procedures for Evaluating Company and Work Unit Performance in relation to Incentives provisions to Employees and Work Units.* *the deployment, however, has not been consistent. This is evidenced in the claim number B-414-KCXV / AMU / 09/2016 received on November 2, 2016, the Minutes of Claim on September 2, 2016 (BRI guaranteed). Agreement dated October 23 and Payment on October 31. In that claim, the document has no date, which causes the SLA not to be measured. This can cause JAMKRINDO difficulties in achieving the Company's Mission, namely the Second Dharma: Providing extensive and quality services*	• Telah menyampaikan surat terkait *Monitoring* dan Evaluasi Beban Klaim Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat arahan tentang melakukan proses klaim kepada Kepala Kantor Wilayah Selindo dan KCK untuk diteruskan ke tiap-tiap cabang • Telah mengajukan permohonan kepada Divisi TI untuk pengembangan sistem aplikasi klaim *online* KURGen 2, Kupedes rakyat dan BRIguna serta mandatory penginputan tanggal berkas lengkap sehingga sistem aplikasi tidak dapat menerima submit pengguna pada form persetujuan klaim sebelum data tanggal berkas diinput terlebih dahulu. • Telah menyampaikan surat terkait ketentuan permintaan kelengkapan berkas klaim atas pengajuan klaim yang diajukan oleh Mitra atas berkas klaim yang belum lengkap kepada Kepala Kantor Wilayah Selindo dan KCK untuk diteruskan ke tiap-tiap cabang. • Telah menyampaikan surat terkait penyelesaian proses klaim yang di dalamnya terdapat penyampaian pembayaran klaim yang belum sesuai ketentuan dan langkah-langkah terkait hal tersebut. • Pembayaran Klaim dilakukan secara sentralisasi di Kantor Wilayah/Kantor Pusat yang mewajibkan Kantor Cabang untuk melampirkan bukti input data dan keputusan klaim di sistem aplikasi, sehingga ketidaksesuaian timeline data tanggal dapat di minimalisir dan SLA dapat lebih terukur. • *A letter related to the Monitoring and Evaluation of Claims Load in 2018, in which there are directives on making claims processes, has been submitted to the Head of the Selindo Regional Office and KCK to be forwarded to each branch* • *An application has been submitted to the IT Division for the development of an online claim application system KURGen 2, Public Kupedes and BRIguna as well as a mandatory inputting date for complete files so that the application system cannot accept user submissions on claim approval forms before the data file date is inputted first.* • *A letter regarding the provisions of the request for completeness of the claim file for filing a claim submitted by the Partner for the incomplete claim file has been submitted to the Head of the Selindo Regional Office and KCK to be forwarded to each branch.* • *A letter regarding the settlement of the claim process has been submitted. In which, there is a submission of payment of claims that are not in accordance with the provisions and steps related to this matter.* • *Claim payment has been centralized at the Regional Office/Head Office which requires the Branch Office to attach input data evidence and claim decisions in the application system so that the incompatibility of the timeline data can be minimized and the SLA can be more measurable.*

No	*Opportunity of improvement*	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2018 *Follow-Up as of the end of 2018*
Dimensi "HASIL" *Dimension of "RESULT"*		
7.	Walaupun JAMKRINDO telah melaporkan 247 (91.8 %) dari 269 Indikator yang harus dilaporkan. Namun terdapat sebanyak: • 52 (19.3%) data level kinerjanya memburuk (poor) dibandingkan tahun sebelumnya. • 57 (21.2%) data memiliki kecenderungan memburuk selama tiga tahun terakhir, terdiri dari 20 (35.1 %) indikator *Unfavourable*, 9 (15.8 %) *Advers* dan 28 (49 %) No *Trend* • 32 (11.9%) *lagging* terhadap pembanding, 126 (46.8%) tidak disertai pembanding, • 60 (22.3%) data tidak ada proyeksinya, 22 (8.2%) kekurangan data • 22 (8.2%) tidak ada segmentasi. *Although JAMKRINDO has reported 247 (91.8%) of the 269 indicators that must be reported, there are:* • *52 (19.3%) data which shows deteriorating levels of performance (poor) compared to the previous year.* • *57 (21.2%) data that shows a tendency to deteriorate over the past three years, consisting of 20 (35.1%) indicators of Unfavorable, 9 (15.8%) Adverse, and 28 (49%) No Trend* • *32 (11.9%) data were lagging against comparators, and 126 (46.8%) were not accompanied by a comparison* • *60 (22.3%) data had no projections, and 22 (8.2%) data were lacking, and* • *22 (8.2%) data had no segmentation.*	Tidak memerlukan tindak lanjut, karena kategori hasil menjelaskan laporan hasil asesmen Jamkrindo. *Follow-up was not necessary because the results category explains the report on the Jamkrindo assessment results.*

Penilaian KPKU Tahun Buku 2018-2019

Penilaian sebagai evaluasi atas implemetasi KPKU tahun 2018-2019 dilaksanakan berdasarkan surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. S-08/D7.MBU/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Asesmen Implementasi KPKU BUMN Tahun 2019. Butir 2. Dan 4a; serta surat edaran dari Forum Ekselen BUMN (FEB) No. FEB-068.ASS.II.2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Ketentuan Asesmen KPKU BUMN Tahun 2019. Dalam Surat ini disebutkan bahwa asesmen mengacu pada Buku KPKU Tahun 2017.

Proses Evaluasi KPKU tahun 2018 melalui 2 (dua) tahapan besar yaitu tahap "Ondesk Review" yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada respon KPKU tahun 2017 dan informasi pendukung ADLI. Tahap berikutnya adalah "Site Visit" ke Perusahaan untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi Perusahaan serta Senior Leader lainnya yang ditunjuk oleh Perusahaan serta verivikasi berbagai data dan informasi.

The Assessment of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) for the 2018 - 2019 Fiscal Year

The assessment as an evaluation of the implementation of the Superior Performance Assessment Criteria in 2018 - 2019 was carried out based on a letter from the Deputy of Business Infrastructure in the Ministry of SOEs No. S-08/D7.MBU/01/2019 dated January 23, 2019, concerning Implementation of Assessment of the Implementation of Superior Performance Assessment Criteria in SOEs in 2019 point number 2 And 4a; and a circular from the 'Forum Ekselen BUMN' (FEB) No. FEB-068.ASS.II.2019 dated February 19, 2019, concerning the provision on the Assessment of SOEs' Superior Performance Assessment Criteria in 2019. In this Letter, it is stated that the assessment refers to the 2017's Superior Performance Assessment Criteria Book.

The Evaluation Process of Superior Performance Assessment Criteria in 2018 was conducted through 2 (two) major stages, namely the "On-desk Review" stage, or on-paper assessment based on the 2017 Superior Performance Assessment Criteria's response and ADLI supporting information. The next stage is the "Site Visit" to the Company for interviews and clarification of the Superior Performance Assessment Criteria's response towards the Company's Directors and other Senior Leaders appointed by the Company and verification of various data and information.

Berdasarkan hal tersebut semua di atas selanjutnya disusun Laporan yang berisi Skor dan Umpan Balik yang berisikan OFI (*Opportunity for Improvements*) dan Kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan *improvement* baik proses maupun *improvement* hasil-hasil bisnis.

Based on all of the above, a report that contains scores and feedback which contains OFI (Opportunity for Improvements) and Company Strengths is compiled to be used as a basis for improving both processes and improving business results.

Mengenai Tim *Evaluator* mengacu pada surat Kementerian BUMN No. S-08/D7.MBU/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Asesmen Implementasi KPKU BUMN Tahun 2019 ditetapkan minimal terdiri dari 5 (lima) orang *Evaluator* yang telah memiliki sertifikat *Evaluator* KPKU serta dapat terdiri dari seluruhnya berasal dari eksternal BUMN atau kombinasi dengan melibatkan minimal 1 (satu) orang dari eksternal BUMN. Penugasan terhadap *evaluator* dengan melibatkan *evaluator* dari BUMN lain .

In relation to the Evaluator Team, it refers to the letter from the Ministry of SOEs No. S-08 / D7.MBU / 01/2019 dated January 23, 2019, concerning the Implementation of Assessment of the Implementation of Superior Performance Assessment Criteria in SOEs in 2019. Based on that it has been stipulated that the evaluator team must at least consists of 5 (five) Evaluators who already have the Superior Performance Assessment Criteria Evaluator certificate and can consist entirely of external parties or a combination of at least 1 (one) person from an external party. Assignment to evaluator involves evaluators from other SOEs.

Pelaksanaan Evaluasi KPKU *KPKU Evaluation Date*	:	27 April - 4 Mei 2019 *April 27 - May 4, 2019*
Evaluator	:	Faisal Arif; PT Sucofindo (Persero); Penanggung Jawab Kategori: Lead: Kat 1 , 4.1 dan 7.4 *(PIC of categories: Lead: Cat. 1, 4.1, and 7.4)* Ida Bagus Putu Aditya; PT Inti (Persero); Penanggung Jawab Kategori: Member: Kat. 2 ,4.1 dan 7.5 *(PIC of categories: Member: Cat. 2,4.1, and 7.5)* Yana Suryana; Perum Jamkrindo; Penanggung Jawab Kategori: Member: Kat. 3 dan 7.2 *(PIC of categories: Member: Cat. 3 and 7.2)* Dessy Kencana Widdi; PT PLN (Persero); Penanggung Jawab Kategori: Member: Kat. 5 dan 7.3 *(PIC of categories: Member: Cat. 5 and 7.3)* Dodo Rianto Wibowo; Perum Jamkrindo; Penanggung Jawab Kategori: Member: Kat. 6 dan 7.1 *(PIC of categories: Member: Cat. 6 and 7.1)*
Lokasi Pelaksanaan Evaluasi *Location of Evaluation*	:	Kantor Pusat Perum Jamkrindo Kunjungan Lapangan: Perum Jamkrindo Cabang Yogyakarta Perum Jamkrindo – Cabang Surabaya *Perum Jamkrindo Head Office* *Field Visits:* *Perum Jamkrindo Yogyakarta Branch* *Perum Jamkrindo - Surabaya Branch*

Hasil evaluasi KPKU tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut: *The results of the 2018-2019 KPKU evaluation are as follows:*

Kategori *(Category)*	**Maksimal Skor** *(Maximum Score)*	**Persentase** *Percentage (%)*	**Skor** *(nominal score)*
	(1)	**(2)**	**(3 = 1x2)**
Kategori 1: Kepemimpinan *(Category 1: Leadership)*			
1.1. Kepemimpinan Senior *(1.1. Senior Leadership)*	70	60%	42,00
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan *(1.2. Community Governance and Responsibility)*	50	60%	30,00
Kategori 2: Perencanaan Strategis *(Category 2: Strategic Planning)*			
2.1. Pengembangan Strategi (2.1. Strategy Development)	45	65%	29,25
2.2. Implementasi Strategi *(2.2. Strategy Implementation)*	40	65%	26,00
Kategori 3: Fokus Pelanggan *(Category 3: Customer Focus)*			
3.1. Suara Pelanggan *(3.1. Customer Voice)*	40	55%	22,00
3.2. Keterikatan (Engagement) Pelanggan *(3.2. Customer Engagement)*	45	55%	24,75
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan *(Category 4: Measurement, Analysis and Knowledge Management)*			
4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan *(4.1. Measurement, Analysis, and Improvement of Company Performance)*	45	60%	27,00
4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi *(4.2. Knowledge Management, Information Management, and Information Technology)*	45	55%	24,75
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja *(Category 5: Workforce Focus)*			
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja *(5.1. Working Environment)*	40	60%	24,00
5.2. Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja *(5.2. Employees Engagement)*	45	55%	24,75
Kategori 6: Fokus Operasi *(Category 6: Operation Focus)*			
6.1. Proses Kerja *(6.1. Work Process)*	45	55%	24,75
6.2. Efektivitas Operasional *(6.2. Operational Effectiveness)*	40	55%	22,00
Kategori 7: Dimensi Hasil *(Category 7: Dimensions of Results)*			

Kategori *(Category)*	**Maksimal Skor** *(Maximum Score)*	**Persentase** *Percentage (%)*	**Skor** *(nominal score)*
	(1)	**(2)**	**(3 = 1x2)**
7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses *(7.1. Product and Process Results/Performance)*	120	55%	66,00
7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan *(7.2. Customer Focus Results/Performance)*	80	55%	44,00
7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja *(7.3. Workforce Focus Results/Performance)*	80	55%	44,00
7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola *(7.4. Leadership and Governance Results/Performance)*	80	55%	44,00
7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar *(7.5. Financial and Market Results/Performance)*	90	55%	49,50
Jumlah ***Total***	**1.000**		**568,75**
Kategori *(Category)*	"Good Performance"		

Opportunity For Improvement paling signifikan untuk dapat ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dimensi "PROSES"
   a. Kepemimpinan (1.1.c.1.2.2)
      Walaupun Pimpinan Senior Jamkrindo menumbuhkan pembelajaran organisasi, pembelajaran pekerja pada umumnya, serta pembelajaran untuk pengambilan risiko secara cerdas melalui mekanisme
      i. Pengelolaan SDM sesuai *Best Practise* : Sistem Penilaian Kinerja Karyawan (KPI Individu), Sistem *Reward and Punishment,* Sistem Remunerasi (*Job & Person Grade*), Sistem Rekrutmen dan *Talent Management*
      ii. Internalisasi Budaya Perusahaan (TRUST)
      iii. Program *training Development*
      iv. Optimalisasi Produktifitas karyawan melalui *Gap* analis Kompetensi
      v. Membudayakan *Risk Manajemen* baik di unit operasional , perencanaan, Pengelolaan SDM , Penjualan jasa , pengadaan dll sebagai asas kesuksesan dan *prudence* (Kehati-hatian)

Divisi MSDM sebagai pengelola pengembangan SDM sebagai asset perusahaan secara konsisten menyempurnakan program internalisasi di atas sehingga mampu terdeliver ke setiap insan Jamkrindo, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektifitas pengembangan SDM.

The most significant Opportunity For Improvement to be followed up in the next stage is as follows:

1. *Dimensions of "PROCESS"*
   a. *Leadership (1.1.c.1.2.2)*
      Eventhough Jamkrindo's Senior Leaders foster organizational learning, general worker learning, and smart learning for risk taking through the following mechanisms
      i. *HR Management in accordance with Best Practices: Employee Performance Assessment System (Individual KPI), Reward and Punishment System, Remuneration System (Job & Person Grade), Recruitment System and Talent Management*
      ii. *Internalization of Corporate Culture (TRUST)*
      iii. *Development training program*
      iv. *Optimizing employee productivity through Gap Competency analysts*
      v. *Cultivating Risk Management both in the operational, planning, HR management, sales services, procurement unit etc. as a principle of success and prudence*

And the fact that the HRM Division as the manager of the development of HR, as the Company asset, consistently improves the above internalization program so that it can be delivered to every Jamkrindo employee, and evaluation is carried out to measure the effectiveness of HR development.

Namun pemetaan *Training development* belum inline dengan *core competence* Jamkrindo serta belum dilakukan pengukuran efektifitas dari program *Best Practice* (COP, *Transfer Knowledge*) , serta hasil pengukuran yang tercermin dari Grafik 7.3.a.1.3 Produktifitas Pegawai (Juta Rp) Menunjukkan kinerja yang kurang baik dengan *trend* yang menurun signifikan setiap tahunnya (*Level Poor : Trend : Advers*), Grfaik 7.3.a.3.4 Pencapaian Kinerja Tenaga Kerja, Sesuai klasifikasi yang ditetapkan (%) Grafik 7.4b.13 Peta Risiko Bidang Pasar (*High*) Grafik 7.4b.14 Peta Risiko Bidang Pasar (*Extreme*) Grafik 7.4b.17 Peta Risiko Bidang Likuiditas (*High*) Grafik 7.4b.18 Peta Risiko Bidang Likuiditas (*Extreme*) Grafik 7.4b.25 Peta Risiko Bidang Hukum (*High*) Grafik 7.4b.26 Peta Risiko Bidang Hukum (*Extreme*) Grafik 7.4b.29 Peta Risiko Bidang Reputasi (*High*) Grafik 7.4b.30 Peta Risiko Bidang Reputasi (*Extreme*)) menunjukkan kinerja yang kurang baik dengan trend yang cenderung menurun (*Level Poor : Trend Unfavorable*). Hal tersebut berdampak pada tidak efektifnya program pengelolaan SDM sebagai asset perusahaan. Belum selaras dalam membangun core *competence* Jamkrindo dan *Core Values Valuing People* dan *Visionary Leadership*.

The mapping of development training, however, has not been in line with Jamkrindo's core competence and the effectiveness of the Best Practice (COP, Transfer Knowledge) program has not been carried out, and the measurement results reflected in Graph 7.3.a.1.3 Employee Productivity (IDR. Million) shows poor performance with a significant downward trend every year (Poor Level: Trend: Adverse). In addition, Graph 7.3.a.3.4, Achievement of Workforce Performance, in accordance to the classification determined (%), Graph 7.4b.13 Risk Map in the Field of Market (High), Graph 7.4b.14 Risk Map in the Field of Market (Extreme), Graph 7.4b.17 Risk Map in the Field of Liquidity (High), Graph 7.4b.18 Risk Map in the Field of Liquidity (Extreme), Graph 7.4b.25 Risk Map in the Field of Legal (High), Graph 7.4b.26 Risk Map in the Field of (Extreme), Graph 7.4b.29 Risk Map in the Field of Reputation, and Graph 7.4b.30 Risk Map in the Field of Reputation (Extreme), shows poor performance with a downward trend (Level Poor: Trend Unfavorable). This has an impact on the ineffectiveness of the management of HR as a Company's asset. This was not yet aligned with the building of Jamkrindo's core competencies and Core Values of Valuing People and Visionary Leadership.

b. Perencanaan Strategis (2.2.a.4.2)
   Walaupun Pimpinan Senior Jamkrindo telah mengatasi dampak potensial terkait dengan ketersediaan tenaga kerja di perusahaan, juga potensi perubahan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja. Mekanismenya diatur dalam Perdir No 16 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Perdir No: 44/Per-Dir/XI/2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi RKAP Berbasis Risiko Perum Jamkrindo yang meliputi:

   - Menetapkan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan program.
   - Menentukan kompetensi yang diperlukan oleh setiap tenaga kerja
   - Menganalisa gap antara kebutuhan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja
   - Menyusun program terkait dengan pemenuhan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja.

Divisi Perencanaan Strategis sebagai penanggung jawab pengelolaan perencanaan strategis berkoordinasi dengan Divisi MSDM untuk melakukan mapping formasi untuk jabatan manajerial dan *staffing* yang disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan, yang tersirat dalam RJPP dan RKAP.

b. *Strategic Planning (2.2.a.4.2)*
   Eventhough Jamkrindo's Senior Leaders have overcome the potential impact associated with the availability of workforce in the Company and the potential for other changes related to the capability and capacity of the workforce, the mechanism of which is regulated in Directors' Regulation No 16 of 2013 concerning Guidelines for Preparation of Long-Term Plans, and Directors' Regulation No: 44/Per-Dir/XI/2014 concerning Standard Operating Procedure (SOP) for Preparation, Implementation, and Evaluation of Perum Jamkrindo's Risk-Based Risk Management RKAP which includes:

   - *The establishment of the workforce's requirements needed to implement the program.*
   - *The establishment of the competencies needed by each workforce*
   - *An analysis of the gap between the capacity and capability requirements of the workforce, and*
   - *Development of programs related to meeting the capacity and capability of the workforce.*

And the fact that the Strategic Planning Division as the person in charge of strategic planning management coordinated with the HRM Division to map formations for managerial and staffing positions that are tailored to the Company's business processes, which are implied in the RJPP and RKAP.

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dari perencanaan tenaga kerja ke depan.

Namun, belum efektif terbukti belum melakukan pengukuran efektivitas RJPP dan RKAP terhadap formasi tenaga kerja. Sehingga Jamkrindo akan mengalami kesulitan untuk menyusun formasi tenaga kerjanya sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan. Hal tersebut menunjukkan Jamkrindo belum selaras dengan perspektif kesisteman dan *valuing people*.

c. Fokus Pelanggan (3.1.a.1.3)
Walaupun Jamkrindo telah menggunakan metode mendengarkan pelanggan yang beragam di seluruh siklus hidup pelanggan (*customer life cycle*) dengan mekanisme :
- Menentukan segment pelanggan yang akan digali informasinya:
  - » Pelanggan KUR
  - » Pelanggan Non KUR
- Menentukan dan mendefinisikan tahapan, periode waktu dan atribut siklus hidup pelanggan baik pelanggan KUR maupun Non KUR.
- Menentukan cara dan media mendengarkan pelanggan dari masing masing tahapan siklus hidup pelanggan. Misalnya melalui pertemuan pelanggan untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk kemudian meyeleksi umpan balik yang bisa ditindak lanjuti.
- Melaksanakan cara mendengarkan pelanggan baik pelanggan KUR maupun Non KUR sesuai tahapan siklus hidup pelanggan.
- Melakukan Evaluasi terhadap efektifitas tindak lanjut dari hasil mendengarkan pelanggan baik KUR maupun Non KUR. Menentukan pelanggan yang akan digali informasinya.

Namun, pelaksanaan tersebut belum konsisten diterapkan secara menyeluruh terbukti butir 3, 4, dan 5 khusus terkait pelanggan NON KUR belum dilaporkan bukti hasil penerapannya dan belum melakukan pengukuran efektifitas terhadap mendengarkan pelanggan berdasarkan segmen persepsi positik dan negatif (komplain), hal tersebut berdampak Jamkrindo akan kesulitan untuk mengetahui persyaratan dan harapan pelanggan, sehingga Jamkrindo tidak optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta belum selaras dengan misi Jamkrindo pada dharma kedua "memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas".

Evaluation is carried out to measure the effectiveness of future workforce planning.

However, it has not been proven effective in measuring the effectiveness of the Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget on workforce formation. As a result, Jamkrindo will experience difficulties in compiling its workforce formation in accordance with the Company's strategic planning. This shows that Jamkrindo's practice on this is not yet aligned with the systemic perspective and valuing people.

c. *Customer Focus (3.1.a.1.3)*
Eventhough Jamkrindo has used a variety of way to pay attention to the customer's voice throughout the customer life cycle with the following mechanism:
- *Determining the customer's segment whose information will be excavated, which are:*
  - » *People's Business Credit (KUR) customer*
  - » *Non-People's Business Credit (Non-KUR) customer*
- *Determining and defining the stages, time periods, and customer life cycle attributes of both KUR and Non KUR customers.*
- *Determining the method and media to listen to customers' voice from each stage of the customer's life cycle, for example, by meeting with customers to gather feedback from customers to then select the feedback that can be followed up.*
- *Carrying out ways to listen to customers' voice, be it KUR and Non KUR customers, according to the customer's life cycle stages, and*
- *Evaluating the effectiveness of follow-up from the results of listening to the voice of both KUR and Non KUR customers.*

The implementation, however, has not been consistently applied as proven by points 3, 4 and 5 which are specifically related to Non-KUR customers whose results of application have not been reported evidence and the measurement of the effectiveness of listening to customers based on the positive and negative perceptual segments (complaints) has not been implemented. This will make it difficult for Jamkrindo to know customer requirements and expectations, so Jamkrindo cannot be optimal in providing the best service to customers. In addition, this finding confrims the non-alignment with the second dharma in Jamkrindo's mission which is "to provide extensive and quality service ".

d. Pengukuran Kinerja (4.1.a.3.1)
Walaupun Pimpinan Senior Jamkrindo telah memilih/ memperoleh data dan informasi suara pelanggan dan calon pelanggan (pasar), salah satunya diatur dalam Surat Edaran Nomor: 36/SE/3/VI/2017 tentang Pedoman Layanan *Call Center* Perum Jamkrindo, yang meliputi :
- Penyediaan Informasi Produk Penjaminan
- Penerimaan aduan pelanggan (keluhan)
  - » Menerima permasalahan dan informasi dari penelepon.
  - » Menerima dan mengolah informasi, melakukan verifikasi, meneruskan permasalahan dan menyampaikan informasi atau hasil aduan kepada atasan.
  - » Membuat laporan harian yang dilaporkan kepada atasan.
- Koordinasi dan monitor seluruh kegiatan call center sesuai ketentuan.
- Memeriksa dan menindaklanjuti hasil laporan call center.

Divisi Jaringan dan Layanan bertanggung jawab melakukan koordinasi, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan melaksanakan kegiatan call center untuk memastikan pelayanan tersebut telah dilaksanakan dengan benar sesuai tujuan yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku serta mendukung pencapaian peningkatan performa pelayanan terbaik.

Namun, belum efektif diterapkan pada perusahaan, terbukti belum dapat menunjukkan efektivitas pengukuran layanan call center, dan seperti ditunjukkan pada Grafik 7.2.a.3.6 Jumlah Keluhan Pelanggan yang mengalami peningkatan. Sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan "*Strengthen The Process*" dari perusahaan, serta pembelajaran dan kelincahannya.

e. Pembelajaran Organisasi (4.2.b.1.1)
Walaupun Pimpinan Senior Jamkrindo membangun dan mengelola pengetahuan organisasi melalui mekanisme
- Himbauan ke Unit Kerja apabila ada inisiatif terkait sharing *knowledge* (FGD) untuk memberikan atau melakukan *sharing* dengan di fasilitasi oleh Dept Pengembangan MSDM.
- Membuat aplikasi *database* dari seluruh literatur *knowledge* dari seluruh kegiatan training dan FGD sehingga mudah diakses kepada seluruh karyawan.

d. Performance Measurement (4.1.a.3.1)
Eventhough Jamkrindo's Senior Leaders have selected/ obtained the customer's and prospective customer's (market) data and information, one of which is regulated in Circular Number: 36/SE/3/VI/2017 concerning Perum Jamkrindo's Call Center Service Guidelines, which include:
- *Provision of Guarantee Product Information*
- *Acceptance of customer complaints*
  - » *Receive problems and information from callers.*
  - » *Receive and process information, verify, forward problems and submit information or results of complaints to superiors.*
  - » *Make daily reports reported to superiors.*
- *Coordination and monitoring of all call center activities in accordance with the provisions.*
- *Check and follow up on the results of the call center report.*

And the fact that the Network and Service Division as the party responsible for coordinating, planning, supervising, evaluating and carrying out call center activities to ensure that the service has been carried out correctly in accordance with the stated objectives and applicable regulations and supports the achievement of improved service performance.

However, it has not been effectively applied to the Company. It has been proven to not be able to show the effectiveness of measuring call center services as shown in Graph 7.2.a.3.6 which shows the increase in the number of Customer Complaints. This can affect the implementation of "Strengthen The Process" of the Company, as well as its "learning and agility".

e. Organizational Learning (4.2.b.1.1)
Eventhough Jamkrindo's Senior Leaders build and manage organizational knowledge through the following mechanisms
- *Appeal to the Work Unit if there are initiatives related to knowledge sharing (FGD) to provide or conduct sharing facilitated by the HRM Development Dept.*
- *Create a database application from all the knowledge literature from all training activities and FGD so that it is easily accessible to all employees.*

- Menyusun kajian-kajian transformasi knowledge yang terintegrasi yang dilaksanakan oleh divisi SDM dan diletakkan dalam KM Portal sehingga mudah diakses oleh seluruh Insan Jamkrindo

Pemilik proses di atas adalah Departemen Pengembangan MSDM sebagai penganggungjawab proses, bahwa proses transformasi *knowledge* di implementasikan dengan baik di seluruh Dept yang ada di Jamkrindo dengan mekanisme Departemen Pengembangan MSDM yang mengundang dan memfasilitasi partisan dari seluruh unit kerja untuk berbagi pengetahuan. Evaluasi dilakukan berdasarkan respon kusioner dari partisan yang *outputnya* menjadi acuan peningkatan kegiatan *Transfer Knowledge* yang akan datang.

Namun, terbukti belum efektif hal tersebut tercermin belum dilakukan pengukuran tingkat efektifitas kajian dari pembelajaran menjadi acuan literature yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja perusahaan serta belum dilakukan pengukuran seberapa besar materil sharing *Knowledge* menjadi literature yang tersimpan dalam aplikasi Portal KM. Hal ini berdampak sulitnya membangun efektifitas dari Pemelajaran karyawan sebagia bagian dari pengembangan pengetahuan dan kompetensi Tenaga kerja Jamkrindo. Sehingga belum selaras dengan *Core Values organizational learning and agility.*

f. (5.2.b.3.3)
Walaupun Jamkrindo telah melakukan kaderisasi (succession planning) untuk posisi managerial dan pimpinan dengan tahapan :

Mengacu pada Peraturan Direksi No.04/Per-Dir/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang SOP Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Rsiko Perum Jamkrindo, yang menjelaskan tentang proses *asessment* untuk kandidat pejabat yang dipersiapkan. Penetapan kandidat berdasarkan evaluasi kinerja dan kamus kompetensi serta disahkan oleh KOMITE DIREKSI sesuai dengan kewenangannya
Mapping formasi jabatan diselaraskan dengan struktur organisasi termutakhir yang tercantum pada Peraturan Direksi No. 01/KD/I/V/2008 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perum Jamkrindo.

Divisi MSDM sebagai penanggungjawab proses dari rekrutmen pejabat dan pegawai secara terpusat (tertutup) untuk seluruh formasi pejabat di area Kantor Pusat, Kanwil dan Cabang. Hssil *asessment* dilaporkan kepada Direksi untuk diterbitkan Perdir Penetapan Jabatan.

- *Develop integrated knowledge transformation studies carried out by the HR division and placed in the KM Portal so that it is easily accessible to all Jamkrindo Personnels*

And the fact that the PIC for the process above is the HRM Development Department and the knowledge transformation process is well implemented in all Departments of Jamkrindo with the mechanism of the HRM Development Department that invites and facilitates partisans from all work units to share knowledge, and evaluation is based on a questionnaire response from partisans whose output is a reference for increasing future Knowledge Transfer activities.

However, it has proven to be ineffective as reflected in the fact that the effectiveness of the study of learning has not been measured as a reference for literature that is useful for improving Company performance and has not yet measured how much Knowledge Sharing material has become literature stored in the KM Portal application. This has an impact on the difficulty of building the effectiveness of employee learning as part of developing the knowledge and competence of the Jamkrindo Workforce. This also shoes the non-alignment with the Core Values of organizational learning and agility.

f. *(5.2.b.3.3)*
Eventhough Jamkrindo has carried out succession planning for managerial positions and leaders with the following stages:

Referring to Board of Directors Regulation No. 04/Per-Dir/X/2011 dated October 10, 2011, concerning Rsiko-Based Human Resource Management (HR) SOP Jamkrindo, which describes the assessment process for prepared candidate officials, the determination of candidates is based on performance evaluation and dictionary of competencies and authorized by the BOARD OF DIRECTORS COMMITTEE in accordance with their authority, and
The mapping of position formations is aligned with the latest organizational structure listed in Directors Regulation No. 01/KD/ I/V/2008 dated May 30, 2018, concerning the Organizational Structure of Perum Jamkrindo, and

HRM Division is responsible for the process of centralized (closed) recruitment of officials and employees for all official formations in the Head Office, Regional Office, and Branch areas, and the results of the Assessment are reported to the Board of Directors for the issuance of Directors' Regulation on Position Determination.

Namun, mekanisme di atas belum sistematis terbukti Jamkrindo belum memiliki aturan pengembangan karier SDM atau SOP jalur karier (*Career Path*). Jamkrindo belum menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas untuk proses pemenuhan formasi pejabat yang dapat langsung diakses oleh pegawai. Hal tersebut berdampak pada persepsi negatif karyawan terhadap Jamkrindo yang dibuktikan dengan grafik 7.3a(2) *Turn Over* Pegawai yang menunjukkan kinerja yang kurang baik dengan tren yang menurun setiap tahun dan tingkat efektivitas promosi yang belum dipetakan sehingga proses di atas belum selaras dengan harapan pegawai dan *core valuing people* dalam pengelolaan sumber daya manusia Jamkrindo.

g. (6.a.(2).a.2.1)
Walanpun JAMKRINDO memadukan waktu siklus, produktivitas dan faktor efektivitas dan efisiensi lainnya ke dalam proses kerja dengan cara :
   - Mengacu kepada Peraturan Direksi Perum JAMKRINDO No: 42/Per-Dir/XII/2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Direksi Nomor 12/Per-Dir/XII/2012 tentang SOP Penjaminan Kredit Umum berbasis Risiko
   - Memisahkan alur kerja berdasarkan produk;
   - Perencanaan dan penetapan biaya operasional keseluruhan berbasis Risiko;
   - *Monitoring* kesesuaian terhadap tahapan proses penjaminan (dari mulai pengajuan penjaminan, penerbitan Sertifikat Penjaminan sampai pelunasan).
   - Produktivitas diukur dari volume total penjaminan setiap tahun yang terealisasi dibandingkan dengan target

Sistem telah diterapkan oleh Bisnis dan penunjang serta lainnya yang terkait di Kantor Pusat, Kanwil dan Kantor Cabang dan secara konsisten dilakukan pengukuran terhadap efektivitas dan efisiensi produk penjaminan.

Namun, belum terbukti efektif sebagaimana yang ditunjukkan oleh grafik pada kinerja *Time Accuracy in Claim Process* (%) yang berfuktuatif cenderung menurun (*level poor dan unfavourable*) (grafik 7.1.b.1.16) dan Bopo meningkat dalam 3 tahun terakhir (grafik 7.5.a.1.19) dengan *level poor serta unfavourable*.

The above mechanism, however, has not been systematically proven, and Jamkrindo was found not to have rules for HR career development or career path SOP (Career Path). In addition, Jamkrindo has not implemented the principle of transparency and accountability for the process of fulfilling official formations that can be directly accessed by employees. This has an impact on employees' negative perceptions of Jamkrindo as evidenced by graph 7.3a (2). The Employees' Turn Over shows poor performance with the declining trend every year and the effectiveness of the promotion that has not been mapped so that the above process has not been in line with the expectations of employees and core valuing people in Jamkrindo's human resource management.

g. (6.a. (2) .a.2.1)
Even though JAMKRINDO combines cycle time, productivity, and other effectiveness and efficiency factors into the work process by:
   - *Referring to the Regulation of the Board of Directors of Perum JAMKRINDO No: 42/Per-Dir/XII/2013 concerning Amendments to Attachments of Directors' Regulations Number 12/Per-Dir/XII/2012 concerning SOP for Risk-based General Credit Guarantee*
   - *Separating workflows based on products;*
   - *Planning and determination of overall risk-based operational costs;*
   - *Monitoring conformity to the stages of the guarantee process (from the start of the guarantee proposal, the issuance of the Guarantee Certificate to repayment).*
   - *Productivity is measured from the total guarantee volume every year which is realized compared to the target*

And the fact that the system has been implemented by business and support as well as other related officials at the Head Office, Regional Office, and Branch Offices, and the effectiveness and efficiency of guarantee products have been consistently measured,

However, it has not been proven to be effective as shown by the graph in the performance of the Time Accuracy in Claim Process (%) which tends to decline in trend (poor and unfavorable levels) (graph 7.1.b.1.16) and the fact that the BOPO increases in the last 3 years (graph 7.5.a .1.19) with poor and unfavorable levels.

Hal tersebut berdampak pada unefisiensi dan ketidakefektifan dari siklup proses penjaminan sehingga menurunkan akurasi dan kualitas penjaminan sesuai dengan SLA (service level agreement), belum selaras dengan Dharma Kedua misi Perusahaan yaitu memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas dan dengan tata nilai Keunggulan yang fokus kepada pelanggan (*customer-focused excellence*) dan Persepektif kesisteman (*systems perspective*) serta core visioner.

This has an impact on the inefficiency and ineffectiveness of the guarantee process cycle, thereby reducing the accuracy and quality of the guarantee in accordance with the service level agreement, which has not been aligned with the seconf dharma of the Company's missions which is 'to provide extensive and quality services with customer-focused excellence and systems perspective, and visionary cores.

2. Dimensi "HASIL"

Walaupun Secara *Overall* JAMKRINDO telah membangun dan mengukur kinerja ekselennya dengan menampilkan 303 Grafik Kinerja secara keseluruhan dengan sebaran sebagai berikut; Kinerja Produk dan Proses (44 Grafik Kinerja), Kinerja *Customer Focus* (40 Grafik Kinerja), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (47 Grafik Kinerja), Kinerja Kepemimpinan (103 Grafik Kinerja) dan Kinerja Keuangan dan Pasar (69 Grafik Kinerja), Namun masih terdapat Kinerja yang belum menunjukkan kinerja positif, dibawah targetnya dan belum standar sebagai berikut:

2. *Dimensions of "RESULTS"*

Eventhough, in Overall, JAMKRINDO has built and measured its excellent performance by displaying 303 Performance Charts as a whole with the following distribution; Product and Process Performance (44 Performance Charts), Customer Focus Performance (40 Performance Charts), Focus Performance on Workforce (47 Performance Charts), Leadership Performance (103 Performance Charts) and Financial and Market Performance (69 Performance Charts), but there are still Performances that have not shown positive performance. The followings are the target and standard which have not shown positive performances:

	LEVEL		TREND		COMPARISON			INTEGRITY			Total Data
	Poor	No Level	Unfavorable	Adverse	No Trend	Laging	No Comp.	KD	NP	NS	
7.1. Produk dan Proses *7.1. Products and Process*	*12*	*0*	*6*	*6*	*0*	*7*	*7*	*0*	*35*	*6*	*44*
7.2 Fokus Pelanggan *7.2. Customer Focus*	*12*	*0*	*8*	*3*	*1*	*2*	*25*	*11*	*37*	*9*	*40*
7.3 Fokus Tenaga Kerja *7.3 Workforce Focus*	*13*	*5*	*12*	*3*	*0*	*0*	*47*	*5*	*39*	*44*	*47*
7.4 Kepemimpinan *7.4. Leadership*	*27*	*17*	*28*	*3*	*17*	*11*	*86*	*14*	*103*	*13*	*103*
7.5 Keuangan dan Pasar *7.5. Finance and Market*	*22*	*1*	*17*	*11*	*2*	*5*	*41*	*0*	*48*	*49*	*69*
Total	**86**	**23**	**71**	**26**	**20**	**25**	**206**	**30**	**262**	**121**	**303**
% Pencapaiam *% of Achievement*	28%	8%	23%	9%	7%	8%	68%	10%	86%	40%	

- *Level – Poor* 28% (86 Grafik Kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) memiliki kecenderungan level yang kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya , yang meliputi kinerja Produk dan Proses (12 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (12 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (13 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (27 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (22 Grafik)
- Level – Nol *Level* (NL), 8% (23 Grafik Kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) memiliki level yang tidak dapat diukur yang meliputi Kinerja Produk dan Proses (0 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (0 Grafik), Kinerja Focus pada Tenaga Kerja (5 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (17) Kinerja Keuangan dan Pasar (1 Grafik)
- Trend – *Unfavorable*, 23% (71 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukan *Trend negative* yang berfluktuasi dan mengalami penurunan , yang meliputi kinerja Produk dan Proses (7 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (24 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (21 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (26 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (12 Grafik)
- *Trend - Advers* ,9% (26 Grafik Kinerja dari 303 Grafik yang tersedia) menunjukkan *Trend* negatif yang mengalami penrunan signifikan setiap tahunnya, yang meliputi Kinerja kinerja Produk dan Proses (6 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (3 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (3 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (3 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (11 Grafik)
- *Trend – No Trend* (NT), 7% (20 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukan Trend yang tidak dapat diukur , yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (0 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (1 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (0 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (17 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (2 Grafik)
- *Comparison – Laging*, 8% (25 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) menunjukan Kinerja dibawah pembandingnya/ Kompetitornya, yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (7 Grafik), Kinerja Customer Focus (2 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (0 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (11 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (5 Grafik)
- *Comparison – No Comparison* (NC), 68% (206 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) tidak memiliki pembandingnya baik dari *Benchmark* maupun Kompetitornya, yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (7 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (25 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (47 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (86 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (41 Grafik)

- *Level - Poor, 28% (86 Performance Charts from 303 Performance Charts available) have a tendency to be less favorable than the previous year. These include Product and Process performance (12 Charts), Customer Focus Performance (12 Charts), Workforce Focus Performance (13 Charts), Leadership Performance (27 Charts), and Financial and Market Performance (22 Charts)*
- *Level - Zero Level (NL), 8% (23 Performance Charts of 303 Performance Charts available) have levels that cannot be measured. These include Product and Process Performance (0 Graph), Customer Focus Performance (0 Graph), Workforce Focus Performance (5 Graphs), Leadership Performance (17), and Financial and Market Performance (1 Graph)*
- *Trend - Unfavorable, 23% (71 Performance charts from the available 303 Performance Charts) show negative trends that fluctuate and decline, which include Product and Process performance (7 Graphs), Customer Focus Performance (24 Charts), Workforce Focus Performance (21 Charts), Leadership Performance (26 Charts), and Financial and Market Performance (12 Charts)*
- *Trend - Adverse, 9% (26 Performance Charts of the 303 available Charts) show a negative trend that experiences significant losses every year, which includes Product and Process Performance (6 Charts), Customer Focus Performance (3 Graphs), Workforce Focus Performance (3 Graphs), Leadership Performance (3 Graphs), and Financial and Market Performance (11 Charts)*
- *Trend - No Trend (NT), 7% (20 performance graphs of 303 Performance Charts available) show a trend that cannot be measured, which includes Product and Process performance (0 Graph), Customer Focus Performance (1 Graph), Workforce Focus Performance (0 Charts), Leadership Performance (17 Charts), and Financial and Market Performance (2 Graphs)*
- *Comparison - Lagging, 8% (25 Performance graphs of 303 Performance Charts available) show Performance under its Competitor, which includes Product and Process performance (7 Graphs), Customer Focus Performance (2 Graphs), Workforce Focus Performance (0 Graphs), Leadership Performance (11 Charts), and Financial and Market Performance (5 Charts)*
- *Comparison - No Comparison (NC), 68% (206 performance graphs of the available 303 Performance Charts) has no comparison from both Benchmark and Competitors. These include Product and Process performance (7 Graphs), Customer Focus Performance (25 Charts), Workforce Focus Performance (47 Charts), Leadership Performance (86 Graphs), and Financial and Market Performance (41 Charts)*

- Tidak ada Proyeksi nya , 86% (262 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia) yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (35 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (37 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (39 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (103 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (48 Grafik)
- Tidak ter Segmen, 40% (121 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia), yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (6 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (9 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (44 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (13 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (49 Grafik)
- Kurang Data, 10% (30 Grafik kinerja dari 303 Grafik Kinerja yang tersedia), yang meliputi kinerja kinerja Produk dan Proses (0 Grafik), Kinerja *Customer Focus* (11 Grafik), Kinerja Fokus pada Tenaga Kerja (5 Grafik), Kinerja Kepemimpinan (14 Grafik) serta Kinerja Keuangan dan Pasar (0 Grafik)

- *No Projections, the number was 86% (262 Performance charts from 303 Performance Charts available) this includes Product and Process performance (35 Graphs), Customer Focus Performance (37 Graphs), Workforce Focus Performance (39 Graphs), Leadership Performance (103 Charts), and Financial and Market Performance (48 Charts)*
- *No Segment, the number was 40% (121 performance charts from 303 available Performance Charts) this includes Product and Process performance (6 Graphs), Customer Focus Performance (9 Charts), Workforce Focus Performance (44 Charts), Leadership Performance (13 Charts), and Financial and Market Performance (49 Charts)*
- *Lack of Data, the number was 10% (30 performance charts from 303 Performance Charts available) this includes Product and Process Performance (0 Graphs), Customer Focus Performance (11 Graphs), Workforce Focus Performance (5 Graphs), Leadership Performance (14 Charts), and Financial and Market Performance (0 Graphs).*

Hal ini dapat menjadi gap bagi Jamkrindo dalam membangun kinerja ekselennya sesuai dengan harapan para *Stakeholder* dan Pelanggan serta membangun Visi Misi dan Kompetensi Inti Jamkrindo, Belum selaras dengan membangun *Core Values Focus on Success*.

This can be a gap for Jamkrindo in building its excellent performance in accordance with the expectations of the Stakeholders and Customers as well as building the Core Mission Vision and Competency of Jamkrindo. This shows the non-alignment with the building of Core Values Focus on Success.

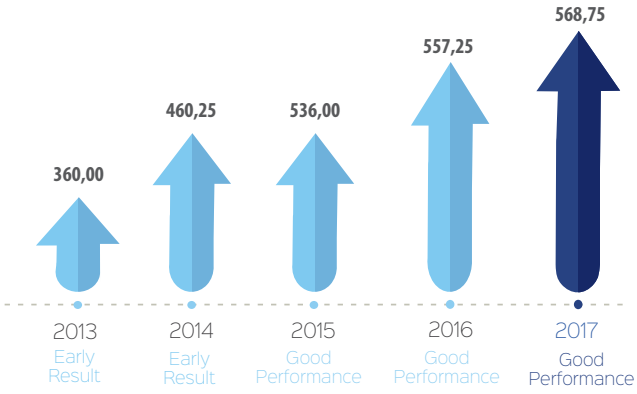
Perkembangan Penerapan KPKU di Lingkup Perum Jamkrindo

Development of KPKU Implementation in Perum Jamkrindo

Melalui penerapan KPKU, Perusahaan memiliki perangkat untuk dapat melakukan evaluasi yang meliputi "Proses" dan "Hasil", di mana kedua faktor ini mempengaruhi seluruh aspek baik kinerja maupun penerapan GCG yang berlandaskan kepatuhan. Tren skor *assessment* GCG periode 2013-2019 adalah sebagai berikut:

Through the application of KPKU, the Company has the tools to conduct evaluations which include "Process" and "Results", in which both of these factors affect all aspects of both performance and implementation of GCG based on compliance. The trends in the 2013-2019 GCG assessment scores are as follows:

Perkembangan Skor Penerapan KPKU 2013-2019
Development of the 2013-2019 KPKU Implementation Score



STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE ORGANIZATION STRUCTURE

PEMILIK MODAL DAN RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA

Pemilik Modal dan Informasi Terkait Entitas Induk Akhir

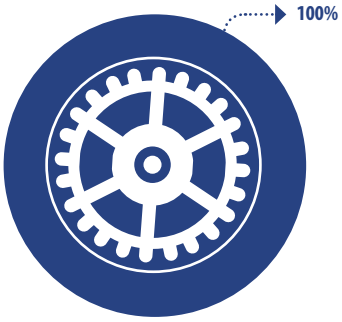
Perum Jamkrindo merupakan entitas usaha dengan status hukum Perusahaan Umum (Perum), di mana Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemilik modalnya. Kebijakan kepemilikan modal dalam Perusahaan dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN menjadi pemilik tunggal sekaligus entitas induk akhir dari Perum Jamkrindo.

EQUITY OWNER AND JOINT DISCUSSION MEETING

Equity Owner and Information Related to the Ultimate Parent Entity

Perum Jamkrindo is a business entity with the legal status of a Public Corporation (Perum), in which the Republic of Indonesia through its Government is the owner of its equity. The policy of equity ownership in the Company is carried out through the mechanism known as the State Equity Participation (PMN). Thus, the Republic of Indonesia through its government/Ministry of SOEs becomes the sole owner and the ultimate parent entity of Perum Jamkrindo.

Komposisi Kepemilikan Perum Jamkrindo
Per 31 Desember 2018
Perum Jamkrindo's Ownership Composition
As of December 31, 2018



Negara Republik Indonesia
Belongs to the Republis of Indonesia

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan mekanisme pengambilan keputusan strategis oleh pemilik modal. Melalui RPB, pemilik modal memiliki wewenang dan hak untuk melakukan berbagai keputusan atas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Wewenang Rapat Pembahasan Bersama

Kewenangan RPBdalam hal ini adalah Menteri Negara BUMN atau Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundangundangan, antara lain:

The Joint Discussion Meeting (RPB) is a mechanism for strategic decision making by equity owner. Through the RPB, equity owner has the authority and rights to make various decisions on the Company as described below.

The Authority of Joint Discussion Meeting

The authorities of the RPB in this case, belongs to the Minister of State-Owned Enterprises or any other Minister who is appointed and/or authorized to represent the Government as the owner of the equity of the Company by still adhering to the provisions of the legislation, include:

1. Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya;
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah;
4. Menetapkan jumlah anggota Direksi Perusahaan dan jumlah anggota Dewan Pengawas;
5. Pengesahan Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
6. Pengesahan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
7. Memberikan Persetujuan Rancangan perubahan RKAP yang telah disahkan, apabila terdapat perubahan;
8. Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan;
9. Pengesahan atas auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, dan melakukan pengesahan atas laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dimaksud;
10. Menetapkan alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan;
11. Menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas;
12. Melakukan penilaian (evaluasi) kinerja Direksi dan Dewan Pengawas.

1. *Providing addition to the State Equity Participation originating from the capitalization of reserves and other sources;*
2. *Ratifying changes to the Company's Articles of Association;*
3. *Appointing and dismissing members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Sharia Supervisory Board;*
4. *Determining the number of members of the Company's Board of Directors and the number of members of the Supervisory Board;*
5. *Ratifying the Draft of the Company Long Term Plan (RJPP);*
6. *Ratifying the Draft of Corporate Work Plan and Budget (RKAP);*
7. *Approving the amendment of RKAP draft if there are any;*
8. *Ratifying the Company's Annual Report;*
9. *Providing endorsement of the appointed external auditor to carry out the assessment, and ratifying the report on the results of the assessment of the intended external auditor;*
10. *Establishing allocation of use of the Company's net profit, including the amount of allowance for reserves;*
11. *Establishing the income of the Board of Directors and the Supervisory Board;*
12. *Conducting an evaluation of the performance of the Board of Directors and the Supervisory Board.*

Hasil Keputusan RPB Tahun 2017 dan dan Tindak Lanjut serta Realisasi oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2018

Results of the 2017 RPB Resolution and Its Follow-Up and Realization by Management Until the End of 2018

Di tahun 2017, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RPB, yaitu tanggal 25 Januari dan 9 Mei 2017. Berikut disampaikan hasil keputusan RPB dan realisasi tindak lanjutnya oleh manajemen.

In 2017, the Company held 2 (two) Joint Discussion Meetings; on January 25 and May 9, 2017. The following are the results of its decision and the realization of its follow-up by the Company's management.

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
RPB tanggal 25 Januari 2017/ *Joint Discussion Meeting of January 25, 2017*			
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 *Ratification of the 2017 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)*	√	Surat Menteri BUMN No. S-83/MBU/I/2017 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017. *Letter of the Minister of SOEs No.S-83/MBU/I/2017 concerning the Ratification of 2017 Company Work Plan and Budget dated January 25, 2017.*

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) 2017 *Approval of the 2017 Partnership and Community Development Program Work Plan and Budget (RKA PKBL)*	√	Surat Menteri BUMN No. S-83/MBU/I/2017 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017. *Letter of the Minister of SOEs No. S-83/MBU/I/2017 concerning the Ratification of 2017 Company Work Plan and Budget dated January 25, 2017.*
3	Menyetujui dan mengesahkan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan Pemilik Modal Perum Jamkrindo, yang telah mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan surat Menteri BUMN No. S-513/MBU/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun2017 *Approved and ratified the Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2017 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo with the Owner of Perum Jamkrindo's Equity, which has referred to the Assessment Criteria of Superior Performance (KPKU) and letter of Minister of SOEs No. S-513/MBU/08/2016 dated August 30, 2016, concerning Submission of Aspirations of Shareholders/Equity Owners for the Preparation of Work Plans and Corporate Budgets for the Year 2016*	√	Surat Menteri BUMN No. S-83/MBU/I/2017 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017. *Letter of the Minister of SOEs No. S-83/MBU/I/2017 concerning the Ratification of 2017 Company Work Plan and Budget dated January 25, 2017.*
4	Menyetujui dan mengesahkan KPI Tahun 2017 antara Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan Pemilik Modal Perum Jamkrindo yang telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. *Approved and ratified the 2017 KPI between the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo and the Equity Owner of Perum Jamkrindo which has referred to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 concerning the Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.*	√	Surat Menteri BUMN No. S-83/MBU/I/2017 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017. *Letter of the Minister of SOEs No. S-83/MBU/I/2017 concerning the Ratification of 2017 Company Work Plan and Budget dated January 25, 2017.*

No	**Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/** *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	**Sudah/Belum Terlaksana/** *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	**Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/** *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
5	Dalam melaksanakan RKAP serta RKA PKBL Tahun 2017, Direksi dan Dewan Pengawas diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Pengawas dan KPI (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas tahun 2017 yang telah disetujui dan disahkan RPB menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2017 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Pengawas. 2. Melakukan sinergi antar BUMN sebagai upaya mengoptimalkan potensi bisnis yang lebih baik yang mampu memberikan tingkat kualitas layanan dan efisien dengan harga yang lebih kompetitif serta dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip saling menguntungkan. 3. Meningkatkan kinerja perusahaan dalam layanan jasa dan produk dengan mengedepankan sinergi kemitraan dengan didukung implementasi sistem TI yang terintegrasi dan selaras dengan model bisnis serta didukung peningkatan kualitas kompetensi SDM. 4. Meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan dari bisnis Non-KUR dengan memperkuat sinergi bisnis internal melalui pengembangan produk dan layanan bisnis, *customer engagement* dan layanan berbasis TI. 5. Meningkatkan pengelolaan pendapatan subrogasi secara optimal untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dengan didukung Sistim Teknologi Informasi terintegrasi dan SDM yang kompeten untuk menghasilkan data yang cepat, akurat, *up to date* dan dapat dipertanggung jawabkan.	√	Surat Menteri BUMN No.S-83/MBU/I/2017 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017.

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
	6. Tantiem yang dianggarkan dalam RKAP 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, merupakan besaran maksimal yang dapat dibebankan dan realisasinya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2017 yang diputuskan dalam RPB Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan. 7. Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: » Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang PKBL. » Terhadap pelaksanaan RKA PKBL Tahun 2017, RPB dapat menyetujui RKA PKBL Tahun 2017 berdasarkan penetapan final hasil telaahan antara unit Keasdepan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Perum Jamkrindo. 8. Direksi agar melaporkan pelaksanaan penggunaan dana penyertaan modal negara kepada Pemilik Modal sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06 /2015 jo. No. PER-1l/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015. 9. Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK RI yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2016 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2017. 10. Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Pengawas dalam pelaksanaan RKAP 2017 sebagaimana disampaikan melalui surat No. S-22/DP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.		

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
	In implementing the RKAP and the 2017 PKBL RKA, the Board of Directors and the Supervisory Board are asked to pay attention to the following matters: 1. *The 2017 Corporate Work Plan and Budget, the Partnership and Community Development Program Work Plan and Budget, and the Work Plan and Budget of the Supervisory Board and the KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Supervisors that have been approved and ratified in the Joint Discussion Meeting shall be the guidelines for the Board of Directors in implementing work programs and performance targets in 2017 as well as becoming the monitoring and supervision functions for the Supervisory Board .* 2. *Creating synergy between SOEs as an effort to optimize the potential of a better business that is able to provide a level of service quality and efficiency at a more competitive price and in implementing the principle of mutual benefit.* 3. *Improving the performance of the Company in terms of service and product services by promoting partnership synergy supported by the implementation of IT systems that are integrated and aligned with the business model and supported by the quality improvement of HR competencies.* 4. *Increasing the Company's revenue contribution from the Non-KUR business by strengthening internal business synergies through product development and business services, customer engagement, and IT-based services.* 5. *Optimizing the management of subrogation revenues to support the Company's operational activities with the support of an integrated Information Technology System and competent HR to produce data that is fast, accurate, up to date and accountable.*		*Letter of the Minister of SOEs No.S-83 / MBU / I / 2017 concerning the Ratification of 2017 Company Work Plan and Budget dated January 25, 2017.*

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
	6. *The tantiem budgeted in the 2017 Corporate Work Plan and Budget are in accordance with the Minister of SOEs' Regulation on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the SOEs' Supervisory Board, which can be charged and realized based on the achievement of 2017 performance targets decided in the Joint Discussion Meeting.* 7. *In the framework of the SOEs partnership program with small businesses and environmental development (PKBL), the following matters need to be considered:* » *Submitting periodic reports in a timely manner according to the time limit specified in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013, as lastly amended by the Minister of SOEs Regulation No. PER03/MBU/12/2016 concerning PKBL.* » *On the implementation of the 2017 Community Development Program Work Plan and Budget (RKA PKBL), the Joint Discussion Meeting can approve the 2017 RKA PKBL based on the final determination of the results of the review between the Social Security and Environmental Responsibility units with Perum Jamkrindo Corporation.* 8. *The Board of Directors must report on the use of state equity participation funds to the Equity Owner in accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-08/MBU 06/2015 2015 jo. No. PER-1l/MBU/09/2015 September 28, 2015.* 9. *The Board of Directors must pay attention to the findings and recommendations of the Audit Board of Indonesia that have not been resolved until 2016 and make this a target for completion in 2017.* 10. *The Board of Directors must pay attention to and follow up on the recommendations and suggestions of the Supervisory Board in the implementation of the 2017 Work Plan and Budget as stated in letter No. S-22/DP/XII/2016 dated December 19, 2016.*		

No	**Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/** *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	**Sudah/Belum Terlaksana/** *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	**Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/** *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
RPB tanggal 9 Mei 2017 *Joint Discussion Meeting of May 9, 2017*			
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2016 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Tahun 2016 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung jawab Sepenuhnya (*volledig acquitet decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Pengawas atas Tindakan Pengawasan Perusahaan selama Tahun Buku 2016. *Approval of Annual Report, Ratification of Company Consolidated Financial Statements for 2016, Approval of the 2016 Supervisory Task Report of the Supervisory Board, Ratification of Financial Statements of Partnership and Community Development Program Implementation for Fiscal Year 2016, provide repayment and fully acquit and discharge (volledig acquitet decharge) the Directors on the Management Actions of the Company and the Supervisory Board Actions of the Company Oversight Measures in the 2016 Fiscal Year.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN Nomor. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
	1.a. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2016 dan Laporan Kegiatan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas serta mengesahkan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2016 yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace dan Karunawan *1.a. Approve the Annual Report and ratify the 2016 Fiscal Year Consolidated Financial Statements, and Corporate Activity Reports and Supervisory Board's Supervisory Task Reports, and ratify the 2016 Partnership and Community Development Program Financial Reports audited by Hertanto, Grace and Karunawan Public Accounting Firm*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN Nomor.S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
	1.b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan anggota Devvan Pengawas atas tindakan pengawasan Perusahaan selama tahun 2016, dengan ketentuan: sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku dan tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. *1.b. Provide repayment and fully acquit and discharge the Board of Directors for actions taken by the Company and members of the Supervisory Board for the Company's supervisory actions during 2016, provided that such actions do not constitute a criminal offense or violate applicable legal provisions/procedures and those actions are recorded and reported in the Annual Report and Financial Statements for Fiscal Year 2016.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2016. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2016 sebesar Rp692.044.895.364 sebagai berikut: 1. Dividen sebesar Rp48.000.000.000 atau 6,94%. 2. Cadangan sebesar Rp644.044.895.364 atau 93,06%. 3. Dividen sebesar Rp48.000.000.000 tersebut agar segera disetor ke kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat persetujuan ini. *Determine the use of the Company's net profit for the fiscal year 2016. Approved the resolutions to use the consolidated net income which can be attributed to the owner of the parent entity for the Fiscal Year of 2016 amounting to IDR 692,044,895,364 as follows:* *1. Dividend of Rp.48,000,000,000 or 6.94%.* *2. Reserves amounting to IDR 644,044,895,364 or 93.06%.* *3. The dividend of Rp.48,000,000,000 must be deposited immediately to the State treasury no later than 1 (one) month after the date of this approval letter.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
3	Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas. Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2017 serta tantiem Tahun Buku 2016 untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo akan ditetapkan secara tersendiri. *Determine the income of the Board of Directors and the Supervisory Board. Determine the salary/honorarium along as well as the facilities and other benefits for 2017 and the tantiem for 2016 for the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo which will be determined separately.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN Nomor.S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292 / MBU / 05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*

No	**Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/** *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	**Sudah/Belum Terlaksana/** *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	**Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/** *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017. 1. Menetapkan kembali KAP Hertanto, Grace dan Karunawan sebagai auditor untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP yang ditetapkan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. *Determine the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and Financial Statements for the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the 2017 Fiscal Year.* *1. Re-establish Hertanto, Grace and Karunawan KAP as auditors to audit the Company's Financial Statements and Financial Statements for the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year ending on December 31, 2017.* *2. Give the authority to the Supervisory Board to determine the substitute Public Accounting Firm in the event that the KAP is determined to be unable to continue or carry out its duties for any reason based on the applicable rules and regulations.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
5	Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Direksi. *Other matters that need the attention of the Board of Directors.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU / 05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
	5.1. Sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan ke depan dengan memperhatikan pencapaian kinerja tahun buku 2016, Direksi diminta untuk: *5.1. As an effort to improve the Company's future performance by taking into account the achievement of the 2016 fiscal year, the Directors are asked to:*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN Nomor.S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
	1. Meningkatkan efisiensi beban usaha yang berasal dari beban SDM, beban operasional, dan beban administrasi kantor dan umum yang meningkat cukup besar pada tahun 2016 melalui pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan perusahaan dengan berorientasi pada efisensi biaya dan peningkatan pendapatan. *1. Increase the efficiency of operating expenses, especially on HR expenses, operating expenses, as well as office and general administrative expenses which increased considerably in 2016, through appropriate policy making in the management of the Company by focusing on cost efficiency and increasing revenue.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
	2. Mengoptimalkan pendapatan subrogasi dengan meningkatkan koordinasi kantor cabang dengan perbankan dalam mendukung efektifitas aplikasi operasional IT penyelesaian klaim dan subrogasi yang telah dibangun perusahaan. *2. Optimize subrogation revenue by increasing coordination of branch offices with banks in supporting the effectiveness of IT operational applications for claim settlement and subrogation that have been built by the Company.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
	3. Melakukan evaluasi struktur organisasi agar lebih efektif dan efisien menuju organisasi berkinerja tinggi yang berfokus pada pencapaian target kinerja perusahaan dan rencana pengembangan bisnis ke depan. *3. Evaluate the Company organizational structures to be more effective and efficient in an effort to become a high-performing organization that focuses on achieving company performance targets and future business development plans.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
	4. Melakukan evaluasi cost and benefit terhadap pencapaian kinerja kantor cabang, sehingga diharapkan dapat diperoleh jumlah kantor cabang yang ideal sesuai potensi dan volume bisnis dari daerah kantor cabang untuk berkontribusi positif pada perusahaan. *4. Evaluate the cost and benefits of branch office performance achievement, so that it is expected to obtain the ideal number of branch offices which is in accordance to the potential and business volume of the branch office area to contribute positively to the Company.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
	5. Memperbaiki secara komprehensif *collection period* atas piutang perusahaan dengan memperbaiki proses perencanaan. pengelolaan. pengendalian dan pengawasan baik di kantor cabang maupun kantor pusat. *5. Comprehensively improve the collection period of the company's receivables by improving the planning, management, control and supervision process in branch offices and head office.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292/ MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
	6. Meningkatkan kinerja sistem IT baik untuk KUR maupun Non KUR serta manajemen SDM yang terintegrasi dengan baik antara kantor pusat dan kantor cabang dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan. *6. Improve the performance of IT systems for both KUR and Non-KUR as well as well-integrated HR management between the head office and branch offices in support of improving Company performance.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 *Stipulated in the Ministry of SOEs' letter No. S-292 / MBU/05/2017 May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of the Perum Jamkrindo for the 2016 fiscal year*
	7. Kebijakan akuntansi perusahaan terutama yang berkaitan dengan pencatatan pendapatan UP harus berpedoman pada standar akuntansi Otoritas Jasa Keuangan/OJK dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. *7. Refine the company's accounting policies, especially those relating to the recording of income of UP which must be guided by the Financial Services Authority/FSA accounting standards and generally accepted accounting principles.*	√	Tertuang dalam surat kementerian BUMN No. S-292/MBU/05/2017 tanggal 9 mei 2017 perihal pengesahan Laporan Tahunan perusahaan umum (Perum) jaminan kredit tahun buku 2016 dan Surat OJK Nomor.S-129/D.05/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal pencatatan imbal jasa penjaminan (IJP) accrual Perum Jamkrindo *Stipulated in the Ministry of SOEs letter Number.S-292/MBU/05/2017 dated May 9, 2017, concerning the ratification of the annual report of thePerum Jamkrindo for the 2016 fiscal year and OJK Letter (Financial Service Authority) Number S.-129 / D.05 / 2017 August 29, 2017, regarding the recording of the accrual guarantee fee (IJP) of Perum Jamkrindo*
	8. Memperkuat peran dan fungsi risk management dalam kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan untuk mendapatkan manfaat penempatan dana investasi yang berkualitas, dan dalam pelaksanaannya agar memperhatikan likuiditas perusahaan, regulasi yang berlaku serta mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudence*). *8. Strengthen the role and function of risk management in the Company's financial management policies to benefit from the placement of quality investment funds, and in its implementation to pay attention to the company's liquidity, applicable regulations and prioritize the principle of prudence.*	√	Tertuang dalam peraturan internal Perusahaan yaitu Peraturan Direksi Nomor : 25/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pendapat (Opini) MR Perum Jamkrindo dan Peraturan Direksi No: 26/ Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang SOP Pendapat (Opini) MR Perum Jamkrindo *It is written in the Company's internal regulations, namely the Directors Regulation No: 25/Per-Dir/ VIII/2016 dated August 12, 2016, concerning Opinion of Perum Jamkrindo MR and Directors Regulation No: 26/Per-Dir/VIII/2016 dated August 12, 2016, concerning SOP of MR Opinion of Perum Jamkrindo*

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
	9. Direksi agar tetap konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko serta terus menyempurnakan pelaksanaannya di seluruh bisnis perusahaan dan memastikan setiap pelaksanaan kegiatan bebas dari praktik gratifikasi, fraud, dan KKN. *9. Remain consistent in implementing GCG principles and risk management and continue to improve its implementation in all Company businesses and ensure that each activity is free from the practice of gratuity, fraud, and Corruption, Collusion, and Nepotism.*	√	Tertuang dalam peraturan internal Perusahaan yaitu Peraturan Direksi No. 22/Per-Dir/5/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Kebijakan Strategi Anti Fraud Perum Jamkrindo *It is written in the Company's internal regulations, namely the Directors Regulation No. 22/Per-Dir/5/XII / 2018 dated December 20, 2018, concerning Perum Jamkrindo's Anti Fraud Strategy Policy*
	5.2. Direksi diminta untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas pada tahun 2017 atas temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak berulang kembali. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Pengawas dan disampaikan secara tertulis kepada Pemilik Modal. *5.2. In 2017, the Directors are asked to immediately follow up and complete the findings, suggestions of external auditors (of the Audit Board of Indonesia and/or Public Accounting Firm) and internal auditors (SPI) in 2016 and previous years, so that, in the future, the auditor's findings for the same problem does not recur. The follow-up resolution of the auditor's findings/suggestions is to be discussed comprehensively with the Supervisory Board and submitted in writing to the Equityl Owner.*	√	Tertuang dalam surat No. 5456/P/1/X/2017 tanggal 27 Oktober 2018 tentang konfirmasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI *Stipulated in Letter No. 5456/P/1/X/2017 dated October 27, 2018, concerning Confirmation of Follow-Up Recommendations on Audit Results of the Audit Board of Republic of Indonesia*
	5.3. Penetapan pemberian jasa produksi kepada para pegawai oleh Direksi dan Dewan Pengawas sebagai upaya pemberian motivasi dan peningkatan kinerja harus didasarkan atas tolok ukur pencapaian RKAP. *Key Performance Indicators* (KPI) dan merit system yang jumlah maksimumnya sebesar yang telah dianggarkan, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan-perundangan yang berlaku. *5.3. The Resolution on the provision of production services to employees by the Board of Directors and the Supervisory Board as an effort to provide motivation and improve performance must be based on benchmarks for achieving Work Plan and Budget. Key Performance Indicators (KPI) and merit systems with a maximum amount of which have been budgeted for, and in its implementation must still adhere to the prevailing rules and regulations.*	√	Tertuang dalam Memorandum Direksi No: B. 471/ INT/SDM/OPS/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Jasa Produksi Tahun Buku 2018 *It is stipulated in the Board of Directors Memorandum No: B.471/INT/SDM/OPS/III/ 2019 dated March 29, 2019, concerning Services for Production for the Fiscal Year 2018*

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
	5.4. Mempertimbangkan tidak adanya alokasi tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Program KUR, Direksi diminta meningkatkan daya saing bisnis Non-KUR melalui peningkatan kualitas dan layanan produk penjaminan yang pemasarannya bersinergi dengan perbankan. *5.4. Considering the absence of an additional allocation of the State Equity Participation (PMN) for KUR Program, the Board of Directors is asked to increase the competitiveness of Non-KUR businesses through improving the quality and service of guarantee products whose marketing synergizes with banks.*	√	Ditandatanganinya perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Bringin Sejahtera Makmur tentang penjaminan kredit briguna *The signing of the Cooperation Agreement (PKS) with PT Bringin Sejahtera Makmur about Briguna Credit Guarantee*
	5.5. Direksi diminta agar melaporkan secara tepat waktu atas perkembangan realisasi penggunaan dana PMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas beserta peraturan perubahannya No. PER-1I/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015. *5.5. The Directors are requested to report in a timely manner the progress in the realization of the use of State Equity Participation funds as stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-08 / MBU / 06/2015 dated June 3, 2015, concerning Guidelines for Reporting the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds to SOEs and Limited Liability Companies along with the amended regulations No. PER-1I / MBU / 09/2015 of September 28, 2015.*	√	Surat Keluar ke Kementrian: No. 2120/I/IV/2018 Perihal Pelaporan Penggunaan Dana PMN TW I No. 4094/I/VI/2018 Perihal Pelaporan Penggunaan Dana PMN TW II No. 6607/I/X/2018 Perihal Pelaporan Penggunaan Dana PMN TW III No. B.1240/EKT/DIRUT/KEU/I/2019 Perihal Pelaporan Penggunaan Dana PMN TW IV *Outgoing Letter to the Ministry:* *No. 2120 / I / IV / 2018 Regarding the Reporting on the Use of 1st Quarter of State Equity Participation's Funds* *No. 4094 / I / VI / 2018 Regarding the Reporting on the Use of 2nd Quarter of State Equity Participation's Funds* *No. 6607 / I / X / 2018 Regarding the Reporting on the Use of 3rd Quarter of State Equity Participation's Funds* *No. B.1240 / EKT / DIRUT / KEU / I / 2019 Regarding the Reporting on the Use of 1st Quarter of State Equity Participation's Funds*
	5.6. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Direksi diminta menindaklanjuti arahan Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2016 No. RIS-150/D7.MBU.3/04/2017 tanggal 9 Maret 2017. *5.6. In the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL), the Directors were asked to follow up on the guidance of the Ministry of SOEs as stated in the 2016 Minutes of Meeting of the Annual Report of the Partnership and Community Development Program Number RIS-150 / D7.MBU.3 / 04/2017 dated March 9, 2017.*	√	Tertuang dalam surat No.1953/P/5.2/2018 perihal Verifikasi Data PKBL dan Surat No. 1169/P/1/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi Audited tahun buku 2017 Perum Jamkrindo *It is included in letter No.1953 / P / 5.2 / 2018 concerning Verification of Partnership and Community Development Program Data and Letter No. 1169 / P / 1 / II / 2018 dated 26 February 2018 concerning Submission of the 2017 Audited Consolidated Financial Statements of Perum Jamkrindo*

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2017/ *Results of the 2017 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana/ *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2017 Hingga Akhir Tahun 2018/ *Follow-up by Management on the 2017 RPB Resolutions Until the End of 2018*
	5.7. Direksi diminta untuk memperhatikan dan menindaklanjuti arahan Pemilik Modal dan saran-saran dari Dewan Pengawas. *5.7. The Directors are asked to pay attention and follow up on the guidance of the Equity Owner and suggestions from the Supervisory Board.*	√	Tercantum dalam Risalah Rapat Teknis Persetujuan & Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 Perum Jamkrindo tanggal 24 April 2018; Perdir 25/ Per-dir/VII/ 2017 mengenai seluruh pejabat menandatangani pakta integritas *It is listed in the Minutes of Technical Meeting of Approval & Ratification of Financial Statements for 2018 Fiscal Year of Perum Jamkrindo dated April 24, 2018; The BoD Regulation Number 25 / Per-dir / VII / 2017 concerning all officials signing of integrity pact*

Penyelenggaraan RPB di Tahun 2018

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan menyelenggarakan RPB sebanyak 2 kali, yaitu RPB pada tanggal 4 Januari 2018 dan 3 Mei 2018. Berikut disampaikan hasil keputusan RPB dan realisasi tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2018.

Joint Discussion Meeting in 2018

In 2018, the Company held two (2) Joint Discussion Meeting (RPB), namely the RPB on 4 January 2018 and 3 May 2018. The following are the results of its resolutions and the realization of its follow-up by management until the end of 2018.

No	Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2018 *Results of the 2018 Joint Discussion Meeting (RPB) Resolution*	Sudah/Belum Terlaksana *Has Already Been / Has Not Been Implemented*	Tindak Lanjut oleh Manajemen Atas Keputusan RPB Tahun 2018 Hingga Akhir Tahun 2018 *Follow-up by Management on the 2018 RPB Resolutions Until the End of 2018*
RPB tanggal 4 Januari 2018 *Joint Discussion Meeting of January 4, 2018*			
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perum Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2018 *Ratification of the 2018 Perum Jamkrindo Corporate Work Plan and Budget*	√	Tertuang dalam Surat Menteri BUMN No. S-11/ MBU/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan perum jaminan kredit indonesia tahun 2018 *It is stipulated in the Letter of the Minister of SOEs No.S-11/ MBU/01/2018 dated January 4, 2018, concerning the ratification of Perum Jamkrindo Work Plan and Budget in 2018*
RPB tanggal 3 mei 2018 *Joint Discussion Meeting of May 3, 2018*			
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia tahun buku 2017 *Approval of annual report and ratification of consolidated financial statements of Perum Jamkrindo for the fiscal year 2017*	√	Tertuang dalam surat Meneteri BUMN No. S-11/ MBU/01/2018 tanggal 03 mei 2018 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia tahun buku 2017 *It is stipulated in the Minister of SOEs Letter No. S-11/ MBU/01/2018 May 3, 2018, concerning Approval of annual reports and ratification of consolidated financial statements of Perum Jamkrindo for the fiscal year 2017*

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas dibentuk oleh pemilik modal untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

BOARD OF SUPERVISORS

The Board of Supervisors is formed by the equity owners to provide oversight of the management of Company run by the Directors. The legal basis for the appointment of the Board of Supervisors is stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu kepada *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012—KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.

Board Manual merupakan kompilasi dan implementasi dari prinsip-prinsip hukum Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan praktik-praktik terbaik (*best practices) Good Corporate Governance* (GCG).

Maksud dari *Board Manual* ialah sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Dokumen ini juga mengatur tata hubungan antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal yang dikuasakan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Ruang lingkup *Board Manual* adalah mengatur dan menjelaskan pelaksanaan hubungan kerja antar organ Dewan Pengawas dan organ Direksi di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana Dewan Pengawas merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

The Charter of the Board of Supervisors

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Board of Directors and Board of Directors Manual that has been ratified through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012 — KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012.

The Board Manual is a compilation and implementation of the legal principles of the Company, as stipulated in Law Number 19/2003 concerning State-Owned Enterprises, Government Regulations Number 35/2018 concerning Public Perum Jamkrindo and Good Corporate Governance (GCG) best practices.

The Board Manual is to be a document that becomes a reference for the Board of Supervisors and the Board of Directors in carrying out their duties, authorities, responsibilities, rights, and obligations. This document also regulates the relationship between the Board of Supervisors, Board of Directors, and Owners of Equity authorized by the Minister of State-Owned Enterprises.

The scope of the Board Manual is to regulate and describe the implementation of work relations between the organs of the Supervisory Board and the organs of the Board of Directors in the Company by referring to the provisions contained in the Company's Articles of Association and/or the provisions contained in the applicable laws and regulations. The Supervisory Board is the organ of the Company whose duty is to supervise and provide advice to the Directors in carrying out the management activities of the Company.

Dalam tata laksana hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi meliputi, di antaranya:

1. Pertemuan formal yang terdiri atas:
   a. kehadiran Direksi dalam rapat Dewan Pengawas
   b. kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat Direksi
   c. penyelenggaraan rapat gabungan Dewan Pengawas – Direksi
2. Pertemuan informal
3. Komunikasi formal
   a. pelaporan, terdiri atas:
      i. pelaporan berkala
      ii. pelaporan khusus
      iii. surat-menyurat/Nota dinas
      iv. pemberitahuan pelaksanaan kegiatan resmi perusahaan
4. Komunikasi infromal

In the management of the Company, the work relations between the Supervisory Board and Directors include, among others:

1. *formal meeting consisting of:*
   a. *the presence of the Board of Directors in the Supervisory Board meeting*
   b. *the presence of the Supervisory Board at the Board of Directors meeting*
   c. *joint meetings of the Supervisory Board - Directors*
2. *Informal meetings*
3. *Formal communication in the form of*
   a. *reporting, which consists of:*
      i. *periodic reporting*
      ii. *special reporting*
      iii. *correspondence/official note*
      iv. *notification of the official activities of the company*
4. *Informal communication*

Kriteria Dewan Pengawas

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mentri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 persyaratan formal dan materil anggota Dewan Pengawas terdiri dari:

The Supervisory Board Criteria

The provisions in the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 states that formal and material requirements of the members of the Supervisory Board consist of:

Persyaratan *Requirements*	**Uraian** *Description*	
Formal	1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum 2. Tidak pernah dinyatakan pailit 3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Perum dinyatakan pailit; dan 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara	*1. The ability to carry out legal actions* *2. Has never been declared bankrupt* *3. Has never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board that was found guilty of causing a Company/ Perum to be declared bankrupt; and* *4. Has never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances*
Materil *Material*	1. Integritas 2. Dedikasi 3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen 4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan 5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya	*1. Possesses Integrity* *2. Is dedicated* *3. Understands the Company management problems related to one of the management functions* *4. Has adequate knowledge in the business field of the Company/Public Corporation in which the relevant person is nominated; and* *5. Can provide sufficient time to carry out their duties*

Persyaratan *Requirements*	**Uraian** *Description*	
Persyaratan lainnya *Other Requirements*	Persyaratan lain anggota Dewan Pengawas, yaitu: 1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II 2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah 3. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut 4. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan Komisaris/dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter 5. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan	*Other requirements for members of the Supervisory Board are:* 1. *He/she is not a member of a Political Party and/or a legislative candidate and/or legislative member. Legislative candidates or legislative members consisting of candidates/members of the House of Representative, Regional Representative Council, Level I Regional People's Representative Assembly, and Level II Regional People's Representative Assembly* 2. *He/she is not a candidate for Regional Head/Deputy Regional Head* 3. *He/she is not serving as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in the relevant SOEs for 2 (two) consecutive periods* 4. *He/she is physically and mentally healthy (is not suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as a member of the Board of Commissioners/ Supervisory board), as evidenced by a health certificate from a doctor* 5. *For prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies, it must be based on the proposal letter and the relevant agency*

Susunan dan Komposisi Dewan Pengawas Tahun 2018

Di tahun 2018 terjadi perubahan keanggotaan Dewan Pengawas, terkait dengan telah habisnya masa jabatan salah satu Dewan Pengawas Perusahaan. Kronologi perubahan susunan Dewan Pengawas, dan susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2018 dapat dilihat di bawah ini.

Composition of the Supervisory Board in 2018

In 2018 there was a change in the membership of the Supervisory Board, related to the expiration of the term of office of one of the Company's Supervisory Boards. The chronology of the changes in the composition of the Supervisory Board, and the composition of the Supervisory Board as of December 31, 2018, can be seen below.

Susunan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo per 31 Desember 2018
The Composition of Perum Jamkrindo Supervisory Board as of December 31, 2018

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Beginning Term of Office*	**Masa Akhir Jabatan** *Term of Office Ending*	**Periode Jabatan** *Term of Office*
Ketua *Chairperson*	Sri Mulyanto	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-233/ MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 *The Decree of the State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-233 / MBU / 10/2017 dated October 27, 2017*	27 Oktober 2017 *October 27, 2017*	26 Oktober 2022 *October 26, 2022*	Ke-1 *1st*

Susunan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo per 31 Desember 2018

The Composition of Perum Jamkrindo Supervisory Board as of December 31, 2018

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Awal Jabatan *Beginning Term of Office*	Masa Akhir Jabatan *Term of Office Ending*	Periode Jabatan *Term of Office*
Anggota *Member*	Subandriyo	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-435/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 *The Decree of the State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-435 / MBU / 2013 dated December 31, 2013*	31 Desember 2013 *December 31, 2013*	31 Desember 2018 *December 31, 2018*	Ke-1 *1st*
Anggota *Member*	Noor Ida Khomsiyati	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 *The Decree of the State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-76 / MBU / 4/2016 dated April 12, 2016*	12 April 2016 *April 12, 2016*	11 April 2021 *April 11, 2021*	Ke-1 *1st*
Anggota *Member*	Diah Natalisa	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 *The Decree of the State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-88 / MBU / 05/2017 dated May 3, 2017*	3 Mei 2017 *May 3, 2017*	2 Mei 2022 *May 2, 2022*	Ke-1 *1st*

*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.
**A brief profile of each member of the Supervisory Board can be seen in the Profile section of the Supervisory Board, in the Company Profile chapter.*

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam rangka menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/

Duties and Responsibilities of the Supervisory Board

The Supervisory Board is the organ of the Company tasked with:

1. *Supervising the Company's management carried out by the Board of Directors.*
2. *Providing advice to the Board of Directors in carrying out management activities of the Company.*

The supervision activities carried out by the Supervisory Board in order to assess the Company is conducted by comparing the actual situation with the pre-determined conditions, both in terms of financial and/or operational. To carry out the tasks

atau bidang teknis operasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi.
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
3. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
5. Memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
6. Mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.

referred to above, the Supervisory Board is obliged to do the following:

1. *Provide opinions and suggestions to the Minister regarding the Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget proposed by the Directors.*
2. *Follow the development of the Company's activities, and give opinions and suggestions to the Minister regarding any issues considered important for the management of the Company.*
3. *Immediately report to the Minister any symptoms of declining Company performance.*
4. *Conduct research and review the Periodic Reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report.*
5. *Monitor and ensure that the principles of GCG have been implemented effectively and sustainably.*
6. *Hold regular meetings, at least once every month.*

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Dewan Pengawas dapat selalu memahami perkembangan hal-hal terkait industri penjaminan, Dewan Pengawas mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Tentang kegiatan program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development Program

For the Supervisory Board to always understand the development of matters related to the guarantee industry, the Supervisory Board must follow a competency development program in the form of seminars, workshops, or other activities that can improve knowledge and competence.

Regarding the competency development program activities followed by the Supervisory Board throughout 2018, it can be seen the Company Profile chapter in this Annual Report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Tahun 2018

Selama tahun 2018, Dewan Pengawas telah melakukan 12 (dua belas) kali rapat internal, 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan Direksi, dan 2 (dua) kali Rapat Pembahasan Bersama dengan Kementerian BUMN selaku Pemilik Modal. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas dapat tergambar dari produk hukum yang dikeluarkan. Selama tahun 2018 telah diterbitkan 60 (enam puluh) surat dan 9 (Sembilan) keputusan.

Dewan Pengawas telah melakukan *monitoring* tindak lanjut atas masalah-masalah penting di lingkup Perusahaan serta berupaya aktif dalam membantu Direksi untuk menyelesaikan

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Supervisory Board in 2018

In 2018, the Supervisory Board conducted 12 (twelve) internal meetings, 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors, and 2 (two) Joint Discussion Meetings with the Ministry of SOEs as the Equity Owner. The implementation of the duties and responsibilities of the Supervisory Board can be reflected in the legal products issued. In 2018, 60 (sixty) letters and 9 (nine) decisions were issued.

The Supervisory Board has monitored follow-up on important issues within the Company as well as performed active efforts to assist the Board of Directors in completing any problems that

setiap masalah yang terjadi dengan memberikan saran dan masukan. Perkembangan tindak ianjut permasalahan strategis dibahas secara intensif dalam kesempatan rapat bulanan Dewan Pengawas.

occur by giving advice and input. The development of a strategic problem was discussed intensively at the Board of Supervisors monthly meeting.

Dewan Pengawas melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Selama tahun 2018, Dewan Pengawas telah melaksanakan 7 (tujuh) kali kunjungan, dengan rincian sebagai berikut:

The Supervisory Board carries out field visits to get a more accurate depiction/information about the areas or aspects that need the Company's attention. In 2018, the Supervisory Board has conducted 7 (seven) visits, with details as follows:

Tanggal *Date*	**Lokasi** *Location*	**Perihal** *Reasons of Visit*	**Kehadiran** *The Visiting Party*
11-12 Januari 2018 *January 11 to 12, 2018*	Kantor Wilayah V Semarang dan Kantor Cabang Solo *Region V Semarang Office and Solo Branch Office*	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang *Monitoring the Performance Evaluation of Regional Offices and Branch Offices*	1. Sri Mulyanto 2. Noor Ida Khomsiyati 3. Slamet Wiyono
21 Februari 2018 *February 21, 2018*	Kantor Wilayah III Jakarta dan Kantor Cabang Jakarta *Regional III Jakarta Office and Jakarta Branch Office*	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang *Monitoring the Performance Evaluation of Regional Offices and Branch Offices*	1. Dahlan Siamat 2. Subandriyo 3. Dody HP
28 Maret 2018 *March 28, 2018*	Kantor Wilayah VI Surabaya dan Kantor Cabang Surabaya *Region VI Surabaya Office and Surabaya Branch Office*	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang *Monitoring the Performance Evaluation of Regional Offices and Branch Offices*	1. Sri Mulyanto 2. Diah Natalisa 3. Alvin Nur W
6 April 2018 *April 6, 2018*	Kantor Wilayah II Palembang dan Kantor Cabang Palembang *Region II Palembang Office and Palembang Branch Office*	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang *Monitoring the Performance Evaluation of Regional Offices and Branch Offices*	1. Subandriyo 2. Slamet Wiyono 3. Taufika Diannya
27 Mei 2018 *May 27, 2018*	Kantor Wilayah IX Makassar dan Kantor Cabang Makassar *Region IX Makassar Office and Makassar Branch Office*	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang *Monitoring the Performance Evaluation of Regional Offices and Branch Offices*	1. Subandriyo 2. Slamet Wiyono

Tanggal *Date*	**Lokasi** *Location*	**Perihal** *Reasons of Visit*	**Kehadiran** *The Visiting Party*
15 November 2018 *November 15, 2018*	Kantor Wilayah Denpasar dan Kantor Cabang Denpasar *Denpasar Regional Office and Denpasar Branch Office*	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang *Monitoring the Performance Evaluation of Regional Offices and Branch Offices*	1. Sri Mulyanto 2. Noor Ida Khomsiyati 3. Alvin Nur W
10 Desember 2018 *December 10, 2018*	Kantor Wilayah Bandung dan Kantor Cabang Bandung *Bandung Regional Office and Bandung Branch Office*	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang *Monitoring the Performance Evaluation of Regional Offices and Branch Offices*	1. Subandriyo 2. Slamet Wiyono

Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas pengawasan menunjukkan bahwa capaian kinerja dari program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2018 secara umum dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat teriihat dari pencapaian skor KPI (*Key Performance Indicator*) Dewan Pengawas tahun 2018 sebesar 100,00 (sangat baik).

The results of the measurement of the implementation of supervisory duties indicate that the performance achievements of work programs and activities carried out during 2018 can generally be categorized as 'Very Good'. This can be seen from the achievement of the Board of Supervisors' KPI (Key Performance Indicator) score of 2018 of 100.00 (Very Good).

Dewan Pengawas juga telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2019 yang masih diarahkan pada tiga aspek strategis, yakni aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat, aspek Pelaporan, dan aspek Dinamis. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan antara lain dengan cara:

1. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan;
2. Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor cabang/ proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
3. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
4. Menugaskan Komite Audit, dan Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.

The Supervisory Board has also compiled a work plan for 2019 which is still directed at three strategic aspects, namely the aspects of Supervision and Advice, Reporting, and Dynamic. The supervision activities carried out by the Supervisory Board consist of:

1. *Request written information from the Board of Directors about a problem at the Company;*
2. *Make visits to certain work units/branch offices/projects, with (or without) previously notifying the Directors;*
3. *Provide responses to periodic reports from the Board of Directors;*
4. *Assign Audit Committee, and Investment and Risk Management Committee to carry out supervisory duties.*

Dasar ketentuan dalam melakukan pengawasan pada pengelolaan perusahaan senantiasa mengacu pada ketentuan perundangan-undangan seperti Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo. PER-09/ MBU/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG pada BUMN, Peraturan OJK No. 3/ POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan, serta dasar Anggaran Dasar perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perum Jamkrindo).

The basic provisions in conducting supervision of the management of the Company always refer to the provisions of legislation such as the Minister of SOEs Regulation Nor. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 jo. PER-09 / MBU / 2012 dated July 16, 2012, regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, the Financial Service Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, and the Articles of Association of the Company listed in Government Regulation (PP) Number 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo.

Dewan Pengawas Independen

Dewan Pengawas Independen merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak terafiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip- prinsip GCG, agar dapat menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Independen

Sesuai dengan POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, kriteria Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen adalah :

1. berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. berdomisili di Indonesia.

Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen Lembaga Penjamin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama;
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
3. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; dan
4. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen dimaksud menjabat.

Independent Supervisory Board

The Independent Supervisory Board is a member of the Supervisory Board who is not affiliated with members of the Supervisory Board, Board members and/or controlling shareholders, as well as free from business relationships or other relationships that can affect its ability to act independently in accordance with GCG principles. This is to ensure the desired objective and independent business climate, and to maintain "fairness" and balance between the interests of shareholders and the interests of the majority shareholders including public shareholders and other stakeholders.

Criteria for Independent Supervisory Board Members

In accordance with the regulation of the financial service authority (POJK) Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for the Guarantee Institution, the criteria of Independent Commissioners / Independent Supervisory Board members are:

1. *Indonesian citizenship; and*
2. *domiciled in Indonesia.*

The Independent Commissioner/Independent Supervisory Board members of the Guarantee Institution must meet the following requirements:

1. *has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or shareholders of the Guarantee Institution, within the same Guarantee Institution;*
2. *has never become a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of the Supervisory Board, a member of the Sharia Supervisory Board, or taken a position of 1 (one) level below the Board of Directors in the same Guarantee Institution or other business entity that has affiliation with the Guaranee Institution in the Company within a period of the last 6 (six) month;*
3. *understand the regulations in the field of Guarantees, Sharia Guarantees, Re-Guarantees, and/or Sharia Re-Guarantee, and other relevant rules and regulations; and*
4. *has a good knowledge of the finances of the Guarantee Institution where the Independent Commissioner/ Independent Supervisory Board performs his/her duties.*

Pernyataan Independensi Dewan Pengawas Independen

Sri Mulyanto sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus Dewan Pengawas Independen Jamkrindo telah membuat pernyataan independensi sebagaimana terlampir.

Statement of Independence of the Independent Supervisory Board

Sri Mulyanto as Chairperson of the Supervisory Board as well as Jamkrindo's Independent Supervisory Board has made a statement of independence as attached in this document.

PERNYATAAN
DEWAN PENGAWAS PERUM JAMKRINDO
DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan pembubaran BUMN;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 jo. Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin;
f. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* dan *Code of Conduct*.

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : **SRI MULYANTO**

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen Perum Jamkrindo

Menyatakan bahwa:

1. Kepemilikan Saham
   - ☑ Saya tidak memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.
   - ☐ Saya memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.

   - ☑ Keluarga saya tidak memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.
   - ☐ Keluarga saya memiliki saham pada Perum Jamkrindo dan/atau anak perusahaannya.

   - ☑ Saya tidak memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.
   - ☐ Saya memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.

   - ☑ Keluarga saya tidak memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.
   - ☐ Keluarga saya memiliki saham diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Lembaga/Institusi tersebut.

Setiap.../2

-2-

Setiap adanya perubahan portofolio kepemilikan saham pribadi maupun anggota keluarga baik di Perum Jamkrindo/anak perusahaan Perum Jamkrindo/diluar Perum Jamkrindo seperti Lembaga Penjamin lain/Perusahaan Jasa Keuangan dan/atau anak perusahaannya akan saya laporkan kepada Sekretaris Perusahaan melalui penyerahan daftar khusus kepemilikan saham.

2. Hubungan Keluarga
   - ☑ Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo.
   - ☐ Mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Dewan Pengawas	Nama Dewan Pengawas Direksi/Dewan Pengawas Syariah/Kementerian BUMN

3. Hubungan Keuangan
   - ☑ Tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo.
   - ☐ Mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Dewan Pengawas	Nama Dewan Pengawas Direksi/Dewan Pengawas Syariah/Kementerian BUMN	Penjelasan singkat

4. ☑ Tidak memiliki aktivitas sbb.: ☐ Memiliki aktivitas sbb.:
   a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di Perum Jamkrindo.
   b. Menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
   c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di Perum Jamkrindo.

5. Tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan pemberian perintah maupun melakukan sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/keluarga, jabatan atau golongan dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*).

6. Menghindari.../3

-3-

6. Menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada pengawasan saya sebagai Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.
7. Dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional Perusahaan pada tahun 2018 akan bertindak independen terutama dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas.
8. Senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan, dan professional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta serta hal-hal material apapun dan kami bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Jakarta, 3 Januari 2019

SRI MULYANTO

DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Pengawas No. 89/Kep-Dir/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi (*Board Manual*), Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu kepada *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012—KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. *Board Manual* merupakan kompilasi dan implementasi dari prinsip-prinsip hukum Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance* (GCG).

Ruang lingkup *Board Manual* adalah mengatur dan menjelaskan pelaksanaan hubungan kerja antar organ Direksi dan organ Dewan Pengawas di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Selain mengatur tentang kegiatan antar organ serta tata laksana hubungan kerja Direksi dan Dewan Pengawas, dalam *Board Manual* Direksi juga di atur tentang tugas serta wewenang dan kewajiban Direksi, pembagian kerja Direksi, rapat Direksi, program pengenalan Direksi, pendidikan berkelanjutan bagi Direksi, serta organ pendukung Direksi.

Board Manual ini menjadi acuan dalam pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG melalui kejelasan sistem dan struktur yang menyangkut hubungan antar organ

BOARD OF DIRECTORS

Based on the Decree of the Board of Directors and the Supervisory Board No. 89/Kep-Dir XII/2012 dated December 3, 2012, concerning Guidelines for the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Directors is the Company's organ responsible for the management of the Company for the interest of the Company and its purposes, and to represent the Company inside or outside the court in accordance with the Articles of Association.

The Board Manual and Code of Conduct

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Board Manual of the Board of Directors and Commissioners which has been ratified through a Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo No. 89/Kep-Dir/XII/2012 — KEP-06/DP-JAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012. The Board Manual is a compilation and implementation of the legal principles of the Company, as stipulated in Law Number 19/2003 concerning State-Owned Enterprises, and Government Regulations Number 35/2018 concerning Perum Jamkrindo and Good Corporate Governance (GCG) best practices.

One of the coverage of the Board Manual is to regulate and explain the implementation of work relations between the organs of the Board of Directors and the organs of the Supervisory Board in the Company with reference to the provisions contained in the Company's Articles of Association and/or the provisions contained in the applicable laws and regulations. The Board of Directors is the Company's organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and to represent the Company both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association.

In addition to regulating inter-organ activities as well as the management of the Board of Directors and Supervisory Board, in the Board Manual, it also regulates the Board of Directors' duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors, distribution of duties of the Directors, the Board of Directors introduction programs, the continuing education program for the Directors, and the Directors' supporting organs.

This Board Manual becomes a reference in the management of the Company based on the principles of GCG through the clarity of the system and structure concerning the relationship

utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kriteria Direksi

Penetapan pedoman kualifikasi Direksi Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Perusahaan bersandar pada Peraturan Mentri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan aturan tersebut terdapat ketetapan mengenai persyaratan formal, materiil dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang Direksi Perum yang mencakup:

between the Company's main organs as referred to in Article 2 paragraph (2) of the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs).

Criteria for Directors

The establishment of the Company's Director's qualification guidelines refers to the prevailing laws and regulations. In this case, the Company relies on the Minister of SOEs Regulation No. PER-03 / MBU / 02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of State Owned Enterprises Board of Directors.

Based on these rules, there are provisions concerning formal, material and other requirements that must be met by a Director of Perum Jamkrindo which includes:

Persyaratan *Requirements*	**Uraian** *Description*	
Formal	• Mampu melaksanakan perbuatan hukum • Tidak pernah dinyatakan pailit • Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Perum dinyatakan pailit; dan • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara	• *The ability to carry out legal actions* • *Has never been declared bankrupt* • *Has never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners / Supervisory Board that was found guilty of causing a Company / Perum to be declared bankrupt; and* • *Has never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances*
Materil *Material*	• Integritas • Dedikasi • Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen • Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan • Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya	• *Possesses Integrity* • *Is dedicated* • *Understands the Company management problems related to one of the management functions* • *Has adequate knowledge in the business field of the Company/Public Corporation in which the relevant person is nominated; and* • *Can provide sufficient time to carry out their duties*

Persyaratan *Requirements*	Uraian *Description*	
Persyaratan lainnya Other Requirements	Persyaratan lain anggota Direksi, yaitu: • Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II • Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah • Tidak menjabat sebagai anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut • Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan Komisaris/dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter • Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan	*Other requirements for members of the Supervisory Board are:* • *He/she is not a member of a Political Party and/or a legislative candidate and/or legislative member. Legislative candidates or legislative members consisting of candidates/members of the House of Representative, Regional Representative Council, Level I Regional People's Representative Assembly, and Level II Regional People's Representative Assembly* • *He/she is not a candidate for Regional Head/Deputy Regional Head* • *He/she is not serving as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in the relevant SOEs for 2 (two) consecutive periods* • *He/she is physically and mentally healthy (is not suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as a member of the Board of Commissioners/ Supervisory board), as evidenced by a health certificate from a doctor* • *For prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies, it must be based on the proposal letter and the relevant agency*

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Pasal 14, disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Term of Office

Based on Government Regulation No. 35 of 2018 dated July 20, 2018 concerning Perum Jamkrindo, in Article 14, it is stated that members of the Board of Directors are appointed for a term of 5 (five) years, and can be reappointed for 1 (one) more subsequent term of office.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2018

Di tahun 2018 tidak terjadi pergantian maupun perubahan susunan dan komposisi keanggotaan jajaran Direksi Perusahaan, susunan dan komposisi Direksi per 31 Desember 2018 dapat dilihat di bawah ini.

The Structure and Composition of Directors in 2018

In 2018, there was no change in the structure and composition of the membership of the Company's Board of Directors. The structure and composition of the Directors as of December 31, 2018, can be seen below.

Susunan Direksi Perum Jamkrindo per 31 Desember 2018

The Composition of the Board of Directors of Perum Jamkrindo as of December 31, 2018

Jabatan *Position*	**Nama** *Name*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Beginning Term of Office*	**Masa Akhir Jabatan** *Term of Office Ending*	**Periode Jabatan** *Term of Office*
Direktur Utama *President Director*	Randi Anto (Direktur Utama *President Director)*	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 *The Decree of the State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-249 / MBU / 11/2017*	21 November 2017 *November 21, 2017*	20 November 2022 *November 22, 2022*	Ke-1 *1st*
Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee*	Amin Masudi (Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee)*	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 *The Decree of the State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-187/ MBU/09/2017*	7 September 2017 *September 7, 2017*	6 September 2022 September 6, 2022	Ke-1 *1st*
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan *Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan *Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 *The Decree of the State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-187/ MBU/09/2017*	7 September 2017 *September 7, 2017*	6 September 2022 *September 6, 2022*	Ke-1 *1st*
Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operations and Network*	Kadar Wisnuwarnaman (Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operations and Network)*	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 *The Decree of the State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-249 / MBU / 11/2017*	21 November 2017 *November 21, 2017*	20 November 2022 *November 22, 2022*	Ke-1 *1st*
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko/ *Director of Finance, Investment and Risk Management*	I. Rusdonobanu	Periode Ke-1: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 Periode Ke-2: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-22/MBU/01/2018 *For the 1st Period: The Decree of the State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-12 / MBU / 2013 j.o Decree of the Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-44 / MBU / 2014* *For the 2nd Period: The Decree of State Minister of SOEs as the Equity Owner of Perum Jamkrindo No. SK-22 / MBU / 01/2018*	15 Januari 2018 *January 15, 2018*	14 Januari 2023 *January 14, 2023*	Ke-2 *2nd*

*Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan.
**A brief profile of each member of the Board of Directors can be seen in the Directors Profile section, in the Company Profile chapter.*

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Dalam melaksanakan Kepengurusan Perusahaan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi. Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka ditetapkan salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan urutan sebagai berikut:

1. Salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang. Direktur sebagaimana dimaksud pada butir (c) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Company Management Policy

The Company's Management Policy is established by the Board of Directors. In carrying out the Management of the Company, the President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company, provided that all the actions of the President Director are approved by the Board of Directors Meeting. If the President Director is absent for any reason, then a Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors in the following order:

1. *One of the Directors appointed by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.*
2. *In the event that the President Director does not appoint anyone, one of the Directors appointed by and among the members of the Board of Directors is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.*
3. *In the case of (b) cannot be carried out, one of the Directors who has served the longest as a member of the Director is authorized to act for and on behalf of the Directors*
4. *In the case of a Director who has served the longest as a member of the Board of Directors are more than 1 (one) person, the Director as referred to in point (c) with the oldest in the age is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors*

Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yang telah di susun dalam board manual Direksi, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, di mana tugas, kewenangan, dan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok

1. Berwenang penuh untuk melakukan segala tindakan terkait dengan Pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebljakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Anggaran Dasar.
2. Berwenang untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Anggaran Dasar, serta Keputusan Menteri.

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Directors

The Duties and Responsibilities of the Board of Directors which have been arranged in the Board Manual refer to the Government Regulation No. 35 of 2018 dated July 20, 2018, concerning Perum Jamkrindo in which it is stated that the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

Main Duties

1. *The Directors has the full authority to take all actions related to the Management of the Company in accordance with policies that are deemed appropriate within the limits stipulated in the laws and regulations concerning State-Owned Enterprises (SOEs), and Articles of Association.*
2. *The Directors has the unlimited and unconditional full authorities to represent the Company inside and outside of court unless otherwise stipulated in legislation concerning State-Owned Enterprises (SOEs), Articles of Association, as well as Ministerial Decrees.*

Kewenangan

1. Menetapkan kebijakan Pengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendirisendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
5. Mengangkat dan memberhentikan peke{a Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan jabatan lainnya;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Authorities

1. *To establish the Company Management policies;*
2. *To regulate the devolution of authority of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company inside and outside the court;*
3. *To regulate the devolution of authority of the Board of Directors to one or several employees of the Company both individually and together or to others, to represent the Company inside and outside the court;*
4. *To regulate provisions concerning the employment of the Company, including the stipulation of salaries, pensions or old age insurance and other income for Company employees based on statutory provisions. The decisions on salary stipulation, pensions or old age benefits and other forms of income for the employees which are not stated in the provisions of the stipulated obligation of laws and regulations must get prior approval from the Minister;*
5. *To appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations, and prevailing laws and regulations;*
6. *To appoint and dismiss the Corporate Secretary and Head of the Internal Audit Unit, and other positions;*
7. *To carry out all other actions regarding the management and ownership of Company property, the Company's partnership with other parties, and represent the Company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as stipulated in the Articles of Association and/or statutory provisions.*

Kewajiban

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tqiuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan Rencana Jangka panjang perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri;
3. Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan beserta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri atau Dewan Pengawas;

Responsibilities

1. *To work for and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with the intent and purpose and business activities;*
2. *To prepare the company's Long Term Plan and submit it to the Supervisory Board and the Minister for approval from the Minister;*
3. *To prepare the Company's Work Plan and Budget through its amendments, and submit it to the Supervisory Board and the Minister for approval from the Minister or the Supervisory Board;*

4. Memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
5. Memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Rencana Ke{a dan Anggaran Perusahaan dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan merupakan kewenangan Menteri;
6. Memberikan penjelasan kepada Dewan pengawas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan merupakan kewenangan Dewan Pengawas;
7. Membuat risalah rapat Direksi;
8. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban Pengurusan Perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
10. Menyampaikan laporan kepada Dewan pengawas mengenai penetapan anggota direksi dan komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
11. Menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan semesteran kepada Menteri;
12. Menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas;
13. Memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan apabila ditanyakan atau diminta anggota Dewan Pengawas dan/ atau Menteri;
14. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahkan;
15. Memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Laporan Tahunan;
16. Memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
17. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalah rapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
18. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi Pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan Pengawasan;
19. Memberikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan khusus dan laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri;

4. *To provide an explanation to the Minister regarding the Company's Long-Term Plan;*
5. *To provide an explanation to the Minister regarding the Company's Plan and the Budget in the event that the ratification of the Company's Work Plan and Budget is the authority of the Minister ;*
6. *To provide an explanation to the Board of Supervisors regarding the Work Plan and Budget of the Company in the event that the ratification of the Company Work Plan and Budget is the authority of the Supervisory Board;*
7. *To make minutes of the Board of Directors meeting;*
8. *To write annual reports as a form of accountability for Company Management and financial documents in accordance with statutory provisions;*
9. *To prepare financial statements based on the Financial Accounting Standards and submit them to the Public Accounting Firm for auditing;*
10. *To submit a report to the supervisory board regarding the establishment of members of the board of directors and commissioners in subsidiaries and/or joint ventures ;*
11. *To deliver and provide an explanation of the semesterly report to the Minister;*
12. *To submit and provide an explanation of the quarterly report to the Supervisory Board;*
13. *To provide explanations relating to Company Management if asked or asked by members of the Supervisory Board and/ or Minister;*
14. *To submit annual reports which include financial reports to the Minister for approval and approval;*
15. *To provide an explanation to the Minister regarding the annual report ;*
16. *To archive the minutes of the Board of Supervisors' meeting, minutes of Board of Directors' meetings, annual reports, financial documents, and other Company's documents;*
17. *To archive at the Company's domicile, the minutes of the Board of Supervisors' meeting, minutes of Board of Directors' meetings, annual reports, financial documents, and other Company's documents;*
18. *To compile the accounting system in accordance with the Financial Accounting Standards and the principles of internal control, especially the functions of Management, Recording, Storage, and Supervision;*
19. *To provide periodic reports which are in accordance with the provisions of laws and regulations, as well as special reports and other reports whenever requested by the Supervisory Board and/or the Minister*

20. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
21. Menyusun dan menetapkan cetak biru (*bluepint*) organisasi Perusahaan;
22. Menyusun indikator pencapaian kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan Menteri;
23. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga;

20. To prepare the composition of the Company's organization, complete with its details and duties ;
21. To arrange and establish blueprints of Company organizations;
22. To arrange indicators for the performance of the Directors to be requested by the Minister for approval;
23. To carry out other responsibilities in accordance with the provisions stipulated in this Government Regulation and those stipulated by the Minister in accordance with the provisions of the legislation;

Pembagian Lingkup Tugas Antar Direksi

Distribution of Duties of the Directors

Tugas dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Ketetapan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perum Jamkrindo yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas melalui surat No. S-24/DP/V /2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Perum Jamkrindo. Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan membagi tugas dan wewenang sebagai berikut:

The duties and authorities of each of the Directors are regulated in the Decree of the Directors No. 01 / KD / 1 / V / 2018 dated May 30, 2018, concerning the Organizational Structure of Perum Jamkrindo that has been approved by the Supervisory Board through letter No. S-24 / DP / V / 2018 dated May 23, 2018, concerning the Approval of Amendment to the Organization Structure of Perum Jamkrindo. In carrying out its activities, the members of the Company's Directors distribute the duties and authorities as follows:

Nama dan Jabatan *Names and Positions*	**Tugas dan Wewenang** *Duties and Authorities*	
Direktur Utama, Randi Anto President Director, Randi Anto	Direktur Utama memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1. Audit Wilayah; 2. Audit Teknologi Informasi dan Korporasi; 3. Pengembangan Standar dan Kualitas Audit; 4. Kesekretariatan; 5. Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan; 6. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; 7. Riset dan Pengembangan Produk; 8. Perencanaan dan Pengembangan Bisnis; dan 9. Sistem Manajemen dan Pengembangan Organisasi.	*The President Director has duties and authorities including:* *1. Regional Audit;* *2. Audit of Information and Corporate Technology;* *3. Development of Audit Standards and Quality;* *4. Secretariat;* *5. Public Relations and Corporate Communication;* *6. Partnership and Community Development Program;* *7. Product Research and Development;* *8. Business Planning and Development; and* *9. Organizational Management and Development System.*
Direktur Bisnis Penjaminan, Amin Masudi *Director of Guarantee Business, Amin Masudi*	Direktur Bisnis Penjaminan memiliki tugas dan wewenang meliputi Bisnis Penjaminan Program dan Non Program baik Bank BUMN, Bank Swasta, Lembaga Non Bank, Suretyship, Resi Gudang maupun Penjaminan Syariah, Pengelolaan Portofolio dan Kebijakan Perusahaan.	*The Director of Business Guarantee has duties and authorities covering the Program and Non-Program Guarantee Business for SOEs Bank, Private Bank, Non-Bank Institution, Suretyship, Warehouse Receipt and Sharia Guarantee, Portfolio Management, and Company Policy.*

Nama dan Jabatan *Names and Positions*	**Tugas dan Wewenang** *Duties and Authorities*	
Direktur Operasional dan Jaringan, Kadar Wisnuwarman *Director of Operations and Network, Kadar Wisnuwarman*	Direktur Operasional dan Jaringan memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1. Teknik Bisnis; 2. Adminsitrasi Bisnis; 3. Pengelolaan Bisnis; 4. Subrogasi; 5. Jaringan Kerja; 6. Layanan dan Pengendalian Mutu; 7. Perencanaan dan Strategi Teknologi Informasi; 8. Pengembangan Sistem Aplikasi; 9. Operasional Teknologi Informasi; dan 10. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance).	*The Director of Operations and Network has the duties and authorities which include:* *1. Business Engineering;* *2. Business Administration;* *3. Business Management;* *4. Subrogation;* *5. Networking;* *6. Service and Quality Control;* *7. Information Technology Planning and Strategy;* *8. Application System Development;* *9. Information Technology Operations; and* *10. Information Technology Governance (IT Governance).*
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan, Sulis Usdoko *Director of HRM, General Affairs, and Compliance, Sulis Usdoko*	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1. Kebijakan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM); 2. Pendidikan dan Pelatihan; 3. Operasional dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); 4. Pengadaan Barang dan Jasa; 5. Administrasi dan Pelayanan Intern; 6. Manajemen Aktiva Tetap; 7. Hukum; dan 8. Kepatuhan.	*The Director of HRM, General Affairs, and Compliance has the duties and authorities which include:* *1. Human Resource Management (HRM) Policy and Development;* *2. Education and Training;* *3. Operations and Management of Human Resources (HR);* *4. Procurement of goods and services;* *5. Internal Administration and Services;* *6. Fixed Assets Management;* *7. Law; and* *8. Compliance.*
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko, Rusdonobanu *Director of Finance, Investment and Risk Management, Rusdonobanu*	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewcnang meliputi: Investasi; 1. Operasional dan Layanan Keuangan; 2. Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Akuntansi; 3. Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; 4. Laporan dan Sistem Informasi Manajemen; 5. Pengelolaan Risiko Penjaminan dan Korporasi; 6. Pemeringkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Konsultasi Manajemen; dan 7. Klaim.	*The Director of Finance, Investment and Risk Management has duties and authorities which include:* *Investment;* *1. Operations and Financial Services;* *2. Accounting Supervision and Control Policy;* *3. Budget Planning and Control;* *4. Management Information Systems and Reports;* *5. Management of Guarantee and Corporate Risk;* *6. Ranking of Micro Enterprises, Small Businesses and Medium Enterprises, and Management Consultations; and* *7. Claim.*

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Direksi dapat selalu memahami perkembangan hal-hal terkait industri penjaminan, Direksi mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Tentang kegiatan program pengembangan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development Program

In order for the Directors to always understand the development of matters related to the guarantee industry, the Board of Directors follows a competency development program in the form of seminars, workshops, or other activities that can improve knowledge and competence.

In regards to the competency development program activities that the Board of Directors participated in throughout 2018, they can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

Keputusan Strategis Tahun 2018

Strategic Decision in 2018

Beberapa keputusan strategis yang tertuang dalam keputusan dan surat Direksi adalah:

Some strategic decisions contained in the decrees and letters of the Directors are:

No	Perihal *Subject Matters*	Nomor *Number*	Tanggal *Date*
1	Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia *Guidelines for Managing a Whistleblowing System of Perum Jamkrindo*	04/Per-Dir/IV/2018	10 April 2018 *April 10, 2018*
2	Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia *Organizational Structure of Perum Jamkrindo*	01/KD/1/V/2018	30 Mei 2018 *May 30, 2018*
3	Kebijakan Performance Management System (PMS) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia *Policy on Performance Management System (PMS) of Perum Jamkrindo*	09/Per-Dir/1/VII/2018	12 Juli 2018 *July 12, 2018*
4	Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia *Information Security System Management Policy of Perum Jamkrindo*	18/Per-Dir/3/XI/2018	28 November 2018 *November 28, 2018*
5	Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia *Risk Management Policy of Perum Jamkrindo*	20/Per-Dir/5/XII/2018	20 Desember 2018 *December 20, 2018*
6	Kebijakan Strategi *Anti Fraud* Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia *Anti Fraud Strategy Policy of Perum Jamkrindo*	22/Per-Dir/5/XII/2018	20 Desember 2018 *December 20, 2018*

TRANSPARANSI INFORMASI TERKAIT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

TRANSPARENCY OF INFORMATION RELATED TO THE BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS

Assessment Dewan Pengawas Dan Direksi

Assessment Of The Board Of Supervisors And Board Of Directors

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

As the main organ in the Company, the Board of Commissioners and Directors have a central role in the growth of the Company. The assessment of these two organs is a necessity, especially because the Company is an SOE that is guided to implement the principles of GCG to the SOEs standards as well as an assessment of these implementations.

Assessment terhadap penerapan GCG mengacu kepada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Assessment of the implementation of GCG refers to a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The

pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan di atas.

Sejalan dengan *assessment* yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi, Manajemen Perusahaan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses *assessment*. Untuk *assessment* penerapan GCG tahun ukur 2017, telah dilakukan *self assessment* oleh Tim *Self Assessment* Internal Perum Jamkrindo. Hasil *self assessment* memberikan predikat "Sangat Baik", dengan nilai mencapai 92,470. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing meraih nilai perolehan 91,671 dan 92,647, keduanya dengan predikat "Sangat Baik".

method of assessment and evaluation is carried out by using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with the values determined as stipulated in the Copy of the Decree mentioned above.

In line with the aim of the assessment which is to provide evaluation and recommendations, the Company Management is expected to follow up on recommendations that arise from the assessment process. For an assessment of 2017 GCG implementation, self-assessment has been carried out by the Internal Self Assessment Team of Perum Jamkrindo. The results of the self-assessment were credited with the category of "Very Good", with scores reaching 92,470. In particular, the aspects of the Board of Commissioners/ Supervisory Board and Directors, each of which achieved the score of 91,671 and 92,647 respectively, both with the category of "Very Good".

Jenis Penilaian *Type of Assessment*	:	*Self Assessment*/Evaluasi *Self Assessment / Evaluation*
Penilai *Assessor*	:	Tim Self Assessment Internal Perum Jamkrindo *Perum Jamkrindo's Internal Self Assessment Team*
Tahun Buku Penerapan *Year of Implementation*	:	1 Januari - 31 Desember 2017 *January 1 - December 31, 2017*
Periode Pengukuran *Period of Measurement*	:	26 September 2017 - 28 Februari 2018 *September 26, 2017 - February 28, 2018*

Hasil Assessment Penerapan GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2017 (Metode Penilaian Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

The following are the results of GCG Implementation Assessment for 2017, for the Board of Commissioners and Directors' Aspects, (with the Assessment Method based on Copies of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16 / S.MBU / 2012)

Aspek Pengujian/ *Aspects of the Assessment*	**Bobot/** *Value*	**Pencapaian Tahun Buku 2016**		
		Nilai/ *Score*	**Pencapaian/** *Achievement (%)*	**Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG/** *Qualification of GCG Implementation Quality*
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/ *Board of Commissioners / Supervisory Board*	35,00	32,085	91,671	"Sangat Baik" *"Very Good"*
Direksi/ *Board of Directors*	35,00	32,426	92,647	"Sangat Baik" *"Very Good"*

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Information: 0-50: Bad | 50-60: Poor | 60-75: Satisfactory | 75-85: Good | 85-100: Very Good

Tentang rekomendasi hasil *assessment* penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun ukur 2017 dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan dapat dilihat pada bagian *Assessment* Penerapan GCG di bagian atas bab ini.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Dan Direksi

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian Dewan Pengawas Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Kebijakan Terkait Penilaian Kinerja Dewan Pengawas bahwa Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian kinerja secara mandiri (*self assessment*) yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*).

Pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Pengawas secara kolegial dilakukan berdasarkan capaian *Key Performance Indicators* yang mencakup aspek-aspek berikut:
1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan, bobot 60%;
2. Aspek Pelaporan, bobot 30%;
3. Aspek Dinamis, bobot 10%.

Sedangkan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Pengawas secara individual dilakukan dengan memperhatikan ketentuan unsur-unsur penilaian, adalah sebagai berikut:
1. Realisasi capaian total skor KPI Dewan Pengawas, bobot 60%; dan
2. Realisasi persentase kehadiran Dewan Pengawas (individual) dalam rapat, bobot 40%. Perhitungan bobot per jenis rapat, yaitu:
   a. Rapat Gabungan, bobot 50%;
   b. Rapat dengan Direktur Teknis, bobot 20%;
   c. Rapat dengan Komite, bobot 15% x 2 = 30%.

Pengukuran kinerja Dewan Pengawas dilaksanakan secara *self-assessment* oleh Komite Audit bersama dengan Komite Investasi dan Risiko Usaha, dan selanjutnya hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan Pengawas untuk dievaluasi sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan kepada Kementerian BUMN selaku Pemilik Modal, dalam bentuk Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi IPK dan Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas.

Information regarding the recommendations for the assessment results of GCG implementation for the Board of Commissioners and Directors aspects for the 2017 measurement year and follow-up actions taken by the Company can be seen in the GCG Implementation Assessment section at the top of this chapter.

Performance Assessment of The Board of Supervisors and Board of Directors

Assessment of the Performance of the Supervisory Board

The assessment of the Corporate Supervisory Board is carried out based on the Decree of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. KEP-04 / DP-JAMKRINDO / III / 2018 dated March 27, 2018, concerning the Policy Related to the Supervisory Board's Performance Assessment, which states that the Supervisory Board measures and evaluates performance independently based on Key Performance Indicators.

The collegial measurement and assessment of the performance of the Supervisory Board is carried out based on the achievements of Key Performance Indicators which cover the following aspects:
1. *The Monitoring and Guidance Aspects, with a value of 60%;*
2. *The Reporting Aspects, with a valued of 30%;*
3. *The Dynamic Aspect, with a value of 10%.*

The individual measurement and assessment of the performance of the Supervisory Board are carried out by taking into account the provisions of the evaluation elements, as follows:
1. *The realization of the total score of the KPI Supervisory Board with a value of 60%; and*
2. *The Realization of the percentage of attendance of the Board of Supervisors in the meeting valued at 40%. The calculation of the value per type of meeting are:*
   a. *The Joint Meeting is valued at 50%;*
   b. *The Meeting with Technical Director is valued at 20%; and*
   c. *The Meeting with the Committee is valued at 15% x 2 = 30%.*

The measurement of the supervisory board's performance is carried out on a self-assessment basis by the Audit Committee, together with the Business Risk and Investment Committee. the results will be reported to the Supervisory Board to be evaluated as input to improve the performance of the Supervisory Board in carrying out supervisory and advisory duties to the Directors. Furthermore, these results are submitted to the Ministry of SOEs as the Equity Owner, in the form of Quarterly Reports on the Development of the CPI Realization and the Annual Report of the Board of Supervisors' Supervisory Duties.

Hasil pengukuran terhadap pelaksanaan tugas pengawasan menunjukkan bahwa capaian kinerja dari program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2018 secara umum dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian skor KPI (*Key Performance Indicator*) Dewan Pengawas tahun 2018 sebesar 100 persen. Ke depan, Dewan Pengawas akan terus melakukan penyempurnaan dan peningkatan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI)/Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas dan hasil penilaian kinerja Dewan Pengawas tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The results of the measurement of the implementation of supervisory duties indicate that the performance achievements of work programs and activities carried out during 2018 can generally be categorized as "Very Good". This can be seen from the achievement of the KPI (Key Performance Indicator) score of the Supervisory Board in 2018 of 100 percent. In the future, the Supervisory Board will continue to make improvements and developments in order to carry out the duties of overseeing the Company more effectively, efficiently and more accountable. The realization of the Key Performance Indicators (KPI) for the Achievement of the Supervisory Board's Performance and the results of the performance of the Supervisory Board in 2018 are as follows:

No	Program Kerja *Work Program*	KPI		Bobot *Value*	Realisasi		Bobot *Value*
		Jumlah *Amount*	Satuan *Unit*		Jumlah *Amount*	Satuan *Unit*	
I	Aspek Pengawasan & Pengarahan *Monitoring & Guidance Aspects*			60,00			60,00
1	Rapat Internal Dewan Pengawas *Internal Meeting of the Supervisory Board*	12	Rapat *Meetings*	10,00	12	Rapat *Meetings*	10,00
2	Rapat Dewan Pengawas dan Direksi *Board of Supervisors and Directors Meetings*	12	Rapat *Meetings*	10,00	12	Rapat *Meetings*	10,00
3	Rapat Pembahasan RKAP Tahun 2019 *2019 Company Work Plan and Budget Discussion Meeting*	2	Rapat *Meetings*	10,00	2	Rapat *Meetings*	10,00
4	Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2017 *Company Performance Discussion Meeting 2017*	2	Rapat *Meetings*	5,00	2	Rapat *Meetings*	5,00
5	Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan *Advice-Giving and Feedback to the Directors in the Management of the Company*	12	Dokumen *Documents*	10,00	12	Dokumen *Documents*	10,00
6	Evaluasi Terhadap Auditor Eksternal *Evaluation of External Auditors*	1	Rapat *Meetings*	5,00	1	Rapat/ *Meetings*	5,00
7	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal *Evaluation of the Internal Control System*	2	Rapat *Meetings*	5,00	2	Rapat *Meetings*	5,00
8	Pengawasan Terhadap Anak Perusahaan *Supervision of Subsidiaries*	2	Rapat *Meetings*	5,00	2	Rapat *Meetings*	5,00
Sub Jumlah I/ *Subtotal I*				**60,00**			**60,00**

No	Program Kerja *Work Program*	KPI		Bobot *Value*	Realisasi		Bobot *Value*
		Jumlah *Amount*	Satuan *Unit*		Jumlah *Amount*	Satuan *Unit*	
II	Aspek Pelaporan *The Reporting Aspects*			30,00			30,00
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2019 *Compile the Work Plan and Budget of the Supervisory Board in 2019*	1	Dokumen *Documents*	5,00	1	Dokumen *Documents*	5,00
2	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas Tahun 2019 *Compile and Propose Indicators for Performance Achievement of the Supervisory Board in 2019*	1	Dokumen *Documents*	5,00	1	Dokumen *Documents*	5,00
3	Menyusun Laporan Berkala Tugas Pengawasan Dewas (Triwulanan) Tahun 2018 *Compile the 2018 Board's Quarterly Supervisory Duties Report*	4	Dokumen *Documents*	5,00	4	Dokumen *Documents*	5,00
4	Menyusun Laporan Berkala Hasil Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Tahun 2018 (Triwulanan) *Prepare Quarterly Periodic Reports on Evaluation Results for 2018 Company Performance*	4	Dokumen *Documents*	5,00	4	Dokumen *Documents*	5,00
5	Memberikan Tanggapan/Pendapat Terhadap Hal-Hal Yang Memerlukan Persetujuan dan/atau Rekomendasi Dewan Pengawas Sesuai Ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Peraturan Lainnya *Give a Response/Opinion to Matters that Require Approval and/or Recommendations of the Board of Supervisors in Accordance with the Provisions in the Articles of Association or Other Regulations*	4	Dokumen *Documents*	10,00	4	Dokumen *Documents*	10,00
Sub Jumlah II ***Subtotal II***				**30,00**			**30,00**
III	Aspek Dinamis *The Dynamic Aspect*			10,00			10,00
1	Kunjungan Kerja ke Cabang *Working Visit to Branch Offices*	4	Kegiatan/ *Activities*	5,00	4	Kegiatan/ *Activities*	5,00
2	Seminar/Workshop dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas dan Organ Pendukung Dewan Pengawas *Seminar/Workshop in the Context of Increasing Competency of Supervisory Board Members and Supporting Organ of the Supervisory Board*	4	Kegiatan/ *Activities*	5,00	4	Kegiatan/ *Activities*	5,00
Sub Jumlah III ***Subtotal III***				**10,00**			**10,00**
Jumlah ***Total***				**100,00**			**100,00**

Sistem Penilaian:
1. Penilaian maksimal sesuai dengan bobot masing-masing indicator.
2. Kriteria hasil penilaian:

Scoring system:
1. *Maximum assessment in accordance with the value of each indicator.*
2. *Criteria for assessment results:*

No.	Realisasi Skor *Score Realization*	Kriteria *Criteria*
1.	> 95 (maksimal 100) *≥ 95 (a maximum of 100)*	Sangat Baik *Very Good*
2.	> 80 s.d. 94	Baik *Good*
3.	> 65 s.d. 80	Cukup *Satisfactory*
4.	> 50 s.d. 65	Kurang *Poor*
5.	< 50	Sangat Kurang *Bad*

Sementara, berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas No. KEP-04/DP-JAMKRIND0/111/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Kebijakan Terkait Penilaian Kinerja Dewan Pengawas, realisasi capaian kinerja individual masing-masing Dewan Pengawas, adalah sebagai berikut.

Based on the Decree of the Supervisory Board No. KEP-04 / DP-JAMKRIND0 / 111/2018 dated March 27, 2018, concerning Policies Regarding the Performance of the Supervisory Board, the realization of individual performance achievements of each Supervisory Board is as follows.

Nama *Name*	Bobot Persentase Capaian Skor KPI Dewan Pengawas *Percentage Value of KPI Score Achievement of the Board of Supervisors*	Persentase Kehadiran Dewan Pengawas *Attendance Percentage of the Supervisory Board*				Bobot persentase kehadiran rapat *Meeting Attendance Percentage Value*	Total Persentasi Capaian Kinerja Individu *Total Performance Percentage of Each Individual Member*
		Rapat Gabungan *Joint Meetings*	Rapat dengan Direktur Teknis *Meetings with Technical Director*	Rapat dengan Komite *Meetings with the Committees*	Total Kehadiran Rapat *Total Meeting Attendance*		
	1	2	3	4	5=2+3+4	6=5x40%	7=1+6
Sri Mulyanto	60	50	20	30	100	40	100
Dahlan Siamat	60	so	18	28	96	38,4	98,4
Subandriyo	60	50	19	27	96	38,4	98,4

Nama *Name*	**Bobot Persentase Capaian Skor KPI Dewan Pengawas** *Percentage Value of KPI Score Achievement of the Board of Supervisors*	**Persentase Kehadiran Dewan Pengawas** *Attendance Percentage of the Supervisory Board*				**Bobot persentase kehadiran rapat** *Meeting Attendance Percentage Value*	**Total Persentasi Capaian Kinerja Individu** *Total Performance Percentage of Each Individual Member*
		Rapat Gabungan *Joint Meetings*	**Rapat dengan Direktur Teknis** *Meetings with Technical Director*	**Rapat dengan Komite** *Meetings with the Committees*	**Total Kehadiran Rapat** *Total Meeting Attendance*		
Noor Ida Khomsiyati	60	38	16	25	79	31,6	91,6
Diah Natalisa	60	29	9	9	47	18,8	78,8

Sistem Penilaian:

1. Realisasi capaian total skor KPI Dewan Pengawas, bobot 60%. Perhitungan mencakup:
   a. Aspek pengawasan dan pengarahan, bobot 60%
   b. Aspek pelaporan, bobot 30%
   c. Aspek dinamis, bobot 10%
2. Realisasi persentase kehadiran Dewan Pengawas (individual) dalam rapat, bobot 40%
   Perhitungan bobot per jenis rapat, yaitu:
   a. Rapat gabungan, bobot 50%
   b. Rapat dengan Direktut Teknis, bobot 20%
   c. Rapat dengan Komite, bobot 15% x 2 = 30%

Scoring System:

1. *Realization of the total score of the KPI Supervisory Board which is valued at 60%. Its calculations include:*
   a. Monitoring and Guidance Aspects valued at 60%
   b. Reporting aspects valued at 30%
   c. Dynamic aspect valued at 10%
2. *Realization of the attendance percentage of the Supervisory Board (individually) in the meeting, valued at 40%. Its value calculation per type of meeting is:*
   a. Joint Meetings at 50%
   b. Meetings with Technical Director at 20%
   c. Meetings with the Committees at 15% x 2 = 30%

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Penilaian atau evaluasi kinerja Direksi melekat pada *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan, yang mengacu kepada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun yang melakukan penilaian adalah setiap unit kerja sesuai perpektif atau Indikator Kinerja.

Indikator untuk mengukur kinerja Direksi yang melekat pada penilaian KPI Perusahaan, terdiri dari 5 (Lima) Perspektif (Keuangan, Fokus Pelanggan dan Pasar, Efektivitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung jawab Kemasyarakatan). Selain penilaian KPI, terdapat juga penilaian *Agent of Development* (AOD) dengan

Assessment of Directors' Performance

The performance assessment or evaluation of the Board of Directors is integrated to the Company's Key Performance Indicator (KPI), which refers to the Ministry of SOEs Letter No. S-08 / S.MBU / 2013 dated January 16, 2013, concerning Submission of Guidelines for Determining KPIs and Assessment Criteria for Superior Performance in State-Owned Enterprises (SOEs). The assessors are each work unit in accordance with the perspective or Performance Indicator.

The indicators to measure the performance of the Board of Directors Integrated to the Company's KPI assessment consist of 5 (Five) Perspectives (Finance, Customer and Market Focus, Product and Process Effectiveness, Workforce Focus, Leadership, Governance, and Social Responsibility). In addition to KPI's assessment, there is also an Agent of Development (AOD)

lingkup penilaian peningkatan kerja sama penjaminan Mekaar dengan PNM dan Peningkatan Volume Penjaminan Produk Kreasi Pegadaian, Pemeringkatan dan Pendampingan UMKM & BUMDes, Peningkatan Volume Penjaminan di Wilayah Indonesia Timur, Penjaminan Pembiayaan Produktif Non Program, Penyerapan *Plafond* Penjaminan KUR.

Dasar Penyusunan KPI Tahun 2018 sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. S-487/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018. Penilaian KPI tahun 2018 sebesar 102,04 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 96,00. Adapun KPI Tahun 2018 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia adalah sebagai berikut:

assessment with the scope of increasing Mekaar guarantee cooperation with PT PNM and Increasing the Volume of Guarantee for Produk Kreasi Pegadaian, Ranking and Assistance to MSMEs & Village-Owned Enterprises, Increasing Guarantee Volume in Eastern Indonesia, Guaranteed Non-Programming Financing, and Absorption of KUR Guarantee Limits.

The Basis for KPI Preparation in 2018 is in accordance with the letter of the Ministry of SOEs No. S-487 / MBU / 08/2017 dated August 31, 2017, regarding Shareholders / Equity Owners Aspirations in the Preparation of Company Work Plans and Budgets for 2018. The 2018 KPI Valuation of 102.04 is higher than the 2017 score of 96.00. The KPI for Perum Jamkrindo in 2018 is as follows:

KPI Kinerja dan Penilaian Direksi Tahun 2018
KPI of Directors' Performance and Valuation in 2018

No	Perspektif/Indikator Kinerja Kunci *Perspective/KPI*	Satuan *Unit*	*Formula*	RKAP 2018 *Company Work Plan and Budget 2018*		Desember 2018 *December 2018*	
				Bobot *Weight*	*Target*	Bobot *Weight*	*Target*
I	Perspektif Keuangan *Financial Perspectives*						
1	*Yield On Investment*	%	Hasil Investasi / Rata-rata Total Investasi *Investment Results / The Average of Total Investment*	5,00	6,78%	6,80%	5,01
2	*Net Profit Margin*	%	Laba Setelah Pajak (EAT) / Pendapatan IJP Bruto *Earning after Tax / Gross Guarantee Fee Income*	5,00	12,73%	24,21%	6,00
3	Penerimaan Subrogasi *Subrogation Income*	%	Pendapatan Subrogasi / Piutang Subrogasi *Subrogation Income / Subrogation Receivables*	5,00,00	8,32%	8,35%	5,02
4	*Credit Guarantee Growth*	%	Volume Penjaminan (n) – Volume Penjaminan 4(n-1) / Volume Penjaminan (n-1) *Guarantee Volume (n) – Guarantee Volume 4(n-1) / Guarantee Volume (n-1)*	5,00	14,91%	17,47%	5,86
5	BOPO	%	Biaya Usaha / Pendapatan Usaha (IJP Bruto) *Operating Expenses / Operating Income (Gross Guarantee Fee)*	4,00	60,28%	48,16%	4,80
	Skor ***Score***			**24**			**26,69**

KPI Kinerja dan Penilaian Direksi Tahun 2018
KPI of Directors' Performance and Valuation in 2018

No	Perspektif/Indikator Kinerja Kunci *Perspective/KPI*	Satuan *Unit*	*Formula*	RKAP 2018 *Company Work Plan and Budget 2018*		Desember 2018 *December 2018*	
				Bobot *Weight*	*Target*	Bobot *Weight*	*Target*
II	Perspektif Fokus Pelanggan Dan Pasar *Customer And Market Focus Perspective*						
1	*Time Accuracy in Claim Process*	%	Klaim yang berhasil diputuskan dalam waktu 13 hari *Claims which are successfully decided within 13 days*	6,00	100,00%	84,62%	5,20
2	Peningkatan Kerja sama Klaim KUR Online	Jumlah *Amount*	Peningkatan Kerja sama Klaim KUR Online *Increased Cooperation in KUR Online Claims*	5,00	4	14	5,25
3	Rasio Klaim *Claim Ratio*	%	Beban Klaim Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan *Claim Expenses* *Guarantee Fee Income*	5,00	58,58%	70,89%	3,95
4	Subrogasi Online *Online Subrogation*	Jumlah *Amount*	Peningkatan Kerja sama Subrogasi Online KUR untuk Bank HIMBARA *Increased Cooperation of KUR Online Subrogation for Banks which belong to State-Owned Banks Association*	6,00	2	2	6,00
	Skor ***Score***			**22**			
III	Perspektif Efektivitas Produk Dan Proses *Products And Processes Effectiveness Perspective*						
1	Inovasi Produk *Product Innovation*	Jumlah *Amount*	∑ Jumlah Inovasi Produk *∑ Number of Product Innovations*	6,00	2	6	6,30
2	Pertambahan Jumlah Produk Online Non KUR *Increase in Number of Non KUR Online Products*	Jumlah *Amount*	∑ Pertambahan Jumlah Produk Online Non KUR per Mitra Kerja *(∑ Increased Number of Non-KUR Online Products per Business Partner*	7,00	5	4	5,60
3	Mempertahankan Rating Perusahaan *Maintaining Company Rating*	Rating *Rating*	Hasil Rating Perusahaan *Results of Company Ratings*	7,00	AA+	AA+	7,35
	Skor ***Score***			**20**			**19,25**

KPI Kinerja dan Penilaian Direksi Tahun 2018

KPI of Directors' Performance and Valuation in 2018

No	Perspektif/Indikator Kinerja Kunci *Perspective/KPI*	Satuan *Unit*	*Formula*	RKAP 2018 *Company Work Plan and Budget 2018*		Desember 2018 *December 2018*	
				Bobot *Weight*	*Target*	Bobot *Weight*	*Target*
IV	Perspektif Fokus Tenaga Kerja *Workforce Perspective*						
1	Pemenuhan Tenaga Ahli Penjaminan *Fulfillment of Guarantee Experts*	Jumlah *Amount*	Sertifikasi Tenaga Ahli Penjaminan *Certification of Guarantee Expert*	6,00	25	157	6,30
2	*Employee Statisfaction Index*	Skor *Score*	Hasil Survey Kepuasan Karyawan *Employee Satisfaction Survey Results*	5,00	78	78,04	5,25
3	Produktivitas Pegawai Non KUR *Non-KUR Employee Productivity*	Rp Miliar *Rp Billion*	Volume Penjaminan Non KUR Jumlah SDM *Non-KUR Guarantee Volume Total Number of HR*	6,00	Rp99 Miliar/ *Billion*	Rp123,97 Miliar/ *Billion*	6,30
	Skor ***Score***			**17**			**17,85**
V	Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, Dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan *Perspective Of Leadership, Governance, And Responsibility Towards The Community*						
1	Penerapan GCG *GCG Implementation*	Skor *Score*	Hasil Assesment GCG (Internal) *GCG Assessment Results Internal*	6,00	92,12	95,72	6,30
2	Implementasi KPKU *Implementation of KPKU*	Skor *Score*	Good Performance (Rentang Skor : 476 – 575) *Good Performance (Rentang Skor : 476 – 575)*	5,00	550	557,25	5,25
3	Efektivitas Penyaluran dan Kolektibilitas PKBL *Effectiveness of Distribution and Collectibility of Partnership and Community Development Program*	%	Penyaluran PKBL & olektibilitas PK *Penyaluran PKBL & olektibilitas PK*	6,00	80,00%	88,20%	6,30
	Skor ***Score***			**17**			**17,85**
	Total Skor ***Total Score***			**100**			**102,04**

Adapun penilaian Agent of Development (AOD) tahun 2018 tercatat sebesar 34,55 lebih besar dibandingkan dengan RKAP tahun 2018 sebesar 20. Adapun dibawah ini tabel AOD Tahun 2018 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia adalah sebagai berikut:

The Agent of Development (AOD) assessment for 2018 was recorded at 34.55, which is greater than the 2018 Company Work Plan and BUdget of 20. The AOD table for PErum Jamkrindo in 2018 is as follows:

Penilaian Agent of Development (AOD) Tahun 2018
Assessment of Agent of Development (AOD) in 2018

No	*Agent Of Development*	Satuan *Unit*	*Formula*	RKAP 2018 *Company Work Plan And Budget 2018*		Desember 2018 *December 2018*	
				Bobot *Weight*	*Target*	Realisasi *Realizations*	*Target*
1	Peningkatan Kerja sama Penjaminan "Mekaar" Dengan PNM *Increasing Cooperation of "Mekaar" Guarantee with PNM*	%	Peningkatan Volume Penjaminan Mekaar PNM *Increase in PNM Mekaar Guarantee Volume*	2,00	2,50%	147,8	2,00
	Peningkatan Volume Penjaminan Produk Kreasi Pegadaian *Increasing the Volume of 'Kreasi Pegadaian' Guaranteed Products*	%	Peningkatan Volume Penjaminan Produk Kreasi Pegadaian *Increasing the Volume of 'Kreasi Pegadaian' Guaranteed Products*	2,00	10,00%	71,1%	2,00
2	Pemeringkatan Dan Pendampingan UMKM & BUMDes *Ranking and Assistance of MSMEs & Village-Owned Enterprises*	Jumlah *Amount*	Jumlah Umkm Dan BUMDes Yang Dilakukan Pemeringkatan Dan Pendampingan *Amount of MSMEs and Regional-Owned Enterprises which are ranked and mentored*	4,00	50	72	5,80
3	Peningkatan Volume Penjaminan Di Wilayah Indonesia Timur *Increased Guarantee Volume in Eastern Indonesia*	%	Peningkatan Volume Penjaminan Di Wilayah Indonesia Timur *Increased Guarantee Volume in Eastern Indonesia*	4,00	10,00%	31,8%	4,00
4	Penjaminan Pembiayaan Produktif Non Program *Guarantee of Non Program Productive Financing*	%	Peningkatan Volume Penjaminan Pembiayaan Produktif Non Program *Increasing the Volume of Guarantee for Non-Program Productive Financing*	4,00	5,00%	21,8%	17,40
5	Penyerapan Plafond Penjaminan KUR *Distribution of KUR Guarantee Limits*	%	Realisasi Volume KUR Realisasi Penyaluran KUR Nasional *Realization of KUR Volume* *Realization of National KUR Distribution*	4,00	50,00%	42,0%	3,40
Total Bobot ***Total Weighted Value***					**20**		**34,55**

Remunerasi Dewan Pengawas Dan Direksi

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan mengacu kepada Peraturan Kementerian BUMN selaku perwakilan Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. PER-06/MBU/06/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan diusulkan dalam Rapat Dewan Pengawas, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya. Dewan Pengawas dan Direksi mengusulkan kepada Pemilik Modal melalui RPB, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri di atas dan kemampuan Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RPB.

Remuneration of The Board of Supervisors and Board of Directors

Remuneration Proposal and Stipulation Procedure of the Supervisory Board and Directors

Stipulation of remuneration for the Board of Supervisors and Directors of the Company refers to the Ministry of SOE Regulation as the representative of the Perum Jamkrindo Equity Owner No. PER-06 / MBU / 06/2018, dated June 4, 2018, concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04 / MBU / 2014 concerning Guidelines for Stipulating the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Remuneration of the Board of Supervisors and Directors of the Company is proposed at the Supervisory Board Meeting, with a discussion to consider the proposals, and the results of surveys with similar industries and other sectors. The Supervisory Board and the Board of Directors propose to the Equity Owner through the Joint Discussion Meeting to be stipulated in it, while still paying attention to the Minister's Regulation and the Company's ability.



Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Supervisory Board and Directors Remuneration Structure

Berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN No. PER-06/MBU/06/2018, struktur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jamkrindo terdiri dari:

Based on the Decree of the Ministry of SOEs No. PER-06 / MBU / 06/2018, the remuneration structure of the Board of Supervisors and Directors of Perum Jamkrindo consists of:

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas *Remuneration Structure of the Supervisory Board*	
Honorarium	Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut: • Honorarium Ketua Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama • Wakil Ketua Dewan Pengawas: 42,5% dari Gaji Direktur Utama; dan • Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebesar 90% dari Ketua Dewan Pengawas *The Supervisory Board is given an honorarium with the following conditions:* • *The honorarium of the Chairperson of the Supervisory Board is determined by position with a composition that the Chairperson honorarium is 45% of the Salary of the President Director* • *Deputy Chairperson of the Supervisory Board honorarirum is 42.5% of the Director's Salary; and* • *The honorarium of members of the Supervisory Board is also determined by position with a composition that the honorarium of the member of the supervisory board is 90% of the Chairperson of the Supervisory Board's salary*
Tunjangan *Allowances*	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan • Tunjangan Komunikasi • Tunjangan Santunan Purna Jabatan • Tunjangan Pakaian • Tunjangan Transportasi • *Religious holiday allowance* • *Communication Allowances* • *Post Position Allowance* • *Clothing Allowances* • *Transportation Allowances*
Fasilitas *Facilities*	• Pemeliharaan Kesehatan • Kepersertaan dan Perkumpulan Profesi • Bantuan Hukum • *Health Care* • *Professional Participation and Association* • *Legal Assistance*

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas *Remuneration Structure of the Supervisory Board*	
Tantiem	Pemberian tantiem bagi Dewan Pengawas juga mengacu pada ketentuan di atas antara lain: • Tantiem diberikan dalam hal BUMN memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan • Tantiem diberikan apabila pencapaian Ukuran Kinerja Utama (KPI) lebih dari 70% dan tingkat kesehatan dengan nilai lebih dari 70% Komposisi besarnya Tantiem/Intensif Kinerja bagi anggota Dewan Pengawas mengikuti Faktor Jabatan sebagai berikut: • Ketua Dewan Pengawas 45% dari Direktur Utama; • Wakil Ketua Dewan Pengawas 42,5% dari Direktur Utama; dan • Anggota Dewan Pengawas 90% dari Ketua Dewan Pengawas. *Provision of tantiem for the Supervisory Board also refers to the above provisions, including:* • *Tantiem which is given in the event that the SOE earns profits in the relevant financial year* • *Tantiem which is given if the achievement of the KPI is more than 70% and the Company health level is more than 70%* • *The composition of the Tantiem/Performance Intensive for members of the Supervisory Board is based on Position. The detail is as follows:* *The Chairperson of the Supervisory Board's tantiem is 45% of that of the President Director;* • *The Deputy Chairperson of the Supervisory Board's tantiem is 42.5% of that of the President Director; and* • *The Members of the Supervisory Board's tantiem is 90% of that of the Chairperson of the Supervisory Board.*

Struktur Remunerasi Direksi *The Remuneration Structure of the Directors*	
Gaji *Salary*	• Anggota Direksi BUMN diberikan gaji dengan ketentuan sebagai berikut: • Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri • Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut: • Wakil Direktur Utama: 90% dari Gaji Direktur Utama; dan • Anggota Direksi lainnya: 85% dari Gaji Direktur Utama. • *Members of the SOEs Board of Directors salaries follow these conditions:* • *The salary of the President Director is determined by using internal guidelines stipulated by the Minister* • *Salaries of other members of the Board of Directors are determined based on position, with the composition as follows:* • *The Deputy President Director is 90% of the President Director's Salary; and* • *Other Directors' salary is 85% of the President Director's Salary.*

Struktur Remunerasi Direksi *The Remuneration Structure of the Directors*	
Tunjangan *Allowances*	Tunjangan yang terdiri atas: Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji Tunjangan perumahan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut; Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% dari Gaji dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp27.500.000,00 untuk wilayah Ibu Kota Perusahaan tidak memberikan fasilitas rumah jabatan bagi Direksi Tunjangan komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (*at cost*) Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut; Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) Premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari Gaji dalam satu tahun Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian Tunjangan pakaian sesuai dengan yang dianggarkan di RKAP Tunjangan cuti tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1 (satu) kali Gaji/Honorarium, setelah Direksi bekerja selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut Tunjangan cuti besar diberikan paling banyak 2 (dua) kali Gaji/Honorarium per bulan apabila Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan. Selama tahun buku 2018 Perusahaan tidak mengeluarkan Tunjangan Cuti Besar Pajak tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan *Allowances consisting of:* *Holidays allowance which is given in the amount of 1 (one) time salary.* *Housing allowances, which are provided under the following conditions;* *Housing allowances including utility fees are provided on a monthly basis, which amount is 40% of the Salaries received with a maximum provision of IDR 27,500,000.00 for the Capital City area* *The Company does not provide housing facilities for the Directors* *Communication allowances for Directors are per usage (at cost)* *Post-position allowance is provided with the following conditions;* *Post-position allowance is granted during the term of office time (starting from the appointment to dismissal)* *The premium borne by the Company is at most 25% of the salary in one year* *The selection of for post-position allowance is determined by each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and the SOEs Supervisory Board* *Provision of premiums, contributions or other terms relevant to Post-position allowance include premiums for accident and death insurance* *Clothing allowances are given in accordance with those budgeted in the Company Work Plan and Budget* *Annual leave allowance is given every year as much as 1 (one) time Salary / Honorarium, after the Board of Directors has worked for at least 6 (six) consecutive months* *Major leave allowance is given at most in the amount of 2 (two) times Salary / Honorarium per month if the Board of Directors has been working for the Company for at least 3 (three) consecutive years in one period of office. During the 2018 fiscal year, the Company did not issue a Major Leave Allowance* *Taxes for the allowances are covered by the Company*

Struktur Remunerasi Direksi *The Remuneration Structure of the Directors*	
Fasilitas *Facilities*	Fasilitas kendaraan bagi Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh Pemilik Modal. Fasilitas kendaraan ini harus dikembalikan kepada Perusahaan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat Perusahaan telah memberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas kepada seluruh Direksi beserta biaya pemeliharaan dan operasional sehingga tidak diberikan lagi tunjangan transportasi Fasilitas kesehatan; Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan Fasilitas kesehatan diberikan berupa: Rawat jalan dan obat Rawat inap dan obat *Medical check up.* Fasilitas uang pangkal dan iuran tahunan paling banyak 2 (dua) perkumpulan profesi Fasilitas biaya respresentasi Direksi mewakili Perusahaan sebesar *at cost* yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan batas maksimumnya ditetapkan oleh RPB Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan Pajak yang timbul akibat pemberian fasilitas ditanggung dan menjadi beban perusahaan *Tansportation facilities for the Board of Directors are 1 (one) unit of office vehicles along with its maintenance and operations. The vehicle specifications and standards are set by the Equity Owner. This vehicle facility must be returned to the Company within 30 (thirty) days after dismissal.* *The Ccompany has provided facilities in the form of 1 (one) unit of office vehicle to all Directors along with its maintenance and operational costs so that transportation allowances are no longer given* *Health facilities;* *Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses* *Health facilities are given to members of the Board of Directors and a wife / husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25, provided that, if the child who is not yet 25 years old has gotten married or has worked, then the child is not entitled to health facilities* *Health facilities are provided in the form of:* *Outpatient and medication* *Hospitalization and medication* *Medical check-up.* *Facilities for the entry and annual fees of at most 2 (two) professional associations* *Representation costs of the Directors in representing the Company which is given at cost and adjusted to the Company's ability and the maximum limit set by the Joint Discussion Meeting* *Legal aid for all actions for and on behalf of the positions in the Company is related to the purpose and objectives and business activities of the Company* *Taxes arising from the provision of facilities are covered by the Company*
Tantiem	Jumlahnya ditetapkan sesuai RPB yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan Pajak yang timbul atas tantiem Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi Komposisi besarnya Tantiem/Intensif Kinerja bagi anggota Direksi mengikuti Faktor Jabatan sebagai berikut: Wakil Direktur Utama: 90% dari Direktur Utama; Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama; *The amount of which is determined according to the Joint Discussion Meeting which is adjusted to the achievement of KPI and the level of health of the Company* *Taxes arising from the tantiem received by the Directors are borne and covered by each of the Directors* *The composition of the Tantiem / Performance Intensive for the members of the Board of Directors is based on the Position Factors with details as follow:* *Deputy of President Director's Tantiem is 90% of the President Director;* *Other members of the Board of Directors is 85% of the President Director;*

Indikator untuk Penetapan Remunerasi Direktur Utama dan Pengesahannya

Penetapan remunerasi yang berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:

- Pendapatan Perusahaan.
- Aktiva Perusahaan.
- Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
- Tingkat inflasi.
- Faktor-faktor lain yang relevan, termasuk di antaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Untuk penetapan remunerasi yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

- Pencapaian target.
- Tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perusahaan.
- Faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*), termasuk di antaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Sesuai dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S- 579/MBU/D5/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo Tahun 2018, besarnya gaji yang diterima Direktur Utama untuk tahun 2018 sebesar Rp 145.000.000. Gaji Direktur Utama tersebut menjadi acuan bagi besaran perhitungan gaji Dewan Pengawas dan Direksi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-06/MBU/06/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Indicator for the Stipulation of Remuneration for the President Director and its Endorsement

The stipulation of remuneration in the form of salary/ honorarium, allowances, and facilities, that is permanent, is done by considering several factors below:

- *Company income.*
- *Company assets.*
- *The financial condition and capabilities of the Company.*
- *Inflation rate.*
- *Other relevant factors, including among others are the level of remuneration generally accepted in similar industries.*

For the stipulation of remuneration in the form of various forms of allowances and tantiems, it is carried out by considering several factors, namely:

- *Achievement of targets.*
- *The Company's level of health and financial capacity.*
- *Other relevant factors (merit system), including among others are the level of remuneration generally accepted in similar industries.*

In accordance with the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-579 / MBU / D5 / 06/2018 dated June 5, 2018, concerning the Submission of Stipulation of Income of Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo in 2018, the amount of salary received by the President Director for 2018 fiscal year is IDR 145,000,000. The salary of the President Director is a reference for the amount of salary calculation of the Supervisory Board and other Directors, as stated in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-06 / MBU / 06/2018, dated June 4, 2018, concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04 / MBU / 2014 concerning Guidelines for Stipulating the Income of the Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2018

Total Remuneration of the Board of vs and Directors in 2018

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Pengawas di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The amount of remuneration received by the Supervisory Board throughout 2018 is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2018
Total Remuneration of the Supervisory Board in 2018

No	Uraian *Description*	Ketua Dewan Pengawas *Chairperson of the Supervisory Boad* (Rp)	Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Boad* (Rp)
1	*Honorarium*	65.250.000	58.725.000
2	THR per Tahun *Annual Religious Holiday Allowance*	78.300.000	70.470.000
3	Komunikasi per bulan *Monthly Communication Allowance*	0	0
4	Transportasi per bulan *Transportation Facilities per Month*	13.050.000	11.745.000
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) bulan per Dewan Pengawas *Total Remuneration in one month per member of the Supervisory Board*	78.300.000	70.470.000
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun per Dewan Pengawas *Total Remuneration in one year per member of the Supervisory Board*	939.600.000	845.640.000
	Jumlah Dewan Pengawas *Number of People*	1 orang *1 person*	4 orang *4 people*
	Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk seluruh Dewan Pengawas *Total Remuneration in one year for all member of the Supervisory Board*	939.600.000	2.536.920.000
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Tahun 2018 ***Total Remuneration of the Supervisory Board in 2018***			**3.476.520.000**

Untuk besaran remunerasi yang diterima Direksi di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The amount of remuneration received by Directors throughout 2018 is as follows:

Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2018
Total Remuneration pf The Board of Director in 2018

No	Uraian *Description*	Direktur Utama *President Director* (Rp)	Direksi Lain *Other Directors* (Rp)
1	Gaji *Salary*	145.000.000	123.250.000
2	THR per Tahun *Annual Religious Holiday Allowance*	172.500.000	150.750.000
3	Komunikasi per bulan *Monthly Communication Allowance*	0	0

Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2018
Total Remuneration pf The Board of Director in 2018

No	Uraian *Description*	Direktur Utama *President Director* (Rp)	Direksi Lain *Other Directors* (Rp)
4	Cuti per tahun (1x Gaji per bulan) *Leave Allowance per Year (equals to one month salary)*	172.500.000	150.750.000
5	Tunjangan perumahan per bulan *) *Housing facilities per month *)*	27.500.000	27.500.000
	Jumlah Gaji dan Tunjangan dalam 1 (satu) bulan *The Amount of Salary and Allowances in 1 (one) month*	172.500.000	150.750.000
	Jumlah Gaji dan Tunjangan dalam 1 (satu) tahun *The Amount of Salary and Allowances in 1 (one) year*	2.070.000.000	1.809.000.000
7	TantiemBonus TB 2017 sebelum PPh 21 **) *Tantiem Bonus for the Fiscal Year 2017 before PPh 21(Income Tax) **)*	3.422.565.717	10.250.584.321
Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun per Direksi *Total Amount of Remuneration in 1 (one) year per Director*		5.492.565.717	17.486.584.321
Jumlah Direksi *Number of People*		1 orang *1 person*	4 orang *4 people*
Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk seluruh Direksi *Total Amount of Remuneration in 1 (one) year for all Directors*		5.492.565.717	17.486.584.321
Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2018 ***Total of Board of Director Remuneration in 2018***			**22.979.150.038**

*) Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04MBU2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
**) Sesuai Peraturan Menteri BUMN pajak tantiem bonus yang ditanggung oleh Ybs.penerima. Untuk tantiem tahun buku 2017 yang diberikan di tahun 2018 kepada Direktur Utama, total diberikan pada 3 Direktur Utama, karena selama tahun 2017 terdapat pergantian Direktur Utama ke Plt. Direktur Utama lalu ke Direktur Utama Definitif.
**) In accordance with the Minister of SOEs' Regulation No. PER-04 MBU 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.*
***) In accordance with the Minister of SOEs' Regulation, the tax for the tantiembonus is borne by the receivers of the tantiembonus. For the 2017 fiscal year's tantiembonus which was given in 2018, the tantiembonus for the President Director was given to 3 different President Directors since in 2017 there were changes in the position from President Director to Acting President Director, and finally to the Definitive Managing Director*

Jumlah remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Therefore, the amount of remuneration provided by the Company to the Board of Supervisors and Directors in 2018 is as follows:

Uraian *Description*	Jumlah *Total Amount* (RpIDR)
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas *Total Remuneration of the Board of Supervisors*	3.476.520.000
Jumlah Remunerasi Direksi *Total Remuneration of the Board of Directors*	22.979.150.038
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2018 *Total Remuneration of the Board of Supervisors and Directors in 2018*	26.455.670.038

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Meeting of The Board of Supervisors And Board of Directors

Rapat Dewan Pengawas

Supervisory Board Meeting

Dewan Pengawas mengadakan rapat rutin sekali dalam setiap bulan, yaitu Rapat Internal Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Komite Audit, dan Komite Investasi dan Risiko Usaha serta Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi. Namun dalam hal dipandang penting, Dewan Pengawas juga melakukan rapat-rapat insidental, baik dengan komite-komite maupun dengan Direksi.

The Supervisory Board holds regular meetings once every month, which is the Internal Meeting of the Supervisory Board. This meeting is attended by the Audit Committee and the Business Risk and Investment Committee. The Board of Supervisors also holds a meeting with the Directors. If deemed necessary/important, the Supervisory Board also conducted incidental meetings, both with committees and with the Directors.

Di sepanjang tahun 2018, Dewan Pengawas menggelar 24 (dua puluh empat) kali Rapat Dewan Pengawas. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat internal Dewan Pengawas.

Throughout 2018, the Supervisory Board held 24 (twenty-four) Meetings. The following is the minutes of the meeting and the level of attendance of the Supervisory Board in the internal meeting of the Supervisory Board.

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Participants*	**Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons for Absence*
25 Januari 2018, di Jakarta *January 25, 2018, in Jakarta*	-	Evaluasi Investasi dan Risiko Perum Jamkrindo Tahun Buku 2017 *Investment and Risk Evaluation of Perum Jamkrindo for 2017 Financial Year*	• Sri Mulyanto • Dahlan Siamat • Subandriyo • Noor Ida Khomsiyati • Diah Natalisa	-
27 Februari 2018, di Jakarta *February 27, 2018, in Jakarta*	-	• *Monitoring* Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Januari 2018 • Lain-lain • *Monitoring the Performance Achievement of Perum Jamkrindo in January 2018* • *Other agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
20 Maret 2018, di Jakarta *March 20, 2018, in Jakarta*	-	Ketentuan Pelaksanaan Investasi pada Perum Jamkrindo *Provisions for the Implementation of Investment in Perum Jamkrindo*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo 4. Noor Ida Khomsiyati	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
24 april 2018, di Jakarta *April 24, 2018, in Jakarta*	-	• *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Maret 2018 • Lain-lain • *Monitoring the Performance Achievement of Perum Jamkrindo in March 2018* • *Other agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Diah Natalisa	-

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Participants*	**Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons for Absence*
23 Mei 2018, di Jakarta *May 23, 2018, in Jakarta*	-	• *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan April 2018 • Lain-lain • *Monitoring the Performance Achievement of Perum Jamkrindo in April 2018* • *Other agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
26 Juni 2018, di Jakarta *June 26, 2018, in Jakarta*	-	• *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Mei 2018 • Lain-lain • *Monitoring the Performance Achievement of Perum Jamkrindo in May 2018* • *Other agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo 4. Noor Ida Khomsiyati	-
1 Agustus 2018, di Jakarta *August 1, 2018, in Jakarta*	-	• *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Juni 2018 • Lain-lain • *Monitoring the Performance Achievement of Perum Jamkrindo in June 2018* • *Other agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
29 Agustus 2018, di Jakarta *August 29, 2018, in Jakarta*	-	• Tanggapan Dewan Pengawas atas Laporan Keuangan dan Kegiatan Perum Jamkrindo Triwulan III Tahun Buku 2018 • Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Juli 2018 • Lain-lain • *The Supervisory Board's response to the Financial Statements and Activities of Perum Jamkrindo in the Third Quarter of 2018 Fiscal Year* • *Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in July 2018* • *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Noor Ida Khomsiyati	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
26 September 2018, di Jakarta *September 26, 2018, in Jakarta*	-	• *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Agustus 2018 • Lain-lain • *Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in August 2018* • *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Noor Ida Khomsiyati	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Participants*	**Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons for Absence*
31 Oktober 2018, di Jakarta *October 31, 2018, in Jakarta*	-	• *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan September 2018 • Lain-lain • *Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in September 2018* • *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Noor Ida Khomsiyati	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
26 November 2018,di Jakarta *November 26, 2018, in Jakarta*	-	• *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Oktober 2018 • Lain-lain • *Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in October 2018* • *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Diah Natalisa	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
19 Desember 2018, di Jakarta *December 19, 2018, in Jakarta*	-	• *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan November 2018 • Lain-lain • *Monitoring and Evaluation of Perum Jamkrindo's Performance Achievement in November 2018* • *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Noor Ida Khomsiyati 4. Diah Natalisa	-

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Internal Dewan Pengawas

Recapitulation and Level of Attendance of the Supervisory Board in the Supervisory Board's Internal Meeting

Dewan Pengawas *Supervisory Board*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Required Meeting*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**Jumlah Ketidakhadiran** *Number of Absence*	**% Kehadiran** *Attendance Percentage*
Sri Mulyanto Ketua Dewan Pengawas *Chairperson of the Supervisory Board*	12	12	0	100%
Dahlan Siamat Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board**	6	6	0	100%
Subandriyo Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	12	12	0	100%
Noor Ida Khomsiyati Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	12	8	4	67%

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Internal Dewan Pengawas
Recapitulation and Level of Attendance of the Supervisory Board in the Supervisory Board's Internal Meeting

Dewan Pengawas *Supervisory Board*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Required Meeting*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**Jumlah Ketidakhadiran** *Number of Absence*	**% Kehadiran** *Attendance Percentage*
Diah Natalisa Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	12	4	8	33%
Rata-rata ***Average***				**80 %**

*) Dahlan Siamat tidak lagi menjabat sebagai Dewan Pengawas sejak 26 Juni 2018
*) *Dahlan Siamat has not served as the Supervisory Board since June 26, 2018*

Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi

Joint Meetings of the Board of Supervisors and Directors

Di sepanjang tahun 2018, Dewan Pengawas menggelar 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan dengan Direksi. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam Rapat Gabungan.

Throughout 2018, the Supervisory Board held 12 (twelve) Joint Meetings with the Directors. The followings are the minutes of meetings and the attendance level of the Board of Supervisors and Directors at the Joint Meeting.

Risalah Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi
Minutes of Board of Supervisors Meetings with the Directors

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Participants*	**Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons for Absence*
25 Januari 2018 *January 25, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Tahun 2017 Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan RKAP Tahun 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in 2017* *Follow-ups on the Implementation of the 2018 Corporate Work Plan and Budget* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Diah Natalisa 6. Randi Anto 7. I Rusdonobanu 8. Kadar Wisnuwarman 9. Sulis Usdoko 10. Amin Mas'udi	-
27 Februari 2018 *Februari 27, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Januari 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in January 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Diah Natalisa 6. Randi Anto 7. Kadar Wisnuwarman 8. Sulis Usdoko 9. Amin Mas'udi	-

Risalah Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi
Minutes of Board of Supervisors Meetings with the Directors

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Participants*	**Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons for Absence*
27 Maret 2018 *March 27, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Februari 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in February 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Diah Natalisa 6. Randi Anto 7. I Rusdonobanu 8. Kadar Wisnuwarman 9. Sulis Usdoko 10. Amin Mas'udi	-
24 April 2018 *April 24, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Maret 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in March 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo 4. Noor Ida Khomsiyati 5. Diah Natalisa 6. I Rusdonobanu 7. Kadar Wisnuwarman 8. Sulis Usdoko 9. Amin Mas'udi	-
23 Mei 2018 *May 23, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Bulan April 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in April 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo 4. Randi Anto 5. I Rusdonobanu 6. Kadar Wisnuwarman 7. Sulis Usdoko 8. Amin Mas'udi	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
26 Juni 2018 *June 26, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Bulan Mei 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in May 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Dahlan Siamat 3. Subandriyo 4. Randi Anto 5. I Rusdonobanu 6. Kadar Wisnuwarman 7. Sulis Usdoko 8. Amin Mas'udi	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
1 Agustus 2018 *August 1, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Bulan Juni 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in June 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Noor Ida Khomsiyati 4. Diah Natalisa 5. Randi Anto 6. I Rusdonobanu 7. Sulis Usdoko 8. Amin Mas'udi	-

Risalah Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi
Minutes of Board of Supervisors Meetings with the Directors

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Participants*	**Dewan Pengawas yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons for Absence*
29 Agustus 2018 *August 29, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Bulan Juli 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in July 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Noor Ida Khomsiyati 4. Randi Anto 5. I Rusdonobanu 6. Kadar Wisnuwarman 7. Sulis Usdoko 8. Amin Mas'udi	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
26 September 2018 *September 26, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Bulan Agustus 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in August 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Noor Ida Khomsiyati 4. Randi Anto 5. I Rusdonobanu 6. Kadar Wisnuwarman 7. Sulis Usdoko 8. Amin Mas'udi	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
31 Oktober 2018 *October 31, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Bulan September 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in September 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Noor Ida Khomsiyati 4. Randi Anto 5. I Rusdonobanu 6. Kadar Wisnuwarman 7. Sulis Usdoko 8. Amin Mas'udi	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
26 November 2018 *November 26, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Bulan Oktober 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in October 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Diah Natalisa 4. Randi Anto 5. I Rusdonobanu 6. Kadar Wisnuwarman 7. Sulis Usdoko	Terdapat tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan *There were other duties that cannot be abandoned*
19 Desember 2018 *December 19, 2018* Jakarta	-	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Bulan November 2018 Lain-lain *Monitoring the Achievement of Perum Jamkrindo Performance in November 2018* *Other Agenda*	1. Sri Mulyanto 2. Subandriyo 3. Noor Ida Khomsiyati 4. Diah Natalisa 5. Randi Anto 6. I Rusdonobanu 7. Sulis Usdoko 8. Amin Mas'udi	-

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam Rapat Gabungan
Recapitulation and Level of Attendance of the Supervisory Board and Directors at the Joint Meeting

Dewan Pengawas dan Direksi *Supervisory Board and Directors*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Required Meeting*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**Jumlah Ketidakhadiran** *Number of Absence*	**% Kehadiran** *Attendance Percentage*
Dewan Pengawas *Supervisory Board*				
Sri Mulyanto Ketua Dewan Pengawas *Chairperson of the Supervisory Board*	12	12	12	100%
Dahlan Siamat Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board**	6	6	0	100%
Subandriyo Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	12	12	0	100%
Noor Ida Khomsiyati Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	12	9	3	75%
Diah Natalisa Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	12	7	5	58%
Direksi *Board of Directors*				
Randi Anto Direktur Utama *President Director*	12	11	1	91%
Amin Masudi Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Guarantee Business*	12	11	1	91%
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan *Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	12	12	0	100%
Kadar Wisnuwarnaman Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operations and Network*	12	10	2	83%
I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment and Risk Management*	12	11	1	91%
Rata-rata ***Average***				**88,9%**

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi No. 56/PerDir/XII/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

As stipulated in the regulations of the Board of Directors No. 56 / PerDir / XII / 2013 concerning Guidelines for Management of

Perum Jamkrindo, ketentuan mengenai Rapat Direksi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

1. Rapat wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau atas usul dari sesama anggota Direksi dengan menyebutkan agenda atau hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir atau diwakili.

Board of Directors Meeting of Perum Jamkrindo, the provisions regarding the Board of Directors Meeting of Perum Jamkrindo are as follows:

1. *The meetings must be held at least once a month, or at the suggestion of fellow members of the Board of Directors by stating the agenda or aspects to be discussed.*
2. *The Board of Directors meeting is chaired by the President Director. If the President Director is unable to attend, the meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the other members of the Board of Directors who is present or represented.*

Direksi mengadakan rapat rutin setiap sekali dalam setiap bulan, sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam penjelasan di atas. Di sepanjang 2018, Direksi melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kali Rapat Internal Direksi. Di samping itu, Direksi menghadiri 12 (dua belas) kali Rapat dengan Dewan Pengawas. Tentang risalah Rapat Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilihat pada bagian pembahasan Rapat Dewan Pengawas.

The Board of Directors holds regular meetings once every month, as stipulated in the explanation above. Throughout 2018, the Board of Directors held 37 (thirty-seven) Directors' Internal Meetings. In addition, the Directors attend 12 (twelve) meetings with the Supervisory Board. The minutes of the Board of Trustees and Directors' Meetings can be seen in the discussion section of the Supervisory Board Meeting.

Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat.

The following are the minutes of the meeting and the level of attendance of the Directors at the meeting.

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Kamis, 4 Januari 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Thursday, January 4, 2018, Jamkrindo Building, 1st floor Meeting Room*		• Pembahasan Paparan RPB RKAP 2018 • Pembahasan Pembaharuan Struktur Organisasi • *Joint Discussion Meeting Exposition of the 2018 Corporate Work Plan and Budget* • *Discussion of Organizational Structures Renewal*	• Sekretaris Perusahaan • Divisi Renbang • Divisi Akuntansi • *Corporate Secretary* • *Planning and Development Division* • *Accounting Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Rabu, 10 Januari 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, January 10, 2018, Jamkrindo Building, 1st floor Meeting Room*		• Pembahasan *Corporate Activity* • Pembahasan Rencana FGD dan Rakernas • Positioning IT Perum Jamkrindo • *Discussion of Corporate Activity* • *Discussion of the FGD Plan and National Working Meeting* • *Perum Jamkrindo IT Positioning*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi TI • *Corporate Secretary* • *Head of the IT Division*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Kamis, 11 Januari 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Thursday, January 11, 2018, Jamkrindo Building, 1st floor Meeting Room*		Evaluasi Kerja sama Al-Amin *Evaluation of Partnership with Al-Amin*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi MSDM • Kepala Divisi Renbang • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi • Kepala Divisi Manajemen Risiko • *Corporate Secretary* • *Head of HRM Division* • *Head of the Planning and Development Division* • *Head of the Finance and Investment Division* • *Head of the Risk Management Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Rabu, 17 Januari 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, January 17, 2018, Jamkrindo Building, 1st floor Meeting Room*		• Pembahasan Pembaharuan Struktur Organisasi • Pembahasan Hal Strategis Lainnya • *Discussion of Renewal of Organizational Structure* • *Other Strategic Discussion*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Kepala Divisi Renbang • *Corporate Secretary* • *Head of the Internal Audit Unit* • *Head of Planning and Development Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Rabu, 24 Januari 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, January 24, 2018, Jamkrindo Building, 1st floor Meeting Room*		• Pembahasan Stuktur Organisasi • Pembahasan Persiapan Rakornas • Laporan Divisi Umum • *Discussion of Organizational Structure* • *Discussion on Preparation of the national coordination meeting* • *General Division Report*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan • Kepala Divisi Umum • *Corporate Secretary* • *Head of Planning and Development Division* • *Head of the General Affairs Division*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Selasa, 6 Februari 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Tuesday, February 6, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan Paparan Penjaminan Derivatif Sistem Resi Gudang • Pembahasan JScore (Jamkrindo Score) • Pembahasan Paparan Positioning IT • *Discussion of the Exposition to Derivative Guarantee for Warehouse Receipt Systems* • *Discussion of JScore (Jamkrindo Score)* • *Discussion of IT Positioning Exposition*	• Sekretaris Perusahan • Kepala Divisi Penjaminan SRG • Kepala Divisi Pemeringkatan UMKM • Kepala Divisi IT • *Corporate Secretary* • *Head of the Warehouse Receipt System Guarantee Division* • *Head of MSME Rating Division* • *Head of the IT Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Rabu, 14 Maret 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, March 14, 2018, Jamkrindo Building, 1st floor Meeting Room*		• Komite Direksi tentang Penjaminan Koperasi Perikanan Mina Rizki Abadi (KOMIRA) • Komite Direksi tentang Pembaharuan Kebijakan Kerja sama Kagenan • *Board of Directors Committee on Guarantee for Mina Rizki Abadi Fisheries Cooperative (KOMIRA)* • *Board of Directors Committee on Renewal of Agency Cooperation Policy*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Manajemen Risiki • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank • Kepala Divisi Suretyship dan Penjaminan Non Bank • Kepala Divisi Teknik Administrasi Penjaminan • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi • *Corporate Secretary* • *Head of the Risk Management Division* • *Head of Bank Guarantee Business Division* • *Head of Suretyship and Non-Bank Guarantee Division* • *Head of Guarantee Administration Engineering Division* • *Head of Finance and Investment Division*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Kamis, 22 Maret 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Thursday, March 22, 2018, Jamkrindo Building, 1st floor Meeting Room*		• Pembahasan Portofolio Investasi Februari 2018 • Presentasi *e-Office* (Tata Kelola Persuratan) dan Digital Management System (Tata Kelola Kearsipan) • Komite Manajemen Risiko Tentang Risiko Operasional • Komite Direksi Tentang SOP Kerja sama Pendayagunaan Aset Tetap • *Discussion of the Investment Portfolio in February 2018* • *E-Office Presentations (Letter Management) and Digital Management Systems (Archive Management)* • *Risk Management Committee Presentation on Operational Risk* • *Board of Directors Committee Exosition about SOP for Permanent Asset Utilization Cooperation*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • Kepala Divisi Akuntansi dan PKBL • Kepala Divisi Binsis Penjaminan Program • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank • Kepala Divisi Suretyship dan Penjaminan non Bank • Kepala Divisi Penjaminan Syariah • *Corporate Secretary* • *Head of Legal and Compliance Division* • *Head of Accounting and Partnership and Community Development Program Division* • *Head of Program Guarantee Business Division* • *Head of the Bank Guarantee Business Division* • *Head of the Non-Bank Suretyship and Guarantee Division* • *Head of the Sharia Guarantee Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Rabu, 28 Maret 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, March 28, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan Tentang Rencana Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan (*Whistleblowing System*) • *Discussion of the Guidelines for the Management of the Reporting System (Whistleblowing System)*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • *Corporate Secretary* • *Head of Internal Audit Unit*	Direktur Bisnis Penjaminan Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Business Guarantee* *Director of Operations and Network*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Rabu, 4 April 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, April 4, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan Pengembangan TI Perum Jamkrindo • Presentasi Standarisasi Tampilan Gedung Unit Kerja (Kantor Cabang) • Presentasi Rencana Kerja sama Penjaminan Kredit Multiguna Bank Riau Kepri dan Bank Jatim Melalui Broker PT Adonai • *Discussion on Perum Jamkrindo's IT Development* • *Presentation of the Display Standardization of Work Unit Building (Branch Office)* • *Presentation of the Plan for Collaborative Multipurpose Credit Guarantee of Bank Riau Kepri and Bank Jatim Through PT Adonai as the Broker*	• *Sekretaris Perusahaan* • *Kepala Divisi TI* • *Kepala Divisi Jaringan dan Layanan* • *Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank* • *Corporate Secretary* • *Head of IT Division* • *Head of Network and Service Division* • *Head of the Bank Guarantee Business Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Kamis, 5 April 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Thursday, April 5, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan Lanjutan Konsep HUT Ke-48 Perum Jamkrindo • *Continued Discussion on the Concept of the 48th Anniversary of Perum Jamkrindo*	Panitia HUT *Company Anniversary Committee*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Jumat, 20 April 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Friday, April 20, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan Evaluasi Kinerja TW I Perum Jamkrindo • Komite Direksi Penjaminan SRG atas Tagihan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Kepada PT Shafira Laras Persada oleh Perum Jamkrindo KCK Jakarta • Pembahasan Peraturan Direksi Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perusahaan • *Discussion on Perum Jamkrindo's First Quarter Performance Evaluation* • *Board of Directors Committee for Warehouse Receipt System Guarantee on Bill of PT. Nusantara Garment Industry (Persero) To PT Shafira Laras Persada by Perum Jamkrindo's Special Branch Office Jakarta* • *Discussion of Directors' Regulations Regarding Guidelines for Establishing Company Regulations*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Akuntansi dan PKBL • Kepala Divisi Penjaminan SRG • Kepala Divisi Renbang • Kepala Divisi Bisnis Penjamian Bank • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • Kepala Divisi Jaringan dan Layanan • Kepala Divisi MR • Kepala Divisi TI • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Program • Kepala Divisi TAP • Kepala Divisi Suretyship dan Penjaminan Non Bank • Kepala Divisi Penjaminan Syariah • Kepala Divisi Umum • *Corporate Secretary* • *Head of Accounting and Partnership and Community Development Program Division* • *Head of Warehouse Receipt System Guarantee Division* • *Head of Planning and Development Division* • *Head of the Bank Guarantee Business Division* • *Head of Finance and Investment Division* • *Head of Legal and Compliance Division* • *Head of Network and Service Division* • *Head of the Risk Management Division* • *Head of IT Division* • *Head of Program Guarantee Business Division* • *Head of TAP Division* • *Head of Suretyship and Non-Bank Guarantee Division* • *Head of the Sharia Guarantee Division* • *Head of General Affairs Division*	Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Kamis, 12 April 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Thursday, April 12, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan Penjaminan Pembiayaan Perumahan PT SMF • Presentasi Rencana PKS Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk • *Discussion of PT SMF Housing Financing Guarantee* • *Presentation of PKS Plan Guarantee of Construction and Procurement of Goods/Services Loans of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non Bank • Kepala Divisi TAP • Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi • Kepala Divisi MSDM • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank • Kepala Divisi Manajemen Risiko • *Corporate Secretary* • *Head of the Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division* • *Head of TAP Division* • *Head of Division of Claims and Subrogation* • *Head of HRM Division* • *Head of Legal and Compliance Division* • *Head of Finance and Investment Division* • *Head of the Bank Guarantee Business Division* • *Head of the Risk Management Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Rabu, 9 Mei 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, May 9, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Paparan Peraturan Direksi tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehetan Kerja (SMK3) • Paparan tentang Perdir Pendelegasian Kewenangan • Persentasi Pembahasan Penjaminan Bersama KUR dengan PT Askrindo (Persero) • *Presentation of Directors' Regulations concerning Work Safety and Health Management System (SMK3)* • *Presentation of the Director's Regulation on Delegation of Authority* • *KUR Collateral Guarantee Presentation with PT Askrindo (Persero)*	Sekretaris Perusahaan Kepala SPI Seluruh Kepala Divisi *Corporate Secretary* *Head of Internal Audit Unit* *All Division Heads*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Rabu, 16 Mei 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, May 16, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Paparan Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun Buku 2019-2023 • Paparan Usulan Program Pengembangan bagi Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jamkrindo Tahun 2018 • *Presentation of the Drafting of the Company Long Term Plan (RJPP) for 2019 - 2023* • *Presentation of the Proposed Development Program for the Board of Supervisors and Directors of Perum Jamkrindo in 2018*	Sekretaris Perusahaan Kepala SPI Seluruh Kepala Divisi *Corporate Secretary* *Head of Internal Audit Unit* *All Division Heads*	Direktur Utama *President Director*
Rabu, 23 Mei 2018 Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, May 23, 2018 Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		Paparan Komite Divisi MSDM Tentang: • Struktur Gaji • Penghargaan Masa Kerja Karyawan • Ketentuan Pengangkatan Calon Karyawan Menjadi Karyawan Tetap • Update Tentang ASIPPINDO • Paparan Komite Tentang: • Keputusan Sewa Gedung Kantor Cabang dan Kantor PT Jamsyar (Gedung Artaloka) • Update Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor *Presentation of the HRM Division Committee About:* • *Salary Structure* • *Employment Award* • *Provisions for the Appointment of Prospective Employees to become Permanent Employees* • *Update About ASIPPINDO* • *Presentation of the Committee About:* • *Decision on the Rent of Branch Office and Office Building of PT Jamsyar (Artaloka Building)* • *Update on Land Procurement and Office Building*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Umum • Kepala Divisi Jaringan dan Layanan • Ka Kanwil III Jakarta • Kepala KCK • Kanca Jakarta • Pranata Utama Direktorat MSDM, Umum dan Kepatuhan • Kepala Divisi MSDM • *Corporate Secretary* • *Head of General Affairs Division* • *Head of Network and Service Division* • *Head of Region III Office Jakarta* • *Head of Special Branch Office Jakarta* • *Head of Jakarta Branch Office* • *Main Institution Officer of Directorate of HRM, General Affairs and Compliance* • *Head of HRM Division*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Rabu, 31 Mei 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, May 31, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Paparan KPI Unit Kerja • Paparan Market Place Guarantee (MPG) • *Presentation of Work Unit KPI* • *Presentation of Market Place Guarantee (MPG)*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi MSDM • Kepala Divisi Jaringan dan Layanan • Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan • Kepala Divisi IT • Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non Bank • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank • Kepala Divisi MR • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • *Corporate Secretary* • *Head of HRM Division* • *Head of Network and Service Division* • *Head of Planning and Development Division* • *Head of IT Division* • *Head of the Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division* • *Head of the Bank Guarantee Business Division* • *Head of Risk Management Division* • *Head of Legal and Compliance Division*	Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Senin, 25 Juni 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Monday, June 25, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		Paparan Perihal Penyertaan Terbatas Private Investment Firm (PIF) *Presentation concerning Participation in Private Investment Firm (PIF)*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi • Kepala Divisi Akuntansi dan PKBL • Kepala Divisi Manajemen Risiko • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • *Corporate Secretary* • *Head of Finance and Investment Division* • *Head of Accounting and Partnership and Community Development Program Division* • *Head of the Risk Management Division* • *Head of Legal and Compliance Division*	Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee*
Jumat, 6 Juli 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Friday, July 6, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Paparan Hasil Audit • Desain Renovasi Lantai 1 dan Kantin Jamkrindo • Paparan Program Reasuransi Perum Jamkrindo Tahun 2018 • *Presentation of Audit Results* • *Jamkrindo Building's 1st Floor Renovation and Canteen Design* • *Presentation of the 2018 Perum Jamkrindo Reinsurance Program*	• Sekretaris Perusahaan • Plh. Kepala Divisi PUKM • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank • Kepala Divisi Suretyship dan Penjaminan Non Bank • Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi • Kepala Divisi TI • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi • Kepala Divisi TAP • *Corporate Secretary* • *Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division (Ad Interim)* • *Head of the Bank Guarantee Business Division* • *Head of Suretyship and Non-Bank Guarantee Division* • *Head of Division of Claims and Subrogation* • *Head of IT Division* • *Head of Finance and Investment Division* • *Head of TAP Division*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Rabu, 18 Juli 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, July 18, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Evaluasi Kinerja Perusahaan s.d Juni 2018 • Penetapan Klasifikasi Cabang • *Company Performance Evaluation as of June 2018* • *Determination of Branch Classification*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Seluruh Kepala Divisi • *Corporate Secretary* • *Head of Internal Audit Unit* • *All Division Heads*	Hadir Semua *All participants were present*
Rabu, 15 Agustus 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, August 15, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Paparan Program Reasuransi Perum Jamkrindo Tahun 2018 • Usulan Penyesuaian Tarif IJP Kredit Umum a.n Koperasi Mina Rizki Abadi (KOMIRA) • *Presentation of Perum Jamkrindo Reinsurance Program in 2018* • *Proposed Adjustment to General Credit Guarantee Schemes on behalf of Mina Rizki Abadi Cooperative (KOMIRA)*	• Kepala Divisi TAP • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi • Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan non Bank • Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Syariah • Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi • *Head of TAP Division* • *Head of the Bank Guarantee Business Division* • *Head of Finance and Investment Division* • *Head of the Non-Bank Suretyship and Guarantee Business Division* • *Head of Sharia Guarantee Business Division* • *Head of Division of Claims and Subrogation*	Hadir Semua *All participants were present*
Kamis, 23 Agustus 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Thursday, August 23, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Report Progres RJPP bersama Konsultan PPM Management • Paparan *Job Description* • Paparan Rancangan Peraturan Direksi Tentang Pedoman Kehumasan Perum Jamkrindo • *Progress Report on the Company's Long Term Plan with PPM Management Consultants* • *Presentation of Job Description* • *Presentation of the Draft of Directors' Regulations on Guidelines for Public Relation for Perum Jamkrindo*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Seluruh Kepala Divisi • *Corporate Secretary* • *Head of Internal Audit Unit* • *All Division Heads*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Senin, 27 Agustus 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Monday, August 27, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan *Layout* Gedung Kantor Cabang Yogyakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Pontianak • *Update* Progress Pekerjaan Tanah dan Bangunan • Paparan Peraturan Direksi tentang Penyesuaian Tata Kelola Persuratan dan Peraturan Direksi tentang Kehumasan • *Discussion of the Layout of the Branch Offices building in Yogyakarta, Bandung, Palangkaraya, and Pontianak* • *Update on Land and Building Work Progress* • *Presentation of the Board of Directors 'Regulations on Adjustment to the Management of Letters and Directors' Regulations on Public Relations*	• Sekretaris Perusahaan • Plt. Kepala Divisi Umum • Kepala Divisi Jaringan dan Layanan • *Corporate Secretary* • *Acting Head of General Affairs Division* • *Head of Network and Service Division*	Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Rabu, 5 September 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, September 5, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Paparan Rancangan Peraturan Direksi Tentang Pedoman Kehumasan Perum Jamkrindo • Komite Pengadaan *Server Multi Data Center* dan *Managed Services* • Pemaparan Hasil Pelaksanaan Kegiatan *Review* dan Penyempurnaan *Integrated Enterprise Risk Management* Perum Jamkrindo • Komite Pembahasan Pemanfaatan Aplikasi Data Kependudukan • *Presentation of the Draft Directors' Regulations Regarding the Guidelines for Public Relations of Perum Jamkrindo* • *Multi Data Center Server and Managed Services Procurement Committee* • *Presentation of the Results of the Implementation of Review and Improvement of Perum Jamkrindo's Integrated Enterprise Risk Management Activity* • *Committee of Discussion for Utilizing Population Data Applications*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi TI • Kepala Divisi Bisnis 3 • Kepala Divisi Akuntansi • Kepala Divisi MR dan PUKM • Plh. Kepala Divisi Umum • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • Kepala Divisi Bisnis 1 • Kepala Divisi TAB • Kepala Divisi Klaim • Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah • Kepala Desk Subrogasi • Kepala Desk SRG • *Corporate Secretary* • *Head of IT Division* • *Head of Business 3 Division* • *Head of Accounting Division* • *Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division* • *Head of General Affairs Division (Ad Interim)* • *Head of Legal and Compliance Division* • *Head of Business 1 Division* • *Head of TAB Division* • *Head of Claim Division* • *Head of Sharia Guarantee Business Desk* • *Head of Desk of Subrogation* • *Head of the Warehouse Receipt System Desk*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Rabu, 19 September 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, September 19, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan Pedoman Pendelegasian Kewenangan • Pembahasan Penambahan Modal kepada PT Jamkrindo Syariah • Pembahasan Alternatif lokasi Sewa Gedung Kantor Cabang Khusus (KCK) Jakarta • *Discussion of the Guidelines for Authority Delegation* • *Discussion on Equity Additions to PT Jamkrindo Syariah* • *Discussion of Alternative Locations to be rented for Special Branch Office Buildings (KCK) Jakarta*	• Kepala SPI • Kepala Divisi Perencanaan Strategis • Kepala Divisi Bisnis 1 • Kepala Divisi Bisnis 2 • Kepala Divisi Bisnsi 3 • Kepala Divisi Penunjang Bisnis • Kepala Divisi TAB • Kepala Divisi Jaringan dan Layanan • Kepala Divisi TI • Kepala Divisi MSDM • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • Plh. Kepala Divisi Umum • Kepala Divisi Keungan dan Investasi • Kepala Divisi Akuntansi • Kepala Divisi Klaim • Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah • Kepala Desk Penjaminan SRG • Pimpinan KCK Jakarta • *Head of Internal Audit Unit* • *Head of Strategic Planning Division* • *Head of Business Division 1* • *Head of Business Division 2* • *Head of Business Division 3* • *Head of Business Support Division* • *Head of TAB Division* • *Head of Network and Service Division* • *Head of IT Division* • *Head of HRM Division* • *Head of Legal and Compliance Division* • *Head of the General Affairs Division (Ad Interim)* • *Head of the Financial and Investment Division* • *Head of Accounting Division* • *Head of Claim Division* • *Head of Sharia Guarantee Business Desk* • *Head of Warehouse Receipt System Guarantee Desk* • *Head of the Jakarta Special Branch Office*	Direktur Utama *President Director*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Kamis, 4 Oktober 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Thursday, October 4, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		Rencana Tindak Lanjut Tim *Business Continuity Management* (BCM) dalam Penanganan Bencana Palu *Follow-Up Plan of the Business Continuity Management (BCM) Team in Disaster Management in Palu*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi MR dan PUKM • *Corporate Secretary* • *Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Kamis, 11 Oktober 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Thursday, October 11, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Lanjutan Pemaparan Hasil Pelaksanaan Kegiatan *Review* dan Penyempurnaan *Integrated Enterprise Risk Management* Perum Jamkrindo • *Continued Presentation of Results of the Implementation of Review and Improvement Activity of the Integrated Enterprise Risk Management of Perum Jamkrindo*	• *Sekretaris Perusahaan* • *Kepala Divisi MR dan PUKM* • *Kepala Divis Renstra* • *Corporate Secretary* • *Head of the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division* • *Head of Strategic Planning Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Jumat, 12 Oktober 2018 *Friday, October 12, 2018*		• Pembahasan Awal RKAP 2019 • Pembahasan Awal RJPP 2019-2023 • *Preliminary Discussion on 2019 Corporate Work Plan and Budget* • *Preliminary Discussion on Corporate Long Term Plan of 2019 - 2023*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Seluruh Kepala Divisi dan Desk • *Corporate Secretary* • *Head of Internal Audit Unit* • *All Division And Desks Heads*	Hadir Semua *All participants were present*
Senin, 15 Oktober 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Monday, October 15, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		Pembahasan Awal RKAP Tahun Buku 2019 dan RJPP 2019-2023 Bersama Direksi dan Dewas *Preliminary Discussion of Corporate Work Plan and Bugdet for Fiscal Year 2019 and Corporate Long Term Plan of 2019 - 2023 with Directors and Supervisory Board*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Renstra • Kepala Divisi Akuntansi • Seluruh Dewan Pengawas • Komite Audit Dewan Pengawas • *Corporate Secretary* • *Head of Strategic Division* • *Head of Accounting Division* • *All Personnel of the Supervisory Board* • *Audit Committee of the Supervisory Board*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Rabu, 17 Oktober 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, October 17, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Konsinyering RKAP 2019 • Konsinyering RJPP 2019-2023 • *Consignment of 2019 Corporate Work Plan and Budget* • *Consignment of Corporate Long Term Plan of 2019 - 2023*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Renstra • Kepala Divisi Akuntansi • Kepala Divisi TI • Kepala Divisi Bisnis 1 • Kepala Divisi Bisnis 2 • Kepala Divisi Bisnis 3 • Kepala Divisi Klaim • Kepala Divisi MSDM • Plh. Kepala Divisi Umum • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • Kepala Desk Subrogasi • Seluruh Dewan Pengawas • Tim Konsultan (PPM Management) • *Corporate Secretary* • *Head of Strategic Planning Division* • *Head of Accounting Division* • *Head of IT Division* • *Head of Business 1 Division* • *Head of Business 2 Division* • *Head of Business 3 Division* • *Head of the Claim Division* • *Head of HRM Division* • *Head of General Affairs Division (Ad Interim)* • *Head of Legal and Compliance Division* • *Head of Subrogation Desk* • *All Personnel of the Supervisory Board* • *Team of Consultants (PPM Management)*	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment, and Risk Management*
Jumat, 19 Okrober 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Friday, October 19, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		Pemaparan RKAP dan RJPP 2019-2023 *Presentation of the Corporate Work Plan and Budget of 2019, and Long Term Plan of 2019 - 2023*	• Sekretaris • Seluruh Kepala Divisi dan Desk • Tim Konsultan (PPM Management) • *Corporate Secretary* • *All Division and Desks Heads* • *Team of Consultants (PPM Management)*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Senin, 22 Oktober 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Monday, October 22, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan Lanjutan RKAP Tahun Buku 2019 dan RJPP Tahun 2019-2023 Bersama Direksi dan Dewan Pengawas • *Continued Discussion on Corporate Work Plan and Budget of 2019 and Corporate Long Term Plan of 2019 - 2023 with the Directors and Supervisory Board*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala SPI • Seluruh Kepala Divisi dan Desk • *Corporate Secretary* • *Head of Internal Audit Unit* • *All Division And Desks Heads*	Hadir Semua *All participants were present*
Rabu, 28 November 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, November 28, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Komite Direksi Tentang Pengajuan Perpanjangan Kerja sama Dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan (LSPP) • Komite Direksi Tentang Ketentuan Usia Pensiun • *The Directors' Committee on Proposal of Extension of Cooperation with the Guarantee Business Professional Certification Agency (LSPP)* • *The Directors' Committee on Provisions concerning Retirement Age*	Divisi MSDM *HRM Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Rabu 5 Desember 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat Lantai 1 *Wednesday, December 5, 2018, Jamkrindo Building, 1st-floor Meeting Room*		• Pembahasan Pedoman Pendelegasian Kewenangan • Penanganan dan Pengendalian Klaim Tahun 2018-2019 • Pembahasan Laporan Kunjungan Lokasi Gedung Kanwil XI Makasar • *Discussion on Guidelines of Authority Delegation* • *Handling and Control of Claims for 2018-2019* • *Discussion of the Report of Site Visit to Region XI Makassar Office Building*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Renstra • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi • Kepala Divisi Klaim • Plh. Kepala Divisi Umum • *Corporate Secretary* • *Head of Strategic Planning Division* • *Head of Legal and Compliance Division* • *Head of Finance and Investment Division* • *Head of Claim Division* • *Head of General Affairs Division (Ad Interim)*	Hadir Semua *All participants were present*

Tanggal dan Tempat *Time and Place*	**Nomor Risalah Rapat** *Minutes of Meeting Number*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat/** *Participants*	**Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Absentees and Reasons of Board of Directors for Absence*
Jumat, 7 Desember 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat serbaguna lantai 10 *Friday, December 7, 2018, Jamkrindo Building, 10th-floor Multipurpose Meeting Room*		• Presentasi SP3 Induk Vendor Financing PT BRI Agroniaga Tbk • Komite Direksi Tentang PKS Co Guarantee KUR dengan Askrindo • Komite Pembahasan Skema Kerja sama Sinergi BUMN • Pembahasan Peraturan Direksi Batas Maksimum Pemberian Pejaminan • *SP3 Presentation of Parent Vendor Financing PT BRI Agroniaga Tbk* • *The Directors' Committee of Cooperation Agreement of KUR Co-Guarantee with Askrindo* • *Committee to Discuss SOEs' Cooperation Synergy Scheme* • *Discussion of the Board of Directors' Regulations on the Legal Granting Limit*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan • Kepala Divisi Penunjang Bisnis • Kepala Divisi MR dan PUKM • Kepala Divisi TAB • Kepala Desk Subrogasi • Kepala Divisi Klaim • *Corporate Secretary* • *Head of Legal and Compliance Division* • *Head of Business Support Division* • *Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division* • *Head of TAB Division* • *Head of Subrogation Desk* • *Head of Claim Division*	Hadir Semua *All participants were present*
Kamis, 27 Desember 2018, Gedung Jamkrindo ruang rapat serbaguna lantai 10 *Thursday, December 27, 2018, Jamkrindo Building, 10th-floor Multipurpose Meeting Room*		Komite Direksi Terkait Aplikasi Market Place Guarantee (MPG) *The Directors' Committees on Market Place Guarantee (MPG) Applications*	• Sekretaris Perusahaan • Kepala Divisi TAB • Kepala Divisi Bisnis 1 • Kepala Divisi Bisnis 2 • Kepala Divisi TI • Kepala Divisi MR dan PUKM • Kepala Desk Syariah • Kepala Desk SRG • *Corporate Secretary* • *Head of TAB Division* • *Head of Business 1 Division* • *Head of Business 2 Division* • *Head of IT Division* • *Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division* • *Head of Sharia Desk* • *Head of the Warehouse Receipt System Desk*	Hadir Semua *All participants were present*

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat
Recapitulation and Level of Attendance of The Directors at the Meeting

Direksi/ *The Board of Directors*	**Jumlah Wajib Rapat/** *Total Required Meeting*	**Jumlah Kehadiran/** *Number of Attendance*	**Jumlah Ketidakhadiran/** *Number of Absence*	**% Kehadiran/** *Attendance Percentage*
Randi Anto Direktur Utama *President Director*	35	33	2	94%
Amin Masudi Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee*	35	30	5	86%
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan *Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	35	35	0	100%
Kadar Wisnuwarnaman Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operations and Network*	35	34	1	97%
I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment and Risk Management*	35	34	1	97%
Rata-rata ***Average***				**95%**

TRANSPARANSI HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEMILIK MODAL

Informasi tentang Pemilik Modal Hingga Nama Pemilik Akhir

Pemilik Modal Perum Jamkrindo adalah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan sebesar 100,00%.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemilik Modal

Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan hubungan afiliasi antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal. Bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/ orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya, maupun hubungan lainnya yang dapat menimbulkan hubungan yang istimewa, seperti yang diuraikan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

TRANSPARENCY OF AFFILIATION BETWEEN THE SUPERVISORY BOARD, BOARD OF DIRECTORS, AND EQUITY OWNER

Information about Equity Owner and the Name of Equity Owner

Equity Owner of Perum Jamkrindo is the Republic of Indonesia, represented by the Government of the Republic of Indonesia/ Ministry of State-Owned Enterprises with 100.00% ownership.

Disclosure of Affiliations Between the Directors, Board of Commissioners, and Equity Owner

The table below shows the affiliations between the Board of Supervisors, Directors and Equity Owners. The form of affiliation includes a special relationship, which is mainly due to blood relationship such as husband/wife/child/parents/siblings/ brother-in-law, etc., as well as other relationships that can create special relationships, as described in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 7 concerning Disclosures of Affiliated Related Parties .

Hubungan Afiliasi Dengan
Affiliations

	Dewan Pengawas *Board of Supervisors*	**Direksi** *Board of Directors*	**Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemilik Modal** *The Government of the Republic of Indonesia as Equity Owner*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*			
Sri Mulyanto Ketua Dewan Pengawas *Chairperson of the Supervisory Board*	x	x	x
Dahlan Siamat Anggota Dewan Pengawas *Supervisory Board Member*	x	x	x
Subandriyo Anggota Dewan Pengawas *Supervisory Board Member*	x	x	x
Noor Ida Khomsiyati Anggota Dewan Pengawas *Supervisory Board Member*	x	x	x
Diah Natalisa *Anggota Dewan Pengawas* *Supervisory Board Member*	x	x	x
Direksi *Board of Directors*			
Randi Anto Direktur Utama *President Director*	x	x	x
Amin Masudi Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee*	x	x	x
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan *Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	x	x	x
Kadar Wisnuwarnaman Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operations and Network*	x	x	x
I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment and Risk Management*	x	x	x

√ = ada x = tidak ada
√ = *affiliated* x = *not affiliated*

Sebagaimana peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan pembubaran BUMN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 jo. Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin;
6. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* dan *Code of Conduct*.

As with laws and regulations as well as other legal regulations stated in:

1. *Law of the Republic of Indonesia No. 19/2003 concerning State-Owned Enterprises;*
2. *Government Regulation Number 45/2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;*
3. *Government Regulation Number 35/2018 concerning Perum Jamkrindo;*
4. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 jo. Number PER-09 / MBU / 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;*
5. *Financial Services Authority Regulation No. 3 / POJK.05 / 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantor Institutions; and*
6. *The Corporate Governance Policy as stated in the Board Manual and Code of Conduct.*

Dewan Pengawas telah menandatangani surat pernyataan berkenaan dengan kepemilikan saham, hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta aktivitas yang dapat menimbulkan dan mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*).

The Supervisory Board has signed a statement regarding share ownership, family relations, financial relations, and activities that can create and contain a conflict of interest rule.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

TRANSPARENCY OF CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada perusahaan lain di luar Perum Jamkrindo periode tahun 2018 sebagai berikut:

The description of Concurrent Position held by Perum Jamkrindo's Supervisory Board and the Board of Directors in other companies outside Perum Jamkrindo Group in 2018 can be seen below:

	Kepengurusan pada Perusahaan Lain *Concurrent Position in Other Companies*	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris *As a member of the Board of Supervisors*	**Sebagai Anggota Direksi** *As a member of the Board of Directors*
Dewan Pengawas *Board of Supervisors*		
Sri Mulyanto Ketua Dewan Pengawas *Chairperson of the Supervisory Board*	x	x
Dahlan Siamat Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	x	x

	Kepengurusan pada Perusahaan Lain *Concurrent Position in Other Companies*	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris *As a member of the Board of Supervisors*	**Sebagai Anggota Direksi** *As a member of the Board of Directors*
Subandriyo Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	x	x
Noor Ida Khomsiyati Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	x	x
Diah Natalisa Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	x	x
Direksi *Board of Directors*		
Randi Anto Direktur Utama *President Director*	x	x
Amin Masudi Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee*	x	x
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan *Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	x	x
Kadar Wisnuwarnaman Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operations and Network*	x	x
I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment and Risk Management*	x	x

√ = ada x = tidak ada
√ = *has concurrent position x = doesn't have concurrent position*

ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

Sekretaris Dewan Pengawas

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang berfungsi melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Secretary To The Board Of Supervisors

To assist the implementation of its duties, the Supervisory Board is assisted by the Secretary of the Supervisory Board who conducts the Company's Protocol and Secretariat activities.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan PER-12/MBU/2012 bagian ketiga Pasal 5 masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Term of Office

Based on PER-12 / MBU / 2012 Section Three (3) of Article Five (5), the term of office of the Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners/Supervisory Board is determined by the Board of Commissioners/Supervisory Board with a maximum of 3 (three) years serving period and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without reducing the rights of the Board of Commissioners/Supervisory Board

Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-05/DP-JAMKRINDO/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas dipercayakan kepada Alvin Nur Widjajanti.

The Secretary of the Supervisory Board

The Secretary of the Supervisory Board is appointed and dismissed by the Supervisory Board. Based on the Decree of the Supervisory Board No. KEP-05 / DP-JAMKRINDO / XI / 2017 dated November 1, 2017, concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Supervisory Board in Perum Jamkrindo, the Secretary of the Supervisory Board was entrusted to Alvin Nur Widjajanti.

Alvin Nur Widjajanti
Sekretaris Dewan Pengawas/ *Secretary of the Supervisory Board*
Periode Jabatan: 1 November 2017 - 31 Oktober 2020, Periode ke-1/ *Term of Office: November 1, 2017 - October 31, 2020, 1st Period*

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Jakarta, 5 November 1959

Domisili
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995), dan Pasca Sarjana (S2) Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997)

Riwayat Profesi
Telah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada beberapa BUMN, di antaranya PT Taman Wisata Candi BP dan RB (2003-2013), PT Perikanan Nusantara (2008-2013), PT Asuransi Jiwasraya (2013-2017). Sejak 2015 menjabat sebagai Kepala Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I, Kementerian BUMN

Personal Data
Indonesian citizen
49 years old
Born in Jakarta, November 5, 1959

Domicile
Bekasi, West Java, Indonesia

Education
Bachelor in Engineering majoring in Civil Engineering from Trisakti University, Jakarta (1995), and Master of Management from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997)

Professional History
He has served as Secretary of the Board of Commissioners / Supervisory Board of several SOEs, including PT Taman Wisata Candi BP and RB (2003-2013), PT Perikanan Nusantara (2008-2013), PT Asuransi Jiwasraya (2013-2017). Since 2015 he has served as the Head of the Financial Services Subdivision, Survey Services, and Consultant I, Ministry of SOEs

Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Pelaksanaan kegiatan tugas Sekretaris Dewan Pengawas mengacu pada Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 Pasal 4, yang meliputi:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Selain melaksanakan tugas di atas, Sekretaris Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundangundangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Kebijakan Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas No. Kep-05/DP/Jamkrindo/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, memutuskan:

1. Honorarium per bulan sebesar Rp18.000.000
2. Tunjangan Transportasi Rp1.300.000

The Duties of Secretary of the Supervisory Board

The implementation of the duties of the Secretary of the Supervisory Board refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-12 / MBU / 2012 Article 4, which includes:

1. *Preparation of meetings, which include the briefing sheet for the Supervisory Board;*
2. *Minutes writing of the Board of Supervisors meeting in accordance with the provisions of the Company's articles of association;*
3. *Administration of the Supervisory Board documents regarding incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;*
4. *Arrangement of the Draft of the Work Plan and Budget of the Supervisory Board;*
5. *Arrangement the Draft of the Supervisory Board Reports;*
6. *Execution of other duties from the Supervisory Board.*

In addition to carrying out the above tasks, the Secretary of the Supervisory Board, as the head of the Secretariat, carries out other duties in the form of:

1. *Ensuring that the Supervisory Board complies with laws and regulations and applies the principles of GCG;*
2. *Providing information needed by the Supervisory Board periodically and/or at any time when requested;*
3. *Coordinating Committee members, if needed, in order to facilitate the duties of the Supervisory Board;*
4. *Acting as a Liaison Officer of the Supervisory Board with other parties.*

The Remuneration Policy for the Secretary of the Supervisory Board

Based on the Decree of the Supervisory Board No. Kep-05 / DP / Jamkrindo / XI / 2017 dated November 1, 2017, concerning Dismissal and Appointment of the Secretary of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo, it has been decided that:

1. *The amount of monthly honorarium is IDR18,000,000, and*
2. *The transportation allowance is IDR1,300,000*

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2018

Kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas seiama tahun 2018 antara lain:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat *(briefing sheet)* Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
4. Sebagai penghubung *(liaison officer)* Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN; dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

Komite Audit senantiasa menjalankan tugasnya secara independen dalam membantu Dewan Pengawas memantau kinerja Unit Audit Internal serta Auditor Eksternal yang ditunjuk. Oleh karena itu, Komite Audit diberikan kewenangan untuk membangun hubungan dengan kedua institusi tersebut

Brief Report on the Implementation of Duties in 2018

The activities of the Supervisory Board Secretariat throughout 2018 include:

1. *Meetings preparations which include the briefing sheet materials for the Supervisory Board;*
2. *Minutes writing of the Board of Supervisors meeting in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company;*
3. *Administration of Supervisory Board's documents regarding incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;*
4. *Drafting of the Work Plan and Budget of the Supervisory Board;*
5. *Compilation the Draft of the Supervisory Board Reports;*
6. *Execution of other duties of the Supervisory Board.*

In addition to carrying out the tasks mentioned above, the Secretary of the Supervisory Board as the head of the Secretariat carries out other tasks in the form of:

1. *Ensuring that the Supervisory Board complies with laws and regulations and applies the principles of GCG;*
2. *Providing information needed by the Supervisory Board periodically and/or at any time when requested;*
3. *Coordinating Committee members, if needed, in order to facilitate the duties of the Supervisory Board;*
4. *Acting as liaison officer of the Supervisory Board with other parties.*

Audit Committee

The formation of the Audit Committee and the implementation of its duties and responsibilities are based on Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo), Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs; and the Minister of SOEs Regulation No. PER-05 / MBU / 2006 concerning the Audit Committee for SOEs.

The Audit Committee always carries out its duties independently in helping the Supervisory Board monitor the performance of the Internal Audit Unit and the appointed External Auditors. Therefore, the Audit Committee is given the authority to build relationships with the two institutions and submit reports to the Supervisory Board. The results of supervision, in the form of

dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas. Hasil pengawasan berupa temuan maupun rekomendasi dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dewan Pengawas dalam hal pengambilan keputusan.

Piagam Komite Audit

Piagam komite audit berfungsi sebagai panduan (*terms of reference*) bagi Dewan Pengawas dalam memberikan penugasan kepada Komite Audit serta Direksi dan jajarannya dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit.

Di mana dalam piagam tersebut dijelaskan bahwa tujuan pembentukan Komite Audit adalah untuk:
1. Membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang diselenggarakan oleh Direksi
2. Mendorong terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran.

Di dalam piagam Komite Audit, juga telah diatur perihal tugas dan tanggung jawab, wewenang serta kode etik kerahasiaan Komite Audit.

Struktur, Keanggotan, Integritas dan Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Struktur, keanggotaan, dan tugas Komite Audit Perum Jamkrindo diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari anggota Dewan Pengawas. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan yang memiliki integritas yang baik dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan. Selain itu, anggota Komite Audit Perum Jamkrindo mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta memahami industri bisnis Perum Jamkrindo. Anggota Komite Audit juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan Perum Jamkrindo.

findings and recommendations, can be taken into consideration by the Supervisory Board in terms of decision making.

Audit Committee Charter

The audit committee charter functions as a guideline (terms of reference) for the Supervisory Board in providing assignments to the Audit Committee as well as to the Directors and its staff in assisting the implementation of the duties of the Audit Committee.

In the charter, it is explained that the purpose of establishing an Audit Committee is to:
1. *Assist the Supervisory Board in carrying out its duties, especially in carrying out supervision of the management of the Company organized by the Board of Directors*

2. *Encourage the realization of Good Corporate Governance in the Company, which is based on the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.*

In the Audit Committee charter, the duties and responsibilities, as well as the authorities and ethics code of confidentiality of the Audit Committee have also been regulated.

Structure, Membership, Integrity, Expertise, and Independence of the Audit Committee

The structure, membership, and duties of the Audit Committee of Perum Jamkrindo are regulated in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-12 / MBU / 2012 dated August 24, 2012, concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The Audit Committee is chaired by a chairperson who is a member of the Supervisory Board. The Audit Committee members can come from members of the Supervisory Board or from outside the Company who have good integrity and have sufficient work experience in the field of supervision/inspection. In addition, the Audit Committee member of Perum Jamkrindo must have an accounting or financial education background and understands Perum Jamkrindo's line of business. The Audit Committee members also must not have a potential conflict of interest with Perum Jamkrindo.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Term of Office

The term of office of an Audit Committee member who is not a member of the Company's Supervisory Board is 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years of office, without reducing the rights of the Supervisory Board to terminate it at any time.

Susunan dan Profil Anggota Komite Audit

Di tahun 2018 terjadi pergantian keanggotaan Komite Audit. Kronologi pergantian susunan Komite Audit, dan susunan Komite Audit per 31 Desember 2018 dapat dilihat di bawah ini.

Composition and Profile of Audit Committee Members

In 2018 there was a change in the Audit Committee membership. The chronology of changes in the composition of the Audit Committee, and the composition of the Audit Committee as of December 31, 2018, can be seen below.

Kronologi Pergantian Susunan Komite Audit di Sepanjang Tahun 2018
Chronology of Changes in the Audit Committee Structures in 2018

Periode 1 – 31 Januari 2018 *January 1 to 31, 2018*	**Periode 31 Januari – 5 September 2018** *January 31 to September 5, 2018*	**Periode 5 september - 31 Desember 2018** *September 5 to December 31, 2018*	**Keterangan** *Information*
Dahlan Siamat Ketua Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas *Chairman of the Audit Committee / Supervisory Board Member*	Dahlan Siamat Wakil Komite Audit/ Anggota Dewan Pengawas *Deputy Chair of Audit Committee / Supervisory Board Member*		Dahlan Siamat tidak lagi menjabat Ketua Komite Audit sejak 31 Januari 2018 *Dahlan Siamat has no longer served as Chair of the Audit Committee since January 31, 2018*
Dody Heriawan Priatmoko Anggota Komite Audit *Audit Committee Member*	Dody Heriawan Priatmoko Anggota Komite Audit *Audit Committee Member*	Dody Heriawan Priatmoko Anggota Komite Audit/ *Audit Committee Member*	-
	Sri Mulyanto Ketua Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas *Chairman of the Audit Committee / Supervisory Board Member*	Sri Mulyanto Ketua Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas *Chairman of the Audit Committee / Supervisory Board Member*	Sri Mulyanto efektif menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 31 Januari 2018 *Sri Mulyanto has effectively served as Chair of the Audit Committee since January 31, 2018*
		Noor Ida Khomsiyati Anggota Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas *Audit Committee Member / Supervisory Board Member*	Noor Ida Khomsiyati efektif menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 5 september 2018 *Noor Ida Khomsiyati has effectively served as a member of the Audit Committee since September 5, 2018*

Susunan Komite Audit Perum Jamkrindo per 31 Desember 2018

The Composition of the Audit Committee of Perum Jamkrindo as of December 31, 2018

Jabatan *Positions*	**Nama** *Names*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Beginning Term of Office*	**Masa Akhir Jabatan** *Term of Office Ending*	**Periode Jabatan** *Term of Office*
Ketua Komite Audit/ Anggota Dewan Pengawas *Chairman of the Audit Committee / Member of the Supervisory Board*	Sri Mulyanto	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 *Decree of the Supervisory Board No. KEP-07 / DP-JAMKRINDO / IX / 2018 on September 5, 2018*	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas *Following the term of office as a Supervisory Board Member*		
Anggota Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas *Audit Committee Member / Supervisory Board Member*	Noor Ida Khomsiyati	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 *Decree of the Supervisory Board No. KEP-07 / DP-JAMKRINDO / IX / 2018 on September 5, 2018*	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas *Following the term of office as a Supervisory Board Member*		
Anggota Komite Audit *Audit Committee Members*	Dody Heriawan Priatmoko	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-06/DP-Jamkrindo/XI/2017 tanggal 15 November 2017 *Decree of the Supervisory Board No. KEP-06 / DP-Jamkrindo / XI / 2017 dated November 15, 2017*	15 November 2017 *November 15, 2017*	15 November 2020 *November 15, 2020*	Ke-1 *1st*

Sri Mulyanto
Ketua Komite Audit/Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Supervisory Board

Profil Ketua Komite Audit Sri Mulyanto dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.	*The profile of the Chairman of the Audit Committee, Sri Mulyanto, can be seen in the Profile section of the Supervisory Board, in the Company Profile Chapter.*

Noor Ida Khomsiyati
Anggota Komite Audit/Anggota Dewan Pengawas
Audit Committee Member / Supervisory Board Member

Profil anggota Komite Audit Noor Ida Khomsiyati dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.	*The profile of Noor Ida Khomsiyati can be seen in the Profile of the Supervisory Board section, in the Company Profile Chapter.*

Dody Heriawan Priatmoko
Anggota Komite Audit/ *Audit Committee Member*
Periode Jabatan: 15 November 2017 - 14 November 2020/ *Term of Office: November 15, 2017 - November 14, 2020*

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun
Kelahiran Pemalang, 15 April 1982

Domisili
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2004).

Riwayat Profesi
Pernah bekerja di Grup Astra (2004-2008), PT Unilever Indonesia Tbk (2008-2009) dan sejak tahun 2009 menjadi pegawai Kementerian BUMN, di mana sejak tahun 2015 hingga kini menjabat Kepala Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas I pada Kedeputian Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, serta Ketua Pokja 3 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementrian BUMN (2017-sekarang). Beberapa pengalaman penugasan di BUMN yaitu Staf Sekretariat Dewan Pengawas (2011-2014) dan Sekretaris Dewan Pengawas (2014-2017) di Perum Perhutani.

Personal data
Indonesian citizen
36 years old
Born in Pemalang, April 15, 1982

Domicile
South Tangerang, Banten, Indonesia

Education
Bachelor in Economics majoring in Accounting from Universitas Diponegoro, Semarang (2004).

Professional History
He worked in the Astra Group (2004-2008), PT Unilever Indonesia Tbk (2008-2009) and since 2009 has been an employee of the Ministry of SOEs, where he has served as Head of The Utilization Subdivision of Minority I State Ownership Portfolio in the Deputy for Business Restructuring and Development, as well as a Chairperson of the Working Group 3 of Procurement Service Units (ULP) of the Ministry of SOEs (2017-present). Some of the assignment which has been taken in SOEs are as a Supervisory Board Secretariat Staff (2011-2014) and as a Secretary of the Supervisory Board (2014-2017) at Perum Perhutani.

Independensi Komite Audit

Independence of the Audit Committee

Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:
The transparency of the independence of the Audit Committee can be seen in the following table:

Aspek Independensi *Aspect of Independence*	Dahlan Siamat*	Sri Mulyanto	Noor Ida Khomsiyati	Dody Heriawan Priatmoko
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan *Do not have up to the third-degree familial relationships, either directly or indirectly, or any relationships which arise because of marriage*	x	x	x	x
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan dan perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan *Do not own shares directly or indirectly in the Company and other companies that can cause a conflict of interest*	x	x	x	x

Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:
The transparency of the independence of the Audit Committee can be seen in the following table:

Aspek Independensi *Aspect of Independence*	Dahlan Siamat*	Sri Mulyanto	Noor Ida Khomsiyati	Dody Heriawan Priatmoko
Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/ata calon/anggota legislatif dan/atau kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kepentingan *Do not hold multiple positions as administrators of political parties and/ or candidates/legislative members and/or regional heads, and other positions in accordance with the provisions of the legislation that can lead to a conflict of interest*	x	x	x	x
Anggota komite audit yang bukan merupakan anggota dewan pengawas, tidak merangkap sebagai: • anggota Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain; • sekretaris/staf sekretariat Dewan Pengawas Pengawas pada BUMN/ perusahaan lain; • anggota Komite lain pada Perusahaan; dan/atau • anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain. *The Audit Committee members who are not members of the supervisory board cannot hold multiple positions as:* • *Member of the Supervisory Board of the other SOEs/company;* • *A secretary/secretariat staff of the Supervisory Board for other SOEs/ companies;* • *Other Committee members at the Company; and/or* • *Committee member in another SOEs / company.*	x	x	x	x
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan *Do not have a business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Company which can cause a conflict of interest*	x	x	x	x
Bukan merupakan karyawan kunci yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Pengawas *Was not a key employee, in other words, someone who has the authority and responsibility to plan, lead and control the activities of the Company in the last 6 (six) months before being appointed by the Supervisory Board*	x	x	x	x
Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material perusahaan *Do not have personal interests with company material information directly or indirectly*	x	x	x	x

Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:
The transparency of the independence of the Audit Committee can be seen in the following table:

Aspek Independensi *Aspect of Independence*	Dahlan Siamat*	Sri Mulyanto	Noor Ida Khomsiyati	Dody Heriawan Priatmoko
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Pengawas *Not a person employed by a Public Accounting Firm, a Legal Consultant's office, or another party that provides audit services, non-audit services, and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Supervisory Board*	x	x	x	x

√ = ada | x = tidak ada
√ = *Yes* | *x = No*

*)Dahlan Siamat tidak lagi menjabat Ketua Komite Audit sejak 31 Januari 2018
**) Dahlan Siamat has no longer served as Chair of the Audit Committee since January 31, 2018*

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai dengan Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 Pasal 12, Komite Audit Perusahaan bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.

The Functions, Duties, and Responsibilities of the Audit Committee

In accordance with the Ministry of SOEs Regulation No. PER-12 / MBU / 2012 Article 12, the Company's Audit Committee works collectively and serves to assist the Supervisory Board in carrying out its duties and in its reporting, and is responsible directly to the Supervisory Board. In carrying out its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. *To assist the Supervisory Board to ensure the effectiveness of the Internal Control System and the effectiveness of the implementation of the duties of the External Auditor and Internal Auditor.*
2. *To assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and External Auditors.*
3. *To provide recommendations regarding the improvement of the Management Control System and its implementation.*
4. *To ensure that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the Company.*
5. *To provide recommendations regarding the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to the Supervisory Board to be submitted to the Equity Owner.*
6. *To identify matters that require the attention of the Supervisory Board and the duties of other Supervisory Boards.*

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Komite Audit selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait industri penjaminan, Komite Audit mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Komite Audit.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Audit di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development Program

In order for the Audit Committee to keep abreast of developments related to the guarantee industry, the Audit Committee follows a competency development program in the form of seminars, workshops, or other activities that can improve the knowledge and competence of the Audit Committee.

In relation to the competency enhancement activities that are participated by Audit Committee Members throughout 2018, they can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

Rapat Komite Audit

Komite Audit telah menyelanggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Rapat Komite Audit di tahun 2018 diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali sepanjang tahun 2018.

Tentang risalah rapat dapat dilihat pada pembahasan Rapat Dewan Pengawas.

Kehadiran Komite Audit pada rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee has held meetings aimed at assisting the duties of the Supervisory Board in overseeing the management of the Company. The Audit Committee held twelve (12) meetings in 2018.

The minutes of the meeting can be seen in the discussion section of the Supervisory Board Meeting.

The attendance of the Audit Committee at the meeting can be seen in the table below.

Kehadiran Anggota Komite Audit pada Rapat
The Attendance of Audit Committee Members at the Meeting

Tanggal *Date*	**Komite Audit** *Audit Commitee*			
	Dahlan Siamat (Ketua *Chairperson)**	**Sri Mulyanto** *(Ketua Chairperson)**	**Noor Ida Khomsiyati (Anggota** *Member)**	**Dody Heriawan Priatmoko (Anggota** *Member)*
31 Januari 2018 *January 31, 2018*	√	√	-	√
27 Februari 2018 *February 27, 2018*	√	√	-	√
27 Maret 2018 *March 27, 2018*	√	√	-	√
24 April 2018 *April 24, 2018*	√	√	-	√
23 Mei 2018 *May 23, 2018*	√	√	-	√

Kehadiran Anggota Komite Audit pada Rapat
The Attendance of Audit Committee Members at the Meeting

Tanggal *Date*	Komite Audit *Audit Commitee*			
	Dahlan Siamat (Ketua *Chairperson)**	**Sri Mulyanto** *(Ketua Chairperson)**	**Noor Ida Khomsiyati (Anggota** *Member)**	**Dody Heriawan Priatmoko (Anggota** *Member)*
26 Juni 2018 *June 26, 2018*	√	√	-	√
1 Agustus 2018 *August 1, 2018*	-	√	-	√
21 Agustus 2018 *August 21, 2018*	-	√	-	√
26 September 2018 *September 26, 2108*	-	√	√	√
31 Oktober 2018 *October 31, 2018*	-	√	√	√
11 November 2018 *November 11, 2018*	-	√	√	√
19 Desember 2018 *December 19, 2018*	-	√	√	√

√ = hadir x = berhalangan hadir
√ = *attended x = absent*

*) Dahlan Siamat efektif tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 31 Januari 2018, digantikan oleh Sri Mulyanto
*) *Dahlan Siamat has no longer served as Chairperson of the Audit Committee since January 31, 2018, and was replaced by Sri Mulyanto*

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat
Recapitulation and Level of Attendance of the Audit Committee at the Meeting

Komite Audit *Audit Committee*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Required Meeting*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**Jumlah Ketidakhadiran** *Number of Absence*	**% Kehadiran** *Attendance Percentage*
Dahlan Siamat Ketua *Chairperson**	6	6	0	100.%
Sri Mulyanto Ketua *Chairperson**	12	12	0	100%
Noor Ida Khomsiyati Anggota *Member**	4	4	0	100%
Dody Heriawan Priatmoko Anggota *Member*	12	12	0	100%
Rata-rata ***Average***				**100%**

* Dahlan Siamat efektif tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 31 Januari 2018, digantikan oleh Sri Mulyanto
* *Dahlan Siamat has no longer served as Chairperson of the Audit Committee since January 31, 2018, and was replaced by Sri Mulyanto*

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit 2018

Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada dewan Pengawas. Program Kerja Komite Audit di tahun 2018 disampaikan pada Desember 2018 kepada Dewan Pengawas dan pelaporannya disampaikan melalui laporan triwulan.

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Januari 2018.
2. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Februari 2018.
3. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2018.
4. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2018.
5. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2018.
6. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2018.
7. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juli 2018.
8. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Agustus 2018.
9. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan September 2018.
10. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Oktober 2018.
11. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan November 2018.
12. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Desember 2018.
13. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Pengawas ke lapangan.
14. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahun buku 2018 yang dilaksanakan oleh KAP Hertanto, Grace dan Karunawan.
15. Membantu Dewan Pengawas dalam proses pengadaan dan pengusulan KAP audit tahun buku 2018 untuk ditetapkan oleh Menteri BUMN.

Brief Report on the Implementation of the 2018 Audit Committee Work Program

The Audit Committee works collectively and serves to assist the Supervisory Board in carrying out its duties. The Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in its reporting, and is directly responsible to the Supervisory Board. The Audit Committee Work Program in 2018 was submitted in December 2018 to the Supervisory Board and its reporting was submitted through quarterly reports.

In 2018, the Audit Committee has carried out its duties in accordance with applicable regulations, which include the following activities:

1. *Prepare a review and material for the January 2018 Board of Supervisors' meeting.*
2. *Prepare a review and material for the February 2018 Board of Supervisors' meeting.*
3. *Prepare a review and material for the March 2018 Board of Supervisors' meeting.*
4. *Prepare a review and material for the April 2018 Board of Supervisors' meeting.*
5. *Prepare a review and material for the May 2018 Board of Supervisors' meeting.*
6. *Prepare a review and material for the June 2018 Board of Supervisors' meeting.*
7. *Prepare a review and material for the July 2018 Board of Supervisors' meeting.*
8. *Prepare a review and material for the August 2018 Board of Supervisors' meeting.*
9. *Prepare a review and material for the September 2018 Board of Supervisors' meeting.*
10. *Prepare a review and material for the October 2018 Board of Supervisors' meeting.*
11. *Prepare a review and material for the November 2018 Board of Supervisors' meeting.*
12. *Prepare a review and material for the December 2018 Board of Supervisors' meeting.*
13. *Provide assistance on the visit of the Supervisory Board to the site.*
14. *Monitor and evaluate the implementation of the 2018 financial statement audit conducted by Hertanto, Grace and Karunawan Public Accounting Firm.*
15. *Assist the Supervisory Board in the procurement and proposal of the Public Accounting Firm for the audit year 2018 to be stipulated by the Minister of SOEs.*

16. Melakukan *review* terhadap kegiatan pengendalian internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern serta memberi tanggapan/masukan terkait temuan-temuan penting SPI dan temuan-temuan dari pihak eksternal seperti BPK-RI, OJK, dan lainnya.
17. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan IV Tahun 2017 Perum Jamkrindo.
18. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2018 Perum Jamkrindo.
19. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2018 Perum Jamkrindo.
20. Melakukan telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2018 Perum Jamkrindo.
21. Melakukan telaahan atas Saran dan Pertimbangan untuk Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI.
22. Melakukan telaahan atas *Assesment Good Corporate Governance*, dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
23. Melakukan telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jamkrindo Tahun 2018.
24. Melakukan telaahan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum Jamkrindo Tahun 2019-2023.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Audit

Remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Kepada anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:
1. Honorarium per bulannya Rp29.000.000.
2. Tunjangan Hari Raya per tahunnya 1x Honorarium.

16. *Review internal control activities carried out by the Internal Audit Unit and provide feedback / input regarding important findings by the unit, or other findings from external parties such as the Financial Service Authority, Audit Board of the Republic of Indonesia and others.*
17. *Conduct a review of the 4th Quarter Management Report of Perum Jamkrindo in 2017.*
18. *Conduct a review of the 1st Quarter Management Report of Perum Jamkrindo of 2018.*
19. *Conduct a review of the 2nd Quarter Management Report of Perum Jamkrindo of 2018.*
20. *Conduct a review of the 3rd Quarter Management Report of Perum Jamkrindo of 2018.*
21. *Conduct a review of Suggestions and Considerations for the Preparation of the Annual Supervision Work Program (PKPT) of the Internal Audit Unit.*
22. *Conduct a review of Good Corporate Governance Assessment, and Company Code of Conduct.*
23. *Conduct a review of the Jamkrindo Corporate Work Plan and Budget (RKAP) in 2018.*
24. *Conduct a review of the Company's Long Term Plan (RJPP) of Perum Jamkrndo of 2019 - 2023.*

Remuneration Policy for the Audit Committee

The remuneration of members of the Audit Committee is determined by the Supervisory Board by taking into account the Company's capabilities. The maximum of which is 20% of the salary of the President Director. The Supervisory Board member who is also the Chairperson/member of the Audit Committee is not given additional income; his/her income is only that of a member of the Supervisory Board.

The members of the Audit Committee who are not members of the Supervisory Board, the Company provides the following remuneration policy:
1. *A monthly Honorarium of IDR 29,000,000.*
2. *He/she is entitled to a one-month amount of honorarium given as Annual Religious Holiday Allowance.*

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Function

Perum Jamkrindo tidak memiliki komite tersendiri terkait fungsi nominasi dan remunasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi. Mekanisme nominasi dan pengangkatan sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian BUMN sebagai Pemilik Modal hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan juga Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas berwenang membentuk Komite selain Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

Perum Jamkrindo does not have its own committee related to the nomination and remuneration function for the Supervisory Board and Directors. The mechanism for nomination and appointment is fully the authority of the Ministry of SOEs as the Capital Owner this is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2018 regarding Public Companies (Perum) Indonesian Credit Guarantees and also Regulation of the Minister of State Owned Enterprises number: Per-12/MBU/2012 regarding the Supporting Organs of the Board of Commissioner/ Supervisory Board in the State Owned Enterprises which state that the Supervisory Board is authorized to create Committees other than Audit, if deemed necessary by taking into account the ability of the company.

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

1. Pengangkatan

   Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 yaitu dengan terlebih dahulu menominasikan beberapa calon yang berasal dari berbagai sumber seperti mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, Pejabat Struktual maupun Fungsional serta dari sumber lain.

   Mekanisme pengangkatan selanjutnya adalah melakukan penjaringan dengan Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi yang bertindak sebagai penanggung jawab. Setelah didapatkan kandidat calon Dewan Pengawas, selanjutnya Deputi melakukan pengadministrasian terhadap masing-masing kandidat. Setelah pengadministrasian dirampungkan, Deputi melakukan penilaian serta evaluasi terhadap seluruh kandidat calon anggota Dewan Pengawas dengan mengacu kepada kualifikasi yang sudah ditetapkan. Rekomendasi yang diberikan setelah hasil penilaian dan evaluasi berupa pernyataan kualitatif yaitu, "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".

   Bagi kandidat calon yang mendapatkan kriteria "Disarankan" dapat diusulkan untuk kemudian ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Dalam aturan ini, anggota Dewan Pengawas dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Untuk itu, terdapat ketentuan bahwa kandidat terpilih diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan sebelumnya semenjak ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Jika dalam waktu yang telah

Procedures for Appointment and Dismissal of Supervisory Board Members

1. *Appointment*

   The mechanism of appointment of the Supervisory Board, based on the Decree of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/ 02/2015, is by first nominating several candidates from various sources such as former members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Supervisory Board of an SOE, or Structual or Functional Officials of an SOE, and from other sources.

   The next appointment mechanism is to conduct a screening with the Minister of SOEs, and the Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy in charge. After obtaining the candidate for the Supervisory Board, the Deputy then administers each candidate. After the administration has been completed, the Deputy assesses and evaluates all candidates for the Supervisory Board members using the predetermined qualifications as its reference. Recommendations given after the results of assessment and evaluation contain qualitative statements, such as "Recommended" or "Not Recommended".

   For candidates who has gotten the "Recommended" criteria, they can be proposed to become members of the Company's Supervisory Board. In this mechanism, members of the Supervisory Board must cease any concurrent positions that he or she has. For this reason, there is a stipulated provision that the candidate must sign a resignation letter from the previous position once he or she is chosen as a member of the Company's Supervisory Board. If within the stipulated period

ditetapkan anggota Dewan Pengawas tidak melaksanakan ketentuan tersebut, secara otomatis masa jabatan yang bersangkutan berakhir pada saat itu.

2. Pemberhentian
Dalam ketentuan ini, Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan berbagai alasan baik atas permintaan pribadi maupun alasan-alasan lain terkait seperti pelanggaran ketentuan kebijakan internal dan hukum, serta tidak terpenuhinya tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Dewan Pengawas Perusahaan juga dapat diberhentikan oleh Menteri BUMN dalam rangka restrukturisasi atau memasuki masa usia pensiun Aparatur Sipil Negara.

Mekanisme pemberhentian diawali dengan pelaksanaan evaluasi terhadap anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan oleh Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris. Setelah melakukan evaluasi, Deputi Teknis mengajukan usulan kepada Mentri BUMN guna mendapatkan penetapan. Penyampaian usulan pemberhentian disertai dengan penjelasan alasan pemberhentian dan konsep surat Menteri tentang pemberhentian.

Selain mendapatkan usulan dari Deputi Teknis dan Sekretaris sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, proses pemberhentian anggota Dewan Pengawas juga dapat dilakukan langsung oleh Menteri BUMN berdasarkan hasil evaluasinya sendiri. Mentri BUMN juga dapat menerima masukan dari Deputi Teknis dan Sekretaris terkait kebijakan pemberhentian yang dilakukan.

the member of the Supervisory Board does not implement the provision, then the candidate will be terminated from the position immediately.

2. *Dismissal*
In the same provision it is stated that the Supervisory Board may be dismissed at any time for various reasons such as based on personal request and other related reasons such as violations of provisions of internal and legal policy, as well as for failure to carry out the assigned tasks and responsibilities. The Corporate Supervisory Board can also be dismissed by the Minister of SOEs in the context of restructuring or entering the retirement age of the State Civil Apparatus.

The dismissal mechanism begins with the evaluation of members of the Supervisory Board who are dismissed by the Technical Deputy in coordination with the Secretary. After conducting an evaluation, the Technical Deputy submits a proposal to the Minister of SOEs to acquire decision. Submission of proposal for termination is accompanied by an explanation of the reasons for the dismissal and the Minister of SOEs' letter concept regarding dismissal.

In addition to getting proposals from the Technical Deputy and Secretary as outlined earlier, the dismissal process of members of the Supervisory Board can also be carried out directly by the Minister of SOEs based on the results of his/her own assessment. The Minister of SOEs can also receive input from the Technical Deputy and the Secretary regarding the dismissal policy that was carried out.

Kebijakan Mengenai Rencana Suksesi Direksi

Suksesi Direksi menjadi momentum membangun tradisi alih generasi dan role model bagi Perum Jamkrindo, selain sebagai tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk menjawabnya dengan prestasi dan kinerja terbaik. Untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan melakukan proses suksesi Direksi di mana penetapan calon Direksi Perum Jamkrindo ditetapkan berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/02/2015. Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian.

Policies Regarding Directors' Succession Plans

The Board of Directors' succession became a momentum to build a tradition of generation transition and role models for Perum Jamkrindo, in addition to being a challenge for elected Directors and all employees to respond to the succession with the best achievements and performance. To ensure that the Company is managed by a management team with the right expertise and competency, the Company carries out a succession process of Directors of which the establishment of the Board of Directors of Perum Jamkrindo is decided based on the fulfillment of Minister of State Enterprises Regulation No. PER-03 / MBU / 02/2015. The process of selecting the Board of Directors is carried out by the Evaluation Team put together by the Minister based on proposals from related Echelon I officials and the Secretary of the Ministry.

Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi, adalah sebagai berikut: *The selection process by the Evaluation Team is as follows:*

Melakukan pemanggilan terhadap Calon Anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri, untuk mengikuti UKK.

Summon the Candidates for Members of the Board of Directors, included in the Candidate List approved by the Minister, to take part in the Fit and Proper Test.

↓

Melakukan pengujian terhadap Calon Anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan Lembaga Profesional.

Testing the Prospective Members of the Board of Directors, in the event that the test is not conducted by appointing a Professional Institution.

↓

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian Lembaga Profesional, jika pengujian menggunakan Lembaga Profesional.

Evaluate the results of the assessment of Professional Institutions in the event that the test was conducted by appointing Professional Institutions.

↓

Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan.

Make decisions and provide recommendations for the assessment

↓

Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi, untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan

Determine the final results of the evaluation signed by the Chairperson and Deputy Chairperson of the Evaluation Team, to be submitted to the Minister in order to obtain a decision

↓

Menyampaikan seluruh dokumen UKK kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan

Submitting all Fit and Proper Test documents to the Secretary of the Ministry for administration

↓

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses UKK

Perform other duties given by the Minister to facilitate the process of Fit and Proper Test

Tim Evaluasi memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menentukan calon terbaik. Sedangkan pembobotan dalam penilaian terhadap persyaratan materil calon Direksi, adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%;
   b. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   c. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/ atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   d. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%;
2. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%.
   b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan diberikan bobot 10%.
   c. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga diberikan bobot 10%.
   d. Kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%.
   e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%.
3. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%.

Saat ini, terdapat anggota Direksi yang berasal dari kalangan internal Perusahaan yakni Direktur Bisnis Penjaminan yang merupakan mantan Kepala Divisi dilingkungan Perusahaan, dan Direktur Operasional & Jaringan yang merupakan mantan Direktur Utama pada Anak Perusahaan.

The Evaluation Team provides recommendations to the Minister of SOEs to determine the best candidates. The weighting in evaluating the material requirements of prospective Directors is as follows:

1. *The aspects of Moral and Integrity are given an assessment weight of 35% with the following details:*
   a. *Have never been involved in an act of engineering and deviant practices at the candidate's place of work before the nomination (which includes dishonest acts). This item is given a weigh of 10%;*
   b. *Has never been involved in an act of Default that can be categorized as not fulfilling a commitment agreed upon at the candidate's place of work before the nomination (which includes bad behavior). This item is given a weight of 10%;*
   c. *Has never been involved in an act categorized as being able to provide unlawful benefits to the person concerned and/or other parties before the nomination (which includes bad behavior). This item is given a weight of 10%;*
   d. *Has never been involved in an act that could be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of management of a healthy company (which includes bad behavior). This item is given a weight of 5%;*
2. *Technical expertise/competencies are given an assessment weight of 55% with the following details:*
   a. *Knowledge in the line of business of the relevant SOE is given a weight of 5%.*
   b. *An understanding of management and corporate governance is given a weight of 10%.*
   c. *Experience in SOEs/Companies/Institutions management is given a weight of 10%.*
   d. *The ability to lead and work together is given a weight of 10%.*
   e. *The ability to formulate and implement strategic policies in the context of SOE development is given a weight of 20%.*
3. *The psychological aspect is given an assessment weight of 10%.*

At present, there are members of the Board of Directors who are from the Company's internal circle, namely the Director of Guarantee Business, who is the former Head of the Division within the Company, and the Director of Operations & Network who is the former President Director of the Subsidiaries.

Komite Investasi dan Risiko Usaha

Pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha pada Desember 2011 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai tindaklanjut atas Surat Menteri Negara BUMN No. S-328/MBU.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil *Assessment* Penerapan GCG Perum Jamkrindo Tahun 2010, dengan memperhatikan kondisi bahwa:

1. Perum Jamkrindo mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi, yang menghadapi risiko tinggi, terutama risiko pembayaran klaim (tagihan ganti rugi dari pihak perbankan selaku pemberi kredit) akibat kredit macet.
2. Perum Jamkrindo mengelola dana dalam jumlah yang relatif besar yang pengelolaannya perlu diselenggarakan dengan baik melalui penempatan pada berbagai instrument investasi keuangan dengan memperhatikan keamanan dan optimalisasi pendapatan.

Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha

Tujuan pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah untuk membantu Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan pedoman serta pelaksanaan investasi (penempatan dana) dan kebijakan dan pengelolaan risiko usaha yang dijalankan oleh Direksi dan jajarannya, termasuk kepatuhan perusahaan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan sebagai bagian dari perwujudan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dalam piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha, telah di atur terkait tugas, kewajiban dan tanggung jawab, di mana Komite Investasi dan Risiko Usaha bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Committee of Investment and Business Risk

The establishment of the Business Risk and Investment Committee in December 2011 was based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo as a follow-up to the Letter of Minister of State Owned Enterprises No. S-328 / MBU.4 / 2011 dated October 25, 2011, concerning the Report on the Assessment Result of GCG Implementation of Perum Jamkrindo in 2010. This establishment of the committee takes into account the conditions that:

1. *Perum Jamkrindo has the main duties of carrying out credit guarantee activities for Micro Enterprises, Small Businesses, Medium Enterprises, and Cooperatives which are equipped with high risk, especially the risk of claim payments (compensation bills from the banks as the lender) due to bad credit.*
2. *Perum Jamkrindo manages relatively large amounts of funds whose management needs to be carried out properly through allocations in various financial investment instruments by paying attention to security and revenue optimization.*

Charter of the Business Risk and Investment Committee

The purpose of the establishment of the Business Risk and Investment Committee is to help the Supervisory Board carry out the supervisory function of policy and its guidelines as well as implementation and policies of investments (placement of funds) and business risk management carried out by the Directors and staff. This includes the Company compliance with legal and statutory provisions as part of the realization of Good Corporate Governance practices.

In the charter of the Business Risk and Investment Committee, it has been regulated that in reation to its duties, obligations and responsibilities, the Business Risk and Investment Committee is independent both in carrying out its duties and in reporting, and is responsible directly to the Supervisory Board.

Kriteria Menjadi Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang berasal dari luar perusahaan harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan yang cukup di bidang investasi dan manajemen risiko;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan dengan perusahaan;
3. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan dan Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Di tahun 2018 terdapat perubahan keanggotaan komite. Susunan dan komposisi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Criteria for a Member of the Business Risk and Investment Committee

The Business Risk and Investment Committee members from outside the Company must meet the following requirements:

1. *Possesses good integrity and sufficient knowledge in the field of investment and risk management;*
2. *Has no personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest with the Company;*
3. *Can provide sufficient time to complete the assigned duties; and*
4. *is able to work together and communicate effectively.*

Term of Office

The Term of office of members of the Business Risk and Investment Committee who are not members of the Company's Supervisory Board is a maximum of 2 (two) years, without reducing the right of the Supervisory Board to terminate them at any time.

Composition and Profile of the Members of the Business Risk and Investment Committee

In 2018 there was a change in committee membership. The composition and structure of members of the Business Risk and Investment Committee in 2018 were as follow:

Susunan Komite Investasi dan Risiko Usaha Perum Jamkrindo Tahun 2018

The composition of the Business Risk and Investment Risk Committee of Perum Jamkrindo in 2018

Jabatan *Positions*	**Nama** *Names*	**Dasar Pengangkatan** *Basis of Appointment*	**Awal Jabatan** *Beginning Term of Office*	**Masa Akhir Jabatan** *Term of Office Ending*	**Periode Jabatan** *Term of Office*
Ketua/Anggota Dewan Pengawas *Chairperson / Member of the Supervisory Board*	Subandriyo	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 jo. KEP-08/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 *Decree of the Supervisory Board No. KEP-04 / DP-JAMKRINDO / III / 2014 dated March 21, 2014 jo. KEP-08 / DP-JAMKRINDO / IX / 2018 dated September 5, 2018*	Mengikuti masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Berdasarkan KEP-08/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018, Noor Ida Khomsiyati tidak menjabat sebagai wakil ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha (menjadi anggota Komite Audit) *Following the term of office as a Supervisory Board Member* *Based on KEP-08 / DP-JAMKRINDO / IX / 2018 dated September 5, 2018, Noor Ida Khomsiyati no longer serves as the deputy chairperson of the Business Risk and Investment Committee (she has been appointed as a member of the Audit Committee)*		
Wakil Ketua/Anggota Dewan Pengawas *Deputy Chairperson / Member of the Supervisory Board*	Noor Ida Khomsiyati	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-01/DP-JAMKRINDO/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 jo. KEP-08/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 *Decree of the Supervisory Board No. KEP-01 / DP-JAMKRINDO / I / 2018 dated 31 January 2018 jo. KEP-08 / DP-JAMKRINDO / IX / 2018 dated September 5, 2018*			
Anggota/Anggota Dewan Pengawas *Committee Member / Member of the Supervisory Board*	Diah Natalisa				
Anggota *Member*	Slamet Wiyono	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/DP-JAMKRINDO/V/2017 tanggal 1 Maret 2017 *Decree of the Supervisory Board No. KEP-02 / DP-JAMKRINDO / V / 2017 dated March 1, 2017*	1 Mei 2017 *May 1, 2017*	30 April 2019 *April 30, 2019*	Ke-2 *2nd*

Subandriyo
Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha /Anggota Dewan Pengawas
Chairperson of the Business Risk and Investment Committee / Member of the Supervisory Board

Profil Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha Subandriyo dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

The profile of the Chairperson of the Business Risk and Investment Committee, Subandriyo, can be seen in the Profile section of the Supervisory Board, in the Company Profile Chapter.

Diah Natalisa
Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha/Anggota Dewan Pengawas
Member of the Business Risk and Investment Committee / Member of the Supervisory Board

Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha Diah Natalisa dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan.

The profile of the member of the Investment and Business Risk Committee, Diah Natalisa, can be seen in the Profile section of the Supervisory Board, in the Company Profile Chapter

Slamet Wiyono
Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha/ *Member of the Business Risk and Investment Committee*
Periode Jabatan: 1 Mei 2017 - 30 April 2020/ *Term of Office: May 1, 2017 - April 30, 2020*

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 60 tahun
Kelahiran Boyolali, 12 Januari 1958

Personal Data
Indonesian citizen
60 years old
Born in Boyolali, January 12, 1958

Domisili
Tangerang, Banten, Indonesia

Domicile
Tangerang, Banten, Indonesia

Pendidikan
Menyelesaikan studi Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1984), Pasca Sarjana (S2) bidang studi Accounting and Finance di RVB Belanda, Maastricht (1993), dan Doktor (S3) bidang Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti (2014).

Education
Completed his Bachelor Degree from the Faculty of Economics majoring in Accounting at Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1984), Master Degree in Accounting and Finance in RVB Netherlands, Maastricht (1993), and earned his Doctoral Degree in Islamic Economics and Finance from Universitas Trisakti (2014).

Riwayat Profesi
Aktif di dunia civitas akademika, khususnya di Universitas Indonesia. Tercatat menjabat Wakil Ketua Kopkar FE Usakti, Universitas Trisakti (2013-2018); Anggota Tim Evaluasi PKM, Universitas Trisakti (2008-2009); Sekretaris Pendidikan Diploma 4 Komunikasi, Universitas Trisakti (2010); Anggota Senat Fakultas, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (1996); Direktur Lembaga Administrasi Perusahaan (LAP), Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (1996-1999), dan Sekretaris Jurusan Akuntansi FE Usakti Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (1992-1996). Hingga saat ini masih aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.

Professional History
Active in the academic community, especially at the University of Indonesia. Recorded as Deputy Chairperson of FE Usakti Cooperative, Universitas Trisakti (2013-2018); Member of PKM Evaluation Team, Universitas Trisakti (2008-2009); Secretary of Program of Diploma 4 Communication, Universitas Trisakti (2010); Member of the Faculty Senate, Faculty of Economics, Universitas Trisakti (1996); Director of the Institute of Corporate Administration (LAP), Faculty of Economics, Universitas Trisakti (1996-1999), and Secretary of the Accounting Department of FE Usakti Jakarta, Faculty of Economics, Universitas Trisakti (1992-1996). At present, he is still actively teaching at the Faculty of Economics, Universitas Trisakti, Jakarta.

Independensi Komite Investasi dan Risiko Usaha

Independence of the Business Risk and Investment Committee

Transparansi independensi Komite Investasi dan Risiko Usaha terlihat dalam tabel berikut:

The transparency of the independence of the Investment and Business Risk Committee is shown in the following table:

Aspek Independensi *Aspect of Independence*	Subandriyo	Noor Ida Khomsiyati*	Diah Natalisa	Slamet Wiyono
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan *Do not have up to the third-degree familial relationships, either directly or indirectly, or any relationships which arise because of marriage*	x	x	x	x
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan dan perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan *Do not own shares directly or indirectly in the Company and other companies that can cause a conflict of interest*	x	x	x	x
Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/ata calon/anggota legislatif dan/atau kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kepentingan *Do not hold multiple positions as administrators of political parties and/or candidates/legislative members and/or regional heads, and other positions in accordance with the provisions of the legislation that can lead to a conflict of interest*	x	x	x	x
Anggota komite audit yang bukan merupakan anggota dewan pengawas, tidak merangkap sebagai: • Anggota Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain; • Sekretaris/staf sekretariat Dewan Pengawas Pengawas pada BUMN/perusahaan lain; • Anggota Komite lain pada Perusahaan; dan/atau • Anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain. *The Audit Committee members who are not members of the supervisory board cannot hold multiple positions as:* • *Member of the Supervisory Board of the other SOEs/company;* • *A secretary/secretariat staff of the Supervisory Board for other SOEs/ companies;* • *Other Committee members at the Company; and/or* • *Committee member in another SOEs / company.*	x	x	x	x
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan *Do not have a business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Company which can cause a conflict of interest*	x	x	x	x

Aspek Independensi *Aspect of Independence*	**Subandriyo**	**Noor Ida Khomsiyati***	**Diah Natalisa**	**Slamet Wiyono**
Bukan merupakan karyawan kunci yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Pengawas *Was not a key employee, in other words, someone who has the authority and responsibility to plan, lead and control the activities of the Company in the last 6 (six) months before being appointed by the Supervisory Board*	x	x	x	x
Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material perusahaan *Do not have personal interests with company material information directly or indirectly*	x	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = Yes | x = No
*) Sejak tanggal 5 September 2018, Noor Ida Khomsiyati tidak menjabat sebagai wakil ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha (menjadi anggota Komite Audit)
**) Since September 5, 2018, Noor Ida Khomsiyati has not served as deputy chairperson of the Business Risk and Investment Committee (she has been appointed as a member of the Audit Committee)*

Tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Investasi dan Risiko Usaha Perum Jamkrindo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan terhadap transaksi, pengelolaan, kebijakan dan pedoman keuangan dan investasi;
2. Melakukan *review* terhadap kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, dan struktur permodalan;
3. Memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada Dewan Pengawas dalam rangka memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko usaha;
4. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan pengelolaan risiko dan investasi yang diselenggarakan Direksi;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas yang terkait dengan pemantauan risiko usaha dan investasi;
6. Melaporkan hasil-hasil kerja Komite kepada Dewan Pengawas.

The Duties of the Business Risk and Investment Committee

In carrying out its functions, the Business Risk and Investment Committee of Perum Jamkrindo has the following duties and responsibilities:

1. *Monitoring transactions, management, policies and guidelines on finance and investment;*
2. *Reviewing investment performance, implementing risk management, and capital structure;*
3. *Providing input on matters that need attention to the Supervisory Board in order to provide advice to the Board of Directors related to the management of investment and business risks;*
4. *Drafting an annual work plan and budget that is aligned with the annual risk management and investment work plan organized by the Board of Directors;*
5. *Executing other duties assigned by the Supervisory Board related to monitoring business and investment risks;*
6. *Reporting the work of the Committee to the Supervisory Board.*

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Komite Investasi dan Risiko Usaha dapat terus mengikuti perkembangan dunia usaha dan industri penjaminan, Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development Program

In order for the Business Risk and Investment Committee to keep abreast of developments in the business world and guarantee industry, t he Company facilitates competency development programs for members of the Business Risk and Investment Committee.
Regarding competency development activities participated by the Business Risk and Investment Committee Members throughout 2018, they can be seen in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite Investasi dan Risiko Usaha menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2018 diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali sepanjang tahun 2018.

Tentang risalah rapat dapat dilihat pada pembahasan Rapat Dewan Pengawas.

Kehadiran Komite Investasi dan Risiko Usaha pada rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The Meetings of the Business Risk and Investment Committee

The Business Risk and Investment Committee holds meetings aimed at assisting the duties of the Supervisory Board in overseeing the management of the Company. In 2018, the Business Risk and Investment Committee Meetings held 12 (twelve) meetings.

The minutes of the meeting can be seen in the discussion section of the Supervisory Board Meeting.

The presence of the Business Risk and Investment Committee at the meetings can be seen in the table below.

Komite Investasi dan Risiko Usaha *Business Risk and Investment Committee*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Required Meeting*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**Jumlah Ketidakhadiran** *Number of Absence*	**% Kehadiran** *Attendance Percentage*
Subandriyo Ketua *Chairperson*	12	12	0	100%
Noor Ida Khomsiyati Wakil Ketua *Deputy Chairperson**	8	8	0	100%
Diah Natalisa Anggota *Member*	12	12	0	100%
Slamet Wiyono Anggota *Member*	12	12	0	100%
Rata-rata ***Average***				**100%**

* Sejak tanggal 5 September 2018, Noor Ida Khomsiyati tidak menjabat sebagai wakil ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha menjadi anggota Komite Audit
** Since September 5, 2018, Noor Ida Khomsiyati has not served as deputy chairperson of the Business Risk and Investment Committee she has been appointed as a member of the Audit Committee*

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha 2018

Salah satu tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen risiko dan investasi atas pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan investasi Perusahaan. Program Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2018 disampaikan pada Desember 2018 kepada Dewan Pengawas dan Laporan Pelaksanaan terhadap Program Kerja tersebut disampaikan melalui Laporan Triwulan. Selama tahun 2018, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Januari 2018.
2. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Februari 2018.
3. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2018.
4. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2018.
5. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2018.
6. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2018.
7. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juli 2018.
8. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Agustus 2018.
9. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan September 2018.
10. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Oktober 2018.
11. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan November 2018.
12. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Desember 2018.
13. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Pengawas ke lapangan.
14. Melakukan telaahan atas Penilaian/*Assessment* GCG di Perum Jamkrindo.
15. Melakukan telaahan atas *Review Board Manual Code of Governance* dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
16. Melakukan telaahan atas reviu SOP dan pelaksanaan kegiatan investasi pada Perum Jamkrindo.
17. Melakukan telaahan atas pelaksanaan dan reviu atas laporan berkala manajemen risiko.

Brief Report on Implementation of the 2018 Business Risk and Investment Committee Work Program

One of the duties of the Business Risk and Investment Committee is to produce recommendations for improving the quality of the implementation of risk management and investment in the supervision of policies and implementation of risk management and investment in the Company. The Business Risk and Investment Committee Work Program in 2018 was submitted in December 2018 to the Supervisory Board and the Implementation Report on the Work Program was submitted through a Quarterly Report. In 2018, the Business Risk and Investment Committee has carried out duties in accordance with applicable regulations, including the following activities:

1. *Prepare a review and material for the January 2018 Supervisory Board meeting.*
2. *Prepare a review and material for the February 2018 Supervisory Board meeting.*
3. *Prepare a review and material for the March 2018 Supervisory Board meeting.*
4. *Prepare a review and material for the April 2018 Supervisory Board meeting.*
5. *Prepare a review and material for the May 2018 Supervisory Board meeting.*
6. *Prepare a review and material for the June 2018 Supervisory Board meeting.*
7. *Prepare a review and material for the July 2018 Supervisory Board meeting.*
8. *Prepare a review and material for the August 2018 Supervisory Board meeting.*
9. *Prepare a review and material for the September 2018 Supervisory Board meeting.*
10. *Prepare a review and material for the October 2018 Supervisory Board meeting.*
11. *Prepare a review and material for the November 2018 Supervisory Board meeting.*
12. *Prepare a review and material for the December 2018 Supervisory Board meeting.*
13. *Accompany the visit of the Supervisory Board to the site.*
14. *Conduct a review of the GCG Assessment / Evaluation at Perum Jamkrindo.*
15. *Conduct a review of the Code of Governance of the Board Manual and Company Code of Conduct.*
16. *Conduct a study on the SOP review and the implementation of investment activities at Perum Jamkrindo*
17. *Conduct a study on the implementation and review of periodic risk management reports.*

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Investasi dan Risiko Usaha

Remunerasi anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Kepada anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha yang bukan merupakan Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut:
- Honorarium per bulannya Rp24.000.000.
- Tunjangan Hari Raya per tahunnya 1x Honorarium.

Remuneration Policy for the Business Risk and Investment Committee

The remuneration of members of the Business Risk and Investment Committee is determined by the Supervisory Board by taking into account the Company's ability, with a maximum amount of 20% of the salary of the President Director. The Supervisory Board member who is the Chairperson / member of the Business Risk and Investment Committee is not given additional income from the position other than income as a member of the Supervisory Board.

To members of the Business Risk and Investment Committee who are not a Supervisory Board, the Company regulates the following remuneration policy:
- *Monthly honorarium of IDR 24,000,000.*
- *Annual Holiday Allowance in amount of one-month honorarium.*

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

SUPPORTING ORGANS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Sekretaris Perusahaan

Perusahaan memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi Perusahaan, termasuk penyusunan strategi serta protokoler dan kesekretariatan Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan berada langsung di bawah Direktur Utama.

Corporate Secretary

The Company has a Corporate Secretary function in charge of carrying out the Company's communication activities, including the formulation of strategies and the Company's protocol and secretariat. The structure of the Corporate Secretary is directly under the President Director.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Pasal 24, disebutkan bahwa Direksi memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

Parties who Appoint and Dismiss the Corporate Secretary

Based on Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Perum Jamkrindo Article 24, it is stated that the Board of Directors has the authority to appoint and dismiss the Corporate Secretary.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 91/Kep-Dir/VIII/2016 tentang Pengangkatan Pejabat, Pejabat Sekretaris Perusahaan dipercayakan kepada Abdul Bari.

Corporate Secretary Official

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors. Based on Directors Decree No. 91 / Kep-Dir / VIII / 2016 concerning the Appointment of Officials, the position of Corporate Secretary Official is entrusted to Abdul Bari.

Abdul Bari
Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
Menjabat sejak 1 Agustus 2016/ *Has served as the Corporate Secretary since August 1, 2016*

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 43 tahun
Kelahiran Subang, 29 September 1975

Domisili
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir
S3 Doktoral Manajemen SDM Universitas Negeri, Jakarta (2014)

Bergabung di Perum Jamkrindo
10 Desember 2015

Riwayat Jabatan
Pranata Utama Direktorat Operasional dan Jaringan (2016)
Pejabat Pranata Utama Direktorat Utama (2015-2016)
Pranata Madya Sekretaris Perusahaan (2015)

Sertifikasi
Certified Profesional In Human Resources Management (CPHRM) Tahun 2015
Completed DISC Trainer Certification Tahun 2014
Sertifikasi Traning Of Trainer Tahun 2014
Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ahli Asuransi Kesehatan/AAK) Tahun 2008
Sertifikasi Asuransi Jiwa (AAIJ) Tahun 2007
Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ajun Ahli Asuransi Kesehatan/AAAK) Tahun 2006
Sertifikasi K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) Tahun 2002

Personal Data
Indonesian citizen
43 years old
Born in Subang, September 29, 1975

Domicile
Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Education
Doctoral Degree in HR Management, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta (2014)

Date of Joining Perum Jamkrindo
December 10, 2015

Work Experience
Main Institution Officer of the Directorate of Operations and Networks (2016)
Main Institution Officer of the President Directorate (2015-2016)
Middle Institution officer of the Corporate Secretary (2015)

Certification
Certified Professional In Human Resources Management (CPHRM) in 2015
Completed DISC Trainer Certification in 2014
Traning of Trainer Certification in 2014
Insurance Expertise Certification (Health Insurance Expert / AAK) in 2008
Life Insurance Certification (AAIJ) in 2007
Insurance Expertise Certification (Associate Level Health Insurance Specialist / AAAK) in 2006
K3 Certification (Occupational Health and Safety) in 2002

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan yang meliputi beberapa aspek di bawah ini:

- Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.
- Menyediakan data dan informasi untuk keperluan pemeriksaan internal/eksternal serta menindaklanjuti rekomendasi auditor tersebut sesuai bidang tugasnya
- Merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan pengelolaan komunikasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembinaan hubungan baik dan kerja sama dengan internal, *stakeholders* eksternal termasuk media.

The Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Implementation of the Corporate Secretary's activities covers the following aspects:

- *The compilation and proposition of the Corporate Secretary Work Unit's Policies and Standard Operating Procedure (SOP).*
- *The provision of data and information for the purposes of internal/external inspection and following up on the auditor's recommendations according to their field of work*
- *The formulation and implementation of strategies and policies for managing corporate communications with the aim of improving the quality of fostering good relations and cooperation with internal, external stakeholders, and the media.*

- Mengoordinasi dan memonitor pelaksanaan prosedur tata upacara/seremonial, tata tempat, tata penghormatan pejabat internal dan eksternal dalam setiap kegiatan di lingkungan Perusahaan.
- Mengumpulkan, menganalisa keluhan/saran masyarakat/klien dari kotak saran dan meneruskannya kepada pimpinan unit kerja terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut, sebagai bahan kebijakan.
- Melaksanakan, memelihara dan mengelola data base sesuai bidang tugasnya.

- *Coordination and monitoring of the implementation of ceremonial procedures, ceremonies, layout, procedures for respecting internal and external officials in every activity within the Company.*
- *The collection and analysis of complaints/suggestions from the community/client from the suggestion box and forwarding it to the head of the relevant work unit and preparing and responding to the complaint, as policy material.*
- *Implementation, maintenance and management of databases according to their field of work.*

Program Pengembangan Kompetensi

Agar Sekretaris Perusahaan selalu dapat mengikuti perkembangan hal-hal terkait dunia usaha, industri penjaminan, serta peraturan dan perundang-undangan terkait, Perusahaan memfasilitasi SDM yang tergabung dalam Divisi Sekretaris untuk mengikuti program pengembangan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development Program

In order for the Corporate Secretary to always be able to keep abreast of matters related to the business world, the guarantee industry, and related laws and regulations, the Company facilitates members of the Secretariat division to participate in competency development programs such as seminars, workshops, or other activities that can increase their knowledge and competence.

In relation to the competency development programs participated by the Corporate Secretary throughout 2018, the details can be seen in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

Di sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Menyusun & mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretaris Perusahaan
- Mengelola pelaksanaan dan penggunaan RKA Sekretaris Perusahaan
- Melakukan *Review* dan menetapkan laporan pelaksanaan RKA dan penggunaan anggaran Unit kerja.
- Sekretaris Perusahaan melakukan pembuatan aplikasi *e-office* dan melakukan implementasi pada tahun 2018 dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah tentang *e-goverment*, dan reformasi birokrasi. Selain itu *e-office* dibuat dalam rangka melakukan percepatan dalam kegiatan surat menyurat perusahaan
- Melakukan penyesuaian kebijakan tata kelola perusaratan, sehingga pada tahun 2018 Sekretaris Perusahaan telah melakukan pembaruan keputusan Direksi melalui Peraturan Direksi *nomor* 17/Per-Dir/1/XI/2019 tanggal

Brief Report on Corporate Secretary Duties of 2018

In 2018, the Corporate Secretary has carried out several activities as follows:

- *Compiled and proposed the Corporate Secretary Work Plan and Budget.*
- *Managed of the implementation and usage of the Corporate Secretary Work Plan and Budget.*
- *Reviewed and established reports on the implementation of Corporate Secretary Work Plan and Budget and the use of work unit budgets.*
- *The Corporate Secretary created e-office applications and implements them in 2018 in order to support Government policies on e-government, and bureaucratic reform. In addition, e-office was created to accelerate the activities of corporate correspondence*
- *Made adjustments to corporate governance policies, so that by 2018 the Corporate Secretary has renewed the Directors' decree through Directors Regulation no 17 / Per-Dir / 1 / XI / 2019 dated November 28, 2018, regarding the guidelines*

28 November 2018 tentang pedoman tata kelola persuratan Perum Jamkrindo dan selanjutnya telah disosialisasikan ke seluruh unit kerja seluruh Indonesia melalui memorandum Sekretaris Perusahaan No : B.3891. INT/SPR/SKR/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal penyampaian peraturan Direksi tentang tata kelola persuratan.

- Sekretaris perusahaan juga telah mengajukan legal drafting penyesuaian Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas terkait dengan terbitnya PP 35 Tahun 2018 sebagai pengganti PP 41 Tahun 2008 tentang Perum Jamkrindo
- Melakukan pendampingan dan pelayanan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas
- Melakukan kegiatan-kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan citra positif perusahaan di antaranya adalah melakukan kegiatan promosi di kampus-kampus, melakukan pemberitaan baik media cetak maupun online Berpartisipasi pada Pameran-Pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, Kemenkop dan lain sebgainya
- Melakukan aksi tanggap bencana dalam rangka peduli bencana dan membantu korban bencana maupun pemerintah setempat diaantaranya adalah bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, bencana gempa bumi di Lombok, NTB, bencana angin puting beliung di Cirebon, Bencana Tsunami di Pantai Anyer Banten dan lain sebagainya
- Melakukan peningkatan peran Humas Perum Jamkrindo dan komunikasi Perusahaan di antaranya dengan melakukan *Media Gathering* dalam rangka meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan wartawan, pembuatan aplikasi *digital magazine*, pembuatan video company profile perusahaan, dan pembuatan kalender perusahaan
- Pemutakhiran dan Desain baru *website* perusahaan, pada tahun 2018 Sekretaris Perusahaan melakukan redesain *website* perusahaan, baik dari segi konten maupun filosofinya dari yang awalnya *Business to Business* (B2B) menjadi *Business to Customer* (B2C)
- Pembuatan sistem aplikasi sistem informasi PKBL dalam rangka memudahkan *monitoring* baik keungan PKBL, database mitra serta data penyaluran Bantuan Lingkungan.

for the management of the Perum Jamkrindo letter and subsequently disseminated it to all work units throughout Indonesia through the Corporate Secretary memorandum No: B.3891.INT/SPR/SKR/XII/2018 dated 18 December 2018 concerning the submission of Directors' regulations regarding governance of corporate letters.

- *The Coporate secretary has also submitted a legal drafting adjustment to the Joint Decree of the Board of Directors and the Supervisory Board related to the issuance of PP 35/2018 as a substitute for PP 41/2008 concerning Perum Jamkrindo.*
- *Provided assistance and services to the Board of Directors and the Supervisory Board*
- *Carried out promotional activities in order to enhance the Company's positive image including conducting promotional activities on campuses, communicating them on both print and online media, participating in exhibitions organized by the Ministry of SOEs, Ministry of Cooperatives, etc.*
- *Conducted disaster response acts in the context of caring for and helping disaster victims and their local government. This includes helping victims of earthquake and tsunami disaster in Palu, earthquake in Lombok, NTB, tornado disaster in Cirebon, Tsunami disaster in Anyer Banten Beach and so on.*
- *Increased the role of Public Relation of Perum Jamkrindo and Company communication which included the holding of Media Gathering in order to improve communication and relations with journalists, making digital magazine applications, making the Company's video profile, and making corporate calendars*
- *Updated and designed the Company's new website. In 2018, the Corporate Secretary redesigned the Company's website, both in terms of content and philosophy from what was originally Business to Business (B2B) to Business to Customer (B2C).*
- *Made application system for the Partnerships and Community Development Program information system in order to facilitate monitoring of Partnerships and Community Development Program security, partner database and distribution of Environmental Assistance data.*

Pengelolaan Informasi Melalui Hubungan Media

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif kepada segenap pemangku kepentingan, Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan melakukan hubungan media dengan menyampaikan Rilis Media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal untuk disebarluaskan sebagai informasi Perusahaan yang harus diketahui oleh segenap pemangku kepentingan. Selama tahun 2018, terdapat 65 rilis yang diberikan kepada media baik nasional maupun lokal. Terkait hal ini, di uraikan secara rinci pada bagian pembahasan tentang Akses Informasi dan Data Perusahaan yang disajikan pada bab GCG ini.

Management of Information Through Media Relations

To be able to convey information comprehensively to all stakeholders, the Company through the Corporate Secretary conducted media relations by delivering Media Releases to a number of national and local media to be disseminated as the Company's Information that must be known by all stakeholders. In 2018, there were 65 releases given to media both national and local. In this regard, the detail is described in the Discussion section on Access to Corporate Information and Data presented in this GCG Chapter

Audit Internal

Audit Internal merupakan proses pengawasan atas pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan yang dilakukan secara internal. Fungsi Audit Internal di Perum Jamkrindo dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. SPI bertugas melakukan *assurance* dan *consulting* yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Internal Audit Unit

Internal Audit is a process of internal supervision of the management of the Company's operations and business. The Internal Audit function at Perum Jamkrindo is carried out by the Internal Audit Unit (SPI) led by a Head who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Supervisory Board. The Internal Audit Unit is tasked with carrying out independent and objective assurance and consulting, with the aim of increasing added value and improving the Company's operations, through a systematic approach by evaluating and increasing the adequacy and effectiveness of internal control systems, risk management, and corporate governance.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Parties who Appoints and Dismisses the Head of the Internal Audit Unit

The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Supervisory Board. The President Director can dismiss the Head of Internal Audit Unit after obtaining the approval of the Supervisory Board if the Head of Internal Audit Unit does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in the regulations that apply and/or fail or are incapable of carrying out his/her assigned duties.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 20/Kep-Dir/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, Untung Heri S dipercaya untuk menjabat Kepala SPI dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Pada tanggal 31 Agustus 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Jamkrindo No. 51/SKD/4/VIII/2018

Profile of the Head of the Internal Audit Unit

Based on Directors Decree No. 20 / Kep-Dir / III / 2017 dated March 8, 2017, Untung Heri S is trusted to be the Head of the Internal Audit Unit and has received approval from the Supervisory Board. On August 31, 2018, based on the Decree of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 51 / SKD / 4 / VIII / 2018

tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Perum Jamkrindo, Untung Heri S dipindahtugaskan menjadi Kepala Divisi Umum Perum Jamkrindo, sehingga jabatan Kepala SPI dipimpin oleh Mohamad Adhy Prayitno berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Jamkrindo No. 81/SKD/4/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum Jamkrindo dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

concerning Appointment and Mutation of Officials of Perum Jamkrindo, Untung Heri S was appointed as the Head of General Affairs Division of Perum Jamkrindo; therefore, the position of Head of the Internal Audit Unit was held by Mohamad Adhy Prayitno based on the Decree of Director of Perum Jamkrindo No. 81 / SKD / 4 / XI / 2018 dated November 12, 2018, concerning the Appointment of Head of Perum Jamkrindo's Internal Audit Unit and has obtained approval from the Supervisory Board.

Mohamad Adhy Prayitno
Kepala Satuan Pengawasan Intern/ *Head of Internal Control Unit*
Menjabat sejak 12 November 2018/ *He has held the position since November 12, 2018*

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 57 tahun
Jakarta, 16 April 1962

Personal Data
Indonesian citizen
57 years old
Jakarta, April 16, 1962

Domisili
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Domicile
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Pendidikan
S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Tahun 2003
S1 Perikanan Institut Pertanian Bogor Tahun 1987

Education
Master of Management in Universitas Gadjah Mada in 2003
Bachelor Degree in Fisheries from Bogor Institute of Agriculture in 1987

Bergabung di Perum Jamkrindo
November 2018

Date of Joining Perum Jamkrindo
November 2018

Riwayat Jabatan
Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum Jamkrindo mulai menjabat tanggal 01/11/2018 - Sekarang
Profesional Auditor Audit Internal Perum Jamkrindo periode 15/10/2018 - 31/10/2018
Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang selama 2 tahun
Wakil Inspektur pada Kantor Inspeksi Pekanbaru PT BRI (Persero), Tbk selama 3 tahun
Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Wilayah Jayapura selama 2 tahun
Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Jelambar selama 2 tahun
Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkal Pinang selama 3 tahun
Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat selama 3 tahun
Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Maumere selama 2 tahun

Work Experience
Head of Perum Jamkrindo's Internal Audit Unit from November 1, 2018 - Now
Professional Internal Audit Auditor of Perum Jamkrindo from 10/15/2018 - 10/31/2018
Deputy Head of Business Region at PT BRI (Persero), Tbk Malang Branch Office for 2 years
Deputy Inspector at PT. BRI (Persero), Tbk Inspection Office in Pekanbaru for 3 years
Deputy Head of Business Region of PT BRI (Persero), Tbk Jayapura Regional Office for 2 years
Branch Manager at PT BRI (Persero), Tbk Jelambar Branch Office for 2 years
Branch Manager at PT BRI (Persero), Tbk Pangkal Pinang Branch Office for 3 years
Branch Manager at PT BRI (Persero), Tbk Rantau Prapat Branch Office for 3 years
Branch Manager at PT BRI (Persero), Tbk Maumere Branch Office for 2 years

Sertifikasi
Qualified Internal Audit (QIA) 2015

Certification
Qualified Internal Audit (QIA) in 2015

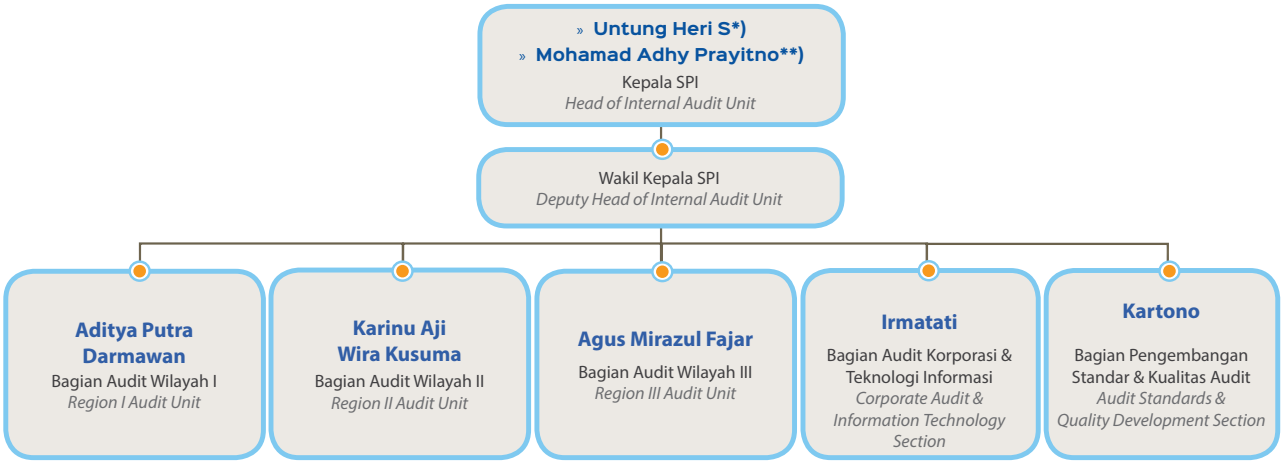
Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Jamkrindo dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. Struktur Organisasi SPI Perum Jamkrindo berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:

Organizational Structure and Position of the Internal Audit Unit

Internal Audit Unit (SPI) of Perum Jamkrindo is led by a Head of Internal Audit Unit who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Supervisory Board. The President Director can dismiss the Head of Internal Audit Unit after obtaining the approval of the Supervisory Board in the event that the Head of Internal Audit Unit does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in the regulations that apply and/or fail or are incapable of carrying out his/her duties. The Organizational Structure of the Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo is based on Directors Decree No. 01 / KD / 1 / V / 2018 dated 30 May 2018 concerning the Organizational Structure of Perum Jamkrindo:

Struktur Organisasi dan Kedudukan SPI
Organizational Structure and Position of Internal Audit Unit



Jabatan *Position*	**Nama**
Kepala Satuan Pengawasan Internal *Head of Internal Audit Unit*	Untung Heri S*)
	Mohamad Adhy Prayitno**)
Kepala Bagian Audit Wilayah I *Head of Region I Audit Unit*	Aditya Putra Darmawan
Kepala Bagian Audit Wilayah II *Head of Region II Audit Unit*	Karinu Aji Wira Kusuma
Kepala Bagian Audit Wilayah III *Head of Region III Audit Unit*	Agus Mirazul Fajar
Kepala Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi *Head of Corporate Audit & Information Technology Section*	Irmatati
Kepala Bagian Pengembangan Standar dan Kualitas Audit *Head of Audit Standards & Quality Development Section*	Kartono

*) Dipindahtugaskan menjadi Kepala Divisi Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Jamkrindo Nomor: 51/SKD/4/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Perum Jamkrindo;
Has been assigned to another position as the Head of General Affairs Division based on Directors Decree of Perum Jamkrindo Number: 51 / SKD / 4 / VIII / 2018 dated August 31, 2018, concerning Appointment and Mutation of Officials of Perum Jamkrindo;
**) Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Jamkrindo Nomor: 81/SKD/4/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum Jamkrindo.
Appointed based on the Decree of the Board of Directors of Perum Jamkrindo Number: 81 / SKD / 4 / XI / 2018 dated November 12, 2018, regarding the Appointment of Head of Perum Jamkrindo's Internal Audit Unit.

Untuk mendukung tugas-tugas pengawasan yang diemban SPI, berikut adalah jumlah dan kualitas personel SPI pada periode tahun 2018:

1. Kepala SPI : 1 orang
2. Kepala Bagian : 5 orang
3. Kepala Seksi : 1 orang
4. Staf : 14 orang
5. Agendaris : 1 orang

Jumlah : 22 orang

To support the supervisory duties carried out by the Internal Audit Unit, the following are the number of Internal Audit Unit personnel in the 2018 period:

1. *Head of Internal Audit Unit : 1 person*
2. *Head of Divisions : 5 people*
3. *Section Heads : 1 person*
4. *Staffs : 14 people*
5. *Agendaris : 1 person*

Total : 22 people

Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Internal

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan SPI hingga akhir tahun 2018.

Internal Audit Unit Professional Certification

Professional certification is an important aspect for auditors to understand the development of auditing, especially related to compliance with regulations and industrial development. The following is the professional certification held by Internal Audit Unit employees until the end of 2018.

Level Sertifikasi *Certification Level*	**Jumlah Karyawan** *Number of Employees*
Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan I *Advanced QIA Certification I*	1 orang *1 person*
Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial *Managerial Level QIA Certification*	3 orang *3 people*

Level Sertifikasi *Certification Level*	Jumlah Karyawan *Number of Employees*
Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Batch VI *Level 1 Batch VI Risk Management Certification Training*	3 orang *3 people*
Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Batch V *Level 1 Batch V Risk Management Certification Training*	1 orang 1 person
Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level I Batch I *Level I Batch I Risk Management Certification Training*	1 orang *1 person*
Certified Fraud Examiner *Certified Fraud Examiner*	1 orang *1 person*
Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Manajerial *Managerial Level Qualified Internal Auditor (QIA) Certification*	4 orang *4 people*
Jumlah ***Total***	**14 orang** ***14 people***

Jumlah karyawan SPI yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 14 orang atau 67% dari jumlah keseluruhan karyawan SPI. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan SPI, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

The number of Internal Audit Unit's employees who have professional certification is 14 people or 67% of the total number of Company's Internal Audit Unit employees who are approved to increase the level of professional certification, and this is for both for employees who already have a professional certification or those who have not.

Piagam SPI (Internal Audit Charter)

Internal Audit Charter

SPI Perum Jamkrindo memiliki *Internal Audit Charter* yang disusun sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi *Audit Internal* yang perlu diselenggarakan oleh Perusahaan serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal serta agar terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

The Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo has an Internal Audit Charter which is prepared as a standard guideline that reviews the functions of the Internal Audit required by the Company as well as aspects related to the implementation of Internal Audit and to create parties related to the Company.

Di samping itu, *Internal Audit Charter* merupakan pemenuhan *compliance* perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

In addition, the Internal Audit Charter is the fulfillment of company compliance in complying with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, and Law No. RI. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.

Piagam Audit Internal Perusahaan telah diperbaharui serta disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas No. 38/Kep-Dir/V/2017 – KEP-03/DP-JAMKRINDO/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

The Company's Internal Audit Charter approved and issued a Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board No. 38 / Kep-Dir / V / 2017 - KEP-03 / DP-JAMKRINDO / V / 2017 dated May 10, 2017.

Visi dan Misi SPI

Berdasarkan Piagam Audit Internal Perusahaan, Visi dan Misi SPI adalah sebagai berikut,

Visi
Menjadi *strategic business partner* yang independen, objektif, profesional, terpercaya, tanggap melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Misi
1. Aktif melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas Perusahaan meliputi proses pengendalian manajemen, operasional, dan pengelolaan risiko dalam peningkatan kinerja Perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG.
2. Meningkatkan peran pemeriksaan intern dan kualitas hasil pengawasan melalui peningkatan kompetensi Auditor Internal dan pemanfaatan sistem informasi.
3. Mengupayakan pelayanan konsultasi untuk meningkatan nilai-nilai Perusahaan dan sistem pendukungnya, memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas Perusahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan, business best practice, dan prosedur serta kebijakan yang ditetapkan.
4. Memberikan nilai tambah yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, proaktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan, dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.

The Vision and Mission of the Internal Audit Unit

Based on the Company's Internal Audit Charter, its Vision and Mission are as follows,

Vision
To become a strategic business partner that is independent, objective, professional, trustworthy, responsive through assurance and consulting activities and can provide added value to the Company.

Mission
1. *Actively supervise all activities of the Company including its management, operations, and risk management processes in improving the Company's performance through increasing the efficiency and effectiveness of the Company's activities based on GCG principles.*
2. *Increase the role of internal audit and the quality of the results of supervision by increasing the competence of Internal Auditors and utilizing information systems.*
3. *Seek consulting services to improve the Company's values and support systems, provide assurance that all of the Company's activities have been carried out in accordance with regulations, business best practices, and established procedures and policies.*
4. *Provide added value focusing on business and customer processes, be proactive, enthusiastic and trustworthy, be able to communicate effectively, find the root of the problem, and to optimally utilize information technology systems.*

Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) terkait dengan Pemeriksaan Internal Perusahaan

Dalam menjalankan Pemeriksaan Internal pada Perusahaan, SPI Perum Jamkrindo bertugas:
1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjalankan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan anggarannya.

The duties of the Internal Audit Unit (SPI) in relation to the Internal Audit Activities of the Company

In carrying out Internal Inspections on the Company, the Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo is in charge of:
1. *Assisting the duties of the President Director and the Supervisory Board in carrying out supervision by running the operations in terms of planning, implementation, and monitoring of audit results.*
2. *Coordinating and integrating the preparation of the Annual Audit Work Program (PKPT) and its budget.*

3. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan pemeriksaan lainnya atas tugas sesuai arahan dan persetujuan Direktur Utama.
4. Melakukan *review* dan evaluasi penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan organisasi yang berlaku serta memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko dengan membantu Perusahaan mengidentifikasi besaran risiko yang signifikan.
5. Melakukan koordinasi kegiatan SPI dengan kegiatan unit kerja lainnya di lingkungan Perusahaan dan mengevaluasi kecukupan indikator pengukuran kinerja yang digunakan.
6. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja audit internal dan pedoman audit internal dan mengoordinir penyusunan laporan kegiatan SPI.
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak-pihak terkait.
8. Melakukan *monitoring* dan pelaksanaan atas tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal serta memberikan jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya terkait dengan fungsi pengawasan.
9. Berkoordinasi dengan pihak eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitan dengan tugas-tugas pengawasan.
10. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan intern melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, SPI bertanggung jawab untuk:
1. Menyelenggarakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan.
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang Pengawasan Intern Perusahaan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan operasional dan administrasi & keuangan.
3. Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi mengenai segala hal yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama mengenai hasil pemeriksaan, berikut saran perbaikannya.

3. *Carrying out routine checks in accordance with the Annual Inspection Work Program (PKPT) and other inspection duties as assigned and approved by President Director.*
4. *Reviewing and evaluating the implementation of GCG in presenting inspections in accordance with prevailing organizational rules/regulations and contributing to the improvement of the risk management process by helping the Company identify significant amounts of risk.*
5. *Coordinating the activities of the Internal Audit Unit with the activities of other work units within the Company and evaluate the adequacy of the performance measurement indicators used.*
6. *Compiling and improving the internal audit work standards and internal audit guidelines and coordinating the preparation of the Internal Audit Unit activity reports.*
7. *Submitting Examination Report (LHP) to related parties.*
8. *Monitoring and implementing follow-up actions on internal and external audit results and providing objective consulting services to management and other work units related to the supervisory function.*
9. *Coordinating with external parties in connection with supervisory duties based on assignments from the President Director.*
10. *Improving internal audit competencies through education and training.*

To carry out these basic duties, the Internal Audit Unit is responsible for:
1. *Organizing a supervisory work program on the implementation of all policies and decisions of the Board of Directors and the Company's work program.*
2. *Coordinating and controlling the implementation of activities in the area of the Company's Internal Oversight relating to the assessment of operational, administrative, and financial activities.*
3. *Conducting research and testing of the truthfulness of the reports or information regarding all matters that could cause losses to the Company.*
4. *Making and submitting a report to the President Director regarding the results of the assessment, along with suggestions for improvement.*

5. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha.
6. Menilai sistem pengendalian intern perusahaan.
7. Menilai kewajaran Laporan Keuangan dan menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional/non operasional perusahaan.
8. Memberikan pendapat, usulan dan saran perbaikan atas kegiatan operasional/non operasional.
9. Memotivasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh setiap unit kerja dan wajib melakukan penilaian dan pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh semua Organ Perusahaan.
10. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan SPI maupun auditor eksternal dan melaporkan hasil pantauan tersebut kepada Direktur Utama.
11. Menjadi mitra kerja auditor eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan ataupun pemeriksaan lainnya.

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Auditor Internal

SPI Perum Jamkrindo aktif sebagai anggota pada Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Asuransi Negara dan Jasa Keuangan (Asgara Jaskeu Plus). Keikutsertaan SPI dalam forum tersebut berguna untuk *sharing* pengetahuan dan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan intern sesama BUMN.

Pengembangan Sumber Daya Auditor

Dalam rangka memastikan kesinambungan pengembangan SDM, baik sisi kompetensi maupun *soft-skill*, auditor SPI Perum Jamkrindo terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan mengikuti seminar, *workshop*, studi banding, pelatihan dan pendidikan bersertifikasi auditor internal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang kompeten, baik untuk pelatihan audit, manajemen risiko maupun *Good Corporate Governance* (GCG).

5. *Assessing compliance with existing provisions, by evaluating and monitoring all systems, procedures, provisions, and operations of the Company to encourage effectiveness and compliance in their implementation and providing recommendations to the Board of Directors regarding business risk control/management.*
6. *Assessing the Company's internal control system.*
7. *Assessing the fairness of financial statements and assessing the efficiency and effectiveness of the Company's operational/non-operational activities.*
8. *Providing opinions, proposals, and suggestions for improvements to operational/non-operational activities.*
9. *Motivating the implementation of GCG principles by each work unit and evaluating and monitoring the implementation of these principles by all Company Organ.*
10. *Monitoring the implementation of the follow-up results of the audit on the results of the Internal Audit Unit's and external auditors assessment, and reporting the results of the monitoring to the President Director.*
11. *Becoming a working partner of an external auditor in carrying out the audit of the Company's financial statements or other inspections.*

Participation in the Professional Association of Internal Auditors

The Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo is active as a member of the Forum of the State Insurance and Financial Services (Asgara Jaskeu Plus) Internal Audit Unit (FKSPI). The participation of the Company's Internal Audit Unit in the forum is useful for sharing knowledge and information about internal audit activities among SOEs.

Auditor Competence Development

To ensure the continuity of HR development, in terms of competency and soft skills, the auditor of the Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo continues to improve its knowledge and capabilities by attending seminars, workshops, comparative studies, internal auditor certified training and education organized by competent educational institutions, be it for audit training, risk management, and Good Corporate Governance (GCG).

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Regarding the competency development activities participated by the Internal Audit Unit Division throughout 2018, the details can be seen in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2018

Brief Report on the Implementation of the Internal Audit Unit's Duties in 2018

Selama tahun 2018, SPI Perum Jamkrindo telah melaksanakan aktivitas pemeriksaan tahunan dan menjadi *counterpart* Auditor Eksternal.

1. Sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI Tahun 2018, sampai dengan bulan Desember 2018 telah menyelesaikan pemeriksaan internal terhadap:

   a. 56 Kantor Cabang yaitu:

In 2018, the Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo carried out annual inspection activities and became a counterpart to the External Auditor.

1. *In accordance with the Internal Audit Unit's Annual Inspection Work Program for 2018, until December 2018, the unit has completed the following activities of internal inspection on:*

   a. 56 Branch Offices:

No	Kantor Wilayah *Regional Offices*	Kantor Cabang *Branch Offices*	Pelaksanaan Audit *Date of Audit*
1	Kanwil I (Medan) *Region I Office (Medan)*	Balige	09 Maret s.d 16 Maret 2018 *March 09, - March 16, 2018*
2		Banda Aceh	25 Juni s.d 03 Juli 2018 *June 25, - July 3, 2018*
3		Padang	08 s/d 15 Agustus 2018 *August 08, - August 15, 2018*
4		Medan	24 Oktober s.d 02 November 2018 *October 24, - November 02 2018*
5		Pekanbaru	19 s.d 28 September 2018 *September 19, - September 28, 2018*
6		Tanjung Pinang	26 Juli s.d 4 Agustus 2018 *July 26, - August 4, 2018*
7		Batam	20 s.d 28 April 2018 *April 20, - April 28, 2018*
8	Kanwil II (Palembang) *Region II Office (Palembang)*	Jambi	08 s.d 15 Agustus 2018 *August 8, - August 15, 2018*
9		Bengkulu	02 s.d 09 Mei 2018 *May 2, - May 9, 2018*
10		Palembang	12 s.d 21 Desember 2018 *December 12, - December 21, 2018*
11		Bandar Lampung	02 s.d 09 Mei 2018 *May 2, - May 9, 2018*
12		Pangkal Pinang	28 Agustus s.d 05 September 2018 *August 28, - September 5, 2018*

No	Kantor Wilayah *Regional Offices*	Kantor Cabang *Branch Offices*	Pelaksanaan Audit *Date of Audit*
13	Kanwil III (Jakarta) *Region III Office (Jakarta)*	Serang	28 Agustus s.d 05 September 2018 *August 28, - September 5, 2018*
14		Tangerang	24 s.d 30 Oktober 2018 *October 24, - October 30, 2018*
15		Jakarta	14 November s.d 4 Desember 2018 *November 14, - December 4, 2018*
16		Pontianak	26 September s.d 05 Oktober 2018 *September 26, - October 5, 2018*
17	Kanwil IV (Bandung) *Region IV Office (Bandung)*	Cirebon	02 s.d 09 Maret 2018 *March 2, - March 9, 2018*
18		Purwakarta	31 Januari s.d 07 Februari 2018 *January 31, - February 7, 2018*
19		Sukabumi	08 s.d 15 Februari 2018 *February 8, - February 15, 2018*
20		Bandung	1 s.d 10 November 2018 *November 1, - November 10, 2018*
21		Tasikmalaya	22 Februari s.d 1 Maret 2018 *February 22, - March 1, 2018*
22	Kanwil V (Semarang) *Region V Office (Semarang)*	Solo	08 s.d 15 Februari 2018 *February 8, - February 15, 2018*
23		Purwokerto	22 s.d 29 Maret 2018 *March 22, - March 29, 2018*
24		Kudus	02 s.d 09 Maret 2018 *March 2, - March 9, 2018*
25		Pekalongan	03 Mei s.d 10 Mei 2018 *May 3, - May 10, 2018*
26		Semarang	11 s.d 20 Juli 2018 *July 11, - July 20, 2018*
27		Yogyakarta	25 Juni s.d 03 Juli 2018 *June 25, - July 3, 2018*
28	Kanwil VI (Surabaya) *Region VI Office (Surabaya)*	Kediri	20 s.d 28 April 2018 *April 20, - April 28, 2018*
29		Banyuwangi	20 s.d 28 April 2018 *April 20, - April 28, 2018*
30		Malang	27 Februari s.d 1 Maret 2018 *February 27, - March 1, 2018*
31		Surabaya	11 s.d 20 Juli 2018 *July 11, - July 20, 2018*
32		Madiun	22 Februari s.d 01 Maret 2018 *February 22, - March 1, 2018*

No	Kantor Wilayah *Regional Offices*	Kantor Cabang *Branch Offices*	Pelaksanaan Audit *Date of Audit*
33	Kanwil VII (Denpasar) *Region VII Office (Denpasar)*	Denpasar	21 November s.d 30 November 2018 *November 21, - November 30, 2018*
34		Mataram	26 Juli s.d 03 Agustus 2018 *July 26, - August 3, 2018*
35		Sumbawa Besar	21 s.d 28 Maret 2018 *March 21, - March 28, 2018*
36		Kupang	18 s.d 28 September 2018 *September 18, - September 28, 2018*
37	Kanwil VIII (Banjarmasin) *Region VIII Office (Banjarmasin)*	Banjarmasin	9 s.d 17 Oktober 2018 *October 9, - October 17, 2018*
38		Palangkaraya	28 Agustus s.d 05 September 2018 *August 28, - September 5, 2018*
39		Samarinda	10 s.d 19 Oktober 2018 *October 10, - October 19, 2018*
40		Balikpapan	31 Januari s.d 7 Februari 2018 *January 31, - February 7, 2018*
41		Tarakan	02 s.d 09 Mei 2018 *May 2, - May 9, 2018*
42	Kanwil IX (Makassar) *Region IX Office (Makassar)*	Gorontalo	26 Juli s.d 04 Agustus 2018 *July 26, - August 4, 2018*
43		Makassar	11 Juli s.d 20 Juli 2018 *July 11, - July 20, 2018*
44		Mamuju	06 s.d 14 September 2018 *September 6, - September 14, 2018*
45		Parepare	21 s.d 29 Maret 2018 *March 21, - March 29, 2018*
46		Palopo	26 Juli s.d 02 Agustus 2018 *July 26, - August 2, 2018*
47		Palu	26 Juni s.d 03 Juli 2018 *June 26, - July 3, 2018*
48		Kendari	08 s.d 15 Agustus 2018 *August 8, - August 15, 2018*
49		Manado	08 s.d 15 Agustus 2018 *August 8, - August 15, 2018*
50		Bitung	08 s.d 16 Maret 2018 *March 8, - March 16, 2018*
51		Ambon	26 Juni s.d 03 Juli 2018 *June 26, - July 3, 2018*
52		Ternate	06 s.d 14 September 2018 *September 6, - September 14, 2018*
53		Jayapura	28 Agustus s.d 05 September 2018 *August 28, - September 5, 2018*

No	Kantor Wilayah *Regional Offices*	Kantor Cabang *Branch Offices*	Pelaksanaan Audit *Date of Audit*
54		Manokwari	05 s.d 14 September 2018 *September 5, - September 14, 2018*
55		Sorong	02 s.d 09 Maret 2018 *March 2, - March 9, 2018*
56		Jakarta Khusus DKI Jakarta	23 November 2018 s.d 11 Januari 2019 *November 23, 2018 – January 11, 2019*

b. 4 (empat) Kantor Wilayah yaitu:

b. 4 (four) Regional Offices:

No	Divisi *Divisions*	Pelaksanaan Audit *Date of Audit*
1	Kantor Wilayah Jakarta *Jakarta Regional Offices*	13 s.d 31 Desember 2018 *December 13, - December 31, 2018*
2	Kantor Wilayah Bandung *Bandung Regional Offices*	1 s.d 9 November 2018 *November 1, - November 9, 2018*
3	Kantor Wilayah Semarang *Semarang Regional Offices*	31 Oktober s.d 9 November 2018 *October 31, - November 9, 2018*
4	Kantor Wilayah Makassar *Makassar Regional Offices*	31 Oktober s.d 9 November 2018 *October 31, - November 9, 2018*

c. 12 Divisi yaitu:

c. 12 Divisions:

No	Divisi *Divisions*	Pelaksanaan Audit *Date of Audit*
1	Divisi Manajemen Risiko *Risk Management Division*	5 s.d 18 April 2018 *April 5, - April 18, 2018*
2	Divisi Jaringan dan Layanan *Network and Service Division*	5 s.d 18 April 2018 *April 5, - April 18, 2018*
3	Divisi Perencanaan & Pengembangan *Planning & Development Division*	5 s.d 18 April 2018 *April 5, - April 18, 2018*
4	Divisi Bisnis Penjaminan Syariah *Sharia Guarantee Business Division*	5 s.d 18 April 2018 *April 5, - April 18, 2018*
5	Divisi Hukum & Kepatuhan *Legal & Compliance Division*	5 s.d 18 April 2018 *April 5, - April 18, 2018*
6	Divisi Bisnis Penjaminan Program *Program Guarantee Business Division*	16 s.d 31 Mei 2018 *May 16, - May 31, 2018*
7	Divisi Bisnis Suretyship & Penjaminan Nonbank *Suretyship Business & Non-bank Guarantee Division*	16 s.d 31 Mei 2018 *May 16, - May 31, 2018*
8	Divisi Umum *General Affairs Division*	21 Mei s.d 07 Juni 2018 *May 21, - June 7, 2018*
9	Divisi MSDM *HRM Division*	21 Mei s.d 07 Juni 2018 *May 21, - June 7, 2018*

No	Divisi *Divisions*	Pelaksanaan Audit *Date of Audit*
10	Divisi Akuntansi & PKBL *Accounting and Partnerships and Community Development Program Division*	21 Mei s.d 07 Juni 2018 *May 21, - June 7, 2018*
11	Divisi Klaim & Subrogasi *Division of Claims & Subrogation*	21 Mei s.d 07 Juni 2018 *May 21, - June 7, 2018*
12	Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan *Guarantee Administartion and Engineering Division*	15 s.d 31 Mei 2018 *May 15, - May 31, 2018*
13	Divisi Keuangan & Investasi *Finance & Investment Division*	16 s.d 31 Mei 2018 *May 16, - May 31, 2018*
14	Divisi Sistem Resi Gudang *Warehouse Receipt System Division*	16 s.d 31 Mei 2018 *May 16, - May 31, 2018*
15	Divisi Bisnis Penjaminan Bank *Bank Guarantee Business Division*	16 s.d 31 Mei 2018 *May 16, - May 31, 2018*
16	Divisi Teknologi & Informasi *IT Division*	15 November s.d 28 Desember 2018 *November 15, - December 28, 2018*
17	Sekertaris Perusahaan *Corporate Secretary*	1 s.d 30 November 2018 *November 1, - November 30, 2018*

d. Pra Audit ISO 9001:2015 Layanan Penjaminan dan Klaim

Pelaksanaan Pra Audit ISO 9001:2015 merupakan langkah awal dalam rangka mendapatkan sertifikasi ISO layanan penjaminan & klaim dari PT Sucofindo (Persero). Pra Audit ISO dilaksanakan pada tanggal 14 Februari s.d 1 Maret 2018, dengan jadwal sebagai berikut:

d. Guarantee and Claim Services Pre Audit ISO 9001: 2015

The implementation of the Pre-Audit ISO 9001: 2015 is the first step in obtaining the ISO certification of guarantee & claim services from PT Sucofindo (Persero). The Pre Audit ISO was held on February 14, to March 1, 2018, with the following schedule:

No.	Area/Bagian/Proses yang Diaudit *Audited Area/Section/Process*	Tanggal *Date of Audit*
1.	*Opening Audit*	14 Februari 2018 *February 14, 2018*
2.	Divisi Hukum Kepatuhan *Legal and Compliance Division*	19 Februari 2018 *Februari 19, 2018*
3.	Divisi Manajemen Risiko *Risk Management Division*	
4.	KCK Jakarta *Jakarta Special Branch Office*	19 s.d 20 Februari 2018 *Februari 19, - February 20, 2018*
5.	Divisi Perencanaan & Pengembangan *Planning & Development Division*	20 Februari 2018 *February 20, 2018*
6.	Divisi Umum *General Affairs Division*	
7.	Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*	

No.	Area/Bagian/Proses yang Diaudit *Audited Area/Section/Process*	Tanggal *Date of Audit*
8.	Divisi Bisnis Penjaminan Bank *Bank Guarantee Business Division*	21 Februari 2018 *February 21, 2018*
9.	Divisi Bisnis Penjaminan Program *Program Guarantee Business Division*	
10.	Divisi Bisnis Penjaminan Suretyship & Non Bank *Suretyship Business & Non-bank Guarantee Division*	
11.	Divisi Bisnis Penjaminan Syariah *Sharia Guarantee Business Division*	
12.	Kantor Cabang Surabaya *Surabaya Branch Office*	22 s.d 24 Februari 2018 *February 22, - February 24, 2018*
13.	Kantor Cabang Batam *Batam Branch Office*	
14.	Kantor Cabang Semarang *Semarang Branch Office*	26 s.d 27 Februari 2018 *February 26, - February 27, 2018*
15.	Kantor Cabang Pangkal Pinang *Pangkal Pinang Branch Office*	

Selanjutnya, Audit ISO akan dijadikan sebagai surveillance audit oleh SPI dalam rangka memastikan bahwa layanan penjaminan dan klaim telah sesuai dengan ISO 9001:2015. Laporan internal audit sertifikasi ISO 9001:2015 Penjaminan dan Pelayanan Klaim telah disampaikan kepada Direktur Utama melalui Memorandum No: 84/M/1.2/III/2018 tanggal 6 Maret 2018.

Furthermore, the ISO Audit will serve as a surveillance audit by the Internal Audit Unit to ensure that guarantee services and claims are in accordance with ISO 9001: 2015. The internal audit report of Guarantee and Service Claims ISO 9001: 2015 have been submitted to the President Director through Memorandum No: 84 / M / 1.2 / III / 2018 dated March 6, 2018.

2. Counterpart Auditor Eksternal
   Sasaran tersebut dilakukan dengan strategi mendampingi auditor eksternal pada saat melakukan pemeriksaan untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan guna memperlancar pemeriksaan yang dilaksanakan dengan rincian:

2. *As a counterpart for the external auditor*
   The target is achieved with a strategy of assisting the external auditor when conducting an audit to meet all the requirements needed to expedite the inspection carried out with the following details:

Auditor Eksternal *External Auditor*	Surat Tugas/ *Letter of Assignment*
Otoritas Jasa Keuangan *Financial Service Authority*	ST-194/NB.2/2018 dan S-406/NB.2/2018 tanggal 25 Juli 2018 *ST-194/NB.2/2018 and S-406/NB.2/2018 dated July 25, 2018*
Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) *Audit Board of the Republic of Indonesia*	357/ST/IX-XX.4/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 *357 / ST / IX-XX.4 / 8/2018 dated August 28, 2018*
KAP Hertanto, Grace dan Karunawan (HGK) *Hertanto, Grace dan Karunawan (HGK) Public Accounting Firm*	Perjanjian Kerja sama (PKS) Nomor: 19/PK/4.2/X/2018 – 149.03.06/PJ/KGH.HO/X-2018 tanggal 5 Oktober 2018 *Cooperation Agreement (PKS) Number: 19 / PK / 4.2 / X / 2018 - 149.03.06 / PJ / KGH.HO / X-2018 dated October 5, 2018*

Terlaksananya penyelesaian tindaklanjut (TL) atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Sasaran tersebut dapat tercapai dengan strategi melakukan *monitoring* penyelesaian tindaklanjut (TL) oleh unit kerja yang diperiksa *(auditee)* atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

The completion of the follow-up on the results of internal and external Auditing can be achieved by the strategy of monitoring the completion of follow-up (TL) by the audited work unit on the results of internal and external audits.

A. Hasil Temuan Auditor Eksternal

A. Findings of the External Auditor

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal
The Number of Findings of The Audit Results by External Auditors

Posisi *Position*	Auditor Eksternal		
	OJK *Financial Service Authority*	KAP *Public Accounting Firm*	BPKP *Audit Board of RI*
	2017	2017	2017
Total Temuan *Total Findings*	5	3	2
Total Rekomendasi *Total Recommendation*	5	6	2
Rekomendasi yang Telah Diselesaikan *Total Completion*	4	6	1
Dalam Proses Penyelesaian *In the Completion Process*	1	0	1

B. Hasil Temuan SPI

B. Findings of the Internal Audit Unit

Unit Kerja *Work Unit*	2018			2017		
	Jumlah Rekomendasi *Total Recommendation*	Penyelesaian Tindak Lanjut *Follow-ups Completion*		Jumlah Rekomendasi *Total Recommendation*	Penyelesaian Tindak Lanjut *Follow-ups Completion*	
Divisi *Division*	69	62	89,86%	66	63	95,45%
Kantor Wilayah *Regional Offices*	111	49	44,14%	-	-	-
Kantor Cabang *Branch Offices*	760	645	84,87%	550	550	100,00%
Jumlah *Total*	616	568	80,43%	616	612	99,51%

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatasasan dan kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Akuntan Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasasan dan kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; dan usulan Dewan Pengawas yang disahkan dalam RPB. Berdasarkan PP 20/2015 tersebut, Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, di mana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian Laporan Keuangan Perusahaan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

- Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen,

PUBLIC ACCOUNTANT

Public Accountants or a process of financial audits carried out by external parties to provide independent and objective opinions regarding the fairness, accuracy, and suitability of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and applicable laws and regulations. Public Accountants must be free from the influence of the Supervisory Board, Directors and other interested parties in the Company, and the Company must provide all accounting records and supporting data needed in the external audit process so as to enable Public Accountants to give their opinions on the fairness, compliance, and suitability of reports of Company finance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The appointment of Public Accountant refers to Government Regulation No. 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants; and the proposal of the Supervisory Board which was ratified in the Joint Discussion Meeting. Based on PP 20/2015, the service of Public Accountant is limited to a maximum of 5 (five) consecutive years. The same Public Accountant can provide audit services again after 2 (two) consecutive fiscal years of not providing audit services to the same company.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

The Management is responsible for presenting the Company's financial statements and complying with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) stipulated by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

External Audit Procedures and Audit Standards

- *An audit of the Company's financial statements is carried out in accordance with the professional standards of a Public Accountant which covers all audit procedures that are deemed necessary in accordance with the circumstances.*
- *The audit includes the testing and evaluating of the internal control system, as well as conducting inspections, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the*

serta penilaian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.

- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

a. Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan usulan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.

b. Dewan Pengawas dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan.

c. Dewan Pengawas menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RPB dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.

d. Usulan kepada RPB tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Pengawas atas kinerja tahunan.

e. Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

overall financial statement presentation in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by Institute of Indonesia Chartered Accountants.

- *As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducted a question and answer session with the management regarding the management statement presented in the financial statements.*
- *The audit contains an inherent risk that, in the event of material errors and irregularities, the Public Accounting Firm will convey them to management.*
- *The Management approved the Public Accounting Firm's inspection document on the Company to be reviewed by the relevant agency or authority.*

The audit is carried out based on the Public Accountant Professional Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, the audit is carried out based on the State Financial Inspection Standards (SPKN) issued by the Indonesian Audit Board (BPK).

The Mechanism for the Appointment of Public Accounting Firm

The following are the stages of Public Accounting Firm appointment mechanism:

a. The Supervisory Board through the Audit Committee proposes external Auditor candidates by requesting the assistance of the Board of Directors in the appointment process in accordance with the provisions of procurement of goods/services.

b. The Supervisory Board can reappoint an external auditor based on the results of an evaluation of the performance of the external auditor to conduct an audit of the financial statements.

c. The Supervisory Board submits the reasons for the nomination to the Joint Discussion Meeting and the proposed amount of honorarium/monetary compensation for the services of the external auditor.

d. The proposal to the Joint Discussion Meeting can be submitted in a separate letter which is part of the Supervisory Board's response letter to the annual performance.

e. The Supervisory Board evaluates the performance of external auditors through the Audit Committee in accordance with applicable provisions and standards.

f. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RPB, Dewan Pengawas cukup memberikan kuasa kepada RPB untuk menetapkan auditor tersebut.

f. For the process of appointing prospective external auditors and/or reappointing external auditors carried out by the Joint Discussion Meeting, the Supervisory Board can authorize the Joint Discussion Meeting to determine the auditor.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik
The Mechanism of the Appointment of Public Accounting Firms

Penetapan Akuntan Publik oleh RPB.

The Public Accounting Firm is appointed by Joint Discussion Meeting

↑

Dewan Pengawas menyampaikan surat rekomendasi kepada RPB.

The Board of Supervisors submit the recommendation letter to the Joint Discussion Meeting

↑

Dewan Pengawas melakukan telaah atas rekomendasi Komite Audit, melakukan pembahasan dengan organ Dewan Pengawas dan calon auditor eksternal/Akuntan Publik.

The Supervisory Board reviews the recommendations of the Audit Committee, conducts discussions with the organs of the Supervisory Board and prospective external auditors/Public Accounting Firm.

↑

Tindak lanjut Komite Audit:
Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan eksternal.
Menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas.

The follow-up by the Audit Committee:
Evaluate the implementation of internal and external audits.
Submit the report to the Supervisory Board.

↑

Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Pengawas kepada Komite Audit.

Submission of guidance and assignment from the Supervisory Board to the Audit Committee.

Akuntan Publik Tahun 2018

Berdasarkan keputusan RPB tahun 2018 disetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan untuk melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2018. Sementara akuntan yang akan melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2018 adalah Bambang Karunawan, S.E., Ak., CPA., CA. Audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2018 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan telah memasuki periode ke-4 berturut-turut.

The Public Accounting Firm appointed in 2018

Based on the decision of the 2018's Joint Discussion Meeting, the appointment of Hertanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm (KAP) has been approved to carry out an independent audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2018. The name of the accountant who will conduct an independent audit of the Company's Financial Statements for 2018 is Bambang Karunawan, SE, Ak. , CPA., CA. The audit of the Company's financial statements for 2018 by Hertanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm has entered its 4th period in a row.

Akuntan Publik Tahun 2018
The Public Accounting Firm of 2018

Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	:	Hertanto, Grace, Karunawan
Akuntan *Accountant*	:	Bambang Karunawan, S.E., Ak., CPA., CA.
Tahun Audit *Audit Year*	:	Tahun Buku 2018 *Fiscal Year 2018*
Periode Penugasan *Assignment Period*	:	11 Oktober 2018 sampai dengan 10 Februari 2019 *October 11, 2018 to February 10, 2019*
Jasa *Service Provided*	:	Audit umum (general audit) atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018 *General audit of the Consolidated Financial Statements for 2018 Fiscal Year*
Jasa Lainnya *Other Services*	:	Audit atas Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pengendalian Intern tahun 2018 Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Audit atas Laporan Keuangan Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pihak Pertama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Review/telahaan atas Pengendalian Internal Pihak Pertama, sekaligus menyampaikan usulan/ rekomendasi perbaikannya, dalam hal ditemukan kelemahan yang signifikan, yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut Direksi *Audit of Company Compliance with applicable Laws and Internal Control in 2018* *Performance Evaluation for the year ended December 31, 2018* *Audit of Financial Report of First Party Partnership and Community Development Program Management for the year ended December 31, 2018* *Review of the First Party's Internal Control, as well as submit recommendations/suggestions for improvements, in case significant weaknesses which need attention and follow-up of the Board of Directors, are found.*
Biaya *Fee*	:	Rp424.500.000 *IDR 424,500,000*

Hasil audit menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 Perusahaan "Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember

The audit results stated that the Financial Statements of the 2018 Fiscal Year of the Company "presents fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Perum Jamkrindo and its subsidiaries on December 31, 2018, as well as the financial

2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

performance and consolidated cash flows for the year ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia" (Unqualified Opinion).

Daftar Akuntan Publik

The List of Public Accounting Firms

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2013 hingga 2018 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

For the sake of transparency, the following is presented the Public Accounting Firms appointed by the Company to audit its Financial Statements for 6 (six) consecutive years. The list for the 2013 to 2018 fiscal year can be seen in the table below:

Tahun Buku *Fiscal Year*	**Akuntan** *Accountant*	**Kantor Akuntan Publik** *Public Accounting Firms*	**Opini** *Opinion*	**Biaya Jasa Audit** *Fee* **(Rp-ribu** *In IDR -thousand)*
2018	Bambang Karunawan	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Unqualified Opinion*	424.500
2017	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Unqualified Opinion*	386.000
2016	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Unqualified Opinion*	387.612
2015	Drs. Hertanto	Hertanto, Grace, Karunawan	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material *Unqualified Opinion*	389.565
2014	Budi Taufik Wibawa	Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar untuk hal yang material *Unqualified Opinion*	300.740
2013	Budi Taufik Wibawa	Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar untuk hal yang material *Unqualified Opinion*	300.740

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT



> Rencana bisnis perusahaan tahun 2018 tetap berpedoman pada pencapaian visi perusahaan dan meraih pertumbuhan berkualitas dan berkesinambungan.
>
> *Our business Plan 2018 still adapts initiative to achieve vision of the company and pursue sustainable and excellent growth.*

DEFINISI MANAJEMEN RISIKO PERUM JAMKRINDO

Manajemen Risiko merupakan alat bantu pemenuhan akuntabilitas Direksi yang mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai kontens dan kapabilitas Perusahaan.

PERUM JAMKRINDO'S DEFINITION OF RISK MANAGEMENT

Risk Management is an instrument to fulfill the accountability of the Board of Directors that supports the decision-making process and the development of the Company's performance. Commitments in the application of Risk Management, as an integral part of the Company's management system as a whole, are stated in Risk Management Policies and Procedures that are drafted according to the Company's content and capabilities.

Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2009 atau SNI ISO 31000:2011.

KELENGKAPAN MANAJEMEN RISIKO

Untuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Perum Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko
   Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Perum Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Perum Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.
2. Organisasi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo
   Secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Perum Jamkrindo. Komite Manajemen Risiko (KMR) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia adalah komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko berperan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis, dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan, menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan, dan memberikan laporan atas pelaksanaan Manajemen RIsiko Perusahaan kepada Dewan Pengawas.
3. Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko.

Corporate Risk Management is implemented in accordance with the conditions and requirements of the Company by using ISO 31000: 2009 or SNI ISO 31000: 2011.

INTEGRATED ELEMENTS OF RISK MANAGEMENT

To support the implementation of risk management in an integrated manner, a number of the necessary elements are needed. In this regard, Perum Jamkrindo has compiled a number of following required elements:

1. *The Directors' Regulations concerning Application of Risk Management*
   The Board of Directors' Regulation on the Implementation of Risk Management is a regulation that regulated the application of risk management and the supporting devices needed. In the regulation, a statement of the Board of Directors and all Company's official of Perum Jamkrindo regarding the Company's risk management policy is included. The statement is a written form of the commitment of the Directors and Officials of the Jamkrindo Corporation in implementing risk management at each stage of the activity.
2. *Perum Jamkrindo's Risk Management Organizational Structure*
   Structurally, the Board of Directors has established an organizational structure in which the Risk Management Division is included in it. In addition to the official organizational structure, there is an ad hoc structure, namely Perum Jamkrindo Risk Management Committee. Risk Management Committee (KMR) of Perum Jamkrindo is a committee consisting of Directors and Head of Divisions related to the management of Corporate Risk Management. The Risk Management Committee has the role to conduct periodic assessments and provide recommendations on business risks, types, and their impact on the Company's activities, and determine the Company's risk appetite and risk tolerance, and provide reports on the implementation of the Company's Risk Management to the Supervisory Board.
3. *In addition, for the smooth implementation of the risk management process, in each work unit a Person in Charge (PIC) is appointed to coordinate the implementation of the risk management process in each work unit. In carrying out its duties, the Risk Management PICs coordinate and consult the Risk Management Division.*

4. Kebijakan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo
   Kebijakan Manajemen Risiko merupakan pedoman atau acuan penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi di Perusahaan dan pedoman penyusunan kebijakan pendukung di korporasi dan tingkat Unit Kerja. Kebijakan Panduan manajemen risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP yang terdapat di dalam Divisi Manajemen Risiko.
5. SOP Manajemen Risiko
   SOP Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Perum Jamkrindo. Peraturan Direksi yang mengatur terkait dengan SOP Manajemen Risiko No. 24/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.
6. Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko
   Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran No 15/SE/4/VII/2012. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap Unit Kerja terkait penerapan Manajemen Risiko di Perum Jamkrindo.

   Hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan penerapan manajemen risiko tersebut secara garis besar adalah :
   - » Identifikasi Risiko
   - » Penilaian Risiko
   - » Penanganan Risiko
   - » Monitoring dan Evaluasi Risiko
   - » Komite Manajemen Risiko
   - » Pelaporan *Loss Event* (Risiko yang telah terjadi)
   - » Pelaksanaan proses bisnis dengan mempertimbangkan risiko
   - » Pemberian Opini/Pendapat Manajemen Risiko atas risiko yang berdampak secara signifikan bagi Perusahaan.
7. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko
   SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam *risk register* dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis,

4. *Perum Jamkrindo's Risk Management Policy*
   The Risk Management Policy is a guideline or reference for the implementation of integrated Risk Management in the Company, and the guidelines for the preparation of supporting policies at the Corporate and Work Unit levels. The policy on risk management guidelines is then cascaded into SOPs contained in the Risk Management Division.
5. *Risk Management SOP*
   The Risk Management SOP is an SOP that is intended to provide technical guidance in the implementation of the risk management at Perum Jamkrindo. The prevailing Directors' Regulations are related to Risk Management SOP No. 24 / Per-Dir / VIII / 2016 dated August 12, 2016, concerning the Risk Management Standard Operating Procedure (SOP) of Perum Jamkrindo.
6. *Technical Guidelines for Application of Risk Management*
   Technical Guidelines for the Implementation of Risk Management are issued with Circular No 15 / SE / 4 / VII / 2012. The Technical Guidelines contain an explanation of the activities that must be completed by each Work Unit related to the implementation of Risk Management at Perum Jamkrindo.

   What needs to be done related to the implementation of risk management in general are:
   - » *Risk Identification*
   - » *Risk Assessment*
   - » *Risk Management*
   - » *Risk Monitoring and Evaluation*
   - » *Risk Management Committee*
   - » *Loss Event Reporting (Risk that has occurred)*
   - » *Implementation of business processes by considering risks*
   - » *Providing Risk Management Opinion/Suggestion for risks that have a significant impact on the Company.*
7. *Risk-based Business Process SOP*
   SOP for the Risk-Based Business Process is a SOP of a business process that is prepared by considering the risks involved in the process. The SOP is intended to ensure that the risks listed in the risk register and the required risk control have been considered in the implementation of business processes. For new types of risks, opinions from the Risk Management

sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari bagian Divisi Manajemen Risiko sebagai *second opinion* dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Perum Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap.

8. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi
Terkait dengan sistem pendukung manajemen risiko terintegrasi sejak tahun 2011, perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR). Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko secara periodik dan terekam digital. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk database yang terstruktur.

BLUE-PRINT MANAJEMEN RISIKO PERUM JAMKRINDO

Untuk melakukan implementasi manajemen risiko terintegrasi, Perum Jamkrindo, telah menyusun *Blue-Print* Manajemen Risiko Terintegrasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. *Blue-Print* yang telah diselesaikan pada tahun 2010 tersebut merupakan cetak biru arsitektur pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Secara umum, *Blue-Print ERM* Perum Jamkrindo terdiri dari 6 komponen utama yaitu komitmen, struktur dan fungsi, mekanisme, proses manajemen risiko, sistem pendukung, dan pencapaian. Keenam komponen tersebut memiliki berbagai elemen sebagai bagian utamanya, secara lebih lengkap model *Blue-Print ERM* perum Jamkrindo digambarkan dalam model di bawah ini.

Division as a second opinion must be obtained initially and considered in the decision making. Considering that the types of activities of Perum Jamkrindo are quite diverse, the preparation of risk-based business process SOPs is carried out in stages.

8. *Integrated Risk Management Support System*
Regarding the integrated risk management support system, since 2011, the company has begun to build a Risk Management Information System (SIMR) Application. The application serves to facilitate the process of risk identification, risk assessment, and periodic follow-up on risk handling which are digitally recorded. With the application, risk data can be stored in the form of a structured database.

BLUE-PRINT OF RISK MANAGEMENT AT PERUM JAMKRINDO

To implement integrated risk management, Perum Jamkrindo, has compiled the Blue-Print of Integrated Risk Management for Perum Jamkrindo. The Blue Print which was completed in 2010 is a blueprint for the architecture of Enterprise Risk Management (ERM) development.

In general, the Blue-Print of Perum Jamkrindo's ERM consists of 6 main components, namely commitment, structure and functions, mechanisms, risk management processes, support systems, and achievements. The six components have various elements making up its main part. In detail, the ERM Blue-Print model of Perum Jamkrindo can be seen in the illustration below.

Model Blue-Print Manajemen Risiko Terintegrasi Perum Jamkrindo
Perum Jamkrindo's Integrated Risk Management Blue-Print Model



ROAD MAP MANAJEMEN RISIKO

Untuk mencapai kondisi penerapan manajemen risiko seperti yang telah dituangkan dalam blue print Manajemen Risiko, Perum Jamkrindo telah menyusun road map implementasi pengembangan manajemen risiko sampai tahun 2021, dengan *milestone* pencapaian *Blue-Print* manajemen risiko yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT ROAD MAP

To achieve the conditions for implementing risk management as outlined in the Blue Print of Risk Management, Perum Jamkrindo has created a road map for the implementation of risk management development until 2021, with the achievement of integrated risk management Blue-Print milestones as follows:

2016

- Pengembangan ketentuan MR Berdasarkan struktur organisasi terbaru
- Penyusunan kebijakan BCM
- *Development of RM stipulations based on the latest organizational structure*
- *Preparation of BCM policy*

2017

- Persetujuan kebijakan BCM
- Penyusunan dan persetujuan kebijakan MR berdasarkan ISO 31000
- Sertifikasi MR dan BCM untuk staf MR
- Benchmark implementasi MR ke Perusahaan Unggul
- *Approval of BCM policies*
- *Preparation and approval of MR policies based on ISO 31000*
- *MR and BCM Certification for MR staffs*
- *Benchmark of MR implementation to Superior Companies*

2018

- Penentuan *Risk Limit, risk appetite, dan risk tolerance*
- Pengembangan SOP MR berdasarkan ISO 31000
- Sosialisasi MR dan BCM ke seluruh Unit Kerja
- Pengembangan dan Implementasi SIMR ke seluruh Unit Kerja
- *Benchmark* implementasi MR ke perusahaan unggul
- Penyusunan kebijakan khusus manajemen risiko untuk masing masing jenis risiko
- *Risk Maturity Assessment*
- Kerja sama dengan dukcapil dan Infobank
- Penyusunan standarisasi pengelolaan risiko penjaminan per produk
- *Establishment of Risk Limit, risk appetite, and risk tolerance*
- *Development of Risk Management's SOPs based on ISO 31000*
- *Dissemination of Risk Management and BCM to all Work Units*
- *Development and Implementation of Risk Management Information System to all Work Units*
- *Benchmark of Risk Management implementation to superior companies*
- *Preparation of specific risk management policies for each type of risk*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Collaboration with Directorate General of Population and Civil Registration and Infobank*
- *Compilation of standardized guarantee risk management per product*

2019

- Penyusunan kebijakan *anti-fraud*
- Integrasi MR ke internal audit
- Menciptakan budaya MR dan BCM ke seluruh aktivitas unit kerja (*risk budgeting, three lines of defense* dan lain-lain)
- Penyusunan SOP *Loss Event Management*
- Uji coba DRBC Plan dan BC Plan
- *Drafting of anti-fraud policy*
- *Risk Management integration to Internal Audit*
- *Creating RM and BCM cultures to all work unit activities (risk budgeting, three lines of defense and others)*
- *Compilation of SOP of Loss Event Management*
- *DRBC and BC Plans trials*

2020

- Integrasi MR ke seluruh aktivitas – *risk integrator system* (integrasi *Loss Event Management* ke dalam sistem SIMR)
- *Risk Maturity Assessment – Level "Intermediate"*
- MR sebagai advisor unit kerja lain dalam penerapan MR
- Sertifikasi ISO 31000 – *Enterprise Risk Management*
- Integrasi MR (LEM dan Risk Profil)
- *Database Management* MR dan BCM
- *Integration of Risk Management (RM) to all activities - risk integrator system (integration of Loss Event Management into the RM Information System)*
- *Risk Maturity Assessment - "Intermediate" Level*
- *RM as an advisor to other work units in implementing RM*
- *ISO 31000 Certification - Enterprise Risk Management*
- *RM Integration (LEM and Risk Profile)*
- *RM and BCM Management Database*

2021

- *Risk Maturity Assessment – Level "Advance"*
- Menjadi acuan/*benchmark* BUMN untuk implementasi MR dan BCM
- Pembuatan sertifikasi internal MR dan BCM
- *Risk Maturity Assessment - "Advance" Level*
- *Become the reference / benchmark for all SOEs for the implementation of Risk Management (RM) and BCM*
- *Internal certifications of RM and BCM*

PERKEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO PERUM JAMKRINDO

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit, Perum Jamkrindo telah menerapkan pengelolaan risiko penjaminan kredit melalui Sistem Manajemen Risiko Penjaminan Kredit. Sistem ini meliputi rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Penjaminan Kredit. Dalam pelaksanaannya, Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif pada seluruh tahapan kegiatan penjaminan kredit disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Perusahaan serta karakteristik dan risiko kredit yang dijamin. Pada tahapan implementasi, dilakukan proses identifikasi risiko penjaminan yang bertujuan untuk memprediksi risiko atas kredit yang diajukan Penjaminannya oleh Penerima Jaminan. Prediksi risiko tersebut dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka implementasi Manajemen Risiko yang lebih baik dan terkendali, pada tahun 2018 Perum Jamkrindo melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Peraturan Direksi No. 20/Per-Dir/5/XII/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko
2. Menyusun Peraturan Direksi No. 21/Per-Dir/5/XII/2018 tentang Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM)
3. Menyusun Peraturan Direksi No. 22/Per-Dir/XII/2018 tentang Kebijakan Strategi *Anti Fraud*
4. Menyusun Peraturan Direksi No. 23/Per-Dir/XII/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko
5. Menyusun Peraturan Direksi No. 24/Per-Dir/XII/2018 tentang Komite Manajemen Risiko
6. Menyusun Peraturan Direksi No. 25/Per-Dir/XII/2018 tentang Pedoman Pelaporan Manajemen Risiko
7. Menyusun Peraturan Direksi No. 26/Per-Dir/XII/2018 tentang SOP Manajemen Risiko
8. Menyusun Peraturan Direksi No. 27/Per-Dir/XII/2018 tentang SOP Pendapat Manajemen Risiko
9. Menyusun Surat Edaran No. 40/SE/5/XII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko
10. Menyusun Keputusan Direksi No. 93/SKD/5/XII/2018 tentang PIC Manajemen Risiko dan Koordinator *Risk Owner*
11. Melakukan Pengembangan SIMR
12. Pengembangan Pemeringkatan UMKM dengan mengintegrasikan Jscore, Psykometrik dan Data LPIP.

DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT OF PERUM JAMKRINDO

As a company engaged in the field of credit guarantee, Perum Jamkrindo has implemented a credit guarantee risk management through the Credit Guarantee Risk Management System. This system includes a series of procedures used to identify, measure, monitor, and control risks arising from Credit Guarantee activities. In its implementation, the Risk Management System is carried out effectively at all stages of credit guarantee activities tailored to the capabilities of the Company's resources as well as guaranteed credit characteristics and risks. At the implementation stage, a guarantee risk identification process is carried out to predict the risk of the credit proposed by the Guarantee Receiver. The risk prediction is used as one of the considerations in decision making. In the framework of implementing a better and more controlled Risk Management, in 2018 Perum Jamkrindo has done the followings:

1. *Drafted the Directors Regulation No. 20 / Per-Dir / 5 / XII / 2018 concerning Risk Management Policy*
2. *Drafted the Directors Regulation No. 21 / Per-Dir / 5 / XII / 2018 concerning Business Continuity Management (BCM) Policy*
3. *Drafted the Directors Regulation No. 22 / Per-Dir / XII / 2018 concerning Anti-Fraud Strategy Policy*
4. *Drafted the Directors Regulation No. 23 / Per-Dir / XII / 2018 concerning Application of Risk Management*
5. *Drafted the Directors Regulation No. 24 / Per-Dir / XII / 2018 concerning the Risk Management Committee*
6. *Drafted the Directors Regulation No. 25 / Per-Dir / XII / 2018 concerning Risk Management Reporting Guidelines*
7. *Drafted the Directors Regulation No. 26 / Per-Dir / XII / 2018 concerning SOP of Risk Management*
8. *Drafted the Directors Regulation No. 27 / Per-Dir / XII / 2018 concerning SOP for Opinions on Risk Management*
9. *Composed the Circular Letter No. 40 / SE / 5 / XII / 2018 concerning Risk Management Implementation Guidelines*
10. *Drafted the Directors Decree No. 93 / SKD / 5 / XII / 2018 concerning the PIC of Risk Management and Risk Owner Coordinator*
11. *Developed Risk Management Information System*
12. *Made development of MSME Ranking by integrating Jscore, Psychometric and LPIP Data.*

Penyusunan Kebijakan-kebijakan tersebut di atas adalah sebagai landasan dasar penerapan Manajemen Risiko yang terstruktur dan terkelola dengan lebih baik. Untuk pengelolaan risiko korporasi lainnya dan meningkatkan *Risk Awarness* insan Perusahaan, disamping Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan, SOP Manajemen Risiko, dan Laporan Evaluasi Profil Risiko, Perusahaan juga melakukan pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko, menerbitkan Buku Tangguh, Tangkas, Tanggap Bencana, dan Buku Panduan BCM, berpartisipasi dalam seminar Manajemen Risiko, serta secara intensif melakukan sosialisasi Manajemen Risiko pada seluruh jajaran Perusahaan.

The drafting of the policies is a basic foundation for better structured and managed Risk Management. For other corporate risk management, and to increase the Risk Awareness of Company employees, in addition to the issuance of Policy, Risk Management SOP, and Risk Profile Evaluation Report, the Company conducts Risk Management Certification and training, publishes the book titled Tangguh, Tangkas, dan Tanggap Bencana (Strong, Agile, and Quick Response to Disaster) and BCM Handbook. The Company also participates in Risk Management seminars and intensively conducts dissemination of Risk Management to all levels of the Company.

Dalam rangka meminimalisir risiko Perusahaan khususnya yang terkait dengan Risiko Penjaminan, Perusahaan juga bekerja sama dengan beberapa pihak yaitu Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan (LPIP) Pefindo Biro Kredit yang menyediakan data *performance* perkreditan calon Terjamin, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menyediakan *database* e-KTP sebagai salah satu alat verifikasi keaslian profil calon Terjamin berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan InfoBank untuk memperoleh data keuangan seluruh lembaga keuangan bank maupun non bank untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan calon Penerima Jaminan.

To minimize the risks of the Company, especially those related to Guarantee Risk, the Company also cooperates with several parties, namely the Credit Information Provider Institution (LPIP) of the Perfindo Credit Bureau (which provides Guaranteed prospective credit performance data), Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil, which provides a database e-ID Card as one of the tools to verify the authenticity of prospective profiles of the Guaranteed based on the Population Number (NIK) data), and InfoBank (to obtain financial data for all bank and non-bank financial institutions to determine the financial health conditions of prospective Guarantee Recipients).

PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN RISIKO

DEVELOPMENT OF A RISK MANAGEMENT SYSTEM APPLICATION

Dalam rangka pengelolaan risiko operasional Perusahaan, Perum Jamkrindo mengembangkan kerangka kerja dengan mengacu kepada ketentuan ekternal dan internal Perusahaan. Cakupan kerangka kerja tersebut meliputi kebijakan dan prosedur, pengembangan *tools* dan sistem informasi Manajemen Risiko operasional, *monitoring* dan pelaporan. Perusahaan juga menerapkan Manajemen Risiko pada sistem informasi dan menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) serta melakukan *Risk Control Self Asessment.*

To manage the Company's operational risk, Perum Jamkrindo develops a framework which refers to the Company's external and internal provisions. The scope of the framework includes policies and procedures, development of Operational Risk Management information tools and systems, and monitoring and reporting. The Company also implements Risk Management in information systems and implements Business Continuity Management (BCM) and performs Risk Control Self Assessment.

Salah satu sistem yang diterapkan Perusahaan dalam melakukan *Risk Control Self Asessment* adalah dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko atau SIMR. SIMR merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menilai risiko pada setiap Unit Kerja Perusahaan. Melalui aplikasi SIMR, setiap Unit Kerja dapat melakukan *risk control assessment* secara mandiri.

One of the systems applied by the Company in conducting Risk Control Self Assessment is by developing a Risk Management Information System or RMIS. RMIS is an application that is used to identify risks and assess risks in each Company Work Unit. Through the RMIS application, each Work Unit can carry out risk control assessment independently.

Kegiatan penilaian risiko melalui SIMR dilakukan oleh seluruh unit kerja secara periodik setiap triwulan. Hasil dari penilaian risiko tersebut dilaporkan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM setiap triwulan dalam Laporan Profil Risiko yang memuat kompilasi risiko dari seluruh Unit Kerja yang telah diinput kedalam SIMR. Laporan Profil Risiko tersebut dapat digunakan oleh BOD untuk mengevaluasi risiko perusahaan dan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis. Selain Laporan Profil Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM juga menyusun Laporan Risiko Penjaminan dengan mengevaluasi performance Default Rate, Rasio Klaim dan *Recovery Rate* setiap tahun dan aktif memberikan *early warning* berupa laporan Rasio Klaim setiap produk kepada Unit Bisnis, sehingga risiko yang dihadapi diharapkan dapat dimitigasi lebih awal.

Risk assessment activities through RMIS are carried out by all work units periodically every quarter. The results of the risk assessment are reported by the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division quarterly in the Risk Profile Report which contains a compilation of risks from all Work Units that have been inputted into RMIS. The Risk Profile Report can be used by Board of Directors to evaluate Company risk and as a tool for consideration in strategic decision making. In addition to the Risk Profile Report, the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division prepares a Guarantee Risk Report by evaluating the annual performance of the Default Rate, Claim Ratio and Recovery Rate and actively provide an early warning in the Report of Claims for each Business Unit so that the risks faced are expected to be mitigated earlier.

Salah satu *tool* Manajemen Risiko Penjaminan yang dikembangkan pada tahun 2018 adalah Jamkrindo *Scoring* (JScore) yang digunakan dalam Pemeringkatan UMKM. Pemanfaatan pemeringkatan UMKM dalam proses seleksi calon Terjamin menjadi bagian dari strategi korporasi dalam mengakselerasi bisnis Penjaminan langsung dengan menempatkan Perusahaan pada garda depan *(lead the bank)*. Inovasi pemeringkatan UMKM Jamkrindo diperkuat dengan pembentukkan sebuah *platfom* yaitu *Market Place Guarantee* (MPG) yang diberi nama UMKM Layak (Layanan Akses Keuangan) melalui domain www.umkmlayak.co.id.

One of the Guarantee Risk Management tools developed in 2018 is the Jamkrindo Scoring (JScore) used in MSME Ranking. The utilization of MSME ratings in the guaranteed selection process is part of the corporate strategy in accelerating the direct guarantee business by placing the Company at the forefront (lead the bank). The innovation of Perum Jamkrindo's MSME rating is strengthened by the establishment of a platform called the Market Place Guarantee (MPG), which is named the UMKM Layak (Layak = Layanan Akses Keuangan = Financial Access Service) through the domain www.umkmlayak.co.id.

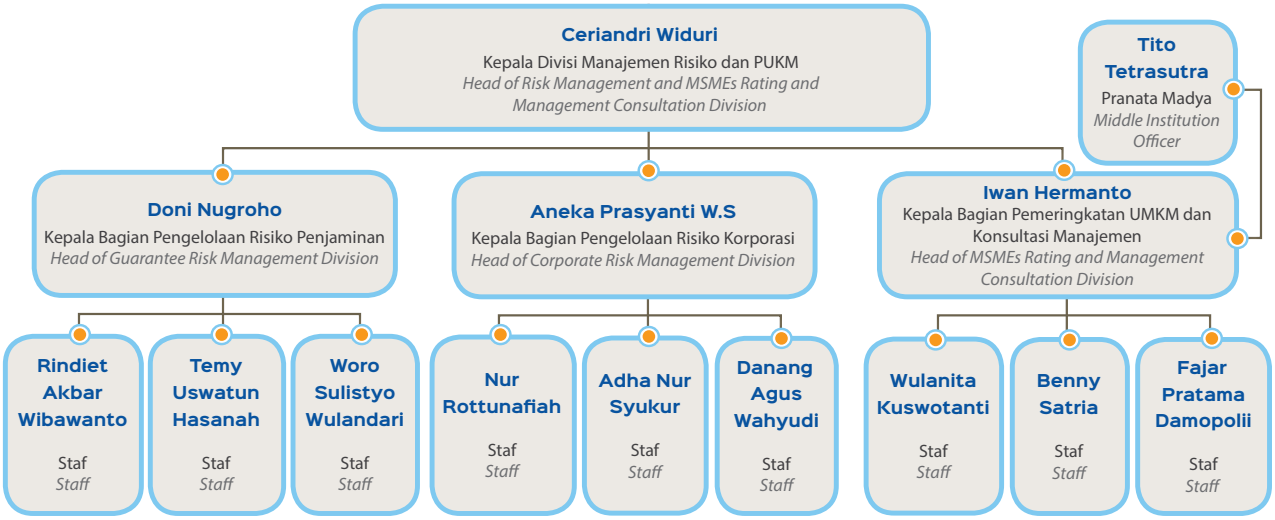
Aplikasi tersebut berfungsi sebagai alat analisa kelayakan usaha UMKM sekaligus mempertemukan UMKM Layak kredit dengan lembaga keuangan penyalur kredit. Sebagai alat analisa kelayakan usaha UMKM, aplikasi tersebut memadukan data dan informasi usaha, karakter melalui psikometri serta *track record* kredit/pembiayaan UMKM.

The application serves as an analysis tool for business feasibility of MSMEs while at the same time bringing together MSMEs worthy of credit with credit channeling financial institutions. As a business feasibility analysis tool for MSMEs, the application combines business data and information, and business characteristics through psychometrics and a track record of MSME credit/financing.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF RISK MANAGEMENT

Struktur Organisasi Manajemen Risiko
Organizational Structure of Risk Management



Sistem Manajemen Risiko Perum Jamkrindo dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM), seperti yang terlihat pada struktur di atas, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM menjalankan 3 (tiga) fungsi, yaitu Pengelolaan Risiko Penjaminan, Pengelolaan Risiko Korporasi, serta Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen. Struktur organisasi Manajemen Risko ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 1/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018. Hingga akhir tahun 2018, jumlah pegawai yang tergabung dalam Divisi Manajemen Risiko dan PUKM sebanyak 14 orang.

Perum Jamkrindo's Risk Management System is managed by the MSMEs Rating and Management Consultation Division (PUKM), as seen in the illustration above. The MSMEs Rating and Management Consultation Division carry out 3 (three) functions, namely Risk Management Guarantee, Management of Corporate Risk, and MSME Rating and Management Consultation. The Risk Management's organizational structure is decided by the Directors Decree No. 1 / KD / 1 / V / 2018 dated May 30, 2018. Until the end of 2018, there were 14 employees who were members of the MSMEs Rating and Management Consultation Division.

Jabatan *Positions*	**Nama** *Names*
Kepala Divisi Manajemen Risiko dan PUKM *Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division*	Ceriandri Widuri
Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Penjaminan *Head of Guarantee Risk Management Division*	Doni Nugroho
Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Korporasi *Head of Corporate Risk Management Division*	Aneka Prasyanti W.S
Kepala Bagian Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen *Head of MSMEs Rating and Management Consultation Division*	Iwan Hermanto
Pranata Madya *Middle Institution officer*	Tito Tetrasutra
Staf *Staffs*	Rindiet Akbar Wibawanto
Staf *Staffs*	Temy Uswatun Hasanah
Staf *Staffs*	Woro Sulistyo Wulandari
Staf *Staffs*	Nur Rottunafiah
Staf *Staffs*	Adha Nur Syukur
Staf *Staffs*	Danang Agus Wahyudi
Staf *Staffs*	Wulanita Kuswotanti
Staf *Staffs*	Benny Satria
Staf *Staffs*	Fajar Pratama Damopolii
Jumlah ***Total***	**14**

PROFIL KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO DAN PUKM

PROFILE OF THE HEAD OF RISK MANAGEMENT AND MSMES RATING AND MANAGEMENT CONSULTATION DIVISION

Ceriandri Widuri
Kepala Divisi Manajemen Risiko dan PUKM/ *Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation*
Menjabat sejak Agustus 2018/ *This individual has served the Company since August 2018*

Data Pribadi
Warga negara Indonesia
Usia 46 tahun
Kelahiran Semarang, 13 Maret 1972

Domisili
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan
S1 Manajemen Universitas Diponegoro (1995)
S2 Manajemen Strategik Universitas Gajah Mada (2009)

Bergabung di Perum Jamkrindo
2 Januari 1997

Riwayat Jabatan
- Kepala Divisi Manajemen Risiko & PUKM (Juli 2018 – Sekarang)
- Kepala Divisi Manajemen Risiko (19 September 2017 - Juli 2018)
- Kepala Divisi Penjaminan Syariah (27 November 2012 – 18 September 2017)
- Kepala Kantor Cabang Banjarmasin (27 Mei 2011 – 26 November 2012)
- Kepala Bagian Penjaminan Syariah I (8 Juli 2010 – 26 Mei 2011)
- Kepala Bagian Divisi Penjaminan Syariah (6 November 2006 – 7 Juli 2010)
- Kepala Bagian Wilayah I Divisi Pengendalian (11 Juli 2006 – 5 November 2006)
- Kepala Bagian Penjaminan Divisi Penjaminan & Pemasaran (29 Desember 2005 – 10 Juli 2006)
- Kepala Bagian Penjaminan Divisi Penjaminan & Pembiayaan (25 Mei 2005 – 28 Desember 2005)

Sertifikasi
Certified Risk Governance Professional (CRGP) (2014) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dan Perpanjangan CRGP No.0059/B-5/CRGP/X/2017/P-1 tanggal 10 Oktober 2017.

Personal Data
Indonesian citizen
46 years old
Born in Semarang, March 13, 1972

Domicile
Bekasi, West Java, Indonesia

Education
Bachelor degree in Management at Universitas Diponegoro (1995)
Master of Strategic Management from Universitas Gajah Mada (2009)

Date of Joining Perum Jamkrindo
January 2, 1997

Work Experience
- *Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division (July 2018 - Present)*
- *Head of the Risk Management Division (September 19, 2017 - July 2018)*
- *Head of the Sharia Guarantee Division (November 27, 2012 - September 18, 2017)*
- *Head of Banjarmasin Branch Office (May 27, 2011 - November 26, 2012)*
- *Head of Sharia I Guarantee Unit (July 8, 2010 - May 26, 2011)*
- *Head of the Sharia Guarantee Division (November 6, 2006 - July 7, 2010)*
- *Head of Region I Control Division (July 11, 2006 - November 5, 2006)*
- *Head of the Guarantee Division, Guarantee & Marketing Unit (December 29, 2005 – July 10, 2006)*
- *Head of Guarantee Division, Guarantee & Financing Unit (May 25, 2005 - December 28, 2005)*

Certification
Certified Risk Governance Professional (CRGP) (2014) and Banking Professional Certification Institute (LSPP) and Extension of CRGP No.0059 / B-5 / CRGP / X / 2017 / P-1 dated October 10, 2017.

KEGIATAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO DAN PUKM DI 2018

Pada tahun 2018 Divisi Manajemen Risiko dan PUKM melakukan *Risk Maturity Assessment* dengan hasil 3,87 (*managed*) dengan kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. Divisi Manajemen Risiko dan PUKM juga telah melakukan benchmark pada perusahaan yang telah melakukan Manajemen Risiko sesuai dengan *best practice* yaitu PT Bank Mandiri.

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM juga telah melakukan pengembangan aplikasi SIMR dengan tujuan lebih memudahkan Unit Kerja untuk melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap Unit Kerjanya.

ACTIVITIES OF THE RISK MANAGEMENT AND MSMES RATING AND MANAGEMENT CONSULTATION DIVISION IN 2018

In 2018 the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division conducted a Risk Maturity Assessment with results of 3.87 (managed) with a general risk assessment/response framework starting regularly. The executive leader gave his opinion on the risks faced by the organization as a whole. The plan is implemented by prioritizing high risks. The Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division have also benchmarked companies that have carried out Risk Management in accordance with best practices, namely PT Bank Mandiri.

The Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division have also developed Risk Management Information System (RMIS) applications with the aim of making it easier for each Work Unit to carry out risk identification and assessment of their work unit.

	SIMR saat ini *Present RMIS*	**SIMR Baru** *New RMIS*
	PIC MR : Kepala Bagian yang ditunjuk, mengisi dan melakukan approval *PIC of Risk Management (RM) - Appointed Head of Section, filling out and giving approval*	PC MR : Kepala Unit Kerja, melakukan approval *PIC of RM - Head of Work Unit, gives approval*
	Free format pengisian risiko, penyebab dan kategori risiko *Free format for filling in the risks, risk causes and categories*	Terdapat beberapa daftar risiko, penyebab dan dampak yang dipilih oleh *risk owner*. Kategori risiko secara otomatis saat risiko dipilih *There are several lists of risks, causes, and impacts that can be chosen by the risk owner. Risk categories will automatically be presented when risk is chosen*
	Parameter dengan secara umum *Impact parameters in general*	Terdapat beberapa parameter dampak sesuai dengan kategori risikonya *There are several impact parameters according to the risk categories*
	Tidak terdapat pengisian data dalam penilaian risiko inheren yang sudah pernah terjadi *There is no data collection in the assessment of inherent risk that has occurred previously*	Terdapat pengisian data dalam penilaian risiko inheren yang sudah pernah terjadi *There is data collection in the assessment of the inherent risk that has already occurred*

Disamping itu, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM pun telah melaksanakan pelayanan terhadap UMKM, yakni dengan melakukan:

1. *Collecting* data sejumlah 8.210 UMKM dengan data Terjamin sebanyak 5.880 UMKM dan data baru 2.330 UMKM
2. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan UMKM sejumlah 1.476 UMKM

Di tahun 2018, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM mengeluarkan Peraturan Direksi No: 22/Per-Dir/5/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Kebijakan Strategi Anti Fraud Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Definisi fraud sendiri adalah tindakan kecurangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, memanipulasi atau dengan maksud untuk menyebabkan beraksinya Perusahaan, mitra atau pihak lain yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan Perusahaan dan atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga dapat menyebabkan Perusahaan menderita kerugian finansial, menguntungkan pelaku fraud, memperkaya pihak lain di luar Perusahaan dan berpotensi menurunkan reputasi Perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk:

- Melindungi aset Perusahaan dan menjaga reputasi Perusahaan;
- Memastikan komitmen Direksi dan Dewan Pengawas dalam mengidentifikasi eksposur risiko *Fraud* dan menetapkan kebijakan untuk mencegah dan mengendalikan *Fraud*;
- Meningkatkan kesadaran seluruh karyawan Perusahaan atas kemungkinan terjadinya fraud dan menjaga budaya etika, profesionalisme, serta integritas karyawan Perusahaan yang tinggi; dan
- Memastikan seluruh anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan Perusahaan ikut serta berupaya mencegah terjadinya *fraud*.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidentil. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan *monitoring* dan evaluasi risiko.

In addition, the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division have given services for MSMEs, by:

1. *Collecting data on 8,210 MSMEs; 5,880 data of Guaranteed MSMEs and 2,330 data on new MSMEs*
2. *Disseminating, training and mentoring of MSMEs totaling 1,476 MSMEs*

In 2018, the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division issued a Directors Regulation No : 22 / Per-Dir / 5 / XII / 2018 dated December 20, 2018, concerning Anti-Fraud Strategy for Perum Jamkrindo.

The definition of fraud itself is an act of fraud and/or intentional negligence carried out to deceive, cheat, manipulate or with the intention of causing the Company, partners, or other parties to act inside and outside the Company and/or use Company facilities which lead to financial loss to the Company suffer financial loss, or provide benefits to fraud perpetrators, or enrich other parties outside the Company, and potentially damage the Company's reputation. This policy aims to:

- *Protecting the Company's assets and maintain the Company's reputation;*
- *Ensure the commitment of the Board of Directors and the Supervisory Board to identify Fraud risk exposures and establish policies to prevent and control fraud;*
- *Increase awareness of all Company employees on the possibility of fraud and maintain a high culture of ethics, professionalism, and integrity of the Company's employees; and*
- *Ensure that all members of the Board of Directors, Supervisory Board and Employees of the Company participate in efforts to prevent fraud.*

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Risk Management activities are carried out periodically and incidentally. Risk Management activities carried out periodically are risk management processes that consist of 4 stages of the process, namely risk identification, risk assessment, risk handling and risk monitoring and evaluation.

Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

In the initial stage, there is the Identification and Assessment of Inherent Risk. The results of risk identification and assessment are evaluated to improve the risk management process.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidentil adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko.

Incidental Risk Management Activities are the implementation of risk management carried out at certain stages in accordance with those stipulated in the SOP of risk-based business processes, and the giving of opinions related to matters for which opinions must be requested to the Risk Management Division.

Kegiatan insidentil berupa pemberian opini untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJPP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/*software* baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Incidental activities in the form of giving opinions are for strategic matters with significant impacts on the sustainability of the company, the creation of new products and/or activities, transactions with certain values, accounts receivable write off policies, SOPs making, Company's Long Term Plan, Corporate Work Plan and Budget, implementation of new applications/software, determination of new banks for deposit and investment, and other strategic policies.

Sesuai Peraturan Direksi No. 03 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo, pelaksanaan pemberian opini tersebut mulai diterapkan secara resmi pada tanggal 1 Juli 2013, namun demikian mulai bulan Oktober 2011 telah dilakukan pemberian opini dalam rangka pembelajaran. Peraturan Direksi tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 25/Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pendapat (opini) Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.

In accordance with the Directors Regulation No. 03 October 10, 2011, regarding the Opinion on Risk Management of Perum Jamkrindo, the implementation of the provision of opinions began officially on July 1, 2013. However, in the Company, since October 2011, opinion has been given in the framework of learning. The Directors' Regulations have been updated with the Directors Regulation No. 25 / Per-Dir / VIII / 2016 dated August 12, 2016, concerning Opinions on Risk Management of Perum Jamkrindo.

Pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, telah dilakukan pemberian opini sebanyak 203 opini, baik opini terkait dengan kegiatan penjaminan, keuangan, maupun kegiatan pendukung lainnya.

In the period of January 1 to December 31, 2018, there have been 203 opinions given; Those opinions are related to guarantee activities, finance, and other supporting activities.

JENIS DAN UPAYA PENGELOLAAN RISIKO SELAMA TAHUN 2018

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Risiko Strategis
   Risiko Stratejik adalah potensi kegagalan dalam mencapai sasaran perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya perusahaan

TYPES AND RISK MANAGEMENT EFFORTS IN 2018

Some of the relatively significant risks in 2018 are as follows:

1. *Strategic Risk*
   Strategic Risk refers to the potential failure in achieving the Company goals due to inappropriate or failure in planning, determining, implementing strategies, making appropriate business decisions, and/or the Company's lacking in responsiveness to external changes. The level of strategic

terhadap perubahan eksternal. Tingkat risiko strategik dapat diukur dengan pendekatan berbasis pencapaian terhadap *Earning Before Taxes* (EBT). EBT adalah laba sebelum pajak yang diperoleh Perusahaan.

risk can be measured by an achievement-based approach to Earning Before Taxes (EBT).

Realisasi EBT 2018/ *Realization of EBT in 2018*	**Target EBT 2018** *EBT Target in 2018*	**% Pencapaian** *Percentage of Achievement*
Rp 480,085 Miliar *IDR 480,085 billion*	Rp 343,00 Miliar *IDR. 343.00 Billion*	139,97%

Realisasi EBT Perusahaan tahun 2018 adalah sebesar Rp 480,085 miliar atau 139,97% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori dampak risiko *Insignificant*. Disarankan pada masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

» Melakukan tindakan preventif melalui pemantauan kinerja/evaluasi rutin untuk memetakan kinerja Perusahaan
» Melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam setiap keputusan bisnis/non bisnis dengan mempertimbangkan risiko
» Melakukan penyesuaian strategi/langkah-langkah untuk mencapai target sesuai dengan peraturan yang berlaku
» Melakukan langkah-langkah kreatif dan atau inovatif sesuai arahan stratejik perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan
» Melakukan pengendalian biaya secara efektif dan efisien
» Melakukan pemantauan penjaminan bersih, pendapatan investasi, pendapatan dan beban lain-lain bersih, dan jumlah biaya usaha

The realization of the Company's EBT in 2018 was IDR 480.085 billion or 139.97% of the target set. This is included in the category of Insignificant risk impact. It is recommended for each work unit to do the following:

» *Perform preventive actions through regular performance monitoring/evaluation to map the Company's performance*
» *Implement the principle of prudence in every business/non-business decision by considering the risks*
» *Adjust the strategies/steps to achieve targets in accordance with applicable regulations*
» *Perform creative and or innovative steps according to the company's strategic direction in an effort to improve company performance*
» *Perform cost control effectively and efficiently*
» *Monitor net insurance, investment income, net income, and other expenses, as well as total business costs*

2. Risiko Likuiditas
Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan memenuhi kewajinan pada saat jatuh tempo. Tingkat risiko likuiditas ditetapkan berdasarkan POJK No 2/POJK.05/2017 tentang penyelengaraan usaha penjaminan Pasal 43 ayat (2), yaitu paling rendah sebesar 120%. Perusahaan memformulasikan risiko likuiditas berdasarkan perhitungan *Cash Flow To Debt Ratio*, yang dihitung dengan formula:

2. *Liquidity Risk*
Liquidity Risk is the risk which exists due to the inability of the Company to meet obligations at its maturity. The level of liquidity risk is determined based on The Financial Service Regulation No 2 / POJK.05 / 2017 concerning the implementation of the guarantee business Article 43 paragraph (2), which states a minimum of 120%. The Company formulates liquidity risk based on the calculation of Cash Flow To Debt Ratio, which is calculated using the following formula:

$$\textit{Cash Flow to Debt Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas} \mid \textit{Cash and Cash Equivalent}}{\text{(Liabilitas Total- Pendapatan yang ditangguhkan)} \mid \textit{(Total Liabilities - Deferred income)}}$$

Data realisasi *cash flow to debt ratio* tahun 2018 adalah sebagai berikut :

The data on the realization of the cash flow to debt ratio in 2018 are as follows:

$$\textit{Cash Flow to Debt Ratio:} \frac{5.811.153.007.139}{4.594.233.434.386 - 3.548.673.057.676} = 555{,}79\%$$

Nilai *Cash Flow To Debt Ratio* tahun 2018 sebesar 555,79% masuk dalam kategori Major. Rasio likuiditas masih berada di atas ketentuan regulator namun melebihi batas toleransi Perusahaan sehingga dapat berdampak pada potensial loss bagi Perusahaan karena dana kelolaan yang besar semestinya dapat dialokasikan untuk investasi lainnya.

The value of Cash Flow To Debt Ratio in 2018 amounted to 555.79% is included in the 'Major' category. The liquidity ratio is still above the regulator's requirements but it has exceeded the Company's limit of tolerance which translates into an impact on potential losses for the Company because large managed funds should be allocated for other investments.

Disarankan agar masing-masing Unit Kerja dapat mengelola dana yang tersedia secara optimal sehingga dapat diperoleh saldo bank minimal pada tiap akhir periode, misalnya memaksimalkan kegiatan reciprocal bisnis melalui penempatan investasi pada bank mitra sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak di mana pencapaian *target funding* bank mitra dapat terbantu melalui penempatan investasi dari Perusahaan sedangkan Perusahaan diharapkan dapat bersinergi dengan bank mitra agar mempercayakan penjaminan kreditnya pada Perusahaan.

It is recommended that each Work Unit can manage the available funds optimally so that a minimum bank balance can be obtained at the end of each period. As an example, by maximizing reciprocal business activities through placements of investments in partner banks it is expected that mutually beneficial cooperation can occur in achieving the target funding of bank partners, while the Company is expected to synergize with partner banks in order to entrust their credit guarantees to the Company.

3. Risiko Penjaminan

Risiko Penjaminan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan. Tingkat risiko penjaminan dapat menggunakan pendekatan Rasio Klaim (RK), *Recovery Rate* dan piutang *Co Guarantee*/ Reasuransi sebagai berikut:

» Rasio Klaim

Rasio klaim dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah Klaim dibagi Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Dalam hal ini yang dimaksud Klaim adalah klaim yang telah terbit surat persetujuannya dan IJP adalah IJP *acrual* basis.

3. *Guarantee Risk*

Guarantee Risk is a risk that arises as a result of the Guaranteed failure in fulfilling its financial obligations to the Recipient of the Guarantee. The level of guarantee risk can use the Claim Ratio (RK) approach, Recovery Rate, and Co Guarantee/Reinsurance receivables as follows:

» *Claim Ratio*

Claim ratio can be used to measure the impact of guarantee risk. The formulation for it is, a Claim divided by accrual guarantee fee (IJP). In this case, the claim is a claim whose letter of approval has been issued, while IJP is an acrual-basis IJP.

Data realisasi Rasio Klaim tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The Data on the realization of the 2018 Claim Ratio is as follows:

$$\text{Rasio Klaim / Claim Ratio} = \frac{\text{klaim | Claim}}{\text{IJP | Accrual Guarantee Fee}}$$

Rasio Klaim tahun 2018 sebesar 72,87% masuk dalam kategori dampak risiko *Major*. Hal ini karena klaim yang terjadi pada tahun 2018 sebagian besar klaim atas penjaminan dari tahun-tahun sebelumnya.

The 2018 Claim Ratio of 72.87% falls into the category of 'Major' risk impacts. This is because the claims that occurred in 2018 were mostly claims for guarantees from previous years.

Disarankan pada masing-masing unit kerja agar melakukan analisa penjaminan secara lebih *prudent* dengan mengacu pada ketentuan perusahaan yang berlaku untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya cacat klaim maupun klaim yang tidak layak bayar. Disamping itu, agar pada saat analisa klaim juga dilakukan secara mendalam, teliti dan mengacu pada ketentuan perusahaan untuk menghindari kesalahan pembayaran klaim.

It is recommended for each work unit to analyze the guarantee in a more prudent manner by referring to the applicable Company provisions to minimize the possibility of defects in claims or claims that are not worth paying. In addition, when analyzing claims an in-depth, careful and compliance to the Company's provisions must be carried out to avoid payment of claims.

» *Recovery Rate* (RR)
Recovery Rate (RR) dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah pembayaran angsuran subrogasi dibagi piutang subrogasi.

» *Recovery Rate (RR)*
Recovery Rate (RR) can also be used to measure the impact of guarantee risk. The impact formulation is acquired by dividing the payment of subrogation installments by subrogation receivables.

$$\text{Recovery Rate} = \frac{\text{angsuran subrogasi | Subrogation installments}}{\text{Piutang subrogasi | Subrogation receivables}}$$

Data realisasi *recovery rate* tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The data on the realization of the recovery rate in 2018 are as follows:

$$\text{Recovery Rate} = \frac{461.330.457.838}{5.739.697.039.784} = 8{,}04\%$$

Recovery Rate tahun 2018 sebesar 8,04% masuk dalam kategori dampak risiko *Insignificant*.

The 2018 Recovery Rate of 8.04% falls into the category of Insignificant risk impact.

Disarankan masing-masing unit kerja agar lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan subrogasi baik melalui kegiatan penagihan subrogasi yang lebih aktif, rutin melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank/mitra, maupun melalui pemberian *fee* atas penagih subrogasi.

It is recommended that each work unit optimize the achievement of subrogation revenue targets through more active subrogation collection activities, routine reconciliation with the bank/partners, or through the giving of fees to subrogation collectors.

» Piutang *Co Guarantee*/Reasuransi
Piutang *Co Guarantee*/Reasuransi dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah Angsuran piutang *co guarantee*/reasuransi dibagi piutang *co guarantee*/reasuransi.

» *Co-Guarantee/Reinsurance Receivables*
Co-Guarantee/Reinsurance receivables can also be used to measure the impact of guarantee risk. The formulation is acquired by dividing the installment of a co-guarantee/reinsurance receivables by a co-guarantee/reinsurance receivables.

Piutang co guarantee/reasuransi
Co-Guarantee/Reinsurance Receivables

$$= \frac{\text{angsuran piutang co guarantee/reasurans | } \textit{Installment of a co-guarantee/reinsurance receivables}}{\text{Piutang co guarantee/reasuransi | } \textit{Co-Guarantee/Reinsurance Receivables}}$$

Data angsuran pembayaran piutang *co guarantee*/reasuransi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Data on installment payments for co-guarantee/reinsurance payments in 2018 are as follows:

Angsuran *Installment*	**Piutang** *Receivables*	**Persentase** *Percentage*
Rp 264.742.445.580 *IDR 264,742,445,580*	Rp 451.063.968.566 *IDR 451,063,968,566*	58,69 %

Persentase pembayaran piutang *co guarantee*/reasuransi tahun 2018 adalah sebesar 58,69 % masuk dalam kategori dampak risiko Moderate.

The percentage of the payment for co-guarantee / reinsurance receivables in 2018 is 58.69% which is in the category of Moderate risk impact.

Disarankan Divisi Teknik Administrasi Bisnis agar aktif berkoordinasi dengan pihak Reassuransi maupun *Co Guarantee* dalam hal percepatan dan peningkatan penyelesaian kewajiban piutangnya.

It is recommended that the Business Administration Engineering Division actively coordinate with the Reinsurance and Co-Guarantee unit in terms of accelerating and increasing the settlement of their debt obligations.

4. Risiko Pasar
Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio penjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan.

Dalam risiko pasar, variabel pasar yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, *trend* kredit per perusahaan, regulasi terkait dengan investasi antara lain suku bunga, inflasi, portofolio investasi. Tingkat dampak risiko pasar ditetapkan berdasarkan perhitungan risiko pasar dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu berdasarkan perhitungan dampak *Yield of investment* (YoI) yang terdapat pada *Key Performance* Indicator (KPI) RKAP Perum Jamkrindo dan Pencapaian Target IJP Bersih.

4. *Market Risk*
Market Risk is a risk that arises because of the movement of the market variable (adverse movement) of the guarantee portfolio owned by the Company, which can harm the Company.

In market risk, the market variables related to guarantee are the level of competition, credit trends per company, and regulations related to investment, among others, interest rates, inflation, and investment portfolios. The level of impact of market risk is determined based on market risk calculations. This market risk calculations can use 2 (two) approaches, namely the calculation of the impact of the yield of investment (YoI) contained in Perum Jamkrindo's Key Performance Indicator (KPI) and Net Accrual Guarantee Fee (IJP) Target Achievement.

» *Yield of Investment* (YoI)
YoI digunakan sebagai acuan pengukuran risiko pasar dengan sudut pandang perubahan atas pencapaian YoI tahun terkait. Perhitungan YoI diperoleh dari Pendapatan investasi (*gross*) / Rata – rata total investasi.

» *Yield of Investment (YoI)*
YoI is used as a reference for measuring market risk with a viewpoint of changes to the achievement of YoI related years. YoI calculation is obtained from investment income (gross) divided by average total investment.

$$\text{YoI} = \frac{\text{Pendapatan investasi (gross)} \mid \textit{Investment Income (gross)}}{\text{Rata – rata total investasi} \mid \textit{Average total investment}}$$

Data realisasi YoI tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Data for realization of YoI in 2018 are as follows:

$$\text{YoI} = \frac{659.803.823.944}{9.464.632.086.468} = 6{,}97\%$$

Realisasi YoI tahun 2018 sebesar 6,97% masuk dalam kategori *insignificant* karena telah memenuhi target YoI tahun 2018 yaitu sebesar 6,78%.

The realization of YoI in 2018 of 6.97% is included in the insignificant category because it has met the YoI target of 2018 which is 6.78%.

Disarankan pada masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Melakukan alokasi/diversifikasi portofolio investasi yang optimal.
- Melakukan analisa penempatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pemantauan secara efektif kinerja portofolio investasi.
- Menetapkan limit investasi di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan/Kantor Cabang Khusus.
- Melakukan pemantauan kinerja ekonomi makro dan industri domestik dan global secara rutin.
- Menyusun strategi *cut loss* dalam mengelola investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan *exit policy* terhadap instrumen investasi pada mitra investasi yang terindikasi kesulitan likuiditas dan/atau indikasi lain yang berdampak pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan *stress testing* dalam merespon suatu gejolak ekonomi.
- Melakukan *review* secara berkala terhadap Kebijakan Investasi dengan memperhatikan perkembangan aktivitas terkini dengan prinsip kehati-hatian.

It is recommended for each work unit to do the following:

- *Perform optimal investment portfolio allocation/ diversification.*
- *Analyze investment placement in accordance with applicable regulations.*
- *Effectively monitor the performance of the investment portfolio.*
- *Establish investment limits at Head Office, Regional Offices and/or Special Branch Offices.*
- *Regularly monitor the performance of domestic and global macro and industrial economies.*
- *Develop a cut loss strategy in managing investments in accordance with applicable regulations.*
- *Conduct an exit policy on investment instruments in investment partners indicated by liquidity difficulties and/or other indications that have an impact on the Company in accordance with applicable regulations.*
- *Perform stress testing in response to economic turmoil.*
- *Conduct periodic reviews of Investment Policies by taking into account the development of current activities with the principle of prudence.*

» Target IJP Bersih
Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak risiko dengan berbasis pencapaian terhadap Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bersih.

Data realisasi pencapaian target IJP Bersih tahun 2018 adalah sebagai berikut:

» *Net Guarantee Accrual Fee (IJP) target*
This approach is used to measure the impact of risk with achievement-based on net guaranteed accrual fee (IJP).

Data on the realization of the achievement of the Net IJP target for 2018 are as follows:

Realisasi IJP Bersih 2018/ *Realization of Net IJP in 2018*	**Target IJP Bersih 2018/** *Net IJP Target in 2018*	**% Pencapaian/** *Percentage of Achievement*
Rp 1,25 Trilliun *IDR 1.25 trillion*	Rp 1,38 Trilliun *IDR 1.38 trillion*	90,58%

Pada tahun 2018 pencapaian IJP bersih Perusahaan adalah sebesar Rp 1,25 trilliun atau setara dengan 90,58% dari target IJP Bersih tahun 2018. Hal ini berarti pencapaian target IJP Bersih Perusahaan tahun 2018 masuk dalam kategori risiko Major.

Disarankan pada unit kerja bisinis untuk melakukan monitoring terhadap Imbal Jasa Penjaminan, pendapatan komisi reas, premi coguar, premi reas, beban restitusi.

In 2018, the achievement of the Company's net IJP was IDR 1.25 trillion or equivalent to 90.58% of the Net IJP target for 2018. This means that the achievement of the Company's Net IJP target in 2018 falls into the Major risk category.

It is recommended for business units to monitor Guaranteed Accrual fees, reinsurance commission income, co-guarante premiums, reinsurance premiums, and restitution expenses.

5. Risiko Hukum
Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-udangan yang mendukung atau kelemahan perikatan dan nilai kerugian risiko hukum yang mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum, terdiri dari:
   - » Operasional perusahaan sebagai dapat menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan risiko hukum yang tertuju akan berdampak pula terhadap risiko reputasi perusahaan.
   - » Risiko Hukum Langsung adalah risiko yang berdampak secara langsung terhadap Perusahaan;
   - » Risiko Hukum Tidak Langsung adalah risiko yang disebabkan oleh pihak Mitra/eksternal dan berdampak mengikutsertakan secara tidak langsung peran Perusahaan dalam suatu perkara hukum.

Risiko hukum yang dapat diukur dengan pendekatan ini adalah risiko hukum "langsung", bukan risiko yang tergolong "tidak langsung". Perhitungan nilai kerugian risiko hukum berdasarkan perhitungan pendekatan nilai kerugian akibat risiko operasional.

5. *Legal Risk*
Legal Risk is a risk caused by a juridical weakness. The weaknesses of the juridical aspect are caused by lawsuits, the absence of supporting laws or weaknesses of the agreement and the value of loss of legal risk which includes the value of claims and/or legal fees, consisting of:
   - » *The Company's operations as being able to avoid things related to targeted legal risk will also have an impact on the company's reputation risk.*
   - » *Direct Legal Risk is a risk that has a direct impact on the Company;*
   - » *Indirect Legal Risk is the risk caused by the Partners/ External Parties, and the impact of indirectly including the role of the Company in a legal case.*

Legal risks that can be measured by this approach are "direct" legal risks. Calculation of the value of legal risk loss is based on the calculation of the value of loss approach due to operational risk. The value of this legal risk loss includes the value of the claim

Nilai kerugian risiko hukum ini mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum. Pada tahun 2018 tidak terdapat tuntutan hukum yang berdampak secara finansial ke Perusahaan, sehingga risiko hukum pada tahun 2018 sangat rendah.

and or the cost of a legal case. In 2018 there were no lawsuits that have a financial impact on the Company, so the legal risk in 2018 was very low.

Disarankan agar masing-masing unit kerja selalu *update* menggunakan dan mempedomani ketentuan peraturan Perusahaan yang berlaku dalam melakukan setiap kegiatan bisis maupun operasional Perusahaan sehingga dapat menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan risiko hukum yang tentunya akan berdampak pula terhadap reputasi Perusahaan.

It is recommended that each work unit to always be updated in using and adhering to the provisions of the Company regulations in carrying out every business activity and operation of the Company so that they can avoid matters related to legal risk which will certainly have an impact on the Company's reputation.

6. Risiko Reputasi

   Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau persepsi negatif terhadap perusahaan.

   Risiko reputasi dapat diukur dengan kuantitas berita negatif mengenai Perusahaan di media massa, baik cetak maupun *online*. Ukuran ini sudah diselaraskan dengan klasifikasi/penggolongan jenis media untuk mengelola pemberitaan negatif yang disusun Sekretaris Perusahaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

   - Tier 1 – media nasional yang reputasinya kuat (cetak dan *online*);
   - Tier 2 – media nasional yang reputasinya moderat (cetak dan *online*);
   - Tier 3 – media nasional yang reputasinya rendah (cetak dan *online*), dan
   - Tier 4 – media lokal

   Pada tahun 2018 tidak terdapat berita negatif yang menyebabkan risiko reputasi dan berdampak buruk bagi Perusahaan, sehingga risiko reputasi tahun 2018 sangat rendah. Meskipun tingkat risiko reputasi sangat rendah, Perusahaan harus tetap menjaga hubungan baik dengan media maupun mitra dan *stakeholder*.

   Disarankan pada masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

   - Melakukan langkah preventif dengan menjalankan SOP Layanan Perusahaan;
   - Melakukan komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan;
   - Menyampaikan informasi mengenai Perusahaan, karyawan dan kegiatan-kegiatan internal, serta produk dan layanan melalui berbagai saluran saluran komunikasi yang dimiliki;

6. *Reputational Risk*

   Reputational Risk is a risk that is caused, among other things, by negative publications related to the company's business activities or negative perceptions of the company.

   Reputational risk can be measured by the quantity of negative news about the Company in both print or online mass media. This measurement has been aligned with the classification of types of media to manage negative news prepared by the Corporate Secretary. The explanation is as follows:

   - *Tier 1 - strong reputable national media (print and online);*
   - *Tier 2 - moderate-reputed national media (print and online);*
   - *Tier 3 - low-reputed national media (print and online), and*
   - *Tier 4 - local media*

   In 2018 there was no negative news that led to reputational risk and had a negative impact on the Company. So the reputational risk in 2018 was very low. Although the level of reputation risk is very low, the Company must maintain good relations with the media and partners and stakeholders.

   It is recommended for each work unit to do the following:

   - *Carry out preventive steps by adhering to the Corporate Service SOP;*
   - *Communicate regularly with stakeholders;*
   - *Deliver information about the Company, employees and internal activities, as well as products and services through various channels of communication channels owned;*

» Melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pelayanan dan kemitraan secara konsisten;
» Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala dan membuka berbagai kanal komunikasi untuk memudahkan menerima aspirasi pelanggan/mitra;
» Melakukan respon atas keluhan/masukan dari pelanggan secara cepat dan tepat, dan dikomunikasikan dengan unit terkait yang memiliki tanggung jawab;
» Membina dan menjalin hubungan baik dengan media yang memiliki kredibilitas baik untuk membuka akses informasi serta memberikan sumber berita;
» Melakukan klarifikasi atas suatu pemberitaan secara cepat, tepat, dan menyeluruh melalui kanal informasi yang dapat merespon risiko reputasi;
» Melakukan pengawasan dan pengendalian informasi yang beredar di msayarakat, media, dan media sosial;
» Berkoordinasi dengan SPI untuk memantau temuan dan risiko yang dapat berakibat pada reputasi Perusahaan;
» Melakukan berbagai kegiatan *Corporate sosial Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan pemahaman mengenai Perusahaaan;
» Setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi dicatat dan ditatausahakan sehingga menjadi pelajaran dimasa datang dan untuk memproyeksikan potensi kerugian yang mungkin timbul;
» Sekretaris Perusahaan dapat bekerja sama dengan unit kerja tertentu di Perusahaan dalam upaya memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat ke masyarakat;
» Dalam hal terjadi gangguan reputasi perusahaan, pihak yang dapat memberikan klarifikasi informasi kepada pihak eksternal hanya pihak yang berwenang (juru bicara Perusahaan). Ketentuan terkait juru bicara Perusahaan diatur dalam Peraturan Direksi tersendiri.

7. Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada tahun 2018 tidak terdapat risiko Kepatuhan dikarenakan Perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan atau ketentuan yang berlaku pada regulator. Namun demikian Perusahaan agar tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

» *Carry out transparency and accountability in every service activity and partnership consistently;*
» *Conduct customer satisfaction surveys regularly and open various communication channels to facilitate receiving customer/partner aspirations;*
» *Respond to complaints/input from customers quickly and precisely, and communicate it with related units which are responsible for it;*
» *Foster and establish good relations with media that has good credibility to open access to information and provide news sources;*
» *Clarify news quickly, precisely, and thoroughly through an information channel that can respond to reputational risk;*
» *Supervise and control information circulating in the community, media and social media;*
» *Coordinate with Internal Audit Unit to monitor findings and risks that can affect the Company's reputation;*

» *Carry out various Corporate Social Responsibility (CSR) activities to improve understanding of the Company;*

» *Every event related to reputational risk is recorded and administered so that it becomes a lesson in the future and to project potential losses that may arise;*

» *The Corporate Secretary can work with certain work units in the Company in an effort to provide fast and accurate information to the public;*

» *In the event of a disruption to the Company's reputation, the party that can provide clarification to external parties is only the authorized party (Company spokesperson). Provisions related to Company spokespersons are regulated in separate Directors' Regulations.*

7. *Compliance Risk*
Compliance Risk is a risk caused by the Company not complying with or not implementing the laws and regulations and other applicable provisions. In 2018 there was no Compliance risk because the Company did not violate prevailing rules and regulations. However, the Company continues to maintain compliance with existing regulations.

Disarankan pada masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

» Melakukan updating peraturan terbaru;
» Melakukan sosialisasi peraturan terbaru berkala melalui berbagai pendekatan dan kanal informasi;
» Melakukan tindak lanjut/penyesuaian atas peraturan yang ditetapkan oleh lembaga eksternal terkait seperti OJK dan Kementrian BUMN;
» Proaktif melakukan konsultasi secara berkala ke unit kepatuhan atau terkait atas setiap peraturan yang ditetapkan oleh lembaga eksternal terkait seperti OJK dan Kementrian BUMN;
» Melakukan dokumentasi secara tertib terhadap setiap proses bisnis yang dijalankan;
» Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif kepada lembaga eksternal terkait seperti OJK dan Kementrian BUMN untuk mendapatkan informasi dan atau masukan melalui unit kerja kepatuhan;
» Melakukan tindakan korektif atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan/ ketentuan eksternal yang berlaku secara tepat waktu;
» Melakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Pengawas Intern terkait pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta temuan Satuan Pengawas Intern;
» Unit Kerja yang membidangi Kepatuhan melakukan uji Kepatuhnan dan monitoring kepatuhan Perusahaan.
» Dalam menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku, setiap karyawan wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kepatuhan terutama apabila terdapat issue adanya ketidakpatuhan. Konsultasi ini juga dibutuhkan apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran terhadap suatu peraturan yang berlaku.

8. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

Perusahaan dalam menghitung dampak risiko operasional menggunakan 7 aspek penilaian yaitu dampak dari nilai kerugian akibat risiko operasional, dampak dari persentase *turnover* Sumber Daya Manusia (SDM), dampak dari *downtime piranti Information Technology* (IT),

It is recommended for each work unit to do the following:

» *Update the latest regulations;*
» *Conduct information dissemination of the latest regulations periodically through various approaches and information channels;*
» *Carry out follow-up/adjustments to regulations stipulated by related external institutions such as the Financial Service Authority and the Ministry of SOEs;*
» *Proactively conduct periodic consultations to the compliance unit or any related units on any regulations stipulated by related external institutions such as the Financial Service Authority and the Ministry of SOEs;*
» *Carry out documentation in an orderly manner towards every business process carried out;*
» *Communicate and coordinate intensively with related external institutions such as the Financial Service Authority and the Ministry of SOEs to obtain information and/or input through compliance work units;*
» *Carry out corrective actions for violations and non-compliance with external laws/regulations that apply in a timely manner;*
» *Coordinate intensively with the Internal Supervisory Unit regarding violations and non-compliance with applicable regulations and the findings of the Internal Audit Unit;*
» *The Work Unit in charge of Compliance performs Compliance tests and monitors compliance of the Company.*
» *In maintaining the Company's compliance with the applicable provisions, each employee must consult and coordinate with the work unit in charge of compliance, especially if there is an issue of non-compliance. This consultation is also needed if there is a difference in the interpretation of applicable regulation.*

8. *Operational RiskOperational Risk is the risk of loss caused by failure or inadequate internal, human and system processes, or as a result of external events.*

In calculating the impact of operational risk, the Company uses 7 aspects of assessment, namely the impact of the value of losses due to operational risk, the impact of the turnover percentage of Human Resources (HR), the impact of Information Technology (IT) downtime, the impact of errors

dampak kesalahan (koreksi) yang dihitung berdasarkan aplikasi koreksi, dampak dari target BOPO, dampak dari tindak lanjut temuan audit, dan dampak kecelakaan kerja.

» Nilai Kerugian akibat risiko operasional
Pengukuran risiko operasional dilihat dari nilai kerugian yang harus ditanggung Perusahaan. Dampak kerugian ini dihitung menggunakan pendekatan kerugian risiko non bisnis Perusahaan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi Perusahaan. Pada tahun 2018 data terkait nilai kerugian akibat risiko operasional belum tersedia karena risiko operasional yang terjadi tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

» *Turn over* Karyawan
Digunakan untuk mengukur dampak sebuah risiko terhadap angka *turn over* karyawan. Dampak dari persentase *turn over* karyawan dihitung menggunakan pendekatan *turn over rate* (tingkat perputaran) yaitu jumlah karyawan keluar (*resign*, diangkat sebagai direktur, pensiun dan meninggal dunia) dibagi total jumlah karyawan pada satu periode yang sama.

(corrections) calculated based on applications correction, the impact of the BOPO target, the impact of follow-up on audit findings, and the impact of workplace accidents.

» *Value of Losses due to operational risk*
The measurement of operational risk is seen from the value of the loss that must be borne by the Company. The impact of this loss is calculated using the approach to the loss of the Company's non-business risk which results in financial losses for the Company.In 2018 the data related to the value of losses due to operational risk was not yet available because the operational risks that occurred did not cause losses to the Company.

» *Employees Turn over*
This is used to measure the impact of a risk on employee turnover rates. The impact of the employee turnover percentage is calculated using the turn over rate approach, namely the number of employees exiting (due to employees resigning, being appointed as director, retiring and death) divided by the total number of employees in the same period.

$$\text{Turn Over Karyawan / } \textit{Employee Turn Over} = \frac{\text{Jumlah karyawan keluar | } \textit{The number of employees exiting the Company}}{\text{Total Karyawan | } \textit{Total number of employees}}$$

Data *Turn Over* Karyawan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Employee Turn Over Data in 2018 are as follows:

$$\textit{Turn Over} = \frac{35}{1045} = 3\%$$

Realisasi *Turn Over* Karyawan tahun 2018 sebesar 3% masuk dalam kategori Major.

Realization of Employee Turn Over in 2018 is 3%, and it is included in the Major category.

» *Downtime* IT
Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak sebuah risiko terhadap gangguan sistem informasi atau biasa disebut dengan *downtime* IT. Perhitungan kriteria dampak dari *downtime* sistem IT didasarkan pada dokumen kritikalitas sistem IT di Perusahaan. Berdasarkan dokumen tersebut, disebutkan bahwa untuk Sistem *Critical* maksimum *downtime* nya adalah 4 jam dan Sistem *Non Critical* maksimum *downtime*-

» *IT downtime*
This approach is used to measure the impact of a risk on information system disruption or commonly referred to as IT downtime. Calculation of the criteria for the impact of IT system downtime is based on the criticality of IT systems documents in the Company. Based on the document, it is stated that for the maximum downtime for System Critical is 4 hours and the for the Non-Critical, the maximum downtime is 48 hours. The establishment of the criticality

nya adalah 48 jam. Penentuan tingkat kritikalitas sistem mengacu pada ketentuan kritikalitas sistem Divisi yang membidangi TI. Aplikasi yang masuk dalam kategori aplikasi kritikal antara lain KUR *online*, Aplikasi Klaim, Aplikasi Akuntansi, KUM Mandiri, dan Penerbitan *Suretyship*. Sedangkan aplikasi selain tersebut di atas tergolong dalam aplikasi non kritikal.

level of the system refers to the provisions of system criticality of the Division in charge of IT. The applications included in the category of critical applications include online KUR, Claim Application, Accounting Application, Mandiri Macro Enterprises Credit, and Suretyship Issuance. The applications which are not included in the above are classified as non-critical applications.

No.	Kategori aplikasi *Applications category*	Rata-rata Downtime *Downtime Average*	Kategori Dampak *Classification of Impact*
1	Aplikasi kritikal *Applications Critical*	1h 11m 46s	Minor
2	Aplikasi non kritikal *Applications Non-critical*	1h 14m 51s	*Insignificant*

Downtime yang terjadi pada tiap aplikasi secara umum terjadi pada jangka waktu singkat kisaran menit. Namun terdapat beberapa waktu terjadi *downtime* dalam waktu cukup lama yang di antaranya disebabkan karena *server* yang sedang *down*.

The downtime that occurs in each application generally occurs in a short period of minutes. However, some times the downtime occurs for a long time. These are caused by a server that is down.

» Koreksi

Dampak dari risiko operasional juga dapat dihitung berdasarkan kesalahan/koreksi yang dihitung menggunakan aplikasi koreksi. Koreksi dimaksud merupakan koreksi yang berasal dari kegiatan koreksi oleh internal Perusahaan.

Pada tahun 2018 terdapat 31.463 koreksi data yang terjadi dan masuk ke dalam tingkat dampak risiko Catastrophic. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya permintaan dari pihak eksternal, namun sampai saat ini belum dapat diketahui jumlah koreksi atas permintaan eksternal maupun karena faktor internal.

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah mengusulkan kepada Divisi TI adanya penambahan fitur untuk identifikasi faktor penyebab koreksi dari faktor internal atau eksternal.

Disarankan agar Satuan Pengawas Intern lebih aktif melakukan *monitoring* terhadap progress tindak lanjut temuan dari masing-masing unit kerja untuk meminimalisir terjadinya temuan berulang pada saat audit berikutnya juga untuk lebih meningkatkan *awareness risk owner* dalam mengelola risiko yang terjadi pada unit kerjanya.

» *Correction*

The impact of operational risk can also be calculated based on errors/corrections calculated using the correction application. The correction referred to is a correction originating from correction activities by the Company's internal activities.

In 2018 there were 31,463 data corrections that occurred and this is included in the level of Catastrophic risk impacts. This is due to a large number of requests from external parties, but until now, there has been no known number of corrections at the request of external parties or due to internal factors.

The Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division have proposed to the IT Division the addition of features to identify factors causing correction from internal or external factors.

It is recommended that the Internal Audit Unit be more active in monitoring the progress of follow-up findings of each work unit to minimize the occurrence of repeated findings during the next audit as well as to further increase the awareness of the risk owner in managing the risks that occur in the work unit.

» BOPO

Pendekatan ini mengukur dampak sebuah risiko berdasarkan deviasi pencapaian target BOPO. Ketika sebuah risiko terjadi, biasanya akan terjadi pula perubahan biaya yang harus dikeluarkan. Salah satu pengukuran efisiensi yang banyak digunakan adalah rasio BOPO.

» *BOPO*

This approach measures the impact of a risk based on the deviation of achievement of BOPO target. When a risk occurs, there will usually be changes in costs that must be incurred. One of the most used efficiency measurements is the BOPO ratio.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Usaha | } \textit{Operating expenses}}{\text{Pendapatan Usaha | } \textit{Operating revenues}}$$

Data realisasi BOPO Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Data on BOPO realization in 2018 are as follows:

$$\text{BOPO} = \frac{749.270.065.097}{1.504.395.006.264} = 49{,}81\%$$

BOPO Perusahaan tahun 2018 adalah sebesar 49,81% atau 10,47% lebih rendah dari target BOPO Tahun 2018 yaitu sebesar 60,28%. Hal ini berarti parameter BOPO Perusahaan memiliki tingkat dampak risiko *insignificant*.

The Company's BOPO in 2018 is 49.81% or 10.47% lower than the BOPO target for 2018 which is 60.28%. This means that the BOPO parameters of the Company have an insignificant level of risk impact.

Disarankan agar masing-masing unit kerja aktif melakukan monitoring pengendalian biaya operasional untuk menjaga supaya tidak terjadi pelampauan dari anggaran yang telah ditetapkan pada RKAR/RKAW/RKAC tahun 2019

It is recommended that each active work unit monitor operational cost control to keep from exceeding the budget set out in RKAR / RKAW / RKAC of 2019

» Tindak Lanjut Temuan Audit

Pendekatan ini mengukur dampak sebuah risiko berdasarkan tindak lanjut dari temuan audit. Ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu persentase tindak lanjut dan waktu penyelesaian tindak lanjut.

» *Follow-up of Audit Findings*

This approach measures the impact of a risk based on follow-up of audit findings. There are two factors that influence the percentage of follow-up and the time of completion of follow-up.

Pada tahun 2018 terdapat temuan audit sebanyak 422 dengan jumlah rekomendasi atas temuan 689. Atas hal tersebut sampai dengan desember 2018 terdapat 568 atau 82,44% temuan audit yang telah ditindaklanjuti. Hal ini berarti temuan audit yang belum ditindaklanjuti adalah sebanyak 121 atau sebesar 17,56%.

In 2018 there were 422 audit findings with 689 recommendations for the findings. For this matter, as of December 2018, there were 568 or 82.44% of audit findings that had been followed up. This means that there are 121 or 17.56% of audit findings that have not been followed up.

Atas tindak lanjut Kantor Cabang terdapat 13,21% yang belum dapat dipenuhi namun telah jatuh tempo masa penyelesaiannya, sehingga tindak lanjut tersebut masuk dalam kategori dampak risiko *moderate*.

For the follow-up of the Branch Office, there is 13.21% which cannot be fulfilled even though the completion period is due. So, that the follow-up falls into the category of moderate risk impact.

» Terjadinya Kecelakaan Kerja
Pendekatan ini mengukur dampak terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di Perusahaan. Pada tahun 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan Perusahaan, sehingga dapat dikatakan dampak risikonya *insignificant*.

Risiko kecelakaan kerja dilingkungan perusahaan dapat dicegah/diminimalisir salah satunya adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pemakaian dari seluruh SDM Perusahaan mengenai pentingnya penerapan K3 Perusahaan.

Sebagai tindakan pengendalian terhadap risiko operasional tersebut, maka divisi Manajemen Risiko dan PUKM dapat memberikan saran/masukan sebagai berikut:
- Melakukan prinsip kehati-hatian yang meliputi konfirmasi transaksi, rekonsiliasi, verifikasi dan validasi/otorisasi atas aktivitas transaksi Perusahaan;
- Menyempurnakan/menyusun ketentuan oleh unit kerja terkait;
- Melakukan perbaikan/koreksi dengan cepat dan tepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis yang ada;
- Melakukan dokumentasi setiap kegiatan bisnis yang dijalankan, sehingga *tracking* data penjaminan lebih mudah, lebih *detail*, mempersingkat SLA, dan mengurangi risiko dokumen hilang maupun rusak;
- Menjalankan *Whistleblowing System* (WBS) untuk mencegah dan melaporkan segala tindakan diluar wewenang dan/atau tidak sesuai aturan yang berlaku;
- Melakukan perawatan dan pengembangan piranti IT secara berkala menyesuaikan perkembangan bisnis Perusahaan;
- Merespon keluhan/gangguan IT secara cepat, tepat, dan efisien;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian progress tindaklanjut temuan audit;
- Menjalankan *Business Continuity Plan* dan/atau *Disaster Recovery Plan* saat terjadi gangguan/ bencana.

» *The Occurrence of Work Accidents*
This approach measures the impact of workplace accidents that occur in the Company. In 2018 there were no work accidents in the Company. So, the risk impact was insignificant.

The risk of workplace accidents in the corporate environment can be prevented/minimized; one of which is through the dissemination and utilization of all the Company's HR regarding the importance of the implementation of the Company's OHS.

As a control measure for these operational risks, the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division divisions can provide suggestions/ input as follows:
- *Perform the principle of prudence which includes confirmation of transactions, reconciliation, verification and validation/authorization of the Company's transaction activities;*
- *Improve/draft provisions by related work units;*
- *Make repairs/corrections quickly and precisely so as not to interfere with existing business processes;*
- *Document every business activity, so that tracking of guarantee data is easier and more detailed. It will also shorten SLA and reduces the risk of lost or damaged documents;*
- *Carry out a Whistleblowing System (WBS) to prevent and report any actions outside of authority and/or actions which are not in accordance with the applicable rules;*
- *Maintain and develop IT devices on a regular basis to adjust the development of the Company's business;*
- *Respond to complaints/IT disruptions quickly, precisely, and efficiently;*
- *Conduct monitoring and control of the progress of follow-up audit findings;*
- *Run a Business Continuity Plan and/or Disaster Recovery Plan during disruptions/disasters.*

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan perusahaan serta meningkatkan nilai Perusahaan dan efisiensi & efektivitas pengelolaan Perusahaan secara hati-hati. Penerapan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo mulai dilakukan pada tahun 2010 yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 21/ Per-Dir/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara garis besar kondisi beberapa parameter penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Pemahaman Manajemen Risiko
  Sebagian proses manajemen risiko sudah tercantum dalam SOP-SOP proses bisnis berbasis risiko, sehingga apabila audit internal ataupun eksternal tidak menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap SOP dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman Manajemen Risiko sudah cukup baik.
- Pelaksanaan Rancangan Proses Manajemen Risiko
  Pelaksanaan rancangan proses manajemen risiko perlu didukung dengan adanya sistem manajemen risiko. Terkait sistem manajemen risiko, Perum Jamkrindo telah memiliki *Blueprint* Manajamen Risiko dan Panduan Manajemen Risiko yang didukung dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko yang berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Proses identifikasi dan penilaian risiko serta penyusunan rencana pengendalian risiko tersebut sudah dilakukan secara triwulanan oleh *Risk Owner* di Perum Jamkrindo. Dengan demikian, dapat dikatakan rancangan proses manajemen risiko telah sesuai untuk diterapkan.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The application of Risk Management aims to provide confidence in the achievement of company goals and increase the value of the Company and the efficiency & effectiveness of the Company's management. The implementation of Risk Management Perum Jamkrindo began in 2010 which was marked by the enactment of Directors Regulation No. 13 / Per-Dir / XII / 2010 dated December 29, 2010, which was later amended by Directors Regulation No. 21 / Per-Dir / VIII / 2016 dated August 12, 2016, concerning Application of Risk Management.

Based on the description above, then, in general, the conditions of some parameters of the application of Risk Management are as follows:

- *Understanding of Risk Management*
  Some of the risk management processes are listed in risk-based business process SOPs, so that if the internal or external audit does not find any non-compliance with the SOP, it can be concluded that the level of understanding of Risk Management is sufficient.

- *The implementation of the Risk Management Process Design*
  The implementation of the risk management process design needs to be supported by the existence of a risk management system. Regarding the risk management system, Perum Jamkrindo already has a Risk Management Blueprint and a Risk Management Guidelines that are supported by a Risk Management Information System Application that serves to simplify the process of identification, risk assessment, and risk management follow-up. The process of identifying and evaluating risks and the preparation of the risk control plan have been carried out quarterly by the Risk Owner at Perum Jamkrindo. Thus, it can be said that the design of the risk management process is appropriate to be applied.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL, SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Perusahaan melaksanakan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dengan mengacu kepada Kebijakan dan Prosedur yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan fungsi pengendalian intern, Perusahaan membentuk Satuan Pengawasan Intern untuk memastikan agar Perusahaan tetap patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, memastikan kesesuaian Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya terhadap tujuan, sasaran, rencana, kebijakan, instruksi dan/atau ketentuan lain yang berlaku dalam organisasi, ketaatan atau kesesuaian perusahaan terhadap aturan dan ketentuan bidang pengelolaan perusahaan dan komitmen perusahaan kepada segenap Stakeholder.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh insan Perum Jamkrindo untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan Keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo mengacu pada *Internal Audit Charter* dan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko
   - » Memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola oleh manajemen risiko sudah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, dimonitor dan dikomunikasikan.
   - » Melaksanakan konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penerapan pengelolaan risiko Perusahaan.
   - » Menyusun dan menerapkan pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yaitu audit berbasis risiko.
2. Satuan Pengawasan Intern
   - » Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL, AND COMPLIANCE WITH OTHER LEGISLATION REGULATIONS

The Company implements an internal control system in the implementation of Corporate Risk Management by referring to the policies and procedures that have been set. To carry out the internal control function, the Company established an Internal Control Unit to ensure that the Company remained in compliance with the laws that apply to the Company, ensuring the suitability of the Work Unit in the context of carrying out its duties towards the Company's objectives, plans, policies, instructions and/or other provisions which apply in the organization, and to ensure the Company compliance with the rules and regulations the management of the Company and the Company's commitment to all stakeholders.

The Internal Control System is a process that is integrated into actions and activities carried out continuously by the top management and all employees of Perum Jamkrindo to provide adequate confidence in achieving organizational goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, safeguarding Company assets and compliance with regulations. The implementation of the internal control system carried out by Perum Jamkrindo refers to the Internal Audit Charter and the Good Corporate Governance Implementation Guidelines which explain the followings:

1. *Risk Management*
   - » *Ensure that the risks managed by risk management have been identified, analyzed, evaluated, monitored and communicated.*
   - » *Carry out consultations, monitoring, and evaluation of the implementation of the Company's risk management.*
   - » *Develop and implement risk-based audits*
2. *Internal Control Unit*
   - » *Evaluate the effectiveness of the implementation of internal controls, Risk Management, and Corporate governance processes, in accordance with the laws and regulations, and the Company policies.*

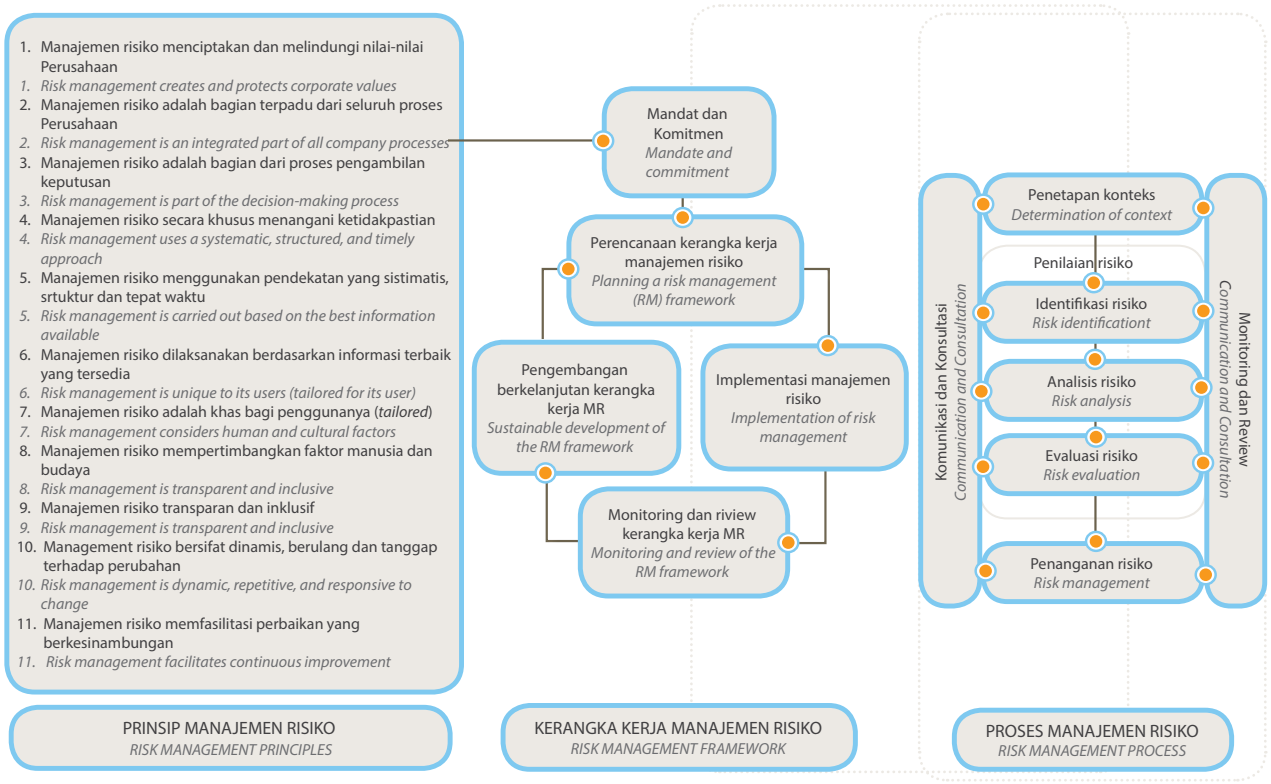
» Menggunakan data profil risiko di Perusahaan dalam rangka mendukung proses audit atau *Risk Based* Audit.
» Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha.

» *Use risk profile data in the Company to support the audit process or Risk-Based Audit.*
» *Assess compliance with existing provisions, by evaluating and monitoring all systems, procedures, provisions, and operations of the Company to encourage effectiveness and compliance in their implementation and provide recommendations to the Board of Directors regarding business risk control/management.*

Sejak tahun 2018, sistem pengendalian intrenal Perusahaan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM, sudah tidak lagi menggunakan COSO *International Framework*, namun menggunakan ISO 31000 dalam acuan membuat kebijakan Manajamen Risiko.

Since 2018, the Company's internal control system carried out by the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division has ceased to use COSO International Framework; they now use ISO 31000 in reference to making Risk Management policies.

Arsitektur Manajemen Risiko Berdasarkan ISO 31000
Risk Management Architecture Based on ISO 31000



Sementara itu, bentuk kegiatan dari sistem pengendalian internal yang dilakukan Perusahaan di sepanjang tahun 2018, adalah sebagai berikut:

The activities of the internal control system carried out by the Company throughout 2018 are as follows:

1. *Cash Budget* dibuat secara periodik untuk perencanaan kebutuhan likuiditas dan investasi
2. Pembayaran kepada rekanan dan pembayaran klaim dilakukan secara berkala
3. Pertanggung jawaban kas sementara dilakukan selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
4. Pembatasan rekening giro aktif di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang (giro pembayaran)
5. Sentralisasi dana secara periodik dari Kantor Cabang ke Kantor Wilayah
6. Sentralisasi deposito KUR di Kantor Pusat dan deposito komersial di Kantor Wilayah.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan yang telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM yaitu dibagi menjadi 2 bagian:

1. Pengelolaan Risiko Korporasi
   Pengelolaan risiko korporasi yang dilakukan yaitu dengan:
   a. Menetapkan parameter risiko-risiko di antaranya risiko stratejik yang dilihat dari EBT perusahaan, risiko likuiditas yang dilihat dari *cash flow to debt ratio*, risiko pasar yang dilihat dari YoI dan Pencapaian IJP, risiko operasional yang dilihat dari *turnover* karyawan, *downtime TI*, pendekatan koreksi, realisasi BOPO dan tindak lanjut temuan audit.
   b. *Monitoring* seluruh risiko Unit Kerja Perusahaan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) yang diisikan setiap triwulannya dan dilaporkan kepada *Top Management*.
2. Pengelolaan Risiko Penjaminan
   Pengelolaan risiko penjaminan yang dilakukan yaitu dengan:
   a. Menetapkan parameter risiko penjaminan yang dilihat dari Rasio Klaim, *Recovery Rate* dan Piutang *Co Guarantee*/Reasuransi.

   Pengelolaan risiko penjaminan juga dilakukan dengan bantuan *tools* aplikasi yaitu aplikasi *scoring* data Calon Terjamin yang bekerja sama dengan Pefindo Biro Kredit, aplikasi verifikasi validasi data Calon Terjamin yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, melakukan *scoring* agen penjamin, scoring pialang reasuransi dan reasuransi.

1. *Cash Budget, which is made periodically for planning liquidity and investment needs*
2. *Payments to partners and claim payments are made regularly*
3. *Temporary cash liability is carried out no later than 14 (fourteen) working days or according to a predetermined schedule*
4. *Limitation of active checking accounts in Regional Offices and Branch Offices (demand deposits)*
5. *Centralize funds periodically from Branch Offices to Regional Offices*
6. *Centralize KUR deposits at Headquarters and commercial deposits in Regional Offices.*

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

Evaluation of the effectiveness of the Company's internal control system that has been carried out by the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division is divided into 2 parts:

1. *Management of Corporate Risk*
   Corporate risk management carried out by:
   a. *Establishing risk parameters including strategic risk seen from the Company's EBT, liquidity risk seen from cash flow to debt ratio, market risk seen from YoI and Guarantee Accrual Fee (IJP) Achievement, operational risk which can be seen from employee turnover, IT downtime, correction approach, the realization of BOPO and follow up of audit findings.*
   b. *Monitoring all risks of the Company's Work Unit through the application of the Risk Management Information System (SIMR) which is filled every quarter and reported to Top Management.*
2. *Guarantee Risk Management*
   The management of guarantee risk is done by:
   a. *Establishing the guarantee risk parameters as seen from the Claim Ratio, Recovery Rate, and Co-Guarantee/ Reinsurance Receivables.*

   Guarantee risk management is also carried out with the help of an application which is an application scoring data for Guaranteed Candidates in cooperation with the Credit Bureau of Indonesia, and the application for data validation of the Guaranteed candidates who work with the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs, as well as scoring guarantor agents and scoring reinsurance and its brokers.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perum Jamkrindo dalam menjalin hubungan dengan Pemangku Kepentingan, baik dari internal seperti karyawan maupun dari eksternal seperti konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perum Jamkrindo membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility (CSR) becomes a forum for Perum Jamkrindo in establishing relationships with Stakeholders, both internally, such as with employees, as well as with external parties such as consumers. Regarding the implementation of CSR, Perum Jamkrindo divides it into 4 (four) aspects.

YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
RELATED TO THE ENVIRONMENT

YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
RELATED TO EMPLOYMENT, HEALTH, AND WORK SAFETY

YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

YANG TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN
RELATED TO CONSUMER RESPONSIBILITIES

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perum Jamkrindo dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More information about the implementation of CSR by Perum Jamkrindo can be seen in the chapter on Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

PERKARA PENTING
SIGNIFICANT CASES

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Pengawas dan Direksi di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut,

LEGAL PROBLEMS

The legal problems and/or cases faced by the Company, subsidiaries, and members of the Board of Supervisors and Directors throughout 2018 are as follows,

Permasalahan Hukum *Legal Problems*	2018		2017	
	Perdata *Civil*	Pidana *Criminal*	Perdata *Civil*	Pidana *Criminal*
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap *Settled and has received final judgment*	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian *In a settlement process*	-	-	-	-
Jumlah ***Total***	-	-	-	-

Pihak yang Berperkara *Disputing Parties*	**Pokok Perkara** *Case Principal*	**Status Perkara** *Case Status*	**Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Perusahaan** *Risk faced by the Company and Its Impact on the Company*	**Tindak Lanjut** *Follow-ups*
-	-	-	-	-

Disepanjang tahun 2018, tidak ada satupun permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan maupun entitas anak perusahaan.

Throughout 2018, there were no legal problems and/or cases faced by the Company or subsidiaries.

SANKSI ADMINISTRASI

DI sepanjang tahun 2018 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Perusahaan maupun kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

In 2018, there were no administrative sanctions imposed by the relevant authorities either to the Company or to the members of the Supervisory Board and Directors.

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Perusahaan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan maupun kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

IMPORTANT CASES OUTSIDE OF LEGAL ASPECTS

The company did not find any important cases outside the legal aspects involving the Company or members of the Supervisory Board and Directors.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Dalam menyampaikan dan penyebaran informasi serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Perum Jamkrindo menggunakan berbagai media yang ada, yaitu media internet, cetak dan kegiatan atau event.

In delivering and disseminating information, and communicating it with interested parties, Perum Jamkrindo uses a variety of available media, namely the internet, print media, and activities or events.

Dalam prosesnya, akses terhadap informasi Perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

In the process, access to Company information can be divided into 2 (two), they are:

No	Akses Informasi *Access to Corporate Information*	Jenis *Types*
1	Komunikasi Internal *Internal Communication*	Surat Edaran/*Circular Letter* Perum Jamkrindo Menggunakan Surat Edaran Untuk Mengkomunikasikan Kebijakan Dan Peraturan Terbaru Di Dalam Internal Perusahaan. Informasi Yang Disebarkan Umumnya Berisi Tentang Sosialisasi Kebijakan Direksi *Perum Jamkrindo uses Circular to communicate the latest policies and regulations internally. Generally, the disseminated information contains the dissemination of Directors' policies*
		ICPR (*Integrated Corporate Performance Reporting*) Perum Jamkrindo Juga Menggunakan Sarana Teknologi Informasi Yang Berbasis Web Yaitu ICPR Yang Telah Diterapkan di Lingkungan Perum Jamkrindo *Perum Jamkrindo also uses a Web-Based Information Technology facility which is named ICPR which has been applied In Perum Jamkrindo*
		E-mail Perum Jamkrindo juga telah memiliki *e-mail system* sendiri untuk mengelola komunikasi internal perusahaan antar unit kerja *Perum Jamkrindo also has its own e-mail system to manage internal company communication between work units*
		Evaluasi dan *Action Plan* Triwulan/ *Quarterly Evaluation and Action Plan* Untuk sarana komunikasi antara Direksi dengan Kepala Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang dalam menyampaikan target dan rencana bisnis Perusahaan, Perum Jamkrindo secara rutin tiga bulan atau triwulanan menyelenggarakan rapat evaluasi dan *action plan*. Dalam rapat evaluasi dan *action plan* ini, Direksi Perum Jamkrindo melakukan evaluasi terhadap kinerja triwulanan berjalan dan membahas serta mengkomunikasikan rencana bisnis Perum Jamkrindo untuk triwulan-an kedepan kepada para Kepala Divisi, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Anak Cabang untuk meneruskan target dan rencana bisnis tahunan yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan *Perum Jamkrindo routinely holds a three-month or quarterly evaluation meetings and action plan to facilitate communication between the Board of Directors and the Head of Division and Head of Branch Offices or Branch Office Offices in delivering the Company's business targets and plans.* *In this quarterly evaluation and action plan meeting, the Board of Directors of Perum Jamkrindo evaluated quarterly performance and discussed as well as communicated Perum Jamkrindo's business plan for the next quarter to Division Heads, Head of Branch Offices and Head of Branch Offices to continue targets and annual business plans determined in the current Corporate Work Plan and Budget*

No	Akses Informasi *Access to Corporate Information*	Jenis *Types*
2	Komunikasi Eksternal *External Communication*	**Alamat Perusahaan/*Company Address*** Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat Telepon/Phone:+62216540335 Faksimili/Facsimile : +62 21 6540344/48
		Situs Web/ *Website* Untuk memudahkan mitra kerja, masyarakat yang berkepentingan lainnya atau *stakeholders* dalam mendapatkan informasi Perum Jamkrindo menyediakan akses dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang andal melalui website www. jamkrindo.com *To facilitate work partners, other interested communities or stakeholders in getting information, Perum Jamkrindo provides access by utilizing reliable information technology support through the www website. jamkrindo.com*
		Press Release Perum Jamkrindo juga pada saat diperlukan melakukan publikasi dari setiap kegiatan perusahaan yang dilakukan melalui *press release* *When needed, Perum Jamkrindo also publish each Company's activities through a press release*
		Public Expose Sekali dalam setahun perusahaan wajib menyelenggarakan *public expose* atau paparan publik mengenai kinerja perusahaan *Once a year, the Company is required to hold a public disclosure regarding the Company's performance*
		Iklan/*Advertisement* Iklan digunakan sebagai alat untuk mengelola citra dan meningkatkan *awareness* terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan menggunakan media untuk menyebarluaskan iklan di masyarakat, antara lain adalah surat kabar, majalah, dan media lainnya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target *audiences* agar iklan dapat berfungsi dengan efektif/ *Advertising is used as a tool to manage images and increase awareness of Perum Jamkrindo and its product. Perum Jamkrindo uses media to disseminate advertisements in the community, including in newspapers, magazines and other media, by first analyzing the media and target audiences so that advertisements can function effectively*
		Pameran/*Exhibition* Perum Jamkrindo juga selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pameran untuk mengelola citra dan meningkatkan *awareness* terhadap Perum Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target *audiences* agar iklan dapat berfungsi dengan efektif *Perum Jamkrindo also always participates in every exhibition activity to manage the image and increase awareness of Perum Jamkrindo and its products, by first analyzing the media and target audiences so that their participation can function effectively*

KORESPONDENSI DAN LAPORAN BERKALA

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemilik modal, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

- Laporan Triwulan.
- Laporan Tahunan.
- Keterbukaan informasi melalui public expose.
- Laporan administrasi kepada Pemilik Modal.

Korespondensi yang dilakukan Perusahaan di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

CORRESPONDENCE AND PERIODIC REPORTS

Financial and non-financial information from the Company has been prepared and reported transparently to the required equity owners, stakeholders, and other institutions. Information is reported in a timely manner, presented completely and accurately, updated, intact and appropriate in accordance with the procedures, types, and scope as stipulated in the provisions concerning Transparency of the Company's Financial Conditions. Information is presented through reports in the form of:

- *Quarterly Reports.*
- *Annual report.*
- *Information disclosure through public exposure.*
- *Administrative report to the Equity Owner.*

The types of Correspondence conducted by the Company throughout 2018 is as follows:

Korespondensi Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara RI
Correspondence with the Minister of the State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia

Bentuk Korespondensi *The types of Correspondence*	**Tanggal** *Date*	**Perihal** *Topics*
Surat *Letter*	26 Februari 2018 *February 26, 2018*	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Audited Tahun Buku 2017 Perum Jamkrindo *Submission of Perum Jamkrindo's Audited Consolidated Financial Statements for 2017 Fiscal Year*
Surat *Letter*	26 April 2018 *April 26, 2018*	Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan I Tahun Buku 2018 *First Quarter Financial and Activity Report for 2018 Fiscal Year*
Surat *Letter*	31 Juli 2018 July 31, 2018	Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun Buku 2018 *Second Quarter Financial and Activity Report for 2018 Fiscal Year*
Surat *Letter*	22 Oktober 2018 *October 22, 2018*	Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan III Tahun Buku 2018 *Third Quarter Financial and Activity Report for 2018 Fiscal Year*

Korespondensi Kepada OJK
Correspondence with the Financial Service Authority

Bentuk Korespondensi *The types of Correspondence*	**Tanggal** *Date*	**Perihal** *Topics*
Surat *Letter*	29 Januari 2018 *January 29, 2018*	Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2018 *Book of Corporate Work Plan and Budget for 2018 Fiscal Year*

SITUS WEB

Situs web memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan, di mana situs web memungkinkan penyampaian informasi yang tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah.

Perusahaan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs web ini menyediakan konten seputar informasi Perusahaan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi kepada publik dan pemangku kepentingan.

WEBSITE

Websites have a significant role in the governance of information disclosure. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to the public and stakeholders, where the website allows unlimited information delivery that can be done quickly, precisely, and cheaply.

The Company has an official website with the address www.jamkrindo.co.id. This website provides comprehensive and useful information about the Company for the public and stakeholders.

HUBUNGAN MEDIA

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media melalui Rilis Media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal. Selama tahun 2018 terdapat 65 rilis yang diberikan kepada media baik nasional maupun lokal.

MEDIA RELATIONS

To be able to convey information comprehensively, the Company engages in media relations through Media Release to a number of media both national and local. In 2018 there were 65 releases given to both national and local media.

No	Tanggal *Date*	Tajuk *Headers*
1	Kamis, 27 Desember 2018 *Thursday, December 27, 2018*	Perum Jamkrindo dan Askrindo Bersinergi dalam Penjaminan KUR Bersama *Perum Jamkrindo and Askrindo Synergize in Joint KUR Guarantee*
2	Kamis, 27 Desember 2018 *Thursday, December 27, 2018*	Jamkrindo Kirim Bantuan Untuk Para Korban Tsunami di Lampung *Jamkrindo Send Assistance to Tsunami Victims in Lampung*
3	Kamis, 27 Desember 2018 *Thursday, December 27, 2018*	Jamkrindo Gerak Cepat Kirim Bantuan ke Korban Tsunami di Banten *Jamkrindo's Quick Response by Sending Assistance to Tsunami Victims in Banten*
4	Kamis, 20 Desember 2018 *Thursday, December 20, 2018*	Jelang 2019, Jamkrindo Perkuat Sinergi Berkelanjutan dengan BTN *Towards 2019, Jamkrindo Strengthens Sustainable Synergy with BTN*
5	Selasa, 18 Desember 2018 *Tuesday, December 18, 2018*	Perum Jamkrindo-KODIT Bahas Penjaminan Bisnis Start Up *Perum Jamkrindo-KODIT Discusses Business Start Up Guarantee*
6	Selasa, 18 Desember 2018 *Tuesday, December 18, 2018*	BUMN Berbagi Melalui Pemberian Santunan Kepada Anak Panti Asuhan di Sulawesi Utara *SOEs Care through the Giving of Allowance to Orphans in North Sulawesi*
7	Kamis, 6 Desember 2018 *Thursday, December 6, 2018*	Perum Jamkrindo Sumbang Kandang Komunal di Solo *Perum Jamkrindo Donates Communal Cages in Solo*
8	Jumat, 30 November 2018 *Friday, November 30, 2018*	Perum Jamkrindo Cetak Petani Kopi Jadi Barista *Perum Jamkrindo transforms Coffee Farmers to become Baristas*
9	Senin, 26 November 2018 *Monday, November 26, 2018*	Jamkrindo Menerima Penghargaan Best SOE in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises *Jamkrindo Received the Best SOE in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises Award*
10	Jumat, 23 November 2018 *Friday, November 23, 2018*	Perum Jamkrindo Raih Apresiasi sebagai Penjamin KUR Terbaik *Perum Jamkrindo Wins Award as the Best KUR Guarantor*

No	Tanggal *Date*	Tajuk *Headers*
11	Rabu, 21 November 2018 *Wednesday, November 21, 2018*	Perum Jamkrindo Raih Penghargaan The Best Marketing 2018 *Perum Jamkrindo Wins The Best Marketing Award 2018*
12	Minggu, 18 November 2018 *Sunday, November 18, 2018*	Randi Anto Terpilih Menjadi Ketua Himppara *Randi Anto was elected as Chairperson of the Himppara*
13	Kamis, 15 November 2018 *Thursday, November 15, 2018*	Gelar Pelatihan di Enam Kota, Jamkrindo Optimis Rangkum 1.200 UMKM *By conducting training in six cities, Jamkrindo is optimistic in acquiring guarantee for 1,200 MSMEs*
14	Selasa, 9 Oktober 2018 *Tuesday, October 9, 2018*	Jamkrindo Berupaya Lahirkan Pengusaha Muda *Jamkrindo attempts to produce Young Entrepreneurs*
15	Selasa, 2 Oktober 2018 *Tuesday, October 2, 2018*	Jamkrindo Gerak Cepat Kirimkan Bantuan ke Palu *Jamkrindo's Quick Response by Sending Assistance to Palu*
16	Selasa, 2 Oktober 2018 *Tuesday, October 2, 2018*	Perum jamkrindo Tingkatkan Komitmen Dukung Pengembangan UMKM *Perum Jamkrindo increases commitment to support the development of MSMEs*
17	Senin, 17 September 2018 *Monday, September 17, 2018*	Perum Jamkrindo Raih ICSB Presidential Award 2018 *Perum Jamkrindo Wins ICSB Presidential Award 2018*
18	Rabu, 12 September 2018 *Wednesday, September 12, 2018*	Perum Jamkrindo Fasilitasi Karyawan untuk Kredit Perumahan *Perum Jamkrindo facilitates employees for Housing Loans*
19	Jumat, 24 Agustus 2018 *Friday, August 24, 2018*	Perum Jamkrindo Bagikan Daging Qurban Untuk Warga Sekitar *Perum Jamkrindo distributes Sacrificial Meat for surrounding residents*
20	Senin, 20 Agustus 2018 *Monday, August 20, 2018*	Ribuan Masyarakat Gorontalo Meriahkan Jalan Sehat Jamkrindo *Thousands of Gorontalo communities enliven Jamkrindo Healthy Walk*
21	Senin, 20 Agustus 2018 *Monday, August 20, 2018*	Perum Jamkrindo Rayakan Hari Kemerdekaan Bersama Masyarakat Gorontalo *Perum Jamkrindo celebrates Independence Day together with Gorontalo Community*
22	Selasa, 14 Agustus 2018 *Tuesday, August 14, 2018*	Perum Jamkrindo Bedah Rumah Veteran dan Berdayakan Petani Mete *Perum Jamkrindo renovates Veterans' Houses and empowers Cashew Farmers*
23	Selasa, 14 Agustus 2018 *Tuesday, August 14, 2018*	Perum Jamkrindo Terima 30 Mahasiswa Program Magang *Perum Jamkrindo employs 30 Internship Program Students*
24	Senin, 13 Agustus 2018 *Monday, August 13, 2018*	Perum Jamkrindo Ajak Siswa Gorontalo Mengenal Nusantara *Perum Jamkrindo invites Gorontalo Students to know about the Archipelago*
25	Kamis, 9 Agustus 2018 *Thursday, August 9, 2018*	Jamkrindo Dukung Pengembangan Bisnis PT Industri Sandang Nusantara *Jamkrindo supports the Business Development of PT Nusantara Garment Industry*
26	Kamis, 9 Agustus 2018 *Thursday, August 9, 2018*	Perum Jamkrindo Gelorakan Semangat Merah Putih di Provinsi Gorontalo *Perum Jamkrindo strengthens the Red and White Spirit in Gorontalo Province*
27	Selasa, 7 Agustus 2018 *Tuesday, August 7, 2018*	Perum Jamkrindo Terlibat dalam Program Elektrifikasi di Jawa Barat dan Banten *Perum Jamkrindois involved in the Electrification Program in West Java and Banten*
28	Kamis, 2 Agustus 2018 *Thursday, August 2, 2018*	Volume Penjaminan Kredit Jamkrindo Makin Melesat *Jamkrindo's Credit Guarantee Volume Increases*
29	Selasa, 24 Juli 2018 *Tuesday, July 24, 2018*	Jamkrindo Pecahkan Rekor Dunia *Jamkrindo Broke World Records*
30	Sabtu, 21 Juli 2018 *Saturday, July 21, 2018*	Perum Jamkrindo Jaga Momentum Pertumbuhan Bisnis *Perum Jamkrindo maintain the momentum of Business Growth*
31	Jumat, 20 Juli 2018 *Friday, July 20, 2018*	Pemenang Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik Perum Jamkrindo 2018 *Winners of the 2018 Perum Jamkrindo's Journalistic Writing and Photo Contest*

No	Tanggal *Date*	Tajuk *Headers*
32	Selasa, 17 Juli 2018 *Tuesday, July 17, 2018*	Pemenang Lomba Foto dan Video Tematik *Winner of Thematic Photo and Video Competition*
33	Jumat, 13 Juli 2018 *Friday, July 13, 2018*	10 Startup Bersaing di Final Penjurian Jamkrindo Startup Challenge *10 Startups Businesses compete in the Jamkrindo Startup Challenge Judging Finals*
34	Jumat, 6 Juli 2018 *Friday, July 6, 2018*	Perum Jamkrindo Mendapat Apresiasi Penyelenggaraan Mudik *Jamkrindo Corporation receives appreciation for organizing Mudik (Annual Homecoming)*
35	Rabu, 4 Juli 2018 *Wednesday, July 4, 2018*	Halal Bihalal PIKA Jamkrindo *Gathering of PIKA Jamkrindo*
36	Minggu, 1 Juli 2018 *Sunday, July 1, 2018*	48 Tahun Perum Jamkrindo Selalu Hadir untuk Negeri *48 Years of Perum Jamkrindo Always Present for the Country*
37	Kamis, 28 Juni 2018 *Thursday, June 28, 2018*	Karyawan Ikut Lomba Seni dan Menyanyi *Employees joined the Art and Singing Contest*
38	Sabtu, 9 Juni 2018 *Saturday, June 9, 2018*	Jumlah Pemudik Bareng BUMN Terus Meningkat *The number of Homecoming Paricipants continues to increase*
39	Jumat, 8 Juni 2018 *Friday, June 8, 2018*	Ratusan Pemudik Berangkat dari Kantor Pusat Perum Jamkrindo *Hundreds of Homecoming Participants departed from the Head Office of Perum Jamkrindo*
40	Selasa, 5 Juni 2018 *Tuesday, June 5, 2018*	Melepas Pemudik di Stasiun Senen *Bidding farewell to Homecoming Participants at Senen Station*
41	Kamis, 31 Mei 2018 *Thursday, May 31, 2018*	Perum Jamkrindo Bagikan Ribuan Paket Sembako Gratis dan Santuni Yatim Piatu *Perum Jamkrindo distributes Thousands of Free Basic Food Packages and donate to Orphans*
42	Rabu, 23 Mei 2018 *Wednesday, May 23, 2018*	Direksi Perum Jamkrindo Berkunjung Ke Kantor Redaksi Kompas *The Director of Perum Jamkrindo Visits the Kompas Editorial Office*
43	Kamis, 17 Mei 2018 *Thursday, May 17, 2018*	Menteri BUMN Rini Soemarno Hadiri Penandatangan Kerja Sama Perum Jamkrindo dan PT Semen Baturaja (Persero) *Rini Soemarno, the minister of SOEs, attended the Signing of Cooperation between Perum Jamkrindo and PT Semen Baturaja (Persero)*
44	Jumat, 11 Mei 2018 *Friday, May 11, 2018*	Perum Jamkrindo Berikan Bantuan Operasi Katarak Gratis di Sumedang *Perum Jamkrindo provides Free Cataract Surgery in Sumedang*
45	Selasa, 8 Mei 2018 *Tuesday, May 8, 2018*	Perum Jamkrindo Berikan Pelatihan Wirausaha Bagi Wartawan *Perum Jamkrindo provides Entrepreneurial Training for Journalists*
46	Kamis, 3 Mei 2018 *Thursday, May 3, 2018*	Jamkrindo Raih Penghargaan BUMN Marketeers Awards 2018 *Jamkrindo Wins 2018 BUMN Marketeers Awards*
47	Senin, 30 April 2018 *Monday, April 30, 2018*	Launching Logo HUT ke 48 Perum Jamkrindo *The 48th Anniversary of Perum Jamkrindo Logo Launching*
48	Senin, 30 April 2018 *Monday, April 30, 2018*	Roadshow JSC di HUT ke 48 Perum Jamkrindo *JSC Roadshow in the 48th Anniversary of Perum Jamkrindo*
49	Senin, 23 April 2018 *Monday, April 23, 2018*	Petani Kopi Bakal Dapat Akses Pembiayaan dari LPDB-KUMKM *Coffee Farmers will get access to Financing from LPDB-KUMKM*
50	Minggu, 22 April 2018 *Sunday, April 22, 2018*	Jamkrindo dan BPP HIPKA Berikan Pelatihan Beternak Puyuh *Jamkrindo and BPP HIPKA provided Quail Farming Training*
51	Senin, 16 April 2018 *Monday, April 16, 2018*	Perum Jamkrindo Berikan Penjaminan Kredit Konstruksi Bagi Nasabah Bank Mandiri *Perum Jamkrindo provides Guarantee for Construction Credit for Bank Mandiri Customers*

No	Tanggal *Date*	Tajuk *Headers*
52	Senin, 9 April 2018 *Monday, April 9, 2018*	Perum Jamkrindo Akan Berangkatkan 1.300 Orang Pemudik *Perum Jamkrindo will assist the Homecoming of 1,300 Participants*
53	Jumat, 6 April 2018 *Friday, April 6, 2018*	Perum Jamkrindo Bersama REI Bekerja sama Untuk Penjaminan Pembiayaan Program Sejuta Rumah *Perum Jamkrindo with REI Collaborates on the Financing Guarantee for One Million Houses Program*
54	Rabu, 4 April 2018 *Wednesday, April 4, 2018*	Cara Karyawan Perum Jamkrindo Berbagi Ilmu dan Pengalaman *The Way the Employees of Perum Jamkrindo Shares Knowledge and Experience*
55	Senin, 2 April 2018 *Monday, April 2, 2018*	Tiga Hal yang Perlu Dikuasai SDM Perum Jamkrindo *Three Things that need to be mastered by HR of Perum Jamkrindo*
56	Senin, 2 April 2018 *Monday, April 2, 2018*	Jamkrindo Bangun Database UMKMK *Jamkrindo Builds MSME Database*
57	Senin, 2 April 2018 *Monday, April 2, 2018*	Perum Jamkrindo Raih PR Indonesia Awards 2018 *Perum Jamkrindo Wins Indonesian PR Awards 2018*
58	Kamis, 15 Maret 2018 *Thursday, March 15, 2018*	Perum Jamkrindo dan PT Askrindo (Persero) Sinergi Penjaminan Bersama *Perum Jamkrindo and PT Askrindo (Persero) had a Joint Guarantee Synergy*
59	Rabu, 14 Maret 2018 *Wednesday, March 14, 2018*	Optimalkan Pelayanan, Perum Jamkrindo Gandeng DukCapil *In Optimizing Services, Perum Jamkrindo Teams Up with the Directorate General of Population and Civil Registration*
60	Selasa, 6 Maret 2018 *Tuesday, March 6, 2018*	Perum Jamkrindo Peduli Pendidikan dan Bangun Rumah Veteran Ex Timor-Timur *The Jamkrindo Corporation Cares for Education and Construction for Ex-East Timor Veteran Houses*
61	Selasa, 27 Februari 2018 *Tuesday, February 27, 2018*	Perum Jamkrindo Cetak Laba Rp 1 Triliun *Perum Jamkrindo Earned Profit of IDR 1 Trillion*
62	Jumat, 9 Februari 2018 *Friday, February 9, 2018*	Perum Jamkrindo Dukung Pencanangan Sinergi BUMN Menjadikan Sumatera Barat sebagai Destinasi Wisata dan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 *Perum Jamkrindo Supports Declaration of SOEs Synergy to Make West Sumatra a National Tourism Destination and Press Day (HPN) 2018*
63	Selasa, 30 Januari 2018 *Tuesday, January 30, 2018*	Sah, Suku Bunga KUR Jadi 7 Persen Mulai Tahun Ini *It has been legitimated that the KUR Interest Rate becomes 7 Percent, starting this year*
64	Senin, 29 Januari 2018 *Monday, January 29, 2018*	Bantu Kembangkan Usaha Kerakyatan, Jamkrindo Bentuk Penjaminan Risiko dan Kegagalan Finansial UMKM *Help Develop Community Business, Jamkrindo Forms Guarantee of Risk and Financial Failure of MSMEs*
65	Senin, 29 Januari 2018 *Monday, January 29, 2018*	Dirut Perum Jamkrindo Randi Anto Gelorakan Semangat Perubahan *President Director of Perum Jamkrindo, Randi Anto, sparks the Spirit of Change*

Selain itu, Perusahaan juga melakukan hubungan media melalui *media gathering*, kunjungan media dan *editor luch meeting*. Perusahaan menjadikan *media gathering* sebagai agenda rutin tahunan perusahaan. Pada tahun 2018 Perusahaan mengundang sebanyak 50 media nasional baik cetak, *online* maupun televisi untuk hadir dalam acara *media gathering* yang diadakan di Hotel The Green Peak Hotel & Convention,Cisarua Bogor tanggal 3-4 November 2018. Selain itu Pada tahun 2018 juga Perusahaan melakukan kunjungan ke redaksi Harian Kompas pada tanggal 22 Mei 2018 yang diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, dan *Editor Luch Meeting* dilakukan pada 05 Juli 2018 dan dihadiri 25 Redaktur Media.

In addition, the Company conducts media relations through media gatherings, media visits, and editorial meetings. The Company makes media gathering an annual routine agenda of the Company. In 2018 the Company invited 50 national media be it print, online, and television to attend the media gathering held at The Green Peak Hotel & Convention Hotel, Cisarua Bogor on 3-4 November 2018. In addition, in 2018 the Company also visited the editorial of Kompas Daily on May 22, 2018, which was received directly by the Editor in Chief of Kompas Budiman Tanuredjo, and the Editor's Luch Meeting was held on July 5, 2018, and was attended by 25 Media Editors.

RAGAM MEDIA KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

VARIETIES OF MEDIA TO STAKEHOLDERS

Below is a table that describes the variety of communication media used by the Company to deliver data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements of the Company.

Kepada *Target*	**Bentuk-bentuk Media** *Types of Media*
Regulator *Regulators*	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan *Quarterly and Annual Report*
Pemilik Modal *Equity Owner*	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan *Quarterly and Annual Report*
Lembaga Publik *Public Institutions*	Press Release
Konsumen *Consumer*	Leaflet, Booklet, Baliho, Banner, Spanduk, Media Sosial, Video PSA, Mobil Layanan *Leaflets, Booklets, Billboards, Banners, Sign Posts, Social Media, PSA Videos, and Car Services*
Karyawan *Employees*	Majalah Internal *Internal Magazine*
Perusahaan Sejenis Lainnya *Other Similar Companies*	Leaflet, Booklet, Baliho, Banner, Spanduk, Media Sosial, Video PSA *Leaflets, Booklets, Billboards, Banners, Sign Posts, Social Media, PSA Videos*
Mitra Kerja dan Rekanan *Partners and Work Partners*	Laporan Tahunan, Leaflet, Booklet *Annual Report, Leaflet, Booklet*
Organisasi Profesi *Professional Organizations*	Laporan Tahunan, Leaflet, Booklet *Annual Report, Leaflet, Booklet*
MasyarakatUmum *General Public*	Leaflet, Booklet, Baliho, Banner, Spanduk, Media Sosial, Video PSA, Mobil Layanan *Leaflets, Booklets, Billboards, Banners, Sign Posts, Social Media, PSA Videos, and Car Services*

* Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.
** The Company's website is not included in the various media above, because it is open, unlimited and can be accessed by anyone.*

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

Kode Etik atau *Code of Conduct* adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budaya Perusahaan serta Standar Etika Perusahaan yang membentuk dan mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Perusahaan. *Code of Conduct* berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perusahaan dan entitas anak, serta menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Tujuan penerapan Kode Etik dilakukan untuk:

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika usaha dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Perum Jamkrindo yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perum Jamkrindo.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Perum Jamkrindo.
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Perum Jamkrindo terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

The Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Company's culture and the Company's Ethical Standards that shape and direct behavior in accordance with the Company's culture and values. The Code of Conduct applies to all individuals acting on behalf of the Company and subsidiaries, as well as being a reference for all stakeholders who conduct business transactions with the Company.

The purpose of implementing the Code of Ethics is:

1. *As a guideline for implementing business ethics standards and behavioral guidelines for all Jamkrindo Company Staff that must be adhered to in daily interactions with all parties.*
2. *As an ethical foundation in thinking and making decisions related to Perum Jamkrindo.*
3. *As a means to create and support a healthy, positive work environment and display ethical behaviors of all Perum Jamkrindo's Staff.*
4. *As a means to increase the sensitivity of the Company and the employees of Perum Jamkrindo to the values of business ethics by developing discussions or developing a discourse on ethics.*

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN SEBAGAI LANDASAN UTAMA

Penerapan kode etik yang dimiliki Perusahaan merupakan sebuah upaya untuk dapat mensinergikan seluruh organ Perusahaan untuk dapat bersama-sama mengemban visi, misi dan budaya Perusahaan. Sebagai tujuan akan perjalanan Perusahaan di masa yang akan datang, visi berperan penting dalam menempatkan seluruh Insan Perum Jamkrindo untuk dapat mewujudkan visi tersebut melalui misi yang telah ditetapkan, serta internalisasi budaya perusahaan hingga mampu membentuk prilaku setiap Insan Perum Jamkrindo.

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE AS THE MAIN PLATFORM

The implementation of the Company's code of conduct is an effort to synergize all of the Company's organs to be able to jointly carry out the Company's vision, mission, and culture. As the future of Corporate goal, the vision plays an important role in reminding all employees of Perum Jamkrindo to be able to realize this vision through a predetermined mission, as well as internalizing the corporate culture so as to be able to shape the behavior of every Perum Jamkrindo employees.

VISI/ *VISION*

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian nasional.

To Become the Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development.



MISI/ *MISSION*

Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan "Tridharma Jamkrindo" sebagai berikut:

1. Dharma Pertama
   Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis umKm dan Koperasi.
2. Dharma Kedua
   Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas.
3. Dharma Ketiga
   Memberikan manfaat bagi stakeholders sesuai prinsip bisnis yang sehat.

The Company's vision is translated into missions which are called "Tridharma Jamkrindo" and they contain the followings:

1. *First Dharma*
   To undertake guarantee activities for MSME and Cooperative business development.
2. *Second Dharma*
   To provide extensive and quality services.
3. *Third Dharma*
   To provide benefits to stakeholders in accordance with sound business principles.

KREDO PERUSAHAAN/ *COMPANY CREED*

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan.
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan.
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan.
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasaan pelanggan.

1. *Trusted in carrying out a guarantee business.*
2. *Responsive to changes in the business environment.*
3. *Excellent and Professional in service.*
4. *Healthy in corporate governance.*
5. *Leading in providing customer satisfaction.*



BUDAYA PERUSAHAAN/ ***CORPORATE CULTURE***

"TRUST"

- **TERPERCAYA**
  Bekerja jujur dengan integritas tinggi
- **RESPONSIF**
  Tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap stakeholder
- **UNGGUL**
  Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan
- **SEHAT**
  Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat
- **TERKEMUKA**
  Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan

- ***TRUSTED***
  Work honestly with high integrity
- ***RESPONSIVE***
  Responsive to the needs of business partners and all stakeholders
- ***SUPERIOR***
  Always improve professionalism for the achievement of added value for the company
- ***HEALTHY***
  Always work diligently to support healthy corporate governance
- ***LEADING***
  Always at the forefront in providing service and performance to become a leader in the guarantee industry



PEDOMAN PERILAKU PERUM JAMKRINDO: PENETAPAN DAN ISI

Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggung jawaban dan kewajaran. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi).

PERUM JAMKRINDO'S CODE OF CONDUCT: ESTABLISHMENT AND CONTENT

The Company is committed to implementing Good Corporate Governance by adhering to the principles of transparency, fairness, accountability, and independence so that it can support Government policies in the development of Small and Medium Micro Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). This was stated in the Joint Decree of the Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo No. 93 / Kep-Dir / XII / 2012-KEP-07 / DP JAMKRINDO / XII / 2012, December 13, 2012, concerning the Code of Conduct.

Company behavior standards are transparency and disclosure of information on independence, accountability, and fairness. The application of business ethics standards is the way the Company does business in order to realize its commitment to:

1. *Place customer satisfaction as a top priority.*
2. *Implement Ethical Standards in all business activities based on the principles of Good Corporate Governance.*
3. *Always be proportional in the framework of providing high-quality services to the business of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives).*

4. Memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.

4. *Treat all stakeholders as partners.*
5. *Serve and strive to anticipate stakeholder needs properly.*

Isi Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan antara lain adalah:

The contents of the Company's Code of Conduct include:

A. Etika Perusahaan

A. Company Ethics

Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan
1. Perusahaan harus memperlakukan stakeholder secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak stakeholder.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi stakeholder.
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.
4. Perusahaan harus memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada stakeholder.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan stakeholder dengan baik.

Company Ethics with Stakeholders
The company must treat stakeholders properly and fairly by fulfilling stakeholder rights.
1. *The Company must improve performance and maintain a positive image in order to increase value for stakeholders.*
2. *The Company must maintain the confidentiality of information and data.*
3. *The Company must ensure the provision of non-misleading information to stakeholders.*
4. *The Company must serve and strive to anticipate stakeholder needs properly.*

Etika Perusahaan dengan Karyawan
1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.
2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Kayawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan.
3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.
4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.
5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.
6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan mengizinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.

Company Ethics with Employees
1. *The Company must prioritize the health and safety of its employees, and improve the quality and welfare of the employees with the fulfillment of employee rights proportionally so that employees are expected to show maximum performance.*
2. *The company provides equal employment opportunities to all employees regardless of their background, ethnicity, religion, gender, age, disability, or other special conditions which are protected by laws and regulations.*
3. *The Company provides equal opportunities for employee self-development.*
4. *The Company gives awards based on employee competency and performance.*
5. *The Company creates a conducive and productive work environment, communication and work relations with superiors, subordinates, and colleagues.*
6. *The Company must respect human dignity without regard to differences in ethnic background, religion, gender, age, or any disabilities or other special circumstances that are protected by legislation.*
7. *The Company must uphold the general principles of humanity, rights, and obligations based on applicable laws and regulations.*
8. *The Company allows employees to carry out their outdoor activities outside the Company for social activities, professional membership, associations or similar groups.*

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (*xssssssd8*) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Company Ethics with Goods and Services Providers

1. *The Company treats all suppliers of goods or services, which include the procurement processes, in accordance with business principles that are sound, open, impartial based on applicable regulations.*
2. *The Company must conduct procurement processes in a transparent and accountable manner based on applicable regulations with reference to the principles of effectiveness, efficiency, and economics.*
3. *The Company uses a provider of goods and services based on written documents.*
4. *The Company must maintain the confidentiality of information and documents for the procurement of goods and services in accordance with applicable laws and regulations.*
5. *The company does not commit corruption, collusion, and nepotism in the procurement of goods and services.*

Etika Perusahaan dengan Pesaing

1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.
4. Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.

Etika Perusahaan dengan Pesaing

1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.
4. The Company does not conduct cooperation without acceptable and reasonable reasons.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

1. Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
2. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
3. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku.

Company Ethics with the Government

1. *The Company must comply with the prevailing laws and regulations.*
2. *The Company must establish good relations and communication with the Government.*
3. *The Company must support Government programs in accordance with the applicable laws and regulations.*

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

1. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak asasi manusia.
3. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Perusahaan mengoptimalkan penyaluran programprogram tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
5. Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Company Ethics with the Community

1. *The Company maintains a clean and healthy environment.*
2. *The Company supports social, cultural, traditional, religious and human rights activities.*
3. *The Company participates in the economic empowerment of the surrounding community.*
4. *The Company optimizes the distribution of corporate social responsibility programs to the community (through the Partnership and Community Development Program).*
5. *The Company does not take actions that lead to discrimination of the community based on ethnicity, religion, and race.*

Etika Perusahaan dengan Media Massa
1. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
2. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

Company Ethics with Mass Media
1. *The Company must provide relevant information.*
2. *The Company makes mass media a partner in creating conducive cooperation based on mutual respect and mutual benefits.*
3. *The Company receives and follows up proportionally against constructive criticisms conveyed through mass media.*

B. Standar Perilaku Insan Jamkrindo

B. Standards of Behavior of Jamkrindo Individuals

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi
1. Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.
2. Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Personal Responsibility and Professionalism
1. *All Company Personnel must comply with all Company provisions regarding staffing.*
2. *All Company Personnel must understand and comply with all provisions whether issued by the Company or the regulator in accordance with their duties and responsibilities.*
3. *All Company Personnel must be dedicated, loyal, enterprising and meticulous in their work and always strive to improve their knowledge and ability to carry out their duties well.*
4. *All Company Personnel must put the Company's interests above personal or group interests.*

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif
1. Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.
5. Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor) :
   a. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkotika atau obat-obatan terlarang.
   b. Mengkonsumsi minuman beralkohol.
   c. Melakukan semua bentuk perjudian,
   d. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.

Creation of a Conducive Work Environment
1. *All Company Personnel must be polite in communicating.*
2. *All Company Personnel must uphold ethical values in work relationships with superiors, subordinates, and co-workers.*
3. *All Company Personnel must avoid actions and utterances that contain elements of harassment, humiliation, ridicule, slander, and humiliation*
4. *All Company Personnel are prohibited from carrying out verbal, visual and physical sexual abuse and acts of abuse including harassment of privacy and status.*
5. *All Company Personnel are prohibited (both in the office and outside the office) to:*
   a. Use, own, distribute or sell narcotics or illegal drugs.
   b. Consume alcoholic beverages.
   c. Do all forms of gambling,
   d. Do all forms of crime.
6. *All Company Personnel must maintain a healthy environment.*
7. *All Company Personnel must make efficient and effective use of telephones and avoid using telephones for personal use in excess and respond to telephone calls at the first chance they get*

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
3. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
5. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
6. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan mark up harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak iain.
9. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

Avoiding All Conflicts of Interest and Their Potentials that Trigger Unhealthy and Dishonest Behavior

1. *All Company employees use their labor, thought and work capabilities for the benefit of the Company. Work or activities outside office hours can be carried out as long as they do not utilize the name and interests of the Company.*
2. *All Company Personnel who have been inactive or have resigned are prohibited from using any form of copyright, intellectual property, Company data and information, and conducting activities on behalf of the Company.*
3. *All Company Personnel may not invest Company funds in personal or group names.*
4. *All Company Personnel may not invest in Company funds by promising personal benefits with other parties.*
5. *All Company Personnel may not accept bribes or payments of any kind from parties who have a direct or indirect relationship with their positions or duties.*
6. *All Company Personnel may not accept and give gifts of any kind that are reasonably suspected to influence sound business decisions.*
7. *All Company Personnel are prohibited from providing goods and services that directly or indirectly sell goods, rights or services to the Company.*
8. *All Company Personnel are prohibited from marking up sales or purchase prices for personal or other parties' interests.*
9. *All Company Personnel are prohibited from using their positions to give preferential treatment to other parties.*

Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.
3. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Safeguard the Company's Assets, Wealth and Information

1. *All Company Personnel use Company assets only for the benefit of the Company and are not permitted for personal or group interests.*
2. *All Company Personnel must be responsible for protecting the Company's assets from theft, embezzlement, and misuse of assets in accordance with their respective authorities.*
3. *All Company Personnel must maintain data and information along with their devices in accordance with their authority so that they are not misused, damaged, stolen or not accessed by other irresponsible parties*
4. *All Company Personnel are not permitted to use the Company's name, logo, copyright, and various accessories for personal gain.*
5. *All Company Personnel must maintain Company internal information that is confidential and does not use it for personal interest, the interests of family, friends, or any groups.*
6. *All Company Personnel must write and provide reports and data correctly and honestly to interested parties in accordance with applicable laws and regulations.*

Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan

1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan insider trading guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (*money laundering*).
3. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat :
   a. Tidak mengatasnamakan Perusahaan,
   b. Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya,
   c. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan,
   d. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Compliance with Laws and Regulations

1. *All Employees of the Company are prohibited from conducting insider trading activities to obtain personal benefits and acting as brokers, seekers or other intermediaries for personal or group interests in transactions conducted by the Company.*
2. *All Company Personnel are prohibited from engaging in investments and/or practices of money laundering.*
3. *All Company Personnel are prohibited from making a notion, engagement, a direct or indirect statement indicating that the Company has an attachment to any political party. The Company gives freedom to all Company Personnel to channel their political aspirations with the following conditions:*
   a. *It is not on behalf of the Company,*
   b. *They do not use Company assets in their political activities,*
   c. *They do not make any contribution on behalf of the Company,*
   d. *If an employee holds a position in a Political Party and will soon become a candidate/member of the legislature, he/she is considered resigning from the Company.*
4. *All Company Personnel are prohibited from carrying out acts of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).*

INTERNALISASI DAN PENEGAKAN CODE OF CONDUCT

Internalisasi *Code of Conduct* memiliki tujuan untuk menciptakan kesepahaman dan komitmen bersama dari segenap jajaran di internal Perusahaan untuk dapat menaati dan menjalankan secara baik pedoman prilaku yang tertuang di dalamnya. Internalisasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dengan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi segenap insan Perusahaan dalam memperoleh informasi tersebut.

Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara seluruh insan perusahaan wajib menandatangani surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan seluruh insan Perusahaan wajib mengerti, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

INTERNALIZATION AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT

The internalization of the Code of Conduct has the aim of creating mutual understanding and commitment from all levels of the Company to be able to adhere to and carry out well the behavioral guidelines contained in it. The internalization was carried out through dissemination activities carried out thoroughly by providing the widest possible access for all Company personnel to obtain this information.

The enforcement of the Code of Conduct is carried out by means that all Company personnel is required to sign a Statement of Commitment to Comply with the Code of Conduct, and all Company personnel must understand, comprehend, and apply the Code of Conduct.

1. Saluran pengaduan
   a. Apabila ditemui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
   b. Permasalahan perilaku Dewan Pengawas dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Menteri.
   c. Permasalahan perilaku pegawai, penanganannya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
   d. Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan.
   e. Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.
2. Mekanisme Penanganan atas Laporan Pelanggaran Pedoman Prilaku
   a. Atasan langsung atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola penanganan atas laporan pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima melakukan identifikasi permasalahan analisis, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor.
   b. Hasil analisis tersebut apabila di pandang perlu dapat dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Penyebarluasan Etika Perusahaan
   Upaya sosialisasi dan penyebarluasan Etika Perusahaan secara merata kepada seluruh elemen Perusahaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:
   a. Pemberian sosialisasi, *training* dan seminar bagi karyawan
   b. Pemasangan banner maupun spanduk
   c. Rapat evaluasi kinerja
   d. Sosialisasi saat proses perekrutan

Proses sosialisasi juga dilakukan secara individu. Kepada setiap insan Perusahaan diwajibkan untuk membaca Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan, dan menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi *Code of Conduct*.

1. *Complaint channel*
   a. *If there is a violation of the Code of Conduct in the Company, every Company Personnel is obliged to immediately report in writing by stating the identity of the whistleblowers to the HR Division*
   b. *For behavior problem of the Supervisory Board and the Board of Directors, the handling is carried out by the Minister.*
   c. *For problems with employee behavior, the handling is carried out by direct supervisor in stages according to the applicable mechanism.*
   d. *For violation of the Code of Conduct in its relationship with the community, its handling still refers to the applicable staffing provisions in the Company.*
   e. *The Human Resources (HR) Division is obliged to respond immediately to any questions, notifications, and reports received proportionally.*
2. *Handling Mechanisms for Behavioral Guidelines Violation Reports*
   a. *The direct supervisor or work unit appointed to manage the handling of reports of violations identify problems of analysis, collect additional relevant information based on reports received, and keep the identity of the whistleblowers confidential.*
   b. *The results of the analysis, if needed, can be reported to the Board of Directors for further processing according to the applicable mechanism.*
3. *Dissemination of Company Ethics*
   The efforts to evenly disseminate Company Ethics to all elements of the Company are carried out through various strategies, including:
   a. *Providing information, training, and seminars for employees*
   b. *Installation of banners*
   c. *Performance evaluation meeting*
   d. *Dissemination during the recruitment process*

The dissemination process is also carried out individually. Every Company employee is required to read the Company's Code of Conduct, and sign a statement of commitment form to comply with the Code of Conduct.

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
UNTUK MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:
NPP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Status Kepegawaian	:

Menyatakan bahwa, saya :

1. Telah menerima Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
2. Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan Perusahaan dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
4. Siap menerima konsekuensi dan sanksi dari Perusahaan apabila melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini;
5. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada Divisi yang membidangi bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pejabat yang telah ditunjuk untuk memonitor penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, apabila menemui permasalahan dan/atau pelanggaran dalam melaksanakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Jakarta, September 2016

(Nama)

4. Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Etika Perusahaan
   Adanya sanksi terhadap pelanggaran etika Perusahaan berfungsi untuk menjamin tegaknya aturan yang dibuat demi terciptanya kedisiplinan dan profesionalisme bagi seluruh Insan Perusahaan. penegakan dan pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali. Adapun sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.
5. Sanksi Administrasi
   Setiap karyawan wajib:
   - » mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi Pegawai BUMN;
   - » mentaati semua peraturan perusahaan, baik berupa perintah maupun larangan secara tertulis atau secara lisan dalam batas pengertian yang layak dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan; dan
   - » menunaikan tugas dan kewaiiban dengan sebaikbaiknya sesuai dengan penugasan oleh Direksi dan atasan masing-masing pegawai dengan mementingkan kepentingan Perusahaan.

Pemberian sanksi administrasi bagi karyawan Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Direksi Nomor : 19/ Per-Dir/III/2006 tentang Disiplin Pegawai. Sanksi administrasi diberikan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun terakhir:

4. *Enforcement and Sanctions for Violating Company Ethics*
   The sanctions for violations of the Company's ethics serve to ensure the establishment of rules that are made in order to create discipline and professionalism for all Company Personnel. The enforcement and sanctions for violations committed in full without exception. The sanctions given are in the form of warning letters.

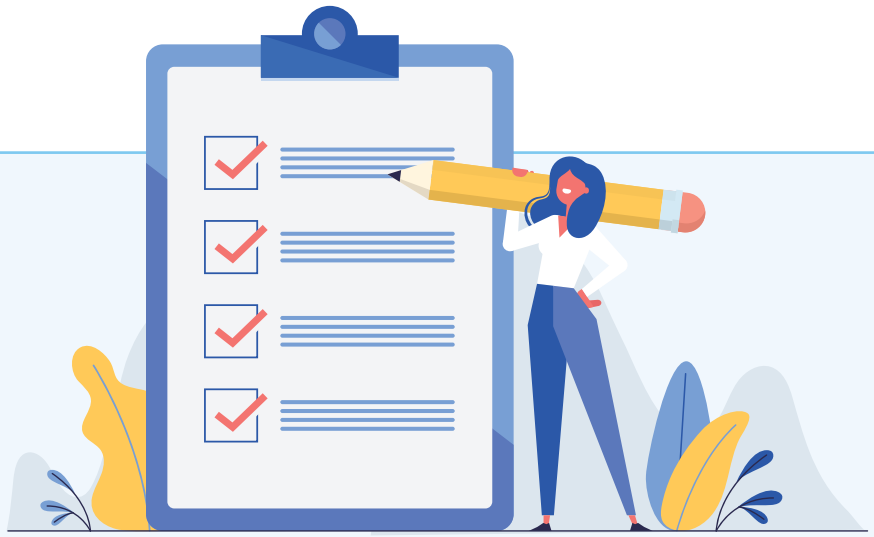
5. *Administrative Sanctions*
   Every employee must:
   - » *comply with all provisions and regulations stipulated by the Government for SOEs Employees;*
   - » *obey all Company regulations, either in the form of written or oral orders or prohibitions within the limits of proper understanding and not contrary to the norms of decency; and*
   - » *fulfill the duties and obligations as best as possible in accordance with the assignment by the Board of Directors and the superiors of each employee with an emphasis on the interests of the Company.*

The provision of administrative sanctions for employees of Perum Jamkrindo refers to the Directors' Regulation Number: 19 / Per-Dir / III / 2006 concerning Employee Discipline. Administrative sanctions are given to employees who commit indisciplinary actions.

As a realization of the enforcement of the Code of Conduct, the following are the details of sanctions imposed regarding the enforcement of the Code of Ethics for the past 3 (three) years:

Jenis Sanksi *Types of Sanction*	**2018**	**2017**	**2016**
Teguran *Oral Reprimand*	1	-	-
Peringatan 1 *First Warning Letter*	3	2	-
Peringatan 2 *Second Warning Letter*	2	1	-
Peringatan 3 *Third Warning Letter*	-	-	-
Pengunduran Diri *Resignation*	1	1	-
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *Termination*	-	-	2

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL



Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam meminimalisir benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, Perusahaan mengupayakan penerapan pengendalian gratifikasi dari pihak lain. Pedoman Kebijakan Gratifikasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Edaran Direksi No. 9/SE/4/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Perum Jamkrindo.

One form of the Company's commitment in minimizing conflicts of interest, as well as abuse of authority and position, the Company implement supervision of gratuities from other parties. The Corporate Gratification Policy Guidelines have been approved by the Board of Directors Circular No. 9 / SE / 4 / IX / 2014 dated September 24, 2014, concerning Gratification Control Policies at Perum Jamkrindo.

Pentingnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan Kode Etik seperti yang telah dijelaskan di atas berhubungan dengan pembatasan secara definitif antara gratifikasi atau hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain, dengan suap yang erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan telah mendefinisikan secara jelas tentang gratifikasi yang tergolong suap, dan pemberian diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta kaidah yang berlaku.

The importance of controlling gratuities in the implementation of the Code of Ethics as agreed above is related to the definitive agreement between gratuities or gifts of any kind given by other parties, with a purpose to bribe, and is related to the abuse of authority and position. The Company Gratification Control Policy has clearly agreed on gratuities classified as bribery, and the granting is allowed insofar as they are not in contradicition with the applicable regulations, rules, and agreements.

Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan tidak hanya mengupayakan penerapan prinsip GCG berbasis pengelolaan korporasi yang sehat, namun kebijakan tersebut juga memberikan landasan bagi setiap insan Perum Jamkrindo untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjauhkan perilaku insan Perum Jamkrindo dari kecenderungan praktik korupsi.

Through this policy, the Company does not only strive for the adoption of GCG principles based on sound management, but also provide a foundation for every employee of the Perum Jamkrindo to not to abuse their authority and leadership and to avoid practice of corruption of Perum Jamkrindo's employees.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICIES

Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, kickback atau pun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara.

The Law of the Republic of Indonesia stipulates that paying or offering payments or even accepting bribes, kickbacks, or other forms of corrupt payments is a criminal offense that can make the Company and individual employees subject to fines and/or prison sentences.

Undang-undang anti korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan undang-undang anti korupsi terkait.
Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini:
1. Suap, Kickback atau Pembayaran Korup Lain
2. Pembayaran Fasilitasi
3. Hubungan dengan Pihak Ketiga

This anti-corruption law, including the Regulations on the Practice of Corruption, makes payments, offers, or the acts of giving of anything of value to Company officials, with the aim of influencing the actions or decisions of officials, as a criminal offense. The purpose of this Policy is to ensure that all employees, officials and directors, and all subsidiaries and Company affiliates comply with the Company's Anti-Corruption Policy and related anti-corruption laws.

This policy includes the following:
1. *Bribes, Kickbacks or Other Corrupt Payments*
2. *Facilitation Payments*
3. *Relations with Third Parties*

Kementerian BUMN telah meluncurkan *roadmap* BUMN Bersih sebagai aksi anti korupsi dilingkungan kementerian BUMN dan perusahaanperusahaan negara, dan itu juga berlaku di Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara.

The Ministry of SOEs has launched a Clean SOEs roadmap as an anti-corruption action within the state-owned ministry and state-owned enterprises, and that also applies at Perum Jamkrindo as one of the state-owned enterprises.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK
INFORMATION ON FUNDS FOR POLITICAL ACTIVITIES

Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Secara tegas, Perusahaan tidak mengizinkan insan Jamkrindo menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Standar Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan.

The Company has a policy to prohibit the involvement of individuals on behalf of the Company in political activities, including giving donations for political purposes. Strictly speaking, the Company does not allow Jamkrindo personnel to use any facilities or resources for political campaign purposes, political fundraising, or for the purpose of political participation, as stipulated in the Company's Code of Conduct.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Adapun tujuan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yaitu:

1. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan dalam rangka menjaga serta melidungi aset/kepentingan perusahaan.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif dalam penyelesaian laporan-laporan pelanggaran secara internal maupun eksternal melalui jalur hukum (bila dianggap perlu), melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut.
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk perlindungan pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
5. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat satu pelanggaran dan mengurangi potensi kerugian bagi perusahaan.
6. Memberikan masukan untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.
7. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
8. Meningkatkan budaya kepatuhan bagi semua insan Perum Jamkrindo.
9. Meningkatkan reputasi Perusahaan.
10. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

The Whistleblowing System is a system that can be used as a medium for reporting witnesses to convey information about indicated violations occurring within the Company based on evidence that can be accounted for and good intentions for the benefit of the Company. The purpose of the violation reporting system (Whistleblowing System) is:

1. *To ensure the implementation of an effective violation complaint resolution mechanism.*
2. *To create a conducive climate by strengthening the supervision and encouraging reporting on matters that can lead to financial and non-financial losses, which include matters that can damage the Company's image in order to protect and safeguard the Company's assets/interests.*
3. *To facilitate the top management to deal quickly and effectively in resolving violation reports internally and externally through legal channels (if deemed necessary), protect the confidentiality of the identity of the whistleblowers, and maintain the confidentiality and security of the information.*
4. *To build a policy and infrastructure for the protection of whistleblowers from replies from internal and external parties.*
5. *To ensure the availability of an early warning system mechanism for potential problems due to a violation and to reduce the potential loss for the Company.*
6. *To provide input to have an in-depth look at further critical areas and work processes that have weaknesses in internal controls and to design corrective actions as needed.*
7. *To ensure the availability of ways of delivering important and critical information to the Company to those who must immediately handle it safely.*
8. *To improve the culture of compliance for all employees of Perum Jamkrindo.*
9. *To improve the reputation of the Company.*
10. *To become one of the efforts in disclosing various problems that are not in accordance with the applicable ethical standards in the Company.*

PENETAPAN PEDOMAN WBS PERUSAHAAN

Lingkup pengaduan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh Tim WBS adalah:

1. Tindakan kecurangan/*fraud*;
2. Penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kepentingan pribadi atau diluar kepentingan Perusahaan;
3. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
4. Penyelewengan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
5. Benturan kepentingan;
6. Pelanggaran peraturan dan kode etik perusahaan; dan

Perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan Pengelola WBS adalah:

1. Pengelola WBS beranggotakan Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Divisi Hukum & Kepatuhan dan Kepala Divisi MSDM yang bersifat *ex-officio*.
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern merangkap sebagai Ketua Pengelola WBS.
3. Tugas dan tanggung jawab Pengelola WBS meliputi:
   a. Memproses tindaklanjut pelaporan pelanggaran yang masuk dalam WBS.
   b. Menyampaikan laporan kegiatan WBS secara periodik kepada Direktur Utama.
   c. Melakukan verifikasi terhadap substansi laporan pelanggaran, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan terjadinya pelanggaran.
   d. Melakukan pemantauan atas pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait.
   e. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk.
   f. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor.
   g. Mengusulkan tindak lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran setelah dilakukan verifikasi atas laporan tersebut sesuai dengan jenis laporan pelanggaran.

THE ESTABLISHMENT OF COMPANY WBS GUIDELINES

The scope of complaints of violations that will be followed up by the WBS Team are:

1. *Acts of fraud;*
2. *Misuse of office/authority for personal interests or outside the interests of the Company;*
3. *Acceptance and/or giving of gratification;*
4. *Misappropriation and/or misuse of Company assets;*
5. *Conflict of interest;*
6. *Violations of company rules and code of ethics; and*

Acts of the WBS Manager that violate the laws and regulations are:

1. *The WBS manager consists of the Head of the Internal Audit Unit, Head of the Legal & Compliance Division and the ex-officio Head of HRM Division.*
2. *The Head of the Internal Audit Unit concurrently as Chairperson of the WBS Manager.*
3. *The Duties and responsibilities of the WBS Manager include:*
   a. Process follow-up reporting of violations included in the WBS.
   b. Periodically submit WBS activity reports to the President Director.
   c. Verify the substance of the violation report, to find and collect the evidence needed to ensure the occurrence of violations.
   d. Monitor the provision of protection to the Whistleblower with the related unit.
   e. Monitor the handling of settlement of incoming reports.
   f. Carry out a whistleblower protection program in accordance with Company policies, especially on aspects of confidentiality and the guarantee of the whistleblower's security.
   g. Propose follow-up actions on complaints of violations after verification of the report in accordance with the type of violation report.

SARANA PELAPORAN

1. Perusahaan menyediakan sarana pelaporan untuk menyiapkan pengaduan pelanggaran melalui media di bawah in:
   a. Surat Tertulis : PO BOX 107123 JKP 10610
   b. SMS dan Whatsapp : 08111717123
   c. Email : wbs@jamkrindo.co.id
2. Pelaporan pengaduan pelanggaran sebaiknya dilengkapi informasi awal/bukti/dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan petunjuk mengenai pelanggaran yang terjadi, sehingga dapat dijadikan bahan tindak lanjut.
3. Laporan pengaduan pelanggaran sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
   a. Identitas pelapor (Tidak wajib);
   b. Bentuk pelanggaran atau penyimpangan;
   c. Kapan dan di mana terjadinya (lokasi, kejadian/ transaksi);
   d. Siapa saja yang diduga terlibat (nama, jabatan/unit kerja);
   e. Kerugian (materil dan non materil) akibat pelanggaran atau penyimpangan; dan
   f. Ada tidaknya pihak yang mengetahui pelanggaran atau penyimpangan tersebut.
4. Pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran dengan sarana yang telah ditetapkan dalam mekanisme WBS dapat memperoleh informasi progres penanganan tindak lanjut atas informasi pelanggaran yang disampaikan dalam WBS.

REPORTING FACILITIES

1. *The Company provides a means of reporting of violations through the media below:*
   a. Written Letter: PO BOX 107123 JKP 10610
   b. SMS and Whatsapp: 08111717123
   c. Email: wbs@jamkrindo.co.id
2. *Reporting of violation should be supplemented with initial information/evidence/documents that contain initial indications that can be accounted for and provide guidance on violations that occur so that they can be used as material for following up.*
3. *Reports of violations contain at least the following information:*
   a. Identity of the whistleblower (Not obligatory);
   b. Form of violation or deviation;
   c. The time and place of the violations (location, event/ transaction);
   d. Who is suspected to be involved (name, position/work unit);
   e. Material and non-material losses due to violations or irregularities; and
   f. Whether there is another party who knows about the violation or deviation.
4. *The whistleblower who submits a violation report with the means set out in the WBS mechanism can obtain information on the progress of follow-up actions on the violation submitted in the WBS.*

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN DAN PELAPORAN

1. Pelapor menyampaikan laporan pengaduan pelanggaran melalui sarana WBS yang telah disediakan oleh Perusahaan.
2. Setiap laporan pelanggaran yang masuk WBS akan diverifikasi dan diidentifikasi lebih lanjut yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal yang cukup dan memadai.
3. Setiap laporan yang masuk WBS akan dilaporkan secara periodik kepada Direktur Utama, dari hasil laporan tersebut Direktur Utama menetapkan rekomendasi tindakan (langkah-langkah) lebih lanjut.
4. Apabila rekomendasi tersebut pada angka 3 diperlukan audit khusus dan atau investigasi lebih lanjut, akan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

THE MECHANISM FOR HANDLING VIOLATION AND REPORTING

1. *The whistleblower submits a complaint report of violations through the WBS facility provided by the Company.*
2. *Any reports of violations that enter the WBS will be verified and identified further which aims to gather sufficient and adequate initial evidence.*
3. *Each report submitted to the WBS will be reported periodically to the President Director. From the results of the report, the President Director sets out recommendations for further actions (steps).*
4. *If the recommendation in number 3 requires a special audit and/or further investigation, it will be carried out by the Internal Audit Unit.*

5. Dalam melakukan investigasi dan/atau audit khusus, Satuan Pengawasan Intern dapat dibantu oleh unit kerja lainnya.
6. Dalam melakukan investigasi Satuan Pengawasan Intern menerapkan prinsip pelaksanaan investigasi sebagai berikut:
   a. Investigasi bertujuan untuk mengumpulkan semua bukti yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya.
   b. Proses investigasi terbuka terhadap kemungkinan reviu secara administratif, operasional dan yudisial. Rekam jejak investigasi (*audit trail*) harus terdokumentasi sehingga dapat ditinjau ulang terkait dengan sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.
   c. Pengelolaan proses investigasi harus cukup fleksibel. Komunikasi yang digunakan harus jelas dan tidak mengambang, pendekatan secara multi disiplin kalau perlu harus digunakan. Dalam hal beberapa tahapan prosedur tidak dapat dilaksanakan, mungkin perlu dicari solusi yang kompromistis dan dapat diterima oleh semua pihak, tanpa kehilangan sasaran dan tujuan. Dalam kondisi semacam ini mungkin diperlukan pendapat ahli dari eksternal.
7. Petugas pengelola WBS memastikan semua laporan pelanggaran ditangani dengan baik, serta memastikan laporan pelanggaran sudah ditindaklanjuti.
8. Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, Direksi, Dewan Pengawas dan Organ Pendukungnya disampaikan kepada Direktur Utama.
9. Petugas pengelola WBS mendokumentasikan seluruh proses pengelolaan pelanggaran tersebut secara rapi, aman dan rahasia.
10. Petugas pengelola WBS membuat laporan tindak lanjut atas laporan pengaduan.
11. Petugas pengelola WBS membuat catatan penerimaan dan status pengaduan pelanggaran memuat sekurangnya:
    a. Nomor registrasi;
    b. Tanggal penerimaan;
    c. Pihak penerima;
    d. Deskripsi singkat; dan
    e. Status penyelesaian yang disertai penjelasan.

5. *In conducting special investigations and/or audits, the Internal Audit Unit can be assisted by other work units.*
6. *In investigating, the Internal Audit Unit applies the following principles:*
   a. *The investigation aims to collect all available evidence so that a conclusion can be drawn whether the report of the violation is true.*
   b. *The investigation process is open to possible administrative, operational, and judicial reviews. The audit trail must be documented so that it can be reviewed in relation to the objectives to be achieved and also important decisions taken during the process.*
   c. *Management of the investigation process must be flexible enough. The communication used must be clear and stable, a multi-disciplinary approach must be used, if necessary. In the event that several stages of the procedure cannot be implemented, it may be necessary to find a compromising solution that can be accepted by all parties, without losing the goals and objectives. In such conditions, external expert opinion may be needed.*
7. *WBS management officers ensure that all violation reports are handled properly, and ensure that violation reports have been followed up.*
8. *Reports of violations committed by employees, directors, supervisory boards and supporting organs are submitted to the President Director.*
9. *The WBS management officer documents the entire process of managing the violation in a neat, safe and confidential manner.*
10. *WBS management officers make follow-up reports on complaints reports.*
11. *The WBS management officer keeps a record of receipt and status of the violation complaint containing at least:*
    a. *Registration number;*
    b. *Receipt date;*
    c. *Recipient;*
    d. *Short description; and*
    e. *Settlement status accompanied by an explanation.*

PELANGGARAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN

1. Pelanggaran yang diduga mengandung unsur melawan hukum, tindak pidana atau pelanggaran perdata dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang menangani sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
3. Apabila informasi yang disampaikan tidak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan maka laporan tersebut dianggap selesai.
4. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan melalui kebijakan Direksi.

VIOLATIONS, SANCTIONS, AND AWARDS

1. *Violations that are alleged to contain elements against the law, criminal acts, or civil violations can be forwarded to the party authorized to handle it in accordance with the provisions of the applicable legislation.*
2. *The form of sanctions against the Reported Party that has been proven to have committed a violation will be determined in accordance with the applicable rules and regulations in the Company.*
3. *If the information submitted is not proven after the inspection is carried out, the report is deemed complete.*
4. *The Company can reward whistleblowers for violations that can be proven through the policies of the Board of Directors.*

RUANG LINGKUP WBS

Lingkup pengaduan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh WBS adalah:

1. Tindakan kecurangan/*fraud*;
2. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang untuk kepentingan pribadi atau di luar kepentingan Perusahaan;
3. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
4. Penyelewengan dan/atau penyalahgunaan asset Perusahaan;
5. Benturan kepentingan;
6. Pelanggaran peraturan dan kode etik Perusahaan; dan
7. Perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.

THE SCOPE OF WBS

The scope of complaints of violations that will be followed up by the WBS are:

1. *Acts of Fraud;*
2. *Abuse of Position/Authority for personal or outside interests of the Company;*
3. *An act of cceptance and/or giving of gratification;*
4. *Misappropriation and/or misuse of Company assets;*
5. *Conflict of interest;*
6. *Violation of Company rules and code of ethics; and*
7. *Acts which violate laws and regulations.*

KOMITMEN PERUM JAMKRINDO DAN KARYAWAN

Penerapan WBS sebagai perwujudan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan WBS diharapkan akan mendorong budaya keterbukaan dan kejujuran dan mengurangi budaya diam membiarkan terjadinya pelanggaran.

Untuk mendukung agar pelaksanaan proses manajemen risiko Perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka Perusahaan akan melakukan pengembangan lingkungan internal yang mendukung penerapan WBS, meliputi antara lain komitmen dan dukungan Manajemen, penetapan kebijakan penerapan WBS, pembentukan fungsi atau unit yang bertugas untuk

PERUM JAMKRINDO AND EMPLOYEES' COMMITMENT

The application of the WBS is a manifestation of consistent and sustainable implementation of Good Corporate Governance. The application of the WBS is expected to encourage a culture of openness and honesty, and reduce the culture of silence in allowing violations to occur.

To support the implementation of the Company's risk management process, the Company will develop an internal environment that supports the implementation of the WBS, including, among others, management commitment and support, policy of WBS implementation, establishment of functions or units tasked with coordinating and supervising

mengoordinir dan melakukan supervisi atas pengelolaan WBS, pengembangan kompetensi serta pengembangan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung.

Seluruh insan Perum Jamkrindo memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menerapkan WBS dan mensosialisasikan kebijakan WBS kepada Karyawan di unit kerja yang dipimpinnya.

managing the WBS, and development of competencies and other supporting policies.

All employees of Perum Jamkrindo have the responsibility and obligation to implement the WBS and disseminate the WBS policy to employees in the work units they lead.

SOSIALISASI WBS

WBS DISSEMINATION

Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi Whistleblowing System (WBS) No: 04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) SPI melakukan sosialisasi WBS terhadap *auditee* bersamaan dengan pelaksanaan *general* audit, dengan rincian sebagai berikut:

Since the issuance of the Board of Directors Regulation on Whistleblowing System (WBS) No: 04 / Per-Dir / IV / 2018 dated April 10, 2018, concerning Guidelines for Management of the Whistleblowing System (WBS) Reporting System, the internal audit unit has disseminated the WBS to the auditee together with the general audit, with details as follows:

No	Tempat Sosialisasi *Location of Dissemination*	Tanggal Sosialisasi *Date of Dissemination*	Tim Pelaksana *Executors*
1	Kantor Pusat *Head Office*	29 Juni 2018 *June 29, 2018*	Untung Heri S Kepala SPI *Head of the Internal Audit Unit SPI*
2	Kantor Cabang Ambon *Ambon Branch Office*	02 Juli 2018 *July 2, 2018*	Karinu Aji Wira Kusuma Kabag Wil. 2 *Region 2 Section Head* Aldhy Haryono Fachrial Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Andreas Theodorus M Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Faisal Arief Sentosa Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
3	Kantor Cabang Palu *Palu Branch Office*		Agus Mirazul Fajar Kabag Wil. 3 *Region 3 Section Head* Asep Ginanjar Cahya Gumilar Kasie SPI *Head of Internal Audit Section* Rinjani Yusni Maharjanti Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Laila Wijayanti Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*

No	Tempat Sosialisasi *Location of Dissemination*	Tanggal Sosialisasi *Date of Dissemination*	Tim Pelaksana *Executors*
4	Kantor Cabang Aceh *Aceh Branch Office*	02 Juli 2018 *July 2, 2018*	Irmatati Kabag Korporasi dan TI *Head of Corporate and IT Division* Muhammad Ilham Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Andi Aldino Chandra Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Muhammad Leonard Gustav Q Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
5	Kantor Cabang Yogyakarta *Yogyakarta Branch Office*		Kartono Kabag PSKA *Head of PSKA Division* Laurdes Sinurat Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Andik Sugiarto Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Arif Syachroni Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
5	Kantor Cabang Makassar *Makassar Branch Office*	19 Juli 2018 *July 19, 2018*	Irmatati Kabag Korporasi dan TI *Head of Corporate and IT Division* Muhammad Ilham Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Laila Wijayanti Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Emmerisa br Sembiring Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
6	Kantor Cabang Semarang *Semarang Branch Office*		Karinu Aji Wira Kusuma Kabag Wil. 2 *Region 2 Section Head* Aldhy Haryono Fachrial Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Arif Syachroni Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Didit Suharyono Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*

No	Tempat Sosialisasi *Location of Dissemination*	Tanggal Sosialisasi *Date of Dissemination*	Tim Pelaksana *Executors*
7	Kantor Cabang Surabaya *Surabaya Branch Office*	19 Juli 2018 *July 19, 2018*	Agus Mirazul Fajar Kabag Wil. 3 *Region 3 Section Head* Asep Ginanjar Cahya Gumilar Kasie SPI *Head of Internal Audit Section* Andreas Theodorus M Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Andi Aldino Chandra Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
8	Kantor Cabang Gorontalo *Gorontalo Branch Office*	01 Agustus 2018 *August 1, 2018*	Asep Ginanjar Cahya Gumilar Kasie SPI *Head of Internal Audit Section* Michael Ranap Simanjuntak Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
9	Kantor Cabang Mataram *Mataram Branch Office*	02 Agustus 2018 *August 2, 2018*	Andi Aldino Chandra Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Arif Syachroni Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
10	Kantor Cabang Tanjung Pinang *Tanjung Pinang Branch Office*		Agus Mirazul Fajar Kabag Wil. 3 *Region 3 Section Head* Laurdes Sinurat Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Faisal Arief Sentosa Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
11	Kantor Cabang Palopo *Palopo Branch Office*		Muhammad Leonard Gustav Q Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Andreas Theodorus Mokodaser Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*

No	Tempat Sosialisasi *Location of Dissemination*	Tanggal Sosialisasi *Date of Dissemination*	Tim Pelaksana *Executors*
12	Ternate	13 September 2018 *September 13, 2018*	Agus Mirazul Fajar Kabag Wil. 3 *Region 3 Section Head* Laurdes Sinurat Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Andik Sugiarto Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
13	Mamuju		Aditya Putra Darmawan Kabag Wil. 1 *Region 1 Section Head* M. Ilham Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Andi Aldino Chandra Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
14	Manokwari		Irmatati Kabag Korporasi dan TI *Head of Corporate and IT Division* Arif Syachroni Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Aldhy Haryono Fachrial Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
15	Pekanbaru	27 September 2018 *September 27, 2018*	Agus Mirazul Fajar Kabag Wil. 3 *Region 3 Section Head* Faoziah Ulfah Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* M. Ilham Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Faisal Arief Sentosa Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
16	Kupang		Aditya Putra Darmawan Kabag Wil. 1 *Region 1 Section Head* Aldhy Haryono Fachrial Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Andik Sugiarto Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Michael Ranap Simanjuntak Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*

No	Tempat Sosialisasi *Location of Dissemination*	Tanggal Sosialisasi *Date of Dissemination*	Tim Pelaksana *Executors*
17	Pontianak	27 September 2018 *September 27, 2018*	Irmatati Kabag Korporasi dan TI *Head of Corporate and IT Division* Laurdes Sinurat Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Faisal Arief Sentosa Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Emmerisa br Sembiring Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
18	Samarinda	17 Oktober 2018 *October 17, 2018*	Agus Mirazul Fajar Kabag Wil. 3 *Region 3 Section Head* M. Ilham Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Muhammad Leonard Gustav Q Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Faisal Arief Sentosa Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*
19	Kanwil V Semarang *Semarang Region V Office*	8 November 2018 *November 8, 2018*	Irmatati Kabag Korporasi dan TI *Head of Corporate and IT Division* Andreas Theodorus M Staf SPI *Internal Audit Unit Staff* Faisal Arief Sentosa Staf SPI *Internal Audit Unit Staff*

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perlindungan kepada pelapor tindak pelanggaran pada prinsipnya adalah pemenuhan hak dan rasa aman kepada pelapor dan atau keluarga pelapor terkait dengan kemungkinan ancaman/tindakan yang dihadapinya akibat penyampaian/pengungkapan laporan pelanggaran. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The protection of whistleblowers, in principle, is the fulfillment of rights and security to the whistleblowers and/or the family of the whistleblowers related to the possibility of the threats/actions they face as a result of submitting/disclosing reports of violations. Protection is given while taking into account the principle of confidentiality and related provisions that apply in the Company.

1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya

2. Menjamin perlindungan segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaannya pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yaitu:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penndaan kenaikan pangkat atau penurunan jabatan;
   c. Penundaan kenaikan gaji berkala dan atau tunjangan;
   d. Pengenaan sanksi baik langsung maupun tidak langsung;
   e. Tindakan fisik seperti pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
   f. Intimidasi, pemaksaan atau menjadi korban;
   g. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran menyampaikan pengungkapan dengan memenuhi kriteria berikut:
1. Beriktikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tidak mengharapkan imbalan materi dan atau popularitas;
2. Informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan adalah yang telah terjadi dan dapat dipercaya;
3. Hal-hal yang terjadi sesuai dengan inforamsi dan atau pelanggaran yang disampaikan/dilaporkan dan dapat dipercaya.

Pemberian perlindungan kepada pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila terbukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya serta apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor ternyata palsu/fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

1. Semua pelanggaran yang dilaporkan dan diversifikasi ditangani dengan baik.
2. Pelanggaran yang berulang dan sistemik dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

1. *The confidentiality of the identity of the whistleblowers is guaranteed*
2. *The Company ensures the protection of all forms of threats, intimidation or unpleasant actions from any party as long as the whistleblowers keep the confidentiality of the violations that are reported to any party.*
3. *Protection against adverse treatment, namely:*
   a. *Unfair dismissal;*
   b. *Decisions of promotion or demotion;*
   c. *Postponement of periodic salary increases and/or benefits;*
   d. *Direct or indirect impositions of sanctions;*
   e. *Physical actions such as harassment or all forms of discrimination;*
   f. *Intimidation, coercion, or victimization;*
   g. *A harmful personal record in his personal data file.*

Protection for whistleblowers of violations is carried out if reporting violations convey disclosures fulfilling the following criteria:
1. *Commit to both moral and ethical impulses and do not expect material rewards and/or popularity;*
2. *Information and/or violations submitted are those that have occurred and can be trusted;*
3. *Occurring matters are in accordance with the information and/or violations submitted/reported, and can be trusted.*

Provision of protection to the whistleblowers can be rejected or stopped if it is proven that the whistleblowers do not carry out his obligations in maintaining the confidentiality of his identity and report and if it is later proven that the violation report submitted by the reporter turns out to be false/defamatory, or has a deviant purpose.

THE MECHANISM FOR THE SUBMISSION OF VIOLATION REPORT

1. *All reported violations and diversifications are handled properly.*
2. *Repeated and systemic violations are reported to relevant officials who have the authority to make improvements.*

3. Tim pengelola WBS harus mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas selaku penanggung jawab pemantauan sistem pelaporan pelanggaran.
4. Mekanisme pelaporan pelanggaran:

3. *The WBS management team must have access to direct reporting to the President Director with a copy to the Chairperson of the Supervisory Board as the person in charge of monitoring the violation reporting system.*
4. *The violation reporting mechanism is as follows:*

Bila Pelanggaran dilakukan Oleh: *In the event that the violation is conducted by:*	**Maka Laporan Pelanggaran diserahkan ke:** *The reports will be submitted to:*	**Penanganan Lebih Lanjut oleh:** *Follow-up Actions will be carried out by:*
Karyawan *Employees*	Direktur Utama *President Director*	Tim Pengelola WBS *WBS Team personnels*
Personel Tim Pengelola WBS *WBS Team personnels*	Direktur Utama *President Director*	Direksi Investigator Auditor Eksternal yang independen *Directors Investigators Independent External Auditors*
Anggota Direksi *Members of the BoD*	Dewan Pengawas *Supervisory Board*	Direksi Investigator Auditor Eksternal yang independen *Directors Investigators Independent External Auditors*
Anggota Dewan Pengawas dan organ pendukungnya *Members of the Board of Supervisors and its supporing organs*	Direktur Utama *President Director*	Direksi Investigator Auditor Eksternal yang independen *Directors Investigators Independent External Auditors*
Anggota Dewan Pengawas, Organ Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan Karyawan *Members of the Supervisory Board, Organ of the Supervisory Board, Members of the Board of Directors and Employees*	Tidak dapat diselesaikan secara internal *Cannot be resolved internally*	Penegak hukum yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau penyidik. *Law enforcers such as the police, prosecutors, corruption eradication commission (KPK), or investigators.*

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Dalam rangka mengelola pelaksanaan pelaporan pelanggaran di Perusahaan, Perum Jamkrindo membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berdasarkan Keputusan Direksi No: 33/Kep-Dir/III/2015 tanggal 11 Maret 2015. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai berikut:

1. Tugas:

THE TEAM THAT MANAGE THE COMPLAINTS

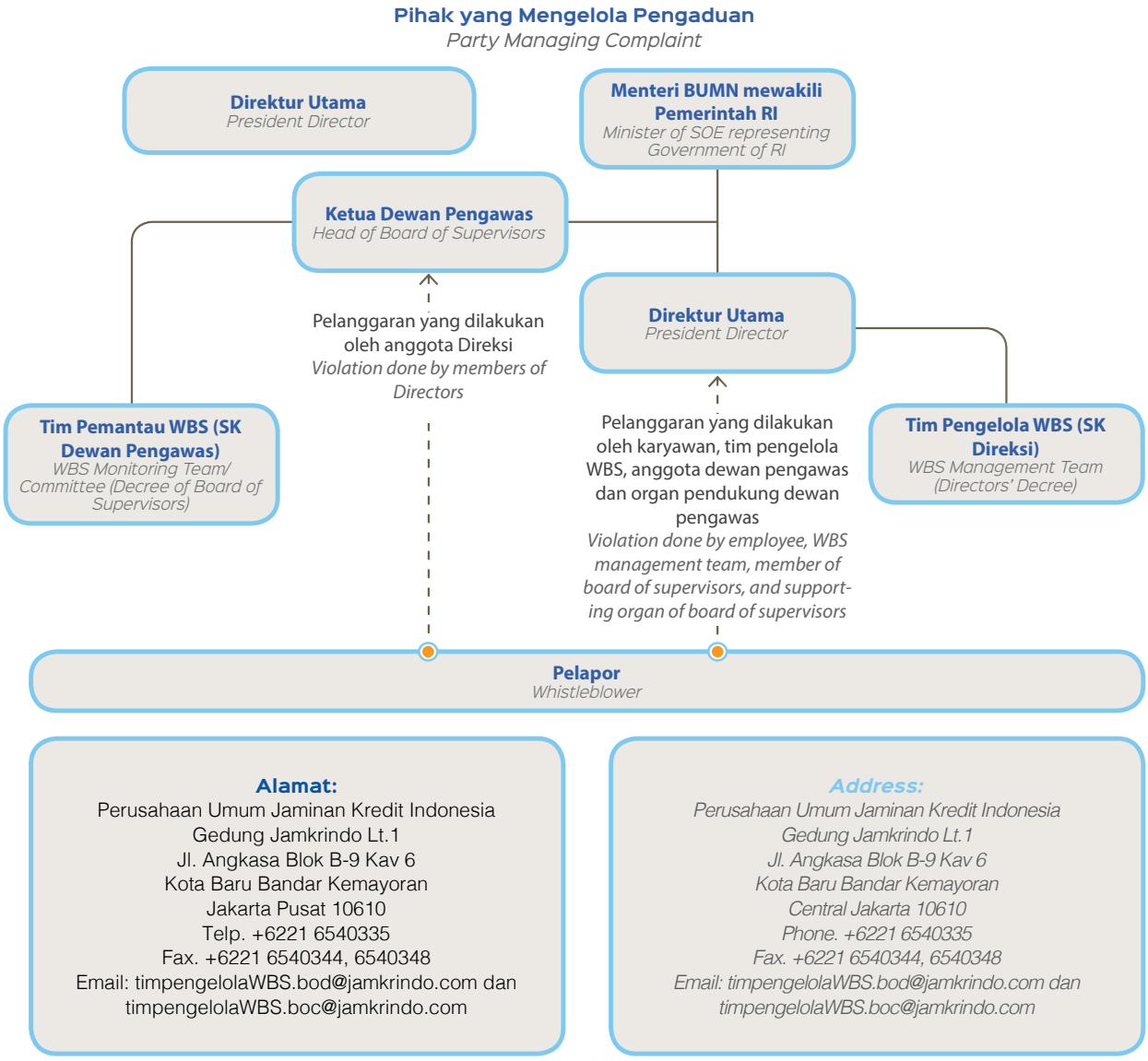
To manage the implementation of violation reporting in the Company, Perum Jamkrindo forms a Whistleblowing System (WBS) Team based on Directors Decree Nor: 33 / Kep-Dir / III / 2015 dated March 11, 2015. The duties and responsibilities of the WBS Team are as follow:

a. Mengelola Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
b. Mengoordinasikan penanganan tindaklanjut atas penerimaan pelaporan pelanggaran, menyeleksi dan memproses laporan pelanggaran tanpa membuka identitas pelapor.
c. Melakukan investigasi terhadap substansi laporan pelanggaran, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan terjadinya pelanggaran.
d. Menyampaikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada Direktur Utama guna mendapat keputusan.
e. Mengoordinasikan pemberian perlindungan terhadap pelapor dengan unit terkait.
f. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk.
g. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap keefektifan pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

2. Tanggung jawab:
a. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor.
b. Memberikan usulan pengelolaan laporan pelanggaran kepada Direktur Utama.
c. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangannya.
d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

1. Duties:
a. Manage the Whistleblowing System.
b. Coordinate the handling of follow-up on violation reporting, select and process reports of violations without disclosing the identity of the whistleblowers.
c. Investigate the substance of the violation report, to find and collect the evidence needed to ensure the reported violations occur.
d. Submit recommendations for sanctions for violations committed to the President Director to get a decision.
e. Coordinate the provision of protection for the whistleblower with related units.
f. Monitor the handling of the settlement of incoming reports.
g. Evaluate and improve actions on the effectiveness of the Whistleblowing System.

2. Responsibilities:
a. Carry out a whistleblower protection program in accordance with Company policies, especially on aspects of confidentiality and guarantee of the whistleblower's security.
b. Propose management of violation reports to President Director.
c. Establish follow-up actions on reports, especially reports for which follow-up decisions are within their authority.
d. Perform other actions needed in the context of the implementation of Whistle-Blowing System.



Alamat:
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
Gedung Jamkrindo Lt.1
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav 6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Telp. +6221 6540335
Fax. +6221 6540344, 6540348
Email: timpengelolaWBS.bod@jamkrindo.com dan timpengelolaWBS.boc@jamkrindo.com

Address:
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
Gedung Jamkrindo Lt.1
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav 6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Central Jakarta 10610
Phone. +6221 6540335
Fax. +6221 6540344, 6540348
Email: timpengelolaWBS.bod@jamkrindo.com dan timpengelolaWBS.boc@jamkrindo.com

SALURAN PENGADUAN WBS

Perusahaan menyediakan sarana pelaporan untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui media dibawa ini:

a. Surat tertulis : PO BOX 107213 JKP 10610
b. SMS dan Whatsapp : +62811 1717 123
c. Email : wbs@jamkrindo.co.id

Pelaporan pengaduan pelanggaran sebaiknya dilengkapi informasi awal/bukti/dokumen yang membuat indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan petunjuk mengenai pelanggaran yang terjadi sehingga dapat dijadikan bahan tindak lanjut.

Laporan pengaduan pelanggaran sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

a. identitas pelapor (tidak wajib);
b. bentuk pelanggaran atau penyimpangan;
c. kapan dan di mana terjadinya (lokasi, kejadian/ transaksi);
d. siapa saja yang diduga (nama, jabatan/unit kerja);
e. kerugian (materil dan non materil) akibat pelanggaran atau penyimpangan; dan
f. ada tidaknya pihak yang mengetahui pelanggaran atas penyimpangan tersebut.

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran dengan sarana yang telah ditetapkan dalam mekanisme WBS dapat memperoleh informasi progres penanganan tindak lanjut atas informasi pelanggaran yang disampaikan dalam WBS.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Mekanisme penanganan pelaporan atau pengaduan melalui sistem WBS adalah seperti skema di bawah ini:

WBS COMPLAINTS CHANNEL

The Company provides a means of reporting to submit complaints of violations through the following media:

a. Written letter: PO BOX 107213 JKP 10610
b. SMS and Whatsapp: +62811 1717 123
c. Email: wbs@jamkrindo.co.id

Reporting of complaints of violations should be supplemented with initial information/evidence/documents that provide accountability of the initial indication and provide guidance on violations that occur so that they can be used as follow-up material.

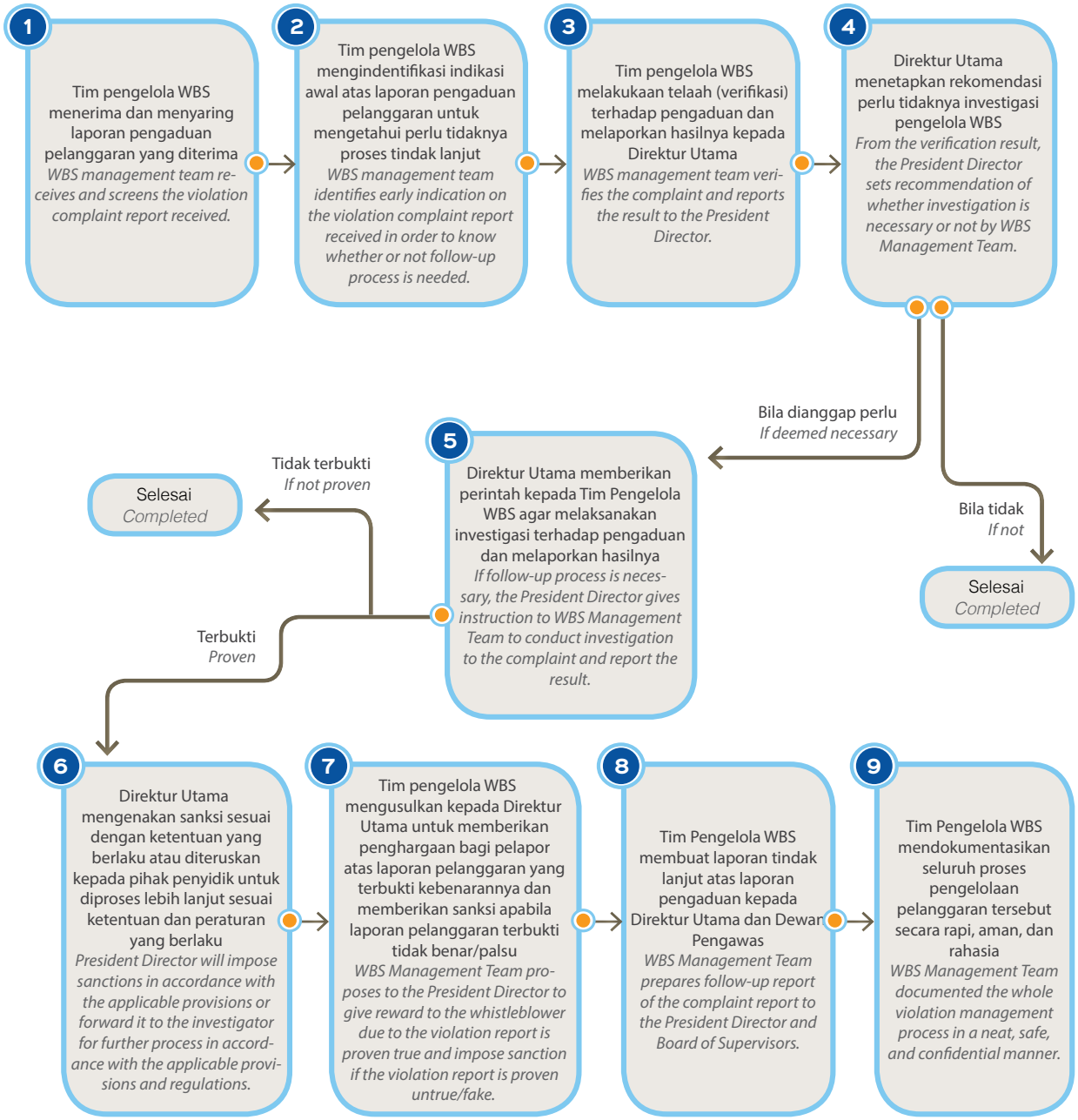
The report on complaints of violations contains at least the following information:

a. identity of the reporter (not obligatory);
b. form of violation or deviation;
c. the time and place of violations (location, event/ transaction);
d. violation suspects (name, position / work unit);
e. material and non-material loss due to violations or irregularities; and
f. whether or not there are parties who know about the violation.

1. The whistleblower can submit a violation report with the means set out in the WBS mechanism to obtain information on the progress of handling the follow-up of the violation submitted in the WBS.

MECHANISM OF HANDLING COMPLAINT

The mechanism for handling reports or complaints through the WBS system can be seen in the scheme below:


1
Tim pengelola WBS menerima dan menyaring laporan pengaduan pelanggaran yang diterima
WBS management team receives and screens the violation complaint report received.
2
Tim pengelola WBS mengindentifikasi indikasi awal atas laporan pengaduan pelanggaran untuk mengetahui perlu tidaknya proses tindak lanjut
WBS management team identifies early indication on the violation complaint report received in order to know whether or not follow-up process is needed.
3
Tim pengelola WBS melakukaan telaah (verifikasi) terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama
WBS management team verifies the complaint and reports the result to the President Director.
4
Direktur Utama menetapkan rekomendasi perlu tidaknya investigasi pengelola WBS
From the verification result, the President Director sets recommendation of whether investigation is necessary or not by WBS Management Team.
Bila dianggap perlu
If deemed necessary
Bila tidak
If not
Selesai
Completed
5
Direktur Utama memberikan perintah kepada Tim Pengelola WBS agar melaksanakan investigasi terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya
If follow-up process is necessary, the President Director gives instruction to WBS Management Team to conduct investigation to the complaint and report the result.
Tidak terbukti
If not proven
Selesai
Completed
Terbukti
Proven
6
Direktur Utama mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
President Director will impose sanctions in accordance with the applicable provisions or forward it to the investigator for further process in accordance with the applicable provisions and regulations.
7
Tim pengelola WBS mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan penghargaan bagi pelapor atas laporan pelanggaran yang terbukti kebenarannya dan memberikan sanksi apabila laporan pelanggaran terbukti tidak benar/palsu
WBS Management Team proposes to the President Director to give reward to the whistleblower due to the violation report is proven true and impose sanction if the violation report is proven untrue/fake.
8
Tim Pengelola WBS membuat laporan tindak lanjut atas laporan pengaduan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas
WBS Management Team prepares follow-up report of the complaint report to the President Director and Board of Supervisors.
9
Tim Pengelola WBS mendokumentasikan seluruh proses pengelolaan pelanggaran tersebut secara rapi, aman, dan rahasia
WBS Management Team documented the whole violation management process in a neat, safe, and confidential manner.

PROSES PENANGANAN DAN DATA PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Memorandum No. 362/M/1.2/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dari Kepala Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama tentang Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) periode bulan September 2018, tidak terdapat pengaduan pelanggaran yang dilaporkan kepada Tim Pengelola WBS baik melalui *email*, surat resmi melalui pos, SMS ataupun *whatsapp*.

HANDLING PROCESS AND DATA ON VIOLATION REPORT MANAGEMENT IN 2018

Based on Memorandum No. 362 / M / 1.2 / X / 2018 dated October 15, 2018, from the Head of the Internal Audit Unit to the President Director regarding the Whistleblowing System (WBS) Implementation Report of September 2018, there were no complaints of violations reported to the WBS Management Team either by email, official letter by post, SMS or WhatsApp.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF SUPERVISORS AND BOARD OF DIRECTORS

Dunia usaha, khususnya pada bidang penjaminan selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Terlebih bisnis ini merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan target pasar Usaha Mikro Kecil Menegah dan Koperasi. Atas dasar tersebut, dibutuhkan beragam kompetensi dan keahlian serta pengalaman di level manajemen Perusahaan khususnya pada Dewan Pengawas maupun Direksi Perusahaan agar senantiasa dapat menjawab tantangan dunia usaha dengan kebijakan-kebijakan strategisnya.

The business world, especially in the guarantee sector, is always experiencing a fairly dynamic development. Moreover, this business is one of the important sectors in driving the growth of the national economy with the target market of Small and Medium Enterprises and Cooperatives. On this basis, it requires a variety of competencies and expertise as well as experience at the level of the Company's management, especially the Board of Supervisors and Directors of the Company so that they can always answer the challenges of the business world with their strategic policies.

Perusahaan menilai bahwa keberagaman komposisi sangat diperlukan, meskipun regulasi dan Peraturan Perundang-undangan terkait belum mengatur hal tersebut. Keberagaman Komposisi pada Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman serta gender dapat memberikan berbagai macam sudut pandang terkait strategi pengelolaan Perusahaan agar menjadi lebih baik dan berkualitas.

The Company considers that the diversity of compositions is very necessary, even though it has not been regulated in the regulations and related laws. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors which is meant here refers to the diversity in academic qualifications, expertise, experience, and gender, which can provide a variety of perspectives related to the Company's management strategy to become better in quality.

Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan dirancang untuk dapat menciptakan iklim yang mendorong adanya partisipasi konkret seluruh pemangku kepentingan serta adanya keberagaman dalam susunan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi. Keberagaman ini diwujudkan melalui pembentukan komposisi Dewan Pengawas maupun Direksi yang memenuhi berbagai aspek yang diperlukan

Therefore, the implementation of corporate governance is designed to create a climate that encourages concrete participation of all stakeholders and the diversity in the composition of the Board of Supervisors and Directors. This diversity is realized through the formation of a composition of the Supervisory Board and the Board of Directors that meet the various aspects needed both in terms of academic qualifications,

baik dari segi kualifikasi akademis, keterampilan, usia serta atas dasar prinsip anti diskriminasi. Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan.

skills, age, and on the basis of anti-discrimination principles. The following is the diversity of the composition of each member of the Company's Board of Supervisors and Directors.

Nama *Names*	**Jabatan** *Position*	**Warganegara** *Citizenship*	**Kualifikasi Akademik** *Academic Qualifications*	**Usia** *Age*	***Gender***
Dewan Pengawas *Supervisory Board*					
Sri Mulyanto	Ketua *Chairperson*	Indonesia	Magister Kebijakan Ekonomi *Master in Economic Policy*	61	Laki-laki *Male*
Subandriyo	Anggota *Member*	Indonesia	Sarjana Pertanian *Bachelor of Agriculture*	63	Laki-laki *Male*
Noor Ida Khomsiyati	Anggota *Member*	Indonesia	Magister Manajemen *Master of Management*	48	Perempuan *Female*
Diah Natalisa	Anggota *Member*	Indonesia	Profesor Ilmu Ekonomi *Professor of Economics*	56	Perempuan *Female*
Direksi *Board of Directors*					
Randi Anto	Direktur Utama *President Director*	Indonesia	Magister Manajemen Perbankan *Master in Banking Management*	58	Laki-laki *Male*
Amin Masudi	Direktur Bisnis Penjaminan *Director of Business Guarantee*	Indonesia	Magister Manajemen Agribisnis *Master of Agribusiness Management*	46	Laki-laki *Male*
Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan *Director of Operations and Network*	Indonesia	Magister Manajemen *Master of Management*	48	Laki-laki *Male*
Sulis Usdoko	Direktur MSDM, Umum Dan Kepatuhan *Director of HRM, General Affairs, and Compliance*	Indonesia	Magister Ekonomi Manajemen *Master of Economics Management*	59	Laki-laki *Male*
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko *Director of Finance, Investment and Risk Management*	Indonesia	*Master of Science*	60	Laki-laki *Male*

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

STATE ADMINISTRATORS' WEALTH REPORT

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

BASIC PRINCIPLES OF STATE OFFICIALS WEALTH REPORTS

As an SOE owned by the State through the Government of Indonesia, the Company must comply with the prevailing laws and regulations. One form of legislation that is based on the spirit of eradicating corruption and internal deviations is the obligation of the State Officials Wealth Reports (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Officials' Assets as outlined in the LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decree No. KEP 07 / KPK / 02/2005 concerning Procedures for Registration, Inspection, and Announcement of State Officials Wealth Reports. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirms the authority of the Corruption Eradication Commission to implement measures or efforts to prevent corruption, among others, through registration and examination of State Officials Wealth Reports. In addition, Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism, mandate that each state officials must report and announce his Assets before and after assuming office and are willing to have his wealth examined before and after taking office. In Law No. 28/1999 Article 2 (7) and its explanation, it is described that the Board of Commissioners, Directors and other structural officials in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD) are included in officials with strategic functions.

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to realize State Officials who adhere to the general principles, free from the practices of corruption, collusion, and nepotism, as well as other despicable acts. Each State Officials is required to report its wealth through the LHKPN form provided by the KPK to be filled honestly, correctly, and completely, so that the Corruption Eradication Commission can analyze, evaluate, and assess the total amount, type and value of reported Assets, correctly, quickly, precisely , accurately and responsibly.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

Legal and Regulatory Bases in Implementing LHKPN in the Company

In implementing LHKPN, the Company considers a number of legal and regulatory bases as the basis for applying LHKPN within the Company. The legal bases are:

1. *Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.*
2. *Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.*
3. *Regulation of the Minister State-Owned Enterprises No. PER-01 / BUMN / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and its amendment.*
4. *Decree of Secretary of Minister of SOEs No. SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators/Parameters for Evaluating and Assessing GCG Implementation.*

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2018

TRANSPARENCY OF STATE OFFICIALS WEALTH REPORT IN 2018

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2018:

Below is the transparency of the submission of State Officials Wealth Report of Company officials in 2018:

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Perum Jamkrindo Tahun 2018
Disclosure of Submission of State Officials Wealth Report of Officials of Perum Jamkrindo in 2018

Pejabat *Officials*	**Jumlah Wajib Lapor** *Number of Mandatory Report*	**Jumlah yang Telah Melaporkan** *Number of Officials who have Reported*	
		Jumlah *Total*	**%**
Dewan Pengawas *Supervisory Board*	2	2	100%
Direksi *Directors*	5	5	100%
Organ Pendukung Dewan Pengawas *Supporting Organ of the Supervisory Board*	-	-	-
Manajer atau Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi *Manager or Officers with the Position One-Level under the Board of Directors*	89	89	100%
Jumlah ***Total***	**96**	**96**	**100%**

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Penjaminan Syariah yang diberikan Perusahaan, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan mengenai syariah, Perusahaan telah membentuk dan mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Keputusan Direksi No. 98/Kep-Dir/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

To optimize the supervisory function of the Sharia Guarantee provided by the Company, and to fulfill the regulatory requirements regarding sharia, the Company has established and appointed a Sharia Supervisory Board based on Decree of the Board of Directors No. 98 / Kep-Dir / VII / 2013 dated July 24, 2013, concerning Appointment of Sharia Supervisory Board of Perum Jamkrindo.

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan Keputusan Direksi No. 124/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Selain melegalisir pengangkatan Dewan Pengawas Syariah, keputusan Direksi tersebut mencakup uraian tentang tugas dan tanggung jawab.

GUIDELINES OF DUTIES IMPLEMENTATION

The duties of the Sharia Supervisory Board are based on the Decree of the Board of Directors No. 123 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016, and Decree of the Board of Directors No. 124 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016, concerning Appointment of Sharia Supervisory Board of Perum Jamkrindo. In addition to legalizing the appointment of the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors' decision includes a description of the duties and responsibilities.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

MEMBERSHIP STRUCTURE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The composition of the Company's Sharia Supervisory Board throughout 2018 is as follows:

Jabatan *Positions*	**Nama** *Names*	**Dasar Pengangkatan** *Bases of Appointment*	**Awal Jabatan** *Beginning Term of Office*	**Masa Akhir Jabatan** *Term of Office Ending*
Ketua *Chairperson*	Hasanudin	Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016/ *Directors Decree No. 123 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016*	1 Juli 2016 *July 1, 2016*	30 Juni 2019 *June 30, 2019*
Anggota *Member*	Muhammad Syakir Sula	Keputusan Direksi No. 123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016/ *Directors Decree No. 123 / Kep-Dir / X / 2016 dated October 14, 2016*	1 Juli 2016 *July 1, 2016*	30 Juni 2019 *June 30, 2019*

*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas Syariah, dalam bab Profil Perusahaan
** A brief profile of each member of the Sharia Supervisory Board can be seen in the Profile section of the Sharia Supervisory Board, in the Company Profile Chapter*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah atas semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan.
- Memberikan nasehat, saran atau pendapat kepada Direksi mengenai kesesuaian semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah.
- Memastikan semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
- Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan yang berkaitan dengan produk syariah pada Perusahaan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, serta memberikan tembusan kepada Direksi.
- Menghadiri pertemuan yang disepakati antara Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan di luar jadwal yang sudah ditentukan apabila diminta oleh Direksi.
- Memberikan dukungan secara maksimal demi tercapainya kemajuan Perusahaan khususnya Unit Kerja Penjaminan Syariah.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Di sepanjang tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah menggelar 4 (empat) kali. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Company's Sharia Supervisory Board are as follows:

- *Supervise and ensure compliance of all Company's products, operations, and policies with sharia principles.*
- *Provide advice, suggestions, or opinions to the Board of Directors regarding the suitability of all Company's products, operations and policies with sharia principles.*
- *Ensure that all Company's products, operations, and policies are in accordance with the fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulema (MUI DSN).*
- *Report business activities and developments relating to the Company's sharia products to the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulema (MUI DSN), at least once in 1 (one) year, and provide copies to the Directors.*
- *Attend an agreed meeting between the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors at least once in 1 (one) month according to the agreed upon schedule, and at any time if needed outside the specified schedule if requested by the Board of Directors.*
- *Provide maximum support for the achievement of the Company's progress, especially the Sharia Guarantee Unit.*

SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETING

In 2018, the Sharia Supervisory Board held 4 (four) meeting. The following are the minutes of the meeting and the attendance of the Sharia Supervisory Board:

Risalah Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah
Minutes of the Sharia Supervisory Board Internal Meeting

Tanggal dan Tempat *Date and Location*	**Nomor Risalah Rapat** *Number of Minute of Meeting*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*	**Peserta Rapat** *Meeting Attendees*	**Dewan Pengawas Syariah yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran** *Sharia Supervisory Board's Absentee and Reasons for Absence*
15 Januari 2018Ruang Rapat Lt.6 *January 15, 2018 6th Floor Meeting Room*	No.01/2.4/DPS/I/2018	Penyampaian Kinerja Divisi Penjaminan Syariah Tahun 2017 *Presentation of 2017 Sharia Guarantee Division Performance*	Prof. Hasanuddin Ir.H.M. Syakir Sula Sudibyo Utomo Barlianta Jumhari Sigit Ekaprilo Kabulangga Kusumah Ira Dwi Handayani	-
16 April 2018Ruang Rapat Lt.6 *April 16, 2018 6th Floor Meeting Room*	No.02/2.4/DPS/IV/2018	Penyampaian Kinerja Divisi Penjaminan Syariah TW II 2018 Konsultasi Penjaminan Produk Rahn Tasjily Tanah *Presentation of the Sharia Guarantee Division's Q2 Performance in 2018* Rahn Tasjily Land Product Guarantee Consultation	Prof. Hasanuddin Ir.H.M. Syakir Sula Sudibyo Utomo Barlianta Jumhari Sigit Ekaprilo Kabulangga Kusumah Ira Dwi Handayani	-
4 September 2018Ruang Rapat Lt.6 *September 4, 2018 6th Floor Meeting Room*	No.03/2.4/DPS/IX/2018	Penyampaian Kinerja Divisi Penjaminan Syariah TW II 2018 Konsultasi Penjaminan Produk PPR *Presentation of the Sharia Guarantee Division's Q2 Performance in 2018* *Consultation on PPR Product Guarantees*	Prof. Hasanuddin Ir.H.M. Syakir Sula Sudibyo Utomo Barlianta Jumhari Sigit Ekaprilo Kabulangga Kusumah Ira Dwi Handayani	-
Selasa, 13 November 2018Ruang Rapat Lt.6 *Tuesday, November 13, 2018 6th Floor Meeting Room*	No.04/2.4/DPS/XI/2018	Kinerja Desk Bisnis Penjaminan Syariah per September 2018 Pembahasan PP Jamkrindo 2018 Penjaminan Pembiayaan Anjak Piutang Aspek Syariah Penjaminan UUS Jamkrindo Sinergi dengan PT Jamkrindo Syariah *Sharia Guarantee Business Desk Performance as of September 2018* *Discussion on PP Jamkrindo 2018* *Guarantee of Factoring Financing* *Sharia Aspects of Jamkrindo's UUS Guarantee* *Synergy with PT Jamkrindo Syariah*	Prof. Hasanuddin Ir.H.M. Syakir Sula Sudibyo Utomo Barlianta Jumhari Sigit Ekaprilo Kabulangga Kusumah Ira Dwi Handayani	-

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat
Recapitulation and Level of Attendance of the Sharia Supervisory Board at the Meeting

Dewan Pengawas *Supervisory Board*	**Jumlah Wajib Rapat** *Total Required Meeting*	**Jumlah Kehadiran** *Number of Attendance*	**Jumlah Ketidakhadiran** *Number of Absence*	**% Kehadiran** *Attendance Percentage*
Hasanudin (Ketua Dewan Pengawas Syariah *Chairperson of the Sharia Supervisory Board)*	4	4	-	100,00%
Muhammad Syakir Sula (Anggota Dewan Pengawas Syariah *Member of the Sharia Supervisory Board)*	4	4	-	100,00%
Rata-rata *Average*				100,00%

KEBIJAKAN REMUNERASI

Kepada Dewan Pengawas Syariah, Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut:

REMUNERATION POLICY

To the Sharia Supervisory Board, the Company provides the following remuneration program:

Uraian *Description*	**Ketua DPS** *Chairperson of the Sharia Supervisory Board*	**Anggota DPS** *Member of the Sharia Supervisory Board*
Honorarium	12.650.000	11.385.000
Tunjangan Hari Raya per tahun (1x Honorarium) *Religious Holiday Allowance per year (one-time the amount of Honorarium)*	12.650.000	11.385.000

PRAKTIK BAD GOVERNANCE
BAD GOVERNANCE PRACTICE

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat sekitar area proyek serta lingkungan. Oleh karena itu, praktik *bad corporate governance* senantiasa mengancam dalam kegiatan operasional Perusahaan. Berikut disampaikan praktik *Bad Governance* sesuai dengan kebutuhan:

The Company realizes that the business activities that it carries out cannot be separated from direct or indirect interactions with the community around the project area and the environment. Therefore, corporate governance bad practices are always threatening in the Company's operational activities. The following is conveyed the practice of Bad Governance as needed:

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak mendapati adanya laporan dari pihak lain atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan dan perizinan.

REPORT ON THE ACTIVITIES OF COMPANIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

In 2018, the Company found no reports from other parties of the Company's activities that polluted the environment and licensing.

Pihak yang Berperkara *Disputing Parties*	**Pokok Perkara** *Case Principal*	**Status Perkara** *Case Status*	**Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Perusahaan** *Risk faced by the Company and Its Impact on the Company*	**Tindak Lanjut** *Follow-ups*
-	-	-	-	-

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai bukti kepatuhan Perusahaan atas kewajibannya terhadap pajak, Perusahaan telah berkontribusi pada negara melalui pajak tahun 2018 sebesar Rp97,88 miliar, dan hingga 31 Desember 2018, Perusahaan tidak terdapat satupun permasalahan terkait perpajakan. Adapun rincian dari kontribusi Perusahaan pada negara melalui pajak tahun 2018, adalah sebagai berikut:

DISCLOSURE OF FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

As proof of the Company's compliance with its tax obligations, the Company has contributed to the country through taxes in 2018 amounting to IDR 97.88 billion, and as of December 31, 2018, the Company did not have any tax-related issues. The details of the Company's contribution to the state through taxes in 2018 are as follows:

Kontribusi Kepada Negara *Contributions to the State*	**2018 (Rp*IDR*)**
Pajak Penghasilan: *Income Tax:*	
Pajak Penghasilan pasal 21 *Article 21 Income Tax*	30.355.835.801
Pajak Penghasilan pasal 22 *Article 22 Income Tax*	255.977.421
Pajak Penghasilan pasal 23 *Article 23 Income Tax*	2.680.305.065

Kontribusi Kepada Negara *Contributions to the State*	2018 (Rp*IDR*)
Pajak Penghasilan pasal 25 *Article 25 Income Tax*	8.063.600.333
Pajak Penghasilan pasal 26 *Article 26 Income Tax*	121.635.700
Pajak Penghasilan pasal 4 (2) *Article 4 (2) Income Tax*	1.857.763.136
Pajak Penghasilan pasal 29 *Income Tax Article 29*	45.937.895.254
Pajak Pertambahan Nilai *Value-Added Tax*	8.411.879.438
Pajak Bumi dan Bangunan *Property Tax*	195.204.496
Jumlah Kontribusi Kepada Negara ***Amount of Contributions to the State***	**97.880.096.644**

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTASI KEUANGAN (SAK)

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun 2018 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang "Penyajian Laporan Keuangan" dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, dengan hasil opini bahwa Laporan Keuangan Perusahaan "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material."

NON-COMPLIANCE WITH ANNUAL REPORT AND FINANCIAL REPORT PRESENTATION WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The Company's Financial Statements for 2018 have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by The Financial Accounting Standards Board - Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK - IAI) and applicable regulations. The financial statements are prepared in accordance with PSAK 1 (2009) regarding the "Presentation of Financial Statements" and have been audited by the Hertanto, Grace, and Karunawan Public Accounting Firm, with the unqualified opinion that the Company's financial statements "has been presented fairly, in all material respects."

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak terdapat kasus terkait dengan buruh atau karyawan yang dihadapi oleh Perusahaan.

CASES RELATED TO WORKERS AND EMPLOYEES

In 2018, the Company has no cases related to workers or employees.

PENGUNGKAPAN SEGMEN OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi. Sebagai Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan PSAK tersebut.

DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS IN FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2018, and 2017 have not applied the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 regarding Operating Segments. As a Public Company (Perum), the Company has no obligation to implement the PSAK.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Perusahaan menyajikan Laporan Tahunan Digital yang disajikan pada situs web Perusahaan sesuai atau sama dengan Laporan Tahunan dalam bentuk buku.

CONFORMITY TO THE ANNUAL REPORT AND DIGITAL ANNUAL REPORT

The Company presents the Digital Annual Report presented on the Company's website in accordance with or the same as the Annual Report in the form of a book.

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



Laporan Tahunan
Annual Report **2018**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL REESPONSIBILITY

Sebagai Agen Pembangunan yang selalu selaras dengan visi Pemerintah, Perum Jamkrindo memiliki peran untuk mewujudkan tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

As an Agent of Development that is always in line with the Government's vision, Perum Jamkrindo has a role to realize social responsibility through the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: SEBUAH PENDEKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN APPROACH



> Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan Perum Jamkrindo, salah satunya mengacu pada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial.
>
> *The implementation of Perum Jamkrindo's Corporate Social Responsibility program refers to, one of which, ISO 26000 on the Guidelines for Social Responsibility.*

Konsep *Sustainability Development*, atau Pembangunan Berkelanjutan yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people*, profit dan planet. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

The concept of Sustainability Development which has developed in various countries emerged as part of the wishes of many parties about the balance between people, profit, and the planet. This concept can only be realized through a strong commitment from all parties, especially business entities, which undeniably rely on profit and tend to ignore the long-term impact of the activities it carries out every day.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: SEBUAH PENDEKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN APPROACH

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibilty* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

In Indonesia, regulators have encouraged this harmonization effort through Corporate Social Responsibility (CSR), which requires business entities to have policies and programs related to their commitment to building sustainable relationships with stakeholders.

Organisasi Internasional untuk Standarisasi *(International Organization for Standardization*/ISO), sebuah badan penetap standar industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial *(Guidance on Social Responsibility)*. Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang bagaimana CSR dapat dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

The International Organization for Standardization (ISO), a world industrial and commercial standard-setting body, has released ISO 26000 on Guidance on Social Responsibility. Although it is not mandatory and is merely an appeal, this ISO provides patterns and modules that apply internationally about how CSR can be developed in an organization. In Indonesia, ISO 26000 has been ratified by the Government in 2010 and made the National Standard (SNI) in 2012.

Subjek Inti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan ISO 26000
Core Subjects of Corporate Social Responsibility Based on ISO 26000



KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP JAMKRINDO

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY AND GOVERNANCE IN JAMKRINDO



> Perum Jamkrindo berkomitmen untuk dapat tumbuh bersama dengan memenuhi hak dan harapan para pemangku kepentingan.
>
> *Perum Jamkrindo is committed to growing together by fulfilling the rights and expectations of stakeholders.*

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN KOMITMEN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu selaras dengan visi Pemerintah, Perum Jamkrindo memiliki peran untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial ke dalam seluruh lapisan khususnya terkait peran BUMN sebagai *Agen of Development* atau Agen Pembangunan. Kepada karyawan dan/atau pekerja sebagai pemangku kepentingan

PRINCIPLES, POLICIES AND COMMITMENTS FOR IMPLEMENTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As a State-Owned Enterprise (SOE) that is always in line with the Government's vision, Perum Jamkrindo has a role in realizing Social Responsibility in all layers specifically related to the role of SOEs as Agents of Development. To employees and/or workers

internal, Perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang dapat memberikan landasan bagi perkembangan diri setiap karyawan. Kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal, Perusahaan melakukan berbagai aktivitas pengembangan sosial kemasyarakatan khususnya melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

as internal stakeholders, the Company must pay attention to the welfare and work environment which can provide a foundation for the development of each employee. To the community as external stakeholders, the Company carries out various social development activities specifically through the implementation of the Partnership and Community Development Program.

Hal tersebut sesuai dengan visi Perusahaan "Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional", Perum Jamkrindo memiliki kewajiban moral untuk dapat mewujudkan keseimbangan antara pengelolaan usaha berbasis laba, kepentingan pemilik modal, hingga hubungan dengan pemangku kepentingan.

This is in accordance with the Company's vision of "Becoming the Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development". Thus, Perum Jamkrindo has a moral obligation to realize a balance between profit-based business management, the interests of capital owners, and relationships with stakeholders.

Pengelolaan usaha yang sehat, penerapan tata kelola organisasi yang baik yang didasarkan pada kepatuhan dan akuntabilitas, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan hak-haknya, hingga pertumbuhan Perum Jamkrindo bersama masyarakat Indonesia, tentu akan memperkuat posisi Perum Jamkrindo untuk dapat menjemput visi yang dicita-citakan.

Healthy business management, the application of good organizational governance based on compliance and accountability, the development of competencies in Human Resources (HR) and the fulfillment of their rights, and the growth of Perum Jamkrindo and the Indonesian people, will certainly strengthen the position of Perum Jamkrindo to achieve the aspired vision.

Aspek lain dari Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan Perusahaan adalah pertanggungjawaban pengelolaan operasional usaha kepada pemegang saham. Pentingnya pengelolaan usaha berbasiskan prinsip korporasi yang sehat menjadi salah satu kewajiban Perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Prinsip korporasi yang sehat tentunya harus dilandasi pada pengelolaan usaha dengan tujuan mencari laba; dan pengelolaan organisasi yang memiliki kaidah-kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang akan berujung pada akuntabilitas Perusahaan.

Another aspect of Corporate Social Responsibility carried out by the Company is the responsibility for managing business operations to shareholders. The importance of business management based on sound corporate principles is one of the Company's obligations to be able to account for its performance. The principle of a healthy corporation must be based on business management with the aim of making a profit; and management of organizations that have the principles of Good Corporate Governance, which will lead to the accountability of the Company.

Prinsip Korporasi yang Sehat
Principles of Healthy Corporations



Dikelola untuk mencari keuntungan
Managed for profit

Dikelola melalui kepatuhan dan akuntabilitas
Managed through compliance and accountability

Dengan memenuhi kewajiban terhadap aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perum Jamkrindo berupaya untuk memenuhi hak dan harapan pemegang saham dan para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa kepentingan mereka atas hubungan yang ada dengan Perusahaan dapat terpenuhi sehingga Perusahaan dan pemangku kepentingan dapat tumbuh bersama. Dalam pencapaian tujuan bersama demi menjaga keselarasan antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan, Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan pemangku kepentingan berpartisipasi melalui berbagai inisiasi yang telah dan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk menciptakan keberlanjutan yang dapat saling menopang antara Perusahaan dan pemangku kepentingan.

By fulfilling obligations towards the aspects of Corporate Social Responsibility, Perum Jamkrindo strives to fulfill the rights and expectations of shareholders and stakeholders and to ensure that their interests in the existing relationships with the Company can be fulfilled so that the Company and stakeholders can grow together. In achieving the common goal of maintaining harmony between the Company and stakeholders, the Company creates conditions that enable stakeholders to participate through various initiatives that have been and will be carried out by the Company to create sustainability that can support each other.

Keseimbangan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Balance in Sustainable Development



Keseimbangan seperti yang tergambar pada bagan di atas dapat diwujudkan melalui komitmen Perum Jamkrindo dalam melaksanakan program CSR ke dalam 4 (empat) aspek:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap lingkungan hidup.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap karyawan melalui Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap masyarakat melalui pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap konsumen.

The balance as illustrated in the chart above can be realized through the commitment of Perum Jamkrindo in implementing CSR programs in 4 (four) aspects:

1. *Corporate Social Responsibility for the environment.*
2. *Corporate Social Responsibility to employees through Employment, Occupational Safety, and Health.*
3. *Corporate Social Responsibility towards the community through social and community development and implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL).*
4. *Corporate Social Responsibility to consumers.*

DASAR HUKUM DAN REFERENSI PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN:
   a. Pasal 2 mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
   b. Pasal 88 mengemukakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pasal 15 (b)) yang berisi, "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat".
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

LEGAL BASIS AND REFERENCE FOR IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The basis for implementing the Corporate Social Responsibility program is based on several legal aspects, including:

1. *Law No. 19 of 2003 concerning SOEs:*
   a. *Article 2 states that one of the aims and objectives of the establishment of SOEs is to actively provide guidance and assistance to economically weak entrepreneurs, cooperatives and the community.*
   b. *Article 88 states that SOEs can set aside a portion of their net income for the purpose of fostering small businesses/ cooperatives as well as fostering communities around SOEs.*
2. *Law No. 32 of 1998 concerning the Development and Guidance of Small Businesses.*
3. *Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises.*
4. *Law No. 25 of 2007 concerning Investment (Article 15 (b)) which contains, "Every investor is obliged to carry out corporate social responsibility. "Corporate social responsibility" is the responsibility inherent in every investment company to continue to create a harmonious and balanced relationship in accordance with the environment, values, norms, and culture of the local community ".*
5. *Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety.*
6. *Law No. 8 of 1999 Consumer Protection.*
7. *Law No. 13 of 2003 concerning Employment.*
8. *Law No. 28 of 1999 concerning Clean State Administrators that are Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.*
9. *Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption.*
10. *Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of an Occupational Safety and Health Management System.*

11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
13. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
14. ISO 26000
    Telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada 2012, dengan 7 (tujuh) subjek inti yaitu:
    a. Tata kelola organisasi yang baik
    b. Penegakan hak asasi manusia
    c. Praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan
    d. Dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan
    e. Prosedur operasi yang wajar
    f. Tanggung jawab terhadap konsumen
    g. Pelibatan dalam pengembangan masyarakat
15. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP PERUM JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)*, yang salah satunya poinnya memuat tentang dukungan Perum Jamkrindo akan kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi), serta menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
16. Peraturan Direksi Perum Jamkrindo No. 29/Per-Dir/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Sistem dan Prosedur, Manual Akuntansi dan *Software* Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perum Jaminan Kredit Indonesia.

11. *Regulation of the State Minister of SOEs No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011, and its amendment No. PER-09 / MBU / 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.*
12. *Regulation of the State Minister of SOEs No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs, as last amended by PER-03 / MBU / 12/2016 concerning Amendments to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program.*
13. *Circular of the State Minister of SOEs No. SE-02 / MBU / Wk / 2012 dated February 23, 2012, concerning the Establishment of Accounting Guidelines for the Partnership Program and the State-Owned Enterprises' Community Development Program.*
14. *ISO 26000*
    This has been ratified by the Government in 2010 and made the National Standard (SNI) in 2012, with 7 (seven) core subjects, namely:
    a. Good organizational governance
    b. Enforcement of human rights
    c. Humanitarian and fair employment practices
    d. Impact of company activities on the environment
    e. Reasonable operating procedure
    f. Responsibility to consumers
    g. Engagement in community development
15. *Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jamkrindo No. 93 / Kep-Dir / XII / 2012-KEP-07 / DP PERUM JAMKRINDO / XII / 2012, December 13, 2012, concerning the Code of Conduct, one of which points is the support of Perum Jamkrindo for Government policy in the development of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives), and placing customer satisfaction as a top priority.*
16. *16. Regulation of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 29 / Per-Dir / VIII / 2008 dated August 25, 2008, concerning Systems and Procedures, Accounting Manual and Accounting Software of the Partnership and Community Development Program for Jamkrindo.*

UJI TUNTAS/*DUE DILLIGENCE* TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Sesuai arahan dari pemilik modal, Kementerian BUMN, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perum Jamkrindo melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan peraturan tersebut, Perum Jamkrindo berkewajiban untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan menyelenggarakan PKBL yang merupakan sebagian dari keseluruhan komitmen Perum Jamkrindo terhadap pembangunan keberlanjutan.

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan Perum Jamkrindo. Pelaksanaan program dilakukan bersama masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa dan Perguruan Tinggi, serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya setempat, kondisi geografis dan kepentingan operasional Perum Jamkrindo. Dalam evaluasi program, Perum Jamkrindo melakukan pengukuran atas efektifitasnya program yang dijalankan agar dapat memberikan manfaat nyata dan nilai tambah, baik bagi Perum Jamkrindo sendiri maupun pemangku kepentingan yang disasar oleh program.

DUE DILIGENCE AGAINST SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF COMPANY ACTIVITIES

According to the guidance of the capital owner, the Ministry of SOEs, which is contained in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs, as last amended by PER-03 / MBU / 12/2016 concerning Amendments to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State Owned Enterprise Partnership and Community Development Program, Perum Jamkrindo implements the Corporate Social Responsibility program through the Partnership and Community Development Program (PKBL) unit. Based on these regulations, Perum Jamkrindo is obliged to channel funds from the government and hold a Partnership and Community Development Program which is part of the overall commitment of Perum Jamkrindo's sustainability development.

The implementation of the Corporate Social Responsibility program is also carried out from planning to evaluation. Program planning must be made in accordance with the plans of the real needs of stakeholders by taking into account the capabilities of Perum Jamkrindo. The program is carried out with the community, as well as in coordination with local Regional Governments (Pemda), Non-Governmental Organizations (NGOs), mass organizations, Universities, and other relevant agencies, taking into account local social culture, geographical conditions and operational interests of Perum Jamkrindo. In program evaluation, Perum Jamkrindo measures the effectiveness of the programs implemented so that they can provide tangible benefits and added value, both for the Perum Jamkrindo itself and the stakeholders targeted by the program.

PEMANGKU KEPENTINGAN SIGNIFIKAN YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH ATAS DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

SIGNIFICANT STAKEHOLDERS AFFECTED BY OR AFFECTING THE COMPANY'S ACTIVITIES

Pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak dari kegiatan Perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

The significant stakeholders affected by or affecting the Company's activities are as follow:

Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)*	**Definisi** *(Definition)*	**Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan** *(Impact on Company's Activities)*
Karyawan *(Employee)*	Karyawan Tetap, Calon Karyawan, Prohire dan Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT). *(Permanent Employee, Prospective Employee, Prohire, and Fixed-term Employee)*	Kesinambungan Perusahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang. *(The sustainability of the company affects the welfare of employees in the long term.)*
Masyarakat *(Community)*	Masyarakat baik yang menggunakan produk perusahaan maupun tidak *(Communities who are using the Company's products or not)*	Kegiatan bisnis Perusahaan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas masyarakat baik melalui produk dan layanan yang diberikan maupun kegiatan PKBL yang bersentuhan langsung dalam membantu kebutuhan masyarakat. *(The Company's business activities have an impact on improving the quality of the community both through the products and services provided and Partnership and Community Development activities which directly helping the community's needs.)*
Konsumen *(Consumer)*	Masyarakat yang menggunakan produk-produk Jamkrindo *(People who use Jamkrindo products)*	Kualitas layanan yang diberikan terhadap konsumen akan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan layanan Perum Jamkrindo *(The quality of services provided to consumers will influence consumer loyalty in using the services of Perum Jamkrindo)*
Pemerintah *(The Government)*	Pemerintah Cq Kementerian Keuangan *(The government i.e. the Ministry of Finance)*	Kinerja keuangan Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran pajak yang diserahkan Perum Jamkrindo kepada Pemerintah sebagai penerimaan Negara yang digunakan untuk modal pembangunan *(The financial performance of the Company will have an impact on the amount of tax payments submitted by Perum Jamkrindo to the Government as State revenues used for development capital)*
Pemegang Saham *(Shareholders)*	Kementerian Badan Usaha Milik Negara *(Ministry of State-Owned Enterprises)*	Kinerja keuangan Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran dividen yang diserahkan kepada Kementerian BUMN selaku pemagang saham *(The financial performance of the Company will have an impact on the amount of dividend payments submitted to the Ministry of SOEs as shareholders)*

Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)*	**Definisi** *(Definition)*	**Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan** *(Impact on Company's Activities)*
Otoritas Jasa Keuangan *(Financial Service Authority)*	Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan regulasi dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan *(State institutions established under the law to regulate and supervise all activities in the financial services sector)*	Pengawasan oleh OJK berpengaruh pada penciptaan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat *(Supervision of the Financial Service Authority influences the activities in the financial services sector that are organized regularly, fairly, transparently and accountable, and are able to realize a financial system that grows sustainably and stable, and is able to protect the interests of consumers and society)*
Media Massa *(Mass Media)*	Media yang menyiarkan informasi Perusahaan baik cetak, elektronik maupun online *(The media that broadcasts the Company's information in print, electronic, and online)*	Kegiatan yang dilakukan Perusahaan di media massa akan berpengaruh terhadap literasi inklusi keuangan *(Activities carried out by the Company in the mass media will influence financial inclusion literacy)*

ISU-ISU PENTING SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Komitmen Perum Jamkrindo untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) secara optimal ditunjukkan dengan keberadaan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Sekretaris Perusahaan. Sebagai organ Perusahaan, Divisi ini memiliki kewenangan dalam membuat master-plan sekaligus melaksanakan program PKBL secara berkelanjutan. Hal yang tak kalah penting, untuk menopang kemandirian Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta menopang pemberdayaan kondisi sosial masyarakat, PKBL yang diselenggarakan oleh Perum Jamkrindo tidak terbatas pada kegiatan filantropi, namun meningkat pada level *corporate community development*.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

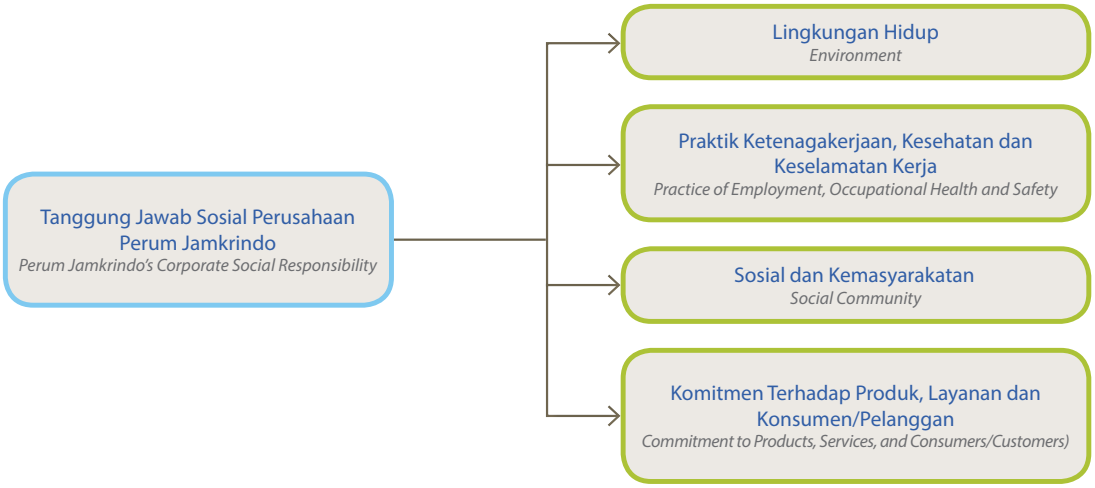
Di samping itu, terkait hak pemangku kepentingan lainnya, pengembangan dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Perum Jamkrindo dituangkan dalam beberapa aspek, yang mencakup lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; sosial kemasyarakatan; serta aspek produk, layanan dan konsumer.

IMPORTANT SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES RELATED TO THE IMPACT OF CORPORATE ACTIVITIES

The commitment of Perum Jamkrindo to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL) optimally is indicated by the existence of the Partnership and Community Development Program Division in the Corporate Secretary. As a Company organ, this Division has the authority to make master-plans while implementing the PKBL program on an ongoing basis. To sustain the independence of Micro, Small and Medium Enterprises, and to support the empowerment of the social conditions of the community, the Partnership and Community Development Program organized by Perum Jamkrindo is not limited to philanthropic activities but increases to the level of corporate community development.

THE COVERAGE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

In addition, related to the rights of other stakeholders, the development of the dimensions of Corporate Social Responsibility from Perum Jamkrindo is outlined in several aspects, which cover the environment; employment, health and safety; social community; and aspects of products, services and consumers.



STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN DALAM MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

1. Strategi & Program Kerja Program Kemitraan
   - » Strategi Program Kemitraan:
     - Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan baru yang potensial di seluruh wilayah kerja Perum Jamkrindo
     - Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan eksisting yang memiliki prospek usaha yang bagus namun masih membutuhkan dukungan dana
     - Penyaluran pinjaman dengan melakukan sinergi BUMN
   - » Program Kerja Program Kemitraan
     Target penyaluran Pinjaman Program Kemitraan adalah sebesar Rp9.300.000.000,- dengan jumlah Mitra Binaan sebanyak 157 Mitra Binaan.
2. Strategi & Program Kerja Program Bina Lingkungan
   - » Strategi Program Bina Lingkungan:
     - Memberikan bantuan untuk perbaikan kondisi sosial masyarakat terutama di lingkungan sekitar kantor Perum Jamkrindo
     - Membantu korban bencana alam
     - Memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan
     - Membantu dala pembangunan fasilitas umum
     - Membantu dalam pembangunan sarana ibadah
     - Mendukung kegiatan pelestarian alam dan lingkungan

THE STRATEGY AND PROGRAM OF THE COMPANY'S WORK IN DEALING WITH SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES

1. *Partnership Program's Strategy & Work Program*
   - » *Partnership Program's Strategy:*
     - *Distribution of loans to potential new partners in the entire working area of Perum Jamkrindo*
     - *Distribution of loans to existing fostered partners who have good business prospects but still need financial support*
     - *Distribution of loans through SOEs synergizing*
   - » *Partnership Program's Work Program*
     The target of the Partnership Program Loan distribution is IDR9,300,000,000, with as many as 157 Foster Partners.
2. *Strategy & Work Program for Community Development Programs*
   - » *Community Development Program's Strategy:*
     - *Providing assistance to improve the social conditions of the community, especially in the locations surrounding Perum Jamkrindo's office*
     - *Helping victims of natural disasters*
     - *Providing education and training assistance*
     - *Assistance in the construction of public facilities*
     - *Assistance in the construction of religious facilities*
     - *Supporting natural and environmental conservation activities*

- Membantu meningkatkan kapasitas Mitra Binaan melalui kegiatan pelatihan, pemagangan, pemasaran serta promosi.

» Program Kerja Program Bina Lingkungan
Target penyaluran Bantuan Bina Lingkungan adalah sebesar Rp14.600.000.000,-

PROGRAM LAINNYA

Selain program wajib di atas, Perusahaan melakukan beberapa program tanggung jawab sosial yang diharapkan memberikan dampak terhadap pemangku kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti donor darah oleh karyawan yang diselenggarakan Perusahaan dapat memberikan kesadaran tentang pentingnya kesehatan diri bagi setiap karyawan.

Bantuan pemeriksaan mata dan operasi katarak bagi masyarakat yang kurang mampu merupakan kepedulian Perusahaan terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, setiap tahun kasus baru buta katarak diperkirakan bertambah 250.000 orang atau 0,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu kemampuan untuk melakukan operasi katarak diperkirakan baru mencapai 180.000 orang per tahun, atau ada *backlog* sekitar 70.000 penderita katarak yang belum ditangani. Melihat adanya kondisi tersebut, Perum Jamkrindo ingin mengambil bagian dalam menekan angka *w* tersebut, melalui program pemeriksaan mata dan operasi katarak bagi masyarakat yang kurang mampu.

ORGANISASI, PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA

Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkup Perum Jamkrindo, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Unit/Divisi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program, seperti yang tergambar di bawah ini:

- *Helping to increase the capacity of Foster Partners through training, apprenticeship, marketing, and promotion activities.*

» *Community Development Program's Work Program*
The target of distribution for Community Development Assistance is IDR14,600,000,000.

OTHER PROGRAMS

In addition to the mandatory program above, the Company conducts several CSR programs that are expected to have an impact on stakeholders, both directly and indirectly. Activities such as blood donation by the employees which are organized by the Company can provide awareness about the importance of personal health for each employee.

Assistance on eye examination and cataract surgery for disadvantaged communities is the Company's concern for public health. Based on data from the Ministry of Health, every year, new cases of cataract are estimated to increase by 250,000 people. This is equal to 0.1% of Indonesia's population. Meanwhile, the ability to carry out cataract surgery is estimated to only reach 180,000 people per year, or there is a backlog of around 70,000 cataract patients who have not been treated. Seeing these conditions, Perum Jamkrindo wants to take part in suppressing the number of backlogs, through eye examination and cataract surgery programs for disadvantaged people.

ORGANIZATIONS, PERSON IN CHARGE AND MANAGERS

To be able to implement the entire Corporate Social Responsibility program within Perum Jamkrindo, the implementation of the entire program is divided into several Units/Divisions with responsibilities in accordance with the program categories, as illustrated below:



PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Terhadap program dan kegiatan CSR di sepanjang tahun 2018, berikut disampaikan pembiayaan dan anggaran yang ditetapkan Perusahaan di awal tahun 2018, dan realisasinya di akhir tahun 2018.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FINANCING AND BUDGETING

Regarding CSR programs and activities throughout 2018, the following are the financing and budgeting set by the Company in early 2018, and their realization at the end of 2018.

No	Uraian *Description*	Realisasi 2018 (Rp) *Realizations (Rp/IDR)*	RKAP 2018 (Rp) *Company Work Plan and Budget of 2018 (Rp/IDR)*	Pencapaian (%) *Achievement (%)*
1	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan *Partnership and Community Development Program*			
	a. Program Kemitraan *a. Partnership Program*	5 .413.000.000	9.300.000.000	58,20%
	b. Program Bina Lingkungan *b. Community Development Program*	13.442.834.649	14.600.000.000	92,07%
Jumlah ***Total***		**18.855.834.649**	**23.900.000.000**	**78,89%**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



RUMUSAN, KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara entitas usaha, masyarakat dan pemerintah, termasuk korporasi seperti Perum Jamkrindo. Walaupun bidang usaha Perusahaan adalah penjaminan kredit, Perum Jamkrindo berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan. Perusahaan memiliki kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjaga keaneka ragaman hayati. Perusahaan pun terus menjaga kelestarian lingkungan dalam operasional kegiatan bisnis. Beberapa rencana dan target di tahun 2018 terkait menjaga kelestarian hayati dapat tercermin dari kegiatan operasioanl Perusahaan yang di jalankan.

Kepedulian terhadap lingkungan antara lain diwujudkan melalui Program Bina Lingkungan, seperti pembuatan MCK, penyediaan sarana air bersih, saluran air, pengadaan gerobak dan tong sampah, maupun pelestarian alam dengan melakukan kegiatan penanaman pohon. Selain itu, kepedulian lingkungan juga dilakukan Perum Jamkrindo melalui kebijakan yang berkaitan dengan operasional sehari-hari, antara lain penggunaan kertas, energi, air, pengurangan emisi kendaraan operasional, dan penanganan limbah.

FORMULATION, COMMITMENTS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICIES RELATED TO THE ENVIRONMENT

Concern for the environment is a shared responsibility between business entities, the public, and the government; this includes SOEs such as Perum Jamkrindo. Although the Company's business sector is credit guarantee, Perum Jamkrindo is committed to caring for the environment. The Company has the policy to preserve the environment to maintain biodiversity. The Company continues to preserve the environment in operating its business activities. Several plans and targets in 2018 related to preserving biodiversity can be reflected in the operational activities of the Company.

Concern for the environment, among others, was realized through the Community Development Program, such as the making of public toilets, provision of clean water facilities, water channels, procurement of trash carts and cans, as well as nature conservation by carrying out tree planting activities. In addition, environmental awareness is also carried out by Perum Jamkrindo through policies relating to daily operations, including paper use, energy, water, reduction of operational vehicle emissions, and waste handling.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan salah satu fokus kegiatan Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan dalam menjaga kualitas lingkungan. Hal ini juga merupakan bentuk pengimplementasian kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan Lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

The effectiveness and efficiency of energy and material use are some of the focuses of the Company's activities towards corporate social responsibility in maintaining environmental quality. This is also a form of implementing the Company's compliance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The Environmental Policy is a guideline for the Company in carrying out operational activities that are increasingly environmentally friendly.

PENERAPAN INISIATIF: PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF INITIATIVES: PROGRAMS AND ACTIVITIES CONDUCTED REGARDING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

Pelestarian Lingkungan Hayati

Environmental Conservation

Jamkrindo sangat peduli dalam melestarikan lingkungan hayati dengan melakukan perawatan tanaman yang dilakukan secara berkala terhadap taman yang terdapat dilingkungan kantor baik taman depan, belakang maupun samping. Perawatan tanaman tersebut dilakukan setiap hari dengan jadwal penyiraman pukul 09.00 dan pukul 15.00 WIB. Divisi Umum menyerahkan tanggung jawab untuk pemeliharaan taman tersebut kepada Badan Pengelola Gedung yang juga memiliki ruang lingkup pekerjaan mengganti tanaman yang mati.

Jamkrindo is very concerned about preserving the biological environment. One of the implementations of the Company's concern is by carrying out periodic plant maintenance to the parks in the office environment both front, rear, and side parks. Plant maintenance is carried out every day with a watering schedule at 09.00 and 15.00 WIB. The General Division assigns responsibility for maintaining the park to the Building Management Agency which also has the scope of work to replace dead plants.

Badan Pengelola Gedung ini juga bertugas untuk melakukan pemeliharaan taman Silangit yang merupakan taman umum yang berada di depan Gedung Jamkrindo sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga keindahan dan keasrian lingkungan sekitar Gedung Jamkrindo.

The Building Management Agency is also responsible for maintaining the Silangit Park which is a public park in front of the Jamkrindo Building as a form of concern to maintain the beauty and serenity of the environment around the Jamkrindo Building.

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

Tanggal dikeluarkannya Penghargaan *Date Issued*	Jenis Penghargaan *Awards*	Acara *Event*	Pelaksana Acara *Organizer*
09 Agustus 2018 *August 9, 2018*	Juara 2 Kategori Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) *2nd Place in the Partnership and Comunity Development Program (PKBL) Category on the 7th BUMN 2018 Award*	7th Anugrah BUMN 2018 *The 7th BUMN Award 2018*	BUMN Track

Penggunaan Material dan Energi dalam Operasional dan Usaha

Penggunaan Kertas

Dalam penggunaan kertas, Perum Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan dengan cara lebih banyak menggunakan surat elektronik atau email dalam menyampaikan informasi. Penghematan kertas juga dilakukan melalui pemanfaatan kertas bekas untuk konsep surat, atau jika memungkinkan mencetak naskah dalam kertas bolak-balik.

Pengecekan naskah secara paripurna sebelum dicetak agar terhindarkan dari kesalahan juga mendapat perhatian. Dengan demikian, pencetakan ulang yang memboroskan kertas bisa dihindarkan. Penghematan penggunaan kertas penting dilakukan karena Perum Jamkrindo menyadari bahwa pembuatan kertas identik dengan penebangan dan pemanfaatan pohon sebagai bahan baku kertas.

Pada tahun 2018, jumlah penggunaan kertas Jamkrindo mencapai 1.330 rim, atau turun sebesar 20,93% dibandingkan tahun 2017 yang membutuhkan kertas sebanyak 1.682 rim. Hal tersebut dikarenakan saat ini aplikasi *e-office (Snapjam)* sudah dijalankan sehingga semua proses surat menyurat atau korespondensi sudah serba *papperless*. Dengan penggunaan sebanyak itu, rasio penggunaan kertas tahun 2018 adalah 1,35 rim per karyawan, turun dibanding rasio penggunaan kertas tahun 2017, yakni 1,61 rim per karyawan. Adapun limbah kertas diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Dalam operasional sehari-hari, Perusahaan tidak menggunakan kertas hasil daur ulang tersebut.

The Use of Materials and Energy in Operations and Businesses

Use of Paper

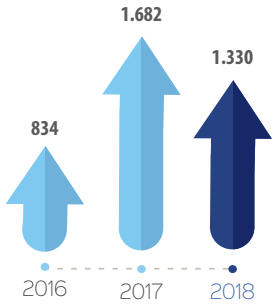
In the use of paper, Perum Jamkrindo has a savings policy by using more e-mail in delivering information. Paper saving is also done through the use of used paper for letter draftings, or if possible print the manuscript on the back and the front side of the paper.

Paper saving is also done by checking the full text before printing so that printing mistakes can be avoided. With this, the act of reprinting that wastes paper can be avoided. The savings in the use of paper are important because Perum Jamkrindo realizes that paper making is identical to the cutting and utilization of trees as paper raw material.

In 2018, the number of paper used for Jamkrindo's operations reached 1,330 reams or a decrease of 20.93% compared to 2017 which required 1,682 reams of paper. This is because now the e-office application (Snapjam) has been implemented so that all correspondence processes have been completely paperless. With that much use, the ratio of paper used in 2018 is 1.35 reams per employee; this was a decrease when compared to the ratio of paper use in 2017, which was 1.61 reams per employee. The paper waste is handed over to third parties for recycling. In daily operations, the Company does not use recycled paper.

Penggunaan Kertas *Paper Use*	**2018**	**2017**	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*	
			Jumlah *Total*	**Persentase (%)** *Percentage (%)*
Volume (rim)	1.330	1.682	-352	(20,93%)
Rasio penggunaan kertas (rim/ karyawan) *Rim/Karyawan Ream/employee*	1,35	1,61	-0,26	(16,15%)

Jumlah Material Kertas dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2018 (rim)
Amount of Paper Use in Operational and Business Activities 2016-2018 (Ream)



Penggunaan Energi Listrik

Perusahaan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 menggunakan listrik yang dibeli dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber energi untuk kegiatan operasional Perusahaan. Untuk penggunaan energi listrik, Perum Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan, di antaranya, dengan mengganti lampu perkantoran dengan lampu hemat energi, serta melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur. Perusahaan juga memastikan bahwa semua alat elektronik telah dimatikan saat karyawan usai bekerja dan keluar dari ruangan. Penghematan penggunaan listrik penting dilakukan karena Perum Jamkrindo menyadari bahwa ketersediaan energi listrik di Indonesia masih terbatas.

Total penggunaan energi listrik pada tahun 2018 tercatat sebesar 1.568 KWh, atau turun sebesar 5,71% dibanding tahun 2017 dengan penggunaan sebesar 1.663 kWh. Penurunan tersebut dikarenakan mesin chiller telah diperbaiki sehingga kondisi mesin tersebut beroperasi dengan kondisi optimal, selain itu budaya mematikan listrik di ruang kerja masing-masing seblum meninggalkan kantor menjadi salah satu faktor efisiensi biaya listrik. Dengan penggunaan listrik sebesar itu, rasio per karyawan pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,56 kWh, turun dibanding rasio tahun 2017, yakni 1,60 kWh per karyawan.

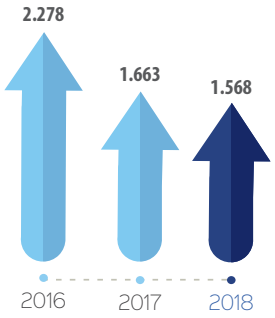
The Use of Electric Energy

The Company, as in previous years, in 2018, used electricity purchased from the National Electricity Company (PLN) as an energy source for the Company's operational activities. For the use of electrical energy, Perum Jamkrindo has an energy saving policy, among others, by replacing office lights with energy-saving lamps, as well as making efficient working hours by reducing overtime. The Company also ensures that all electronic devices have been turned off when employees finish working and leave the room. Savings in electricity use is important because Perum Jamkrindo realizes that the availability of electricity in Indonesia is still limited.

The total electricity usage in 2018 was recorded at 1,568 KWh, or a decrease of 5.71% compared to 2017 usage of 1,663 kWh. The decrease was due to the engine chiller being repaired which makes the engine to operate in optimal conditions. The culture of turning off the electricity in each workspace before leaving the office also became one of the efficiency factors of electricity costs. With that much electricity usage, the ratio per employee in 2018 was 1.56 kWh, a decrease from the 2017 ratio of 1.60 kWh per employee.

Penggunaan Energi Listrik *Electical Energy Usage*	**2018**	**2017**	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*	
			Jumlah *Total*	**Persentase (%)** *Percentage) (%)*
Volume (kWh)	1.568	1.663	-95,00	(5,71%)
Rasio konsumsi energi llistrik (kWh /karyawan) *The Ratio of Electricity Usage per Employee (kWh/employee)*	1,56	1,60	-0,04	(2,50%)

Penggunaan Volume Energi Listrik dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2018 (kWh)
Use of Electrical Energy in Operational and Business Activities 2016-2018 (kWh)



Penggunaan Air

Air merupakan salah satu elemen alam yang bermetamorfosa melalui proses alami. Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari, terutama air yang bersumber dari tanah di wilayah perkotaan, berdampak langsung terhadap kualitas tanah dan air di wilayah tersebut

Untuk penggunaan air, Perum Jamkrindo memanfaatkan air dari PDAM dan tidak menggunakan air tanah. Pada tahun 2018, volume penggunaan air tercatat sebesar 13.790 meter kubik, atau naik sebesar 1,57% dibanding tahun 2017 dengan penggunaan sebesar 13.573 meter kubik. Hal tersebut dikarenakan penggunaan air di Gedung Jamkrindo bertambah banyaknya kegiatan diluar kegiatan rutin perusahaan seperti Renovasi lantai 1 dan kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya yang tidak berhubungan dengan bisnis utama Perusahaan.

Upaya Perum Jamkrindo untuk menghemat penggunaan air adalah melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur, serta secara rutin melakukan pengecekan instalasi air dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang menyebabkan kebocoran. Adapun rasio penggunaan air per karyawan pada tahun 2018 adalah 14,01 meter kubik, naik dibanding rasio tahun 2017, yang tercatat sebesar 13,00 meter kubik.

Water Usage

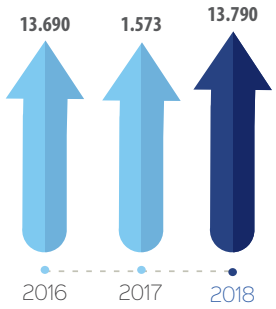
Water is one of the natural elements that metamorphoses through natural processes. The use of water in everyday life, especially water sourced from land in urban areas, has a direct impact on the quality of land and water in the region

For water use, Perum Jamkrindo uses water from the PDAM and does not use groundwater. In 2018, the volume of water use was recorded at 13,790 cubic meters, an increase of 1.57% compared to 2017 use of 13,573 cubic meters. This increase in the use of water in the Jamkrindo Building was due to the increase in the number of activities outside the Company's routine activities such as 1st-floor renovations and other Company activities which are not related to the Company's main business.

The efforts of Perum Jamkrindo to conserve water use are to make working hours efficient by reducing overtime, and routinely checking water installations and making repairs if damage causing leaks is found. The ratio of water use per employee in 2018 was 14.01 cubic meters, an increase from the ratio in 2017, which was recorded at 13.00 cubic meters.

Konsumsi Air *Water Consumption*	**2018**	**2017**	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*	
			Jumlah *Total*	**Persentase (%)** *Percentage) (%)*
Volume (m3)	13.790	13.573	217	1,57%
Rasio penggunaan air per karyawan (m3 /karyawan) *Ratio of Water Consumption per Employee (m3/employee)*	14,01	13,00	1,01	7,77%

Penggunaan Volume Air dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2018 (m3)
Water Consumption in Operational and Business Activities 2016-2018 (m3)



Penanganan Emisi

Kepedulian Perum Jamkrindo terhadap lingkungan juga ditunjukkan dengan upaya mengurangi emisi udara melalui peremajaan mobil operasional. Pada tahun 2017, Kantor Pusat melakukan peremajaan mobil sebanyak 2 (dua) buah dari total mobil operasional sebanyak 17 buah. Sementara pada tahun 2018, hal tersebut tidak dilakukan karena mobil operasional yang dipakai masih layak jalan dengan efek emisi udara yang masih terkendali.

Pengurangan emisi udara juga dilakukan Perum Jamkrindo dengan melakukan penyewaaan mobil keluaran terbaru dari pihak ketiga untuk Direksi dan Kepala Divisi, serta melakukan penyewaan mobil sesuai dengan keperluan (insidental).

Upaya pengurangan emisi lain yang dilakukan Perum Jamkrindo berkaitan dengan emisi bahan perusak ozon (BPO). Dalam hal ini, Perusahaan berkomitmen untuk mengganti refrigeran (zat pendingin) AC yang ramah lingkungan. Pada tahun 2017, Perum Jamkrindo mengganti 6 dari 21 buah AC yang semula menggunakan refrigeran yang tidak ramah lingkungan menjadi refrigeran ramah lingkungan (dari refrigeran R-22 menjadi R-32 dan R-410). Adapun pada tahun 2018, Pemasangan AC Cassette yang menggunakan freon ramah lingkungan dipasang sejumlah 32 unit.

Pengurangan emisi bahan perusak ozon patut didukung karena menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya radiasi ultraviolet matahari, terutama UV-B yang mampu mencapai permukaan bumi. Kondisi tersebut memiliki berrbagai dampak pada kesehatan tubuh manusia.

Emission Management

Perum Jamkrindo's concern for the environment is also shown by its efforts to reduce air emissions through the rejuvenation of operational cars. In 2017, the Head Office rejuvenated 2 (two) cars from a total of 17 operational cars. While in 2018, this was not done because the operational cars used were still roadworthy with the effects of air emissions still under control.

Air emission reduction is also carried out by Perum Jamkrindo by leasing the latest car from third parties for Directors and Head of Divisions, as well as car rental according to necessity (incidental).

Other emission reduction efforts carried out by Perum Jamkrindo is related to emissions of ozone-depleting substances (ODS). In this case, the Company is committed to replacing air-conditioning refrigerants to those that are environmentally friendly. In 2017, Perum Jamkrindo replaces 6 of the 21 AC units that originally used non-environmentally friendly refrigerants to be environmentally friendly refrigerants (from R-22 refrigerants to R-32 and R-410). As for 2018, 32 units of AC Cassette that use environmentally friendly freons are installed.

Reduction of ozone-depleting substances emissions should be supported because the depletion of the ozone layer causes increased the sun's ultraviolet radiation, especially UV-B that can reach the surface of the earth. This condition has various effects on the health of the human body.

Penanganan Limbah

Dalam operasional sehari-hari, Perum Jamkrindo menghasilkan limbah berupa sampah dan limbah dari WC. Untuk penanganan sampah, Perusahaan menyediakan cukup tempat sampah, selanjutnya sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir bekerja sama dengan dinas kebersihan. Adapun limbah dari WC, akan dilakukan penyedotan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau dinas kebersihan.

Waste Management

In its daily operations, Perum Jamkrindo produces waste in the form of garbage and waste from toilets. For waste management, the Company provides enough rubbish bins; the waste is then disposed to the final disposal site in collaboration with the sanitation department. As for the waste from the toilet, desludging is carried out through cooperation with third parties or the sanitation service.

KEPATUHAN

Upaya dan kesungguhan Perum Jamkrindo untuk kepedulian lingkungan, termasuk melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional keseharian, membuahkan hasil dengan tidak adanya denda moneter maupun sanksi lain sepanjang tahun 2018. Hal itu tak lepas dari kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan lainnya selama menjalankan usaha.

COMPLIANCE

The efforts and seriousness of Perum Jamkrindo for environmental care through various policies relating to daily operations bear fruit with the absence of monetary fines or other sanctions throughout 2018. This is due to the Company's compliance with laws and other environmental regulations while running its business.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN TERKAIT OPERASI DAN BISNIS PERUSAHAAN

Gedung Jamkrindo telah dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah yang terletak di lantai B1 dan B2, dan mesin-mesin pengolahan tersebut dikelola dengan perawatan rutin oleh Badan Pengelola Gedung. Mesin tersebut berfungsi untuk mengolah air kotor yang dihasilkan oleh gedung Jamkrindo menjadi air dengan kadar racun dan limbah yang layak untuk dibuang di saluran air kotor kota Jakarta

ENVIRONMENTAL IMPACTS AND RISKS REGARDING THE COMPANY'S OPERATIONS AND BUSINESS

The Jamkrindo Building has been equipped with a wastewater treatment system located on floors B1 and B2, and the processing machines are managed with routine maintenance by the Building Management Agency. The machine serves to treat the dirty water produced by the Jamkrindo building into poisonous water and wastewater which is proper to be disposed of in the Jakarta sewerage

PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Pada tahun 2018, Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan terkait masalah lingkungan dari area sekitar Gedung Jamkrindo

COMPLAINTS ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS

In 2018, the Company did not find any complaints regarding environmental issues from the area around the Jamkrindo Building

BIAYA DAN/ATAU INVESTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN

Berikut disampaikan biaya dan/atau investasi yang dikeluarkan Perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terkait aspek lingkungan yang tercatat naik 80,24% di tahun 2018 dibanding tahun 2017.

COSTS AND/OR INVESTMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL ASPECTS

The following are the Company's costs and/or investments on Corporate Social Responsibility activities related to environmental aspects, which recorded an increase of 80.24% in 2018 compared to 2017.

No	Perihal *(Costs and/or Investments)*	2018 *(Rp/IDR)*	2017 *(Rp/IDR)*	Kenaikan (Penurunan) *(Increase/Decrease)*	
				Jumlah *Total (Rp)*	Persentase *Percentage (%)*
1	Biaya Perawatan Lift* *(Lift Maintenance Costs)**	110.297.880	63.657.360	46.640.520	73,27%
2	Biaya Perawatan Taman *(Garden Maintenance Costs)*	147.571.260	134.629.000	12.942.260	9,61%
3	Pembuatan Air Bersih (PAB) *(Provision of Clean Water)*	78.206.680	21.763.635	56.443.045	259,35%
4	Pembuatan MCK *(The Making of Public Toilets)*	479.584.229	-	-	-
5	Pengadaan Penerangan Jalan *(Provision of Road Lighting)*	-	33.700.000	-	-
6	Pembangunan/Perbaikan Jalan Desa *(Development / Repair of Village Roads)*	105.000.000	44.000.000	61.000.000	138,64%
7	Pembuatan Taman *(Garden Making)*	-	244.911.000	-	-
8	Penanaman Bibit Pohon *(Planting of Tree Seedlings)*	57.430.000	-	-	-
Jumlah *(Total)*		**978.090.049**	**542.660.995**	**435.429.054**	**80,24%**

*) Di tahun 2017, biaya perawatan lift masih termasuk dalam kontrak pekerjaan modernisasi lift, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebesar biaya di tahun 2018.
**) In 2017, lift maintenance costs are still included in the lift's modernization work contract, so the costs incurred are not as large as the fees in 2018.*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF EMPLOYMENT, AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY



RUMUSAN, KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Seperti yang telah disampaikan pada bagian Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta dalam Laporan Tahunan ini, Perusahaan memandang pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi utama dari seluruh dimensi operasional dan bisnis yang dijalankan. Kehadiran Perum Jamkrindo di bidang penjaminan kredit tidak sekadar mencari profit. Lebih dari itu, Perusahaan memiliki tekad yang kuat agar keberadaannya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan, termasuk bagi karyawan, manajemen, dan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan beroperasi. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo meyakini bahwa semakin besar manfaat sosial dan kemasyarakatan yang diberikan oleh Perusahaan, maka hal itu akan berdampak positif pada keberlanjutan usaha di masa-masa mendatang.

FORMULATION, COMMITMENTS AND, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICIES REGARDING EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

As stated in the Human Resources and Talent Development section of this Annual Report, the Company views the importance of Human Resources (HR) as the main foundation of all operational and business dimensions. The presence of Perum Jamkrindo in the field of credit guarantee is not just for profit. More than that, the Company is determined that its existence will bring the greatest benefit to stakeholders, which includes its employees, management, and the communities around the Company's area of operation. In this case, Perum Jamkrindo believes that the greater the social and community benefits provided by the Company, the more positive the impact on the sustainability of the business in the future.

PENERAPAN INISIATIF: PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kepegawaian

Dalam menjalankan usaha, Perum Jamkrindo tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan serta sistem imbal jasa yang sepadan. Selain itu, Perum Jamkrindo dan perusahaan pemasok, tidak mempekerjakan anak, serta tidak memberlakukan kerja paksa karena jam kerja karyawan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Hingga 31 Desember 2018, Perum Jamkrindo mengaryakan 1.002 orang. Jumlah ini berkurang 40 orang atau menurun 3,99% dibanding tahun 2017 yang sebanyak 1.042 orang. Jumlah ini merupakan akumulasi dari rekrutmen karyawan yang dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 6 orang. Rekrutmen terdiri dari 6 orang calon karyawan dari jenjang D3/SMA/SMP, S1/D4 dan S2, karyawan profesional 6 orang, dan 1 orang tenaga kontrak waktu tertentu. Adapun alasan karyawan meninggalkan Perusahaan adalah 7 orang karena pensiun normal, 1 orang pensiun dini, 35 orang mengundurkan diri, dan 3 orang meninggal.

Berdasarkan data tersebut, tingkat pergantian karyawan atau *turnover* pada tahun 2018 adalah sebesar 8,22%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tingkat *turnover* sebesar 14,93%. Terhadap temuan ini, Perusahaan terus berupaya untuk melakukan perbaikan agar persentase *turnover* bisa semakin kecil. Hal itu dilakukan dengan tiga cara, yakni memperbaiki sistem remunerasi karyawan, mempertimbangkan kondisi karyawan pada saat melakukan promosi dan mutasi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mengembangkan *hard skill* maupun *soft skill*.

Selain karyawan tetap, Perum Jamkrindo juga memiliki karyawan kontrak atau *outsource*. Hingga 31 Desember 2018, jumlah karyawan dengan status kontrak dan *outsource* tercatat sebanyak 556 orang, naik 44 orang atau 8,59% dibanding tahun 2017 dengan 512 orang karyawan kontrak dan *outsource*. Perbedaan status kepegawaian tersebut ikut menentukan tunjangan yang mereka peroleh selama bekerja di Perum Jamkrindo. Sementara

IMPLEMENTATION OF INITIATIVES: PROGRAMS AND ACTIVITIES CONDUCTED RELATED TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT, HEALTH AND SAFETY

Staffing

In running its business, Perum Jamkrindo adheres and complies with all laws and regulations related to the field of employment. In this regard, Perum Jamkrindo gives high attention and commitment in terms of gender equality and employment opportunities, job training to improve employee professionalism and commensurate reward systems. Besides that, Perum Jamkrindo and its supplier companies, do not employ children and do not impose forced labor because employee working hours follow statutory provisions.

As of December 31, 2018, Perum Jamkrindo employs 1,002 people. This number is a decrease of 40 people or 3.99% compared to 2017 number of 1,042 people. This amount is an accumulation of 6 employee recruitment conducted in 2018. The recruitment consists of 6 prospective employees from Diploma 3/High School/ Junior High, Bachelor Degree/Diploma 4, and Master Degree, as well as 6 professional employees, and 1 contractor at a certain time. The reasons for employees leaving the Company were as follow 7 people left the Company due to normal retirement, 1 person retired early, 35 people resigned, and 3 people died.

Based on these data, the turnover rate or turnover in 2018 was 8.22%, which is lower than the previous year with a turnover rate of 14.93%. On these findings, the Company continues to make improvements to make the turnover percentage smaller. This is done in three ways, namely improving the employee remuneration system, considering the employees' conditions during promotions and transfers, and providing equal opportunities for all employees to develop hard skills and soft skills.

In addition to permanent employees, Perum Jamkrindo also has contract-based or outsourced employees. As of December 31, 2018, there were 556 contract-based and outsourced employees. This is an increase of 44 people or 8.59% compared to 2017 with 512 contract-based and outsourced employees. The difference in employment status also determines the benefits they receive while working at Perum Jamkrindo. Meanwhile, in relation to

itu, terkait dengan remunerasi dan tunjangan serta bonus terhadap karyawan tetap dan kontrak, di 2017 mengalami penurunan. Hal tersebut terkait dengan berkurangnya jumlah karyawan tetap yang turun 3,99% apabila dibandingkan tahun 2017, dan bertambahnya jumlah karyawan kontrak atau *outsource* yang naik 8,59% dibanding tahun 2017.

Adapun penurunan remunerasi dan tunjangan serta bonus terhadap karyawan tetap dan kontrak, di 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

remuneration and benefits, as well as bonuses for permanent employees and contract-based employees, in 2017 there was a decline. This is related to the reduction in the number of permanent employees. The number of which fell by 3.99% compared to 2017, and the increase in the number of contract-based or outsourced employees which rose by 8.59% compared to 2017.

The decrease in remuneration and benefits as well as bonuses for permanent employees and contract-based employees, in 2018 when compared to 2017 are as follows:

Uraian *Description*	**2018 (Rp)**	**2017 (Rp)**	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*	
			Jumlah (Rp) *Total) (Rp/IDR)*	**Persentase (%)** *Percentage) (%)*
Gaji *Salary*	39.198.450.195	35.613.180.004	3.585.270.191	10,07%
Kesejahteraan *Welfare*	69.930.004.034	61.644.714.013	8.285.290.021	13,44%
Tunjangan Jabatan *Positional Benefits*	19.253.447.818	20.763.348.482	(1.509.900.664)	(7,27%)
Tunjangan Kesehatan *Health Benefits*	9.359.355.373	9.507.472.119	(148.116.746)	(1,56%)
Tunjangan Konsumsi *Consumption Benefits*	13.363.359.000	12.583.112.570	780.246.430	6,20%
Tunjangan Komunikasi *Communication Benefits*	1.019.222.344	981.688.395	37.533.949	3,82%
Tunjangan Wilayah *Regional Benefits*	6.923.556.921	6.553.644.450	369.912.471	5,64%
Jumlah Remunerasi dan Tunjangan *Total Remuneration and Benefits*	159.047.395.685	147.647.160.033	11.400.235.652	7,72%
Bonus	59.160.153.351	55.909.879.000	3.250.274.351	5,81%

Remunerasi dan Tunjangan serta Bonus Karyawan Kontrak
Remuneration and Benefits as well as Contract-based Employee Bonuses

Uraian *Description*	**2018 (Rp)**	**2017 (Rp)**	**Kenaikan (Penurunan)** *Increase (Decrease)*	
			Jumlah (Rp) *Total) (Rp/IDR)*	**Persentase (%)** *Percentage) (%)*
KKWT	144.260.774	875.029.548	(730.768.774)	(83,51%)
Prohire	1.069.166.667	2.160.029.548	(1.090.862.881)	(50,50%)
Jumlah ***Total***	**1.213.427.441**	**2.160.029.548**	**(946.602.107)**	**(43,82%)**

Tunjangan karyawan berdasarkan status kekaryawanan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Employee benefits based on employment status are presented in the table below:

Tunjangan yang Diberikan Kepada Karyawan Tetap, Kontrak, dan Outsource
Benefits Given To Permanent Employees, Contract-Based, and Outsourced Employees

Uraian *Description*	**Karyawan Tetap** *Permanent Employees*	**Karyawan Kontrak** *Contract-Based Employees*	**Karyawan Outsource** *Outsourced Employees*
Tunjangan Jabatan Tetap (Fix) *Fixed Positional Benefits*	√	x	x
Tunjangan Jabatan Tidak Tetap (Variabel) *Variable Benefits*	√	x	x
Tunjangan Kesejahteraan *Welfare Benefits*	√	x	x
Tunjangan Wilayah *Regional Benefits*	√	x	x
Tunjangan Komunikasi *Communicational Benefits*	√	x	x
Tunjangan Transportasi Pelatihan *Training Transportation Benefits*	√	√	x
Tunjangan Kesehatan *Health Benefits*	√	√	√

√ = diberikan | x = tidak diberikan
√ = Given I x = Not Given

Imbalan Pasca Kerja

Post-Employment Benefits

Sebagai korporasi yang bertanggung jawab, Perum Jamkrindo senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan hak karyawan berkaitan dengan imbalan pascakerja/program pensiun. Dalam hal ini, Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

As an accountable responsible corporation, Perum Jamkrindo has always been obedient and compliant to labor regulations. One of which relates to the fulfillment of employee rights related to post-employment benefits/pension programs. In this case, the Company has included its employees in the pension program, namely the Employee Welfare Insurance Program and the Employee Welfare Program through the Pension Fund Financial Institution (DPLK). In addition to the pension plan, the Company also records defined post-employment benefits for employees in accordance with the Employment Act.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti di mana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun

A defined benefit pension plan is a pension plan that determines the number of pension benefits to be provided, usually based on one or more factors such as age, tenure or compensation. In addition to the defined benefit pension plan, the Company also has a defined contribution plan in which the Company pays contributions calculated based on a certain percentage of the employees' basic salary to a pension insurance program held by Pension Funds Financial Institution. Contributions are charged to

lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

Pada tahun 2018, Beban Estimasi Imbalan Pasca Kerja tercatat sebesar Rp8,52 miliar, turun Rp3,61 miliar atau 29,75% dibanding tahun 2017, yang tercatat sebesar Rp12,22 miliar. Adapun pembayaran untuk Premi Asuransi Pensiun pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp11,81 miliar, naik Rp5,33 miliar atau 82,32% dibanding tahun 2017, yang tercatat sebesar Rp6,48 miliar.

Rasio Upah Standar

Ketaatan Perum Jamkrindo terhadap ketentuan ketenagakerjaan juga ditunjukkan dengan pembayaran upah karyawan baru yang jumlahnya jauh di atas Upah Minimum Regional (UMR). Upah minimal yang diberikan Perum Jamkrindo untuk karyawan baru adalah sebesar Rp 4.201.486 untuk karyawan D3 dan Rp 4.720.752 untuk karyawan S1. Kebijakan ini berlaku untuk semua wilayah operasi. Dalam memberikan upah, temasuk remunerasi, Perum Jamkrindo tidak membedakan berdasarkan *gender*, melainkan berpatokan pada kompetensi karyawan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Selain terus berupaya menciptakan kenyamanan dalam bekerja, Perusahaan juga berkomitmen untuk mewujudkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Dalam hal ini, Perusahaan bertekad untuk menekan angka kecelakaan sehingga tidak terjadi satupun kecelakaan *(zero accident)*.

Untuk mewujudkan target tersebut, Perusahaan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat keselamatan kerja, seperti jalur evakuasi, *sprinkle, hydrant*, alat pemadam kebakaran, kotak P3K dan alat keselamatan kerja lainnya di setiap lantai gedung kantor. Selain itu, pelaksanaan program K3 untuk fasilitas kesehatan diwujudkan dengan mengikutsertakan karyawan dan keluarga dalam program asuransi kesehatan BPJS dan Asuransi BRI Life.

Untuk kondisi darurat, Perusahaan memiliki Peraturan Direksi No. 45/Per-Dir/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Kebijakan Umum Penanganan Kondisi Darurat di Lingkungan Kerja Perum Jamkrindo.

Dengan berbagai upaya tersebut, pada tahun pelaporan, Jamkrindo mampu meneruskan pencapaian tahun 2017, yakni mewujudkan angka kecelakaan kerja nol.

the income statement when payable.

In 2018, the Estimated Post-Employment Benefits Expenditures amounted to IDR8.52 billion, a decrease of IDR3.61 billion or 29.75% compared to 2017, which was recorded at IDR12.22 billion. Payments for Pension Insurance Premiums in 2018 were recorded at IDR 11.81 billion, an increase of IDR5.33 billion or 82.32% compared to 2017, which was recorded at IDR6.48 billion.

Standard Wage Ratio

Perum Jamkrindo's compliance with labor provisions was also indicated by the payment of wages for new employees that are far above the Regional Minimum Wage (UMR). The minimum wage given by Perum Jamkrindo for new employees is IDR4,201,486 for Diploma 3 employees and IDR 4,720,752 for employees with a bachelor degree. This policy applies to all operating areas. In providing wages, including remuneration, Perum Jamkrindo does not differentiate based on gender but based on employee competency.

Occupational Health and Safety

In addition to continuing to strive to create comfort in work, the Company is also committed to creating a culture of occupational health and safety for its employees. In this case, the Company is determined to reduce the number of accidents to achieve zero accidents.

To realize this target, the Company provides safety and health protection by providing work safety equipment, such as evacuation route scheme, sprinkle, hydrant, fire extinguishers, first aid kits, and other safety equipment on each floor of the office building. In addition, the implementation of the Occupational and Health Safety (K3) program for health facilities was realized by including employees and families in the BPJS health insurance program and BRI Life Insurance.

For emergency conditions, the Company has the Directors Regulation No. 45 / Per-Dir / XII / 2012 dated December 21, 2012, concerning General Policy for Handling Emergency Conditions in the Work Environment of the Jamkrindo Corporation.

With these various efforts, in this reporting year, Jamkrindo was able to continue the achievement of 2017, which is to realize zero work accident rates.

Ketercakupan dalam Perjanjian Kerja Bersama

Karyawan Jamkrindo memiliki wadah untuk berserikat dan berkumpul berupa Serikat Pekerja bernama "Sekarya" (Serikat Karyawan). Anggota serikat pekerja saat ini berjumlah 1.002 orang, yang terdiri dari karyawan permanen dan karyawan Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah. Seluruh anggota Serikat Pekerja (100%) tercakup dan terikat dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan manajemen Perum Jamkrindo.

Inclusion in Collective Labor Agreements

Jamkrindo employees are given a place to associate and assemble in the form of a Workers' Union called "Sekarya". Currently, there are 1,002 union members, consisting of permanent employees and assignment of employees to subsidiaries, PT Jamkrindo Syariah. All members of the Workers' Union (or 100%) are included and bound by the Collective Labor Agreement (PKB) which regulates the rights and obligations of employees and management of Perum Jamkrindo.

Jumlah Karyawan yang Menjadi Anggota Serikat Pekerja dan Terikat PKB
Number of Employees who become Members of Workers' Unions and Bound to the Collective Labor Agreement

Tahun *Year*	Jumlah Karyawan dalam Serikat Pekerja *Number of Employees in Workers' Unions*	Persentese *Percentage*
2017	1.042	100,00%
2018	1.002	100,00%

PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Mekanisme pengaduan perihal K3 dilakukan oleh unit kerja yang langsung disampaikan kepada Divisi Umum dan ditindaklanjuti dengan melibatkan penyedia jasa atau badan pengelola Gedung Jamkrindo. Sementara itu, Perusahaan pun tengah menyusun kepanitiaan untuk mengelola Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan masalah terkait K3 di lingkungan Jamkrindo.

COMPLAINTS ABOUT EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3) PROBLEMS

The complaint mechanism regarding K3 is carried out by certain work units to be directly submitted to the General Affairs division and followed up by involving service providers or management bodies of the Jamkrindo Building. The Company is also preparing a committee to manage the Occupational Health and Safety Management System (SMK3).

Throughout 2018, the Company did not find any complaints regarding K3-related issues within Jamkrindo.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI DI BIDANG K3

K3 AWARD AND CERTIFICATION

Sertifikasi Bidang K3 yang Masih Berlaku di Tahun 2018
Occupational Health and Safety Certificates that Still Apply in 2018

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi *Certification Issuance Date*	Jenis Sertifikat *Types of Certifications*	Dikeluarkan Oleh *Issued by*	Masa Berlaku Hingga *Valid Date*
18 September 2017 *September 18, 2017*	Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja *Development of Supervision of Occupational Safety and Health Norms*	Kemenaker *Ministry of Manpower*	18 September 2020 *September 18, 2020*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/ JASA SERTA KONSUMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS AND GOODS AS WELL AS CONSUMERS



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN

Sebagai institusi keuangan yang bergerak di bidang Penjaminan, Perum Jamkrindo menekankan pada aspek pelayanan kepada para nasabah yang membutuhkan fasilitas Penjaminan Kredit. Penguatan mutu pada aspek pelayanan yang prima dan responsif juga terus dilakukan oleh Perum Jamkrindo agar masyarakat dapat terbantu dalam memanfaatkan layanan-layanan yang disediakan. Perum Jamkrindo meyakini hal tersebut tidak hanya berperan sebagai sebuah fasilitas namun juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap konsumen yang telah mempercayai Perum Jamkrindo sebagai institusi penjamin.

Salah satu bentuk aktif dari tanggung jawab kepada konsumen diwujudkan melalui penyediaan sarana komunikasi di beberapa media seperti nomor *hotline* untuk wilayah jakarta, informasi nomor telepon dan faksimili di setiap Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan di seluruh Indonesia, serta kontak *online* yang disediakan pada situs web Perum Jamkrindo.

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY ON PRODUCTS/SERVICES AND CONSUMERS

As a financial institution engaged in the Guarantee industry, Perum Jamkrindo emphasizes the aspect of service to customers who need a Credit Guarantee facility. Strengthening quality in the aspects of excellent and responsive service is also continuously carried out by Perum Jamkrindo so that the community can be helped in utilizing the services provided. Perum Jamkrindo believes that this does not only act as a facility but also as a form of Corporate Social Responsibility towards consumers who have trusted the Perum Jamkrindo as a guarantor institution.

One active form of responsibility towards the consumers was realized through the provision of communication facilities in several media such as the hotline number for the Jakarta area, information on telephone and fax numbers at each Branch Office or Service Unit Office throughout Indonesia, as well as online contacts provided on the Perum Jamkrindo's website.

Pengaduan Langsung *Direct Complaints*	:	Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan di seluruh Indonesia *Branch Offices or Service Unit Offices throughout Indonesia*
Kontak Situs Web *Website Contact*	:	http://www.Perum Jamkrindo.co.id/kontak
Kontak Surel *Email*	:	info@Perum Jamkrindo.co.id
Hotline	:	(62-21) 6540335

Melalui penyediaan alamat komunikasi tersebut, Perum Jamkrindo telah melakukan penanganan pertanyaan dan keluhan konsumen terkait layanan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo.

Through the provision of these channels, Perum Jamkrindo has handled consumer questions and complaints related to the services provided by Perum Jamkrindo.

TANGGUNG JAWAB PRODUK

Perum Jamkrindo senantiasa melakukan survei guna mengetahui tingkat kepuasan dan engagement pelanggan. Survei kepuasan pelanggan atas layanan dan produk Perum Jamkrindo pada tahun 2018, dilakukan secara independen. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Nilai kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo yaitu 83,1% naik dari tahun 2017 yang sebesar 83,0%, hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan Perum Jamkrindo pada pelanggan sudah baik. Dengan hasil ini, Perum Jamkrindo telah memenuhi target berdasarkan RKAP 2018 yang ditetapkan sebesar 83,0%.

Sementara itu, indeks keterikatan pelanggan Perum Jamkrindo di tahun 2018 yaitu 80,0% turun dari tahun 2017 yang sebesar 85,0%. Menurunnya nilai *engagement* pelanggan, disebabkan karena pada tahun 2017 penilaian yang dilakukan hanya terbatas pada mitra eksisting, sehingga angka keterikatan yang diperoleh lebih besar. Sementara pada tahun 2018, dilakukan survei pada mitra eksisting, mitra pesaing dan calon mitra yang mendorong nilai *engagement* menjadi lebih rendah.

Selain kepada pelanggan, di tahun 2018, Perusahaan juga melakukan asesmen terhadap pemasok. Asesment dilakukan berdasarkan pencapaian QCDS *(quality, cost, delivery, service)* dengan *sample* sebanyak 8 (delapan) pemasok melalui Surat Pengantar Lembar Survei No. 5593/P/4.2/XI/2017 tanggal 3 November 2017. Hasil rekapitulasi survei menjelaskan bahwa pemasok merasa puas terhadap *fairness* dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa di Perusahaan.

RESPONSIBILITY TOWARDS THE PRODUCT

Perum Jamkrindo always conducts surveys to determine the level of customer satisfaction and engagement. The customer satisfaction survey of the services and products of Perum Jamkrindo in 2018 was carried out independently. The survey results show a good level of satisfaction. The value of Perum Jamkrindo's customer satisfaction is 83.1%, which went up from 2017 number of 83.0%. This shows that, in general, the services provided by Perum Jamkrindo to customers are good. With this result, Perum Jamkrindo has fulfilled the target based on the 2018 RKAP set at 83.0%.

Meanwhile, Perum Jamkrindo customer attachment index in 2018 was 80.0%. It went down from 2017 number of 85.0%. The reduced value of customer engagement was because in 2017 the assessment was carried out only to existing partners so that the number of attachments obtained is greater. In 2018, the survey was conducted on existing partners, competing partners, and potential partners that pushed engagement values lower.

In addition to the survey to customers, in 2018, the Company also assesses suppliers. The assessment was based on the achievement of QCDS (quality, cost, delivery, service) with a sample of 8 (eight) suppliers. This assessment was based on the Introduction Letter No. Survey Sheet. 5593 / P / 4.2 / XI / 2017 dated November 3, 2017. The results of the survey recapitulation explained that suppliers were satisfied with the fairness and transparency of the implementation of the system and procedures for the procurement of goods and services in the Company.

Selain melakukan survei, Perusahaan juga membuka akses pengaduan apabila ada pemangku kepentingan yang merasakan ketidakpuasan. Mekanisme penanganan pangaduan pemangku kepentingan *(stakeholders)* disosialisasikan kepada *stakeholders* melalui *website* Perusahaan. Pengaduan dari *stakeholders* disampaikan oleh petugas pengaduan kepada pejabat penanggungjawab atau unit kerja terkait sesuai dengan materi pengaduan untuk ditindaklanjuti oleh pejabat penanggungjawab atau unit kerja yang bersangkutan.

In addition to conducting surveys, the Company also opens access to complaints channel for dissatisfied stakeholders. The mechanism for handling the complaints of stakeholders is communicated to stakeholders through the Company's website. Complaints from stakeholders are conveyed by the complaints officer to the responsible official or the related work unit in accordance with the complaint materials. It is then to be followed up by the responsible official or the work unit concerned.

Hasil tindak lanjut pejabat penanggung jawab atau unit kerja disampaikan kembali oleh Perusahaan kepada pemangku kepentingan yang bersangkutan. Selama tahun 2018 tidak terdapat keluhan dari *stakeholders* mengenai reputasi Perusahaan baik yang diterima melalui *email* maupun surat resmi tertulis yang disampaikan langsung ataupun melalui pos.

The results of the follow-up of the responsible person or work unit are returned by the Company to the relevant stakeholders. In 2018 there were no complaints from stakeholders regarding the reputation of the Company whether received through e-mail and written official letters delivered directly or by post.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Dalam rangka membangun Perusahaan agar memiliki budaya kinerja yang *excellent*, baik dalam hal kinerja keuangan dan non keuangan, Kementerian BUMN telah mewajibkan seluruh BUMN untuk melaksanakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dalam pengukuran kinerjanya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing BUMN sekaligus meningkatkan profitabilitas Perusahaan dan menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu poin KPKU adalah Indeks Kepuasan Pelanggan, Ketidakpuasan Pelanggan dan *Engagement* Pelanggan.

In order to build a Company with an excellent performance culture, both in terms of financial and non-financial performance, the Ministry of SOEs has required all SOEs to implement Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) in measuring their performance. The main objective is to increase the competitiveness of SOEs while increasing the Company's profitability and improving the Company's financial condition. One of KPKU's points is Customer Satisfaction, Customer Dissatisfaction, and Customer Engagement Index.

Perum Jamkrindo sebagai BUMN juga dituntut untuk menciptakan mewujudkan optimalisasi pelayanan terhadap pelanggan. Pelanggan Perum Jamkrindo adalah Penerima Jaminan (Lembaga Keuangan baik Perbankan maupun Non Bank) dan Terjamin (debitur yang kreditnya dijamin oleh Perum Jamkrindo).

Perum Jamkrindo as a SOEs is also required to create a realization of customer service optimization. Customers of Perum Jamkrindo are Guarantee Recipients (Banking and Non-Bank Financial Institutions) and Guaranteed (debtors whose credit is guaranteed by Perum Jamkrindo).

Sebagai perusahaan jasa keuangan, pelayanan kepada pelanggan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan perusahaan. Untuk itu, peningkatan pelayanan di semua unit kerja harus ditingkatkan karena merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi kompetisi yang semakin tinggi.

As a financial services company, customer service is the main factor which must be considered for the sustainability of the Company. For this reason, improving services in all work units must be increased because it is part of a strategy to face increasingly high competition.

Program kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai program peningkatan kinerja *(performance improvement)* secara efektif, dalam hal ini adalah program yang menyesuaikan

The customer satisfaction program can be described as an effective performance improvement program, in this case, a program that adapts to market and customer needs. Jamkrindo

dengan kebutuhan pasar dan pelanggan. Perum Jamkrindo senantiasa melakukan survei guna mengetahui tingkat kepuasan dan engagement pelanggan. Sebelumnya Perum Jamkrindo telah melakukan survei kepuasan pelanggan yang dinilai pada tahun 2017. Selanjutnya, hasil survei tahun 2017 akan dijadikan acuan dalam pembuatan program peningkatan kepuasan dan engagement pelanggan di tahun 2018.

Sementara, pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo tahun 2018 dilakukan secara independen oleh Perum Jamkrindo melalui Divisi Perencanaan Strategis, yang merupakan penelitian primer dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengukuran variable yang diukur dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan bentuk layanan yang diberikan dan disesuaikan dengan 5 (lima) dimensi utama yaitu *Reliability, Responsive, Assurance, Emphaty*, dan *Tangible* (Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, 1990). Dimensi utama tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan yang diukur tingkat kepentingan dan tingkat kinerjanya dengan skala 1-5 (Likert). Untuk memastikan keandalan instrumen yang digunakan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo tahun 2018 dilaksanakan dari bulan Juli hingga September 2018. Ruang lingkup responden survei kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo 2018 adalah mitra eksisting, mitra pesaing, dan calon mitra Perum Jamkrindo yang tersebar di kantor cabang pada seluruh kantor wilayah Perum Jamkrindo. Adapun jumlah kuesioner yang tersebar adalh sebanyak 304 dan kuesioner yang diterima adalah 250. Area survei kepuasan pelanggan dilakukan pada 19 Kantor Cabang Perum Jamkrindo yang ditentukan secara acak.

Adapun perhitungan Indeks Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan kategori sebagai berikut:

Corporation always conducts surveys to determine the level of customer satisfaction and engagement. Previously, Perum Jamkrindo has conducted a customer satisfaction survey assessed in 2017. Furthermore, the results of the 2017 survey will be used as a reference in making the program to increase customer satisfaction and engagement in 2018.

Meanwhile, the implementation of the 2018 Perum Jamkrindo customer satisfaction survey was carried out independently by Perum Jamkrindo through the Strategic Planning Division. It is primary research using quantitative methods. Measurements of the variables measured in this study are determined based on the form of service provided and adjusted to the 5 (five) main dimensions namely Reliability, Responsive, Assurance, Empathy, and Tangibility (Zeithaml, Parasuraman, and Berry, 1990). The main dimensions are translated into several questions which are measured in importance and level of performance on a scale of 1-5 (Likert). To ensure the reliability of the instruments used, validity and reliability were tested.

The implementation of the 2018 Perum Jamkrindo Customer Satisfaction Survey was carried out from July to September 2018. The scope of the Perum Jamkrindo 2018 customer satisfaction survey respondents are existing partners, competing partners, and potential partners of Perum Jamkrindo that are spread in branch offices in all Perum Jamkrindo regional offices. The number of distributed questionnaires were 304 and the questionnaire received was 250. The customer satisfaction survey area was conducted at 19 Jamkrindo Perum Branch Offices which are randomly determined.

The calculation of the Jamkrindo Perum Customer Satisfaction Index in 2018 refers to the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No. 14 of 2017 concerning Guidelines for the Preparation of the Community Satisfaction Survey for Public Service Implementation Units, with the following categories:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF RESPONSIBILITY TOWARDS PRODUCTS AND GOODS AS WELL AS CONSUMERS

Kategori Indeks Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Index Category

Nilai *Value*	Kategori Kepuasan *Satisfaction Category*
25,00 - 64,99	Tidak Baik *Bad*
65,00 - 76,60	Kurang Baik *Poor*
76,61 - 88,30	Baik *Good*
88,31 - 100,00	Sangat Baik *Excellent*

Berdasarkan hasil survei tahun 2018, nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo yang diperoleh pada survei kepuasan pelanggan Perum Jamkrindo tahun 2018 adalah 83,1%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, pelanggan Perum Jamkrindo merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Jamkrindo selama periode tahun 2018.

Based on the survey results in 2018, the value of the Perum Jamkrindo Customer Satisfaction Index obtained from the 2018 Perum Jamkrindo customer satisfaction survey was 83.1%. This value indicates that, overall, Perum Jamkrindo customers are satisfied with the services provided by Jamkrindo during the period of 2018.

Indeks Kepuasan Pelanggan Perum Jamkrindo Tahun 2018
Perum Jamkrindo's Customer Satisfaction Index in 2018

No	Dimensi *Dimension*	Kepuasan Pelanggan *Consumer Satisfaction*		
		Mitra Ext *Existing Partner*	Pesaing *Competing Partners*	Calon *Prospective Partners*
		2018	2018	2018
1	*Assurance*	82.8	80.0	85.0
2	*Reliability*	83.8	80.9	85.2
3	*Responsiveness*	83.3	84.0	83.1
4	*Empathy*	83.3	80.3	81.7
5	*Tangible*	82.5	82.7	83.1
Keseluruhan ***Overall***		**83.1**	**81.6**	**83.6**

Pada tahun 2018, Perum Jamkrindo juga melakukan survei kepuasan pelanggan pada beberapa segmen, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan mitra bisnis/pelanggan pada pelayanan Perusahaan melalui penjualan beberapa produk.

In 2018, Perum Jamkrindo also conducted a customer satisfaction survey on several segments, this was done to determine the level of satisfaction of business partners/customers on the Company's services through the sale of several products.

Indeks Kepuasan Pelanggan Per Segmen Tahun 2018
Customer Satisfaction Index Per Segment in 2018

No	Dimensi *Dimension*	Kepuasan Pelanggan *Consumer Satisfaction*				
		Mitra KUR *People Business Credit Partners*	**Mitra Non-KUR** *Non-People Business Credit Partners*	**Pesaing KUR** *People Business Credit Competitors*	**Pesaing Non KUR** *Non-People Business Credit Competitors*	**Calon Mitra** *Prospective Partners*
1	*Assurance*	82.0	74.9	73.8	82.5	88.1
2	*Reliability*	83.5	76.7	74.5	84.5	86.2
3	*Responsiveness*	83.7	77.7	75.4	86.4	88.4
4	*Empathy*	81.3	76.3	72.8	80.9	80.2
5	*Tangible*	85.5	80.1	75.8	90.6	89.3
Keseluruhan ***Overall***		**83.2**	**77.1**	**74.5**	**85.0**	**86.4**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kepuasan pelanggan per segmen yang paling tinggi adalah pada segmen calon mitra yakni 86,4%. Secara umum, kepuasan calon mitra lebih tinggi meskipun segmen tersebut belum menggunakan produk Perusahaan. Tingkat kepuasan calon mitra lebih dipengaruhi pada dimensi empathy yakni sebesar 89,3%. Begitupun dengan tingkat kepuasan Mitra KUR dan Mitra Non KUR yang menunjukkan nilai 83,2% dan 77,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini Perum Jamkrindo telah memberikan pelayanan yang baik pada mereka, sehingga mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Jamkrindo selama periode tahun 2018.

Based on the table above, it appears that the highest level of customer satisfaction per segment is in the prospective partner segment, which is 86.4%. In general, the satisfaction of prospective partners is higher even though this segment is not the Company's product-user. The satisfaction level of prospective partners is more influenced by the empathy dimension which numbered in 89.3%. The same can be said to the level of satisfaction of KUR Partners and Non-KUR Partners which showed values of 83.2% and 77.1%. This shows that so far Perum Jamkrindo has provided good service to them so that they are satisfied with the services provided by Jamkrindo during the period of 2018.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perwujudan CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial diselenggarakan dengan melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan program hingga melakukan eveluasi pelaksanaan kegiatan.

Sebagai BUMN, Perum Jamkrindo mendapatkan penugasan untuk melaksanakan PKBL di wilayah kerjanya. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

The realization of the Company's CSR in the field of social and community development is carried out through the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL), as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-08 / MBU / 2013, which was changed to No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program. The implementation of the social responsibility program is carried out by conducting analysis, planning, program implementation to carry out an evaluation of the implementation of activities.

As an SOE, Perum Jamkrindo is assigned to implement the Partnership and Community Development Program in its area of operations. The Partnership Program is a program to improve the ability of small businesses in the form of loans to make them become resilient and independent. Whereas the Community Development Program is an empowerment program for the community's social conditions in the

pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo. Salah satu bentuk bantuan dalam Program Bina Lingkungan adalah bantuan dana pembinaan (hibah) kepada mitra binaan (usaha kecil dan koperasi) untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

form of providing assistance to communities around the working area of Perum Jamkrindo. One form of assistance in the Community Development Program is the assistance funds (grants) to fostered partners (small businesses and cooperatives) to encourage and develop their business activities to become resilient and independent so that they can improve people's lives.

RUMUSAN PENGEMBANGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN, ISU-ISU SOSIAL, DAN RISIKO SOSIAL YANG TIMBUL DARI OPERASI DAN BISNIS PERUSAHAAN

FORMULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT FOR SOCIAL AND COMMUNITY AFFAIRS, SOCIAL ISSUES, AND SOCIAL RISKS THAT ARISE FROM COMPANY'S OPERATIONS AND BUSINESS

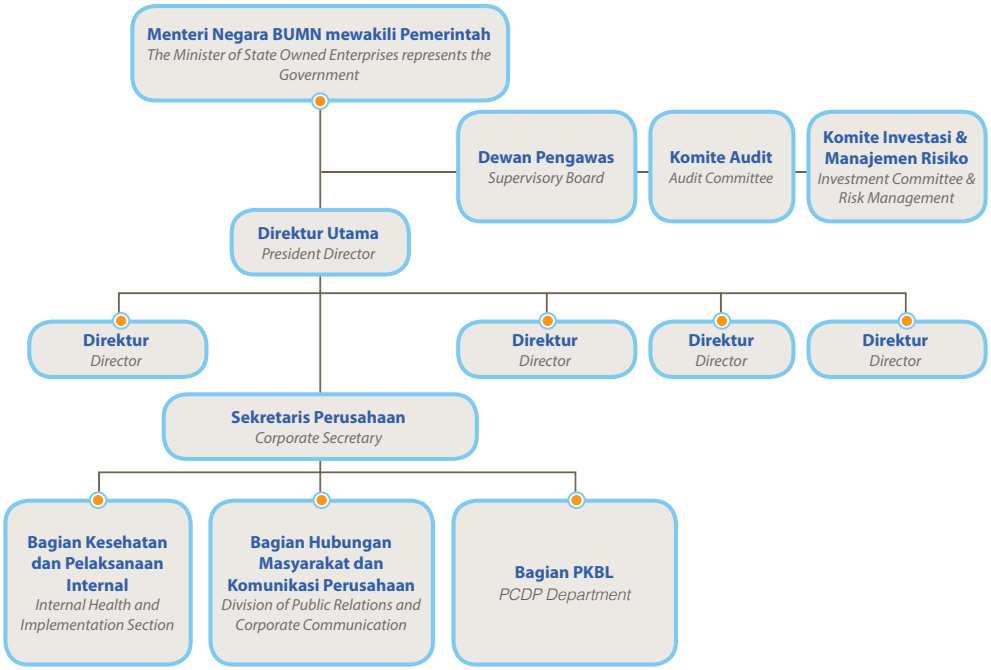
Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengacu pada peraturan Kementerian BUMN dan sejauh ini, tidak ada isu-isu sosial ataupun risiko sosial yang timbul akibat dari operasi dan bisnis yang dijalankan Perusahaan

Development of Corporate Social Responsibility refers to the regulations of the Ministry of SOEs, and so far, there are no social issues or risks arising from the operations and businesses run by the Company

PENGELOLA PKBL PERUM JAMKRINDO

PERUM JAMKRINDO'S PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM MANAGEMENT UNIT

Struktur Organisasi PKBL Perum Jamkrindo
The Organizational Structure of PCDP of Perum Jamkrindo



Berikut adalah Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo.

The following is the Organization Structure of the Partnership and Community Development Program Unit of Perum Jamkrindo.

Direktur Utama *President Director*	:	Randi Anto
Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*	:	Abdul Bari
Kepala Bagian PKBL *Development Program Management Unit*	:	Liesnun
Kepala Seksi PK *Head of the Partnership Program Section*	:	Irma Hartati
Kepala Seksi BL *Head of Community Development Section*	:	Erna Nova
Staf PKBL	:	Retno Indriani

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN PKBL TAHUN 2018

TARGETS AND WORK PLANS FOR PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM ACTIVITIES IN 2018

Di setiap awal tahun, Perum Jamkrindo telah melakukan perumusan rencana kerja dan anggaran terkait pelaksanaan PKBL. Berikut disampaikan target dan rencana kegiatan PKBL yang telah dicanangkan di awal tahun 2018.

At the beginning of each year, Perum Jamkrindo has formulated a work plan and budget related to the implementation of the Partnership and Community Development Program. The following are the targets and plans for the Partnership and Community Development Program activities that have been announced in early 2018.

Program Kemitraan
Partnership Program

Sasaran
- Tersalurnya dana Program Kemitraan di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo sebesar Rp 9.300.000.000.
- Adanya penyebaran penyaluran dana Program Kemitraan ke seluruh Kanca Perum Jamkrindo.

Target
- *Distribution of Partnership Program funds in all Perum Jamkrindo Perum work units of IDR9,300,000,000.*
- *The distribution of the Partnership Program funds to all Branch Offices of Perum Jamkrindo.*

Strategi
1. Intensifikasi Program Kemitraan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Kemitraan agar mitra binaan menjadi lebih tangguh dan mandiri, antara lain:
   a. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen dan keuangan serta memberikan bantuan konsultasi manajemen sesuai dengan kemampuan SDM perusahaan.
   b. Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan promosi/pameran serta melakukan upaya pemasaran hasil produksi mitra binaan melalui peran perusahaan berskala nasional.
   c. Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra binaan secara kontinyu untuk melakukan evaluasi dan melihat perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi serta membantu memberikan saran/solusi perbaikan, dan mengintensifkan penagihan kepada mitra binaan dengan tetap memperhatikan kondisi mitra binaan.
2. Ekstensifikasi Program Kemitraan dengan mencari calon mitra binaan yang potensial, berkualitas dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan melalui organisasi perdagangan dan industri milik pemerintah/swasta atau secara langsung oleh Perum Jamkrindo.
3. Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan antara lain dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di sektor pertanian.

Program Kemitraan
Partnership Program

Strategy

1. *Intensification of the Partnership Program by optimizing the implementation of the Partnership Program so that the fostered partners become more resilient and independent. This includes:*
   a. *Improving management and production capabilities of the assisted partners by participating in management and financial training and providing management consulting assistance in accordance with the capabilities of the company's HR.*
   b. *Increasing marketing access to the production of fostered partners by participating in promotional/exhibition activities as well as making efforts to marketing the products of fostered partners through the role of national-scale companies.*
   c. *Increasing continuous guidance by conducting continuous visits to the business site of fostered partners to evaluate and see the progress of businesses and problems faced, and help provide suggestions/remedial solutions, and intensify collection to fostered partners while taking into account the conditions of the assisted partners.*
2. *Extensification of the Partnership Program by looking for potential, qualified and trained partners who have profitable business prospects through government/private trade and industry organizations or directly by Perum Jamkrindo.*
3. *Synergize with other SOEs coaches or other parties in implementing the Partnership Program fund distribution, among others, with PT Permodalan Nasional Madani (PNM) in the agricultural sector.*

Program Bina Lingkungan
Community Development Program

Sasaran
Tersalurnya dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp 14.600.000.000 di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo sesuai program kerja dan mandatory KBUMN dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo.

Strategi
Melaksanakan penyaluran dana Bina Lingkungan melalui kerja sama dengan Sinergi BUMN, Pemerintahan setempat, Yayasan, LSM dan masyarakat.

Target
The distribution of Community Development Program funds amounted to IDR14,600,000,000 in all work units of Perum Jamkrindo in accordance with the work program and mandatory KBUMN in the form of providing assistance to communities around the Perum Jamkrindo working area.

Strategy
Carry out Community Development fund distribution through cooperation with Synergy of SOEs, Local Government, Foundations, NGOs and the community.

REALISASI KEGIATAN PKBL DI TAHUN 2018

Pengelolaan Program Bina Lingkungan Perum Jamkrindo di tahun 2018 dilaksanakan 56 Cabang dan Kantor Pusat sedangkan penyaluran Pinjaman Kemitraan dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan 20 Cabang.

Realisasi kegiatan PKBL di sepanjang tahun 2018 telah dilaksanakan dengan pencapaian terhadap anggaran sebesar 58,20% untuk Program Kemitraan, dan 92,07% untuk Program Bina Lingkungan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, penyaluran Program Kemitraan di tahun 2018 mengalami penurunan 31,25% sementara Program Bina Lingkungan naik 49,75%. Di tahun 2018, Jamkrindo menyalurkan Program Bina Lingkungan Unggulan meliputi jenis bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan dan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

REALIZATION OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM ACTIVITIES IN 2018

Management of the Community Development Program of the Jamkrindo Corporation in 2018 was carried out by 56 Branches and Headquarters while the distribution of Partnership Loans was carried out by the Head Office and 20 Branches.

The realization of Partnership and Community Development Program Activities throughout 2018 has been implemented with the achievement of a budget of 58.20% for the Partnership Program, and 92.07% for the Community Development Program. When compared with the realization in 2017, the distribution of the Partnership Program in 2018 decreased by 31.25% while the Community Development Program increased by 49.75%. In 2018, Jamkrindo channeled a Superior Community Development Program covering the types of assistance in Education and/or Training and Social Services in the context of poverty alleviation.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Uraian *Description*	**2018 (Rp)**	**2017 (Rp)**	**Kenaikan/ Penurunan (%)** *Increase/Decrease (%)*
	(1)	**(2)**	**((1-2):2)**
Program Kemitraan *Partnership Program*	5.413.000.000	7.874.000.000	(31,25%)
Program Bina Lingkungan *Community Development Program*	13.434.913.955	8.976.855.932	49,75%

Berikut disampaikan laporan realisasi kegiatan PKBL Perum Jamkrindo tahun 2018:

1. Realisasi Program Kemitraan
   Penyaluran dana Program Kemitraan dan jumlah mitra binaan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

The following is a report on the realization of the Perum Jamkrindo Partnership and Community Development activities in 2018:

1. *Realization of the Partnership Program*
   The distribution of the Partnership Program funds and the number of fostered partners based on sectors are as follows:

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2018 Berdasarkan Sektor Usaha Mitra Binaan
Realization of 2018 Partnership Program Fund Distribution Based on Business Sector of Foster Partners

No	**Uraian** *Description*	**2018**		**2017**		**Kenaikan/ Penurunan** *Increase/Decrease) (%)*	
		MB	**Jumlah (Rp)**	**MB**	**Jumlah (Rp)**	**MB**	**Jumlah (%)**
		1	**2**	**(3)**	**(4)**	**((1-3)/3)**	**((2-4)/4)**
1	Sektor Industri *Industrial Sector*	31	1.435.000.000	12	640.000.000	158,33%	124,22%
2	Sektor Perdagangan *Trade Sector*	52	1.738.000.000	107	4.218.000.000	-51,40%	-58,80%
3	Sektor Pertanian *Agriculture Sector*	0	0	7	330.000.000	-100,00%	-100,00%
4	Sektor Peternakan *Livestock Sector*	7	330.000.000	6	250.000.000	16,67%	32,00%
5	Sektor Perkebunan *Plantation Sector*	43	1.270.000.000	20	1.000.000.000	115,00%	27,00%
6	Sektor Perikanan *Fisheries Sector*	0	0	0	0	-	-
7	Sektor Jasa *Service Sector*	20	640.000.000	43	1.436.000.000	-53,49%	-55,43%
Jumlah ***Total***		**153**	**5.413.000.000**	**195**	**7.874.000.000**	**-21,54%**	**-31,25%**

MB = Mitra Binaan
MB = Fostered Partners

Dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan, bagian PKBL Perum Jamkrindo melakukan kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

In carrying out the distribution of the Partnership Program funds, the Partnership and Community Development Program section of Perum Jamkrindo collaborated with PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

2. Realisasi Program Bina Lingkungan

2. *Realization of the Community Development Program*

Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Berdasarkan Jenis Bantuan
Fund Distributions for Community Development Program based on Types of Assistance

No	Uraian *Description*	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%) *Increase/Decrease) (%)*
		(1)	(2)	((1-2):2)
1	Bantuan Korban Bencana Alam *Assistance to Natural Disaster Victims*	546.253.091	361.975.000	50,91%
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan *Education and/or Training Assistance*	4.291.276.793	1.885.260.658	127,62%
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan *Health Improvement Assistance*	112.000.000	40.000.000	180,00%
4	Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana Umum *Assistance for the Development of Public Infrastructure & Facilities*	535.780.000	507.611.140	5,55%
5	Bantuan Sarana Ibadah *Assintance of Worship Facilities*	1.169.085.000	1.157.156.161	1,03%
6	Bantuan Pelestarian Alam *Assistance of Nature Conservation*	57.430.000	0	100,00%
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan dlm Rangka Pengentasan Kemiskinan *Social Community Assistance in the Framework of Poverty Alleviation*	6.731.009.765	5.024.852.973	33,95%
Jumlah ***Total***		**13.442.834.649**	**8.976.855.932**	**49,75%**

PROGRAM KEMITRAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/mBu/2013 tanggal 10 September 2013, Program Kemitraan BUMN dengan usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Permen BUMN 5/2007 tersebut.

PARTNERSHIP PROGRAM

Based on Minister of SOEs Regulation No. PER-08 / MBU / 2013 dated September 10, 2013, the SOE's Partnership Program with Small businesses, hereinafter referred to as the Partnership Program, is a program to improve the capacity of small businesses to become resilient and independent through the utilization of funds from the SOE's profits. Small businesses are small-scale economic activities of the people which meet the criteria of net worth or annual sales proceeds and ownership as stipulated in the Minister of SOEs Regulation No 5/2007.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Tanggung jawab terhadap mitra binaan diwujudkan dalam bentuk pembinaan mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan.

Program Kemitraan yang telah dilakukan antara lain meliputi pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pemberian bantuan dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

Calon Mitra Binaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,- ,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,-;
2. Milik warga negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan *(non bankable).*

Penetapan dana unit PKBL adalah sebagai berikut:

- Dana Program Kemitraan, yang bersumber dari:
  a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan Bumn Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
  b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
  c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan; dan
  d. Sumber lain yang sah.

The Company's responsibility for the fostered partners is manifested in the form of fostering partners. The source of funds for fostering partners is the Partnership Program Development Fund, which is a maximum of 20% of the Partnership Program funds distributed in the current year.

Partnership programs which have been carried out include the provision of loans to finance working capital and or purchase of fixed assets in order to increase production and sales, provide assistance in the form of grants to finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating increased productivity of Foster Partners.

Prospective Partners for SOEs Partnership Programs with small businesses and Community Development Programs must meet the following criteria:

1. *Having a net worth of at most IDR500,000,000, excluding land and buildings of business premises or having annual sales of a maximum of IDR2,500,000,000;*
2. *Owned by Indonesian citizens;*
3. *A Standalone, or it is not a subsidiary or branch of a company that is owned, controlled, or affiliated directly or indirectly with a medium-sized business or large business;*
4. *An individual business entity, a business entity that is not a legal entity, or a legal business entity, including cooperatives;*
5. *Has potential and business prospects to be developed;*
6. *Has carried out business activities for at least 1 (one) year;*
7. *Not meeting banking requirements (non-bankable).*

The Establishment of the Partnership and Community Development Program unit funds is as follows:

- *Partnership Program Funds, sourced from:*
  a. Provision for after-tax net income as stipulated in the GMS/Minister ratification of the Fostering SOEs Annual Report with a maximum of 4% of the previous year's taxable profit;
  b. Loan administration/margin/profit sharing services from the Partnership Program;
  c. Results of deposit interest and/or current account services from the allocated Partnership Program and Community Development Program funds; and
  d. Other legitimate sources.

- Dana Program Kemitraan yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:
  a. Pinjaman; diberikan untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
  b. Pinjaman Khusus; diberikan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan

Mekanisme atau tata cara penyaluran atau pemberian dana pinjaman Program Kemitraan adalah sebagai berikut:
1. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana kegunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina.
2. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh Calon Mitra Binaan.
3. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina bersangkutan.
4. Pemberian pinjaman kepada Calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.
5. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada Calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.

Dalam pelaksanannya, Program Kemitraan yang dilakukan Perum Jamkrindo sepanjang tahun 2018 adalah:
1. Program Kemitraan di sektor industri
2. Program Kemitraan di sektor perdagangan
3. Program Kemitraan di sektor pertanian
4. Program Kemitraan di sektor peternakan
5. Program Kemitraan di sektor perkebunan
6. Program Kemitraan di sektor perikanan
7. Program Kemitraan di sektor jasa
8. Program Kemitraan di sektor lainnya

Adapun realisasi penyaluran dana terkait Program Kemitraan yang telah disalurkan Perum Jamkrindo sepanjang 2018 adalah sebesar Rp5,41 miliar, atau turun 31,25% dibandingkan realisasi tahun 2017 sejumlah Rp7,87 miliar, yang dialokasikan kepada Mitra Binaan untuk berbagai sektor usaha.

Realisasi penyaluran dana pembinaan Program Kemitraan berdasarkan Kantor Cabang Perum Jamkrindo selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- *Partnership Program funds provided in the form of loans, namely:*
  a. Loans; given to finance working capital and or purchase of fixed assets in order to increase production and sales.

  b. Special Loans; given to finance the funding needs for short-term business activities of Foster Partners in order to fulfill orders from business partners of Foster Partners

The mechanism or procedure for channeling or granting the Partnership Program funds are as follows:
1. *Prospective Partners submit a plan for the use of loan funds in order to develop their business to be submitted to the Fostering SOEs.*
2. *The Fostering SOEs carry out evaluations and direct selection of applications submitted by Prospective Partners.*
3. *Prospective Development Partners who are eligible for development, complete the loan administration process with the relevant Fostering SOEs.*
4. *Loan provisions to Prospective Partners are drafted in the letter of agreement/contract.*
5. *Fostering SOEs are prohibited from giving loans to Prospective Partners who are other Fostered SOEs Partners.*

In its implementation, the Partnership Programs conducted by Perum Jamkrindo throughout 2018 are as follow:
1. *Partnership Program in the industrial sector*
2. *Partnership Program in the trade sector*
3. *Partnership Program in the agricultural sector*
4. *Partnership Program in the livestock sector*
5. *Partnership Program in the plantation sector*
6. *Partnership Program in the fisheries sector*
7. *Partnership Program in the service sector*
8. *Partnership Program in other sectors*

The realization of the distribution of funds related to the Partnership Program that has been channeled by Perum Jamkrindo throughout 2018 amounted to IDR5.41 billion or went down 31.25% compared to the realization in 2017 of IDR7.87 billion, which was allocated to Fostered Partners for various business sectors.

The realization of the partnership fund distribution program in Perum Jamkrindo's Branch Office for the past 5 (five) years is as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

No.	Kantor Cabang *Branch Office*	2018	2017	2016	2015	2014
1	Jakarta	340.000.000	1.905.000.000	1.435.000.000	1.470.000.000	1.095.000.000
2	Bandung	1.290.000.000	415.000.000	480.000.000	-	50.000.000
3	Semarang	375.000.000	655.000.000	630.000.000	490.000.000	510.000.000
4	Surabaya	150.000.000	200.000.000	790.000.000	780.000.000	590.000.000
5	Makassar	112.000.000	490.000.000	655.000.000	80.000.000	230.000.000
6	Pekanbaru	185.000.000	448.000.000	315.000.000	540.000.000	91.000.000
7	Palembang	420.000.000	730.000.000	1.055.000.000	525.000.000	630.000.000
8	Pontianak	40.000.000	513.000.000	735.000.000	630.000.000	525.000.000
9	Samarinda	245.000.000	635.000.000	490.000.000	305.000.000	285.000.000
10	Denpasar	95.000.000	1.050.000.000	185.000.000	415.000.000	320.000.000
11	Medan	160.000.000	190.000.000	460.000.000	495.000.000	360.000.000
12	Banjarmasin	145.000.000	170.000.000	70.000.000	250.000.000	95.000.000
13	Palangkaraya	126.000.000	158.000.000	263.000.000	45.000.000	85.000.000
14	Mataram	30.000.000	-	15.000.000	-	-
15	Kupang	1.030.000.000	-	97.279.000	-	96.000.000
16	Papua	20.000.000	70.000.000	280.000.000	-	80.000.000
17	Jambi	100.000.000	80.000.000	60.000.000	50.000.000	102.000.000
18	Manado	-	165.000.000	130.000.000	273.000.000	100.000.000
19	Padang	500.000.000	-	-	-	-
20	Jogja	30.000.000	-	-	-	-
21	Kediri	20.000.000	-	-	-	-
Jumlah		**5.413.000.000**	**7.874.000.000**	**8.145.279.000**	**6.348.000.000**	**5.244.000.000**

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kesadaran Perum Jamkrindo akan pentingnya keberadaan masyarakat di sekitar lokasi usaha, serta Permen BUMN No. Per-08/mBu/2013.

Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:

1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam ruPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan Bumn Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

The Community Development Program is a social condition empowerment program around the working area of Perum Jamkrindo, which is organized through the use of funds from the profit section. This is done based on the awareness of Perum Jamkrindo on the importance of the community existence around the Company's business location, as well as on the Minister of SOEs Regulations No. PER-08/MBU/2013.

Funds for the Community Development Program come from:

1. *Provision for after-tax net income as stipulated in the GMS/Minister ratification of the Fostering SOE's Annual Report with a maximum of 4% of the previous year's taxable profit;*

2. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dari Program Kemitraan, hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan; dan
3. Sumber lain yang sah.

Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, serta sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Tata cara pemberian pinjaman dana Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:
1. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat.
2. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dilakukan secara langsung oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

Realisasi penyaluran dana terkait Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan Perum Jamkrindo sepanjang 2018 adalah sebesar Rp13.442.834.649 atau naik 49,75% dibandingkan realisasi tahun 2017 sejumlah Rp8,98 miliar.

Adapun kegiatan Program Bina Lingkungan yang telah dilakukan Perum Jamkrindo sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Bantuan kepada korban bencana alam tsunami, gempa, banjir, angin puting beliung dan longsor di Palu, Serang, Lampung, Lombok, Cirebon dan Situbondo total sebesar Rp 546.253.091,-.
2. Bantuan Pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan yang disalurkan ke beberapa wilayah unit kerja Perum Jamkrindo melalui kegiatan Jamkrindo Peduli Pendidikan dengan bantuan pendidikan total sebesar Rp 4.291.276.793,- dengan bantuan sebagai berikut :
   - Bantuan Program Bina Lingkungan Unggulan Pemberian paket Taman Bacaan Sekolah (Lemari buku, buku bacaan, laptop, printer, kipas angin, karpet dan pelatihan sistem administrasi) sebanyak 26 Taman Bacaan Sekolah sebagai berikut :

2. Loan administration/margin/profit sharing services from the Partnership Program, deposit interest and/or demand deposit services from the allocated Partnership Program and Community Development Program funds; and
3. Other legitimate sources.

Funds for the Community Development Program are used for purposes that can provide benefits to the community in the SOEs' business area in the form of assistance to victims of natural disasters, education and/or training, health improvement, development of public infrastructure, facilities for worship, nature preservation, social-community poverty alleviation, and education, training, apprenticeship, marketing, promotion and other forms of assistance related to efforts to increase the capacity of Partnership Program Fostered Partners.

The procedures for granting loans for the Community Development Program are as follows:
1. The Fostering SOEs must conduct surveys and identification in accordance with the conditions and needs in the business area of the Fostering SOEs.
2. The implementation of the Community Development Program is carried out directly by the concerned Fostering SOEs.

The realization of the distribution of funds related to the Community Development Program that has been channeled by Perum Jamkrindo throughout 2018 amounted to IDR13,442,834,649 or went up by 49.75% compared to the realization in 2017 of IDR8,98 billion.

The Community Development Program activities that have been carried out by Perum Jamkrindo throughout 2018 are as follows:

1. Assistance to victims of tsunami, earthquakes, floods, tornadoes, and landslides in Palu, Serang, Lampung, Lombok, Cirebon and Situbondo totaling IDR546,253,091.

2. Educational assistance can be in the form of training, infrastructure, and educational facilities that are distributed to several regions of the Perum Jamkrindo work unit through the Jamkrindo Peduli Pendidikan programs with total educational assistance of IDR4,291,276,793. The form of assistance are as follows:
   - *Superior Community Development Program Assistance with the provision of School Reading Parks packages (which include bookshelves, reading books, laptops, printers, fans, carpets, and administrative system training) to as many as 26 School Reading Parks with the following details:*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

No	Nama Penerima *Names of Recipients*	Nominal (Rp)
1	SD N 173591 Parhitean, Toba Samosir	66.500.000
2	SD N Inpres 1 Koya Timur Papua	63.000.000
3	MI Hidayatul Mubtadi'in, Indramayu	58.500.000
4	MI PUI Jatisawit Lor, Indramayu	58.500.000
5	SDN 05 Tarok Dipo, Bukittinggi	59.500.000
6	SD Kartika I-10 Padang	59.500.000
7	SDN 14 Telaga Biru, Gorontalo	99.000.000
8	SMAN 7 Kupang	67.000.000
9	SMK Al Irsyad Jakarta	55.000.000
10	Yayasan Ritzki Chairani Medan	58.500.000
11	TK Tartila Padang	58.500.000
12	SDN Kopo 3 Bogor	55.000.000
13	SD/MI Amaliyah Bogor	65.000.000
14	SMP Muhammadiyah Almadani Bogor	55.000.000
15	SMP Muhammadiyah 39 Jakarta	55.000.000
16	MI Jakarta Islamic School Jakarta	55.000.000
17	SDN Depok Baru 3	55.000.000
18	Rumah Qur'an Muhammad Natsir Jakarta	55.000.000
19	Yayasan Ar Rabbani Cendekia Insani (YACI) TK Generasi Rabbani Bogor	55.000.000
20	buku -buku di Mts PKP Jakarta	4.970.000
21	Yayasan Para Muallim Bima MTs Al Mukhlisin Lune Dompu	60.250.000
22	SDN 1 Biromaru Palu	62.500.000
23	TBS SDN Kalensari, Subang	91.000.000
24	Taman bacaan firdaus dusun mendiro, ngawi	57.000.000
25	Taman Baca Masyarakat Naga Banjaran	57.250.000
26	TBS SMP Islam Terpadu Azhar	60.250.000
Total		**1.546.720.000**

» Bantuan Program Bina Lingkungan Unggulan renovasi gedung perpustaan dan gedung laboratorium bahasa serta pemberian paket audio visual SMAN 7 Kupang senilai Rp 564.333.720,-

» *The Superior Community Development Program assistance in the form of renovation of library buildings and language laboratory buildings and the provision of audiovisual packages of SMAN 7 Kupang with a total value of IDR564,333,720*

» Pertukaran pelajar Siswa Mengenal Nusantara Gorontalo ke Lampung senilai Rp 262.290.700,-

» Menyelenggarakan vokasi kewirausahaan bagi wartawan bertema Strategi UMKM Sukses di Era Disruption yang bertujuan agar wartawan dapat berbisnis sebesar Rp 42.140.306,-

» Bantuan pendidikan lainnya berupa prasarana dan sarana sekolah dan pondok pesantren.

3. Bantuan Peningkatan Kesehatan sebagai berikut :

» *Students Exchange of 'Siswa Mengenal Nusantara Gorontalo' program to Lampung with a total value of IDR262,290,700*

» *Organizing entrepreneurship vocations for journalists with the theme MSMEs Success Strategies in the Era of Disruption' which aims to enable journalists to do business with a total value of IDR42,140,306*

» *Other educational assistance in the form of school infrastructure and facilities and Islamic boarding schools.*

3. Health Improvement Assistance in the form of the following programs:

No	Bantuan *Assistance*	Nominal (Rp)
1	Donor Darah dalam rangka HUT ke-48 Jamkrindo *Blood Donation in Jamkrindo's 48th Anniversary*	12.000.000
2	Baksos Operasi Katarak dalam rangka HUT ke-48 Jamkrindo di Jawa Barat *Social service for Cataract Surgery in Perum Jamkrindo's 48th Anniversary in West Java*	75.000.000
3	Pengobatan gratis Cahaya Sakti *Free treatment of Cahaya Sakti*	10.000.000
4	Bantuan dana untuk pengadaan Ambulance , yayasan putera bangsa di Banyumas *Funding program for the procurement of Ambulance with Yayasan Putera Bangsa in Banyumas*	15.000.000
Total		**112.000.000**

4. Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana Umum dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat melalui program padat karya tunai untuk mendukung pengembangan daerah wisata di pantai Botutonuo, Gorontalo dengan bantuan pembangunan paving jalan sebesar Rp 100.000.000,- dan bantuan prasarana dan sarana lainnya tersebar di beberapa wilayah kerja Perum Jamkrindo seperti MCK, penampungan air warga, drainase, balai RW yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Bantuan Sarana Ibadah yang diberikan oleh Perum Jamkrindo melalui yayasan, sekolah dan pondok pesantren untuk renovasi dan pembangunan masjid, musholla dan pura.
6. Bantuan Pelestarian Alam diberikan oleh Perum Jamkrindo untuk penanaman 500 pohon rasamala di Bogor dan bibit kelapa genjak salak di Bali sejumlah Rp 57.430.000,-
7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan dlm rangka pengentasan kemiskinan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo berupa:
   » Sembako gratis dalam rangka bulan ramadhan secara serentak di 56 cabang Perum Jamkrindo sejumlah Rp 1.099.721.000,- .

4. Public Infrastructure & Facilities Development Assistance in the context of empowering local communities through cash-intensive programs to support the development of tourism areas on the coast of Botutonuo, Gorontalo with the assistance in the form of road-paving of IDR100,000,000, and other infrastructure and facilities in several Perum Jamkrindo work areas such as the construction of Public Toilet, community water storage, drainage, and village hall; all of which is beneficial for the community.

5. Worship Facilities provided by Perum Jamkrindo through several foundations, schools and Islamic boarding schools for the renovation and construction of mosques, prayer rooms, and temples.

6. Nature Conservation Assistance is provided by the Perum Jamkrindo in the form of planting 500 Rasamala trees in Bogor and coconut seedlings in Bali with a total value of IDR57,430,000.

7. Social Community Assistance in the framework of poverty alleviation provided by Perum Jamkrindo in the form of:

» *Free groceries in the context of Ramadhan month which is conducted simultaneously in 56 Perum Jamkrindo branches totaling at IDR1,099,721,000.*

» Bedah Rumah Veteran (BRV) sinergi bersama 6 (enam) BUMN di Kupang senilai Rp 714.972.500,-.

» Bantuan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo dalam rangka penyaluran KUR Peternakan Sapi untuk peternak sapi di Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Pengayom Tani Sejagad berupa Pembangunan Kandang Komunal Sapi sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp 200.000.000,-

» *Veteran's House Renovation (BRV) as a form of synergy with 6 (six) SOEs in Kupang with a total value of IDR714,972,500.*

» *Assistance provided by Perum Jamkrindo in the context of distributing People's Business Credit for Cattle Farms in Farmer-Owned Enterprises (BUMP) PT Pengayom Tani Sejagad in the form of 2 (two) units of Cattle Communal Cage with a total value of IDR200,000,000,*

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, kickback ataupun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para karyawan secara individu dikenai denda dan/atau hukuman penjara. Undang-undang Antikorupsi, termasuk Peraturan Praktik Korupsi, menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana.

Kebijakan ini dibuat untuk memastikan agar semua karyawan, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan undang-undang antikorupsi terkait. Berkaitan dengan komitmen antikorupsi, Kementerian BUMN telah meluncurkan *roadmap* BUMN Bersih sebagai aksi antikorupsi di lingkungan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku bagi Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara. Atas komitmen itu, pada tahun pelaporan, tidak ada insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.

Selain antikorupsi, Perum Jamkrindo juga berkomitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Sesuai dengan Memorandum No. 006/M/4.1/1/2018 dari Kepala Divisi MSDM kepada Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan perihal Laporan Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi Tahun 2018. Selama tahun 2018, Divisi MSDM tidak menerima laporan mengenai penerimaan atau pemberian (gratifikasi) dari atau kepada mitra keija, nasabah, dan rekanan atau calon mitra kerja/nasabah/rekanan berkenaan dengan tugas dan jabatan seluruh jajaran Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perum Jamkrindo.

ANTI-CORRUPTION POLICY

The Law of the Republic of Indonesia stipulates that paying or offering payments or even accepting bribes, kickbacks or other forms of corrupt payments is a criminal offense that can make the Company and individual employees subject to fines and/or prison sentences. The Anti-Corruption Law, including the Regulations for the Practice of Corruption, categorizes payments, offers, or the giving of anything of value to Company officials with the aim of influencing the actions or decisions of officials, as a criminal offense.

This policy was made to ensure that all employees, officials, and directors, as well as all of the Company's subsidiaries and affiliates, adhere to the Company's Anti-Corruption Policy and related anti-corruption laws. With regards to anti-corruption commitments, the Ministry of BUMN has launched a Clean SOEs roadmap as an anti-corruption measure within the Ministry of SOEs and state-owned companies; and that also applies to Perum Jamkrindo as one of the state companies. For that commitment, in this reporting year, there were no proven corruption incidents and actions taken.

In addition to anti-corruption, Perum Jamkrindo is also committed to rejecting all forms of gratuity. This is in accordance with Memorandum No. 006 / M / 4.1 / 1/2018 from the Head of the HRM Division to the Director of HRM, General Affairs, and Compliance regarding the Report of Receiving or Granting Gratification in 2018. In 2018, the HRM Division did not receive reports on the acceptance or giving (gratuities) from or to partners, customers, and/or prospective work partners/customers with regard to duties and positions throughout the Board of Supervisors, Directors, and Employees of Perum Jamkrindo.

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia



Laporan Tahunan
Annual Report **2018**

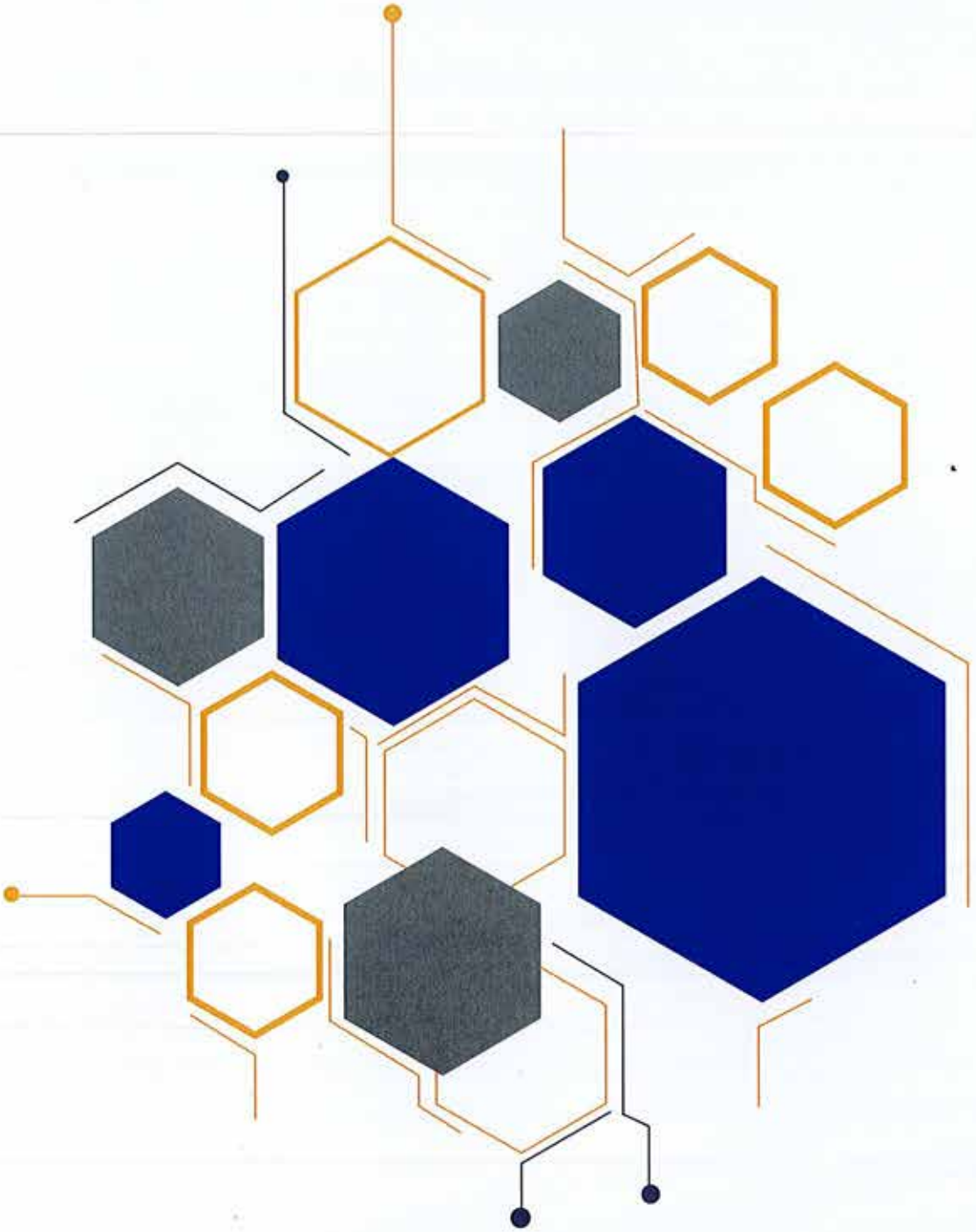
LAMPIRAN
APPENDIX

BUMN
Hadir untuk negeri

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
DISERTAI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENT
FOR THE YEARS THEN ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT



Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab
Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2018
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

Board Of Directors' Statement
Regarding The Responsibility
For The Consolidated Financial Statement
For The Year Ended
As of December 31, 2018
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama	:	Randi Anto
- Jabatan	:	Direktur Utama
- Alamat Kantor	:	Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720
- Nama	:	I. Rusdonobanu
- Jabatan	:	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
- Alamat Kantor	:	Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720

We, the undersigned:

- Name	:	*Randi Anto*
- Function	:	*President Director*
- Office Address	:	*Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720*
- Name	:	*I. Rusdonobanu*
- Function	:	*Risk Management, Investment and Finance Director*
- Office Address	:	*Jl Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720*

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan:
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statement of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia;*
2. *The consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia have been prepared and presented in accordance with indonesian financial accounting standars, and:*
   a. *All information has been fully and correctly disclosed in Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's consolidated financial statements.*
   b. *Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's consolidated financial statements do not contain false material information or fact, nor do they permit material information or fact.*
3. *We are responsible for Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's internal control system.*

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which made is truthfully.

Jakarta, 8 Februari 2019 /
Jakarta, February 8, 2019

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko/
Risk Management, Investment and Finance Director

METERAI TEMPEL
DE730AFF550337573
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Randi Anto

I. Rusdonobanu

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 Desember 2018 dan 2017

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
December 31, 2018 and 2017

Daftar Isi

	Halaman / Page	*Table of Contents*
Laporan Auditor Independen	1 - 4	*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	5 - 6	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	7 - 8	*Statements of Profit or Loss And Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Modal	9 - 10	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	11	*Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	12 - 81	*Notes to the Financial Statements*
Informasi Tambahan	82 - 88	*Supplementary Information*

*****

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Nomor/*Number*: 00002/2.1000/AU.1/08/0912-1/1/II/2019

Laporan Auditor Independen /
Independent Auditors' Report

Kepada Dewan Pengawas dan Direksi /
To The Boards of Supervisory and Directors

PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia ("Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

MEMBER TIAG
A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Management's responsibility for the consolidated financial statements (Continued)

Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standards (SPKN) established by The Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK-RI). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiary as of December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2018 and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial Statements take as a whole. The accompanying additional financial information of Perum Jaminan kredit Indonesia (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2018 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entitiy Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare accompanying consolidated financial statements.

HGK
Hertanto, Grace, Karunawan

Hal Lain (Lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dalam hubungannya dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Other Matter (Continued)

The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedure applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, The Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as a whole.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also examined the company's compliance to laws and regulations. Compliance with laws and regulations is the responsibility of the Company's management.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami nomor 00002/2.1000/LK/08/0912/1/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019.

We submit our report regarding compliance with laws and regulations separately with our report number 00002/2.1000/LK/08/0912/1/II/2019 dated February 8, 2019.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Bambang Karunawan, S.E., Ak., CPA., CA.

Nomor Register Akuntan Publik / *Registered of Public Accountant No. 0912*

Jakarta, 8 Pebruari 2019 / *February 8, 2019*

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	**31 Desember/ *December* 31, 2018**	**31 Desember/ *December* 31, 2017**	
ASET				***ASSETS***
Kas dan Setara Kas	2.f ,2u, 3	6.190.307.278.263	5.417.928.558.090	*Cash and Cash Equivalents*
Surat Berharga	2.f,2.u,2.w, 4	4.124.057.242.998	4.025.861.247.365	*Marketable Securities*
Piutang Imbal Jasa Penjaminan-Bersih	2.l, 5	2.666.852.629.458	2.474.754.220.235	*Guarantee Receivable - Nett*
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih	2.f, 2.h, 2.l, 6	254.606.804.980	120.532.396.074	*Reguarantee Receivable - Nett*
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	2.f, 2.g 2.l, 7	656.333.533	776.333.533	*Loans - Nett*
Piutang Lain-Lain	2.f, 8	104.901.182.852	87.891.596.187	*Other Receivable*
Premi dan Fee Dibayar Dimuka	2.i, 9	1.384.677.311.636	1.132.300.438.990	*Prepaid Premium and Fees*
Beban Dibayar Dimuka	2.i, 10	27.805.926.403	21.689.588.201	*Prepaid Expenses*
Aset tetap - Bersih	2.j, 11	477.067.039.529	471.169.221.028	*Fixed assets - Nett*
Aset Pajak Tangguhan	2.o, 17.c	231.563.227.602	177.252.313.228	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-lain	2.k, 12	778.502.031.330	747.987.111.603	*Other Assets*
JUMLAH ASET		**16.240.997.008.584**	**14.678.143.024.534**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember/ *December* 31, 2018	31 Desember/ *December* 31, 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang Klaim	2.r, 13	85.804.016.553	75.925.490.383	*Claim Payable*
Cadangan Klaim	2.s, 14	456.690.410.738	427.142.720.164	*Claims Reserve*
Utang Penjaminan Ulang	15	188.053.186.910	109.686.987.928	*Co-Guarantee Payable*
Pendapatan Ditangguhkan	16	3.908.674.559.869	2.638.597.771.550	*Unearned Revenue*
Utang Pajak	2.o, 17.a	7.594.082.920	59.549.965.359	*Tax Payable*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.t,18	18.886.986.058	38.907.168.785	*Post Employment Benefit Liabilities*
Utang Lain-Lain	19	279.613.670.754	204.457.625.894	*Other Payable*
JUMLAH LIABILITAS		**4.945.316.913.802**	**3.554.267.730.063**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				***Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity***
Penyertaan Modal Negara	20.a	7.638.733.365.160	7.638.733.365.160	*Government's Share Capital*
Saldo Laba				*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya	20.b	3.193.598.361.143	2.471.937.444.659	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya		397.320.981.986	781.820.701.149	*Unappropriated*
Komponen Ekuitas Lainnya				*Other Equity Component*
Keuntungan (kerugian) Aset yang Tersedia untuk Dijual	20.c	(223.421.776.905)	(58.064.439.835)	*Gain (loss) Financial Assets Available For Sale*
Cadangan revaluasi aset	20.c	289.434.424.383	289.434.424.383	*Asset Revaluation Reserve*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		**11.295.665.355.767**	**11.123.861.495.516**	***Total Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity***
Kepentingan Non-pengendali	2.v, 21	**14.739.015**	**13.798.955**	***Non-controlling Interest***
JUMLAH EKUITAS		**11.295.680.094.782**	**11.123.875.294.471**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**16.240.997.008.584**	**14.678.143.024.534**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2018	2017	
PENDAPATAN PENJAMINAN				***GUARANTEE INCOME***
Imbal Jasa Penjaminan	2.p, 22	1.641.901.735.705	2.036.052.574.099	*Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi	2.p, 22	36.423.541.343	27.223.787.525	*Commission Fee*
Premi *Co-Guarantee*	2.p, 22	(116.764.808.819)	(96.471.972.027)	*Co-Guarantee Premium*
Premi Re-Asuransi	2.p, 22	(215.349.131.741)	(154.312.552.154)	*Reinsurance Premium*
Restitusi Imbal Jasa Penjaminan	2.p, 22	(5.003.118.459)	(6.805.472.327)	*Guarantee Restitution*
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih	**2.p, 22**	**1.341.208.218.029**	**1.805.686.365.116**	***Net Guarantee Revenues***
BEBAN KLAIM				***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	2.r, 23	(1.163.984.699.685)	(971.217.594.834)	*Claim Expenses*
Kenaikan Cadangan Klaim	2.s, 23	(31.048.400.761)	(22.614.674.140)	*Increase in Reserve Claim*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	2.l, 23	(42.325.198.501)	(10.777.367.505)	*Impairment Losses of Receivable*
Jumlah Beban Klaim		**(1.237.358.298.947)**	**(1.004.609.636.479)**	***Total Claim Expenses***
PENJAMINAN BERSIH		**103.849.919.082**	**801.076.728.637**	***OPERATING INCOME - NET***
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH	24	**684.108.412.718**	**601.634.006.083**	***INVESTMENT INCOME - NET***
PENDAPATAN LAIN-LAIN	26	**511.098.615.744**	**328.679.048.443**	***OTHERS INCOME***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	25	(242.149.926.554)	(228.402.367.101)	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	25	(383.172.454.283)	(325.822.267.767)	*Human Resource Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	25	(138.965.421.049)	(132.938.891.723)	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	25	(26.485.347.446)	(21.005.555.703)	*System, Technology, and Operating Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha		**(790.773.149.332)**	**(708.169.082.294)**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK		**508.283.798.212**	**1.023.220.700.869**	***INCOME BEFORE TAX***
Pajak kini		(117.273.861.679)	(247.360.565.250)	*Current income tax*
Manfaat pajak tangguhan		6.533.435.466	25.986.025.219	*Deferred tax income*
Beban pajak penghasilan	17.b	**(110.740.426.213)**	**(221.374.540.031)**	***Total Income tax expenses***
LABA TAHUN BERJALAN		**397.543.371.999**	**801.846.160.838**	***CURRENT YEAR INCOME***

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2018	2017	
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)***
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi:				*Items That Will Not Be Reclassified To Profit And Loss*
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	18	25.994.023.091	(1.234.793.443)	*Remeasurement of Post Employment Benefit*
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasti		(6.190.757.709)	308.698.361	*Related Deffered Tax Restatement on Defined Benefits Obligation*
Pos-pos Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi Ketika Kondisi Tertentu Terpenuhi:				*Items That Will Be Reclassified To Profit and Loss Due to Certain Conditions:*
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual		(210.036.507.467)	82.413.699.217	*Gain (Loss) Financial Assets Available For Sale*
Pajak Tangguhan Terkait Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual		54.275.984.681	(23.656.795.267)	*Related Deferred Tax Financial Instrument of Available For Sale*
Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain		(135.957.257.404)	57.830.808.868	*Total Other Comprehensive Income (Expense)*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**261.586.114.595**	**859.676.969.706**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		**397.542.431.939**	**801.845.416.483**	*Equity Holders of The Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali		**940.060**	**744.355**	*Non-controlling Interest*
JUMLAH		**397.543.371.999**	**801.846.160.838**	***TOTAL***
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***COMPREHENSIVE INCOME THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		**261.585.174.535**	**859.676.225.351**	*Equity Holders of The Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali		**940.060**	**744.355**	*Non-controlling Interest*
JUMLAH		**261.586.114.595**	**859.676.969.706**	***TOTAL***

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS PERIODS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(Expressed in Full Rupiah, unless otherwise stated)

		Saldo Laba/ *Retained Earning*		Pendapatan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensive Income*					
	Penyertaan Modal Pemerintah / *Government's Share Placement*	Ditentukan Penggunaannya / *Appropriated*	Belum Ditentukan penggunaannya / *Unappropriated *)*	Keuntungan (kerugian) Aset yang Tersedia untuk Dijual / *Gain (loss) Financial Assets Available For Sale*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset Revaluation Reserve*	Jumlah /*Total*	Kepentingan Non Pengendali / *Non-Controlling Interest*	Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2017	**7.638.733.365.160**	**1.828.847.314.244**	**672.946.275.112**	**(129.450.748.661)**	**288.479.659.435**	**10.299.555.865.290**	**13.122.707**	**10.299.568.987.997**	***Balance as of January 1, 2017***
Pembagian Laba Tahun 2017:									*Distribution of 2017 profits :*
Cadangan Umum	-	643.090.130.415	(643.090.130.415)	-	-	-	-	-	*General Reserve*
Dividen	-	-	(48.000.000.000)	-	-	(48.000.000.000)	(68.107)	(48.000.068.107)	*Dividend*
Pelepasan Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	-	-	-	12.629.404.876	-	12.629.404.876	-	12.629.404.876	*Disposal of Financial Instruments Available for Sale*
Laba Tahun Berjalan	-	-	801.845.416.483	-	-	801.845.416.483	744.355	801.846.160.838	*Current Year Income*
Pendapatan Komprehensif Lainnya :						-		-	*Other Comprehensive Income:*
Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	-	-	-	58.756.903.950	-	- 58.756.903.950	-	- 58.756.903.950	*Financial Instruments Available for Sale*
Revaluasi Aset Tetap	-	-	(954.764.948)	-	954.764.948	-	-	-	*Fixed Assets Revaluation*
Imbalan Pasca Kerja	-	-	(926.095.083)	-	-	(926.095.083)	-	(926.095.083)	*Employee Benefit*
Saldo 31 Desember 2017	**7.638.733.365.160**	**2.471.937.444.659**	**781.820.701.149**	**(58.064.439.835)**	**289.434.424.383**	**11.123.861.495.516**	**13.798.955**	**11.123.875.294.471**	***Balance as of December 31, 2017***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak adalah sebesar (Rp20.024.715.335).

**) Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefits, net of tax amounting to (Rp20,024,715,335).*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan / *The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements*

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS PERIODS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(Expressed in Full Rupiah, unless otherwise stated)

		Saldo Laba/ *Retained Earning*		Pendapatan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensive Income*					
	Penyertaan Modal Pemerintah / *Government's Share Placement*	Ditentukan Penggunaannya / *Appropriated*	Belum Ditentukan penggunaannya / *Unappropriated *)*	Keuntungan (kerugian) Aset yang Tersedia untuk Dijual / *Gain (loss) Financial Assets Available For Sale*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset Revaluation Reserve*	Jumlah /*Total*	Kepentingan Non Pengendali / *Non-Controlling Interest*	Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	
Saldo 1 Januari 2018	**7.638.733.365.160**	**2.471.937.444.659**	**781.820.701.149**	**(58.064.439.835)**	**289.434.424.383**	**11.123.861.495.516**	**13.798.955**	**11.123.875.294.471**	***Balance as of January 1, 2018***
Pembagian Laba Tahun 2017 :									*Distribution of 2017 profits :*
Cadangan Umum	-	721.660.916.484	(721.660.916.484)	-	-	-	-	-	*General Reserve*
Dividen	-	-	(80.184.500.000)	-	-	(80.184.500.000)	-	(80.184.500.000)	*Dividend*
Laba Tahun Berjalan	-	-	397.542.431.939	-	-	397.542.431.939	940.060	397.543.371.999	*Current Year Income*
Pelepasan Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	-	-	-	(9.596.814.284)	-	(9.596.814.284)	-	(9.596.814.284)	*Disposal of Financial Instruments Available for Sale*
Pendapatan Komprehensif Lainnya :									*Other Comprehensive Income :*
Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	-	-	-	(155.760.522.786)	-	(155.760.522.786)	-	(155.760.522.786)	*Financial Instruments Available for Sale*
Imbalan Pasca Kerja	-	-	19.803.265.382	-	-	19.803.265.382	-	19.803.265.382	*Employee Benefit*
Saldo 31 Desember 2018	**7.638.733.365.160**	**3.193.598.361.143**	**397.320.981.986**	**(223.421.776.905)**	**289.434.424.383**	**11.295.665.355.767**	**14.739.015**	**11.295.680.094.782**	***Balance as of December 31, 2018***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak adalah sebesar (Rp221.449.953).

**) Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefits, net of tax amounting to (Rp221,449,953).*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan / *The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements*

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KONSOLIDASIAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY
STATEMENTS OF CASH FLOWS CONSOLIDATED
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Imbalan Jasa Penjaminan	2.644.529.772.242	2.153.622.469.334	*Receipt from Guarantee Fee*
Pembayaraan Klaim dari Mitra *Co-Guarantee* dan *Re-Guarantee*	(132.248.265.853)	(15.606.448.656)	*Payment to Co-Guarantee and Re-Guarantee Partners*
Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya	551.741.732.311	375.077.835.087	*Receipt from Other Operating Activities*
Pembayaran Imbalan Jasa Co Guarantee	(515.544.976.308)	(348.848.626.181)	*Payment of Fee Co Guarantee*
Pembayaran Klaim	(1.157.327.226.437)	(906.941.686.053)	*Payment of Claims*
Pembayaran Biaya	(213.454.120.090)	(143.293.209.736)	*Payment of Expenses*
Pembayaran Aktivitas Lainnya	(185.562.919.359)	(207.446.495.795)	*Payment of Other Activities*
Pembayaran kepada Karyawan	(383.172.454.283)	(298.911.644.485)	*Payment to Employee*
Pembayaran Pajak Penghasilan	(117.273.861.679)	(257.345.741.750)	*Payment of Income Tax*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**491.687.680.544**	**350.306.451.765**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES***
Penerimaan Hasil Investasi	649.002.332.194	526.819.353.226	*Receipt from Return of Investment*
Penerimaan Aktivitas Investasi Lainnya	23.741.278.307	9.924.305.869	*Receipt from Other Investment*
Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(280.085.662.765)	(1.093.350.454.202)	*Placement of Allowed Investment*
Pembelian Aset Tetap	(27.415.267.797)	(47.770.981.387)	*Acquisition of Fixed Assets*
Pembayaran Aktivitas Investasi Lainnya	(4.367.140.309)	(3.815.568.027)	*Payment of Other Investment Activities*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**360.875.539.630**	**(608.193.344.520)**	***Net cash used in investment activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran Dividen	(80.184.500.000)	(48.000.068.107)	*Payment of Dividend*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(80.184.500.000)**	**(48.000.068.107)**	***Net cash provided from financing activities***
(Penurunan) kenaikan kas dan Setara kas	772.378.720.174	(305.886.960.863)	***(Decreased) increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	5.417.928.558.090	5.723.815.518.953	***Cash and equivalents at the beginning of year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**6.190.307.278.263**	**5.417.928.558.090**	***Cash and equivalents at the end of year***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 diubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 2018, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat terletak di Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta dan mempunyai 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

b. Lingkup Usaha

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai maupun non tunai yang diberikan Bank atau badan Usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

c. Struktur dan Manajemen

Pada tanggal 30 Mei 2018, Keputusan Direksi No. 36/Kep-Dir/IV/2016 Pada tanggal 20 April 2016 tentang Struktur Organisasi Perum Jaminan Kredit Indonesia menetapkan Perubahan Nama dan Fungsi Susunan Organisasi, diubah menjadi Keputusan Direksi No. 01/KD/I/V/2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum Jamkrindo menetapkan dengan hormat Randi Anto sebagai Direktur Utama Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menetapkan Amin Mas'udi sebagai Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum Jamkrindo menetapkan Kadar Wisnuwarman sebagai Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menetapkan Sulis Usdoko sebagai Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Perum Jamkrindo.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of Company

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Company") was established under the name Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, was established based on Government Regulation No. 51 year 1981 which is merged from Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which is formed by 1970. Based on the Government Regulation No. 51 year 1981, which is renewed by Government Regulation No. 27 year 1985, here in after by Government Regulation No. 95 year 2000 dated November 7, 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi was changed by Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, and based on PP No. 41 Year 2008 the name was changed again become Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. On July 20, 2018, Government Regulation No. 41 of 2008 was changed to Government Regulation No. 35 of 2018.

The company located in Jakarta, which Head Office located in Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta and have 9 regional offices, 56 branch offices, and 16 unit service offices which spread over in all Indonesia.

b. Scope of Business

Based on Government Regulation No. 35 Year 2018, the main business activity of Company is guarantee of loan either in form of cash or non cash which is provided by Bank or Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives.

c. Organizational and Management Stucture

On May 30, 2018, Directors Decree No. 36 / Kep-Dir / IV / 2016 On April 20, 2016 concerning the Organizational Structure of the Indonesian Credit Guarantee Corporation stipulating the Amendment to the Name and Function of the Organizational Structure, changed to Decree of the Board of Directors No. 01 / KD / I / V / 2018.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-249 / MBU / 11/2017 dated November 21, 2017 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jamkrindo, Randi Anto appoints as President Director of Perum Jamkrindo.

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises Number: SK-187 / MBU / 09/2017 dated September 7, 2017 concerning Termination, Change of Nomenclature, Position, Assignment of Assignments, and Appointment of Members of the Board of Directors of General Companies (Perum) Indonesian Credit Guarantee stipulates Amin Mas udi is the Director of the Jamkrindo Perum Guarantee Business.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-249 / MBU / 11/2017 dated November 21, 2017 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors Perum Jamkrindo assigns Kadar Wisnuwarman as Director of Operations and Network.

Based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-187 / MBU / 09/2017 dated September 7, 2017 concerning Dismissal, Amendment of Nomenclature, and Appointment of Members of the Public Corporation of Indonesia Credit Guarantee stipulates Sulis Usdoko as HRD, General Affair and Compliance Director of HRD, General Affair and Compliance.

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Struktur dan Manajemen (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-22/MBU/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menetapkan I Rusdonobanu sebagai Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, memberhentikan dengan hormat Braman Setyo sebagai Ketua Dewan Pengawas dan menetapkan Sri Mulyanto sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, memberhentikan dengan hormat Nasaruddin Umar sebagai anggota Dewan Pengawas dan menetapkan Diah Natalisa sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo.

Susunan Dewan Pengawas, Direksi dan Komite Audit Perum Jamkrindo untuk per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Dewan Pengawas		***The Board of Supervisor Council***
Ketua	Sri Mulyanto	*Chairman*
Anggota	Subandriyo	*Member*
Anggota	Noor Ida Khomsiyati	*Member*
Anggota	Diah Natalisa	*Member*
Direksi		***The Board of Directors***
Direktur Utama	Randi Anto	*President Director*
Direktur Bisnis Penjaminan	Amin Mas'udi	*Business Guarantee Director*
Direktur Operasional dan Jaringan	Kadar Wisnuwarman	*Operational and Network Director*
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Sulis Usdoko	*HRD, General Affair and Compliance Director*
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	I. Rusdonobanu	*Finance, Investment and Risk Management Director*
Komite		***Committee***
Komite Audit	Dody Heriawan Priatmoko	*Audit Committee*
Komite Investasi dan Risiko Usaha	Slamet Wiyono	*Risk Management Committee*
Dewan Pengawas Syariah		***The Board of Supervisor Council Sharia***
Ketua	Hasanuddin	*Chairman*
Anggota	Muhammad Syakir Sula	*Member*

Susunan Dewan Pengawas, Direksi dan Komite Audit Perum Jamkrindo untuk per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Dewan Pengawas		***The Board of Supervisor Council***
Ketua	Sri Mulyanto	*Chairman*
Anggota	Dahlan Siamat	*Member*
Anggota	Noor Ida Khomsiyati	*Member*
Anggota	Diah Natalisa	*Member*
Anggota	Subandriyo	*Member*
Direksi		***The Board of Directors***
Direktur Utama	Randi Anto	*President Director*
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Sulis Usdoko	*HRD, General Affair and Compliance Director*
Direktur Bisnis Penjaminan	Amin Mas'udi	*Business Guarantee Director*
Direktur Operasional dan Jaringan	Kadar Wisnuwarman	*Operational and Network Director*
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	I. Rusdonobanu	*Finance, Investment and Risk Management Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Dahlan Siamat	*Chairman*
Anggota	Dody Heraiwan Priatmoko	*Member*
Dewan Pengawas Syariah		***The Board of Supervisor Council Sharia***
Ketua	Hasanuddin	*Chairman*
Anggota	Muhammad Syakir Sula	*Member*

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Organizational and Management Stucture (Continued)

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-22 / MBU / 01/2018 dated January 18, 2018 concerning the Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of the Public Company (Perum) Indonesian Credit Guarantee, I appointed Rusrusobanu as the Director of Finance, Investment and Risk Management of the Indonesian

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-233 / MBU / 10/2017 dated October 27, 2017 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Indonesian Company Public Credit Supervisory Board (Perum), honorably dismissing Braman Setyo as Chair of the Supervisory Board and stipulates Sri Mulyanto as Chair of the Supervisory Board concurrently the Independent Supervisory Board of Perum Jamkrindo.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-88 / MBU / 05/2017 dated May 3, 2017 on Termination, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Supervisory Board of Public Company (Perum) Credit Guarantee Indonesia, dismissed with honor Nasaruddin Umar as a member of the supervisory board and appointed Diah Natalisa as a member of the Supervisory Board.

The Board of Supervisor Council, Board of Directors and the Audit Committee of Perum Jamkrindo as of December 31, 2018 as

The Board of Supervisor Council, Board of Directors and the Audit Committee of Perum Jamkrindo as of December 31, 2017 as

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Struktur dan Manajemen (Lanjutan)

Jumlah pegawai Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Tahun	Tetap / *Permanent*	Tidak tetap / *Non-permanent*	Jumlah / *Total*	*Year*
2018	1002	556	1.558	**2018**
2017	1042	512	1.554	**2017**

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ The Subsidiary	*Kegiatan usaha/ Business activity*	Tanggal mulai beroperasi komersial / *Date started commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownerships*	*Jumlah Aset / Total Assets*
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Penjaminan Syariah	19 September 2014	99,995%	Rp746.638.381.732

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 68 tanggal 19 September 2014.

Entitas anak bergerak dalam bidang usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

1. *GENERAL INFORMATION (Continued)*

c. *Organizational and Management Stucture (Continued)*

The number of employees of Perum Jamkrindo are as follows (unaudited):

d. *Consolidated Subsidiary*

Company has direct ownership in the following Subsidiary:

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah was established based on Notarial Deed No. 68 dated September 19, 2014.

Main business of the subsidiary is guarantee business based on syariah principles.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidasian Perum Jamkrindo dan Entitas Anak ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Pada tanggal 31 Desember 2018.

Kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, menggunakan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No.102, "Akuntansi Murabahah", PSAK No.104, "Akuntansi Istihna", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No.106, "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah", PSAK No.110, "Akuntansi Sukuk".

Laporan keuangan konsolidasian disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah dan bangunan, aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*

The consolidated financial statements of Perum Jamkrindo and Subsidiaries were completed and authorised for issuance by The Board of Directors on Desember 31, 2018.

The significant accounting policies, applied consistently in the preparation of the financial statements of the company for the years ended December 31, 2018 and 2017 were as follows:

a. *Basis of preparation of the consolidated financial statements*

The Consolidated financial statements for the years ended December 31, 2017 and 2016 were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Indonesian Institute of Accountants.

The Company's financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards in Indonesia, used the historical cost basis, except for financial assets classified as available for sale, financial assets and liabilities held at fair value through profit and loss, and on an accrual basis, including the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 101 (Revised 2011), "Presentation of Financial Statements Sharia", SFAS 102, "Accounting Murabaha", SFAS No.104, "Accounting Istihna "SFAS No. 105, "Accounting Mudaraba", SFAS 106, "Accounting Musharaka", SFAS No. 107, "Accounting for Ijarah", SFAS 110, "Accounting for Sukuk".

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, as modified by the revaluation of land and buildings, available-for-sale financial assets, and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting, with some exceptions as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (Lanjutan)

1) Aset yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;

2) Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang menggunakan dasar kas; dan

3) Pendapatan imbalan (ujrah) jasa tertentu dan pendapatan adminstrasi pembiayaan yang diakui menggunakan dasar kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensial.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan beserta Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Perusahaan.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun tertentu, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan kedalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut dimulai diperoleh hingga saat pengendalian atas Entitas Anak itu berakhir.

Pengendalian dianggap ada bilamana Perusahaan menguasai lebih dari lima puluh persen (50%) hak suara di Entitas Anak, atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas anggota Direksi di Entitas Anak.

Seluruh saldo utang piutang serta transaksi antar perusahaan konsolidasian dieliminasi. Hak pemegang saham minoritas dalam ekuitas dan hasil usaha dari Entitas Anak yang dikonsolidasi disajikan secara tersendiri dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

c. Usaha yang Berkelanjutan

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak memperoleh bukti objektif tentang ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (Continued)

1) Foreclosed assets in connection with the completion of the financing are recorded at net realizable value;

2) Calculation of income available to the results using the cash basis; and

3) Income benefits (ujrah) certain services and financing revenue administration recognized using the cash basis.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows reporting, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits can be withdrawn at any time and short-term liquid investments with original maturities of three months or less, to the extent not used as collateral and unrestricted.

Conventional entity conducting sharia transaction do not need to set up sharia financial statements in full but only report the sharia transaction in accordance with the accounting standards of sharia in conventional financial statements.

b. Principle of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiary are under the control of the Company.

In terms of control to the subsidiary commencing or ending in a particular year, then the results of operations of subsidiaries accounted into the consolidated financial statements only from the date that the control starts up to the date control of the subsidiary ended.

Control is presumed to exist where more than fifty percent (50%) of the voting rights in the Subsidiary, or control the removal or appointment of a majority of the directors in the Subsidiary.

The entire balance of accounts payable as well as transactions between consolidated companies are eliminated. Rights of minority shareholders in the equity and results of operations of consolidated subsidiary are presented separately in the consolidated financial statements.

The financial statements are prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia, which are accompanied by statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants Association.

c. Going Concern

Subsidiary is fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through another subsidiary, more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control.

Management has conducted an assessment of the Company's ability to continue its business continuity and convinced that the company has sufficient resources to continue its efforts in the future. In addition, the management company does not obtain objective evidence about uncertainties of material that can cause significant losses to the company's ability to continue its business. Therefore, the company's financial statements for the year ended December 31, 2018 have been prepared on the basis of a sustainable business.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui Pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan secara khusus.

Pertimbangan dan estimasi signifikan adalah sebagai berikut:

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk menggunakan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Dalam mengestimasi arus kas, Perusahaan melakukan penilaian tentang kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih dari agunan.

Penurunan Nilai Piutang

Perusahaan meriviu piutang secara individual pada setiap akhir periode pelaporan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi.

Secara khusus, pertimbangan oleh manajemen diperlukan dalam mengestimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin akan berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai di masa mendatang.

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2018, Perum Jamkrindo dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perum Jamkrindo dan Entitas Anak, dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Use of Judgements, Estimates and Assumptions

In preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standard requires management to make judgments, estimates and assumptions that effect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimate and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised and future periods affected by the revised estimate.

Figures in these financial statements are rounded to and stated in Rupiah, unless otherwise stated.

The most significant uses of the judgement and estimates are as

Fair value of financial instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the financial position statements cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. In estimating these cash flows, the Company makes judgement about the borrower's financial condition and the net realizable value of collateral.

Impairment Losses on Receivables

The Company reviews its receivable individually at each the end of reporting dates to assess whether an impairment loss should be recorded in the income statement.

In particular, judgement by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may be different, resulting in future changes to the allowance.

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

On January 1, 2018, Perum Jamkrindo and Subsidiaries adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Perum Jamkrindo and Subsidiaries accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to Perum Jamkrindo and Subsidiaries accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

1) Amandemen PSAK 2 “Laporan arus kas”

Amandemen tersebut mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktifitas pembiayaan pada laporan arus kas.

2) Amandemen PSAK 13 “Properti investasi”

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk mengalihkan ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan.

Untuk menyimpulkan bahwa terdapat perubahan penggunaan terjadi, pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi. Perubahan ini harus didukung oleh bukti atas penggunaan perubahan. Pada amandemen ini, dikonfirmasi juga bahwa perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan bukti perubahan penggunaan.

3) Amandemen PSAK 15 “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama”

Amandemen tersebut mengizinkan perusahaan modal ventura, reksa dana, unit trust dan entitas serupa untuk memilih pengukuran inestasi mereka di perusahaan asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). DSAK mengklarifikasi bahwa pemilihan tersebut harus dilakukan secara terpisah untuk setiap

4) Amandemen PSAK 16 “Aset tetap”

Amandemen tersebut memberikan klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran dari tanaman produksi harus sesuai dengan standar yang relevan.

5) Amandemen PSAK 46 “Pajak penghasilan”

Amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan untuk mengakui asset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi. Amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah asset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih rendah dari dasar pengenaaan pajak atas asset tersebut. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi aspek tertentu dari akuntansi untuk pajak tangguhan.

6) Amandemen PSAK 53 “Pembayaran berbasis saham”

Amandemen ini mengklarifikasi basis pengukuran untuk pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas dan akuntansi untuk modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang sebelumnya diklasifikasikan dari imbalan yang diselesaikan dengan kas menjadi imbalan yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Amandemen ini juga memperkenalkan sebuah pengecualian terhadap prinsip pada PSAK 53 yang mengharuskan suatu penghargaan diakui seakan-akan seluruhnya akan diselesaikan melalui pembayaran berbasis saham, ketika pemberi kerja diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pekerja terkait dengan pembayaran berbasis saham dan membayarkannya kepada otoritas pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (Continued)

1) Amendment to SFAS 2 “Statement of cash flows”

The amendment requires entity to explain changes in their liabilities for which cash flows have been, or will be classified as financing activities in the statement of cash flows.

2) Amendment to SFAS 13 “Investment property”

The amendment clarified that to transfer to, or from, investment properties there must be a change in use.

To conclude if a property has changed use, there should be an assessment of whether the property meets the definition of the investment property. This change must be supported by evidence. It is confirmed that a change in intention, in isolation, is not enough to support a transfer.

3) Amendment to SFAS 15 “Investment in associate and joint venture”

The amendment allows venture capital organisations, mutual funds, unit trusts and similar entities to elect measuring their investments in associates or joint ventures at fair value through profit or loss (FVTPL). The Board clarified that this election should be made separately for each associate or joint venture at initial recognition.

4) Amendment to SFAS 16 “Property, plant and equipment

The amendment provides the clarification that biological assets that meet the definition of bearer plants are accounted for as fixed assets; definition, recognition and measurement of the bearer plant sshall be made in accordance with the relevant standard.

5) Amendment to SFAS 46 “Income taxes”

The amendments clarify the requirements for recognising deferred tax assets on unrealized losses. The amendments clarify the accounting for deferred tax where an asset is measured at fair value and that fair value is below the asset’s tax base. The amendment also clarify certain other aspects of accounting for deferred tax assets.

6) Amendment to SFAS 53 “Share-based payment”

The amendment clarifies the measurement basis for cash-settled, share-based payments and the accounting for modifications that change an award from cashsettled to equity-settled. It also introduces an exception to the principles in SFAS 53 that will require an award to be treated as if it was wholly equity-settled, where an employer is obliged to withhold an amount for the employee’s tax obligation associated with a share-based payment and pay that amount to the tax authority.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

7) Amandemen PSAK 67 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain"

Amandemen tersebut berlaku untuk kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sifat dari kepentingan di entitas lain, risiko yang terasosiasi dengan kepentingan dan efek dari kepentingan tersebut untuk laporan keuangan.

8) PSAK 69 "Agrikultur"

Standar ini menyajikan definisi dan kriteria pengakuan untuk aset biologis atau hasil agrikultur. Aset-aset tersebut diukur menggunakan nilai wajar dikurangi harga jual dengan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut :

- ISAK 33 "Transaksi valuta asing dan imbalan di muka"
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan"

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan. Perusahaan telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- PSAK 71 "Instrumen keuangan"

PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk asset keuangan.

Sementara ini Perusahaan belum melakukan kajian yang terperinci atas klasifikasi dan pengukuran dari asset keuangan, instrument utang yang sekarang diklasifikasi sebagai asset keuangan yang tersedia untuk dijual dianggap memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai asset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dengan begitu tidak ada perubahan perlakuan akuntansi untuk asset-aset tersebut.

Aset keuangan lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan mencakup:

a. instrument ekuitas yang sekarang diklasifikasikan sebagai AFS dimana pemilihan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya tersedia;

b. investasi dalam ekuitas yang sekarang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang kemungkinan besar akan dilanjutkan untuk diukur berdasarkan basis yang sama di bawah PSAK 71, dan

c. instrumen utang yang sekarang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan diukur pada biaya amortisasi yang tampaknya memenuhi persyaratan untuk klasifikasi pada biaya amortisasi di bawah PSAK 71.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (Continued)

7) Amendment to SFAS 67 "Disclosure of interests in other entities"

The amendment is applicable to interests in entities classified as held-for-sale except for summarised financial information. The objective of SFAS 67 was to provide information about the nature of interests in other entities, risks associated with these interests, and the effect of these interests on financial statements

8) SFAS 69 "Agriculture"

The standard provides definition and recognition criteria for biological assets or agricultural produce. Those assets are measured at fair value less cost to sell with the changes in the carrying amounts recognized in the profit or loss.

New standards, amendments and interpretations issued but effective for the financial year beginning 1 January 2019 are as follows :

- *ISFAS 33 "Foreign currency transactions and advance consideration"*
- *ISFAS 34 "Uncertainty over income tax treatments*

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended 31 December 2018 and have not been early adopted by the Company. The Company has assessed the impact of these new standards and interpretations as set out below:

- *SFAS 71 "Financial instruments"*

SFAF 71 addresses the classification, measurement and derecognition of financial assets and financial liabilities, introduces new rules for hedge accounting and a new impairment model for financial assets.

While the Company has yet to undertake a detailed assessment of the classification and measurement of financial assets, debt instruments currently classified as available-for-sale (AfS) financial assets would appear to satisfy the conditions for classification as at fair value through other comprehensive income (FVOCI) and hence there will be no change to the accounting treatment for these assets.

The other financial assets held by the Company include:

a. *equity instruments currently classified as AfS for which a FVOCI election is available;*

b. *equity investments currently measured at fair value through profit or loss (FVPL) which would likely continue to be measured on the same basis under SFAS 71; and*

c. *debt instruments currently classified as held-to maturity and measured at amortised cost which appear to meet the conditions for classification at amortised cost under SFAS 71.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengharapkan pedoman baru tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangannya.

Tidak akan ada dampak terhadap perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan Perusahaan, karena persyaratan yang baru hanya berdampak kepada perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dan Perusahaan tidak memiliki liabilitas tersebut. Peraturan penghentian pengakuan telah dipindahkan dari PSAK 55 dan tidak mengalami perubahan.

Peraturan akuntansi lindung nilai yang baru akan menyelaraskan akuntansi untuk instrumen lindung nilai lebih dekat lagi dengan praktik manajemen risiko Perusahaan. Sebagai peraturan umum, akan lebih banyak lagi hubungan lindung nilai yang dapat memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai, karena standar memperkenalkan pendekatan yang lebih berbasis prinsip. Sementara Perusahaan masih belum melakukan tinjauan yang mendalam, aktivitas lindung nilai Perusahaan sekarang akan tampak memenuhi persyaratan sebagai lindung nilai setelah menerapkan PSAK 71. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengharapkan dampak signifikan atas akuntansi untuk aktifitas lindung nilai.

Model penurunan nilai yang baru mensyaratkan pengakuan atas provisi penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit espektasian daripada hanya kerugian kredit seperti kasus dalam PSAK 55. Hal ini berlaku untuk aset keuangan diklasifikasi dalam biaya amortisasi, instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, kontrak aset dalam PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak Pelanggan, piutang sewa, komitmen pinjaman dan kontrak garansi keuangan tertentu. Sementara Perusahaan belum melakukan tinjauan mendalam tentang bagaimana provisi penurunan nilainya akan terkena dampak model baru ini, hal itu dapat menghasilkan pengakuan dini atas kerugian kredit.

Standar baru juga memperluas persyaratan pengungkapan dan perubahan penyajian. Hal ini diharapkan mengubah sifat dan batasan dari pengungkapan Perusahaan tentang instrumen keuangan terutama pada tahun penerapan standar baru.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan.

- Amandemen PSAK 62 “Kontrak asuransi”

  Amendemen ini merupakan amendemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamendemen memberikan petunjuk bagi perusahaan yang mengeluarkan kontrak asuransi, terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71.

- PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”

  Sebuah standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini akan menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (Continued)

Accordingly, the Company does not expect the new guidance to have a significant impact on the classification and measurement of its financial assets.

There will be no impact on the Company’s accounting for financial liabilities, as the new requirements only affect the accounting for financial liabilities that are designated at fair value through profit or loss and the Company does not have any such liabilities. The derecognition rules have been transferred from SFAS 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement and have not been changed.

The new hedge accounting rules will align the accounting for hedging instruments more closely with the Company’s risk management practices. As a general rule, more hedge relationships might be eligible for hedge accounting, as the standard introduces a more principles-based approach. While the Company is yet to undertake a detailed assessment, it would appear that the Company’s current hedge relationships would qualify as continuing hedges upon the adoption of SFAS 71. Accordingly, the Company does not expect a significant impact on the accounting for its hedging relationships.

The new impairment model requires the recognition of impairment provisions based on expected credit losses (ECL) rather than only incurred credit losses as is the case under SFAS 55. It applies to financial assets classified at amortised cost, debt instruments measured at FVOCI, contract assets under SFAS 72 Revenue from Contracts with Customers, lease receivables, loan commitments and certain financial guarantee contracts. While the Company has not yet undertaken a detailed assessment of how its impairment provisions would be affected by the new model, it may result in an earlier recognition of credit losses.

The new standard also introduces expanded disclosure requirements and changes in presentation. These are expected to change the nature and extent of the Company’s disclosures about its financial instruments particularly in the year of the adoption of the new standard.

This standard must be applied for financial years commencing on or after 1 January 2020. Early adoption is permitted.

- *Amandment of SFAS 62 ‘Insurance contracts’*

  This amendment is a consequential amendment due to the issuance of SFAS 71. The amended standard provides guidance for company who's issuing insurance contract, especially insurance company, on how to implementing SFAS 71.

- *SFAS 72 “Revenue from contracts with customers”*

  A new standard for the recognition of revenue has been issued. This will replace SFAS 23 which covers contracts for goods and services and SFAS 34 which covers construction contracts. The new standard is based on the principle that revenue is recognised when control of a good or service transfers to a customer.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

Standar mengijinkan pendekatan retrospektif penuh atau retrospektif modifikasian untuk penerapan.

Manajemen sedang meninjau efek dari penerapan standar baru atas laporan keuangan Perusahaan dan telah mengidentifikasi hal-hal berikut yang akan terkena dampak:

1) Akuntansi untuk program loyalitas pelanggan – PSAK 23 menyaratkan total imbalan yang diperoleh harus dialokasi ke poin dan barang berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif daripada metode nilai residu; hal ini dapat menghasilkan perbedaan antara jumlah yang dialokasi ke barang yang dijual dan keterlambatan pengakuan porsi penghasilan.

2) Akuntansi untuk biaya tertentu yang terjadi dalam pemenuhan kontrak – biaya tertentu yang saat ini dibebankan mungkin harus diakui sebagai aset dalam PSAK 72, dan

3) Hak pengembalian – PSAK 72 mensyaratkan penyajian terpisah di laporan posisi keuangan atas hak pemulihan barang dari pelanggan dan kewajiban pengembalian.

Dalam tahap ini, Perusahaan tidak dapat mengestimasi dampak dari standar baru terhadap laporan keuangan Perusahaan. Perusahaan akan melakukan peninjauan yang lebih mendalam atas dampaknya terhadap periode dua belas bulan ke depan.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 73 “Sewa”

PSAK 73 disahkan di September 2017. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.

Perlakuan akuntansi untuk pesewa tidak akan berbeda secara signifikan.

Beberapa komitmen dapat dicakup oleh pengecualian untuk sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah dan beberapa komitmen dapat berhubungan dengan pengaturan yang tidak memenuhi syarat sewa dalam PSAK 73.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan khusus bagi entitas yang telah menerapkan PSAK 72. Perusahaan tidak bermaksud untuk mengadopsi standar ini sebelum tanggal efektifnya.

Penerapan akuntansi baru dan amendemen lainnya tidak berdampak potensial terhadap laporan keuangannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (Continued)

The standard permits either a full retrospective or a modified retrospective approach for the adoption.

Management is currently assessing the effects of applying the new standard on the group’s financial statements and has identified the following areas that are likely to be affected:

1) Accounting for the customer loyalty programme – SFAS 23 requires that the total consideration received must be allocated to the points and goods based on relative stand-alone selling prices rather than based on the residual value method; this could result in different amounts being allocated to the goods sold and delay the recognition of a portion of the revenue.

2) Accounting for certain costs incurred in fulfilling a contract – certain costs which are currently expensed may need to be recognised as an asset under SFAS 72, and

3) Rights of return – SFAS 72 requires separate presentation on the statement of financial position of the right to recover the goods from the customer and the refund liability.

At this stage, the Company is not able to estimate the impact of the new rules on the company’s financial statements. The Company will make more detailed assessments of the impact over the next twelve months.

This standard must be applied for financial years commencing on or after 1 January 2020. Early adoption is permitted.

- *SFAS 73 “Leases”*

SFAS 73 was issued in September 2017. It will result in almost all leases being recognised on the statement of financial position, as the distinction between operating and finance leases is removed. Under the new standard, an asset (the right to use the leased item) and a financial liability to pay rentals are recognised. The only exceptions are short-term and low-value leases.

The accounting for lessors will not significantly change.

Some of the commitments may be covered by the exception for short-term and low-value leases and some commitments may relate to arrangements that will not qualify as leases under SFAS 73.

This standard must be applied for financial years commencing on or after 1 January 2020. Early adoption is permitted only for entities that apply SFAS 72. The Company does not intend to adopt the standard before its effective date.

The implementation of other new and amendment accounting do not have potential impact to its financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Klasifikasi
Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Aset Keuangan
Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, surat berharga, piutang *co-guarantee* , pinjaman yang diberikan dan piutang lain-lain.

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014), pada saat pengakuan awal aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut:

1) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
2) pinjaman yang diberikan dan piutang;
3) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo; dan
4) aset keuangan tersedia untuk dijual.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya berdasarkan tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

1) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non-derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perusahaan tidak berniat untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

- yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan piutang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai'.

2) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan *non-derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial Asset and Financial Liabilities

Classification
The Company classifies its financial instruments into classes that reflects the nature of the information and considering the characteristics of the financial instruments.

Financial Asset
The company financial assets consist of cash and cash equivalent, marketable securities, co-guarantee receivable, loans and other receivable.

Under SFAS No. 55 (Revised 2014), at initial recognition, financial assets are classified into the following categories:

1) financial assets at fair value through profit or loss;
2) loans and receivables;
3) held-to-maturity financial assets; and
4) available-for-sale financial assets.

Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired.

1) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and The Company does not intend to sell immediately or in the short term.

- *those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company upon initial recognition designates as available for sale; or*
- *those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the income statement as 'Allowance for impairment losses'.

2) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity investments are non derivative financial assets with fixed or determinable payments and have fixed maturities which is the Company has the positive intention and ability to hold to maturity, and are not specified at fair value through profit loss or available for sale.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan piutang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui didalam laporan keuangan sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai'.

3) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan *non-derivatif* yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

- Pengakuan pendapatan dan beban

a. Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Perubahan nilai wajar dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada pendapatan komprehensif lainnya sebagai "keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual".

Ketika aset keuangan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual telah dijual, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga".

Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang klaim, utang *co-guarantee* dan liabilitas lain-lain.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial Asset and Financial Liabilities (Continued)

Financial Asset (Continued)

- *those that the Company upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company designates as available for sale; and*
- *those that meet the definition of loans and receivables.*

These are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method.

Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

In the case of an impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the investment and recognised in the income statement as "Allowance for impairment losses".

3) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non derivative financial assets that designated as available for sale or are not classified in any of the other categories of financial assets.

- *Income and expense recognition*

a. For available-for-sale securities and financial assets and liabilities held at amortized cost, interest income and interest expense is recognised in the statement of income using the effective interest rate method.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statement of income.

The change at fair value of financial assets classified as available for sale are recognized in other comprehensive income as "gains or losses from changes at fair value of financial assets available for sale".

When financial assets classified as available for sale have been sold, the accumulated fair value aejustments recognized in equity are included in the income statement. Interest Income from loans and receivables are calculated using the effective interest method that recognize in the income statement as 'Interest income'.

Financial Liabilities

The company classifies its financial liabilities in the category of financial liabilities are measured by amortized cost. Financial liabilities of the Company consits of claim payable, co-guarantee payable and other liabilities.

At the time of initial recognition, financial liabilities are amortized cost category recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau pada saat Perusahaan memindahkan seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Klasifikasi dan Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Saling Hapus Aset Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Pinjaman yang diberikan merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan adalah Pinjaman Bagi Hasil (PBH) dan pinjaman koperasi pegawai. Pinjaman yang diberikan disajikan dalam jumlah neto setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

g. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas pinjaman yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke penyisihan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan.

h. Piutang *Co-Guarantee* dan Piutang *Re-Guarantee*

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee* dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee.*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial Asset and Financial Liabilities (Continued)

Derecognition

The Company terminates recognition of financial assets when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Company transferred all rights to receive the contractual cash flows of the financial asset in a transaction in which the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the asset transferred financial. Any rights or liabilities for financial assets that are transferred incurred or that are still owned by the Company is recognized as a separate asset or liability.

The Company terminates recognition of financial liability when the liability specified in the contract are released or canceled or expired.

Classes of Financial Instrument

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.

Offseting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount presented in the statement of financial position if, and only if, the Company has a legally enforceable right to offset the recognised amounts and intend to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

Loans are financial assets non-derivatif with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market. Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and an aeditional cost to acquire the asset, and after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Included in loans is the loan-sharing (PBH) and loan cooperative employees. Loans are recorded net of allowance for impairment losses.

g. Loans

Loans are written off when there is no realistic prospect of the return of the loan. The loans can not be repaid is written off by debiting the allowance for impairment losses. Subsequently repayment on loans previously written off are credited to the allowance for impairment losses in the statement of financial position.

h. Co-Guarantee and Re-Guarantee Receivable

Payment of claims to the sole recipent of a guarantee that partners co-guarantee and partners re-guarantee are recorded as a receivable in the settlement.

The recognition of receivables in the settlement of claims payments made every occur a dependent partner co-guarantee and partner re-guarantee.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Piutang *Co-Guarantee* dan Piutang *Re-Guarantee* (Lanjutan)

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat mitra *co-guarantee* mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra *co-guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *reguarantee* pada saat diterbitkannya SOA (*Statement of Acoount*), namun pembayaran belum dilakukan.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban *co-guarantee* , beban *re-guarantee* , beban *fee based income* bank pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan /Kafalah.

j. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perum Jamkrindo menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai “Cadangan Revaluasi Aset” dan disajikan sebagai “Pendapatan Komprehensif Lain”. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memilki saldo “Keuntungan Revaluasi Aset Tetap” yang disajikan sebagai “Pendapatan Komprehensif Lain”, maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap “Keuntungan Revaluasi Aset Tetap” dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Co-Guarantee and Re-Guarantee Receivable (Continued)

Receivables in the settlement are recognized as co-guarantee Receivables in the completion of when partners co-guarantee accept in settlement of the accounts (in accordance with a term of the Agreement of Cooperation between the Perum Jamkrindo with partners of Co-guarantee), but payment has not been done.

Receivables in the settlement are recognized as a receivables re-guarantee at the time of the SOA (Statement of Acoount), but the payment has not been made.

i. Prepaid Expense

Expenses are allocated according to the useful life of each charge with a straight-line method (straight-line method).

Prepaid co-guarantee expense, re-guarantee expense, fee based income of banks implementing and agent commission expense are amortized proportionally to follow the pattern of revenue recognition Guarantee/Kafalah Fee.

j. Fixed Assets

On December 31, 2015, Perum Jamkrindo applies revaluation model as accounting policy for land and buildings. For fixed assets other than land and buildings, it applies cost model.

Land and buildings are shown at fair value, less subsequent depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land and bulidings recorded in “Asset Revaluation Reserve” and presented as “Other Comprehensive Income”. Decreasing in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expenses in the current year. If the asset does have balance on its “Gain of Revaluation of Fixed Assets”, loss from revaluation of fixed asset is charged to “Gain of Revaluation of Fixed Assets” which presented as “Other Comprehensive Income” and the rest of the amount is charged to current year’s expenses.

Fixed assets besides land and buildings are stated at historical cost less accumulated depreciation.

Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or lossupon occurrence. At each financial year end, the assets’ residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Jenis Aset *(Asset Type)*	Masa Manfaat (tahun) *Useful Life (year) Annual*	Penyusutan Per Tahun (%) *Depreciation (%)*
Bangunan Gedung (*Buildings*)	20-30	3,33-5
Kendaraan Bermotor (*Vehicle*)	5	20
Inventaris (*Equipment*)	2-10	50-10

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Perusahaan memiliki kebijakan kapitalisasi aset tetap dengan nilai minimum sebesar Rp5.000.000,-, kecuali untuk inventaris sebesar Rp3.000.000,-

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya Pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak dengan menggunakan metode garis lurus.

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan riviu periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Fixed Assets (Continued)

The Company has classified fixed assets capitalization policy with a minimum value of Rp5.000.000, -, except for equipment of Rp3.000.000,-

Costs after the initial recognition are recognized as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only if the company is likely to benefit economically in the future with respect to the assets and the cost of the item can be measured reliably. The cost of repairs and maintenance are charged to the income statement in the financial period when these costs occur.

Fixed assets are derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

All cost and expenses incurred in relation with the acquisition of the landright, such as license fee, survey and measurement cost, notarial fees and taxes, are deferred and presented separately from the cost of the landright was presented as part of "Other Assets" in the statements of financial position, and amortized over the period of the related landright using the straight-line method.

All costs incurred in connection with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When fixed assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

The carrying amount of assets immediately reduced by the amount that can be recovered if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

At each reporting date the Company perform periodic reviews of fixed assets to ensure the remaining useful lives, residual values and depreciation method are comparable with previous estimates.

At each reporting date the Company perform conducts a review to determine whether there is any indication of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tidak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tidak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

Jumlah tersusutkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan diikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (15-20 tahun).

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya *overhead* yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari tiga tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan riviu periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Intangible Assets

Intangible assets are initially recognized at cost. The cost of acquisition of intangible assets consists of the purchase price, including import duties and taxes that can not be restituted on purchase, net of discounts and rebates and all the costs that are directly attributable to preparing the asset so it is ready for use.

After initial recognition, intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

The Company assesses whether the useful life of intangible assets is limited or unlimited and, if limited, period of time or number of production or similar units quantity produced during useful life. Intangible assets are considered by the Company to have an indefinite useful life when, based on an analysis of all relevant factors, there is no limit in sight at the moment over the period the asset is expected to generate net cash flows of the entity.

Total depreciation of intangible assets with finite useful life are systematically allocated during their useful life. Amortization begins when the asset is available for use, ie when the asset is at a location and in a condition to operate in the manner intended by management. Amortization stopped at an earlier date between when the assets are classified as assets held for sale (or included in a loose group of assets classified as assets held for sale. The method of amortization is used illustrates the expected pattern of consumption of the entity over the future economic benefits. If the pattern can not be determined reliably, the straight-line method is used.

1. Licences

Licences are disclosed at historical cost licences have a definite useful life and are carried at cost less accumulated amortization.

Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of licences over their estimated useful lives (15-20 years).

2. Computer Software

Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software. These costs are amortized over their estimated useful lives (3-5 years).

Costs associated with developing or maintaining computer software programmes are recognised as an expense as incurred. Costs that are directly associated with the production of identifiable, and unique software products controlled by company, and that will probably generate economic benefits exceeding costs more than one year, are recognised as intangible assets. Direct costs include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Computer software development costs recognised as assets are amortized over their estimated useful lives (not exceeding three years).

At each reporting date the assets perform periodic reviews to ensure intangibles amortization period and amortization method is in accordance with previous estimates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

I. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

1. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dan aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun penyisihan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit (yaitu berdasarkan proses pemeringkatan Perusahaan yang mempertimbangkan jenis aset, industri, lokasi geografis, jenis agunan, status tunggakan dan faktor-faktor relevan lainnya). Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dan kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pemah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pemah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang dari kelompok aset harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya (seperti perubahan tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran, atau faktor-faktor lainnya yang merupakan indikasi timbulnya kerugian dalam kelompok aset keuangan tersebut serta besarannya). Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa datang dikaji ulang secara berkala oleh Perusahaan untuk mengurangi perbedaan antara taksiran jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktualnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

I. Allowances for Impairment of Financial Assets

The company, assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or the company of financial assets is impaired.

A financial asset or the company of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of' one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the company of financial assets that can be reliably estimated.

1. Financial Assets carried at amortized cost

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value, of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the, loss is recognised in the consolidated income statement. If a loan or held-to--maturity investment has a variable interest rate) the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the company may measure impairment on the basis of an instruments fair value using an observable market price.

For the purposes of a collective evaluation of impairment; financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics (that is, on the basis of the company graeing process that considers asset types industry, geographical location, collateral type past due status and other relevant factors). Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows from groups of such assets by being indicative of the debtors' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Future cash flows in a Company of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the Company and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is aejusted on the basis of current observable data to reflect the effect of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

Estimates of changes in future cash flows for groups of assets should reflect and be directionally consistent with changes in related observable data from period to period (for example, changes in unemployment rates, property prices payment status, or other factors indicative of changes in the probability of losses in the company and their magnitude). The methodology and assumptions used for estimating future cash flows are reviewed regularly by the company to reduce any differences between loss estimates and actual loss experience.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

l. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur) maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya, diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2. Aset yang tersedia untuk dijual

Penurunan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dibalik melalui laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Allowances for Impairment of Financial Assets (Continued)

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreeses and the decrease can be related objectively to an event occurring, after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtors credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by aejusting the allowance account The amount of the reversal is recognized in the income statement.

Interest income on financial assets is impaired continues to be recognized on the basis of interest rates used to discount the future cash flows in measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss decreases impairment, the impairment loss previously recognized to be restored and the recovery is recognized in the income statement.

2. Assets classified as available for sale

Decrease in fair value of available-for-sale financial assets has been recognized in other comprehensive income and there is an objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial asset has not been derecognized.

The amount of the cumulative loss that is reclassified from equity to profit or loss is the difference between the acquisition cost (net of principal repayment and amortization) and current fair value, less any impairment loss before financial asset has been recognized in profit or loss.

Impairment losses are recognized in profit or loss on investment in equity instruments classified as available for sale are not reversed through profit or loss.

If, in subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through the income statement.

m. Impairment of Non-Financial Assets

The carrying amount of financial assets that are not assets of the Company, except for deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If such an indication exists, the recoverable value of the asset will be estimated.

The recoverable value of an asset or cash-generating unit is the higher of the amount between its value in use and fair value of an asset or cash-generating unit less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the present cash value and the risks specific to the asset.

For the purpose of impairment testing, assets that can not be tested individually be combined in smaller groups that provide cash inflows of Sustainable use that are largely independent of the cash inflows of other assets or groups over assets ("Cash Generating Unit" or "CGU").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

n. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Investasi

Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

o. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwil* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Impairment of Non-Financial Assets (Continued)

Provision for impairment is recognized if the carrying amount of an asset or UPK exceeds its recoverable value. Provision for impairment loss is recognized in profit or loss for the year.

Recovery of impairment loss, for non-financial assets, are recognized if, and only if, there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount since the last impairment testing. Reversal of impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

n. Interest/ Profit Sharing Income of Investment

Interest income are recognized in the statement of income using the effective interest method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future losses. This calculation covers all commision, provision, and other forms accepted by the parties in the contract which are an integral part of effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of loss on impairment, then the interest income subsequently acquired is recognized based on interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

o. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or ubstantially enacted asat reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

o. Perpajakan (Lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan aeanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, Pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

p. Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah, Pendapatan Komisi *Re-Guarantee*, Pendapatan Jasa administrasi Penjaminan, Beban Komisi Agen, *Fee based Income* Bank Pelaksana, Beban *Co-Guarantee* dan Beban *Re-Guarantee*

Pendapatan imbal jasa penjaminan/ kafalah, pendapatan komisi *re-guarantee* dan beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari IJP, beban *fee based income-bank* pelaksana, beban *co- guarantee* dan beban *re-guarantee* diakui sejak bulan Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan/ kafalah dan pendapatan komisi/ ujrah *re-guarantee* yang besarnya dinyatakan sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya sertifikat penjaminan kecuali sertifikat penjaminan eksisting yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2013 diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan dengan batas waktu maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan.

Pendapatan jasa administrasi penjaminan diakui seluruhnya saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Beban *fee based income-bank* pelaksana, beban komisi/ ujrah agen yang besarnya dinyatakan sebagai persentase tertentu dari IJP, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee* yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/ kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan *fee base income-bank* pelaksana, beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee* .

Jika terdapat pelunasan dipercepat atas pinjaman yang dijaminkan, jumlah pendapatan imbalan jasa penjaminan dan pendapatan komisi *re-guarantee*, serta beban dibayar dimuka atas *fee based income-bank* pelaksana, beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee* yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

q. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah permohonan/ pengajuan klaim yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar oleh Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

o. Taxation (Continued)

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

p. Guarantee/ Kafalah Service Fee, Re-Guarantee Commission Fee, Guarantee administration Service Fee, Agent Commission Expenses, Fee Based Income-Executive Bank and Co-Guarantee Expenses, and Re-Guarantee Expenses

Underwriting compensation income, commission income and expenses re-guarantee agency commission in the amount expressed as a certain percentage of the IJP, the burden of fee-based income-bank executive, co-guarantee load and re-load the guarantee recognized since Guarantee Certificate (SP) was published.

Income guarantee/ kafalah compensation and commission/ ujrah income guarantee in the amount of re-guarantee are recognized as deferred revenue and amortized over the period of validity of the certificate unless the certificate of guarantee existing guarantees issued prior to January 1, 2013 is amortized in accordance with the Guarantee Certificate validity period with a maximum time limit of 48 (forty-eight) months.

administrative services revenue assurance is recognized when all of Guarantee Certificates (SP) was published.

Fee-based income expenses for banks, commission/ ujrah expenses for agent calculated based on Guarantee Fee on certain percentage, co-guarantee and re-guarantee expenses that more than one year are recognized as prepayments and amortized in accordance with the Guarantee Certificates validity periods.

Underwriting fee income is presented on a gross basis before the deductible fee income base-bank executive, agent commission expense, Co-Guarantee expense and re-guarantee expense.

If there is an accelerated repayment of the loan collateral, the amount of the guarantee fee income and commission income re-guarantee, as well as prepaid expenses over the bank's fee-based income-executor, agent commission expense, burden of co-guarantee and re-guarantee loads are still suspended entirely recognized to profit or loss for the year.

q. Claim Payable

Claim payable is debts of the Company to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claim payable are debts that have been processed and approved but not yet paid. Payables are stated at the amount of claim has been authorization dan paid.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

r. Beban Klaim

Beban klaim dicatat pada saat klaim telah disetujui oleh Komite Klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

s. Cadangan Klaim

Cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut pembentukan cadangan klaim dibagi dua metode, 1) Cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,01% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri, 2) penjumlahan dari 100% klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Perusahaan menggunakan metode yang lebih besar dalam penjumlahan.

Kenaikan (penurunan) cadangan klaim merupakan selisih cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.

t. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Program imbalan pasca kerja dilaksanakan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 dengan metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban manfaat pasti dan biaya jasa kini adalah *Projected Unit Credit*, sebagaimana yang ditetapkan dalam PSAK 24 (Revisi 2014).

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang timbul dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu.

Kewajiban program imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung sebesar nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset bersih dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit-credit.*

Ketika imbalan pasca kerja berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan hingga imbalan pasca kerja menjadi hak karyawan. Imbalan pasca kerja yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti dimana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

r. Claim Expenses

Claims expense is recorded when the claim has been approved by the Claims Committee. Changes in the amount of claims payable, as a result of further review and the difference between the amount of the claim debt and the claim paid, are recognized in the statement of income in the year of the change.

s. Claim Reserve

The claim reserve established by the Regulation of the Financial Services Authority Number 2 / POJK.05 / 2017 on the Guarantee Institution Business Implementation. Under this provision, the methods of claim reserves shall be divided into two methods, 1) The required reserve reserves shall be at least 0.01% of the total value of the underwriting, 2) the sum of 100% of claims already incurred but not yet reported. Companies use larger methods in addition.

Increase (decrease) in reserve claim reserve represents the excess up the claim period and prior periods.

t. Post Employment Benefit

Perum Jaminan Kredit Indonesia have registered their employees into pension plan, that is Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan and Program Kesejahteraan Karyawan through Financial Institution Pension Fund (DPLK). Besides pension plan, company also recognized defined benefit post employment benefit according to Labor Law.

Post employment benefit is executed according to Labor Law No.13 year 2003 use actuarial calculation method which applied to determine present of value defined benefit obligation and current service cost that is Projected Unit Credit method, as stated in SFAS 24 (Revised 2014).

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually based on one or more factors such as age, years of service or compensation.

A defined contribution plan is a pension plan under which The company will pay fixed contributions into a separate entity (a fund) and has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits arising of services provided by employees on the present and the past.

Defined benefit plan obligations are recognized in the statement of financial position is calculated at the present value of the estimated post-retirement benefit obligations in the future arising from services rendered by employees who have been on the present and the past, less the fair value of net assets of the pension fund. The calculation is performed by an independent actuary with the projected-unit-credit.

When the post-employment benefits change, the portion of the increase or decrease in compensation in connection with the services that have been provided by the employee in the past charged or credited to the income statement using the straight-line method over the expected average remaining working lives of the employees until the benefits become vested employment . Post-employment benefits become vested is recognized immediately as an expense in the income statement.

In addition to the defined benefit pension plan, The company also has defined contribution plans in which the Company pays fees calculated based on a certain percentage of the employee's basic salary to the pension insurance program held by the pension funds of financial institutions. Contributions are charged to the income statement when due.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

t. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak area pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

u. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2014) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut :

a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
   i memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
   ii memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
   iii personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :
   i entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   vi entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);
   vii orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

t. Post Employment Benefit (Continued)

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they occured.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

u. Transactions with Related Parties

In accordance with SFAS No. 7 (Revised 2014) regarding "related party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow :

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person :
   i has control or joint control over the reporting entity;
   ii has significant influence over the reporting entity; or
   iii member of the key management personel of the reporting entity of a parent of the reporting entity.
b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   i the entity and the reporting entity are members of the same the Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   ii one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member).
   iii both entities are joint ventures of the same third party;
   iv one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   v the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
   vi the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   vii a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personel of the entity (or of a parent of the entity).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

u. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut : (Lanjutan)

Entitas pelapor yang berelasi dengan pemerintah tidak mengungkapkan persyaratan pada PSAK 7 (Revisi 2014) paragraf 17 yaitu, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Pengungkapan sekurang-kurangnya meliputi:

i Jumlah transaksi;

ii Jumlah saldo, termasuk komitmen:

a. Persyaratan dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian;

b. Rincian garansi yang diberikan atau diterima;

c. Penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan

d. Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

Entitas pelapor yang berelasi dengan pemerintah mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait dengan:

i Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor (misalnya, pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan);

ii Informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak- pihak berelasi terhadap laporan keuangan;

a. Sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan

b. Untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individu, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atas luasnya transaksi tersebut.

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2014), transaksi antara Perusahaan dengan pemerintah, BUMN lainnya dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki, atau dikendalikan negara, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi.

v. Kepentingan Non Pengendali

Kepentingan non pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak.

Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

u. Transactions with Related Parties (Continued)

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (Continued)

Reporting entities are related to the government did not disclose terms of the (Revised 2014) SFAS 7 paragraph 17 that is, if the entity hae transactions with related parties during the period covered by the financial statements, the entity shall disclose the nature of the relationship with related parties as well as information about the transactions and balances, including commitments, necessary to understand the potential impact of such relationships in the financial statements. Disclosure shall at least include:

i Total Transaction;

ii Total balances, including commitments :

a. Terms and conditions, including whether there is a guarantee, and the nature of the reward that will be given, for completion;

b. Details of the warranty is given or received;

c. Allowance for doubtful accounts related to the amount of the balance; and

d. Expense recognized during the period in terms of doubtful accounts receivable or elemination of related parties.

Reporting entities are related to the government revealed on transactions and balances related to:

i Name of the department or government agency and the nature of its relationship with the reporting entity (eg, control, joint control or significant influence);

ii The following information with enough detail that enables users of financial statements to understand the impact of transactions with related parties on the financial statements;

a. The nature and amount of each individually significant transactions; and

b. For other transactions that are collectively, but not individually, significant, a qualitative or quantitative indication on the extent of such transactions.

Based on SFAS No. 7 (Revised 2014), transaction between the Company and the government, other state owned entities and companies which are owned or controlled by the government, including the deposit insurance corporation is not categorized as transaction with related parties.

v. Non-Controlling Interests

Non-controlling interest is the equity of the subsidiary not attributable, directly and indirectly in subsidiaries.

Non-controlling interests are presented in equity in the consolidated financial statements, separately from the equity owners of the parent.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

v. Kepentingan Non Pengendali (Lanjutan)

Investasi pada sukuk dapat diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan

b. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi. Untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari pada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

v. Non-Controlling Interests (Continued)

Investments in sukuk may be classified as measured at cost or fair value.

Investments in sukuk are classified as measured at cost if:

a. The investments held within a business model whose main aim to obtain contractual cash flows; and

b. Contractual terms determine the specific date of payment of principal and / or results.

At initial recognition, investments in sukuk are measured at cost, including transaction costs and the difference between the acquisition cost and nominal value is amortized straight-line basis over the term of the sukuk.

Investments in sukuk which are not classified as measured at historical cost, are classified as at fair value. At initial recognition, investments are measured at fair value at acquisition cost excluding transaction costs. To subsequently measured at fair value. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

For investments in sukuk are measured at cost, if there is an indication of impairment, the Company measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than the carrying amount, the Company recognizes an impairment loss. Recoverable amount is the amount that would be obtained from the principal returns without taking into account the present value.

3. KAS DAN SETARA KAS / 3. *CASH AND CASH EQUIVALENT*

	2018	2017	
Kas	**8.638.965.062**	**9.180.779.514**	***Cash on hand***
Giro Bank			***Bank Account***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	43.052.316.800	61.656.800.993	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk	27.556.981.957	20.928.672.465	*PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk	36.720.214.956	42.951.237.782	*PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	15.768.788.688	35.183.051.575	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk*
PT Bank Mandiri Syariah	15.654.523.936	8.956.260.181	*PT Bank Mandiri Syariah*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	11.705.498.779	9.788.556.347	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	7.895.638.799	2.853.495.854	*PT Bank Rakyat Indonesia Syariah*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	3.383.374.317	26.499.793.217	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	241.448.309	108.234.721	*PT Bank Negara Indonesia Syariah*
Jumlah Giro Pihak Berelasi	**161.978.786.541**	**208.926.103.134**	***Total Bank Account Related Parties***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT BPD Jawa Tengah	7.486.711.036	21.485.838.679	*PT BPD Jawa Tengah*
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	6.044.088.313	4.278.851.236	*PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk*
PT BPD Syariah Jawa Barat Banten	5.039.055.737	5.687.172.840	*PT BPD Syariah Jawa Barat Banten*
PT BPD Syariah Jawa Tengah	4.605.146.565	3.409.438.657	*PT BPD Syariah Jawa Tengah*
PT BPD Jawa Timur, Tbk	4.453.646.457	2.322.435.973	*PT BPD Jawa Timur, Tbk*
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk	3.707.556.922	3.425.122.563	*PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk*
PT BPD Sumatera Utara	2.267.256.423	186.524.150	*PT BPD Sumatera Utara*
PT BPD Syariah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2.107.977.745	1.950.676.666	*PT BPD Syariah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*
PT Bank Lampung	1.997.023.634	647.758.225	*PT Bank Lampung*
PT BPD Kalimantan Selatan	1.944.256.250	4.049.044.009	*PT BPD Kalimantan Selatan*
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1.991.632.035	7.071.023.558	*PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*
PT BPD Bengkulu	1.895.313.848	377.200.861	*PT BPD Bengkulu*
PT BPD Syariah Kalimantan Barat	1.798.802.037	880.583.122	*PT BPD Syariah Kalimantan Barat*
PT BPD Kalimantan Barat	1.759.108.583	471.970.961	*PT BPD Kalimantan Barat*
PT BPD Papua	1.714.928.151	433.044.672	*PT BPD Papua*
PT Bank CTBC Indonesia	1.702.602.526	96.895.179	*PT Bank CTBC Indonesia*
PT Bank Muamalat Indonesia	1.397.522.757	827.564.014	*PT Bank Muamalat Indonesia*
PT BPD Sulawesi Selatan	1.122.493.876	2.288.989.896	*PT BPD Sulawesi Selatan*
PT BPD Kalimantan Timur	1.022.807.422	1.542.523.720	*PT BPD Kalimantan Timur*
PT BPD Bali	995.273.832	106.081.858	*PT BPD Bali*
PT BPD DKI	920.956.345	364.423.802	*PT BPD DKI*
PT BPD Syariah Kalimantan Timur	821.990.635	367.020.821	*PT BPD Syariah Kalimantan Timur*
PT BPD Banten	759.455.174	266.575.448	*PT BPD Banten*
PT BPD Aceh	740.818.387	104.628.133	*PT BPD Aceh*
PT Bank Bukopin, Tbk	644.761.293	454.897.848	*PT Bank Bukopin, Tbk*
PT BPD Nusa Tenggara Timur	630.009.386	1.004.408.738	*PT BPD Nusa Tenggara Timur*
PT BPD Syariah Jawa Timur	536.408.747	145.018.061	*PT BPD Syariah Jawa Timur*
PT BPD Syariah Aceh	455.161.056	11.917.372.985	*PT BPD Syariah Aceh*
PT Bank OCBC NISP, Tbk	437.995.840	244.773.172	*PT Bank OCBC NISP, Tbk*
PT BPD Jambi	335.318.434	96.357.015	*PT BPD Jambi*
PT BPD DKI Syariah	316.787.529	1.342.807.541	*BPD DKI Syariah*
PT BPD Maluku	302.297.854	156.773.502	*PT BPD Maluku*
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	298.874.697	621.535.440	*PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta*
PT BPD Sumatera Barat (Nagari)	289.051.638	103.071.744	*PT BPD Sumatera Barat (Nagari)*
PT BPD Syariah DIY	283.407.100	278.632.779	*PT BPD Syariah DIY*
PT Bank Permata, Tbk	243.455.650	117.505.177	*PT Bank Permata, Tbk*
PT BPD Syariah Nusa Tenggara Barat	212.843.347	19.933.638	*PT BPD Syariah Nusa Tenggara Barat*
PT Bank Perkreditan Rakyat HIK	211.286.953	14.431.500	*PT Bank Perkreditan Rakyat HIK*
PT BPD Sulawesi Utara	183.848.753	153.300.785	*PT BPD Sulawesi Utara*
PT Bank Bukopin Syariah	167.441.260	41.881.490	*PT Bank Bukopin Syariah*
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	134.912.246	270.586.213	*PT BPD Riau dan Kepulauan Riau*
PT BPD Nusa Tenggara Barat	114.165.370	175.195.404	*PT BPD Nusa Tenggara Barat*
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	112.141.492	232.585.249	*PT Bank CIMB Niaga, Tbk*
PT BPD Kalimantan Tengah	75.739.113	60.195.262	*PT BPD Kalimantan Tengah*
Total Dipindahkan	**64.282.332.447**	**80.092.652.587**	***Brought Foward***

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / **3. *CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)***

	2018	2017	
Giro Bank (Lanjutan)			***Bank Account (Continued)***
Saldo Dipindahkan	**64.282.332.447**	**80.092.652.587**	***Carried Foward***
PT Bank BTPN Syariah, Tbk	84.132.369	-	*PT Bank BTPN Syariah, Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	63.144.104	41.802.080	*PT Bank Danamon Indonesia, Tbk*
PT BPD Syariah Kalimantan Selatan	58.508.026	10.035.551	*PT BPD Syariah Kalimantan Selatan*
PT BPD Sulawesi Tengah	51.178.265	20.490.513	*PT BPD Sulawesi Tengah*
PT BPD Sumatera Utara Syariah	45.051.339	165.137.759	*PT BPD Sumatera Utara Syariah*
PT Bank Sinar Mas, Tbk	39.728.279	151.633.902	*PT Bank Sinar Mas, Tbk*
PT Bank Maybank	34.110.836	3.446.950	*PT Bank Maybank*
PT Bank CIMB Niaga Syariah	22.650.940	23.665.518	*Bank CIMB Niaga Syariah*
PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hik Syariah	19.526.246	-	*PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hik Syariah*
PT BPD Sulawesi Tenggara	18.539.279	424.995.065	*PT BPD Sulawesi Tenggara*
PT Bank Mega Syariah	10.763.304	-	*PT Bank Mega Syariah*
PT BPD Syariah Riau	9.031.052	10.861.216	*PT BPD Syariah Riau*
PT Bank Mandiri Taspen Pos	4.353.908	4.658.110	*PT Bank Mandiri Taspen Pos*
PT Bank Permata Syariah	3.243.113	3.336.928	*PT Bank Permata Syariah*
PT Bank Sinar Mas Syariah, Tbk	2.193.553	-	*PT Bank Sinar Mas Syariah, Tbk*
PT BPD Syariah Sulawesi Selatan	2.123.200	1.000.000	*PT BPD Syariah Sulawesi Selatan*
PT Bank Kesejahteraan	2.048.316	-	*PT Bank Kesejahteraan*
Sub Jumlah Giro Pihak Ketiga	**64.752.658.576**	**80.953.716.178**	***Sub Total Bank Account Third Parties***
Jumlah Giro Perusahaan	**226.731.445.117**	**289.879.819.313**	***Total Bank Account***
Deposito			***Time Deposits***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.270.835.000.000	3.163.565.977.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	529.800.000.000	212.450.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	124.050.000.000	81.300.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	89.625.000.000	43.125.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	75.910.000.000	63.409.972.263	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	75.256.000.000	61.931.000.000	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	35.470.000.000	34.270.000.000	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	31.100.000.000	10.340.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Syariah*
Sub Jumlah Deposito Pihak Berelasi	**4.232.046.000.000**	**3.670.391.949.263**	***Sub Total Time Deposits Related Parties***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Bank Bukopin, Tbk	358.500.000.000	275.000.000.000	*PT Bank Bukopin, Tbk*
PT BPD Jawa Tengah	146.375.858.085	153.675.000.000	*PT BPD Jawa Tengah*
PT BPD DKI	105.950.000.000	91.100.000.000	*PT BPD DKI*
PT BPD Kalimantan Barat	104.490.000.000	82.490.000.000	*PT BPD Kalimantan Barat*
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	96.650.000.000	22.651.000.000	*PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk*
PT BPD Sumatera Selatan	89.350.010.000	91.950.010.000	*PT BPD Sumatera Selatan*
PT BPD Sulawesi Selatan	72.165.000.000	43.015.000.000	*PT BPD Sulawesi Selatan*
PT BPD Syariah Nusa Tenggara Barat	57.550.000.000	1.800.000.000	*PT BPD Syariah Nusa Tenggara Barat*
PT BPD Maluku	55.050.000.000	34.550.000.000	*PT BPD Maluku*
PT Bank Kesejahteraan	51.300.000.000	36.250.000.000	*PT Bank Kesejahteraan*
PT BPD Syariah Jawa Barat Banten	48.350.000.000	41.100.000.000	*PT BPD Syariah Jawa Barat Banten*
PT Bank Panin Syariah	46.000.000.000	44.800.000.000	*PT Bank Panin Syariah*
PT Bank Bukopin Syariah	45.000.000.000	280.000.000	*PT Bank Bukopin Syariah*
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	40.140.000.000	39.890.000.000	*PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah*
PT BPD Bali	35.420.000.000	39.220.000.000	*PT BPD Bali*
PT BPD Nusa Tenggara Timur	31.850.000.000	34.850.000.000	*PT BPD Nusa Tenggara Timur*
PT BPD Bengkulu	31.350.000.000	14.450.000.000	*PT BPD Bengkulu*
PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	28.450.000.000	36.990.000.000	*PT BPD Riau dan Kepulauan Riau*
PT BPD Kalimantan Selatan	25.650.000.000	27.950.000.000	*PT BPD Kalimantan Selatan*
PT BPD Sumatera Utara	28.300.000.000	800.000.000	*PT BPD Sumatera Utara*
Total Dipindahkan	**1.497.890.868.085**	**1.112.811.010.000**	***Brought Forward***

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / 3. *CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued)*

	2018	2017	
Deposito (Lanjutan)			***Time Deposits (Continued)***
Saldo dipindahkan	**1.497.890.868.085**	**1.112.811.010.000**	***Carried Forward***
PT BPD Jambi	23.500.000.000	22.500.000.000	*PT BPD Jambi*
PT BPD Jawa Timur	22.310.000.000	16.310.000.000	*PT BPD Jawa Timur*
PT BPD Jawa Barat Banten	22.000.000.000	46.100.000.000	*PT BPD Jawa Barat Banten*
PT BPD Aceh	18.790.000.000	6.200.000.000	*PT BPD Aceh*
PT BPD Kalimantan Timur	17.900.000.000	20.700.000.000	*PT BPD Kalimantan Timur*
PT BPD Sumatera Barat (Nagari)	17.350.000.000	18.450.000.000	*PT BPD Sumatera Barat (Nagari)*
PT BPD Sulawesi Utara	15.700.000.000	15.550.000.000	*PT BPD Sulawesi Utara*
PT BPD Banten	15.500.000.000	38.000.000.000	*PT BPD Banten*
PT BPD Syariah Jawa Tengah	13.500.000.000	3.100.000.000	*PT BPD Syariah Jawa Tengah*
PT Bank Lampung	12.250.000.000	11.150.000.000	*PT Bank Lampung*
PT BPD Maluku Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	*PT BPD Maluku Syariah*
PT BPD Syariah Jawa Timur	9.435.000.000	8.435.000.000	*PT BPD Syariah Jawa Timur*
PT BPD Syariah Kalimantan Barat	5.000.000.000	25.000.000.000	*PT BPD Syariah Kalimantan Barat*
PT BPD Nusa Tenggara Barat	3.915.000.000	40.020.000.000	*PT BPD Nusa Tenggara Barat*
PT BPD Kalimantan Tengah	3.050.000.000	4.050.000.000	*PT BPD Kalimantan Tengah*
PT BPD Syariah Sumatera Selatan	2.650.000.000	14.250.000.000	*PT BPD Syariah Sumatera Selatan*
PT BPD Syariah Riau dan Kepulauan Riau	2.500.000.000	2.500.000.000	*PT BPD Syariah Riau dan Kepulauan Riau*
PTBPD Syariah Kalimantan Timur	2.500.000.000	6.700.000.000	*PTBPD Syariah Kalimantan Timur*
PT BPD Papua	2.400.000.000	2.400.000.000	*PT BPD Papua*
PT Bank Artha Graha	2.000.000.000	-	*PT Bank Artha Graha*
PT Bank Mega, Tbk	600.000.000	600.000.000	*PT Bank Mega, Tbk*
PT Bank Mega Syariah, Tbk	400.000.000	-	*PT Bank Mega Syariah, Tbk*
PT BPD Syariah DKI	500.000.000	-	*PT BPD Syariah DKI*
PT BPD DIY Yogjakarta	500.000.000	-	*PT BPD DIY Yogjakarta*
PT BPD Syariah Aceh	400.000.000	7.040.000.000	*PT BPD Syariah Aceh*
PT BPD Kalimantan Tengah Syariah	250.000.000	-	*PT BPD Kalimantan Tengah Syariah*
PT BPD Sulawesi Tengah	100.000.000	100.000.000	*PT BPD Sulawesi Tengah*
PT Bank ICB Bumiputera, Tbk	-	500.000.000	*PT Bank ICB Bumiputera, Tbk*
PT BPD Sumatera Utara Syariah	-	16.010.000.000	*PT BPD Sumatera Utara Syariah*
Sub Jumlah Deposito Pihak Ketiga	**1.722.890.868.085**	**1.448.476.010.000**	***Sub Total Time Deposits Third Parties***
Jumlah Deposito	**5.954.936.868.085**	**5.118.867.959.263**	***Total Time Deposits***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**6.190.307.278.263**	**5.417.928.558.090**	***Total Cash and Cash Equivalent***

4. SURAT BERHARGA / 4. *MARKETABLE SECURITIES*

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			***Held-To-Maturity***
	2018	2017	
Investasi Deposito			***Time Deposits Incesments***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	62.000.000.000	63.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk*
PT BPD Sulawesi Utara	10.000.000.000	10.000.000.000	*PT BPD Sulawesi Utara*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
PT BPD Jawa Timur Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	*PT BPD Jawa Timur Syariah*
PT BPD Jawa Barat Banten Tbk	-	2.000.000.000	*PT BPD Jawa Barat Banten Tbk*
PT BPD Sumatera Selatan	-	1.000.000.000	*PT BPD Sumatera Selatan*
Jumlah Investasi Deposito	**129.000.000.000**	**133.000.000.000**	***Total Time Deposits Incesments***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Lanjutan) / ***Held-To-Maturity (Continued)***

	2018	2017	
Obligasi			***Bonds***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Obligasi Wajib Konversi Reindo Tahun 2014	300.000.000.000	300.000.000.000	*Mandatory Convertible Bonds Reindo Year 2014*
Negara RI seri FR0068	40.314.364.378	40.335.225.071	*Negara RI Series FR0068*
Negara RI seri FR0077	39.016.623.658	-	*Negara RI Series FR0068*
Negara RI seri FR0070	30.255.401.641	30.307.584.998	*Negara RI Series FR0070*
Pegadaian II Tahap I Tahun 2013 seri D	25.000.000.000	24.993.965.517	*Pegadaian II Tahap I Year 2013 Series D*
Obligasi MTN Perumnas II Tahun 2018 Seri A	25.000.000.000	-	*Obligasi MTN Perumnas II year 2018 Seri A*
Negara RI seri FR0071	20.990.308.529	21.086.335.196	*Negara RI Series FR0071*
Negara RI Seri FR0073	20.120.527.615	20.130.605.159	*Negara RI Series FR0073*
Antam seri B Tahun 2011	20.000.000.000	20.000.000.000	*Antam Series B Year 2011*
Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	20.000.000.000	20.000.000.000	*Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013*
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri A	20.000.000.000	-	*Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri A*
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2018 Seri A	18.000.000.000	-	*Obligasi I Angkasa Pura II year 2018 Seri A*
Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013	17.000.000.000	17.000.000.000	*Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Year 2013*
Obligasi Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	15.000.000.000	15.000.000.000	*Obligasi Telkom Tahap I Year 2015 Series A*
Berkelanjutan I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	12.000.000.000	12.000.000.000	*Berkelanjutan I Hutama Karya Year 2013 Series C*
Obligasi I PLN tahap I Tahun 2013 seri A	11.000.000.000	11.000.000.000	*Obligasi I PLN tahap I Year 2013 Series A*
Negara RI seri FR0044	10.880.693.930	11.032.860.160	*Negara RI Series FR0044*
Negara RI seri FR0058	9.868.749.919	9.858.998.678	*Negara RI Series FR0058*
Obligasi MTN I RNI Tahun 2017	10.000.000.000	10.000.000.000	*Obligasi MTN I RNI Tahun 2017*
Obligasi Negara RI Seri FR0072	10.412.683.807	10.436.352.632	*Obligasi Negara RI Seri FR0072*
Obligasi MTN Subordinasi Mandiri I Tahun 2018	10.000.000.000	-	*Obligasi MTN Subordinasi Mandiri I Tahun 2018*
Oligasi I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018	10.000.000.000	-	*Oligasi I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018*
Negara RI seri FR0070	9.754.260.000	-	*Negara RI Series FR0070*
Obligasi Negara RI Seri PBS012	9.271.965.042	9.323.137.126	*Obligasi Negara RI Seri PBS012*
PNM I Tahun 2012	-	25.000.000.000	*PNM I Year 2012*
Obligasi I PTPN X Tahun 2013	-	20.000.000.000	*Obligasi I PTPN X Year 2013*
Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013	-	20.000.000.000	*Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Year 2013*
Berkelanjutan II BTPN Tahap I Tahun 2013 seri B	-	5.000.000.000	*Berkelanjutan II BTPN Tahap I year 2013 seri B*
Berkelanjutan Pengadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B	-	2.000.000.000	*Berkelanjutan Pengadaian Tahap III Tahun 2015 Seri B*
Sub Jumlah Obligasi Pihak Berelasi	**713.885.578.519**	**654.505.064.537**	***Sub Total Bonds Related Parties***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Bukopin Tahap I Tahun 2012	83.000.000.000	83.000.000.000	*Bukopin Tahap I year 2012*
Obligasi I Agung Podomoro Land II Tahun 2014	10.000.000.000	10.000.000.000	*Obligasi I Agung Podomoro Land II year 2014*
Obligasi II Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2018 Seri A	10.000.000.000	-	*Obligasi II Bank Sulselbar Tahap I year 2018 Series A*
Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	-	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I year 2013*
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013	-	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II year 2013*
Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013	-	10.000.000.000	*Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II year 2013*
Sub Jumlah Obligasi Pihak Ketiga	**103.000.000.000**	**123.000.000.000**	***Sub Total Bonds Third Parties***
Jumlah Obligasi	**816.885.578.519**	**777.505.064.537**	***Total Bonds***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Lanjutan) / ***Held-To-Maturity (Continued)***

	2018	2017	
Reksadana			***Mutual Funds***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
RDPT Asanusa Jamkrindo Fund	144.000.000.000	144.000.000.000	RDPT Asanusa Jamkrindo Fund
RDPT Danareksa Infrastruktur Transjawa	100.000.000.000	-	*RDPT Danareksa Infrastruktur Properti 2*
RDT Danareksa Proteksi 46	35.000.000.000	35.000.000.000	*RDT Danareksa Proteksi 46*
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017	30.000.000.000	30.000.000.000	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro Fund 2013 - Infrastruktur 3*
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 Infrastruktur 7	25.500.000.000	25.500.000.000	*RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 Infrastruktur 7*
RDPT Ciptadana Infrastruktur Indonesia	25.000.000.000	-	*RDPT Ciptadana Infrastruktur Indonesia*
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018	25.000.000.000	-	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018*
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	25.000.000.000	-	*RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II*
RDT Mandiri SERI 83	15.000.000.000	15.000.000.000	*RDT Mandiri SERI 83*
RDPT Perumnas 2016	15.000.000.000	15.000.000.000	*RDPT Perumnas 2016*
RDPT PNM Perumnas	10.000.000.000	10.000.000.000	*RDPT PNM Perumnas*
RDPT PNM Wika Realty 2016	10.000.000.000	10.000.000.000	*RDPT PNM Wika Realty 2016*
RDT BNI AM Proteksi Pundarika	10.000.000.000	-	*RDT BNI AM Proteksi Pundarika*
RDT Danareksa Proteksi 59	5.000.000.000	-	*RDT Danareksa Proteksi 59*
RDT PNM Perinus	5.000.000.000	5.000.000.000	*RDT PNM Perinus*
RDT Danareksa Proteksi 53	5.000.000.000	5.000.000.000	*RDT Danareksa Proteksi 53*
RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 Properti 1	-	55.000.000.000	*RDPT Danareksa BUMN Fund 2014 Properti 1*
RDPT BNI - Am Mahitala	-	45.322.209.142	*RDPT BNI - Am Mahitala*
RDPT Mandiri Farmasi Terbatas Seri 1	-	40.000.000.000	*RDPT Mandiri Farmasi Terbatas Seri 1*
RD Terproteksi Mandiri Seri 26		12.000.000.000	*RD Terproteksi Mandiri Seri 26*
RDPT Danareksa BUMN Fund 2015 Properti 2	-	10.100.000.000	*RDPT Danareksa BUMN Fund 2015 Properti 2*
RDPT PNM Wika Realty	-	10.000.000.000	*RDPT PNM Wika Realty*
RDPT PNM Proteksi Syariah	-	10.000.000.000	*RDPT PNM Proteksi Syariah*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	**484.500.000.000**	**476.922.209.142**	***Sub Total Related Parties***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
RDT Insight Terproteksi 14	103.000.000.000	103.000.000.000	*RDT Insight Terproteksi 14*
RD Insight Terproteksi 5	43.012.500.000	43.012.500.000	*RD Insight Terproteksi 5*
RDT MNC Terproteksi Seri 28	25.000.000.000	-	*RDT MNC Terproteksi Seri 28*
RDT Bahana Merdeka Terproteksi	25.000.000.000	-	*RDT Bahana Merdeka Terproteksi*
RDPT Syailendra Multifinance	10.000.000.000	10.000.000.000	*RDPT Syailendra Multifinance*
RDSPT PNM Indah Karya	10.000.000.000	-	*RDSPT PNM Indah Karya*
RDT MNC Dana Terproteksil XIV	5.000.000.000	5.000.000.000	*RDT MNC Dana Terproteksil XIV*
RDPT PNM Terproteksi Dana Investa 2	-	42.187.354.167	*RDPT PNM Terproteksi Dana Investa 2*
RDPT Bahana Primera Protected Fund 87	-	25.000.000.000	*RDPT Bahana Primera Protected Fund 87*
RDT Bahana Core Protected Fund 113	-	20.000.000.000	*RDT Bahana Core Protected Fund 113*
Sub Pihak Ketiga	**221.012.500.000**	**248.199.854.167**	***Sub Third Parties***
Jumlah Reksadana	**705.512.500.000**	**725.122.063.309**	***Total Mutual Funds***
Efek Beragun Aset (EBA)			***Security (Asset Underlying)***
Efek Beragun Aset KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	14.590.251.282	20.419.547.930	*Security (Asset Underlying) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Efek Beragunan Aset SP SMF BTN 03 Kelas A Seri A2 2017	7.798.788.406	9.288.203.145	*Security (Asset Underlying) SP SMF BTN 03 Kelas A Seri A2 2017*
Jumlah Efek Beragun Aset (EBA)	**22.389.039.688**	**29.707.751.075**	***Total Security (Asset Underlying)***
Jumlah Surat Berharga Yang Dimiliki Hingga Jatuh tempo	**1.673.787.118.207**	**1.665.334.878.921**	***Total Held-To-Maturity Marketable Securities***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

	2018	2017	
Tersedia untuk Dijual			***Available For Sale***
Saham			***Shares***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT GMF Aero Asia Tbk	34.464.700.000	51.213.900.000	*PT GMF Aero Asia Tbk*
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	18.750.000.000	14.208.000.000	*PT Telekomunikasi Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk	15.600.000.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk*
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	13.225.000.000	11.385.000.000	*PT Semen Gresik (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.285.000.000	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Gedung Tbk	11.832.000.000	13.026.000.000	*PT Wijaya Karya Gedung Tbk*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	8.540.000.000	3.492.500.000	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.030.000.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Waskita Beton Precast Tbk	7.854.000.000	8.526.000.000	*PT Waskita Beton Precast Tbk*
PT PP Presisi Tbk	7.504.800.000	9.441.854.800	*PT PP Presisi Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.375.000.000	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk	6.858.000.000	-	*PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya Tbk	6.700.000.000	8.800.000.000	*PT Waskita Karya Tbk*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6.435.000.000	5.635.000.000	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT PP (Persero) Tbk	6.317.500.000	6.457.776.000	*PT PP (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	5.300.000.000	2.408.100.000	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	4.740.000.000	7.050.000.000	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	4.028.000.000	-	*PT Aneka Tambang (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.144.500.000	2.945.000.000	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	**188.983.500.000**	**144.589.130.800**	***Sub Total Related Parties***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	20.945.446.400	45.490.891.400	*PT Dua Putra Utama Makmur Tbk*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	16.672.740.000	-	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	11.884.500.000	-	*PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk*
PT Astra International Indonesia Tbk	9.870.000.000	-	*PT Astra International Indonesia Tbk*
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	9.652.500.000	7.011.250.000	*PT Indofood Sukses Makmur Tbk*
PT United Tractors Tbk	7.521.250.000	-	*PT United Tractors Tbk*
PT Kalbe Farma Tbk	5.302.500.000	5.055.000.000	*PT Kalbe Farma Tbk*
PT AKR Corporindo Tbk	4.280.000.000	-	*PT AKR Corporindo Tbk*
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	3.735.000.000	2.710.000.000	*PT PP London Sumatera Indonesia Tbk*
PT Unilever Indonesia Tbk	3.401.250.000	-	*PT Unilever Indonesia Tbk*
PT Vale Indonesia Tbk	3.250.000.000	-	*PT Vale Indonesia Tbk*
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.125.000.000	4.212.500.000	*PT Bumi Serpong Damai Tbk*
PT Pakuwon Jati Tbk	-	6.460.000.000	*PT Pakuwon Jati Tbk*
Sub Jumlah Pihak Ketiga	**99.640.186.400**	**70.939.641.400**	***Sub Total Third Parties***
Jumlah Saham	**288.623.686.400**	**215.528.772.200**	***Total Shares***
Reksadana			***Mutual Funds***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
RD ITB Harmoni BNI-AM	25.096.477.500	25.806.322.500	*RD ITB Harmoni BNI-AM*
RD BNI AM Indeks IDX30	23.336.335.460	-	*RD BNI AM Indeks IDX30*
RDS Bahana Mes Syariah Fund	10.877.825.298	5.643.600.000	*RDS Bahana Mes Syariah Fund*
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	6.154.999.845	6.151.637.070	*RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis*
RD BNI-AM Dana Saham Sektoral/ Saham Inspiring Equity Fund	-	76.844.062.750	*RD BNI-AM Dana Saham Sektoral/ Saham Inspiring Equity Fund*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	**65.465.638.104**	**114.445.622.320**	***Sub Total Related Parties***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

	2018	2017	
Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)			***Available For Sale (Continued)***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
RD Syailendra Dana Ekuitas Dinamis	218.361.002.358	213.651.504.360	*RD UGM CIMB-Principal Balanced*
RD Maybank Dana Obligasi Plus	146.640.873.539	155.609.289.870	*RD AAA Balanced Fund*
RD Sucorinvest Saham Dinamis	91.916.013.124	97.912.128.233	*RD Sucorinvest Saham Dinamis*
RD Insight Green (I- Green)	53.551.991.697	57.133.944.143	*RD CIMB Princ. Balanced*
RD Insight Support (I-Support)	44.945.459.728	48.460.135.519	*RD Insight Support (I-Support)*
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah	34.827.032.566	36.817.486.890	*RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah*
RD Maybank Dana Pasti	25.551.582.319	26.027.187.584	*RD Maybank Dana Pasti*
RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty	18.163.345.733	19.396.753.078	*RD CIMB-Principal Indo Domestic Equty*
RD SAM Indonesian Equity Fund	-	11.224.301.445	*RD SAM Indonesian Equity Fund*
RD Insight Government Fund	10.616.071.203	10.864.989.164	*RD Insight Government Fund*
RD Panin Dana Unggulan	10.188.476.834	-	*RD Panin Dana Unggulan*
RD MNC Dana SBN	9.842.171.865	10.071.838.511	*RD MNC Dana SBN*
RD Simas Syariah Unggulan	9.761.192.029	7.359.687.607	*RD Simas Syariah Unggulan*
RD Sucorinvest Bond Fund	9.728.708.168	10.234.859.708	*RD Sucorinvest Bond Fund*
RD Panin Gebyar Indonesia II	9.633.958.201	10.062.981.623	*RD Panin Gebyar Indonesia II*
RD SAM Syariah Berimbang	8.076.035.640	8.672.219.061	*RD SAM Syariah Berimbang*
RD Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds	7.946.020.000	8.820.040.000	*RD Premier ETF Indonesia Sec. Rotation*
RD Makara Prima	5.436.002.793	5.689.859.606	*RD Makara Prima*
Reksadana Bahana Mes Syariah Fund	-	5.584.686.469	*Reksadana Bahana Mes Syariah Fund*
RD Syailendra MSCI Index Fund	5.497.550.000	-	*RD Syailendra MSCI Index Fund*
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	5.433.259.080	5.205.284.851	*RD Syailendra Equity Opportunity Fund*
RD Sucorinvest Flexi Fund	5.119.760.134	-	*RD Sucorinvest Flexi Fund*
RD Panin Dana Maksima	4.758.472.550	4.834.680.582	*RD Panin Dana Maksima*
RD SAM Sharia Equity Fund	3.600.362.716	3.929.568.351	*RD SAM Sharia Equity Fund*
RD Manulife Saham SMC Plus	3.585.408.362	3.864.710.832	*RD Manulife Saham SMC Plus*
RD Millenium Equity	1.594.992.588	1.834.570.526	*RD Millenium Equity*
RD Simas Saham Unggulan	-	10.410.869.360	*RD Simas Saham Unggulan*
Sub Jumlah Pihak Ketiga	**744.775.743.228**	**773.673.577.372**	***Sub Total Third Parties***
Jumlah Reksadana	**810.241.381.332**	**888.119.199.692**	***Total Mutual Funds***
Obligasi			***Bonds***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Negara RI Seri FR0072	255.010.812.394	260.806.686.000	*Negara RI series FR0072*
Obligasi Negara RI Seri PBS005	241.696.760.000	280.118.322.000	*Obligasi Negara RI Seri PBS005*
Negara RI Seri FR0068	70.399.420.000	78.362.060.000	*Negara RI series FR0068*
Obligasi Negara RI Seri FR0075	68.585.540.732	42.000.120.000	*Obligasi Negara RI Seri FR0075*
Sukuk SBSN Seri PBS012	67.481.069.038	55.395.920.928	*Sukuk SBSN Seri PBS012*
Negara RI Seri PBS012	59.343.548.378	56.371.636.464	*Negara RI series PBS012*
Negara RI Seri FR0073	41.756.560.000	46.648.840.000	*Negara RI series FR0073*
Negara RI Seri FR0065	39.169.350.000	29.263.050.000	*Negara RI series FR0065*
Negara RI Seri FR0074	31.395.989.768	35.320.772.168	*Negara RI series FR0074*
Obligasi Negara RI Seri PBS004	31.306.583.070	13.776.912.880	*Obligasi Negara RI Seri PBS004*
Obligasi Negara RI Seri FR0077	25.389.700.000	-	*Obligasi Negara RI Seri FR0077*
Obligasi Berkelanjutan I SMI Tahap II Tahun 2017 Seri B	24.436.500.000	25.101.375.000	*Obligasi Berkelanjutan I SMI Tahap II Tahun 2017 Seri B*
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	24.045.425.000	-	*Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B*
Negara RI Seri FR0064	24.202.594.270	9.740.970.000	*Negara RI series FR0064*
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B	23.607.150.000	25.643.100.000	*Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B*
Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap I 2018 Seri A	23.114.850.000	-	*Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap I 2018 Seri A*
Obligasi Negara RI Seri FR0076	21.951.754.380	26.825.863.230	*Obligasi Negara RI Seri FR0076*
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 Seri A	14.900.820.000	14.975.205.000	*Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 Seri A*
Total Dipindahkan	**1.087.794.427.029**	**1.000.350.833.670**	***Brought Forward***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

	2018	2017	
Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)			***Available For Sale (Continued)***
Saldo dipindahkan	**1.087.794.427.029**	**1.000.350.833.670**	***Carried Forward***
Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018	14.297.280.000	-	*Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018*
Obligasi I KAI Tahun 2017 Seri A	14.280.600.000	15.187.725.000	*Obligasi I KAI Tahun 2017 Seri A*
Negara RI Seri FR0052	11.686.670.000	12.928.280.000	*Negara RI series FR0052*
Negara RI Seri FR0042	11.315.300.000	12.599.000.000	*Negara RI series FR0042*
Negara RI Seri FR0047	11.211.660.000	12.473.880.000	*Negara RI series FR0047*
Berkelanjutan II Pengadaian Tahap II Tahun 2014 SERI C	10.101.200.000	10.403.980.000	*Berkelanjutan II Pengadaian Tahap II Tahun 2014 series C*
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B	9.519.610.000	10.544.860.000	*Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B*
Obligasi I KAI Tahun 2017 Seri B	9.471.350.000	10.146.480.000	*Obligasi I KAI Tahun 2017 Seri B*
Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013	9.399.500.000	9.813.310.000	*Berkelanjutan I BTN Tahap II Tahun 2013*
Obligasi Subordinasi III BRI Tahun 2018	9.199.310.000	-	*Obligasi Subordinasi III BRI Tahun 2018*
Sukuk SBSN Seri PBS015	6.010.788.000	-	*Sukuk SBSN Seri PBS015*
Sukuk SBSN Seri PBS011	5.116.975.000	5.584.420.000	*Sukuk SBSN Seri PBS011*
Perum Pegadaian Tahun 2012 Seri D	4.001.960.000	4.037.896.000	*Perum Pegadaian Year 2012 Series D*
Negara RI Seri FR0059	2.484.406.020	2.796.880.500	*Negara RI series FR0059*
Sukuk SBSN Seri PBS019	2.002.484.000	-	*Sukuk SBSN Seri PBS019*
Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B	1.888.490.000	1.976.286.000	*Obligasi I PP Properti Tahun 2016 series B*
Antam Seri A Tahun 2011	-	6.063.348.000	*Antam Series A Year 2011*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	**1.219.782.010.049**	**1.114.907.179.170**	***Sub Total Related Parties***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jawa Barat dan Banten Tahap I 2017 Seri B	23.731.600.000	25.175.200.000	*Obligasi Berkelanjutan I Bank Jawa Barat dan Banten Tahap I 2017 Seri B*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	18.128.280.000	21.285.040.000	*Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017*
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	14.683.440.000	-	*Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B*
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 Seri B	14.654.775.000	-	*Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018 Seri B*
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi International Tahap IV Tahun 2017	15.040.140.000	15.954.435.000	*Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi International Tahap IV Tahun 2017*
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III 2018 Seri B	9.798.170.000	-	*Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III 2018 Seri B*
Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	-	15.361.200.000	*Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 series B*
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	-	15.111.720.000	*Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013*
Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A	-	10.047.070.000	*Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A*
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B	-	5.021.115.000	*Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B*
Jumlah Pihak Ketiga	**96.036.405.000**	**107.955.780.000**	***Total Third Parties***
Jumlah Obligasi	**1.315.818.415.049**	**1.222.862.959.170**	***Total Bonds***

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / ***4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)***

	2018	2017	
Tersedia untuk Dijual (Lanjutan)			***Available For Sale (Continued)***
Efek Beragun Aset (EBA)			***Security (Asset Underlying)***
Efek Beragunan Aset Mandiri JSMR01 Kelas A	19.665.740.000	25.309.075.000	*Security (Asset Underlying) Mandiri JSMR01 Kelas A*
Efek Beragunan Aset SP SMF BTN04 Kelas A	8.999.807.899	-	*Efek Beragunan Aset SP SMF BTN04 Kelas A*
Efek Beragunan Aset Danareksa IP PLN I Tahun 2017	6.921.094.112	8.706.362.382	*Security (Asset Underlying) Danareksa IP PLN I Tahun 2017*
Jumlah Efek Beragun Aset (EBA)	**35.586.642.010**	**34.015.437.382**	***Total Security (Asset Underlying)***
Jumlah Surat Berharga Yang Dimiliki Untuk Dijual	**2.450.270.124.791**	**2.360.526.368.444**	***Total Marketable Securities Available for Sale***
Jumlah Surat Berharga	**4.124.057.242.998**	**4.025.861.247.365**	***Total Marketable Securities***

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / ***Held-To-Maturity***

	Kupon / Coupon	*Rating / Rate*	*Jatuh Tempo / Maturity Date*	
Obligasi				***Bonds***
Obligasi Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B	9,05%	A-	14 Desember 2021	*Obligasi Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B*
Obligasi I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014	12,25%	A-	06 Juni 2019	*Obligasi I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014*
Obligasi Bukopin Tahap I Tahun 2012	9,25%	BBB+	06 Maret 2019	*Obligasi Bukopin Tahap I Tahun 2012*
Obligasi Wajib Konversi Reindo Tahun 2014	8,50%	A+	31 Desember 2020	*Obligasi Wajib Konversi Reindo Tahun 2014*
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D	8,00%	AAA	09 Juli 2020	*Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A	8,00%	AAA	05 Juli 2020	*Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A*
Obligasi I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B				*Obligasi I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B*
Obligasi Berkelanjutan I	9,60%	AAA	10 Desember 2023	*Obligasi Berkelanjutan I*
Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	9,50%	A	28 Juni 2020	*Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C*
MTN 1 RNI Tahun 2017	9,75%	BBB+	13 April 2020	*MTN 1 RNI Tahun 2017*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	8,00%	AAA (sy)	05 Juli 2020	*Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013*
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	9,93%	AAA	23 Juni 2022	*Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A*
Eba DBTN05- KPR Kelas A Tahun 2014 Seri A2	10,25%	AAA	07 September 2025	*Eba DBTN05- KPR Kelas A Tahun 2014 Seri A2*
EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	9,75%	AAA	28 April 2020	*EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2*
MTN Subordinasi Mandiri 1 Tahun 2018	8,50%	AAA	31 Juli 2023	*MTN Subordinasi Mandiri 1 Tahun 2018*
Obligasi Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018	8,50%	AAA	30 September 2023	*Obligasi Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018*
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri A	9,25%	A-	27 September 2021	*Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri A*
MTN Perum Perumnas III Tahun 2018 Seri A	10,75%	BBB+	10 Desember 2021	*MTN Perum Perumnas III Tahun 2018 Seri A*
Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 Seri A	8,65%	AAA	12 Desember 2021	*Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 Seri A*
Obligasi II Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2018 Seri A	10,40%	A+	28 Desember 2021	*Obligasi II Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2018 Seri A*
Obligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	7,90%	AA+	27 Maret 2023	*Obligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013*
Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D	7,75%	AAA	14 Februari 2019	*Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D*
Obligasi Berkelanjutan II Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C	9,75%	AAA	11 Juli 2019	*Obligasi Berkelanjutan II Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C*
Obligasi 1 PP Properti Tahun 2016 Seri B	9,90%	BBB	01 Juli 2019	*Obligasi 1 PP Properti Tahun 2016 Seri B*
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,20%	AAA	18 Nopember 2021	*Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B*
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B	9,00%	A-	21 Februari 2022	*Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	11,00%	A-	28 Februari 2024	*Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017*
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I 2017 Seri A	9,25%	A-	22 Juni 2022	*Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I 2017 Seri A*
EBA JSMR01 - Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi Kelas A	8,40%	AAA	30 Agustus 2022	*EBA JSMR01 - Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi Kelas A*
EBA PPLN01- Indonesia Power	8,25%	AAA	19 September 2022	*EBA PPLN01- Indonesia Power*

4. SURAT BERHARGA (Lanjutan)

Jatuh Tempo (Lanjutan)

Obligasi Waskita III Waskita Karya Tahun 2017	8,50%	A-	06 Oktober 2022	*Obligasi Waskita III Waskita Karya Tahun 2017*
Obligasi II Medco Energi Tahap VI Tahun 2017	10,80%	A	28 September 2022	*Obligasi II Medco Energi Tahap VI Tahun 2017*
Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri A	7,75%	AAA	21 Nopember 2022	*Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri A*
Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri B	8,25%	AAA	22 Nopember 2022	*Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri B*
Obligasi Berkelanjuta I SMI Tahap II tahun 2017 Seri B	7,40%	AAA	15 Nopember 2022	*Obligasi Berkelanjuta I SMI Tahap II tahun 2017 Seri B*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B	9,90%	AA-	06 Desember 2024	*Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B*
Obligasi III Waskita Tahap II tahun 2018 Seri B	8,25%	A-	23 Februari 2023	*Obligasi III Waskita Tahap II tahun 2018 Seri B*
EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	7,50%	AAA	27 September 2025	*EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2*
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III Tahun 2018 Seri B	7,45%	AAA	12 April 2021	*Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III Tahun 2018 Seri B*
Obligasi Subordinasi III BRI Tahun 2018	7,70%	AA	26 Juni 2023	*Obligasi Subordinasi III BRI Tahun 2018*
Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap I Tahun 2018 Seri A	9,00%	BBB	06 Juli 2021	*Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap I Tahun 2018 Seri A*
Obligasi II PTPP tahap 1 tahun 2018 Seri A	8,25%	A+	06 Juli 2021	*Obligasi II PTPP tahap 1 tahun 2018 Seri A*
Obligasi Berkelanjutan I BJB Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,50%	AA+	27 September 2023	*Obligasi Berkelanjutan I BJB Tahap II Tahun 2018 Seri B*

4. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

Held-To-Maturity (Continued)

5. PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN

5. GUARANTEE RECEIVABLES

	2018	2017	
Piutang IJP/IJK KUR			***KUR Guarantee Receivables***
Piutang IJP/ IJK KUR Kepada Pemerintah	1.328.036.144.692	1.304.389.738.431	*KUR Guarantee Receivables - Government*
Piutang IJP/ IJK KUR Kepada Bank	1.307.160.788.366	1.179.756.847.279	*KUR Guarantee Receivables - Bank*
Jumlah Piutang IJP/IJK KUR	**2.635.196.933.058**	**2.484.146.585.710**	***Total KUR Guarantee Receivables***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(43.657.810.489)	(11.771.789.372)	*Allowance for Inpairment Losess*
Jumlah Piutang IJP/IJK KUR	**2.591.539.122.569**	**2.472.374.796.338**	***Total KUR Guarantee Receivables***
Piutang IJP/IJK Eksisting			***Existing Guarantee Receivables***
Piutang IJP/IJK Existing	75.313.506.889	2.379.423.897	*Existing Guarantee Receivables*
Jumlah Piutang IJP/IJK Eksisting	**75.313.506.889**	**2.379.423.897**	***Total Existing Guarantee Receivables***
Jumlah Piutang Imbal Jasa Penjaminan	**2.666.852.629.458**	**2.474.754.220.235**	***Total Guarantee Receivables***

Piutang IJP KUR merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008. Imbal Jasa Penjaminan dibayar oleh Pemerintah dengan tarif imbal jasa penjaminan sebesar 1,5% dan *coverage* sebesar 70% untuk kredit yang akadnya sebelum 14 Februari 2010. Untuk kredit yang akadnya setelah 14 Februari 2010 tarif imbal jasa penjaminan sebesar 3,25% pertahun dengan *coverage* sebesar 70%-80% sesuai PMK No.189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010.

KUR IJP receivables represent receivables to the Government in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 135/PMK.05/2008 dated 24 September 2008. Return Guarantee Services paid by the Government to guarantee compensation rates at 1.5% and the coverage is 70% for credit agreement before February 14, 2010. For credit agreement after February 14, 2010 underwriting compensation rates by 3.25% per year with coverage of 70% -80% according PMK No.189/PMK.05/2010 On November 2, 2010.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan bulan Januari sampai dengan Desember bagian Administrasi Bisnis tahun 2018 untuk Tagihan KUR Gen I dan KUR Gen II, sebagai berikut :

Based on the January until December Activities Report. December Business Administration section in 2018 for KUR Gen I and KUR Gen II Bills, as follows:

Subsidi IJP :

IJP Subsidy :

Tagihan Subsidi IJP KUR Fase 1 tahun 2018 (Tahap 1 & 2 tahun 2017) sebesar Rp.62.824.339.833 telah dilakukan verifikasi oleh BPKP dan telah dibayar oleh KPA sebesar Rp.46.604.957.569 pada tanggal 24 September 2018

IJP KUR Subsidy Bill Phase 1 of 2018 (Phase 1 & 2 of 2017) of Rp.62,824,339,833 has been verified by the BPKP and has been paid by KPA of Rp.46,604,957,569 on September 24, 2018

Tagihan Subsidi IJP KUR Fase 2 Tahun 2018 (Tahap 1 & 2 tahun 2018) telah disampaikan surat kepada Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi IJP KUR nomor 6594/P/3/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.46.055.673.169.

Phase 2 of IJP KUR Subsidy Bill 2018 (Phase 1 & 2 of 2018) has been sent a letter to the Deputy of Kemenkop and UKM Financing as the Budget User Authority (KPA) of IJP KUR Subsidy number 6594 / P / 3 / X / 2018 dated October 30, 2018 amounting Rp.46,055,673,169.

Subsidi Bunga :

Interest Subsidy :

Total pembayaran IJP KUR Gen 2 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.108.586.760.168,72 atau 112,55 % dari target pembayaran IJP KUR tahun 2018 sebesar Rp.984.973.855.455.

The total payment of IJP KUR Gen 2 for the period of 01 January to 31 December 2018 is Rp.1,108,586,760,168.72 or 112.55% of the payment target for IJP KUR in 2018 amounting to Rp.984,973,855,455.

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG / *6. GUARANTEE RECEIVABLES*

	2018	2017	
Piutang *Co-Guarantee* :			***Co-Guarantee Receivable:***
- PT Asuransi Syariah Mubarakah	60.884.628.596	60.884.628.596	*PT Asuransi Syariah Mubarakah* -
- PT Heksa Eka Life Insurance	52.903.759.277	58.562.700.167	*PT Heksa Eka Life Insurance* -
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	6.076.092.738	28.418.115.225	*PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin* -
- PT Asuransi Jiwasraya	1.143.626.300	287.132.230	*PT Asuransi Jiwasraya* -
- PT Central Asia Raya	25.127.520	-	*PT Central Asia Raya* -
- PT Jamkrindo Syariah	-	5.663.525.788	*PT Jamkrindo Syariah* -
- PT Asuransi Beringin Sejahtera Artamakmur	-	41.697.379.470	*PT Asuransi Beringin Sejahtera Artamakmur* -
Jumlah Piutang *Co-Guarantee*	**121.033.234.431**	**195.513.481.476**	***Total Co-Guarantee Receivables***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			***Allowance for Impairment Losses***
- PT Asuransi Syariah Mubarakah	(60.884.628.596)	(60.884.628.596)	*PT Asuransi Syariah Mubarakah* -
- PT Heksa Eka Life Insurance	(15.937.504.466)	(15.670.119.570)	*PT Heksa Eka Life Insurance* -
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	-	(6.836.744.578)	*PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin* -
Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	**(76.822.133.062)**	**(83.391.492.745)**	***Total Allowance for Impairment Loss***
Total Piutang *Co-Guarantee*	**44.211.101.369**	**112.121.988.731**	***Total Co-Guarantee Receivable***
Piutang Re-Asuransi :			***Re-Insurance Receivable***
- PT Re-asuransi Nasional Indonesia	138.853.870.849	2.427.915.729	*PT Re-asuransi Nasional Indonesia* -
- PT Re-asuransi Internasional Indonesia	59.229.915.333	4.293.064.088	*PT Re-asuransi Internasional Indonesia* -
- PT Igna Asia	11.462.459.520	1.689.427.526	*PT Igna Asia* -
- PT Reasuransi Syariah Indonesia	849.457.909	-	*PT Reasuransi Syariah Indonesia* -
Jumlah Piutang Re-Asuransi	**210.395.703.611**	**8.410.407.343**	***Total Re-Insurance Receivable***
Total Piutang Penjaminan Ulang	**254.606.804.980**	**120.532.396.074**	***Total Guarantee Receivable***

Piutang *Co-Guarantee* kepada PT Heksa Eka Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra *Co-Guarantee* atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan.

Co-guarantee receivables to PT Heksa Eka Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, PT Asuransi Syariah Mubarakah, PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya are reimbursement of claims billed to Co-Guarantee partners for the payment of claims have been paid by the Company.

Perusahaan bekerjasama dengan mitra *Co-Guarantee* untuk kredit multiguna dan mikro untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggalnya terjamin.

The company cooperates with Co-Guarantee partners for a multipurpose and micro credit to transfer the risk of claims resulting from the death of the assured.

Untuk menghindari tertunggaknya pembayaran Piutang dari mitra *Co-Guarantee*, sejak tahun 2011 telah ditambahkan ketentuan baru dalam perjanjian kerja sama dengan mitra *Co-Guarantee* yaitu perusahaan akan memotong pembayaran premi *Co-Guarantee* maksimal sebesar 50% dari premi *Co-Guarantee* sebesar 60% dari IJP/IJK yang menjadi hak mitra *Co-Guarantee* apabila saldo Piutang *Co-Guarantee* di atas kewajaran, yang dihitung 3 kali dari rata-rata pengajuan pembayaran klaim dalam 1 tahun terakhir atau dengan perhitungan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan mitra *Co-Guarantee*.

To avoid the payment of delinquent receivables from Co-Guarantee partners, since 2011 has been aeded a new provision in the agreement of cooperation with Co-Guarantee partners that the company will cutoff the premium Co. Guarantee a maximum of 50% of the premium Co. Guarantee for 60% of the IJP / IJK the Guarantee Co partner right when the balance in the Accounts Receivable Guarantee Co. fairness, which is calculated 3 times of the average filing claims payments in the last 1 year or with other calculations agreed by the company and partner Co. Guarantee.

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perum Jamkrindo, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, dan PT Reasuransi Nasional Indonesia nomor 02/PKS/OP-02/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang penyelesaian Utang Piutang dan Pengalihan Portofolio Bisnis. Telah menyepakati bahwa piutang co-guarantee dari PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin kepada Perum Jamkrindo akan dialihkan kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp94.741.625.377 (Lihat catatan 32).

Based on the agreement between Perum Jamkrindo, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, and PT Reasuransi Nasional Indonesia number 02 / PKS / OP-02/2019 dated January 25, 2019 concerning settlement of Debt and Transfer of Business Portfolio. It has been agreed that the co-guarantee receivables from PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin to the Perum Jamkrindo will be transferred to PT Indonesia National Reinsurance amounting to Rp94,741,625,377 (See notes 32).

Perjanjian kerjasama terbaru dengan mitra *Co-Guarantee* sebagai berikut:

New cooperation agreements with partner Co-Guarantee as follows:

- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM) No:37/Jamkrindo/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- *A cooperation agreement with PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM) No: 37 / Jamkrindo / VI / 2012 dated June 27, 2012 regarding the Closure of Credit Life Insurance For Debtor Banks / Financial Institutions Other Receivers Credit / Financing Multiguna.*

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

Perjanjian kerjasama terbaru dengan mitra *Co-Guarantee* sebagai berikut: (Lanjutan)

- Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat No. 36/Pdt-Sus/pailit/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 6 September 2016 menyatakan PT Asuransi Syariah Mubarakah Pailit dengan Segala Akibat Hukumnya dan Surat Tim Kurator PT Asuransi Syariah Mubarakah No. 02/TK-CDS/Pailit-ASM/IX/16 tanggal 13 September 2016 perihal Undangan Rapat Kreditur PT Asuransi Syariah Mubarakah (Dalam Pailit).

- Perjanjian kerjasama dengan PT Heksa Eka Life Insurance No. 06/Jamkrindo/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna yang diaddendum dengan perjanjian kerjasama No. 33/Jamkrindo/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.01/Jamkrindo/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, yang kemudian diaddendum lagi dengan perjanjian kerjasama No.38/Jamkrindo/V/2013 – PKS.008/HELI/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, dan terakhir diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.06/Jamkrindo/II/2014 – PKS.003/HELI/II/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya No. 40/Sarana/XII/2007-DIR/243/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit Multiguna diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya No. 36/Sarana/V/2008-038/DIR-PKD/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penutupan Asuransi pertanggungan Uang Muka Baperum Griya (UMB) Bagi Pegawai Bank Indonesia

- Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga No. 30/Sarana/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penutupan Asuransi Pinjaman Tunai Bagai Pegawai Bank Indonesia, Pensiunan Pegawai Bank Indonesia dan Pinjaman Multi Guna Bagi Karyawan Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) Jakarta diaddendum dengan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 29/Sarana/X/2007-ATK.DU.ADD.PKS-026.10.2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Penutupan Asuransi Pinjaman Tunai Bagi Pegawai Bank Indonesia, Pensiunan Pegawai Bank Indonesia dan Pinjaman Multi Guna Bagi Karyawan KOPEBI Jakarta.

- Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BSAM) No. 14/Jamkrindo/OP-02/VI/2015-PKS014-DIR/MKT/06/2015 tanggal 04 Juni 2015 tentang Santunan Asuransi Kebakaran Atas Produk Penjaminan Kredit Kreasi PT. Pegadaian (Persero) diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur No.36/Jamkrindo/OP-02/XI/2017-PKS.032-DIR/SYR/11/2017 tentang Santunan Asuransi Kebakaran atas Produk Penjaminan Kredit Kreasi PT. Pegadaian (Persero).

6. GUARANTEE RECEIVABLES (Continued)

New cooperation agreements with partner Co-Guarantee as follows: (Continued)

- *Based on Decision of the Central Jakarta District Court No. 36 / Pdt-Sus / bankrupt / 2016 / PN.NIAGA.JKT.PST dated September 6, 2016 stated PT Asuransi Syariah Mubarakah bankrupt with all its legal consequences and letter of receiver team of PT Asuransi Syariah Mubarakah No. 02 / TK-CDS / Bankrupt-ASM / IX / 16 dated September 13, 2016 concerning Invitation to the Meeting of Creditors of PT Asuransi Syariah Mubarakah (In Bankruptcy).*

- *Cooperation agreement with PT Heksa Eka Life Insurance No.: 06/Jamkrindo/II/2012 date February 28,2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose that has been addendum with cooperation agreement No.: 33/Jamkrindo/V/2012 date May 24, 2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 01/Jamkrindo/I/2013 date January 15, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No. 38/Jamkrindo/V/2013 - PKS.008/HELI/V/2013 date May 17, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, and last that has been addendum with cooperation agreement No.: 06/Jamkrindo/II/2014 - PKS.003/HELI/II/2014 date February 07, 2014 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.*

- *Cooperation Agreement with PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya No. 40 / Sarana / XII / 2007-DIR / 243 / XII / 2007 dated 12 December 2007 concerning Closing of Credit Life Insurance for Debtors of Banks / Other Financial Institutions of Multipurpose Credit Recipients with a Cooperation Agreement with PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya No. 36 / Sarana / V / 2008-038 / DIR-PKD / 2008 dated May 19, 2008 concerning Closing of Insurance Coverage for Baperum Griya Advance (UMB) for Bank Indonesia Employees*

- *Cooperation Agreement with PT Takaful Insurance Family No. 30 / Sarana / XII / 2006 dated December 29, 2006 concerning Closing of Cash Loan Insurance for Employees of Bank Indonesia, Retired Bank Indonesia Employees and Multi-Purpose Loans for Employees of Bank Indonesia Employee Cooperatives (KOPEBI) Jakarta added with Addendum to Cooperation Agreement No. 29 / Sarana / X / 2007-ATK.DU.ADD.PKS-026.10.2007 dated 26 October 2007 concerning Closing of Cash Loan Insurance for Bank Indonesia Employees, Bank Indonesia Retired Employees and Multi-Purpose Loans for KOPEBI Jakarta Employees.*

- *Cooperation Agreement with PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BSAM) No. 14 / Jamkrindo / OP-02 / VI / 2015-PKS014-DIR / MKT / 06/2015 dated June 4, 2015 concerning Compensation of Fire Insurance for Product Guarantee of Creative Credit PT. Pegadaian (Persero) renewed with a Cooperation Agreement with PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur No.36 / Jamkrindo / OP-02 / XI / 2017-PKS.032-DIR / SYR / 11/2017 concerning Fire Insurance Benefits for Product Credit Guarantee of PT. Pegadaian (Persero).*

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

- Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin No. 4/Jamkrindo/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.02/Jamkrindo/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaeendum dengan perjanjian kerjasama No.39/Jamkrindo/V/2013 – 0011/PKS-AL AMIN/DIR/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna, diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.05/Jamkrindo/II/2014 – 006/PKS-AL AMIN/DIR/II/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna. kemudian diaddendum dengan perjanjian kerjasama No.07/Jamkrindo/OP-01/II/2015 – 010/PKS-AL AMIN/DIR/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- Perjanjian kerjasama dangan PT Asuransi Jiwasraya No.07/Jamkrindo/II/2014 –035.SJ.U.0214 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna dan tahun 2015 diadendum dengan perjanjian kerjasama No.08/Jamkrindo/OP-01/II/2015 –025a.SJU.0215 tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/ Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/ Pembiayaan Multiguna.

- Perjanjian kerjasama dangan PT Asuransi Bina Griya Upakara No.54/Jamkrindo/VI/2014 – 15/PKS/DIR-BINAGRIYA/062014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penempatan Asuransi Kebakaran Rumah Tinggal Bagi Nasabah Bank Yang Dibiayai Dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

- Perjanjian kerjasama dangan PT Asuransi Bina Griya Upakara No.14/Jamkrindo/OP02VI/2014 –PKS.014-DIR/MKT/06/2015 tanggal 04 Juni 2015 tentang Santunan Asuransi Kebakaran atas Produk Penjaminan Kredit Kreasi PT Pegadaian (Persero).

- Perjanjian Kerjasama dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 05/Jamkrindo/OP-03/X/2015-071/PKS/Jamsyar/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 tentang Penjaminan Pembiayaan Bersama diaddendum dengan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 08/Jamkrindo/OP-01/I/2016-002/PKS/JAMSYAR/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 tentang Penjaminan Pembiayaan Bersama diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 18/Jamkrindo/OP-02/IV/2018-18/PKS/Jamsyar/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penjaminan Pembiayaan Bersama diaddendum dengan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 38/Jamkrindo/OP-02/XI/2018-053/PKS/Jamsyar/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penjaminan Pembiayaan Bersama.

Piutang Re-Asuransi kepada Perusahaan Re-asuransi adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Re-Asuransi atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan. Perusahaan bekerjasama dengan mitra Re-asuransi untuk semua jenis kredit untuk mengalihkan sebagian risiko klaim.

Dalam kerja sama dengan re-asuransi digunakan metode *treaty*. Metode *treaty* merupakan perjanjian pertanggungan ulang otomatis secara tahunan antara Perusahaan Penjamin dan Re-asuransi dengan kondisi yang disepakati bersama dalam negosiasi *treaty*.

6. REGUARANTEE RECEIVABLE (Continued)

- *Cooperation agreement with PT Asuransi Jiwa Sharia Al-Amin No.: 4/Jamkrindo/I/2012 date January 31, 2012 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 02/Jamkrindo/I/2013 date January 15, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No. 39/Jamkrindo/V/2013 - 011/PKS-AL AMIN/DIR/V/2013 date May 17, 2013 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose, that has been addendum with cooperation agreement No.: 05/Jamkrindo/II/2014 - 006/PKS-AL AMIN/DIR/II/2014 date February 07, 2014 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.that has been addendum with cooperation agreement No.: 07/Jamkrindo/OP-01/II/2015 - 010/PKS-AL AMIN/DIR/II/2015 date February 28, 2015 about The Closing Credits Life Insurance For the Debtor Bank / Other Financial Institution Recipient Credit / Financing Multipurpose.*

- *Cooperation agreement invitation PT BNI Life Insurance No.07 / Jamkrindo / II / 2014 dated 07 February 2014 -035.SJ.U.0214 about Closing Credit Life Insurance For Debtor Banks / Financial Institutions Other Receivers Credit / Financing Multipurpose and 2015 updated with agreement cooperation No.08 / Jamkrindo / OP-01 / II / 2015 dated February 23, 2015 -025a.SJU.0215 about Credit Life Insurance Closure For Debtor Banks / Financial Institutions Other Receivers Credit / Financing Multiguna.*

- *Cooperation agreement with PT Asuransi Bina Griya Upakara No. : 54/Jamkrindo/VI/2014 - 15/PKS/DIR-BINAGRIYA/062014 date June 26, 2014 about Fire Insurance Placement House Live For Customer Bank Financed With Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) .*

- *Cooperation agreement invitation PT Asuransi Bina Griya Upakara 14 / Jamkrindo / OP02VI / 2014 -PKS.014-DIR / MKT / 06/2015 dated June 4, 2015 on Compensation Insurance Products Credit Guarantee Fire on Creative PT Pegadaian (Persero).*

- *Cooperation Agreement with PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 05 / Jamkrindo / OP-03 / X / 2015-071 / PKS / Jamsyar / X / 2015 dated October 8, 2015 concerning Joint Financing Guarantee added with the Addendum to the Cooperation Agreement No. 08 / Jamkrindo / OP-01 / I / 2016-002 / PKS / JAMSYAR / I / 2016 dated January 23, 2016 concerning the updated Joint Financing Guarantee with a Cooperation Agreement with PT Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 18 / Jamkrindo / OP-02 / IV / 2018-18 / PKS / Jamsyar / IV / 2018 dated 26 April 2018 concerning Joint Financing Guarantee added with the Addendum to the Cooperation Agreement No. 38 / Jamkrindo / OP-02 / XI / 2018-053 / PKS / Jamsyar / XI / 2018 dated 1 November 2018 concerning Collateral Financing Guarantee.*

Re-Insurance Receivable to Company Indonesian National Re-insurance is reimbursement payments charged to the partners claim for payment of Re-Insurance claims paid by the Company. Re-insurance companies collaborate with partners for all types of credit to shift some of the risk of claims.

In cooperation with the insurance partner treaty methods is being used. Treaty method is an annually automatic re-guarantee agreement and re-insurance partner with the condition agreed concering treaty negotiation.

6. PIUTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

Kerjasama dengan perusahaan Re-asuransi dilakukan melalui perusahaan pialang dengan PKS sebagai berikut:

- PKS antara Perum Jamkrindo dengan PT Re-asuransi Nasional Indonesia dan PT Re-asuransi Internasional Indonesia No. 27/Jamkrindo/OP-01/IV/2016 – 311/DIR/NR/IV/2016 – 00141/HK.01.01/00/ReINDO/4/2016 tanggal 29 April 2016.

Treaty antara Perum Jamkrindo dan PT Re-asuransi Nasional Indonesia dan PT Re-asuransi Internasional Indonesia, terdiri dari :

1) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Multiguna Tahun 2016;
2) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Umum Tahun 2016;
3) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Mikro Tahun 2016;
4) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016;
5) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Bank Garansi Tahun 2016;
6) *Quota Share Re-insurance Treaty* Penjaminan Distribusi Barang Tahun 2016;
7) *Quota Share Re-insurance Treaty Surety Bond* Tahun 2016.

Perubahan penyisihan penurunan nilai atas Piutang *Co-Guarantee* adalah sebagai berikut:

6. GUARANTEE RECEIVABLES (Continued)

Cooperation with companies is done through a re-insurance brokerage firm with PKS as follows:

- *Cooperation Agreement between Perum Jamkrindo with PT Re-asuransi Nasional Indonesia and PT Re-asuransi Internasional Indonesia No. 27 / Jamkrindo / OP-01 / IV / 2016-311 / DIR / NR / IV / 2016-00141 / HK.01.01 / 00 / ReINDO / 4/2016 dated 29 April 2016.*

Treaty between Perum Jamkrindo and PT Indonesian National Re-insurance and PT Re-asuransi Internasional Indonesia, consisting of:

1) Quota Share Re-insurance Treaty of Multiguna Credit Guarantee Year 2016;
2) Quota Share Re-insurance Treaty of General Credit Guarantee Year 2016;
3) Quota Share Re-insurance Treaty of Micro Credit Guarantee Year 2016;
4) Quota Share Re-insurance Treaty of procurement and contruction;
5) Quota Share Re-insurance Treaty of goods distibution Guarantee Year 2016;
6) Quota Share Re-insurance Treaty of General Credit Guarantee Year 2016;
7) Quota Share Re-insurance Treaty of surety bond Year 2016.

The changes in allowance of impairment loss for Co-Guarantee Receivable is as follows:

	2018	2017	
Saldo Awal Tahun	83.391.492.744	75.971.633.023	*Beginning Balance of The Year*
Pembentukan Cadangan	10.276.760.814	7.419.859.721	*Establishment of Allowance*
Pemulihan Cadangan	(16.846.120.496)	-	*Recovery of Allowance*
Saldo Akhir	**76.822.133.062**	**83.391.492.744**	***Ending Balance***

7. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

7. LOANS

	2018	2017	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Piutang Pinjaman Bagi Hasil	16.994.913.380	17.168.237.689	*Profit Sharing Loan*
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Piutang kepada Koperasi Pegawai	694.557.996	814.557.996	*Employee Cooperative Receivable*
Piutang Pinjaman Bagi Hasil	132.402.352	-	*Profit Sharing Loan*
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan	**17.821.873.728**	**17.982.795.685**	***Total Loans***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil	(16.716.194.745)	(16.880.570.570)	*Profit Sharing Loan for Impairment Losses*
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Penyisihan kerugian nilai pinjaman koperasi pegawai	(325.891.583)	(325.891.583)	*Employee Cooperative Receivable for Impairment Losses*
Penyisihan kerugian nilai pinjaman bagi hasil	(123.453.868)	-	*Profit Sharing Loan for Impairment Losses*
Jumlah penyisihan penurunan nilai	**(17.165.540.196)**	**(17.206.462.153)**	***Total Allowance for Impairment Losses***
Jumlah Pinjaman Yang diberikan Bersih	**656.333.533**	**776.333.533**	***Total Net Loans***

Piutang Pinjaman Bagi Hasil adalah penyediaan uang/dana oleh Perusahaan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pinjaman bagi hasil antara Perusahaan dengan nasabah yang mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan imbalan bagi hasil yang dihitung dari nilai nominal atau target IRR tertentu. Piutang Pinjaman bagi Hasil diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan No. 42/DIR/IX/2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia tidak lagi menyalurkan pinjaman bagi hasil baru.

Profit Sharing Loan Receivable is the provision of money / funds by the Company to customers under Profit Sharing Loan agreements between the Company with customers who require the customer to repay the debt after a certain period in return for taking into account the results calculated from the nominal value or a specific target IRR. Profit Sharing Loan Receivable regulated in The Decree of Company's Board of Directors No.42/DIR/IX/2001. Based on Government Regulation Number 41 of 2008 and Presidential Regulation Number 2 of 2008, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia are not distributed new Profit Sharing Loan.

7. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Pinjaman bagi hasil dengan kategori lancar ditetapkan sebagai pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Terhadap Piutang bagi hasil yang mengalami penurunan nilai namun Perusahaan tidak dapat memperoleh komitmen pembayaran dari para debitur, maka nilai wajar Piutang bagi hasil ditetapkan nihil. Dengan demikian CKPN yang dibentuk sebesar 100% dari nilai tercatat.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

7. LOANS (Continued)

Profit Sharing Loan with current category defined as loans that are not impaired and no impairment loss reserves established.

For profit sharing loan receivables are impaired but the Company can not obtain payment from the debtor's commitments, the fair values of accounts receivable is set to nihil. Thus allowance for impairment losses formed at 100% of the carrying value.

Management considers that allowance for impairment losses have been adequate to cover losses that may arise from uncollectible loans.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

	2018	2017	
Piutang Pendapatan Komisi	35.767.955.023	17.920.349.773	*Comission Income Receivable*
Piutang Pendapatan Bunga Reksadana	25.153.653.950	8.858.217.232	*Mutual Fund Interest Income Receivable*
Piutang Pendapatan Bunga Obligasi	18.339.435.959	26.545.584.804	*Bonds Interest Income Receivable*
Piutang Pendapatan Bunga Deposito	4.922.809.888	5.685.252.014	*Time Deposit Interest Income Receivable*
Piutang Pendapatan EBA	479.005.828	630.720.801	*Security (Asset Underlying) Income Receivable*
Piutang kepada Pegawai	275.670.650	1.585.579.016	*Receivable to Employee*
Piutang kepada Pegawai Lainnya	43.076.890	-	*Other Receivable to Employee*
Piutang kepada Penyewa Gedung	-	412.639.989	*Receivable to Tenant Building*
Piutang Lainnya	19.919.574.664	26.253.252.558	*Others Receivable*
Jumlah Piutang Lain-lain	**104.901.182.852**	**87.891.596.187**	***Total Other Receivable***

Piutang sewa gedung merupakan tagihan sewa gedung kepada penyewa dan Piutang kepada penyewa gedung merupakan tagihan atas pemakaian telepon oleh penyewa.

Piutang kepada pegawai merupakan tagihan atas ekses klaim asuransi kesehatan kepada karyawan dan tagihan atas bantuan uang muka.

Piutang lainnya merupakan rincian Piutang cabang-cabang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Piutang tersebut diatas.

Building Rent Receivable is claim of builing rent to tenant and Receivable to Tenant Building is claim of telephone charges.

Receivables to employee is billed for the excess to the employee health insurance claims and bills for payment assistance.

Other receivables are detailed receivables of the branches that can not be classified as receivables mentioned above.

9. PREMI DAN FEE DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID PREMIUM AND FEES

	2018	2017	
Premi Re-Asuransi	546.855.324.938	322.510.422.682	*Re-Insurance Premium*
Premi *Co-Guarantee*	519.521.138.210	505.495.314.284	*Co-Guarantee Premium*
Fee Agent	161.777.576.715	177.614.685.226	*Fee Agent*
Fee Based Income	156.523.271.773	126.680.016.798	*Fee Based Income*
Jumlah Premi dan Fee Dibayar Dimuka	**1.384.677.311.636**	**1.132.300.438.990**	***Total Prepaid Premium and Fees***

Beban Premi *Co-Guarantee* dan *Fee Based Income* dibayar dimuka diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP).

Beban dibayar dimuka *co-guarantee* merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra *co-guarantee* yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Beban dibayar dimuka re-asuransi merupakan Pembayaran Premi tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra re-asuransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Beban dibayar dimuka *fee bank* (*fee based income*) merupakan pembayaran *fee bank* tahun berjalan dan tahun-tahun lalu penerima jaminan yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Beban dibayar dimuka *fee agen* merupakan pembayaran *fee agen* tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra agen yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Premiums Co-Guarantee Expenses and Prepaid Fee Based Income are recognized over the term of the guarantee and allocated by month issuance of Certificate of Guarantee (SP).

Prepaid expenses co-guarantee is premium payments of the current year and years ago to co-guarantee partners that will be due in the coming years.

Prepaid expenses re-insurance is premium payments of the current year and years ago to re-insurance partners that will be due in the coming years.

Prepaid expenses fee bank (fee based income) is fee bank payments of the current year and years ago to the insured partners that will be due in the coming years.

Prepaid expenses agent fee is agent fee payments of the current year and years ago to the agent partners that will be due in the coming years.

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA / *10. PREPAID EXPENSES*

	2018	2017	
Beban Operasi	19.080.691.938	12.697.966.550	*Operating Expense*
Uang Muka Supplier	6.497.497.132	5.311.827.868	*Supplier Prepaid Taxes*
Beban SDM	2.067.228.639	1.921.583.447	*Human Resource Expense*
Beban Umum	160.508.694	1.758.210.335	*General Expense*
Jumlah Beban Dibayar Dimuka	**27.805.926.403**	**21.689.588.200**	***Total Prepaid Expense***

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat sewa bangunan, asuransi dan premi pensiun sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Expenses are allocated according to the useful life of each cost with a straight-line method. The useful life of building rent, insurance and pension premiums in accordance with the term of the contract or policy.

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

	2018				
	Saldo Awal 1 Januari 2018 / *Beginning Balance January 1, 2018*	**Penambahan / *Additions***	**Pengurangan / *Reclassification***	**Penyesuaian dan Reklasifikasi/ *Adjustment and Reclassification***	**Saldo Akhir 31 Desember 2018/ *Ending Balance Desember 31, 2018***
Biaya Perolehan *(Cost)*					
Tanah *(Land)*	302.692.445.156	37.400.000	-	-	302.729.845.156
Bangunan Kantor *(Buildings)*	105.366.496.861	8.747.053.783	-	-	114.113.550.644
Perumahan Dinas *(Houses)*	5.980.636.284	4.207.500	-	-	5.984.843.784
Kendaraan Bermotor (Vehicles)	43.397.485.931	119.870.000	-	-	43.517.355.931
Inventaris Kantor (Office Equipment)	79.633.705.044	17.964.008.908	-	-	97.597.713.952
Inventaris Rumah Dinas *(House Equipment)*	2.151.182.615	542.727.606	-	-	2.693.910.221
Jumlahl Biaya Perolehan *(Total cost)*	**539.221.951.891**	**27.415.267.797**	**-**	**-**	**566.637.219.688**

	2018				
	Saldo Awal 1 Januari 2018/ *Beginning Balance January 1, 2018*	**Penambahan / *Additions***	**Pengurangan / *Disposals***	**Penyesuaian dan Reklasifikasi / *Adjustment and Reclassification***	**Saldo Akhir 31 Desember 2018/ *Ending Balance Desember 31, 2018***
Akumulasi Penyusutan *(Accumulated Depreciation)*					
Bangunan Kantor (*Buildings*)	(5.501.112.547)	(1.054.824.435)	-	-	(6.555.936.982)
Perumahan Dinas (*Houses*)	(440.903.097)	(521.867.086)	-	-	(962.770.183)
Kendaraan Bermotor (Vehicles)	(18.914.803.382)	(4.226.366.137)	-	-	(23.141.169.519)
Inventaris Kantor (Office Equipment)	(41.458.402.148)	(15.655.984.522)	-	-	(57.114.386.670)
Inventaris Rumah Dinas *(House Equipment)*	(1.737.509.688)	(58.407.116)	-	-	(1.795.916.804)
Total Akumulasi Penyusutan *(Total Accumulated Depreciation)*	(68.052.730.862)	(21.517.449.296)	-	-	(89.570.180.158)
Nilai Buku (*Book Value*)	**471.169.221.029**				**477.067.039.529**

11. ASET TETAP (Lanjutan) / *11. FIXED ASSETS (Continued)*

	2017				
	Saldo Awal 1 Januari 2017 / *Beginning Balance January 1, 2017*	**Penambahan / *Additions***	**Pengurangan /*Disposals***	**Penyesuaian dan Reklasifikasi / *Adjustment and Reclassification***	**Saldo Akhir 31 Desember 2017 /*Ending Balance December 31, 2017***
Biaya Perolehan *(Cost)*					
Tanah *(Land)*	291.688.000.001	11.004.445.155	-	-	302.692.445.156
Bangunan Kantor (*Buildings*)	84.461.201.446	15.309.866.675	-	5.595.428.740	105.366.496.861
Perumahan Dinas (*Houses*)	5.980.636.284	-	-		5.980.636.284
Kendaraan Bermotor (Vehicles)	32.857.171.236	10.540.314.695	-	-	43.397.485.931
Inventaris Kantor (Office Equipment)	68.940.276.723	10.693.428.321	-	-	79.633.705.044
Inventaris Rumah Dinas *(House Equipment)*	1.928.256.073	222.926.542	-	-	2.151.182.615
Bangunan Dalam Penyelesaian/ *Contruction on Progess*	5.595.428.740	-		(5.595.428.740)	-
Total Biaya Perolehan *(Total Cost)*	**491.450.970.503**	**47.770.981.387**	**-**	**-**	**539.221.951.891**

	2017				
	Saldo Awal 1 Januari 2017 / *Beginning Balance January 1, 2017*	**Penambahan / *Additions***	**Pengurangan /*Disposals***	**Penyesuaian dan Reklasifikasi / *Adjustment and Reclassification***	**Saldo Akhir 31 Desember 2017 /*Ending Balance December 31, 2017***
Akumulasi penyusutan *(Accumulated depreciation)*					
Bangunan Kantor (*Buildings*)	(3.141.535.531)	(2.359.577.016)	-	-	(5.501.112.547)
Perumahan Dinas (*Houses*)	(117.228.200)	(323.674.897)	-	-	(440.903.097)
Kendaraan Bermotor (Vehicles)	(14.331.787.769)	(4.583.015.613)	-	-	(18.914.803.382)
Inventaris Kantor (Office Equipment)	(30.304.828.553)	(11.153.573.596)	-	-	(41.458.402.148)
Inventaris Rumah Dinas *(House Equipment)*	(1.560.197.529)	(177.312.159)	-	-	(1.737.509.688)
Total Akumulasi Penyusutan *(Total Accumulated Depreciation)*	(49.455.577.582)	(18.597.153.281)	-	-	(68.052.730.862)
Nilai Buku (*Book Value*)	**441.995.392.921**				**471.169.221.029**

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp21.517.449.296 dan Rp18.597.153.281 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The balances of depreciation amounting to Rp21,517,449,296 and Rp18,597,153,281 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Perum Jamkrindo dan Entitas Anak selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Perum Jamkrindo and Subsidiary during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan.

There were no fixed assets pledged as collateral.

12. ASET LAIN-LAIN / *12. OTHER ASSETS*

	2018	2017	
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya	479.878.677.597	424.140.000.000	*Restricted Deposit*
Klaim Dalam Proses	146.384.883.544	143.507.025.927	*Claim in Process*
Piutang Penjaminan Ulang Dalam Proses	115.172.703.220	170.729.493.766	*Reguarantee Receivable in Process*
Aset Lainnya	36.597.498.564	9.442.673.283	*Other Assets*
Sediaan Cetakan	330.796.500	-	*Printing Supplies*
Aset Tak Berwujud -*Software*	137.471.905	167.918.627	*Intangible Asset - Software*
Jumlah Aset Lain-Lain	**778.502.031.330**	**747.987.111.603**	***Total Other Assets***

Piutang Dalam Proses merupakan Piutang Co-Guarantee yang belum ada persetujuan klaim dari mitra Co-Guarantee.

Receivable in process are co-guarantee's receivables that yet any claim approval from co-guarantee partners.

Deposito yang dimiliki entitas tetapi dibatasi penggunaannya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan mitra bank.

Time deposit owned entity but are restricted in accordance with an agreement with bank partners.

Klaim dalam proses adalah klaim yang sudah diajukan ke Perum Jamkrindo akan tetapi belum ada persetujuan atas klaim tersebut.

Claims in process are claims submitted to Perum Jamkrindo but no agreement has been reached.

Aset lainnya merupakan saldo jaminan listrik, PLN, telepon, dan software.

Other assets are balances of Electricity, PLN, telephone, and software guarantees.

13. UTANG KLAIM / *13. CLAIM PAYABLE*

	2018	2017	
Utang Klaim - Kredit Eksisting	59.735.621.062	24.058.110.208	*Claim Liability – Existing Credit*
Utang Klaim - Kredit Usaha Rakyat	26.068.395.491	51.867.380.175	*Claim Liability - Kredit Usaha Rakyat*
Jumlah Utang Klaim	**85.804.016.553**	**75.925.490.383**	***Total Claim Payable***

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah Utang yang telah disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar persentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang disetujui.

Claims payable is payable to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claims payable are debts that have been approved but not yet paid. Claims payable are stated at the percentage of underwriting the loans approved discharge tray.

14. CADANGAN KLAIM / *14. CLAIM RESERVE*

	2018	2017	
Cadangan Klaim KUR	353.891.916.709	310.837.377.744	*Claim Reserve KUR*
Cadangan Klaim - Kredit Eksisting	96.127.753.343	108.133.891.549	*Claim Reserve – Existing Credit*
Provisi Kerugian Atas Klaim			*Provision for Claim Losses*
Co-Guarantee	6.670.740.686	8.171.450.871	*Co-Guarantee*
Jumlah Cadangan Klaim	**456.690.410.738**	**427.142.720.164**	***Total Claim Reserve***

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

The claim reserves is the reserve of claim that might occur in the coming years onto the guarantee that has not mature yet.

Pada tahun 2018 dan 2017, cadangan klaim ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut pembentukan cadangan klaim dibagi dua metode, 1) Cadangan klaim yang wajib dibentuk minimal sebesar 0,01% dari total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri, 2) penjumlahan dari 100% klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Perusahaan menggunakan metode yang lebih besar dalam penjumlahan.

In 2018 and 2017, the claim reserve established by the Regulation of the Financial Services Authority Number 2 / POJK.05 / 2017 on the Guarantee Institution Business Implementation. Under this provision, the methods of claim reserves shall be divided into two methods, 1) The required reserve reserves shall be at least 0.01% of the total value of the underwriting, 2) the sum of 100% of claims already incurred but not yet reported. Companies use larger methods in addition.

Perusahaan membentuk provisi untuk mengantisipasi bahwa kemungkinan akan tertagihnya/terpulihnya Piutang *co-guarantee* serta potensi klaim di masa yang akan datang yang menjadi tanggungan PT Asuransi Syariah Mubarakah sangat kecil. Provisi dibentuk berdasarkan Default Rate (DR) rata-rata ditambah dengan standar deviasi dikalikan dengan outstanding kredit.

The company establish provisions to anticipate the uncollectible co-guarantee receivables and also potential future claims dependent on PT Asuransi Syariah Mubarakah is very low. Provisions establish based on average Default Rate plus deviation standard and multiplied with credit outstanding.

15. UTANG PENJAMINAN ULANG / *15. RE-GUARANTEE PAYABLE*

	2018	2017	
Utang *Co-Guarantee* :			*Co-Guarantee Payable:*
- PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	17.584.706.411	17.840.076.355	*PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin* -
- PT Asuransi Binagriya Upakara	15.144.148.564	-	*PT Asuransi Binagriya Upakara* -
- PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	3.567.722.519	4.358.076.890	*PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur* -
- PT Asuransi Jiwasraya	1.320.153.215	1.092.655.947	*PT Asuransi Jiwasraya* -
- PT Heksa Eka Life Insurance	1.111.921.408	1.085.307.364	*PT Heksa Eka Life Insurance* -
- PT UAF Jaminan Kredit	113.956.442	113.956.442	*PT UAF Jaminan Kredit* -
- PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	-	-	*PT Penjaminan Jamkrindo Syariah* -
Jumlah Utang *Co-Guarantee*	**38.842.608.559**	**24.490.072.998**	***Total Co-Guarantee Payable***
Utang Re-Asuransi:			*Re-Insurance Payable*
- PT Re-asuransi Nasional Indonesia	126.931.399.902	77.692.403.514	*PT Re-asuransi Nasional Indonesia* -
- PT Re-asuransi Internasional Indonesia	15.023.265.636	3.987.720.480	*PT Re-asuransi Internasional Indonesia* -
- PT Igna Asia	5.805.475.533	2.415.287.257	*PT Igna Asia* -
- PT Nasional Reasuransi Syariah	1.450.437.280	1.101.503.679	*PT Nasional Reasuransi Syariah* -
Jumlah Utang *Re-Guarantee*	**149.210.578.351**	**85.196.914.930**	***Total Re-Guarantee Payable***
Jumlah Utang Penjaminan Ulang	**188.053.186.910**	**109.686.987.928**	***Total Guarantee Payable***

Utang *co-guarantee* dan re-asuransi merupakan utang premi yang harus dibayarkan perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim.

Re-guarantee and re-insurance payables are an insurance premium payable that must be paid by the company to transfer the risk of claim.

16. PENDAPATAN DITANGGUHKAN / *16. UNEARNED REVENUE*

	2018	2017	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Imbal Jasa Penjaminan	2.848.889.947.628	2.292.178.011.937	*Guarantee Fee*
Imbal Jasa Penjaminan Belum Terbit	187.852.917.141	111.618.292.273	*Guarantee Fee Unpublished*
Komisi Penjaminan Ditangguhkan	32.798.782.229	62.924.644.855	*Defferred Comission Fee*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Imbal Jasa Penjaminan	767.094.309.043	167.748.803.310	*Guarantee Fee*
Komisi Penjaminan Ditangguhkan	72.038.603.828	3.380.006.362	*Defferred Comission Fee*
Sewa dan Servis Gedung	-	748.012.813	*Rent and Service Building*
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	**3.908.674.559.869**	**2.638.597.771.550**	***Total Unearned Revenue***

Imbal Jasa Penjaminan ditangguhkan merupakan pembayaran premi penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Deferred guarantee fee is a guarantee premium payments for current year and previous years from the guaranteed to Perum Jamkrindo which will become income in the coming years.

Komisi Penjaminan Ditangguhkan merupakan penerimaan komisi dari co-guarantee dan re-asuransi tahun berjalan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Deferred guarantee commission is an acceptance of commission from co-guarantee and re-insurance in the current year that will become income in the coming years.

Pendapatan ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP). Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi Imbal Jasa Penjaminan diterima dimuka adalah sesuai jangka waktu.

Deferred income will be recognized as income during the remaining period of guarantee and allocated based on the issuance month of Guarantee Certificate (SP). By considering the number of accelerated payment credits, management establish maximum time limit of the unearned guarantee fee allocation, that is due to time limit.

Sewa dan Service Gedung ditangguhkan merupakan pembayaran sewa dan service dari penyewa gedung yang belum menjadi pendapatan.

Deferred Rent and Service Building is rent and service payment from the lessee that unrecognized as revenue.

17. PERPAJAKAN / *17. TAXES*

a. Utang Pajak / *a. Tax Payable*

Saldo utang pajak adalah per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari :

Tax payable as of December 31, 2018 and 2017 consists of:

	2018	2017	
Entitas Induk			***Parent Company***
PPh Pasal 21	3.807.122.308	2.368.492.551	*Income Tax –Article 21*
Pajak Pertambahan Nilai	2.401.769.356	2.390.606.389	*Value Added Tax*
PPh Pasal 23	335.049.164	206.890.293	*Income Tax –Article 23*
PPh Pasal 4 Ayat 2	128.185.372	188.269.671	*Income Tax –Article 4 point 2*
PPh Pasal 22	73.780.094	61.304.581	*Income Tax –Article 22*
PPh Pasal 26	34.778.160	16.623.250	*Income Tax –Article 26*
PPh Pasal. 29	-	45.937.895.254	*Income Tax –Article 29*
PPh Pasal 25	-	8.063.600.333	*Income Tax –Article 25*
Pajak Bumi dan Bangunan	-	26.000.000	*Income tax - Revaluation of Fixed Assets*
Jumlah Entitas Induk	**6.780.684.454**	**59.259.682.322**	***Total Parent Entity***
Entitas Anak			***Subsidiary***
PPh Pasal 21	651.101.925	217.892.388	*Income Tax –Article 21*
PPh Pasal 23	117.357.632	69.890.649	*Income Tax –Article 23*
PPh Pasal 4 Ayat 2	42.438.909	-	*Income Tax –Article 4 point 2*
Pajak Pertambahan Nilai	2.500.000	2.500.000	*Value Added Tax*
Jumlah Entitas Anak	**813.398.466**	**290.283.037**	***Total Subsidiary***
Jumlah Utang Pajak	**7.594.082.920**	**59.549.965.359**	***Total Tax Payable***

b. Beban Pajak / *b. Tax Expense*

Beban Pajak Penghasilan terdiri dari :

Income Tax Expense consist of :

Entitas Induk			***Parent Company***
Beban Pajak Kini	-	142.982.583.250	*Current Tax Expense*
Beban Pajak Kini Final	112.643.579.020	100.095.631.526	*Current Tax Expense - Final*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(4.246.807.353)	(26.417.185.125)	*Deferred Tax (Benefit) Expense*
Jumlah Entitas Induk	**108.396.771.667**	**216.661.029.651**	***Total Parent Company***
Entitas Anak			***Subsidiary***
Beban Pajak Kini Final	4.630.282.659	4.282.350.474	*Current Tax Expense - Final*
(Manfaat) Pajak Tangguhan	(2.286.628.113)	431.159.906	*Deffered Tax (Benefit)*
Jumlah Entitas Anak	**2.343.654.546**	**4.713.510.380**	***Total Subsidiary***
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**110.740.426.213**	**221.374.540.031**	***Total Income Tax Expense***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax, as presented in statement of income, and taxable income for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Entitas Induk			***Parent Company***
	2018	**2017**	
Laba Sebelum Pajak	**483.396.788.208**	**1.007.317.945.744**	***Earnings Before Tax***
Perbedaan Temporer:			***Temporary Differences:***
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(1.267.363.175)	987.551.020	*Depreciation Differences between Fiscal and Commercial*
Pemulihan Penyisihan Piutang	(16.838.872.095)	-	*Recovery of Receivable Allowances*
Penyisihan Piutang Bagi Hasil dan Piutang Lain	-	101.167.500	*Allowance of profit sharing receivables and Other Receivables*
Penyisihan Piutang IJP KUR	(31.886.021.117)	3.276.005.834	*Allowance of IJP KUR Receivables*
Jasa Produksi Tahun 2016	-	(36.892.343.817)	*Incentif Year 2016*
Jasa Produksi Tahun 2017	(59.951.432.999)	-	*Incentif Year 2017*
Jasa Produksi Tahun Berjalan	93.793.109.553	59.951.432.999	*Incentif at Current Year*
Estimasi Imbalan Pasca Kerja	(8.516.451.117)	12.122.599.855	*Post Employee Benefit*
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	(10.439.177.384)	7.501.361.671	*Allowance for Inpairment Losess*
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(22.747.119.588)	24.641.306.629	*Increase (Decrease) in Reserve Claim*
Jumlah	**(57.853.327.922)**	**71.689.081.691**	***Total***

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

b. Beban Pajak (Lanjutan) / ***b. Tax Expense (Continued)***

Entitas Induk (Lanjutan) / ***Parent Company (Continued)***

	2018	2017	
Perbedaan Permanen:			***Permanent Differences:***
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	23.995.402.088	22.503.509.329	*Other General and Administrative Expenses*
Beban Promosi	20.593.209.089	13.381.553.312	*Promotion Expenses*
Beban Representasi	9.591.742.623	11.842.411.985	*Repersentation Expenses*
Beban Asuransi dan Penggantian Biaya Kesehatan	7.862.248.562	6.575.884.198	*Insurance and Health Reimbursement Expense*
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4.899.679.481	8.899.676.897	*Service Vehicle Maintenance Expenses*
Beban Investasi	4.352.583.986	3.753.769.028	*Investment Expenses*
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas	2.401.415.910	2.039.634.928	*Service Vehicle Depreciation Expense*
Beban Sewa Lain-Lain	2.399.046.005	4.435.794.599	*Other Rent Expenses*
Beban Komunikasi dan Energi Rumah Dinas	344.675.565	332.228.462	*Communication and Officer Housing Energy Expenses*
Beban Pemeliharaan Gedung	342.502.525	1.877.863.808	*Building Maintenance Expenses*
Beban Penyusutan Rumah Dinas	260.933.543	157.622.457	*Depreciation Home Office Expenses*
Beban Pemeliharaan dan Inventaris Rumah Dinas	250.880.691	143.922.928	*Maintenance Expense and Inventory Home Office*
Beban Pajak Lainnya	-	585.460.607	*Other tax Expenses*
Jumlah	**77.294.320.069**	**76.529.332.538**	***Total***
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:			***Income which charged by final tax:***
Penghasilan Investasi	(659.524.459.210)	(578.966.420.744)	*Penghasilan Investasi*
Pendapatan Jasa Giro	(4.832.732.989)	(5.765.541.694)	*Interest Income on Current Account*
Jumlah	**(664.357.192.199)**	**(584.731.962.438)**	***Total***
Laba (Rugi) kena Pajak	**(161.519.411.843)**	**570.804.397.535**	***Taxable Income (Loss)***
Laba (Rugi) Kena Pajak (dibulatkan)	**(161.519.412.000)**	**570.804.397.000**	***Taxable Income (Loss) (Rounded)***
Dasar Pengenaan Pajak	**(161.519.412.000)**	**570.804.397.000**	***Tax Base***
Pajak Penghasilan			*Income Tax*
25% x Dasar Pengenaan Pajak	(40.379.853.000)	142.701.099.250	*25% x Tax Base*
Total Beban Pajak Kini	(40.379.853.000)	142.701.099.250	***Total Current Tax Expenses***
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka	-	(96.763.203.996)	*Less prepaid Tax*
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	**(40.379.853.000)**	**45.937.895.254**	***Income Tax Payable***
Beban Pajak Penghasilan Kini:			***Current Tax Income***
Kini	-	142.982.583.250	*Current*
Final	112.643.579.020	100.095.631.526	*Final*
Beban Kini	**112.643.579.020**	**243.078.214.776**	***Current Tax Expenses***
Entitas Anak			***Subsidiary***
Laba Sebelum Pajak	24.887.010.000	15.902.755.126	***Income Before Tax***
Perbedaan Temporer:			***Temporary Difference:***
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(126.352.750)	(32.278.898)	*Depreciation Difference Fiscal and Commercial*
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	8.301.281.173	(2.026.632.489)	*Increase (Decrease) in Claim Reserves*
Jumlah	**8.174.928.423**	**(2.058.911.387)**	***Total***
Perbedaan Permanen:			***Permanent Difference:***
Beban Promosi	1.030.021.362	798.835.931	*Promotion Expenses*
Beban Umum dan Administrasi Lain-lain	1.043.643.248	610.964.219	*Other General and Administrative Expenses*
Beban Rapat Kerja	438.290.743	416.784.585	*Meeting Expenses*
Beban Representasi	801.736.550	472.927.164	*Representative Expenses*
Pendapatan Imbal Hasil Deposito	(24.596.293.599)	(22.667.585.339)	*Deposits Return Income*
Pendapatan Bonus Giro	(371.456.351)	(124.559.893)	*Interest Income*
Jumlah	**(21.654.058.047)**	**(20.492.633.333)**	***Total***
Laba (Rugi) yang Dikompensasi Tahun Berjalan	**11.407.880.376**	**(6.648.789.594)**	***Profit (Loss) Carry Forward Current Year***

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

b. Beban Pajak (Lanjutan) / ***b. Tax Expense (Continued)***

Entitas Induk (Lanjutan) / ***Parent Company (Continued)***

	2018	2017	
Akumulasi Rugi Fiskal			***Accumulated Fiscal Loss***
2015	**(6.608.367.802)**	**(6.608.367.802)**	*2015*
2016	**(7.839.970.827)**	**(7.839.970.827)**	*2016*
2017	**(6.648.789.594)**	**(6.648.789.594)**	*2017*
2018	**11.407.880.376**	**-**	*2018*
Jumlah	**(9.689.247.847)**	**(21.097.128.223)**	***Total***
Beban Pajak Penghasilan Kini:			***Current Tax Income***
Kini	-	-	*Current*
Final	4.630.282.659	4.282.350.474	*Final*
Beban Kini	**4.630.282.659**	**4.282.350.474**	***Current Tax Expenses***

Sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, Perum Jaminan Kredit Indonesia menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak terhutang (*self-assesment system*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah kewajiban pajak dalam batas 10 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

In accordance with the taxation laws of Indonesia, Perum Jamkrindo calculate, and pay the amount of tax payable (self - assessment system). The tax authorities may calculate and amend taxes within 10 years from the date the tax becomes due.

c. Aset Pajak Tangguhan / ***c. Deferred Tax Assets***

	2018			
	1 Januari 2018 / *January 1, 2018*	Dikreditkan / (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian / *Credited / (Charged) to Consolidated Statement of Comprehensive Income*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Equity*	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*
Entitas Induk/ *Parent Company*				
CKPN – Piutang Bagi Hasil/ *Allowance of Profit Share Receivable*	4.220.142.642	(10.230.489)	-	4.209.912.153
Jasa Produksi/*Incentive*	14.987.858.250	8.460.419.138	-	23.448.277.388
Penyusutan Aset Tetap/ *Fixed Assets Deprecation*	(2.813.863.448)	(19.957.223.451)	-	(22.771.086.899)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim/ *Increase (Decrease) in Reserve Claim*	103.922.269.533	5.686.779.897	-	109.609.049.430
Provisi atas Kerugian Klaim *Co-Guarantee* / *Provision for Claim Losses*	2.042.862.717	(375.177.546)	-	1.667.685.171
CKPN – Piutang Koperasi/ *Allowance of Cooperative Receivable*	81.472.895	-	-	81.472.895
CKPN – Piutang *Co-Guarantee* / *Allowance of Co-Guarantee Receivable*	20.847.873.187	1.312.814.829	-	22.160.688.016
CKPN Piutang IJP KUR/ Allowance *for Inpairment Losess*	2.942.947.344	7.971.505.278	-	10.914.452.622
Kenaikan (penurunan) nilai pasar Surat Berharga tersedia untuk dijual/ *Increase (Decrease) in Marketable Securities - Available For Sale*	19.881.768.075	-	53.138.986.934	73.020.755.009
Penilaian kembali liabilitas Imbalan kerja/ *Remeasurement Of Post Employment Benefit*	9.993.372.916	1.157.919.696	(6.488.149.655)	4.663.142.957
Jumlah/ *Total Entitas Induk/ Parent Company*	**176.106.704.111**	**4.246.807.352**	**46.650.837.279**	**227.004.348.743**

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

c. Pajak Tangguhan (Lanjutan) / ***c. Deferred Tax (Continued)***

	2018			
	1 Januari 2018 / *January 1, 2018*	Dikreditkan / (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian / *Credited / (Charged) to Consolidated Statement of Comprehensive Income*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Equity*	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*
Entitas Anak/*Subsidiary Entity*				
Penyusutan Aset Tetap/ *Fixed Assets Deprecation*	(32.278.898)	183.515.491	-	151.236.593
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim/ *Increase (Decrease) in Reserve Claim*	820.547.790	2.075.320.293	-	2.895.868.083
Kenaikan (penurunan) *nilai pasar Surat Berharga tersedia untuk dijual*	316.172.878	-	1.136.997.747	1.453.170.625
Penilaian kembali liabilitas *Imbalan kerja/ Remeasurement Of Post Employment Benefit*	41.167.347	27.792.329	(10.356.118)	58.603.558
Sub Jumlah/ *Total Entitas Anak* /Subsidiary Entity	**1.145.609.117**	**2.286.628.113**	**1.126.641.629**	**4.558.878.859**
Jumlah Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax*	**177.252.313.228**			**231.563.227.602**

	2017			
	1 Januari 2017 / *January 1, 2017*	Dikreditkan / (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian / *Credited / (Charged) to Consolidated Statement of Comprehensive Income*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Equity*	31 Desember 2017 / *December 31, 2017*
Entitas Induk/ *Parent Company*				
CKPN – Piutang Bagi Hasil/ *Allowance of Profit Share Receivable*	4.245.434.517	(25.291.875)	-	4.220.142.642
Jasa Produksi/*Incentive*	9.223.085.954	5.764.772.296	-	14.987.858.250
Penyusutan Aset Tetap/ *Fixed Assets Deprecation*	(3.060.751.203)	246.887.755	-	(2.813.863.448)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim/ *Increase (Decrease) in Reserve Claim*	97.761.942.876	6.160.326.657	-	103.922.269.533
Provisi atas Kerugian Klaim *Co-Guarantee / Provision for Claim Losses*	2.150.708.355	(107.845.637)	-	2.042.862.717
CKPN – Piutang Koperasi/ *Allowance of Cooperative Receivable*	81.472.896	-	-	81.472.895
CKPN – Piutang *Co-Guarantee* / *Allowance of Co-Guarantee Receivable*	3.582.335.856	17.265.537.330	-	20.847.873.187
CKPN Piutang IJP KUR/ Allowance *for Inpairment Losess*	2.123.945.885	819.001.458	-	2.942.947.344
Kenaikan (penurunan) nilai pasar Surat Berharga tersedia untuk dijual/ *Increase (Decrease) in Marketable Securities - Available For Sale*	43.326.371.220	-	(23.444.603.145)	19.881.768.075
Penilaian kembali liabilitas Imbalan kerja/ *Remeasurement Of Post Employment Benefit*	13.391.827.711	(3.706.202.859)	307.748.064	9.993.372.916
Jumlah/ *Total Entitas Induk/ Parent Company*	**172.826.374.067**	**26.417.185.125**	**(23.136.855.081)**	**176.106.704.111**

17. PERPAJAKAN (Lanjutan) / ***17. TAXES (Continued)***

c. Pajak Tangguhan (Lanjutan) / ***c. Deferred Tax (Continued)***

	1 Januari 2017 / *January 1, 2017*	Dikreditkan / (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian / *Credited / (Charged) to Consolidated Statement of Comprehensive Income*	Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Equity*	31 Desember 2017 / *December 31, 2017*
Entitas Anak/*Subsidiary Entity*				
Penyusutan Aset Tetap/ *Fixed Assets Deprecation*	(67.560.064)	35.281.166	-	(32.278.898)
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim/ *Increase (Decrease) in Reserve Claim*	1.327.205.912	(506.658.122)	-	820.547.790
Kenaikan (penurunan) *nilai pasar Surat Berharga tersedia untuk dijual*	528.365.000	-	(212.192.122)	316.172.878
Penilaian kembali liabilitas *Imbalan kerja/ Remeasurement Of Post Employment Benefit*	-	40.217.050	950.297	41.167.347
Sub Jumlah/ *Total Entitas Anak* /Subsidiary Entity	**1.788.010.848**	**(431.159.906)**	**(211.241.825)**	**1.145.609.117**
Jumlah Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax*	**174.614.384.915**			**177.252.313.228**

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA / ***18. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES***

Perusahaan telah menyelenggarakan program manfaat pasti (JHT dan THT) maupun program iuran pasti (DPLK) untuk seluruh karyawan

The company have carried out defined benefit plan (JHT) and THT and also defined contribution program (DPLK) for all permanent employees.

Aset program manfaat pasti dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI. Program tersebut memberikan manfaat JHT dan THT yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau berhenti, sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

This defined benefit asset program managed by PT Asuransi Jiwasraya which the founding have got endorsement from The Finance Minister RI. The program give JHT and THT benefit which will be paid to employees at the time of employees pension or desist, as according to regulation of the pension fund.

Program Pensiun Manfaat Pasti
Penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 tanggal 23 Nopember 1987 jo No. 01/DIR/I/2002 tanggal 7 Januari 2002. Program ini terdiri dari Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Tunjangan Hari Tua (THT). Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang periode kerjanya dimulai sebelum tahun 1995. Jumlah karyawan yang diikutsertakan program tersebut masing-masing sebanyak 12 dan 8 orang untuk tahun 2018 dan 2017.

Defined Benefit Pension Plan
Implementation of defined benefit pension plan is declare in Director decision No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 date of November 23, 1987 jo No. 01/DIR/I/2002 dated January 7, 2002. This Program consist of Program Jaminan Hari Tua (JHT) and Program Tunjangan Hari Tua (THT). This programdestine for employees which time line working is started before 1995. The number of employees included in the program are 12 and 8 people for 2018 and 2017 respectively.

Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 5% oleh karyawan dan sisanya ditanggung Perusahaan.

Funding of pension plan done by employees and corporation with paying monthly fee. Funding contribution equal to 5% by employees and the rest accounted by company.

Manfaat yang diperoleh dari program pensiun manfaat pasti ialah sebagai berikut:

Benefit which obtained from defined benefit pension program is the following:

a. Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 30 (tiga puluh) x Gaji Karyawan;

a. Program Jaminan Hari Tua (JHT) equal to 30 (thirty times) x employees salary;

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar 2,5% x Masa Kerja x Gaji karyawan.

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT) equal to 2,5% x Years of Service x employees salary.

Penyelenggaraan program pensiun iuran pasti dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.31/DIR/IV/1997 Tanggal 28 April 1997 jo No.14/DIR/V/2002 tanggal 21 Mei 2002. Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang periode kerjanya mulai setelah tahun 1995.

Implementation of defined contribution pension plan is declared by Director decision No. 31/DIR/IV/1997 dated April 28, 1997 jo No. 14/DIR/V/2002 dated May 21, 2002. This Program destine for employees which time line working is strarting after year 1995.

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan) / *18. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)*

Program Pensiun Manfaat Pasti (Lanjutan)
Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 4,4% dari gaji pokok karyawan dan sisanya 6,6% ditanggung Perusahaan. Dan jumlah karyawan yang diikutsertakan program tersebut masing-masing sebanyak 831 dan 784 untuk tahun 2018 dan 2017.

Defined Benefit Pension Plan (Continued)
The funding of pension plan done by employees and corporation with paying monthly fee. Funding contribution equal to 4,4% from employees base salary and the rest of 6,6% accounted on company. And the number of employees included in the program are 831 and 784 respectively for 2018 and 2017

Besarnya asumsi hasil investasi untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ialah 9% per tahun.

The return of investment level assumption for Financial Institution Pension Fund (DPLK) is 9% per year.

Pada tahun 2018 dan 2017 manajemen menunjuk aktuaris independen PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa untuk melakukan perhitungan beban/manfaat pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013) untuk tahun 2018 dan 2017 dengan laporan bernomor 1888/LV/PSGJ/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan 038/LV/PSGJ/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.

In 2018 management hire independent actuary of PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa for calculating post empoyment expense/benefit post according to SFAS 24 (Revision 2013) for 2018 calculation reports numbered 1888/LV/PSGJ/II/2019 on February 7, 2019 and 038/LV/PSGJ/I/2018 on January 4, 2018.

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2018 dan 2017 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut

In estimating pension benefit as of December 31, 2018 and 2017 for both programs, Actuary in the calculation use Projected Unit Credit. Actuarial Cost Method the calculation refers to the actual level of financing needed in the period. The key assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

	2018	2017	
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	18.886.986.058	38.907.168.785	*Post Employment Benefit*
Total Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	**18.886.986.058**	**38.907.168.785**	***Total Post Employment Benefit Liabilities***
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	9,00%	7,00%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	8,00%	7,00%	*Annual salary growth rate*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	*Mortality rate*
Tingkat cacat	5% per tahun / per year	5% per tahun / per year	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri			*Resignation rate*
- Usia 20 - 39 tahun	5.0% per tahun / *per year*	5.0% per tahun / *per year*	*20 - 39 years old* -
- Usia 40 - 44 tahun	3.0% per tahun / *per year*	3.0% per tahun / *per year*	*40 - 44 years old* -
- Usia 45 - 49 tahun	2.0% per tahun / *per year*	2.0% per tahun / *per year*	*45 - 49 years old* -
- Usia 50 - 54 tahun	1.0% per tahun / *per year*	1.0% per tahun / *per year*	*50 - 54 years old* -
- Usia diatas 54 tahun	0.0% per tahun / *per year*	0.0% per tahun / *per year*	*over 54 years old* -
Program Pensiun			*Pension Program*

Kewajiban (aset) program pensiun manfaat pasti sebagai berikut: / *Defined benefit pension program liability (asset) manfaat pasti is as follows:*

	2018	2017	
Entitas Induk			***Parent Company***
Nilai Sekarang Kewajiban akhir periode	54.062.268.387	61.581.057.673	*Present value of Obligation ending balance*
Nilai Wajar Aset Program	(35.409.696.558)	(22.838.558.274)	*Fair value of Program Assets*
Status Pendanaan	18.652.571.829	38.742.499.399	*Funding Status*
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	**18.652.571.829**	**38.742.499.399**	***Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position***
Rekonsiliasi biaya manfaat yang diakui di Laporan Laba Rugi Komprehensif			***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of comprehensive income***
Biaya Jasa Kini	5.858.486.282	7.629.805.259	*Current Service Expense*
Biaya Bunga	4.256.663.914	3.786.072.002	*Interest expense*
Pengembalian Aset Program yang diharapkan	(1.598.699.079)	(1.537.873.296)	*Required rate of return of Program Assets*
Total biaya manfaat karyawan	**8.516.451.117**	**9.878.003.965**	***Total employee benefit expenses***
Rekonsiliasi perubahan pada aset/kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan			***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of Financial Position***
(Aset)/Kewajiban pada awal periode	38.742.499.399	28.102.483.838	*(Asset)/Liabilities at beginning period*
Biaya manfaat karyawan	8.516.451.117	12.122.599.855	*Employee benefit expenses*
Beban/(Pendapatan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(25.952.598.619)	1.230.992.258	*Recognized to OCI of actuarial (gain)/loss*
Iuran yang dibayarkan	(2.653.780.068)	(2.713.576.552)	*Contribution Paid*
(Aset)/kewajiban pada tanggal di Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk	**18.652.571.829**	**38.742.499.399**	***(Assets)/ Liabilities at Statement of Financial Position Period-Parent Company***

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan) / *18. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)*

	2018	2017	
Entitas Anak			***Subsidiary***
Nilai Sekarang Kewajiban akhir periode	234.414.229	164.669.386	*Present value of Obligation ending balance*
Nilai Wajar Aset Program	-	-	*Fair value of Program Assets*
Status Pendanaan	234.414.229	164.669.386	*Funding Status*
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan - Entitas Anak	**234.414.229**	**164.669.386**	***Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position- Subsidiary***
Rekonsiliasi biaya manfaat yang diakui di Laporan Laba Rugi Komprehensif			***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of comprehensive income***
Biaya Jasa Kini	99.313.120	89.480.694	*Current Service Expense*
Biaya Bunga	11.856.195	5.531.873	*Interest expense*
Pengembalian Aset Program yang diharapkan	-	-	*Required rate of return of Program Assets*
Total biaya manfaat karyawan	**111.169.315**	**95.012.567**	***Total employee benefit expenses***
Rekonsiliasi perubahan pada aset/kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan			***Reconciliation of employee benefit expenses which recognized in statement of Financial Position***
(Aset)/Kewajiban pada awal periode	164.669.386	65.855.632	*(Asset)/Liabilities at beginning period*
Biaya manfaat karyawan	111.169.315	95.012.567	*Employee benefit expenses*
Beban/(Pendapatan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(41.424.472)	3.801.187	*Recognized to OCI of actuarial (gain)/loss*
Iuran yang dibayarkan		-	*Contribution Paid*
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan- Entitas Anak	**234.414.229**	**164.669.386**	***Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position- Subsidiary***
Aset (Kewajiban) yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	**18.886.986.058**	**38.907.168.785**	***Asset (Liabilities) presented in Statement Financial Position***

19. UTANG LAIN-LAIN / *19. OTHER LIABILITY*

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari: / *Other Payable as of December 31, 2018 and 2017 consists of:*

	2018	2017	
Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	125.852.326.109	64.065.114.446	*Accrued Employee Expenses*
Beban Administrasi dan Umum yang Masih Harus Dibayar	49.781.298.083	8.794.606.245	*Administrative and General Expenses Accrued*
Utang Fee Bank	20.907.405.432	2.886.934.931	*Bank Fee Payable*
Utang Fee Agen	12.647.086.603	16.462.600.657	*Agent Fee Payable*
Beban Operasi YMH Dibayar	7.267.285.211	11.513.713.020	*Operational Expense Accrued*
Setoran Jaminan	5.137.391.060	2.383.872.959	*Deposit Guarantee*
Akun dalam Penyelesaian	3.510.503.857	49.679.198.910	*Other Liabilities in Progress*
Dana Titipan Subrogasi	2.961.449.407	1.264.928.611	*Deposit Subrogation*
Titipan IJP	2.038.828.989	433.262.086	*Deposit IJP*
Utang Premi Pensiun	1.804.849.635	1.006.950.411	*Retirement of debt premium*
Beban Sistek dan Pengembangan yang Masih Harus Dibayar	1.768.077.770	2.180.564.085	*Technology System and Development Expenses Accrued*
Bagian dana Jaminan Ulang yang Belum Disisihkan	395.317.480	395.317.480	*Unapproriate Re-Guarantee Fund*
Bagian Dana Penampungan KUT yang Belum Disisihkan	389.177.486	389.177.486	*Unapproriate KUT Fund*
Dana Titipan Klaim	108.135.106	108.135.106	*Deposit Claim*
Utang Premi Jamsostek	98.507.279	89.581.636	*Jamsostek Premiums Payable*
Utang Premi BPJS Kesehatan	35.997.039	7.932.303	*BPJS Kesehatan Premiums Payable*
Bagian DPT yang Belum Disisihkan	474.000	474.000	*Unapproriate DTP*
Security Deposit Penyewa	-	325.004.400	*Tenant Security Deposit*
Jaminan Telepon Penyewa	-	40.128.299	*Tenant Warranty Deposit*
Lainnya	44.909.560.208	42.430.128.822	*Others*
Jumlah Utang Lain-Lain	**279.613.670.754**	**204.457.625.895**	***Total Other Payable***

20. EKUITAS / *20. EQUITY*

	2018	2017	
Penyertaan Modal Negara	**7.638.733.365.160**	**7.638.733.365.160**	***Government Paid-in Capital***
Saldo Laba			***Retained Earnings***
Ditentukan Penggunaannya :			***Appropriated:***
Cadangan Modal	904.000.000	904.000.000	*Capital Reserve*
Cadangan Umum	2.816.712.257.248	2.095.051.340.764	*General Reserve*
Cadangan Tujuan	297.707.510.860	297.707.510.860	*Purposed Reserve*
Cadangan Dana Teknis	78.274.593.035	78.274.593.035	*Technical Fund Reserve*
Jumlah	**3.193.598.361.143**	**2.471.937.444.659**	***Total***
Belum Ditentukan Penggunaannya :	**397.320.981.986**	**781.820.701.149**	***Unappropriated:***
Komponen Ekuitas Lainnya			***Other Components Of Equity***
Keuntungan (kerugian)			*Gain (loss)*
Aset yang Tersedia untuk Dijual	(223.421.776.905)	(58.064.439.835)	*Financial Assets Available For Sale*
Cadangan revaluasi aset	289.434.424.383	289.434.424.383	*Asset Revaluation Reserve*
Jumlah	**66.012.647.478**	**231.369.984.548**	***Total***
Jumlah Ekuitas Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**11.295.665.355.767**	**11.123.861.495.516**	***Net Equity Attributable to Owners of the Parent***
Kepentingan Non Pengendalian	**14.739.015**	**13.798.955**	***Non - Controlling Interest***
Total Ekuitas	**11.295.680.094.782**	**11.123.875.294.471**	***Total Equity***

a. Penyertaan Modal Negara (PMN) / *a. Government Paid-in Capital*

Pada tahun 2016 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500.000.000.000 yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016. Pada tahun 2015 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 134 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015. Pada tahun 2014 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1.300.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Pada tahun 2013 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1.120.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

In 2016 there were additional State Capital (PMN) amounted to Rp500.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 92 of 2016 dated December 30, 2016. In 2015 there were additional State Capital (PMN) amounted to Rp500.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 134 of 2015 dated December 28, 2015. In 2014 there were additional State Capital (PMN) amounted to Rp1.300.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 98 of 2014 dated October 17, 2014 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Capital of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. In the year 2013 there were additional State Capital (PMN) was Rp1.120.000.000.000 stipulated by Government Regulation Number 81 of 2013 dated December 10, 2013 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Penambahan modal ini dimaksudkan untuk untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan terkait dengan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

This capital increase is intended to increase the capacity of the business and to strengthen the Company's capital structure related to KUR Guarantee.

Penambahan modal terkait Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ini juga dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2012 terdapat penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 1.169.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 108 tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, tahun 2011 sebesar Rp1.200.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011, tahun 2010 sebesar Rp900.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, tahun 2009 sebesar Rp250.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 dan tahun 2007 sebesar Rp600.000.000.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007.

Capital increase related to the Kredit Usaha Rakyat Guarantee is also done by the Government in 2012 there were additional State Capital (PMN) was Rp. 1.169.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 108 of 2012 dated December 24, 2012 on the addition of the Investment of the Republic of Indonesia to the Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, in 2011 at Rp1.200.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 61 of 2011 dated December 29, 2011, in 2010 amounted Rp900.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 82 of 2010 dated December 20, 2010, in 2009 amounted Rp250.000.000.000 stipulated by Government Regulation 65 of 2009 dated October 31, 2009 and 2007 amounted Rp600.000.000.000 stipulated by Government Regulation No. 67 of 2007 dated December 10, 2007.

Modal awal Perusahaan adalah sebesar Rp21.000.000.000. Pada tahun 1992 dan 1993 terdapat penambahan modal sebesar Rp22.330.000.000 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1994 tanggal 3 Maret 1994.

Beginning capital of company amounted to Rp21.000.000.000. In 1992 and 1993 there in capital addition amounted to Rp22.330.000.000 and stated with Government regulation No. 5 year 1994 dated March 3, 1994.

20. EKUITAS (Lanjutan)

b. Cadangan - cadangan

Pada tahun 1998, terdapat penambahan modal sebesar Rp56.403.365.160 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-33/MK.016/1998 tanggal 22 Januari 1998 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999.

- Saldo cadangan modal merupakan saldo cadangan modal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 383/KMK/011/1982 tanggal 15 Juni 1982 tentang penetapan modal awal Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

  Jumlah ini telah dimasukkan sebagai cadangan modal per 31 Desember 1981 sesuai dengan tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 tentang pendirian Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.

- Saldo cadangan umum merupakan saldo pencadangan untuk pemupukan modal kegiatan operasional. Pada tahun buku 2002 telah dilakukan koreksi cadangan umum sebagai akibat diterapkannya PSAK 46 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan yang diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2001.

- Saldo cadangan tujuan merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber dana pembiayaan investasi dan saldo cadangan teknis merupakan saldo pencadangan untuk digunakan sebagai sumber pendanaan jika terjadi klaim.

c. Komponen Ekuitas Lainnya

Merupakan laba rugi belum direalisir atas efek tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut:

20. EQUITY (Continued)

b. Reserves

In 1998, there in capital additon amounted to Rp56.403.365.160 and have been stated with Finance Minister decision No. S-33/MK.016/1998 dated Januari 22, 1998 and Government Regulation of Republic of Indonesia No. 11 year 1999 dated January 27, 1999.

- *Capital reserve balance represent capital reserve balance which specified based on Finance Minister decree No. 383/KMK/011/1982 dated June 15, 1982 concerning pegging of start-up capital Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.*

- *This amounts have been classified as capital reserves as of December 31, 1981 according to the implementation date of PP Nomor 51 year 1981 concerning establishment of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi.*

- *General reserve balance represent reservation balance for capital accummulating of operational activity. In the 2002 general reserve have been adjusted due to effect of SFAS 46 implementaion concerning Income Tax Accounting, which effective since January 1, 2001.*

- *Purposed reserve is reservation balance to be used as source of fund of investment financing and technical reserve is reservation balance to be used as source of funding in case of claim happened.*

c. Other Components of Equity

Is unealized profit or loss on securities available for sale with the following details:

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / ***Financial Instruments - Available for Sale***

Per 31 Desember 2018 / *As of December 31, 2018*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*
Reksadana/*Mutual Fund*			
RD Dana Syailendra Dana Ekuitas Dinamis	225.000.000.000	218.361.002.358	(6.638.997.642)
Reksadana Maybank Dana Obligasi Plus	155.259.497.600	146.640.873.539	(8.618.624.061)
RD Sucorinvest Saham Dinamis	100.000.000.000	91.916.013.124	(8.083.986.876)
RD Dana Insight Green (I-Green)	80.000.000.000	53.551.991.697	(26.448.008.303)
RD Insight Support (I-Support)	50.000.000.000	44.945.459.728	(5.054.540.272)
RD Cimb-Principal Islamic Equity Growth Syariah	45.000.000.000	34.827.032.566	(10.172.967.434)
Reksa Dana Maybank Dana Pasti 2	25.000.000.000	25.551.582.319	551.582.319
Reksa Dana ITB BNI-Am	25.000.000.000	25.096.477.500	96.477.500
RD BNI Am Indeks Idx30	25.000.000.000	23.336.335.460	(1.663.664.540)
RD CIMB-P Indo Domestic Equity Fund	20.000.000.000	18.163.345.733	(1.836.654.267)
RD Sam Syariah Berimbang	10.000.000.000	8.076.035.640	(1.923.964.360)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	10.000.000.000	6.154.999.845	(3.845.000.155)
Reksa Dana Insight Government Fund (I-Govt)	10.000.000.000	10.616.071.203	616.071.203
Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund	10.000.000.000	9.728.708.168	(271.291.832)
Panin Gebyar Indonesia II	10.000.000.000	9.633.958.201	(366.041.799)
RD MMC Dana Sbn	10.000.000.000	9.842.171.865	(157.828.135)
RD Simas Syariah Unggulan	10.000.000.000	9.761.192.029	(238.807.971)
RD Panin Dana Unggulan	10.000.000.000	10.188.476.834	188.476.834
RD Premiere Etf Indonesia Sovereign Bonds	8.798.640.000	7.946.020.000	(852.620.000)
RD Manulife Saham SMC Plus	5.000.000.000	3.585.408.362	(1.414.591.638)
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	5.000.000.000	5.433.259.080	433.259.080
RD Sam Sharia Equity Fund	5.000.000.000	3.600.362.716	(1.399.637.284)
RD Panin Dana Maksima	5.000.000.000	4.758.472.550	(241.527.450)
RD Millenium Equity	5.000.000.000	1.594.992.588	(3.405.007.412)
RD Dana Makara Prima	5.000.000.000	5.436.002.793	436.002.793
Reksadana Bahana Mes Syariah Fund	10.500.000.000	10.877.825.298	377.825.298
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund	5.000.000.000	5.497.550.000	497.550.000
RD Sucorinvest Flexi Fund	5.000.000.000	5.119.760.134	119.760.134
Jumlah Reksadana/*Total Mutual Fund*	**889.558.137.600**	**810.241.381.332**	**(79.316.756.269)**

20. EKUITAS (Lanjutan) / ***20. EQUITY (Continued)***

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan) / **c. *Other Components of Equity (Continued)***

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) / ***Financial Instruments - Available for Sale (Continued)***

Per 31 Desember 2018 / *As of December 31, 2018*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*
Obligasi / *Bonds*			
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS005	260.855.070.857	241.696.760.000	(19.158.310.857)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	256.795.800.000	255.010.812.394	(1.784.987.606)
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	74.053.446.296	68.585.540.732	(5.467.905.564)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	74.035.000.000	70.399.420.000	(3.635.580.000)
SBSN Seri PBS012	69.904.079.837	67.481.069.038	(2.423.010.799)
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	61.859.795.255	59.343.548.378	(2.516.246.877)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	43.145.000.000	41.756.560.000	(1.388.440.000)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	42.714.950.000	39.169.350.000	(3.545.600.000)
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS004	34.912.430.000	31.306.583.070	(3.605.846.930)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	32.854.207.485	31.395.989.768	(1.458.217.717)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	25.671.522.210	21.951.754.380	(3.719.767.830)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077	25.212.425.000	25.389.700.000	177.275.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	25.062.422.380	24.202.594.270	(859.828.110)
Obligasi Waskita III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B	25.000.000.000	23.607.150.000	(1.392.850.000)
Obligasi Berkelanjutan I SMI Tahap II Tahun 2017 Seri B	25.000.000.000	24.436.500.000	(563.500.000)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B	25.000.000.000	23.731.600.000	(1.268.400.000)
Obligasi III Waskita Tahap II Tahun 2018 Seri B	25.000.000.000	24.045.425.000	(954.575.000)
Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap I Tahun 2018 Seri A	25.000.000.000	23.114.850.000	(1.885.150.000)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	20.000.000.000	18.128.280.000	(1.871.720.000)
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I 2017 Seri A	15.000.000.000	14.900.820.000	(99.180.000)
Obligasi II Medco Energi Tahap VI Tahun 2017	15.000.000.000	15.040.140.000	40.140.000
Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri A	15.000.000.000	14.280.600.000	(719.400.000)
Obligasi II PT PP Tahap 1 Tahun 2018 Seri A	15.000.000.000	14.297.280.000	(702.720.000)
Obligasi Berkelanjutan I BJB Tahap II Tahun 2018 Seri B	15.000.000.000	14.654.775.000	(345.225.000)
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	15.000.000.000	14.683.440.000	(316.560.000)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042	12.205.000.000	11.315.300.000	(889.700.000)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	12.000.000.000	11.211.660.000	(788.340.000)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	11.750.000.000	11.686.670.000	(63.330.000)
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B	10.000.000.000	9.519.610.000	(480.390.000)
Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri B	10.000.000.000	9.471.350.000	(528.650.000)
Obligasi Subordinasi III BRI Tahun 2018	10.000.000.000	9.199.310.000	(800.690.000)
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III Tahun 2018 Seri B	10.000.000.000	9.798.170.000	(201.830.000)
Obligasi Berkelanjutan II Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C	10.000.000.000	10.101.200.000	101.200.000
Obligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	9.730.000.000	9.399.500.000	(330.500.000)
SBSN Seri PBS015	5.967.470.000	6.010.788.000	43.318.000
SBSN Seri PBS011	5.508.740.000	5.116.975.000	(391.765.000)
Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D	3.924.000.000	4.001.960.000	77.960.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	2.491.484.274	2.484.406.020	(7.078.254)
Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B	2.040.000.000	1.888.490.000	(151.510.000)
SBSN Seri PBS019	1.954.084.000	2.002.484.000	48.400.000
Jumlah Obligasi / *Total Bonds*	**1.379.646.927.594**	**1.315.818.415.049**	**(63.828.512.545)**

20. EKUITAS (Lanjutan) / ***20. EQUITY (Continued)***

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan) / **c. *Other Components of Equity (Continued)***

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) / ***Financial Instruments - Available for Sale (Continued)***

Per 31 Desember 2018 / *As of December 31, 2018*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase*
Saham / *Share*			
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	89.999.965.000	20.945.446.400	(69.054.518.600)
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	64.420.000.000	34.464.700.000	(29.955.300.000)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	21.364.900.000	18.750.000.000	(2.614.900.000)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	19.344.379.310	13.225.000.000	(6.119.379.310)
PT Asuransi Tugu Pratama Syariah Tbk	19.996.900.000	16.672.740.000	(3.324.160.000)
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	15.300.000.000	15.600.000.000	300.000.000
PT Wika Gedung Tbk	14.297.000.000	11.832.000.000	(2.465.000.000)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.275.389.960	12.285.000.000	(990.389.960)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	12.162.167.495	8.540.000.000	(3.622.167.495)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	12.021.125.200	6.700.000.000	(5.321.125.200)
PT PP (Persero) Tbk	11.417.920.850	6.317.500.000	(5.100.420.850)
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10.189.045.146	11.884.500.000	1.695.454.854
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	10.173.499.960	9.652.500.000	(520.999.960)
PT Waskita Beton Precast Tbk	10.302.774.300	7.854.000.000	(2.448.774.300)
PT PP Presisi Tbk	10.136.296.760	7.504.800.000	(2.631.496.760)
PT Astra International Indonesia Tbk	9.796.260.000	9.870.000.000	73.740.000
PT United Tractors Tbk	9.483.021.295	7.521.250.000	(1.961.771.295)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.333.875.000	7.375.000.000	(958.875.000)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	8.160.242.500	5.300.000.000	(2.860.242.500)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.667.200.200	8.030.000.000	362.799.800
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.016.552.910	6.858.000.000	(158.552.910)
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6.806.826.000	6.435.000.000	(371.826.000)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	6.802.329.600	4.740.000.000	(2.062.329.600)
PT AKR Corporindo Tbk	5.973.250.000	4.280.000.000	(1.693.250.000)
PT Kalbe Farma Tbk	5.750.416.700	5.302.500.000	(447.916.700)
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	4.837.125.000	4.028.000.000	(809.125.000)
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.671.919.500	3.125.000.000	(1.546.919.500)
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	4.533.703.050	3.144.500.000	(1.389.203.050)
PT PP London Sumatra Tbk	4.195.764.900	3.735.000.000	(460.764.900)
PT Unilever Indonesia Tbk	3.269.167.500	3.401.250.000	132.082.500
PT Vale Indonesia Tbk	3.261.744.000	3.250.000.000	(11.744.000)
Jumlah Saham/ *Total Shares*	**434.960.762.136**	**288.623.686.400**	**(146.337.075.736)**
Efek Beragunan Aset / *Security (Assets Underlying)*			
EBA JSMR01 - Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi Kelas A	25.000.000.000	19.665.740.000	(5.334.260.000)
EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	10.000.000.000	8.999.807.899	(1.000.192.101)
EBA PPLN01- Indonesia Power	9.000.000.000	6.921.094.112	(2.078.905.888)
Jumlah Efek Beragunan Aset / *Total Security (Assets Underlying)*	**44.000.000.000**	**35.586.642.010**	**(8.413.357.990)**
Jumlah Aset Tersedia Untuk Dijual / *Total Financial Instrument - Available for Sale*			**(297.895.702.539)**
Pengaruh Pajak Atas Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / *Tax Effect on Financial Instuments - Available for Sale*			**74.473.925.634**
Cadangan Revaluasi Aset / *Asset Revaluation Reserve*			**289.434.424.383**
Pengaruh Pajak atas Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti / *Tax Effect on Restatement of Post Employee Benefit*			**(221.449.953)**
Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya / *Total Other Equity Component*			**65.791.197.524**

20. EKUITAS (Lanjutan) / ***20. EQUITY (Continued)***

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan) / ***c. Other Components of Equity (Continued)***

Merupakan laba rugi belum direalisir atas efek tersedia untuk dijual dengan rincian sebagai berikut:

Is unealized profit or loss on securities available for sale with the following details:

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / ***Financial Instruments - Available for Sale***

Per 31 Desember 2017 / *As of December 31, 2017*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase*
Reksadana/*Mutual Fund*			
RD Dana Syailendra Dana Ekuitas Dinamis	225.000.000.000	213.651.504.360	(11.348.495.640)
RD Maybank Dana Obligasi Plus	155.259.497.600	155.609.289.870	349.792.270
RD Sucorinvest Saham Dinamis	100.000.000.000	97.912.128.233	(2.087.871.767)
RD Dana Insight Green (I-Green)	80.000.000.000	57.133.944.143	(22.866.055.857)
RD BNI – AM Dana Saham Sektoral	68.154.185.052	76.844.062.750	8.689.877.698
RD Insight Support (I-Support)	50.000.000.000	48.460.135.519	(1.539.864.481)
RD CIMB – Pricipal Islamic Equity Growth Syariah	45.000.000.000	36.817.486.890	(8.182.513.110)
Reksadana Insight Government Fund (I-Govt)	10.000.000.000	10.924.989.163	924.989.163
Reksadana Maybank Dana Pasti II	25.000.000.000	26.027.187.584	1.027.187.584
Reksadana ITB BNI-AM	25.000.000.000	25.806.322.500	806.322.500
RD CIMB – P Indo Domestic Equity Fund	20.000.000.000	19.396.753.078	(603.246.922)
Reksadana Sucorinvest Bond Fund	10.000.000.000	10.234.859.708	234.859.708
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis	10.000.000.000	6.151.637.070	(3.848.362.930)
RD Sam Syariah Berimbang	10.000.000.000	8.672.219.061	(1.327.780.939)
RD Panin Gebyar Indonesia II	10.000.000.000	10.062.981.623	62.981.623
RD Sam Indonesian Equity Fund	10.000.000.000	11.224.301.445	1.224.301.445
RD Simas Syariah Unggulan	10.000.000.000	7.359.687.607	(2.640.312.393)
RD Simas Saham Unggulan	10.000.000.000	10.410.869.360	410.869.360
RD MNC Dana SBN	10.000.000.000	10.071.838.511	71.838.511
RD Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds	8.798.640.000	8.820.040.000	21.400.000
RD Manulife Saham SMC Plus	5.000.000.000	3.864.710.832	(1.135.289.168)
RD Syailendra Equity Opportunity Fund	5.000.000.000	5.205.284.851	205.284.851
RD Sam Sharia Equiy Fund	5.000.000.000	3.929.568.351	(1.070.431.649)
RD Panin Dana Maksima	5.000.000.000	4.834.680.582	(165.319.418)
RD Millenium Equity	5.000.000.000	1.834.570.526	(3.165.429.474)
RD Dana Makara Prima	5.000.000.000	5.689.859.606	689.859.606
RD Bahana Mes Syariah Fund	5.000.000.000	5.643.600.000	643.600.000
Reksadana Bahana MES Syariah Fund	5.500.000.000	5.584.686.469	84.686.469
Jumlah Reksadana/*Total Mutual Fund*	**932.712.322.652**	**888.179.199.692**	**(44.533.122.960)**

20. EKUITAS (Lanjutan) / ***20. EQUITY (Continued)***

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan) / **c. *Other Components of Equity (Continued)***

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) / ***Financial Instruments - Available for Sale (Continued)***

Per 31 Desember 2017 / *As of December 31, 2017*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase (Decrease)*
Obligasi / *Bonds*			
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS005	254.728.200.000	270.210.600.000	15.482.400.000
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	228.820.800.000	232.823.136.000	4.002.336.000
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	40.971.520.000	42.000.120.000	1.028.600.000
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072	27.975.000.000	27.983.550.000	8.550.000
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0076	25.671.522.510	26.825.863.230	1.154.340.720
Obligasi Berkelanjuta I SMI Tahap II tahun 2017 Seri B	25.000.000.000	25.101.375.000	101.375.000
Obligasi Waskita III Waskita Karya Tahun 2017	25.000.000.000	25.643.100.000	643.100.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B	25.000.000.000	25.175.200.000	175.200.000
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	22.419.840.000	23.010.240.000	590.400.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	22.350.000.000	22.389.160.000	39.160.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	21.800.000.000	23.324.420.000	1.524.420.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	21.000.000.000	22.389.160.000	1.389.160.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	20.390.000.000	22.389.160.000	1.999.160.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	20.000.000.000	22.135.868.604	2.135.868.604
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	16.730.055.000	17.257.680.000	527.625.000
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri B	15.000.000.000	15.361.200.000	361.200.000
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I 2017 Seri A	15.000.000.000	14.975.205.000	(24.795.000)
Obligasi II Medco Energi Tahap VI Tahun 2017	15.000.000.000	15.954.435.000	954.435.000
Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri A	15.000.000.000	15.187.725.000	187.725.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	14.551.610.940	15.785.021.780	1.233.410.840
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042	12.205.000.000	12.599.000.000	394.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	12.000.000.000	12.473.880.000	473.880.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	11.750.000.000	12.928.280.000	1.178.280.000
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	10.765.000.000	11.505.120.000	740.120.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	10.700.000.000	11.662.210.000	962.210.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	10.645.000.000	11.662.210.000	1.017.210.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	10.295.000.000	11.194.580.000	899.580.000
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahun 2017	10.000.000.000	10.544.860.000	544.860.000
Obligasi I Kereta Api Tahun 2017 Seri B	10.000.000.000	10.146.480.000	146.480.000
Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A	10.000.000.000	10.047.070.000	47.070.000
Obligasi Berkelanjutan II Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri C	10.000.000.000	10.403.980.000	403.980.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	9.837.210.000	10.583.320.000	746.110.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	9.620.000.000	9.754.350.000	134.350.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	9.600.000.000	9.754.350.000	154.350.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	9.600.000.000	9.754.350.000	154.350.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	9.500.000.000	9.740.970.000	240.970.000
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS005	9.240.000.000	9.907.722.000	667.722.000
Obligasi I BSD Tahap II Tahun 2013	9.000.000.000	9.067.032.000	67.032.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	8.465.386.545	8.952.430.388	487.043.843
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS004	8.000.000.000	8.509.520.000	509.520.000
Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011	5.880.000.000	6.063.348.000	183.348.000
Obligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	5.730.000.000	5.887.986.000	157.986.000
Obligasi I BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri B	5.000.000.000	5.021.115.000	21.115.000
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS004	4.948.905.000	5.267.392.880	318.487.880
Obligasi Negara Republik Indonesia PBS012	4.316.420.255	4.598.596.464	282.176.209
Obligasi I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	4.000.000.000	3.925.324.000	(74.676.000)
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	3.960.000.000	4.029.792.000	69.792.000
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai			
Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D	3.924.000.000	4.037.896.000	113.896.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	2.491.484.274	2.796.880.500	305.396.226
Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B	2.040.000.000	1.976.286.000	(63.714.000)
Tahap II Tahun 2013	2.010.000.000	2.014.896.000	4.896.000
Jumlah Obligasi / *Total Bonds*	**1.117.931.954.524**	**1.162.733.446.846**	**44.801.492.322**

20. EKUITAS (Lanjutan) / ***20. EQUITY (Continued)***

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan) / ***c. Other Components of Equity (Continued)***

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (Lanjutan) / ***Financial Instruments - Available for Sale (Continued)***

Per 31 Desember 2017 / *As of December 31, 2017*

Produk Investasi / *Investment Product*	Harga Perolehan / *Cost*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Kenaikan (Penurunan) / *Increase*
Saham / Share			
PT Dua Putra Utama Makmur, Tbk	89.999.965.000	45.490.891.400	(44.509.073.600)
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	64.420.000.000	51.213.900.000	(13.206.100.000)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	19.344.379.310	11.385.000.000	(7.959.379.310)
PT Wijaya Karya Gedung Tbk	14.529.000.000	13.026.000.000	(1.503.000.000)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	14.000.150.000	14.208.000.000	207.850.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	10.973.000.000	8.800.000.000	(2.173.000.000)
PT Waskita Beton Precast Tbk	10.302.774.300	8.526.000.000	(1.776.774.300)
PT PP Presisi Tbk	9.999.994.000	9.441.854.800	(558.139.200)
PP (Persero) Tbk	8.395.489.119	6.457.776.000	(1.937.713.119)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.921.120.125	7.050.000.000	(871.120.125)
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	7.123.295.147	7.011.250.000	(112.045.147)
PT Pakuwon Jati Tbk	6.228.039.450	6.460.000.000	231.960.550
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6.043.167.430	5.635.000.000	(408.167.430)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	5.215.842.342	2.408.100.000	(2.807.742.342)
PT Kalbe Farma Tbk	5.002.250.100	5.055.000.000	52.749.900
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	4.533.703.050	2.945.000.000	(1.588.703.050)
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.402.741.552	4.212.500.000	(190.241.552)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.500.250.000	3.492.500.000	(7.750.000)
PT PP London Sumatera Tbk	2.510.000.000	2.710.000.000	200.000.000
Jumlah Saham/ *Total Shares*	**294.445.160.925**	**215.528.772.200**	**(78.916.388.725)**
Efek Beragunan Aset / Security (Assets Underlying)			
Efek Beragunan Aset Mandiri Kelas A	25.000.000.000	25.309.075.000	309.075.000
Efek Bergunan Aset Danareksa IP PLN	8.629.798.807	8.706.362.382	76.563.575
Jumlah Efek Beragunan Aset / *Total Security (Assets Underlying)*	**33.629.798.807**	**34.015.437.382**	**385.638.575**
Jumlah Aset Tersedia Untuk Dijual / *Total Financial Instrument - Available for Sale*			**(78.262.380.788)**
Pengaruh Pajak Atas Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual / *Tax Effect on Financial Instuments - Available for Sale*			**20.197.940.953**
Cadangan Revaluasi Aset / *Asset Revaluation Reserve*			**289.434.424.383**
Pengaruh Pajak atas Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti / *Tax Effect on Restatement of Post Employee Benefit*			**(20.024.715.335)**
Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya / *Total Other Equity Component*			**211.345.269.213**

d. Analisis *Gearing Ratio* / ***d. Gearing Ratio Analysis***

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. 010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, *Gearing Ratio* adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dalam melakukan kegiatan Penjaminan.

In accordance with Regulation of the Minister of Finance Number 99/PMK.010/2011 on Amendments to the Minister of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 about the Company Corporate Credit Guarantee and Credit Re-Guarantee Company, Gearing Ratio is the limit set to measure the ability of the Guarantor in the Guarantee activities.

Gearing Ratio merupakan perbandingan antara total nilai outstanding Penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih Penjamin pada waktu tertentu. Modal sendiri bersih terdiri dari penempatan modal Pemerintah, cadangan-cadangan, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya dikurangi kerugian.

Gearing Ratio is the ratio between the total outstanding value of a self-assurance with a net worth of Guarantor at any given time. Net worth is total assets minus totalliabilities consist of the placement of government capital, reserves, retained earnings and other equity components of net losses.

Gearing Ratio Penjaminan untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi sepuluh kali dari ekuitas Perusahaan dan total *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi empat puluh kali dari ekuitas Perusahaan.

Gearing Ratio Guarantee for Productive Enterprises is set at a high of ten times the Company's equity and total gearing ratio is set at a high fourty times the equity of the Company.

Pada posisi 31 Desember 2018, Gearing Ratio Produktif Perum Jamkrindo adalah 10,03 kali, sedangkan total gearing ratio adalah sebesar 17,17 kali.

On December 31, 2018, the gearing ratio of Perum Jamkrindo was productive to 10.03 times, while the total gearing ratio is to 17.17 times.

Karena Gearing Ratio masih berada di bawah ketentuan maksimal yang diperkenankan, maka Perum Jamkrindo masih mempunyai kelonggaran kapasitas untuk melakukan penjaminan. Untuk penjaminan kredit produktif, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp112,581 triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari outstanding tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Because Gearing Ratio is still below the allowed maximum terms, the Perum Jamkrindo still have given the capacity to do the guarantee. To guarantee the productive credit, guarantee concessions amounted to Rp112.581 trillion without taking into account the repayment of outstanding current year, calculated as follows:

= (20,00 – 10,03) x Rp11,296 triliun = Rp112,581 triliun

20. EKUITAS (Lanjutan)

d. Analisis *Gearing Ratio (Lanjutan)*

Untuk penjaminan kredit secara total, kelonggaran penjaminan adalah sebesar Rp257,838 triliun tanpa memperhitungkan pelunasan dari outstanding tahun berjalan, dengan perhitungan sebagai berikut:

20. *EQUITY (Continued)*

d. *Gearing Ratio Analysis (Continued)*

For a total credit guarantee, the guarantee allowance amounted to Rp257.838 trillion without taking into account the repayment of outstanding current year, calculated as follows:

= (40,00 – 17,17) x Rp11,296 triliun = Rp257,838 triliun

21. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Bagian yang menjadi hak (beban) pengaruh non-pengendali atas laba Entitas Anak adalah sebagai berikut:

21. *NON-CONTROLLING INTEREST*

The rights part (expense) non-controlling influence on subsidiaries profit are as follows:

31 Desember 2018 / December 31, 2018
Laporan Posisi Keuangan / *Statements of Financial Position*

Entitas Anak / *Subsidiaries*	%	Aset Bersih/ *Net Assets*	Kepentingan *Non*-Pengendali *Non-Controlling Interest*
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,004%	340.493.329.470	14.739.015

31 Desember 2018 / December 31, 2018
Laba yang Dapat Diatribusikan /*Net - Income Attributable*

Entitas Anak / *Subsidiaries*	%	Laba Bersih/ *Net Income*	Kepentingan Non Pengendali *Non-Controlling Interest*
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,004%	22.543.355.454	940.058

31 Desember 2017 / December 31, 2017
Laporan Posisi Keuangan / *Statements of Financial Position*

Entitas Anak / *Subsidiaries*	%	Aset Bersih/ *Net Assets*	Kepentingan *Non*-Pengendali *Non-Controlling Interest*
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	277.341.231.979	13.798.955

31 Desember 2017 / December 31, 2017
Laba yang Dapat Diatribusikan /*Net - Income Attributable*

Entitas Anak / *Subsidiaries*	%	Laba Bersih/ *Net Income*	Kepentingan Non Pengendali *Non-Controlling Interest*
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	0,005%	14.887.091.979	744.356

22. IMBAL JASA PENJAMINAN

22. *GUARANTEE FEE*

	2018	2017	
IJP Bruto:			***Gross Guarante Fee***
IJP Kredit Usaha Rakyat	744.683.722.116	1.359.768.223.454	*Guarantee Fee – KUR*
IJP Kredit Eksisting	897.218.013.588	676.284.350.645	*Guarantee Fee – Existing Credit*
Pendapatan Komisi Re-Asuransi	31.110.131.138	27.223.787.525	*Re-insurance Commission*
Pendapatan Komisi Co-Guarantee	5.313.410.206	-	*Co-Guarantee Commission*
Jumlah IJP Bruto	**1.678.325.277.048**	**2.063.276.361.624**	***Total Gross Guarantee Fee***
Premi *Co-Guarantee*	(116.764.808.819)	(96.471.972.027)	*Co-Guarantee Premium*
Premi Re-Asuransi	(215.349.131.741)	(154.312.552.154)	*Re-Insurance Premium*
Restitusi IJP	(5.003.118.459)	(6.805.472.327)	*Guarantee Restitution*
Jumlah IJP Bersih	**1.341.208.218.029**	**1.805.686.365.116**	***Total Net Guarantee Fee***

Pendapatan Imbal Jasa penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, plafond kredit dan jangka waktu kredit.

Guarantee Fee (IJP) is the premium received by the company in order to secure credit activities. The amount of IJP is measure from IJP rate, credit limit, and credit period.

Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan. IJP kredit umum dibayar sekaligus di

For existing credits, the amount of IJP rate is determined by considering such as: product of guarantee, guarantee risk, and guarantee period. IJP of general credit is paid in advance.

22. IMBAL JASA PENJAMINAN (Lanjutan) / *22. GUARANTEE FEE (Continued)*

Tarif IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2014 tanggal 2 November 2010. IJP KUR dibayarkan per tahun oleh pemerintah dengan periode penagihan pada bulan Mei dan November.

Rates of KUR Guarantee Fee is regualated in Minister of Finance Regulation Number 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning KUR Guarantee facility and Ministry of Finance Regulation No.190/PMK.05/2014 dated November 2, 2010. IJP KUR paid once a year by the government with billing period in May and November.

Pendapatan komisi re-asuransi merupakan komisi yang diterima dari mitra re-asuransi dengan prosentase tertentu dari jumlah premi yang dibayar ke mitra re-asuransi.

Re-insurance commission income is earned commission from re-insurance partner with a certain percentage of the amount of the premium paid to re-insurance partners.

Premi *Co-Guarantee* merupakan premi yang dibebankan kepada terjamin atas kepesertaan asuransi jiwa kredit/ pembiayaan untuk dibayarkan kepada mitra *Co-Guarantee* melalui Penerima Jaminan (bank/ *non bank*).

Co-guarantee premium is premium charged to guaranteed about their participation in credit life insurance/ financing to be paid to co-guarantee partners through The Insured (bank/ non-bank).

Besaran premi *Co-Guarantee* yang menjadi hak mitra *Co-Guarantee* s/d 31 Januari 2013 adalah 60% dan mulai 01 Pebruari 2013 adalah sebesar 54% dari Imbal Jasa Penjaminan yang ditetapkan dalam Sertifikat Penjaminan (SP) yang di dalamnya sudah termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya yang terkait dengan Perjanjian Khusus atau yang disetarakan dengan itu. Dengan adanya addendum PKS mitra co bulan Mei 2013, hak mitra co menjadi 38% tanpa dipotong biaya administrasi untuk penerbitan SP yang realisasi kreditnya mulai tanggal 01 Mei 2013. Kemudian dilakukan addendum lagi, hak mitra co menjadi 54% tanpa dipotong biaya administrasi untuk penerbitan SP yang realisasi kreditnya mulai tanggal 01 Januari 2014.

The amount of Co-Guarantee premium which are the right of co-guarantee partners until January 31, 2013 is at 60% and started February 1, 2013 the amount is at 54% from IJP specified in Guarantee Certificate (SP) include administrative costs and other expenses which related to special agreement or that equal. With the addendum of co-guarantee agreement on May, 2013, the rights of co partners become at 38% without reduced of administration costs for issuance of SP which the realization was began on May 1, 2013. Then on the next addendum, rights of co partners become at 54% without reduced of administration costs for the issuance of SP which the realization was began on January 1, 2014.

Premi re-asuransi merupakan premi yang dibayarkan guna mengalihkan risiko klaim ke mitra re-asuransi. Besaran premi re-asuransi yang menjadi hak mitra re-asuransi ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Re-insurance premium is the premium that paid to reduce the claim risk to re-insurance partner. The amount of the premium is determined based on the type of guarantee products.

23. BEBAN KLAIM / *23. CLAIM EXPENSE*

	2018	2017	
Beban Klaim Kredit Usaha Rakyat	670.156.941.870	549.812.308.644	*KUR's Claim Expenses*
Beban Klaim Kredit Eksisting	493.827.757.815	421.405.286.190	*Claim Expense - Exsisting Credit*
Jumlah Beban Klaim	**1.163.984.699.685**	**971.217.594.834**	***Total Claim Expenses***
Kenaikan Cadangan Klaim	31.048.400.761	22.614.674.140	*Increase in Claim Reserves*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang *Co-Guarantee*	42.325.198.501	10.777.367.505	*Impairment Losses- Co-Guarantee Receivable*
Jumlah Beban Klaim	**1.237.358.298.947**	**1.004.609.636.479**	***Total Claim Expenses***

Beban klaim adalah beban yang timbul sebagai akibat macetnya kredit akibat risiko yang ditanggung Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Jaminan terdiri dari hutang pokok, hutang bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh terjamin pada saat kredit jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang lagi atau sebelum kredit jatuh tempo sesuai kesepakatan yang ada.

Claim expenses are expenses incurred as a result of credit loss due to the risks covered by the company. The number of claims that can be paid by the company to the Recipient of Guarantee include of principal payable, interest payable and penalties that can not be met by the Guaranteed at the time of loan maturity and the credit can not be extended again or before the due credit according to existing

Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim merupakan selisih Cadangan Klaim tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Increase (Decrease) of Claim Reserves represent the difference of the current year with previous year.

24. PENDAPATAN INVESTASI / *24. INVESTMENT INCOME*

	2018	2017	
Bunga Deposito	379.487.634.635	345.519.197.963	*Time Deposit Interest*
Bunga Obligasi	166.591.664.788	150.642.568.373	*Bond Interest*
Pendapatan Reksadana	106.615.702.978	69.637.341.530	*Mutual Fund Income*
Laba Pelepasan Saham	23.737.664.977	34.285.580.131	*Capital Gain on Stock*
Dividen	6.855.259.004	1.985.616.083	*Dividend*
Efek Beragunan Aset	5.187.626.645	3.317.471.032	*Security (Assets Underlying)*
Jumlah Pendapatan Investasi	**688.475.553.027**	**605.387.775.111**	***Total Investment Income***
Beban Investasi	(4.367.140.309)	(3.753.769.028)	*Investment Expense*
Jumlah Beban Investasi	**(4.367.140.309)**	**(3.753.769.028)**	***Total Investment Expense***
Jumlah Pendapatan Investasi Bersih	**684.108.412.718**	**601.634.006.083**	***Total Investment Income - Net***

25. BEBAN USAHA / *25. OPERATING EXPENSES*

	2018	2017	
Beban Sumber Daya Manusia			***Human Resources Expenses***
Jasa Produksi	72.580.566.582	57.597.384.085	*Production Services*
Kesejahteraan	69.930.004.034	61.644.714.013	*Wealthfare*
Gaji	39.198.450.195	35.613.180.004	*Sallaries*
PPh. Pasal 21	27.118.407.218	23.803.972.737	*Income Tax Subsidy (art. 21)*
Tantiem	27.131.850.001	21.045.500.000	*Tantiem*
Tunjangan Hari Raya	23.332.983.546	18.076.516.713	*Special Day Subsidy*
Tunjangan Jabatan	19.253.447.818	20.763.348.482	*Officer Subsidy*
Pendidikan dan Pelatihan	19.244.903.668	13.551.409.477	*Education and Training*
Insentif	13.490.501.310	7.269.388.088	*Incentive*
Konsumsi	13.363.359.000	12.583.112.570	*Meal*
Premi Asuransi Pensiun	11.810.195.584	6.477.836.450	*Pension Insurance Premiums*
Asuransi Kesehatan	9.359.355.373	9.507.472.119	*Healthcare Insurance*
Beban Cuti	9.123.592.296	11.418.364.088	*Leave Expense*
Beban Estimasi Imbalan Pasca Kerja	8.627.620.432	12.217.612.422	*Employee Benefit Estimation Expenses*
Tunjangan Wilayah	6.923.556.921	6.553.644.450	*Area Benefits*
Tunjangan Perumahan	3.853.673.333	2.327.996.667	*Housing Subsidy*
Pakaian Kerja	3.102.844.080	640.221.000	*Uniform*
Iuran Jamsostek	1.686.571.203	1.560.607.341	*Social Security Premium*
Lembur	1.591.265.195	1.311.287.465	*Overtime*
Tunjangan Komunikasi	1.019.222.344	981.688.395	*Communication*
Tunjangan Transport	882.580.000	877.011.200	*Transportation Subsidy*
SDM Lainnya	547.504.150	-	*Human Resources Other*
Sub Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	**383.172.454.283**	**325.822.267.767**	***Sub Total Human Resources Expenses***

	2018	2017	
Beban Operasional			***Operating Expenses***
Fee Agen	65.285.840.504	58.757.209.307	*Fee Agent*
Beban Sewa	37.932.997.464	38.835.086.753	*Rent Expenses*
Beban Promosi	28.806.930.434	23.886.950.155	*Promotional Expenses*
Fee Based Income	27.212.045.867	22.110.438.422	*Fee Based Income*
Beban Eksploitasi	21.779.406.847	9.995.937.468	*Exploitation Expenses*
Beban Perjalanan Dinas	19.823.603.794	20.753.682.565	*Business Travel Expenses*
Beban Pemeliharaan Kendaraan	11.466.185.722	19.022.795.233	*Vehicle Meintenance Expenses*
Beban Hubungan Kelembagaan dan Pemasaran	13.949.457.990	18.037.794.304	*Institutional Relation and Marketing Expenses*
Beban Penagihan Subrogasi	5.039.258.691	10.514.914.174	*Subrogation Collection Expenses*
Beban Sosialisasi dan Rekonsiliasi	5.940.931.142	6.487.558.720	*Socialization and Reconciliation Expenses*
Beban *Collecting Data*	4.862.762.737	-	*Collecting Data Expense*
No Klaim Bonus	41.247.899	-	*No Claim Fee*
Beban PPH 21 Non Pegawai	9.257.468	-	*Tax Art. 21 Non Employees Expense*
Sub Jumlah Beban Operasional	**242.149.926.559**	**228.402.367.101**	***Sub Total Operating Expenses***
Beban Administrasi Kantor dan Umum			***General and Administrative Expenses***
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	25.532.053.445	29.313.207.601	*Vehicle Meintenance Expenses*
Beban Lain-lain	25.039.045.336	23.363.380.822	*Other Expenses*
Beban Penyusutan Aset Tetap	21.517.449.296	18.597.153.281	*Fixed Asset Depreciation Expenses*
Beban Komunikasi dan Energi	14.304.647.485	14.267.134.988	*Communication and Energy Expenses*
Beban Representasi	10.393.479.173	12.315.339.149	*Representation Expenses*
Beban PKBL	13.442.834.649	10.002.712.060	*PKBL Expense*
Beban Konsultasi	8.594.452.732	4.299.002.551	*Consultant Expenses*
Beban ATK	6.433.071.062	5.896.701.709	*Suplies Expenses*
Beban Pencetakan	5.699.099.629	6.123.626.284	*Printing Expenses*
Beban Rapat Kerja	3.631.351.938	4.460.660.754	*Business Meeting Expenses*
Beban Pemeriksaan	1.416.267.399	1.391.370.134	*Audit Expenses*
Beban Asosiasi	1.104.900.357	921.832.082	*Association Expenses*
Beban Bank	907.549.566	1.161.752.980	*Bank Expenses*
Beban Pajak-Pajak	657.992.990	597.480.471	*Tax Expenses*
Beban Zakat	279.731.119	-	*Association Expenses*
Beban Perijinan	11.494.872	180.806.904	*Registration Expenses*
Beban Amortisasi	-	46.729.953	*Amortization Expenses*
Sub Jumlah Beban Adm. Kantor & Umum	**138.965.421.049**	**132.938.891.723**	***Total General And Administrative Expenses***

25. BEBAN USAHA (Lanjutan) / *25. OPERATING EXPENSES (Continued)*

Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha			***Technology, System and Development Expense***
Beban Sistem dan Teknologi	22.338.890.278	17.332.814.074	*Technology and System Expenses*
Beban Pengembangan Usaha	3.997.555.793	3.672.741.629	*Development Expenses*
Beban ACIS	148.901.375	-	*Development Expenses*
Sub Jumlah Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha	**26.485.347.446**	**21.005.555.703**	***Sub Total Technology, System and Development Expense***
Jumlah Beban Usaha	**790.773.149.337**	**708.169.082.294**	***Total Operating Expenses***

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *26. OTHER INCOME*

Pendapatan lain-lain bersih merupakan pendapatan diluar usaha setelah dikurangi beban diluar usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Other income is income beside operating revenue and operating expense, are as follows:

	2018	2017	
Pendapatan Lain-Lain			***Other Income***
Pendapatan Subrogasi	461.124.570.157	285.834.472.729	*Subrogation Income*
Pendapatan Lainnya	24.179.047.389	21.887.077.410	*Others*
Pendapatan Subrogasi Lainnya	15.674.135.952	11.033.192.436	*Other Subrogation Income*
Pendapatan Jasa Giro	5.204.189.340	5.890.101.587	*Interest Income*
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan	4.766.904.841	3.815.125.966	*Administration Guarantee Income*
Pendapatan Administrasi BUM	149.768.065	219.078.317	*BUM Administration Income*
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	**511.098.615.744**	**328.679.048.443**	**Total Other Income**

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

In its bussiness activities, the company perform certain transactions with related parties, management believes that transaction with related parties performed with the same condition with third parties, which include:

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Sifat dari Transaksi / *Nature from The Transaction*
Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan / *The Government of Republic Indonesia through the Ministry of Finance*	Pemegang Saham / *Controlling Shareholder*	Piutang IJP KUR/ *IJP KUR Receivables* ; Pendapatan IJP KUR / *IJP KUR Revenue*
Dewan Pengawas dan Direksi / *Supervisory Council Members*	Manajemen Kunci / *Key Management*	Gaji dan Tunjangan Dewas / *Salaries and Allowances*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
PT Bank Syariah Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
PT Bank Negara Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	Giro, deposito, efek-efek/ *Bank Account, Deposit, Securities*
PT Reasuransi Internasional Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
Perum Pegadaian (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
Perum Perumahan Nasional (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

27. *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)*

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / *Nature of Relationship*	Sifat dari Transaksi / *Nature from The Transaction*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Angkasa Pura II (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Hutama Karya (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Danareksa (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Semen Gresik (Persero Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah/ *Related with The Government*	efek-efek/ *Securities*

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Tahun 2008, berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM-K, Perusahaan melaksanakan penjaminan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk merealisasikan program KUR tersebut, Pemerintah telah menambah modal Perusahaan sebesar Rp600 milyar tahun 2007, Rp250 milyar tahun 2009, Rp900 milyar tahun 2010, Rp1,2 trilyun tahun 2011, Rp1,169 milyar tahun 2012, Rp1,12 triliun tahun 2013, Rp1,3 triliun tahun 2014, Rp500 miliar tahun 2015, dan Rp500 miliar tahun 2016. Imbal Jasa Penjaminan (IJP)/Imbal Jasa Kafalah (IJK) atas KUR tersebut ditanggung oleh pemerintah dan dibayar per tahun. Untuk Sertifikat Penjaminan (SP) yang terbit sebelum 14 Februari 2010 dicatat sebesar Rp 1,5% x 70% dari plafon kredit sedangkan untuk Sertifikat Penjaminan (SP) setelah 14 Februari 2010 dicatat dengan menggunakan tarif 3,25% dengan coverage 70%-80%.

28. GUARANTING ON KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

In 2008, based on President Instruction No. 6 year 2007 dated Juni 8, 2007 concerning Real Sector Acceleration and Strenghtening of UMKM-K Policy, Company provide guarantee to citizen business loan (KUR). To realize the program, in the end of 2009 and 2007 Govermnet have make addition of company capital amounted to Rp600 billion, Rp250 billion in 2009, Rp900 billion in 2010, Rp1,2 trillion in 2011, Rp1,169 billion in 2012, Rp1,12 trillion in 2013, Rp1,3 trillion in 2014, Rp500 billion in 2015, and Rp500 billion in 2016. Guarantee Fee/Kafalah Fee of KUR is borne by the government and paid per year, for the Certificate of Guarantee (SP), which appeared prior to February 14, 2010 recorded at Rp 1.5% x 70% of the credit limit while for Certificate of Assurance (SP) after February 14, 2010 recorded a marginal 3.25% to 70% -80% coverage.

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Lanjutan)

Pelaksanaan KUR Gen 2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menko Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR lalu diaddendum yang kedua melalui Peraturan Menko Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dan semua Peraturan diganti dengan Peraturan Menko Nomor 11 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Tahun 2015 kebijakan atas besaran IJP KUR Ritel dan Mikro adalah sebesar 1,5% ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyalur KUR dengan Penjamin KUR. Tahun 2017 berdasarkan keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-46/D.I.M.EKON/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang kebijakan KUR tahun 2017 adanya perubahan besaran IJP KUR Mikro dari 1,5% menjadi 1,75% sesuai kesepakatan antara Penyalur KUR dengan Penjamin KUR. Segmentasi operasional penjaminan KUR sebagai berikut:

28. GUARANTING ON KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Continued)

The KUR Gen 2 implementation was carried out based on the Coordinating Minister's Regulation No. 8 of 2015 concerning the KUR Implementation Guidelines which was then adjourned the second through the Coordinating Minister's Regulation No. 9 of 2016 concerning the KUR Implementation Guidelines and all Regulations related to Coordinating Minister Regulation No. 11 concerning the KUR Implementation Guidelines. In 2015 a policy of 1.5% Retail and Micro IJP KUR was determined based on an agreement between KUR Distributors and KUR Guarantor. In 2017 based on the decision of the Coordinating Ministry for Economic Affairs Number S-46 / DIMEKON / 2/2017 dated February 22, 2017 regarding KUR policy in 2017 regarding changes in the amount of Micro IJP KUR from 1.5% to 1.75% in accordance with the agreement between KUR Distributors and KUR guarantor. KUR guarantee operational segmentation as follows:

a. Laporan Posisi Dana / **a. *Fund Position Report***

	2018	2017	
Giro	73.815.446.310	145.762.490.737	*Current Accounts*
Deposito	4.310.734.000.000	4.045.035.000.000	*Time Deposit*
Obligasi	1.235.207.099.011	1.910.752.408.664	*Bonds*
Saham	288.623.686.400	215.528.772.200	Shares
Reksa dana	804.831.006.033	1.607.656.576.532	*Mutual Fund*
Efek Beragun Aset (EBA)	35.586.642.010	63.723.188.457	*Security (Asset Underlying)*
Sub Jumlah	**6.748.797.879.764**	**7.988.458.436.590**	***Sub Total***
Keuntungan Belum Direalisasi Atas Efek Tersedia Untuk Dijual	202.959.133.453	57.830.808.868	*Unralized Gain of Marketable Securities - Avalaible for Sale*
Jumlah	**6.951.757.013.217**	**8.046.289.245.458**	***Total***

b. Laporan Laba Rugi / **b. *Income Statement***

2018	**KONSOLIDASI**	**KUR**	***2018***
PENDAPATAN OPERASIONAL			***OPERATING REVENUE***
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	1.641.901.735.705	744.683.722.116	*Gross Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi Re-Asuransi	36.423.541.343	-	*Re Insurance Comission Fee*
Premi *Co-Guarantee*	(116.764.808.819)	-	*Co-Guarantee Premium*
Premi Re-Asuransi	(215.349.131.741)	-	*Re-Insurance Premium*
Restitusi IJP	(5.003.118.459)	-	*Guarantee Restitution*
Imbal Jasa Penjaminan Bersih	**1.341.208.218.029**	**744.683.722.116**	***Net Guarante Revenues***
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	(1.163.984.699.685)	(670.156.941.870)	*Claim Expenses*
Kenaikan Cadangan Klaim	(31.048.400.761)	(43.280.225.747)	*Increase in Reserve Claim*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(42.325.198.501)	(31.886.021.117)	*Impairment Losses on Receivable*
Jumlah Beban Klaim	**(1.237.358.298.947)**	**(745.323.188.734)**	***Total Claim Expenses***
PENJAMINAN BERSIH	**103.849.919.082**	**(639.466.618)**	***GUARANTEE FEE NET***
Pendapatan Investasi Bersih	**684.108.412.718**	**587.008.406.529**	***Investment Income- Net***
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	**511.098.615.744**	**251.270.418.914**	***Other Income (Expenses)***
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	(242.149.926.554)	(106.440.127.974)	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	(383.172.454.283)	(277.459.930.964)	*Human Resoursce Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	(138.965.421.049)	(126.322.327.835)	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	(26.485.347.446)	(20.664.191.420)	*Technology, System, and Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha	**(790.773.149.332)**	**(530.886.578.193)**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**508.283.798.212**	**306.752.780.632**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Beban Pajak Kini	(117.273.861.679)	(89.654.693.972)	*Current Income Tax*
Manfaat Pajak Tangguhan	6.533.435.466	-	*Deferred Tax Benefit*
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**(110.740.426.213)**	**(89.654.693.972)**	***Total Income Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN	**397.543.371.999**	**217.098.086.660**	***CURRENT YEAR NET INCOME***
Pendapatan Komprehensif	(135.957.257.404)	(202.959.133.453)	*Comprehensive Income*
LABA KOMPREHENSIF	**261.586.114.595**	**14.138.953.207**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***

28. PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Lanjutan) / *28. GUARANTING ON KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (Continued)*

2017 / *2017*

	KONSOLIDASI	KUR	
PENDAPATAN OPERASIONAL			***OPERATING REVENUE***
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	2.036.052.574.099	1.359.768.223.453	*Gross Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi Re-Asuransi	27.223.787.525	-	*Re-Insurance Comission Fee*
Premi Co-Guarantee	(96.471.972.027)	-	*Co-Guarantee Premium*
Premi Re-Asuransi	(154.312.552.154)	-	*Re-Insurance Premium*
Restitusi IJP	(6.805.472.327)	-	*Guarantee Restitution*
Imbal Jasa Penjaminan Bersih	**1.805.686.365.116**	**1.359.768.223.453**	***Net Guarante Revenues***
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	(971.217.594.834)	(549.812.308.643)	*Claim Expenses*
Kenaikan Cadangan Klaim	(22.614.674.140)	(99.359.342.968)	*Increase in Reserve Claim*
Penyisihan Piutang IJP/KUR	(3.276.005.834)	(3.276.005.834)	*Allowance for Inpairment Losess*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(7.419.859.721)	-	*Impairment Losses on Receivable*
Provisi Kerugian Klaim	(81.501.950)	-	*Provision for Claim Losses Co-Guarantee*
Jumlah Beban Klaim	**(1.004.609.636.479)**	**(652.447.657.445)**	***Total Claim Expenses***
PENJAMINAN BERSIH	**801.076.728.637**	**707.320.566.008**	***GUARANTEE FEE NET***
Pendapatan Investasi Bersih	601.634.006.083	525.393.194.178	*Investment Income- Net*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	328.679.048.443	171.810.123.302	*Other Income (Expenses)*
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	(228.402.367.101)	(99.780.144.255)	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	(325.822.267.767)	(214.873.082.552)	*Human Resoursce Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	(132.938.891.723)	(104.034.724.747)	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	(21.005.555.703)	(14.845.770.784)	*Technology, System, and Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha	**(708.169.082.294)**	**(433.533.722.338)**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**1.023.220.700.869**	**970.990.161.150**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Beban Pajak Kini	247.360.565.250	225.961.078.977	*Current Income Tax*
Manfaat Pajak Tangguhan	(25.986.025.219)	-	*Deferred Tax Benefit*
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**221.374.540.031**	**225.961.078.977**	***Total Income Tax Expense***
LABA TAHUN BERJALAN	**801.846.160.838**	**745.029.082.173**	***CURRENT YEAR NET INCOME***
Pendapatan Komprehensif	57.830.808.868	54.667.700.367	*Comprehensive Income*
LABA KOMPREHENSIF	**859.676.969.706**	**799.696.782.541**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***

29. MANAJEMEN RESIKO / *29. RISK MANAGEMENT*

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Some significant relative risks in 2018 are as follows:

1. Risiko Penjaminan Kredit / *1. Risk Credit Guarantee*

Risiko Penjaminan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya Rasio Klaim dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

Guarantee Risk is a risk that arises as a result of guaranteed failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the magnitude of the Claim Ratio and the level of guaranteed NPL of credit, as well as the rate of return on subrogation accounts.

Pada posisi 31 Desember 2018, indikator-indikator pada risiko penjaminan mengalami kenaikan dan penurunan. Risiko Penjaminan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya Rasio Klaim dan tingkat NPL kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi.

At the position of December 31, 2018, indicators on guarantee risk experienced increases and decreases. Guarantee Risk is a risk that arises as a result of guaranteed failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the magnitude of the Claim Ratio and the level of guaranteed NPL of credit, as well as the rate of return on subrogation accounts.

Indikator pada risiko penjaminan kredit yang mengalami kenaikan adalah Rasio Klaim yaitu dari 47,70% pada tahun 2017, naik menjadi 70,89% pada 31 Desember 2018, Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi yaitu 117,42% pada 31 Desember 2018, yang sebelumnya sebesar 82,67%, dan *Recovery Rate* naik menjadi 8,31%, yang sebelumnya sebesar 5,89%. Sedangkan untuk indikator pada risiko penjaminan kredit yang mengalami penurunan adalah NPG. Untuk tingkat NPG mengalami penurunan sebesar 0,03% pada 31 Desember 2018, yang sebelumnya sebesar 0,04%, disebabkan tingginya *outstanding* kredit yang dijamin yang telah kol 3,4 dan 5.

The indicator for the risk of credit guarantee that has increased is the Claim Ratio, which is from 47.70% in 2017, up to 70.89% on December 31, 2018, the Subrogation Return Achievement Rate is 117.42% as of December 31, 2018, which was previously 82,67%, and the Recovery Rate to 8.31%, which was previously 5,89%. Whereas the indicator for credit guarantee risk that has decreased is NPG. The NPG rate decreased by 0.03% as at 31 December 2018, which was previously 0.04%, due to the high outstanding guaranteed loans which had collections 3,4 and 5.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

1. Risiko Penjaminan Kredit (Lanjutan)

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

1. Risk Credit Guarantee (Continued)

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Pertumbuhan/ *Growth*	*Description*
Rasio Klaim = (Beban Klaim)/(IJP)	971.217.594.834 / 2.036.052.574.099 = 47,70%	1.163.984.699.685 / 1.641.901.735.705 = 70,89%	23,19%	*Claim Ratio = (Cost of Claim) / (IJP)*
NPL = (*Outstanding* Kredit Kol 3+4+5)/(Total *Outstanding* Kredit)	71.497.231.459 / 169.909.821.557.704 = 0,04%	51.071.264.326 / 193.989.223.890.825 = 0,03%	-0,01%	*NPL = (Outstanding Credit Col. 3+4+5) / (Total Outstanding Credit)*
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi = (Realisasi Angsuran Subrogasi)/(Target Angsuran Subrogasi)	296.867.665.165 / 359.077.995.038 = 82,67%	476.798.706.109 / 406.065.000.000 = 117,42%	34,74%	*Return on Subrogation Achievement = (Realization of Subrogation Installment) / (Target of Subrogation Installment)*
Recovery Rate Piutang Subrogasi = (Angsuran Piutang Subrogasi)/(Saldo Piutang Subrogasi)	296.867.665.165 / 5.037.355.029.413 = 5,89%	476.798.706.109 / 5.713.507.830.553 = 8,35%	2,45%	*Recovery Rate of Subrogation Receivables = (Subrogation Receivables Installment)/(Total Subrogation Receivables)*

Untuk memitigasi risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan disarankan agar melakukan identifikasi risiko menggunakan 4P (*Prospect, Productivity, Payment, dan Personality*), 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of Economy*) dan/atau 3R (*Return, Repayment dan Risk Bearing Activity*). Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

To mitigate guarantee risk, the guarantee process is advised to identify risks using 4P (Prospect, Productivity, Payment, and Personality), 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral and Condition of Economy) and / or 3R (Return, Repayment and Risk Bearing Activity). The items that must be considered for each aspect are adjusted to the characteristics to be guaranteed, and are described in the related guarantee systems and procedures.

Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan / atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem scoring. Berdasarkan score ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing Terjamin atau sekelompok Terjamin, atau suatu produk baru.

The results of the risk identification process and then followed with the establishment of guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In the implementation, risk prediction can be done qualitatively and / or quantitatively to every aspect of the 4P. Quantitative predictions made by the scoring system. Based on score, determined risk prediction of each Guaranteed or a group of Guaranteed, or a new product.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prudent. Kewenangan memutuskan penjaminan dalam rapat komite penjaminan mengacu Peraturan Direksi tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan Perum Jamkrindo yang berlaku. Dengan mekanisme pengambilan keputusan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisir.

Furthermore, to make a decision whether or not a guarantee proposal can be approved or not, it will be conducted in a committee meeting by prioritizing the principle of prudence and prudence. The authority to decide on guarantees in the guarantee committee meeting refers to the Directors' Regulations concerning the Guidelines for Delegating Administrative Authority and the applicable Perum Jamkrindo Policy. With the mechanism of decision making, it is expected that decisions will become more objective and potential risks because the decision-making errors can be minimized.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko dalam rapat komite juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka monitoring dan evaluasi terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

In addition to being used to assist the process of making guarantee decisions, the results of risk analysis in committee meetings are also used as one of the basic considerations in monitoring ongoing credit. For high-risk loans, credit monitoring and evaluation is carried out more intensively.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

1. Risiko Penjaminan Kredit (Lanjutan)

Disamping upaya mitigasi tersebut, Perusahaan juga dapat melakukan beberapa mitigasi risiko lainnya yaitu:

- Dalam penjaminan langsung dan penjaminan secara Case By Case (CBC) dilakukan verifikasi data calon Terjamin melalui aplikasi KTP El dengan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil atau lembaga terkait dan checking data Calon Terjamin melalui Pefindo Biro Kredit atau lembaga sejenis
- Memegang prinsip kehati-hatian dan melakukan analisa yang prudent pada proses penjaminan kredit
- Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama dengan menambahkan klausul yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
- Menambah produk yang dipasarkan oleh Perusahaan sesuai dengan tren yang sedang berkembang.
- Melakukan penjajakan penyebaran risiko dengan bekerjasama dengan perusahaan re-asuransi dan co guarantee.
- Memanfaatkan jasa agen yang dapat membantu menyeleksi calon Terjamin untuk Penjaminan Kredit non KUR.
- Melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Program KUR untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.
- Melakukan update kebijakan dan peraturan yang berlaku untuk produk KUR.
- Melakukan pembatasan volume penjaminan untuk produk yang
- Melakukan update data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan
- Bekerjasama dengan mitra dalam mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.
- Melakukan rekonsiliasi dengan mitra kerja untuk meminimalisir kesalahan dalam data misalnya IJP, klaim, dan subrogasi.
- Melakukan evaluasi atas kerjasama secara keseluruhan (perusahaan Penerima Jaminan, Produk, dll) apabila akan
- Mengetahui penyebab klaim dari setiap Terjamin, sehingga dapat diidentifikasi alternatif-alternatif pengamanan sebagai bagian dari

2. Risiko *Co-Guarantee*

Co Guarantee merupakan kerjasama antara Perusahaan Penjaminan dengan Perusahaan Asuransi Jiwa, dalam bentuk Penutupan Asuransi Jiwa Kredit. Dalam kerjasama dengan mitra Co Guarantee terdapat risiko yaitu risiko tidak tertagihnya piutang Co Guarantee.

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

1. Risk Credit Guarantee (Continued)

Besides these mitigation efforts, the Company can also do a number of other risk mitigations, there are:

- *direct guarantee and guarantee by Case By Case (CBC) verification of prospective data is guaranteed through the application of El KTP in collaboration with the Director General of Civil Engineering or related institutions and checking data Guaranteed Candidates through the Credit Office Credit Bureau*
- *Hold the principle of prudence and conduct prudent analysis on the credit guarantee process*
- *Renew cooperation agreements by adding clauses that can be used to minimize risk.*
- *Add products that are marketed by the Company in accordance with emerging trends.*
- *Exploring risk spread by collaborating with reinsurance companies and co guarantee.*
- *Utilizing the services of agents who can help select guaranteed candidates for non KUR Credit Guarantees.*
- *Coordinate with the Policy Committee regarding the implementation of the KUR Program to anticipate possible problems.*
- *Update the policies and regulations that apply to KUR products.*
- *Restricting the guarantee volume for high-risk products.*
- *Updating data on subrogation receivables including collateral as one of the considerations in making efforts to collect subrogation receivables so that these efforts can be carried out*
- *Cooperate with partners in optimizing billing of subrogation receivables.*
- *Reconcile with partners to minimize errors in data such as IJP, claims, and subrogation.*
- *Evaluate the overall collaboration (Guarantee Receiver company, Products, etc.) if you will extend the cooperation with*
- *Knowing the causes of claims from each Guaranteed, so that security alternatives can be identified as part of risk mitigation*

2. Co-Guarantee Risk

Co Guarantee is a collaboration between the Guarantee Company and the Life Insurance Company, in the form of Credit Life Insurance Closure. In cooperation with Co Guarantee partners there are risks, namely the risk of uncollectible Co Guarantee receivables.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

2. Risiko *Co-Guarantee (Lanjutan)*

Pada posisi 31 Desember 2018, co-guarantee dilakukan dengan 5 (lima) perusahaan asuransi, yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT Al Amin), PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM), PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), PT Central Asia Raya (PT CAR), PT Asuransi Bringin Sejahtera (PT BRINS), PT Heksa Solution Insurance (PT Heksa), dan PT Jamkrindo Syariah (PT Jamsyar). *Performance* mitra co-guarantee Perum Jamkrindo tersebut adalah sebagai berikut :

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

2. Co-Guarantee Risk (Continued)

As of December 31, 2018, there are co-guarantee cooperation with five (5) insurance companies, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin (PT Al Amin), PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM), PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya), PT Central Asia Raya (PT CAR), PT Asuransi Bringin Sejahtera (PT BRINS), PT Heksa Solution Insurance (PT Heksa), and PT Jamkrindo Syariah (PT Jamsyar). Performance of co-guarantee partners are as follow:

Mitra *Co-Guarantee* / *Co-Guarantee Partner*	**Saldo Piutang *Co-Guarantee* / *Co-Guarantee Receivables* (dalam jutaan/ *in million*)**	**Rata-rata Pengajuan Klaim *Co-Guarantee* per Bulan/ *Average Co-Guarantee Claims per Month* (dalam jutaan/ *in million*)**	**Perbandingan Saldo Piutang terhadap 3 bulan Rata-rata Pengajuan/ *Comparative Balance receivable on average 3 months Submissions* (%)**
PT Heksa Solution Insurance	61.295.762.206	749.560.864	2726%
PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	6.076.092.738	8.162.538.839	25%
PT Asuransi Syariah Mubarakah	72.946.359.893	-	0%
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	11.626.252.068	1.748.705.262	222%
PT Asuransi Beringin Sejahtera	39.463.840.109	1.132.512.067	1162%
PT Central Asia Raya	25.127.520	421.619	1987%

Untuk meminimalkan risiko *co-guarantee*, perusahaan melakukan mitigasi dengan:
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif terhadap perkembangan kerjasama dengan Perusahaan mitra Co Guarantee termasuk kondisi bisnis dan keuangan Perusahaan mitra Co Guarantee.
- Melakukan kegiatan rekonsiliasi dan penagihan atas piutang Co Guarantee secara terus menerus.
- Melakukan penyempurnaan dalam perjanjian kerjasama dengan menambahkan klausul-klausul untuk meminimalkan risiko.

To minimize the risk of co-guarantee, the company do the mitigation with:
- *Conducting more intensive monitoring and evaluation of the development of cooperation with Co Guarantee partner companies includes the business and financial conditions of the Co Guarantee partner company.*
- *Do reconciliation and collection activities on Co Guarantee receivables continuously.*
- *Make improvements in cooperation agreements by adding clauses to minimize risk.*

3. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dapat tercermin dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah

Sesuai dengan POJK No. 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelanggaraan Lembaga Usaha Penjamin, rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan cash flow to debt ratio yaitu perbandingan antara kas dan setara kas dengan total liabilitas dikurangi pendapatan ditangguhkan.

3. *Financial Risk*

Financial risk can be reflected in the liquidity risk of a company. Liquidity risk is a risk that is caused, among other things, by a company unable to fulfill obligations that have fallen due.

Based on POJK No. 2 / POJK.05 / 2017 dated January 11, 2017 concerning the Execution of Guarantor Business Institutions, the guarantor's liquidity ratio is set at a minimum of 120% (one hundred twenty per hundred). The Liquidity Ratio is calculated using a cash flow to debt ratio, namely the ratio between cash and cash equivalents with total liabilities minus deferred income.

Uraian	**2017 (Rp)**	**2018 (Rp)**	**Pertumbuhan/ *Growth***	***Description***
Risiko Likuiditas = (kas dan setara kas) / (total liabiliats - pendapatan ditangguhkan)	5.417.928.558.090 / 915.669.958.513 = 591,69%	6.190.307.278.263 / 1.089.778.315.808 = 568,03%	-23,66%	*Likuidity risk = (Cash and Cash Equivalent) / (Liability Defferedincome)*

Risiko likuiditas perusahaan pada posisi 31 Desember 2018 sejumlah 568,03% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 591,69%. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan ditangguhkan Perusahaan ± sebesar Rp 1,271 Trilliun, tetapi kenaikan tersebut beiringan dengan kenaikan liabilitas Perusahaan ± sebesar Rp 1,445 Trilliun serta kas dan setara kas sebesar 772 Miliar. Namun, berdasarkan indikator di atas, risiko likuiditas Perum Jamkrindo masih di atas ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK No. 2/POJK.05/2017.

The company's liquidity risk as of December 31, 2018 was 568.03%, a decrease compared to 2017 which amounted to 591.69%. This was influenced by the increase in the Company's deferred income ± Rp. 1,271 trillion, but the increase was in line with the increase in the Company's liabilities ± Rp. 1,445 trillion and cash and cash equivalents of 772 billion. However, based on the above indicators, Perum Jamkrindo's liquidity risk is still above the conditions required in POJK No. 2 / POJK.05 / 2017.

29. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) penjaminan Perum Jamkrindo, yang dapat mengurangi pasar penjaminan (merugikan) Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunnya return dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, trend kredit perbankan, regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

29. RISK MANAGEMENT (Continued)

4. Market Risk

Market risk is the risk arising from the movement of market variables (adverse movement) Perum Jamkrindo guarantee, which can be reduce guarantee market (adverse) of the company and the movement of financial market that may potentially decrease the return and investment value. Market variables in this case related to guarantee is the level of competition, bank credit trends, market regulation. Market risk related to investment are interest rates, inflation, and investment portfolio.

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Pertumbuhan/ *Growth*	*Description*
Pertumbuhan Penjaminan = ((Vol Penjaminan t-Vol Penjaminan t-1))/(Vol Penjaminan t-1)	22.791.143.593.114 / 125.968.092.619.258 = 18,09%	25.982.734.717.223 / 148.759.236.212.372 = 17,47%	-0,63%	*Growth Guarantee = ((Vol Guarantee t-Vol Guarantee t-1)) / (Vol Guarantee t-1)*
Pencapaian Target Penjaminan = (Realisasi Vol Penjaminan)/ (Target Vol Penjaminan)	148.759.236.212.372 / 145.998.073.803.131 = 101,89%	174.741.970.929.595 / 156.576.551.000.000 = 111,60%	9,71%	*Achievement of Guarantee Target = (Realization of Vol Guarantee)/ (Target of Vol Guarantee)*
Pencapaian Pendapatan Investasi = (Realisasi Pendapatan Investasi)/ (Target Pendapatan Investasi)	601.634.006.083 / 621.456.168.011 = 96,81%	684.108.412.718 / 672.132.361.740 = 101,78%	4,97%	*Achieving of Investment Income = (Realization of Investment Income)/ (Target of Investment Income)*

Dari indikator-indikator tersebut di atas, dapat dilihat pertumbuhan penjaminan pada posisi 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2017.

From the indicators mentioned above, it can be seen that the growth of guarantees at 31 December 2018 has decreased by 0.63% compared to the position on 31 December 2017.

Pencapaian target penjaminan yang telah dicapai oleh Perusahaan adalah sebesar 111,60%. Sedangkan pencapaian realisasi pendapatan investasi telah mencapai sebesar 101,78% dari target yang telah ditetapkan.

The achievement of the target achieved of guarantee by the Company was 111.60%. While the achievement of realization of investment income has reached 101.78% of the set target.

Untuk meminimalkan risiko investasi berupa deposito, hal-hal yang dilakukan perusahaan adalah:
- Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, dimana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik.
- Nominal penempatan disesuaikan dengan ekuitas bank yang bersangkutan.
- Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan riviu apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga.

To minimize the risk of investment in the form of deposits, company do the things as follow:
- *Conduct elections for placement of bank deposits, where deposits are placed in banks that performed well.*
- *Nominal placement determined with the equity of relevant bank.*
- *Placement is done by a certain time period which possible to do a review if there is a change in interest rates.*

Analisis kelayakan reksa dana

- Penetapan batasan toleransi risiko kerugian maksimal yang dapat diterima Perusahaan apabila kondisi memburuk
- Melakukan pemantauan kinerja ekonomi makro dan industri domestik dan global secara rutin
- Menyusun strategi *cut loss* dalam mengelola investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan *exit policy* terhadap instrumen investasi pada mitra investasi yang terindikasi kesulitan likuiditas dan/atau indikasi lain yang berdampak pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Monitoring dan evaluasi rutin

Feasibility analysis of mutual funds

- *Determination of tolerance limits for the maximum risk of losses that can be received by the Company if conditions deteriorate*
- *Routinely monitor domestic and global macroeconomic and industrial performance*
- *Develop a cut loss strategy in managing investments in accordance with applicable regulations*
- *Conduct an exit policy on investment instruments in investment partners indicated by liquidity difficulties and / or other indications that affect the Company in accordance with applicable regulations*
- *Routine monitoring and evaluation*

30. REKENING ADMINISTRATIF / *30. ADMINISTRATIVE ACCOUNT*

Piutang Subrogasi / *Subrogation Receivables*

Piutang subrogasi merupakan tagihan kepada instansi/nasabah yang tidak dapat membayar kredit dan sudah dibayarkan klaimnya kepada bank oleh Perum Jamkrindo.

Subrogation receivables represent receivables from agencies / customers who can not pay the loan and the bank claims have been paid by the Corporation Jamkrindo.

	2018	2017	
Saldo Awal Tahun	5.026.321.836.977	4.351.971.907.308	*Beginning Balance of The Year*
Pembayaran Klaim Tahun Berjalan	1.163.984.699.685	971.217.594.834	*Claims Payments Current Year*
Pendapatan Subrogasi Tahun Berjalan	(476.798.706.109)	(296.867.665.165)	*Subrogation Revenue Current Year*
Saldo Akhir Tahun	**5.713.507.830.553**	**5.026.321.836.977**	***Ending Balance***

31. INFORMASI TAMBAHAN / *31. SUPPLEMENTARY INFORMATION*

Berdasarkan salinan keputusan dewan komisioner OJK Nomor KEP-61/NB.223/2017 tentang pemberian izin pembentukan unit usaha syariah perusahaan penjaminan kepada Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia.

Based on a copy of the decision of the OJK board of commissioners Number KEP-61 / NB.223 / 2017 regarding the licensing of the establishment of a sharia business unit of the guarantee company to the Indonesian Credit Guarantee General Company.

a. Dewas Pengawas Syariah / *Sharia Council*

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Nomor 123/Kep-Dir/X/2016 pada tanggal 14 Oktober 2016, tentang pengangkatan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the Credit Guarantee Company Directors General of Indonesia Number 123/Kep-Dir/X/2016 on October 14, 2016, on the adoption of the Sharia Supervisory Board is as follows:

Ketua	Prof. DR.H. Hasanuddin AF,MA	*Chairman*
Anggota	Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ,FIIS	*Member*

b. Kafalah Pembiayaan Syariah / *b. Kafalah Sharia Financing*

Produk penjaminan kredit syariah yang ditawarkan adalah kafalah pembiayaan syariah merupakan suatu kegiatan perlengkapan (accessoir bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah yang disalurkan oleh bank umum syariah maupun unit usaha syariah.

Sharia credit insurance products offered are kafalah sharia financing is an activity equipment (accessoir for a pattern of sharia financing extended by sharia banks and of sharia business units.

Dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara terjamin (makfuul'anhu) dengan penerima jaminan (makfuul'lahu). Namun demikian, karena kafalah pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia melalui penerbitan surat persetujuan prinsip kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan, seluruh kegiatan penjaminan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI.

Thus there must be contract / agreement between the secured financing receiver (makfuul'anhu) assurance (makfuul'lahu). Nevertheless, because kafalah serve as substitute collateral for financing the Public Company Credit Guarantee Indonesia through the issuance of a letter of approval kafalah principles could be the basis of an agreement signed financing, the entire sharia refers to underwriting activities DSN-MUI Fatwa.

c. Jenis-jenis Produk Penjaminan Syariah / *c. Types of Product Assurance Sharia*

- Kafalah Pembiayaan Umum / *Kafalah Public Financing*
- Kafalah Pembiayaan Multiguna / *Financing Kafalah Multipurpose*
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa / *Kafalah Construction Financing and Supplying of Goods / Services*
- Kafalah Pembiayaan Mikro / *Microfinance Kafalah*
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS / *Kafalah Financing To BPRS*
- Kafalah Pembiayaan Kontra Bank Garansi / *Kafalah Counter Financing Bank Guarantee*
- Fasilitias Likuidasi Pembiayaan Perumahan (FLPP) / *Financing Liquidation Facility Mortgage*
- Multifinance / Multifinance
- Penjaminan Ijarah Umrah / *Umrah Ijrah Guarantee*
- Penjaminan Mikro-Multiguna / *Micro-Multipurpose Guarantee*
- Penjaminan Langsung dan Tidak Langsung (LPDD-KUMKM) / *Direct and Indirect Guarantee (LPDB-KUMK)*
- Penjaminan Fintect Landing / *Fintech Landing Guarantee*
- Penjaminan Rahn Tasjily Tanah / *Rahn Tasjily of Land Guarantee*
- Penjaminan Arrum / *Arrum Guarantee*
- Penjaminan KPR Syariah / *Sharia KPR Guarantee*

31. INFORMASI TAMBAHAN (LANJUTAN) / *31. SUPPLEMENTARY INFORMATION (CONTINUED)*

d. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2018 dan 2017 / *d. Income Statement Sharia 2018 dand 2017*

	2018	2017	
PENDAPATAN PENJAMINAN			***GUARANTEE REVENUES***
Imbal Jasa Kafalah	43.975.721.663	47.253.048.216	*Gross Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi Re Asuransi	615.854.979	628.181.202	*Re Insurance Comission Fee*
Premi Co Guarantee	(22.265.496.160)	(16.617.906.584)	*Co Guarantee Premium*
Premi Re Asuransi	(2.177.496.208)	(940.848.716)	*Re Insurance Premium*
Imbal Jasa Kafalah Bersih	**20.148.584.274**	**30.322.474.118**	***Guarantee- Net***
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSE***
Beban Klaim	(11.024.714.451)	(10.879.935.523)	*Claim Expense*
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	2.918.999.971	3.715.999.761	*Increase (Decrease) In Reserve claim*
Jumlah Beban Klaim	**(8.105.714.480)**	**(7.163.935.762)**	*Total Claim Expenses*
PENJAMINAN BERSIH	**12.042.869.794**	**23.158.538.356**	***NET GUARANTEE INCOME***
Pendapatan Investasi Bersih	102.912.418	605.914.875	*Investment Income - Net*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	9.195.915.009	8.975.580.447	*Other Income (Expenses)*
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	(5.897.319.517)	(6.281.772.660)	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	(4.203.602.078)	(4.112.749.273)	*Human Resource Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	(1.908.036.686)	(1.932.386.226)	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	(336.793.145)	(269.794.984)	*Technology, System, and Development Expense*
Jumlah Beban Usaha	**(12.345.751.426)**	**(12.596.703.143)**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**8.995.945.795**	**20.143.330.535**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
Pajak Kini	(43.076.321)	210.483.055	*Current income tax*
Jumlah beban Pajak Penghasilan	**(43.076.321)**	**210.483.055**	*Total Current income tax*
LABA TAHUN BERJALAN	**8.952.869.474**	**19.932.847.480**	***CURRENT YEAR INCOME***

32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN / *32. SUBSEQUENT EVENT*

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perum Jamkrindo, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, dan PT Reasuransi Nasional Indonesia nomor 02/PKS/OP-02/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang penyelesaian Utang Piutang dan Pengalihan Portofolio Bisnis. Telah menyepakati bahwa piutang co-guarantee dari PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin kepada Perum Jamkrindo akan dialihkan kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp94.741.625.377.

Based on the agreement between Perum Jamkrindo, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, and PT Reasuransi Nasional Indonesia number 02 / PKS / OP-02/2019 dated January 25, 2019 concerning settlement of Debt and Transfer of Business Portfolio. It has been agreed that the co-guarantee receivables from PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin to the Perum Jamkrindo will be transferred to PT Indonesia National Reinsurance amounting to Rp94,741,625,377.

33. REKLASIFIKASI AKUN / *33. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT*

Beberapa akun dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2018 untuk tujuan perbandingan.

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2016 have been reclassified to the preparation of financial statements as December 31, 2018 for comparative purposes.

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		
	Sebelum Reklasifikasi/ ***Before Reclassification***	**Sesudah Reklasifikasi/** ***After Reclassification***	
Laporan Posisi Keuangan			***Statement of Financial Statement***
Aset Lancar			***Current Assets***
Kas Setara Kas			*Cash and Cash Equivalent*
Giro Pihak Berelasi	199.969.842.954	208.926.103.134	*Bank Account Related Parties*
Giro Pihak Ketiga	90.204.050.749	80.953.716.178	*Bank Account Third Parties*
Aset Lain-Lain	747.693.037.215	747.987.111.603	*Other Assets*
Cadangan-cadangan	2.471.937.444.484	-	*Reserves*
Saldo Laba			*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya	-	3.193.598.361.143	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaanya	-	397.320.981.986	*Unappropriated*
Komponen Ekuitas Lainnya	211.345.269.213	- 58.064.439.835	*Other Equity Component*

34. PERIKATAN PENTING

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.6/2015 berikut perubahannya, Perum Jamkrindo memiliki perikatan dengan beberapa Bank BUMN mengenai kegiatan penjaminan kredit.

Pada tahun 2018 terdapat perikatan antara Perum Jamkrindo dengan Bank BUMN sebagai berikut:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Retail No.64/Jamkrindo/OP-01/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada KUR mikro, KUR kecil, KUR Penempatan TKI, dan KUR khusus yang telah memperoleh kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jangka waktu suatu fasilitas KUR sesuai jatuh tempo perjanjian kredit.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat No.40/Jamkrindo/OP-01/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016. Addendum I yang menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah memperoleh kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jangka waktu perikatan selama 3 tahun yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat No.24/Jamkrindo/OP-01/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Perum Jamkrindo melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah memperoleh kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jangka waktu perikatan selama satu tahun yang berlaku sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019

34. SIGNIFICANT AGREEMENT

In accordance with Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 6/2015 and its amendments, Perum Jamkrindo had engagements with some of the state-owned bank credit for underwriting activities.

In 2018, there were engagements between Perum Jamkrindo with state-owned banks as follows:

1. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk concerning Micro and Retail Kredit Usaha Rakyat Guarantee No.64 / Jamkrindo / OP-01 / V / 2018 dated May 21, 2018 which explains that the Jamkrindo Corporation conducts credit guarantee activities to micro KUR, small KUR, KUR Placement of special TKI and KUR that have obtained credit from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The duration of a KUR facility according to the maturity of the credit agreement.*

2. *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk about the Kredit Usaha Rakyat Guarantee No. 40/Jamkrindo/OP-01/VI/2016 dated June 6, 2016. Addendum I certifying that Perum Jamkrindo activities guarantee the provision of credit to micro, small, medium and cooperatives have obtaining credit from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The term of engagement valid for 3 year from October 26, 2015 until October 26, 2018.*

3. *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk concerning Kredit Usaha Rakyat Guarantee No.24 / Jamkrindo / OP-01 / II / 2018 dated February 12, 2018 which explains that Perum Jamkrindo conducts credit guarantee activities to micro, small, medium and cooperative businesses. who has obtained credit from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. the tenure of one year is valid from 12 February 2018 to 31 December 2019*

35. PERSETUJUAN DIREKSI

Laporan keuangan ini telah mendapat persetujuan Direksi Perusahaan Umum Jaminan Kredit pada tanggal 8 Pebruari 2019. Manajemen Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap laporan keuangan ini.

35. MANAGEMENTS APPROVAL

The financial statement had been approved by the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia's Board of Directors dated February 8, 2019. Management of the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia is fully responsible for the financial statement.

36. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Perum Jaminan Kredit Indonesia menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) (halaman 82 – 88) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia (Entitas Induk) dan Entitas Anak.

36. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Perum Jaminan Kredit Indonesia published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of Perum Jaminan Kredit Indonesia (Parent Entity) which account for investments in Subsidiaries using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analyzed. The following supplementary financial information of Perum Jaminan Kredit Indonesia (Parent Entity) (pages 82 – 88) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of Perum Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiaries.

*****

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December* 31, 2018	**31 Desember/ *December* 31, 2017**	
ASET			***ASSETS***
Kas dan Setara Kas	5.810.797.957.421	5.146.634.280.666	*Cash and Cash Equivalents*
Surat Berharga	4.037.035.551.662	3.958.296.219.968	*Marketable Securities*
Piutang Imbal Jasa Penjaminan-Bersih	2.667.026.085.551	2.474.754.220.235	*Guarantee Receivables - Nett*
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih	237.673.119.013	117.687.546.960	*Reguarantee Receivables - Nett*
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	656.333.533	776.333.533	*Loans - Nett*
Piutang Lain-Lain	100.216.688.629	85.328.255.005	*Other Receivable*
Premi dan Fee Dibayar Dimuka	1.222.072.120.087	1.099.806.419.138	*Prepaid Premium and Fees*
Beban Dibayar Dimuka	25.904.802.900	19.224.188.773	*Prepaid Expenses*
Investasi pada Entitas Anak	299.987.500.000	249.987.500.000	*Investment on Subsidiary*
Aset tetap - Bersih	474.449.989.268	468.745.504.406	*Fixed assets - Nett*
Aset Pajak Tangguhan	227.004.348.743	176.106.704.111	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-lain	692.625.881.828	708.525.118.587	*Other Assets*
JUMLAH ASET	**15.795.450.378.633**	**14.505.872.291.382**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December* 31, 2018	**31 Desember/ *December* 31, 2017**	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang Klaim	84.743.520.220	75.743.401.429	*Claim Payable*
Utang Pajak	6.780.684.454	59.259.682.322	*Tax Payable*
Utang Penjaminan Ulang	175.809.173.612	111.989.430.246	*Co-Guarantee Payable*
Pendapatan Ditangguhkan	3.547.827.961.743	2.499.897.924.547	*Deferred Income*
Cadangan Klaim	445.106.938.407	423.860.529.004	*Claims Reserve*
Utang Lain-Lain	261.355.263.057	196.375.311.893	*Other Payable*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	18.652.571.829	38.742.499.399	*Employee Benefits Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**4.540.276.113.322**	**3.405.868.778.840**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			***Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity***
Penyertaan Modal Negara	7.638.733.365.160	7.638.733.365.160	*Government's Share Capital*
Saldo Laba			*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya	3.171.318.391.670	2.460.845.975.578	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	374.750.349.126	770.635.051.648	*Unappropriated*
Komponen Ekuitas Lainnya			*Other Equity Component*
Keuntungan (kerugian) Aset yang Tersedia untuk Dijual	(219.062.265.028)	(59.645.304.227)	*Gain (loss) Financial Assets Available For Sale*
Cadangan revaluasi aset	289.434.424.383	289.434.424.383	*Asset Revaluation Reserve*
JUMLAH EKUITAS	**11.255.174.265.311**	**11.100.003.512.542**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**15.795.450.378.633**	**14.505.872.291.382**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
PENDAPATAN PENJAMINAN			***GUARANTEE INCOME***
Imbalan Jasa Penjaminan	1.504.396.781.035	1.982.596.488.931	*Guarantee Fee*
Pendapatan Komisi	27.888.281.162	22.580.223.046	*Comission Fee*
Premi Co Guarantee	(129.479.608.255)	(106.531.755.041)	*Co Guarantee Premium*
Premi Re Asuransi	(147.924.532.634)	(124.465.791.507)	*Reinsurance Premium*
Restitusi IJP	(5.003.118.459)	(6.805.472.327)	*Guarantee Restitution*
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih	1.249.877.802.849	1.767.373.693.103	*Net Guarantee Revenues*
BEBAN KLAIM			***CLAIM EXPENSES***
Beban Klaim	(1.096.564.320.519)	(959.666.274.809)	*Claim Expenses*
Penurunan Cadangan Klaim	(22.747.119.588)	(24.641.306.629)	*Decrease in Reserve Claim*
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(42.325.198.501)	(10.777.367.505)	*Impairment Losses of Receivable*
Jumlah Beban Klaim	**(1.161.636.638.608)**	**(995.084.948.943)**	***Total Claim Expenses***
PENJAMINAN BERSIH	**88.241.164.241**	**772.288.744.160**	***OPERATING INCOME - NET***
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH	**659.526.675.443**	**578.966.420.744**	***INVESTMENT INCOME - NET***
PENDAPATAN LAIN-LAIN	**465.215.109.437**	**325.868.775.128**	***OTHERS INCOME***
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban Operasional	(216.922.953.272)	(215.942.017.735)	*Operating Expenses*
Beban Sumber Daya Manusia	(354.524.304.289)	(305.554.933.222)	*Human Resource Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	(132.624.271.146)	(128.330.281.187)	*General and Administrative Expenses*
Beban Sistem, Teknologi, dan Pengembangan Usaha	(25.514.632.204)	(19.978.762.144)	*System, Technology, and Operating Development Expenses*
Jumlah Beban Usaha	**(729.586.160.912)**	**(669.805.994.288)**	***Total Operating Expenses***
LABA SEBELUM PAJAK	**483.396.788.208**	**1.007.317.945.744**	***INCOME BEFORE TAX***
Pajak kini	(112.643.579.020)	(243.078.214.776)	*Current income tax*
Manfaat pajak tangguhan	4.246.807.353	26.417.185.125	*Deferred tax income*
Beban pajak penghasilan - bersih	**(108.396.771.666)**	**(216.661.029.651)**	***Total Income tax expenses - net***
LABA TAHUN BERJALAN	**375.000.016.542**	**790.656.916.093**	***CURRENT YEAR INCOME***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE)***
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi:			*Items That Will Not Be Reclassified To Profit And Loss*
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	25.952.598.619	(1.230.992.256)	*Remeasurement of Post Employment Benefit*
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Kembali Kewajiiban Imbalan Pasti	(6.180.401.591)	307.748.064	*Related Deffered Tax Restatement on Defined Benefits Obligation*
Pos-pos Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi Ketika Kondisi Tertentu Terpenuhi:			*Items That Will Be Reclassified To Profit and Loss Due to Certain Conditions:*
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual	(202.959.133.453)	79.035.547.704	*Gain (Loss) Financial Assets Available For Sale*
Pajak Tangguhan Terkait Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	53.138.986.934	(23.444.603.145)	*Related Deferred Tax Financial Instrument of Available For Sale*
Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	(130.047.949.490)	54.667.700.367	*Total Other Comprehensive Income (Expense)*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**244.952.067.052**	**845.324.616.460**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR***

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS PERIODS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(Expressed in Full Rupiah, unless otherwise stated)

		Saldo Laba/ *Retained Earning*		Pendapatan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensive Income*			
	Penyertaan Modal Pemerintah / *Government's Share Placement*	**Ditentukan Penggunaannya / *Appropriated***	**Belum Ditentukan penggunaannya / *Unappropriated *)***	**Keuntungan (kerugian) Aset yang Tersedia untuk Dijual / *Gain (loss) Financial Assets Available For Sale***	**Cadangan revaluasi aset / *Asset Revaluation Reserve***	**Jumlah Ekuitas / *Total Equity***	
Saldo 1 Januari 2017	**7.638.733.365.160**	**1.822.249.186.145**	**619.498.169.180**	**(127.865.653.661)**	**288.479.659.435**	**10.241.094.726.259**	***Balance as of January 1, 2017***
Pembagian Laba Tahun 2017:							*Distribution of 2017 profits :*
Cadangan Umum	-	590.596.789.432	(590.596.789.432)	-	-	-	*General Reserve*
Dividen	-	48.000.000.000	(48.000.000.000)	-	-	-	*Dividend*
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	*Other Equity Component*
Pelepasan Aset Keuangan yang						-	*Disposal of Financial Instruments*
Tersedia untuk Dijual	-	-	-	12.629.404.876	-	12.629.404.876	*Available for Sale*
Laba Tahun Berjalan	-	-	790.656.916.093	-	-	790.656.916.093	*Current Year Income*
Pendapatan Komprehensif Lainnya :						-	*Other Comprehensive Income:*
Aset Keuangan yang Tersedia						-	*Financial Instruments Available*
untuk Dijual	-	-	-	55.590.944.559	-	55.590.944.559	*for Sale*
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	954.764.948	954.764.948	*Fixed Assets Revaluation*
Imbalan Pasca Kerja	-	-	(923.244.192)	-	-	(923.244.192)	*Employee Benefit*
Saldo 31 Desember 2017	**7.638.733.365.160**	**2.460.845.975.577**	**770.635.051.649**	**(59.645.304.226)**	**289.434.424.383**	**11.100.003.512.543**	***Balance as of December 31, 2017***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak adalah sebesar (Rp20.021.864.444).

**) Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefits, net of tax amounting to (Rp20,021,864,444).*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan / *The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements*

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS PERIODS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(Expressed in Full Rupiah, unless otherwise stated)

		Saldo Laba/ *Retained Earning*		Pendapatan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensive Income*			
	Penyertaan Modal Pemerintah / *Government's Share Placement*	**Ditentukan Penggunaannya / *Appropriated***	**Belum Ditentukan penggunaannya / *Unappropriated *)***	**Keuntungan (kerugian) Aset yang Tersedia untuk Dijual / *Gain (loss) Financial Assets Available For Sale***	**Cadangan revaluasi aset/ *Asset Revaluation Reserve***	**Jumlah /*Total***	
Saldo 1 Januari 2018	**7.638.733.365.160**	**2.460.845.975.577**	**770.635.051.649**	**(59.645.304.226)**	**289.434.424.383**	**11.100.003.512.543**	***Balance as of January 1, 2018***
Penyertaan Modal Negara	-	-	-	-	-	-	*Government's Share Placement*
Penyertaan Saham di Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	*Subsidiary's Share Placement*
Reklasifikasi Laba Atas Aset Revaluasi	-	-	-	-	-	-	*Reclassification of Gain on Revaluation Asset*
Pembagian Laba Tahun 2017 :							*Distribution of 2017 profits :*
Cadangan Umum	-	710.472.416.093	(710.472.416.093)	-	-	-	*General Reserve*
Dividen	-	-	(80.184.500.000)	-	-	(80.184.500.000)	*Dividend*
Laba Tahun Berjalan	-	-	375.000.016.542	-	-	375.000.016.542	*Current Year Income*
Pelepasan Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	-	-	-	(9.596.814.283)	-	(9.596.814.283)	*Disposal of Financial Instruments Available for Sale*
Pendapatan Komprehensif Lainnya :							*Other Comprehensive Income :*
Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual	-	-	-	(149.820.146.519)	-	(149.820.146.519)	*Financial Instruments Available*
Imbalan Pasca Kerja	-	-	19.772.197.028	-	-	19.772.197.028	*Employee Benefit*
Saldo 31 Desember 2018	**7.638.733.365.160**	**3.171.318.391.670**	**374.750.349.126**	**(219.062.265.028)**	**289.434.424.383**	**11.255.174.265.311**	***Balance as of December 31, 2018***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak adalah sebesar (Rp249.667.416).

**) Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefits, net of tax amounting to (Rp249,667,416).*

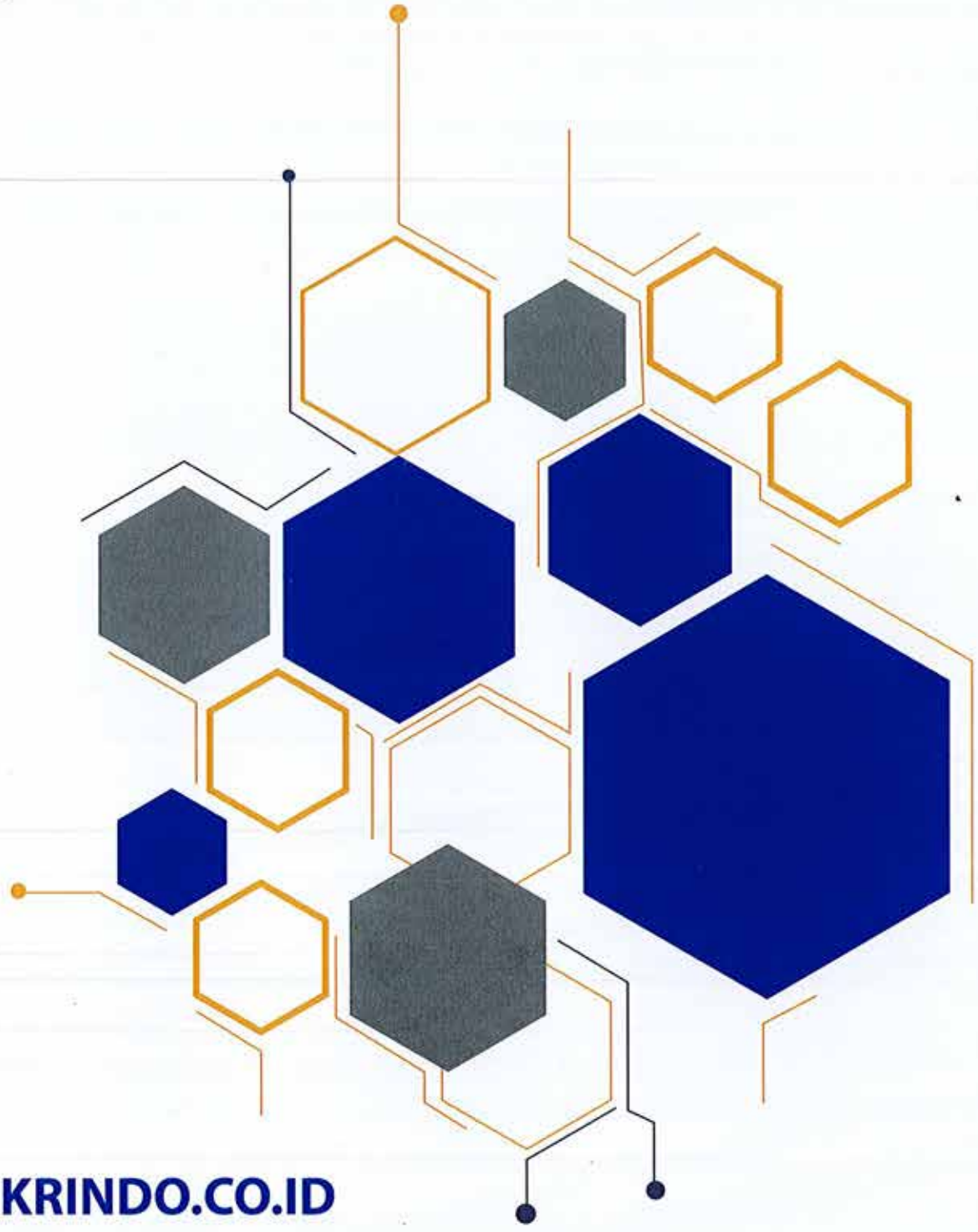
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan / *The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements*

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Imbalan Jasa Penjaminan	2.355.051.834.457	2.131.398.875.372	*Receipt from Guarantee Fee*
Pembayaraan Klaim dari Mitra Co Guarantee & Re Guarantee	(120.147.988.623)	(15.606.448.656)	*Payment to Co Guarantee and Re Guarantee Partners*
Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya	484.789.381.257	153.758.059.074	*Receipt from Other Operating Activities*
Pembayaran Imbalan Jasa Co Guarantee	(288.045.121.870)	(319.029.882.933)	*Payment of Fee Co Guarantee*
Pembayaran Klaim	(1.090.442.059.345)	(895.572.454.981)	*Payment of Claims*
Pembayaran Biaya	(310.081.905.458)	(629.895.938.711)	*Payment of Expenses*
Pembayaran Aktivitas Lainnya	(26.090.019.920)		*Payment of Other Activities*
Pembayaran kepada Karyawan	(371.960.451.791)		*Payment to Employee*
Pembayaran Pajak Penghasilan	(165.122.576.887)	(201.781.660.799)	*Payment of Income Tax*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**467.951.091.819**	**223.270.548.365**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES***
Penerimaan Hasil Investasi	366.009.555.718	502.838.322.443	*Receipt from Return of Investment*
Penerimaan Aktivitas Investasi Lainnya	120.000.000	9.924.305.869	*Receipt from Other Investment*
Penempatan Investasi yang Diperkenankan	(59.000.000.000)	(1.012.577.738.652)	*Placement of Allowed Investment*
Pembelian Aset Tetap	(26.379.886.797)	(46.735.600.387)	*Acquisition of Fixed Assets*
Pembayaran Aktivitas Investasi Lainnya	(4.352.583.986)	(3.788.126.029)	*Payment of Other Investment Activities*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**276.397.084.935**	**(550.338.836.755)**	***Net cash used in investment activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari setoran modal	-	50.000.000.000	*Receipt from Paid-up Capital*
Dividen	(80.184.500.000)	(48.000.068.107)	*Dividend*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(80.184.500.000)**	**1.999.931.893**	***Net cash provided from financing activities***
(Penurunan) kenaikan kas dan Setara kas	664.163.676.754	(325.068.356.497)	***(Decreased) increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	5.146.634.280.666	5.471.702.637.163	***Cash and equivalents at the beginning of year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**5.810.797.957.420**	**5.146.634.280.666**	***Cash and equivalents at the end of year***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements



WWW.JAMKRINDO.CO.ID

2018 Laporan Tahunan
Annual Report

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

PERUM JAMKRINDO
Jl. Angkasa B-9 Kavling 6 Kota Baru Bandar Kemayoran
(021) 6540335
(021) 6540335
info@jamkrindo.co.id
www.jamkrindo.co.id

scan me for digital report